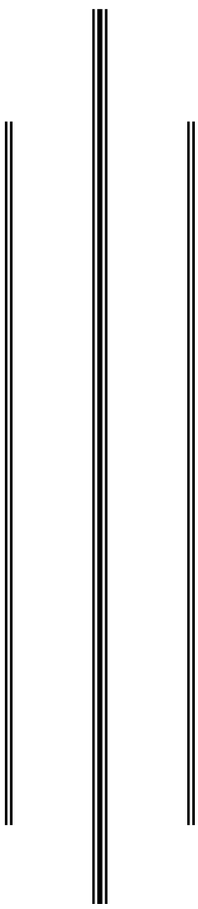
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI BALI

2023



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
(2) RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah.

Pasal 3

Susunan dan sistematika RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi menyusun RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024.
(2) Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas ang[illegible].

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah.

(2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
   a. Inspektorat Daerah Provinsi;
   b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
   c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
   d. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi.

(3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 6 Juli 2023

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 26

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 5
1.3 Hubungan Antar Dokumen 7
1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2024 8
1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan 8
1.3.3 Hubungan RKPD dan RPD Provinsi Bali 2024-2026 9
1.3.4 Hubungan RKPD, Renja PD dan KUA-PPAS 9
1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota ... 9
1.4 Maksud dan Tujuan 10
1.5 Sistematika Dokumen RKPD 11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 16
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 17
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 17
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 54
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 90
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 106
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 119
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD 122
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 122
2.2.2 Realisasi RPJMD 283
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 323
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah 323
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 330

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 346
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 346
3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali 350
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 355
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 356
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 365
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 371

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 377
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 392
4.2 Prioritas Pembangunan 393

4.3 Paradigma Pembangunan Bali 394

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 397

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 473

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 911

BAB VIII PENUTUP 935

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024.....	3
Gambar 1.2	Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah.....	5
Gambar 1.3	Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2024.....	7
Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Provinsi Bali.....	19
Gambar 2.2	Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2020.....	28
Gambar 2.3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara Kumulatif (C to C) Tahun 2018-2022.....	61
Gambar 2.4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2018-2022.....	62
Gambar 2.5	PDRB Per Kapita Bali Tahun 2017-2021.....	66
Gambar 2.6	Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2018-2022.....	68
Gambar 2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2022.....	73
Gambar 2.8	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2018-2022....	76
Gambar 2.9	Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	81
Gambar 2.10	Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	82
Gambar 2.11	Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	84
Gambar 2.12	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020-Agustus 2022.....	86
Gambar 2.13	Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Agustus 2020-Agustus 2022.....	95
Gambar 2.14	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Tahun 2018-2022.....	96
Gambar 2.15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	97
Gambar 2.16	Jumlah Produksi Ikan dan Nilai Produksi Ikandi Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	102
Gambar 2.17	Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Tahun 2021-2022.....	110
Gambar 5.1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2018-2022.....	399
Gambar 5.2	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2018-2022.....	400
Gambar 5.3	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2018-2022.....	401

Gambar 5.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2018-2022.....	402
Gambar 5.5	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2018-2022.....	403
Gambar 5.6	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.....	409
Gambar 5.7	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.....	410
Gambar 5.8	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.....	411
Gambar 5.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.....	412
Gambar 5.10	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.....	413
Gambar 5.11	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022.....	417
Gambar 5.12	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022.....	418
Gambar 5.13	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022.....	419
Gambar 5.14	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022.....	420
Gambar 5.15	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022.....	421
Gambar 5.16	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022.....	426
Gambar 5.17	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022.....	427
Gambar 5.18	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022.....	428
Gambar 5.19	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022.....	429
Gambar 5.20	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022.....	430
Gambar 5.21	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022.....	435
Gambar 5.22	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022.....	436
Gambar 5.23	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022.....	437
Gambar 5.24	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022.....	438
Gambar 5.25	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022.....	439
Gambar 5.26	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022.....	443
Gambar 5.27	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022.....	444

Gambar 5.28	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022.....	445
Gambar 5.29	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022.....	446
Gambar 5.30	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022.....	447
Gambar 5.31	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022.....	450
Gambar 5.32	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022.....	451
Gambar 5.33	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022.....	452
Gambar 5.34	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022.....	453
Gambar 5.35	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022.....	454
Gambar 5.36	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022.....	458
Gambar 5.37	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022.....	459
Gambar 5.38	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022.....	460
Gambar 5.39	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022.....	461
Gambar 5.40	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022.....	462
Gambar 5.41	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2018-2022.....	466
Gambar 5.42	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2018-2022.....	467
Gambar 5.43	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2018-2022.....	468
Gambar 5.44	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2018-2022.....	469
Gambar 5.45	Perkembangan Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2018-2022.....	470
Gambar 6.1	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1.....	473
Gambar 6.2	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2.....	475
Gambar 6.3	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3.....	476
Gambar 6.4	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4.....	477
Gambar 6.5	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5.....	479
Gambar 6.6	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6.....	480

Gambar 6.7 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7..... 481

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali.....	18
Tabel 2.2	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali	31
Tabel 2.3	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali	33
Tabel 2.4	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali	40
Tabel 2.5	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali	42
Tabel 2.6	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2025.....	49
Tabel 2.7	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021-2023.....	50
Tabel 2.8	Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023.....	51
Tabel 2.9	Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2019-2021.....	52
Tabel 2.10	Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2018-2022.....	54
Tabel 2.11	Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini.....	66
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2022	70
Tabel 2.13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2018-2022.....	73
Tabel 2.14	Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021.....	74
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021.....	78
Tabel 2.16	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2016-2021.....	79
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2016-2021.....	81
Tabel 2.18	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022.....	84
Tabel 2.19	Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali Tahun 2021.....	89
Tabel 2.20	Karakteristik Pengangguran (Persen) di Provinsi Bali, Agustus 2020-Agustus 2022.....	92

Tabel 2.21	Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2021-Agustus 2022.....	93
Tabel 2.22	*Share* Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2018-2022.....	103
Tabel 2.23	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Bali Tahun 2018-2021.....	104
Tabel 2.24	Populasi Unggas di Provinsi Bali Tahun 2018-2021.....	105
Tabel 2.25	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Setiap Bulan Masyarakat Provinsi Bali Tahun 2020-2021.....	107
Tabel 2.26	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	108
Tabel 2.27	Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.....	113
Tabel 2.28	Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2021.....	115
Tabel 2.29	Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar PelayananMinimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	120
Tabel 2.30	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	125
Tabel 2.31	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	126
Tabel 2.32	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	127
Tabel 2.33	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan RPJMD SB Tahun 2018-2023.....	130
Tabel 2.34	Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.....	148
Tabel 2.35	Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Pada Aplikasi Si-Dalev Provinsi Bali Tahun 2022.....	151
Tabel 2.36	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan.....	152
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	283
Tabel 2.38	Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	286
Tabel 2.39	Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Daya Saing Daerah.....	288
Tabel 2.40	Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Pelayanan Umum.....	290
Tabel 3.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	347
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Permendagri 13 Tahun 2006).....	361
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Ringkasan Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024 (PP Nomor 12 Tahun 2019)...	363

Tabel 3.4	Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	367
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Ringkasan Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024.....	370
Tabel 3.6	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	373
Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, Ringkasan PembiayaanTahun 2023, dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024.....	375
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	392
Tabel 5.1	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	404
Tabel 5.2	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	404
Tabel 5.3	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024.....	406
Tabel 5.4	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	413
Tabel 5.5	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	414
Tabel 5.6	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2024.....	416
Tabel 5.7	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	421
Tabel 5.8	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	422
Tabel 5.9	Strategi dan Arah Kebijkan Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2024.....	422
Tabel 5.10	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2024.....	424
Tabel 5.11	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	430
Tabel 5.12	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	431
Tabel 5.13	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2024.....	434
Tabel 5.14	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten	439

		Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	
Tabel	5.15	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	440
Tabel	5.16	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024.....	441
Tabel	5.17	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	447
Tabel	5.18	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	448
Tabel	5.19	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	449
Tabel	5.20	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	454
Tabel	5.21	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	455
Tabel	5.22	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2024.....	457
Tabel	5.23	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	462
Tabel	5.24	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	465
Tabel	5.25	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2024.....	465
Tabel	5.26	Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Tema Bali Tahun 2024.....	470
Tabel	5.27	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.....	471
Tabel	5.28	Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2024.....	472
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024.....	483
Tabel	7.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Bali Tahun 2024.....	911
Tabel	7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali.....	913

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencananaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pasal 201 ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang

dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

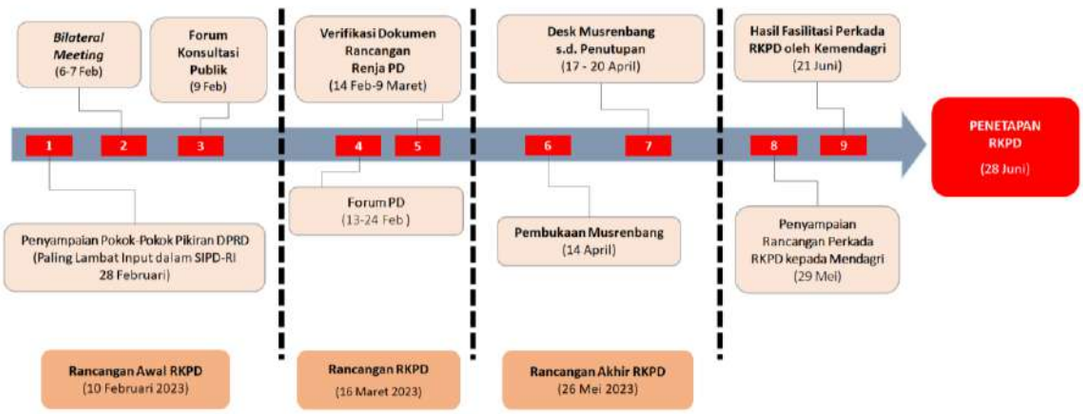
Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi Bali kemudian menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubenur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 inilah yang dijabarkan untuk jangka waktu 1 tahun dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 mencakup Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: 1) sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri

Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata.

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) *Bilateral Meeting*; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bali 2024 disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

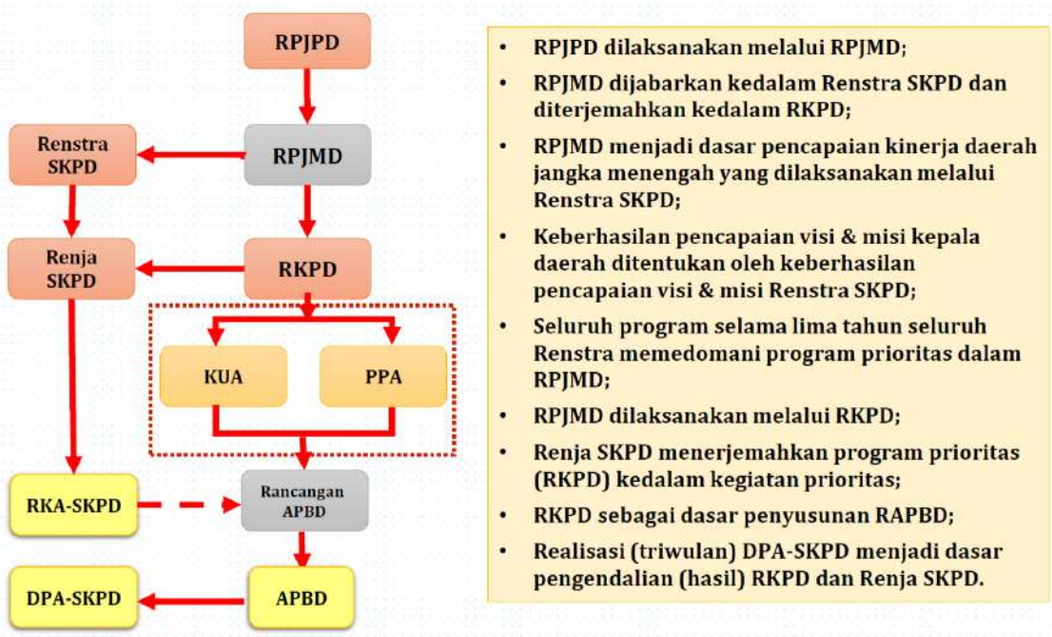
Sebagai penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPD dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD (dalam konteks RKPD Tahun 2024 adalah sebagai penjabaran RPD Tahun 2024-2026), Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2.

Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

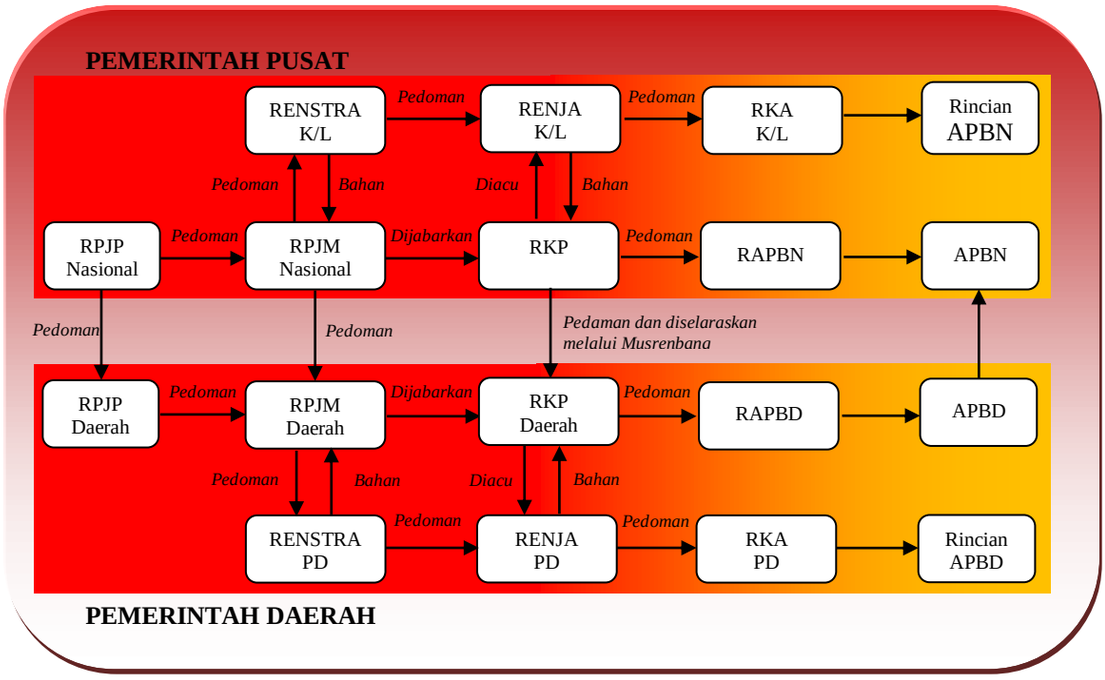
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dan
11. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2024.

Hubungan dokumen RKPD Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 Sebagai berikut :



Gambar 1.3.

Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2024

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah.

Dengan proses dan subtansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2024

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2024 merupakan RKP tahun keempat yang merupakan penjabaran tahunan RPJMN 2020-2024. Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan

RPJPD Semesta Berencana Tahun 2005-2025 sebagai rencana pembangunan jangka panjang telah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD dituangkan secara spasial ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan. Hal ini pula yang dijadikan dasar dalam penyusunan arah pengembangan wilayah pada RPJMD serta arah kebijakan pembangunan pada RKPD.

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Bali dan memberikan arah program strategis Provinsi Bali bagi Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

1.3.3 Hubungan RKPD dan RPD Provinsi Bali 2024-2026

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Disamping itu memuat juga penjabaran indikator kinerja tahunan sesuai dengan proyeksi dan target yang tertuang di dalam dokumen RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 tahun berkenan (Tahun 2024).

1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, agar terwujud keselerasan antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran, prioritas dan program pembangunan serta

kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistik, integrasi dan spasial.

Tujuan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 adalah:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Bali dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2024;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin);
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkroniasi pembangunan baik antara Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat;
5. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
7. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali;
9. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Bali, pelaku usaha swasta dan masyarakat, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Lainnya;
10. Menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan target-target dalam Standar Pelayanan Mininal (SPM) yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian

daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan tahun 2024-2026 yang diambil dari dokumen RPD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah RPD Tahun 2024-2026 .

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja

tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kedudukan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bentangan sejarah panjang Bali dari zaman ke zaman dengan sangat jelas menunjukkan bahwa para Leluhur/Tetua Bali sesungguhnya telah mewariskan suatu tatanan kehidupan ideal bagi *Krama* Bali. Tatanan kehidupan ideal itu berupa tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/keharmonisan antara tiga unsur utama, yaitu: Alam Bali, Manusia (*Krama*) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal bernapaskan agama Hindu, secara *sakala* dan *niskala.* Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan *Krama* Bali, sehingga pada puncaknya menghasilkan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali yang mataksu, bermartabat, dan bernilai tinggi. Inilah tatanan kehidupan *Krama* Bali yang merupakan *Genuine* Bali.

Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan *mataksu*, sehingga menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, dalam lontar *Mpu Kuturan* disebutkan bahwa Bali merupakan *Padma Bhuwana*, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali.

Namun seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global, maka Bali yang semula merupakan *Padma Bhuwana* itu pun turut serta berubah. Bagaimana dinamika perubahan tersebut terjadi di Bali, berikut ini akan diuraikan gambaran umum kondisi daerah Bali lebih terperinci yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi

1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*). Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota, yang terletak di bagian selatan pulau ini.

Pulau Bali dengan total luas wilayah 5.636,66 Km^2, terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali.

Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di Indonesia.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km^2 atau 0,29% dari luas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Bali terbagi kedalam delapan kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten dan kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yaitu 1.364,73 Km^2 atau 23,61% dari luas Provinsi Bali, diikuti oleh Kabupaten Tabanan seluas 1.013,88 Km^2 (17,54%), Kabupaten Jembrana seluas 841,80 Km^2 (14,56%), dan Kabupaten Karangasem seluas 839,54 Km^2 (14,52%). Wilayah sisanya berturut-turut adalah Kabupaten Bangli seluas 490,71 Km^2, Kabupaten Badung seluas 418,62 Km^2, Kabupaten Gianyar seluas 368,00 Km^2, Kabupaten Klungkung seluas 315,00 Km^2, dan Kota Denpasar seluas 127,78 Km^2.

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan.

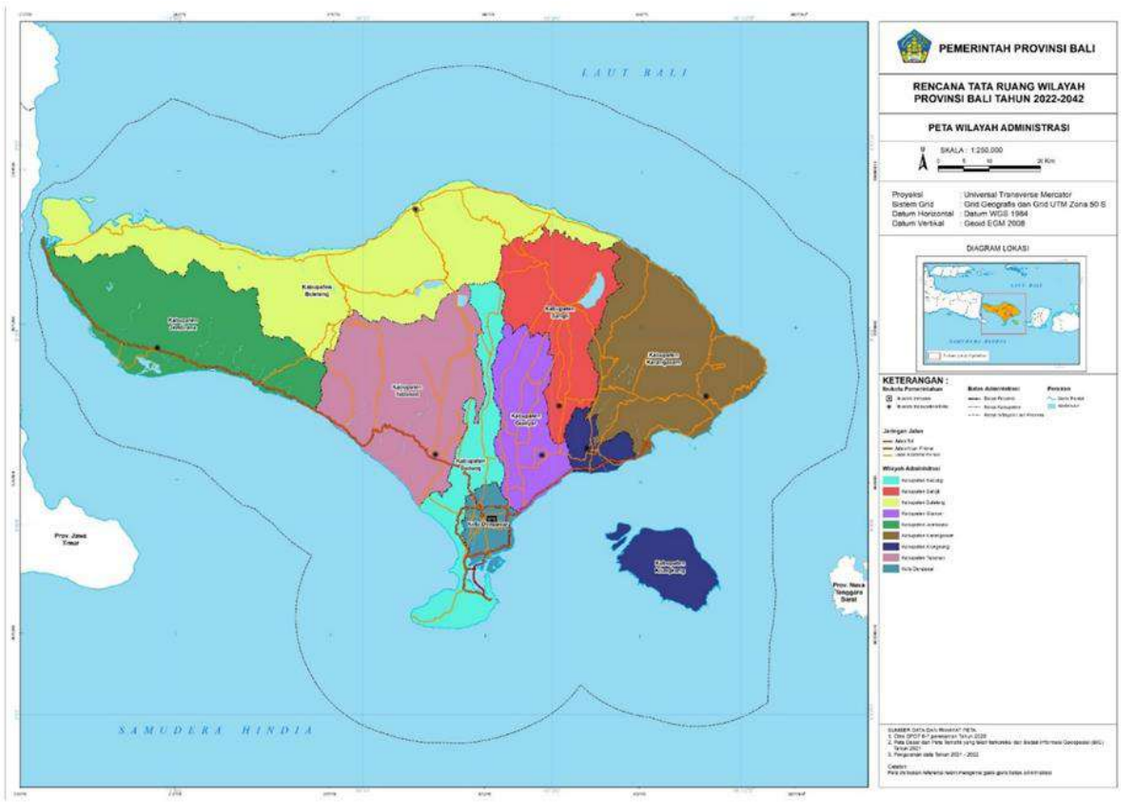
Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km^2)	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Desa Adat
1	Buleleng	1.364,73	9	148	170
2	Jembrana	841,80	5	51	64
3	Tabanan	1.013,88	10	133	348
4	Badung	418,62	6	62	122
5	Denpasar	127,78	4	43	35
6	Gianyar	368,00	7	70	272
7	Bangli	490,71	4	72	168
8	Klungkung	315,00	4	59	119
9	Karangasem	839,54	8	78	190
BALI		**5.780,06**	**57**	**716**	**1.493**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023



Gambar 2.1.

Wilayah Administrasi Provinsi Bali

Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki "keunikan" yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua, yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut *Desa Dinas*, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali dinamakan Desa Adat. Di bawahnya ada *banjar adat* atau *banjar suka-duka*.

Keberadaan Desa Adat di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut,

Krama atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan, Pawongan,* dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *asih* kepada alam (*Palemahan)*, *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi,* meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*).

Masing-masing Desa Adat memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat yang memiliki *Pura Kahyangan Desa* lainnya. Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/ disebut *Desa Mawacara*.

Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinil, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: *Pura Kahyangan Tiga* sebanyak 4.552 Pura, *Pura Dang Kahyangan* sebanyak 289 Pura, dan *Pura Sad Kahyangan* sebanyak 10 Pura yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (*Krama Bali*), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan *Krama Bali* yang berkebudayaan tinggi dan religius.

2. Topografi

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan *Nyegara-Gunung*.

Wilayah Provinsi Bali, 85% merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi aktif yaitu Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.142 m).

Ditinjau dari ketinggian lahan, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan sebagai berikut:

a) Lahan dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77.321,38 ha;
b) Lahan dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan berombak sempai bergelombang dengan luas 60.620,34 ha;
c) Lahan dengan ketinggian 100-500 meter seluas 211.923,85 ha didominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit;
d) Lahan dengan ketinggian 500-1.000 meter seluas 145.188,61 ha; dan
e) Lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90 ha.

3. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo-Hadiwidjojo dkk, 1998), wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung api.Sementara batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir. Dengan komposisi litologi/batuan wilayah, sebagai berikut.

a) Aluvium (Qa) berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung; sebagai endapan sungai, danau dan pantai di leher sepenanjung Prapat Agung, wilayah pesisir dekat pantai di

Kabupaten Buleleng (Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sawan dan sebagian Buleleng), pesisir dekat pantai Kabupaten Jembrana (Kecamatan Negara, Jembrana dan Mendoyo), Kabupaten Badung (Tanjung Benoa dan leher Kuta), Kota Denpasar (dekat pantai Denpasar Selatan dan Pulau Serangan asli).

b) Formasi Prapat Agung (Tpsp), terdiri dari batugamping ter-kars-kan, batupasir gampingan dan napal, terdapat di sepenanjung Prapat Agung Kabupaten Buleleng.

c) Formasi Palasari (QTsp), terdiri dari konglomerat, batupasir dan batugamping terumbu. Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah Kabupaten Jembrana, menyebar hingga pesisir dekat pantai Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng.

d) Formasi Selatan (Tmps), terdiri dari batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Penida.

4. Hidrologi

a) Sungai

Terbaginya fisiografi Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat – timur pulau ini menyebabkan sistem sungai di Pulau Bali mengalir dari utara ke selatan di belahan selatan pulau dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau. Sungai-sungai di Povinsi bali dikelompokan dalam Wilayah Sungai Bali Penida, terdii dari 391 Daerah Aliran Sungai (DAS).

DAS di Provinsi dibagi dalam 5 zona meliputi: Zona Utara 138 DAS, Zona Timur 68 DAS, Zona Tengah 70 DAS, Zona Sarbagita 85 DAS dan Zona Barat 30 DAS. Dari 391 DAS yang ada 94 DAS diantaranya merupakan DAS Lintas Kabupaten/Kota. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Buleleng memiliki DAS terbanyak (139 DAS) disusul Kabupaten Karangasem (77 DAS) dan Kabupaten Klungkung (72 DAS).

b) Danau/Waduk/Embung/Embungan

Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Semua danau-danau tersebut tidak termasuk di dalam wilayah pesisir. Potensi air danau di Bali adalah 872,47 juta m^3. Danau terbesar di Bali adalah Danau Batur dengan potensi air 773,33 juta m^3 atau 88,63% dari total potensi air danau.

Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di Kabupaten Karangasem. Seluruh bendungan/waduk/ embung tersebut terdapat di wilayah pesisir. Potensi air bendungan/waduk/embung adalah 13,53 juta m^3.

c) Mata Air

Berdasarkan data dari Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, potensi mata air di Provinsi Bali adalah 1.023 miliar m^3 dengan total debit 32.463,12 Lt/dt. Jumlah Mata Air yang tercatat di Provinsi Bali adalah sebanyak 1.394 titik mata air dimana jumlah paling banyak berada di Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 447 titik mata air. Namun untuk debit paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem dengan potensi air 13.023,48 Lt/dt meskipun jumlah mata air hanya 215 titik.

d) Air Tanah dan Cekungan Air Tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1985), kondisi akuifer dan air tanah di wilayah pesisir Provinsi Bali sebagai berikut:

1) Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar,

Kabupaten Badung (Kuta, Kuta Utara dan mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri).

2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan).
3) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana (dekat pantai Negara, Jembrana dan Mendoryo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kec. Geokgak, Seririt, dan Banjar).
4) Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran dan Tanjung Benoa), pesisir utara dekat pantai Nusa Penida, pesisir utara Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima).
5) Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya >5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi bagian atas), Kota Denpasar (Kecamatan Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayah pesisir dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung (dekat pantai Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja).
6) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan pesisir bagian atas

Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), wilayah pesisir bagian atas Kabupaten Gianyar, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis, Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kab. Buleleng (Tejakula, Buleleng, dan Seririt).

7) Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat mata air dapat diturap. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir atas Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg), sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Karangasem dan Buleleng.
8) Akuifer produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai Kubutambahan.
9) Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.
10) Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau zona pelapukan. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan dan Sumberkima).
11) Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah pesisir perbukitan Kabupaten Jembrana, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem.

Berdasarkan data Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdata ada di Provinsi Bali adalah sebanyak 8 kawasan CAT. Adapun CAT tersebut adalah sebagai berikut.

1) CAT Denpasar – Tabanan dengan luas 2.080 Km^2 yang meliputi kawasan di dalam 8 kabupaten/kota (Kecuali Kabupaten Jembrana)
2) CAT Singaraja dengan luas 505 Km^2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan
3) CAT Amlapura dengan luas 200 Km^2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Karangasem.
4) CAT Negara dengan luas 418 Km^2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan
5) CAT Gilimanuk dengan luas 131 Km^2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
6) CAT Nusa Penida dengan luas 198 Km^2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Klungkung.
7) CAT Nusa Dua dengan luas 99 Km^2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Badung.
8) CAT Tejakula dengan luas 750 Km^2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem.

5. Klimatologi

a) Tipe Iklim

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini,

sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

b) Suhu dan Curah Hujan

Menurut catatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar , sepanjang tahun 2021, suhu/temperatur udara rata-rata tertinggi di wilayah Bali terjadi di Kota Denpasar, yaitu mencapai 28,2oC dengan rata-rata kelembaban udara 78%. Sebaliknya, suhu udara rata-rata terendah terjadi di Kabupaten Karangasem yang mencapai 26,3oC dengan tingkat kelembaban udara rata-rata yakni sebesar 80%.

Apabila dilihat dari curah hujan di masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali, tercatat Kabupaten Bangli memiliki curah hujan tertinggi yang mencapai 3.070 mm selama tahun 2021. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Badung yang mencapai 1.390,5 mm.

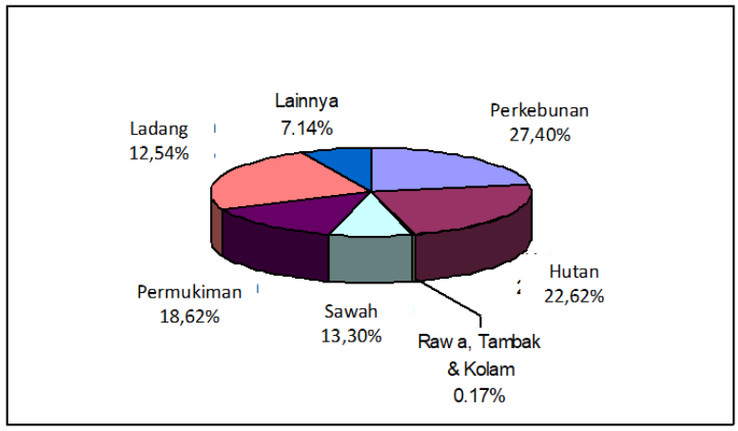
Intensitas curah hujan tertinggi selama tahun 2021 terjadi di bulan Desember seperti yang tercatat di semua stasiun pencatatan di Bali yakni Stasiun Ngurah Rai, Sanglah, Negara, dan Karangasem.

6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data dasar tutupan lahan dari Citra BIG 2020 sebagaiman tercantum dalam Buku Fakta dan Analisa Perubahan RTRW Provinsi Bali, didapatkan peta tutupan lahan wilayah daratan Provinsi Bali tahun 2020. Penggambaran penggunaan lahan Wilayah Provinsi Bali diidasarkan SNI 7645-1-12014 tentang Klasifikasi Penutup Lahan skala 250.000.

Berdasarkan hasil pengolahan peta dasar dan tematik BIG, maka didapatkan komposisi penggunaan lahan dari berbagai penggunaan lahan di Provinsi Bali. Dari total luas wilayah 559.472,91 ha, luas lahan terbangun adalah 104.812,17 Ha atau 18,73% dari luas wilayah dan sisanya merupakan lahan terbuka seluas 454.660,74 Ha atau 81,27% dari luas wilayah. Dengan demukian Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Provinsi Bali pada Tahun 2020 adalah sebesar 18,73%.

Menurut jenisnya, tutupan lahan pertanian di Bali didominasi oleh lahan pertanian yang meliputi perkebunan, sawah dan tegalan seluas 297.956,40 ha atau 53,26% dari luas wilayah. Selanjutny adalah tutupan lahan hutan seluas 126.562,80 Ha atau 22,62% dari luas wilayah, selanjutnya permukiman seluas 104.191,01 Ha (18,62%) dan sawah seluas 74.384,57 Ha atau 13,30%. Komponen kawasan permukiman yang merupakan seluruh penggunaan lahan barupa bangunan untuk aktivitas penduduk meliputi pemanfaatan untuk perumahan, sarana pelayanan pendukung kegiatan (perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pariwisata) dan lainnya.



Sumber: Buku Fakta dan Analisa RTRW Provinsi Bali

Gambar 2.2.

Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya
di Provinsi Bali Tahun 2020

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Selanjutnya mempertimbangkan dari aspek penggunaan lahan maka dalam pengembangan wilayah dipertimbangkan aspek perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Konsep pengembangan wilayah pada prinsipnya lebih menekankan pada adanya

perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang.

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan daerah, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah.

Potensi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan yang dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan di masing-masing kawasan yang didukung oleh pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan, seperti PKN, PKW, dan PKL dengan menggali potensi dan keunggulan kawasan tersebut. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan pengembangan industri kreatif dan industri pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa kreatif, produktif, dan mandiri berkelanjutan sehingga memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan dan keterpaduan kegiatan ekonomi antar sektor, antar kabupaten/kota dan antar kota dengan desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang seirama dengan pembangunan Kawasan perkotaan.

8. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti *epidemic* dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometerologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi.

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali berpotensi mengalami bencana alam dan bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa dan tsunami, abrasi pantai, gelombang pasang, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti erosi/abrasi pantai dan kenaikan paras muka laut. Oleh karena itu, mitigasi bencana pesisir mutlak mendapatkan perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

a) Daerah Rawan Banjir

Seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali termasuk memilki daerah rawan banjir ditinjau dari aspek curah hujan, kemiringan lereng, kerapatan sungai, jenis tanah dan penggunaan lahan serta ketinggian tempat dari permukaan laut.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali terdapat 81 desa/kelurahan di Provinsi Bali yang termasuk kedalam daerah rawan banjir. Desa/Kelurahan ini tersebar di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung,

Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah terbanyak yang memiliki desa/kelurahan dengan status daerah rawan banjir. Terdapat 40 desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng yang rawan banjir.

Untuk lebih jelasnya, daerah rawan banjir di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
2	Desa Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
3	Desa Kedonganan	Kecamatan Kuta	Badung
4	Desa Tuban	Kecamatan Kuta	Badung
5	Desa Kuta	Kecamatan Kuta	Badung
6	Desa Legian	Kecamatan Kuta	Badung
7	Desa Seminyak	Kecamatan Kuta	Badung
8	Desa Kerobokan Kelod	Kecamatan Kuta Utara	Badung
9	Desa Kerobokan	Kecamatan Kuta Utara	Badung
10	Desa Dalung	Kecamatan Kuta Utara	Badung
11	Desa Kapal	Kecamatan Mengwi	Badung
12	Desa Penarungan	Kecamatan Mengwi	Badung
13	Desa Darmasaba	Kecamatan Abiansemal	Badung
14	Desa Abiansemal	Kecamatan Abiansemal	Badung
15	Desa Carangsari	Kecamatan Petang	Badung
16	Desa Takmung	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
17	Kelurahan Semarapura Kauh	Kecamatan Klungkung	Klungkung
18	Kelurahan Semarapura Tengah	Kecamatan Klungkung	Klungkung
19	Kelurahan Semarapura Kangin	Kecamatan Klungkung	Klungkung
20	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Kecamatan Klungkung	Klungkung
21	Desa Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
22	Desa Kampung Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
23	Desa Pejarakan	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
24	Desa Celukan Bawang	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
25	Desa Sangalangit	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
26	Desa Musi	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
27	Desa Penyabangan	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
28	Desa Banyupoh	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
29	Desa Pengastulan	Kecamatan Seririt	Buleleng
30	Desa Tangguwisia	Kecamatan Seririt	Buleleng
31	Desa Kalianget	Kecamatan Seririt	Buleleng

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
32	Desa Sulanyah	Kecamatan Seririt	Buleleng
33	Desa Umaanyar	Kecamatan Seririt	Buleleng
34	Kelurahan Seririt	Kecamatan Seririt	Buleleng
35	Desa Banjarasem	Kecamatan Seririt	Buleleng
36	Desa Kalisade	Kecamatan Seririt	Buleleng
37	Desa Petemon	Kecamatan Seririt	Buleleng
38	Desa Kaliasem	Kecamatan Banjar	Buleleng
39	Desa Temukus	Kecamatan Banjar	Buleleng
40	Desa Dencarik	Kecamatan Banjar	Buleleng
41	Desa Banjar	Kecamatan Banjar	Buleleng
42	Kelurahan Penarukan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
43	Kelurahan Banyuning	Kecamatan Buleleng	Buleleng
44	Kelurahan Kampung Baru	Kecamatan Buleleng	Buleleng
45	Kelurahan Kampung Kajanan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
46	Kelurahan Kampung Anyar	Kecamatan Buleleng	Buleleng
47	Kelurahan Kaliuntu	Kecamatan Buleleng	Buleleng
48	Banjar Bali	Kecamatan Buleleng	Buleleng
49	Kelurahan Kampung Bugis	Kecamatan Buleleng	Buleleng
50	Desa Baktiserage	Kecamatan Buleleng	Buleleng
51	Desa Pemaron	Kecamatan Buleleng	Buleleng
52	Desa Kalibubuk	Kecamatan Buleleng	Buleleng
53	Desa Anturan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
54	Desa Bungkulan	Kecamatan Sawan	Buleleng
55	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
56	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
57	Desa Kubutambahan	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
58	Desa Bukti	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
59	Desa Pacung	Kecamatan Tejakula	Buleleng
60	Desa Bondalem	Kecamatan Tejakula	Buleleng
61	Desa Tejakula	Kecamatan Tejakula	Buleleng
62	Desa Tembok	Kecamatan Tejakula	Buleleng
63	Desa Padasambian Kaje	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
64	Kelurahan Padasambian	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
65	Kelurahan Padasmbian Klod	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
66	Desa Tegal Kertha	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
67	Desa Tegal Harum	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
68	Desa Pemecutan	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
69	Desa Pemecutan Klod	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
70	Desa Dauh Puri	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
71	Desa Dauh Puri Kauh	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
72	Desa Dauh Puri Klod	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
73	Desa Sesetan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
74	Desa Panjer	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
75	Desa Pemogan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
76	Desa Pedungan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
77	Desa Sanur	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
78	Desa Kesiman Kerthalangu	Kecamatan Denpasar Timur	Denpasar
79	Desa Melaya	Kecamatan Melaya	Jembrana
80	Kelurahan Baler Bale Agung	Kecamatan Negara	Jembrana
81	Desa Batuagung	Kecamatan Jembrana	Jembrana

Sumber: BPBD Provinsi Bali

b) Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor

Pulau Bali dibentuk oleh vulkanik dan mempunyai topografi bergelombang, berbukit dan bergunung, termasuk memiliki kerentanan tinggi terhadap potensi longsor.

Berdasarkan data BPBD, tercatat sebanyak 322 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang masuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Terdapat 122 desa di Kabupaten Tabanan yang rawan longsor. Untuk lebih jelasnya, data mengenai desa/kelurahan yang masuk kedalam klasifikasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Buahan	Kintamani	Bangli
2	Desa Belandingan	Kintamani	Bangli

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
3	Desa Batur Utara	Kintamani	Bangli
4	Desa Batur Tengah	Kintamani	Bangli
5	Desa Batur Selatan	Kintamani	Bangli
6	Desa Kutuh	Kintamani	Bangli
7	Desa Abang Batudinding	Kintamani	Bangli
8	Desa Pengejaran	Kintamani	Bangli
9	Desa Subaya	Kintamani	Bangli
10	Desa Siakin	Kintamani	Bangli
11	Desa Trunyan	Kintamani	Bangli
12	Desa Bunutin	Kintamani	Bangli
13	Desa Binyan	Kintamani	Bangli
14	Desa Dausa	Kintamani	Bangli
15	Desa Kintamani	Kintamani	Bangli
16	Desa Kedisan	Kintamani	Bangli
17	Desa Serai	Kintamani	Bangli
18	Desa Satra	Kintamani	Bangli
19	Desa Songan A	Kintamani	Bangli
20	Desa Songan B	Kintamani	Bangli
21	Desa Pinggan	Kintamani	Bangli
22	Desa Suter	Kintamani	Bangli
23	Desa Tegallalang	Tegallalang	Gianyar
24	Desa Taro	Tegallalang	Gianyar
25	Desa Pupuan	Tegallalang	Gianyar
26	Desa Kedisan	Tegallalang	Gianyar
27	Desa Kenderan	Tegallalang	Gianyar
28	Desa Sebatu	Tegallalang	Gianyar
29	Desa Keliki	Tegallalang	Gianyar
30	Desa Tampaksiring	Tampaksiring	Gianyar
31	Desa Manukaya	Tampaksiring	Gianyar
32	Desa Sanding	Tampaksiring	Gianyar
33	Desa Pejeng	Tampaksiring	Gianyar
34	Desa Pejeng Kaja	Tampaksiring	Gianyar
35	Desa Pejeng Kelod	Tampaksiring	Gianyar
36	Desa Pejeng Kawan	Tampaksiring	Gianyar
37	Desa Puhu	Payangan	Gianyar
38	Desa Bukian	Payangan	Gianyar
39	Desa Bresela	Payangan	Gianyar
40	Desa Kelusa	Payangan	Gianyar
41	Desa Melinggih Kelod	Payangan	Gianyar
42	Desa Melinggih	Payangan	Gianyar
43	Desa Buahan	Payangan	Gianyar
44	Desa Buahan Kaja	Payangan	Gianyar
45	Desa Kerta	Payangan	Gianyar
46	Desa Gobleg	Banjar	Buleleng
47	Desa Pancasari	Banjar	Buleleng
48	Desa Gitgit	Banjar	Buleleng
49	Desa Antap	Selemadeg	Tabanan
50	Desa Bajera	Selemadeg	Tabanan
51	Desa Bajera Utara	Selemadeg	Tabanan
52	Desa Berembeng	Selemadeg	Tabanan
53	Desa Serampingan	Selemadeg	Tabanan
54	Desa Selemadeg	Selemadeg	Tabanan
55	Desa Pupuan Sawah	Selemadeg	Tabanan
56	Desa Wanagiri	Selemadeg	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
57	Desa Wanagiri Kauh	Selemadeg	Tabanan
58	Desa Manikyang	Selemadeg	Tabanan
59	Desa Tegai Mengkeb	Selemadeg Timur	Tabanan
60	Desa Tangguntiti	Selemadeg Timur	Tabanan
61	Desa Mambang	Selemadeg Timur	Tabanan
62	Desa Bantas	Selemadeg Timur	Tabanan
63	Desa Megati	Selemadeg Timur	Tabanan
64	Desa Gadungan	Selemadeg Timur	Tabanan
65	Desa Gunung Salak	Selemadeg Timur	Tabanan
66	Desa Dalang	Selemadeg Timur	Tabanan
67	Desa Gadung sari	Selemadeg Timur	Tabanan
68	Desa Lalanglinggah	Selemadeg Barat	Tabanan
69	Desa Antosari	Selemadeg Barat	Tabanan
70	Desa Tiying Gading	Selemadeg Barat	Tabanan
71	Desa Lumbung	Selemadeg Barat	Tabanan
72	Desa Lumbung Kauh	Selemadeg Barat	Tabanan
73	Desa Mundeh	Selemadeg Barat	Tabanan
74	Desa Mundeh Kangin	Selemadeg Barat	Tabanan
75	Desa Angkah	Selemadeg Barat	Tabanan
76	Desa Mundeh Kauh	Selemadeg Barat	Tabanan
77	Desa Selabih	Selemadeg Barat	Tabanan
78	Desa Bengkel Sari	Selemadeg Barat	Tabanan
79	Desa Tibibiu	Kerambitan	Tabanan
80	Desa Kelanting	Kerambitan	Tabanan
81	Desa Penarukan	Kerambitan	Tabanan
82	Desa Belumbang	Kerambitan	Tabanan
83	Desa Tista	Kerambitan	Tabanan
84	Desa Kerambitan	Kerambitan	Tabanan
85	Desa Pangkung Karung	Kerambitan	Tabanan
86	Desa Kukuh	Kerambitan	Tabanan
87	Desa Baturiti	Kerambitan	Tabanan
88	Desa Meliling	Kerambitan	Tabanan
89	Desa Sembung Gede	Kerambitan	Tabanan
90	Desa Samsam	Kerambitan	Tabanan
91	Desa Batuaji	Kerambitan	Tabanan
92	Desa Kesiut	Kerambitan	Tabanan
93	Desa Timpag	Kerambitan	Tabanan
94	Desa Sudimara	Tabanan	Tabanan
95	Desa Bongan	Tabanan	Tabanan
96	Desa Gubug	Tabanan	Tabanan
97	Desa Dauh Peken	Tabanan	Tabanan
98	Desa Delod Peken	Tabanan	Tabanan
99	Desa Dajan Peken	Tabanan	Tabanan
100	Desa Subamia	Tabanan	Tabanan
101	Desa Denbantas	Tabanan	Tabanan
102	Desa Tunjuk	Tabanan	Tabanan
103	Desa Wanasari	Tabanan	Tabanan
104	Desa Beraban	Kediri	Tabanan
105	Desa Buwit	Kediri	Tabanan
106	Desa Kaba-kaba	Kediri	Tabanan
107	Desa Pandak Gede	Kediri	Tabanan
108	Desa Pejaten	Kediri	Tabanan
109	Desa Nyambu	Kediri	Tabanan
110	Desa Kediri	Kediri	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
111	Desa Abiantuwung	Kediri	Tabanan
112	Desa Banjar Ayar	Kediri	Tabanan
113	Desa Tegal Jadi	Marga	Tabanan
114	Desa Kukuh	Marga	Tabanan
115	Desa Beringkit	Marga	Tabanan
116	Desa Peken Blayu	Marga	Tabanan
117	Desa Batan Nyuh	Marga	Tabanan
118	Desa Kuwum	Marga	Tabanan
119	Desa Caublayu	Marga	Tabanan
120	Desa Selanbawak	Marga	Tabanan
121	Desa Marga	Marga	Tabanan
122	Desa Petiga	Marga	Tabanan
123	Desa Tua	Marga	Tabanan
124	Desa Payangan	Marga	Tabanan
125	Desa Dauh Puri	Marga	Tabanan
126	Desa Dajan Puri	Marga	Tabanan
127	Desa Geluntung	Marga	Tabanan
128	Desa Baru	Marga	Tabanan
129	Desa Perean	Baturiti	Tabanan
130	Desa Perean Tengah	Baturiti	Tabanan
131	Desa Perea Kangin	Baturiti	Tabanan
132	Desa Luwus	Baturiti	Tabanan
133	Desa Apuan	Baturiti	Tabanan
134	Desa Angseri	Baturiti	Tabanan
135	Desa Bangli	Baturiti	Tabanan
136	Desa Baturiti	Baturiti	Tabanan
137	Desa Batunya	Baturiti	Tabanan
138	Desa Antapan	Baturiti	Tabanan
139	Desa Candikuning	Baturiti	Tabanan
140	Desa Rejasa	Penebel	Tabanan
141	Desa Jegu	Penebel	Tabanan
142	Desa Riang Gede	Penebel	Tabanan
143	Desa Buruan	Penebel	Tabanan
144	Desa Tajen	Penebel	Tabanan
145	Desa Pitra	Penebel	Tabanan
146	Desa Penatahan	Penebel	Tabanan
147	Desa Tengkudak	Penebel	Tabanan
148	Desa Mengeste	Penebel	Tabanan
149	Desa Penebel	Penebel	Tabanan
150	Desa Biaung	Penebel	Tabanan
151	Desa Bebahan	Penebel	Tabanan
152	Desa Seganan	Penebel	Tabanan
153	Desa Jatiluwih	Penebel	Tabanan
154	Desa Wangaya Gede	Penebel	Tabanan
155	Desa Pesagi	Penebel	Tabanan
156	Desa Tegallinggah	Penebel	Tabanan
157	Desa Sangketan	Penebel	Tabanan
158	Desa Belatungan	Pupuan	Tabanan
159	Desa Kebon Padangan	Pupuan	Tabanan
160	Desa Belimbing	Pupuan	Tabanan
161	Desa Sanda	Pupuan	Tabanan
162	Desa Batungsel	Pupuan	Tabanan
163	Desa Pujungan	Pupuan	Tabanan
164	Desa Pajahan	Pupuan	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
165	Desa Munduk Temu	Pupuan	Tabanan
166	Desa Bantiran	Pupuan	Tabanan
167	Desa Padangan	Pupuan	Tabanan
168	Desa Jelijih Punggang	Pupuan	Tabanan
169	Desa Karya Sari	Pupuan	Tabanan
170	Desa Sai	Pupuan	Tabanan
171	Desa Bugbug	Karangasem	Karangasem
172	Desa Bukit	Karangasem	Karangasem
173	Desa Pertima	Karangasem	Karangasem
174	Desa Seraya Barat	Karangasem	Karangasem
175	Desa Tegallinggah	Karangasem	Karangasem
176	Desa Tumbu	Karangasem	Karangasem
177	Desa Gegelang	Manggis	Karangasem
178	Desa Nyuh Tebel	Manggis	Karangasem
179	Desa Selumbung	Manggis	Karangasem
180	Desa Tenganan	Manggis	Karangasem
181	Desa Ulakan	Manggis	Karangasem
182	Desa Datah	Abang	Karangasem
183	Desa Pidpid	Abang	Karangasem
184	Desa Purwakerti	Abang	Karangasem
185	Desa Tista	Abang	Karangasem
186	Desa Tiyingtali	Abang	Karangasem
187	Desa Ababi	Abang	Karangasem
188	Desa Bunutan	Abang	Karangasem
189	Desa Bebandem	Bebandem	Karangasem
190	Desa Bhuana Giri	Bebandem	Karangasem
191	Desa Budakeling	Bebandem	Karangasem
192	Bungaya Kangin	Bebandem	Karangasem
193	Desa Jungutan	Bebandem	Karangasem
194	Desa Macang	Bebandem	Karangasem
195	Desa Sibetan	Bebandem	Karangasem
196	Desa Besakih	Rendang	Karangasem
197	Desa Menanga	Rendang	Karangasem
198	Desa Nongan	Rendang	Karangasem
199	Desa Pempatan	Rendang	Karangasem
200	Desa Rendang	Rendang	Karangasem
201	Desa Amertha Bhuana	Selat	Karangasem
202	Desa Duda	Selat	Karangasem
203	Desa Duda Timur	Selat	Karangasem
204	Duda Utara	Selat	Karangasem
205	Desa Muncan	Selat	Karangasem
206	Desa Peringsari	Selat	Karangasem
207	Desa Sebudi	Selat	Karangasem
208	Desa Selat	Selat	Karangasem
209	Desa Kertha Bhana	Sidemen	Karangasem
210	Desa Lokasari	Sidemen	Karangasem
211	Desa Sangkangunung	Sidemen	Karangasem
212	Desa Sidemen	Sidemen	Karangasem
213	Desa Sindu Wati	Sidemen	Karangasem
214	Desa Talibeng	Sidemen	Karangasem
215	Desa Tangkup	Sidemen	Karangasem
216	Desa Telaga Tawang	Sidemen	Karangasem
217	Desa Tri Ekabuana	Sidemen	Karangasem
218	Desa Wismakerta	Sidemen	Karangasem

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
219	Desa Tianyar Barat	Kubu	Karangasem
220	Desa Tianyar Tengah	Kubu	Karangasem
221	Desa Tulamben	Kubu	Karangasem
222	Desa Ban	Kubu	Karangasem
223	Desa Melaya	Melaya	Jembrana
224	Kelurahan Baler Bale Agung	Negara	Jembrana
225	Desa Batu Agung	Jembrana	Jembrana
226	Kelurahan Dauh Waru	Jembrana	Jembrana
227	Desa Penyaringan	Mendoyo	Jembrana
228	Desa Yeh Sumbul	Mendoyo	Jembrana
229	Desa Yehembang	Mendoyo	Jembrana
230	Desa Asah Duren	Pekutatan	Jembrana
231	Desa Manggis Sari	Pekutatan	Jembrana
232	Desa Gumbrih	Pekutatan	Jembrana
233	Desa Selisihan	Klungkung	Klungkung
234	Desa Selat	Klungkung	Klungkung
235	Desa Akah	Klungkung	Klungkung
236	Desa Tangkas	Klungkung	Klungkung
237	Kelurahan Semarapura Kangin	Klungkung	Klungkung
238	Kelurahan Semarapura Kelod Kangin	Klungkung	Klungkung
239	Desa Toh Pati	Banjarangkan	Klungkung
240	Desa Bungbungan	Banjarangkan	Klungkung
241	Desa Nyalian	Banjarangkan	Klungkung
242	Desa Tusan	Banjarangkan	Klungkung
243	Desa Getakan	Banjarangkan	Klungkung
244	Desa Aan	Banjarangkan	Klungkung
245	Desa Timuhun	Banjarangkan	Klungkung
246	Desa Nyanglan	Banjarangkan	Klungkung
247	Desa Takmung	Banjarangkan	Klungkung
248	Desa Paksebali	Dawan	Klungkung
249	Desa Gunaksa	Dawan	Klungkung
250	Desa Besan	Dawan	Klungkung
251	Desa Pikat	Dawan	Klungkung
252	Desa Dawan Kelod	Dawan	Klungkung
253	Desa Dawan Kaler	Dawan	Klungkung
254	Desa Kutampi	Nusa Penida	Klungkung
255	Desa Batu Kandik	Nusa Penida	Klungkung
256	Desa Bungamekar	Nusa Penida	Klungkung
257	Desa Suana	Nusa Penida	Klungkung
258	Desa Pejukutan	Nusa Penida	Klungkung
259	Desa Carangsari	Petang	Badung
260	Desa Getasan	Petang	Badung
261	Desa Pangsan	Petang	Badung
262	Desa Petang	Petang	Badung
263	Desa Sulangai	Petang	Badung
264	Desa Pelaga	Petang	Badung
265	Desa Belok	Petang	Badung
266	Desa Ayunan	Abiansemal	Badung
267	Desa Bongkasa	Abiansemal	Badung
268	Desa Sangeh	Abiansemal	Badung
269	Desa Bongkasa Pertiwi	Abiansemal	Badung
270	Desa Kuwum	Kuta Selatan	Badung

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
271	Desa Pecatu	Kuta Selatan	Badung
272	Desa Ungasan	Kuta Selatan	Badung
273	Desa Kutuh	Kuta Selatan	Badung
274	Desa Jimbaran	Kuta Selatan	Badung
275	Desa Sumberkirana	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
276	Desa Pemuteran	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
277	Desa Musi	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
278	Desa Gerokgak	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
279	Desa Pengulon	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
280	Desa Tinga-tinga	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
281	Desa Tukad Sumaga	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
282	Desa Pangkung Paruk	Kecamatan Seririt	Buleleng
283	Desa Unggahan	Kecamatan Seririt	Buleleng
284	Desa Rangdu	Kecamatan Seririt	Buleleng
285	Desa Gunung Sari	Kecamatan Seririt	Buleleng
286	Desa Titab	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
287	Desa Telaga	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
288	Desa Subuk	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
289	Desa Kedis	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
290	Desa Uma Jero	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
291	Desa Bengkel	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
292	Desa Puncak Sari	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
293	Desa Tinggar Sari	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
294	Desa Sepang	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
295	Desa Sepang Kelod	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
296	Desa Tista	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
297	Desa Tigawase	Kecamatan Banjar	Buleleng
298	Desa Cempage	Kecamatan Banjar	Buleleng
299	Desa Pedawa	Kecamatan Banjar	Buleleng
300	Desa Sidatape	Kecamatan Banjar	Buleleng
301	Desa Gobleg	Kecamatan Banjar	Buleleng
302	Desa Banyuseri	Kecamatan Banjar	Buleleng
303	Desa Munduk	Kecamatan Banjar	Buleleng
304	Desa Gesing	Kecamatan Banjar	Buleleng
305	Desa Silangjana	Kecamatan Sukasada	Buleleng
306	Desa Pegayaman	Kecamatan Sukasada	Buleleng
307	Desa Ambengan	Kecamatan Sukasada	Buleleng
308	Desa Gitgit	Kecamatan Sukasada	Buleleng
309	Desa Wanagiri	Kecamatan Sukasada	Buleleng
310	Desa Lemukih Desa Galungan	Kecamatan Sawan	Buleleng
311	Desa Sekumpul	Kecamatan Sawan	Buleleng
312	Desa Sudaji	Kecamatan Sawan	Buleleng
313	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
314	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
315	Desa Depaha	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
316	Desa Tunjung	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
317	Desa Tajun	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
318	Desa Bontiing	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
319	Desa Tamblang	Kecamatan	Buleleng

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
		Kubutambahan	
320	Desa Sembiran	Kecamatan Tejakula	Buleleng
321	Desa Madenan	Kecamatan Tejakula	Buleleng
322	Desa Julah	Kecamatan Tejakula	Buleleng

Sumber: BPBD Provinsi Bali

c) Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi

Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Bali (3.142 meter) merupakan gunung berapi yang aktif. Direktorat Jenderal Vulkanologi telah menggolongkan radius bahaya letusan G. Agung kedalam tiga zona bahaya yaitu:

1) Zona Terlarang: area yang paling tinggi tingkat resiko terkena awan panas, aliran lava dan lontaran batu pijar, diharuskan terbebas dari hunian.
2) Zona Bahaya Primer: area yang dapat terkena lontaran batu pijar, hujan abu dan pasir serta aliran lahar.
3) Zona Bahaya Sekunder: area sepanjang lembah sungai yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi lahar serta banjir yang menyertainya

Sedangkan rawan bencana letusan Gunung Berapi Batur berada dalam Kaldera Batur.

Berikut adalah data desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi berdasarkan data BPBD Provinsi Bali.

Tabel 2.4.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Songan A	Kintamani	Bangli
2	Desa Songan B	Kintamani	Bangli
3	Desa Belandingan	Kintamani	Bangli
4	Desa Sukawana	Kintamani	Bangli
5	Desa Pinggan	Kintamani	Bangli
6	Desa Batur Selatan	Kintamani	Bangli
7	Desa Kedisan	Kintamani	Bangli
8	Desa Buahan	Kintamani	Bangli
9	Desa Abang Batudinding	Kintamani	Bangli
10	Desa Terunyan	Kintamani	Bangli
11	Desa Abang Songan	Kintamani	Bangli

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
12	Desa Padang Kerta	Karangasem	Karangasem
13	Desa Karangasem	Karangasem	Karangasem
14	Desa Subagan	Karangasem	Karangasem
15	Desa Pidpid	Abang	Karangasem
16	Desa Bebandem	Abang	Karangasem
17	Desa Bhuana Giri	Abang	Karangasem
18	Desa Budakeling	Abang	Karangasem
19	Desa Bungaya Kangin	Abang	Karangasem
20	Desa Jungutan	Abang	Karangasem
21	Desa Macang	Abang	Karangasem
22	Desa Sibetan	Abang	Karangasem
23	Desa Besakih	Rendang	Karangasem
24	Desa Menanga	Rendang	Karangasem
25	Desa Nongan	Rendang	Karangasem
26	Desa Pesaban	Rendang	Karangasem
27	Desa Rendang	Rendang	Karangasem
28	Desa Amertabuana	Selat	Karangasem
29	Desa Duda	Selat	Karangasem
30	Desa Duda Utara	Selat	Karangasem
31	Desa Muncan	Selat	Karangasem
32	Desa Peringsari	Selat	Karangasem
33	Desa Sebudi	Selat	Karangasem
34	Desa Selat	Selat	Karangasem
35	Desa Kerta Bhuana	Sidemen	Karangasem
36	Desa Lokasari	Sidemen	Karangasem
37	Desa Sangkan Gunung	Sidemen	Karangasem
38	Desa Sinduwati	Sidemen	Karangasem
39	Desa Talibeg	Sidemen	Karangasem
40	Desa Tangkup	Sidemen	Karangasem
41	Desa Telaga Tawang	Sidemen	Karangasem
42	Desa Wismakerta	Sidemen	Karangasem
43	Desa Baturinggit	Kubu	Karangasem
44	Desa Sukadana	Kubu	Karangasem
45	Desa Tianyar Barat	Kubu	Karangasem
46	Desa Tulamben	Kubu	Karangasem
47	Desa Tianyar	Kubu	Karangasem

Sumber: BPBD Provinsi Bali

d) Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Berdasarkan hasil kajian BMG Bali (Daryono dkk, 2006 dalam Bappeda Provinsi Bali, 2006) yang mendasarkan pada seismik gempa merusak dan sejarah gempa maka di Bali dibagi menjadi 3 zona daerah rawan gempa. Daerah sangat rawan gempa (zona 1) meliputi wilayah Bali timur (Kabupaten Karangasem dan Klungkung; daerah rawan gempa (zona 2) mencakup seluruh wilayah Bangli,

Buleleng, Jembrana dan Tabanan. Sedangkan zone 3 daerah agak rawan gempa meliputi Denpasar, Badung dan Gianyar.

e) Daerah Rawan Bencana Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang tsu artinya pelabuhan dan nami berarti gelombang. Tsunami berarti pasang laut besar di pelabuhan. Secara singkat tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti terjadinya gempa bumi, erupsi vulkanik, atau oleh land-slide (longsoran). Gelombang tsunami yang ditimbulkan oleh gaya impulsif ini bersifat transien yaitu gelombangnya bersifat sesar. Luasan rawan tsunami merupakan hasil tumpang susun antara peta permukiman dengan ketinggian tempat.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, terdapat 141 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami. Adapun daftar desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
2	Desa Jimbaran	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
3	Desa Ungasan	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
4	Desa Kutuh	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
5	Desa Pecatu	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
6	Desa Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
7	Desa Kerobokan	Kecamatan Kuta Utara	Badung
8	Desa Canggu	Kecamatan Kuta Utara	Badung
9	Desa Tibubeneng	Kecamatan Kuta Utara	Badung
10	Desa Kedonganan	Kecamatan Kuta	Badung
11	Kelurahan Kuta	Kecamatan Kuta	Badung
12	Desa Tuban	Kecamatan Kuta	Badung
13	Desa Seminyak	Kecamatan Kuta	Badung
14	Desa Legian	Kecamatan Kuta	Badung
15	Desa Pererenan	Kecamatan Mengwi	Badung
16	Desa Cemagi	Kecamatan Mengwi	Badung

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
17	Desa Munggu	Kecamatan Mengwi	Badung
18	Desa Sanur Kauh	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
19	Desa Sanur Kaja	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
20	Kelurahan Sanur	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
21	Kelurahan Pedungan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
22	Desa Sidakrya	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
23	Kelurahan Serangan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
24	Kelurahan Sesetan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
25	Desa Pemogan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
26	Desa Kesiman	Kecamatan Denpasar Timur	Denpasar
27	Desa Kertalangu	Kecamatan Denpasar Timur	Denpasar
28	Desa Candi Kusuma	Kecamatan Melaya	Jembrana
29	Desa Melaya Banjar Melaya Pantai	Kecamatan Melaya	Jembrana
30	Desa Cupel	Kecamatan Negara	Jembrana
31	Desa Banyu Biru Banjar Pebuahan	Kecamatan Negara	Jembrana
32	Desa Pengambengan	Kecamatan Negara	Jembrana
33	Kelurahan Lelateng Banjar Awen	Kecamatan Negara	Jembrana
34	Desa Baluk	Kecamatan Negara	Jembrana
35	Desa Perancak	Kecamatan Jembrana	Jembrana
36	Desa Air Kuning	Kecamatan Jembrana	Jembrana
37	Desa Yeh Kuning	Kecamatan Jembrana	Jembrana
38	Desa Delod Berawah	Kecamatan Mendoyo	Jembrana
39	Desa Medewi	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
40	Desa Pulukan	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
41	Desa Pengeragoan	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
42	Desa Negari	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
43	Desa Takmung	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
44	Desa Jumpai	Kecamatan Klungkung	Klungkung
45	Desa Gelgel	Kecamatan Klungkung	Klungkung
46	Desa Tojan	Kecamatan Klungkung	Klungkung
47	Desa Tangkas	Kecamatan Klungkung	Klungkung
48	Desa Satra	Kecamatan Klungkung	Klungkung
49	Desa Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
50	Desa Pesinggahan	Kecamatan Dawan	Klungkung
51	Desa Lembongan	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
52	Desa Jungutbatu	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
53	Desa Toya Pakeh	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
54	Desa Pedungan	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
55	Desa Kutampi Kaler	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
56	Desa Batununggul	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
57	Desa Suana	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
58	Desa Tulikup	Kecamatan Gianyar	Gianyar

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
59	Desa Lebih	Kecamatan Gianyar	Gianyar
60	Desa Keramas	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
61	Desa Medahan	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
62	Desa Pering	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
63	Desa Saba	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
64	Desa Sukawati	Kecamatan Sukawati	Gianyar
65	Desa Guwang	Kecamatan Sukawati	Gianyar
66	Desa Ketewel	Kecamatan Sukawati	Gianyar
67	Desa Batubulan	Kecamatan Sukawati	Gianyar
68	Desa Nyuh Tebel	Kecamatan Manggis	Karangasem
69	Desa Sengkidu	Kecamatan Manggis	Karangasem
70	Desa Manggis	Kecamatan Manggis	Karangasem
71	Desa Ulakan	Kecamatan Manggis	Karangasem
72	Desa Padang Bai	Kecamatan Manggis	Karangasem
73	Desa Antiga Kelod	Kecamatan Manggis	Karangasem
74	Desa Antiga	Kecamatan Manggis	Karangasem
75	Desa Bugbug	Kecamatan Karangasem	Karangasem
76	Desa Pertima	Kecamatan Karangasem	Karangasem
77	Kelurahan Subagan	Kecamatan Karangasem	Karangasem
78	Kelurahan Karangasem	Kecamatan Karangasem	Karangasem
79	Desa Tumbu	Kecamatan Karangasem	Karangasem
80	Desa Seraya Barat	Kecamatan Karangasem	Karangasem
81	Desa Seraya	Kecamatan Karangasem	Karangasem
82	Desa Bunutan	Kecamatan Abah	Karangasem
83	Desa Purwakerti	Kecamatan Abah	Karangasem
84	Desa Datah	Kecamatan Abah	Karangasem
85	Desa Labasan	Kecamatan Abah	Karangasem
86	Desa Tulamben	Kecamatan Kubu	Karangasem
87	Desa Kubu	Kecamatan Kubu	Karangasem
88	Desa Baturinggit	Kecamatan Kubu	Karangasem
89	Desa Sukadana	Kecamatan Kubu	Karangasem
90	Desa Tianyar Tengah	Kecamatan Kubu	Karangasem
91	Desa Tianyar	Kecamatan Kubu	Karangasem
92	Desa Tianyar Barat	Kecamatan Kubu	Karangasem
93	Desa Tembok	Kecamatan Tejakula	Buleleng
94	Desa Les	Kecamatan Tejakula	Buleleng
95	Desa Penuktukan	Kecamatan Tejakula	Buleleng
96	Desa Sambirenteng	Kecamatan Tejakula	Buleleng
97	Desa Tejakula	Kecamatan Tejakula	Buleleng
98	Desa Bondalem	Kecamatan Tejakula	Buleleng
99	Desa Julah	Kecamatan Tejakula	Buleleng
100	Desa Pacung	Kecamatan Tejakula	Buleleng
101	Desa Bukti	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
102	Desa Kubutambahan	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
103	Desa Bungkulan	Kecamatan Sawan	Buleleng
104	Desa Giriemas	Kecamatan Sawan	Buleleng

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
105	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
106	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
107	Kelurahan Banyuning	Kecamatan Buleleng	Buleleng
108	Kelurahan Penarukan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
109	Kelurahan Kampung Baru	Kecamatan Buleleng	Buleleng
110	Kelurahan Kampung Kajanan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
111	Kelurahan Kampung Anyar	Kecamatan Buleleng	Buleleng
112	Kelurahan Kaliuntu	Kecamatan Buleleng	Buleleng
113	Desa Baktiserage	Kecamatan Buleleng	Buleleng
114	Desa Pemaron	Kecamatan Buleleng	Buleleng
115	Desa Tukad Mungga	Kecamatan Buleleng	Buleleng
116	Desa Anturan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
117	Desa Kalibukbuk	Kecamatan Buleleng	Buleleng
118	Desa Temukus	Kecamatan Banjar	Buleleng
119	Desa Banjar	Kecamatan Banjar	Buleleng
120	Desa Kaliasem	Kecamatan Banjar	Buleleng
121	Desa Dencarik	Kecamatan Banjar	Buleleng
122	Desa Pengastulan	Kecamatan Seririt	Buleleng
123	Desa Lokapaksa	Kecamatan Seririt	Buleleng
124	Desa Tangguwisia	Kecamatan Seririt	Buleleng
125	Desa Kalianget	Kecamatan Seririt	Buleleng
126	Desa Sulanyah	Kecamatan Seririt	Buleleng
127	Desa Umaanyar	Kecamatan Seririt	Buleleng
128	Desa Seririt	Kecamatan Seririt	Buleleng
129	Desa Kalisada	Kecamatan Seririt	Buleleng
130	Desa Antap	Kecamatan Selemadeg	Tabanan
131	Desa Berembeng	Kecamatan Selemadeg	Tabanan
132	Desa Tegal Mengkeb	Kecamatan Selemadeg Timur	Tabanan
133	Desa Beraban	Kecamatan Selemadeg Timur	Tabanan
134	Desa Lalanglinggah	Kecamatan Selemadeg Barat	Tabanan
135	Desa Selabih	Kecamatan Selemadeg Barat	Tabanan
136	Desa Tibibiu	Kecamatan Kerambitan	Tabanan
137	Desa Kelating	Kecamatan Kerambitan	Tabanan
138	Desa Sudimara	Kecamatan Tabanan	Tabanan
139	Desa Pangkung Tibah	Kecamatan Kediri	Tabanan
140	Desa Belalang	Kecamatan Kediri	Tabanan
141	Desa Beraban	Kecamatan Kediri	Tabanan

Sumber: BPBD Provinsi Bali

f) Daerah Rawan Bencana Angin Kencang dan Gelombang Badai Pasang

Terjadinya bencana angin kencang di beberapa tempat di Bali pada umumnya, disamping disebabkan faktor dinamika atmosfer lokal juga disebabkan karena pengaruh cuaca ekstrim secara regional. Berdasarkan identifikasi potensi

bencana alam di Provinsi Bali, secara geografis kerawanan paling tinggi terhadap ancaman bencana angin kencang adalah seluruh kawasan pesisir di selatan Bali yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, tempat terjadinya badai tropis. Secara spesifik, daerah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi bencana angin kencang adalah Gilimanuk, kawasan pesisir Kecamatan Negara, Tabanan, Canggu, Kerobokan, Nusa Dua, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Nusa Penida dan pesisir selatan Kabupaten Karangasem.

g) Erosi / Abrasi Pantai

Erosi adalah pengikisan dan pengangkutan material hasil pelapukan batuan oleh aktivitas tenaga angin, air, gelombang laut atau es. Sedangkan abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Bali Penida, panjang pantai di Bali yang mengalami erosi/abrasi mencapai 111,652 km, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1987. Hampir seluruh kawasan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mengalami erosi/abrasi. Erosi pantai terpanjang terdapat di Kabupaten Buleleng mengingat kabupaten ini juga memiliki pantai terpanjang di Bali. Dari panjang pantai yang tererosi, sampai tahun 2013 telah ditangani dengan berbagai metode sepanjang 77, 230 km atau 69,17%.

B. Aspek Demografi

1. Struktur Penduduk

Penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Bali yang dikenal dengan istilah *Krama* Bali, memiliki tata kehidupan yang berakar pada Kebudayaan Bali yang sangat kental berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas atau unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat.

Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya dalam melaksanakan tata kehidupan *Krama* Bali sehari-harinya sehingga terwujud menjadi suatu alam kehidupan, selain khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang memiliki kekuatan tersendiri (*mataksu*).

Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Desa Adat atau disebut dengan *Desa Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinil, dan asasi) hasil karya para Leluhur Bali.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali menyatu dengan alam sehingga perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang merupakan bagian dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, tata kehidupan *Krama* Bali harus sejalan dan seirama dengan alam: "*hidup yang menghidupi, urip yang menguripi'*.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali yang menyatu dalam alam, baik secara "*sakala"* maupun *"niskala"* terdapat dalam nilai-nilai *Sat Kerthi,*, yaitu *enam sumber kesejahteraan atau kebahagiaan kehidupan* yang terdiri dari: *(1) Atma Kerthi, (2) Danu Kerthi, (3) Wana Kerthi, (4) Segara Kerthi, (5) Jana Kerthi, dan (6) Jagat Kerthi.*

Tata cara *kehidupan* masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai tersebut merupakan warisan leluhur untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan alam Bali yang khas/unik, indah, dan suci/*metaksu* yang dituangkan menjadi nilai-nilai *Tri Hita Karana*: yaitu cara hidup untuk memelihara/menjaga 3 (tiga) keseimbangan/keharmonisan manusia, yaitu:

a) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan Hyang Maha Pencipta/ Hyang Widhi Wasa yang dinamakan *Parahyangan*;
b) Keseimbangan/ keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia yang dinamakan *Pawongan;* dan

c) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan alam beserta lingkungan yang dinamakan *Palemahan*.

Tata cara kehidupan untuk memelihara keseimbangan atau keharmonisan kehidupan *Krama* Bali dalam ranah spiritualitas, adat, agama, dan budaya dilaksanakan dengan *Upakara Pakerthi Yadnya* untuk Sat Kerthi, , yaitu: *(1) Tumpek Landep, (2) Tumpek Wariga, (3) Tumpek Kuningan, (4) Tumpek Klurut, (5) Tumpek Uye atau Tumpek Kandang, (6) Tumpek Wayang*. Sistem nilai dalam kebudayaan Bali tersebut terbentuk melalui suatu pemahaman tentang *Manumadi,* yaitu sifat keutamaan kelahiran sebagai manusia; pemahaman tentang *Rta,* yaitu hukum alam; dan kewajiban manusia merawat/ memelihara keselarasan/ keharmonisan hubungan-hubungan kosmik, nilai tentang keniscayaan *Dharma* dalam pengembangan kebudayaan, *lascarya,* yaitu sikap yang ikhlas dalam melaksanakan *swadharma* sebagai kewajiban hidup manusia, dan *Karma Phala,* yaitu kepercayaan kepada kehidupan hukum sebab-akibat.

Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat (*Krama)* Bali adalah sumber daya manusia yang *unggul,* yaitu *berkualitas* dan *berintegritas* dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kualitas dan keunggulan *Krama* Bali tersebut tercermin dalam potensi yang luar biasa dengan karakter *jemet*, *seken*, *saja, beneh* dan *luwih,* serta *undagi* (kreatif dan inovatif). Dengan kualitas tersebut *Krama* Bali mampu menghasilkan karya-karya berbasis budaya, seperti tari-tarian, tetabuhan, lukisan, patung, arsitektur, dan kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif yang bernilai tinggi sehingga menarik perhatian masyarakat dunia.

2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

BPS Provinsi Bali telah merilis proyeksi penduduk Provinsi Bali tahun 2021-2025 dengan menggunakan data Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2021 diproyeksikan sebesar 4.446,6 ribu jiwa, tahun 2022 sebesar 4.518,7 ribu jiwa, tahun 2023 sebesar 4.570,7 ribu jiwa, tahun

2024 sebesar 4.622,60 ribu jiwa, dan tahun 2025 sebesar 4.674,20 ribu jiwa.

Tabel 2.6.

Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk (Dalam Ribu Jiwa)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Jembrana	282.00	283.60	285.10	286.60	288.00
2	Kab. Tabanan	451.60	453.90	456.20	458.30	460.40
3	Kab. Badung	711.40	728.00	744.80	761.80	779.10
4	Kab. Gianyar	523.60	528.10	532.50	536.90	541.10
5	Kab. Klungkung	180.70	181.40	182.10	182.80	183.40
6	Kab. Bangli	230.00	231.10	232.10	233.10	234.00
7	Kab. Karangasem	420.80	422.60	424.30	425.90	427.40
8	Kab. Buleleng	669.10	672.50	675.80	678.90	681.90
9	Kota Denpasar	997.50	1,017.60	1,037.90	1,058.30	1,078.90
10	Provinsi Bali	4,466.60	4,518.70	4,570.70	4,622.60	4,674.20

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

3. Rasio Jenis Kelamin *(Sex Ratio)*

Rasio jenis kelamin *(sex ratio)* merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali tahun 2023, dapat dihitung rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2023 diperkirakan adalah sebesar 101,07. Rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Bali diproyeksikan terus menurun dari tahun 2021. Pada tahun 2021 rasio jenis kelamin Provinsi Bali diperkirakan sekitar 101,13, menurun di tahun 2022 menjadi 101,10, dan menurun lagi di tahun 2023 yaitu 101,07.

Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 102,64 sedangkan yang terendah

adalah Kabupaten Jembrana yaitu dengan rasio jenis kelamin 100,18.

Tabel 2.7.

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021-2023

No	Wilayah	Sex Ratio		
		2021	2022	2023
1	Kab. Jembrana	100.19	100.18	100.18
2	Kab. Tabanan	100.52	100.47	100.47
3	Kab. Badung	100.33	100.29	100.26
4	Kab. Gianyar	100.58	100.54	100.53
5	Kab. Klungkung	100.29	100.37	100.28
6	Kab. Bangli	101.46	101.43	101.33
7	Kab. Karangasem	102.67	102.66	102.64
8	Kab. Buleleng	101.10	101.07	101.05
9	Kota Denpasar	102.00	101.97	101.92
	Provinsi Bali	101.13	101.10	101.07

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali 2023

4. Kepadatan Penduduk

Menggunakan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2021-2025, maka dapat dihitung proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 hingga tahun 2023. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, diperkirakan kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 adalah 792 Jiwa/Km^2, meningkat menjadi 802 Jiwa/Km^2 pada tahun 2022, dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 811 Jiwa/Km^2. Kota Denpasar diproyeksikan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 7.806 Jiwa/Km^2 pada tahun 2021, 7.964 Jiwa/Km^2 pada tahun 2022, dan 8.123 Jiwa/Km^2 pada tahun 2023.

Sedangkan wilayah yang diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 335 Jiwa/Km^2 pada tahun 2021, 337 Jiwa/Km^2 pada tahun 2022, dan 339 Jiwa/Km^2 pada tahun 2023,

Adapun hasil proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)		
			2021	2022	2023
1	Kab. Jembrana	841,8	335	337	339
2	Kab. Tabanan	839,33	538	541	544
3	Kab. Badung	418,52	1.700	1.739	1.780
4	Kab. Gianyar	368	1.423	1.435	1.447
5	Kab. Klungkung	315	574	576	578
6	Kab. Bangli	520,81	442	444	446
7	Kab. Karangasem	839,54	501	503	505
8	Kab. Buleleng	1.365,88	490	492	495
9	Kota Denpasar	127,78	7.806	7.964	8.123
10	Provinsi Bali	5.636,66	792	802	811

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2023

5. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di Provinsi Bali. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak.

Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung, seperti pertanian;
b) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; dan
c) Sektor tersier berupa jasa.

Untuk melihat data lebih rinci dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.9.

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Bali Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) (Orang)		
		2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	462,871	545,533	534,705
2	Pertambangan dan Penggalian	9,627	9,013	7,859
3	Industri Pengolahan	368,947	381,746	394,125
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,709	5,473	3,703
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,870	8,324	6,486
6	Konstruksi	162,469	159,554	155,461
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	480,622	495,533	511,721
8	Transportasi dan Pergudangan	77,347	59,540	57,669
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	327,609	236,386	233,811
10	Informasi dan Komunikasi	12,805	14,360	16,494
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	71,061	62,230	62,708
12	Real Estat	4,092	3,094	2,738
13	Jasa Perusahaan	58,490	42,832	33,764
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	125,316	114,051	136,969
15	Jasa Pendidikan	100,014	103,537	109,449
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54,886	51,303	56,262
17	Jasa lainnya	135,271	130,910	117,930
	Jumlah	2,469,006	2,423,419	2,441,854

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di tahun 2021 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 21,90%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 20,96%; dan Industri Pengolahan sebesar 16,14%.

Pembangunan tenaga kerja dapat memiliki dua makna penting, yakni sebagai subyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (input faktor produksi) serta sebagai obyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai unsur yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Jika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggunakan modal (investasi) dan teknologi yang tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan relatif berkurang digantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas tertentu dituntut dapat memenuhi kebutuhan dalam proses produksi.

Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif (*productive employment*).

Penduduk usia kerja Provinsi Bali pada Agustus 2022 sebanyak 3,56 juta orang, meningkat sebanyak 54.052 ribu orang dibanding Agustus 2021, dan meningkat sebanyak 53.593 ribu orang jika dibanding Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,74 juta orang (76,96%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 2,74 juta orang penduduk yang bekerja dan 131.469 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 158.016 orang (6,12%).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2022 tercatat sebesar 76,86%, mengalami peningkatan sebesar 3,32% persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. BPS menyebutkan bahwa TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,80%. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,57 poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Penurunan TPT ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat Provinsi Bali pada tahun 2022 masih berada dalam imbas kontraksi ekonomi akibat COVID-19 meskipun TPT Bali pada tahun 2022 belum sampai menyentuh TPT pra pandemi di tahun 2019 (1,52%)

Tabel 2.10.

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	3,288,908	3,338,767	3,455,127	3,509,090	3,563,142
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus (%)	76.56	73.77	74.32	73.54	76.86
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus (%)	1.37	1.52	5.63	5.37	4.80

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau

berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, dan kemiskinan); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara lain: pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, gini ratio, kondisi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Dalam teori pembangunan ekonomi diketahui bahwa produk domestik bruto (PDB) dan belanja negara mempunyai hubungan timbal balik yang positif. PDB adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu. PDB terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi,

konsumsi pemerintah, dan ekspor bersih. PDB menjadi dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi.

PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dilihat berdasarkan pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstannya (ADHK).

Pertumbuhan ekonomi akan dilihat dan disandingkan antar waktu seperti antar triwulan, antar tahun, maupun antar kumulatif.

a) Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Triwulan (Q to Q)

Pada triwulan IV-2022, nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp39,36 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan III-2022 yang tercatat hanya Rp38,17 triliun. Peningkatan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada triwulan IV-2022 dibandingkan dengan triwulan III-2022 (q-to-q) tercatat tumbuh sebesar 3,11 persen.

Momentum KTT G-20 yang diselenggarakan pada akhir tahun 2022 di Bali serta libur Perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi katalis pergerakan aktivitas ekonomi di Provinsi Bali. Peningkatan aktivitas transportasi udara terutama penerbangan internasional, lonjakan distribusi tenaga listrik, serta meningkatnya produksi dari industri pengolahan turut berkontribusi menggerakkan roda perekonomian Bali di penghujung tahun 2022. Corak perekonomian Bali tergambar dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang cenderung meningkat di triwulan IV-2022. Keseluruhan fenomena tersebut selanjutnya bermuara pada ekonomi Bali yang tumbuh pada triwulan IV-2022 secara q-to-q.

Secara umum hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Hanya terdapat 3 kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu lapangan

usaha Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) sedalam 14,84 persen, diikuti oleh Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) sedalam 2,97 persen, dan Kategori F (Konstruksi) sedalam 1,74 persen. Faktor cuaca buruk dan bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Bali diperkirakan menjadi penyebab turunnya nilai tambah pada industri di Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) serta Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan). Sementara itu, lesunya aktivitas pada Kategori F (Konstruksi) tercermin dari penurunan realisasi penjualan semen secara q-to-q pada kisaran -3,69 persen.

b) Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Tahun (Y to Y)

Ekonomi Bali pada triwulan III-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 8,09 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan dua triwulan sebelumnya yaitu pada triwulan I-2022 yang hanya tercatat sebesar 1,43 persen dan triwulan II-2022 sebesar 3,05 persen. Hal tersebut sejalan dengan pengendalian pandemi Covid-19 yang semakin baik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada triwulan III-2022 ini sejumlah momentum mampu mendorong ekonomi Bali untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi triwulan III-2021 walaupun masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Adanya peningkatan beberapa aktivitas seperti mulai diperbolehkannya aktivitas dengan massa dalam jumlah besar, pelaksanaan upacara agama perkawinan dan ngaben masal, hingga digelarnya *side-event* dan pertemuan berskala nasional maupun internasional di Provinsi Bali dan bertambahnya jalur jalur penerbangan internasional yang menyebabkan peningkatan kunjungan wisman. Hal tersebut menjadi kekuatan yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III- 2022(y-on-y).

Ekonomi Bali pada triwulan IV-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat

tumbuh sebesar 6,61 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan dua triwulan sebelumnya yaitu pada triwulan I-2022 yang hanya tercatat sebesar 1,48 persen, triwulan II-2022 sebesar 3,09 persen, sedangkan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan III-2022 yang mencapai 8,10 persen.

Pemulihan ekonomi Bali perlahan mulai tampak meskipun belum sepenuhnya mampu mengembalikan gemerlap ekonomi seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada triwulan IV-2022 ini sejumlah momentum mampu mendorong ekonomi Bali untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi triwulan IV-2021. Perhelatan KTT G-20 di Provinsi Bali, momentum liburan Natal dan Tahun Baru serta berbagai pertemuan berskala nasional maupun internasional di Provinsi Bali yang didukung oleh peningkatan kapasitas transportasi penerbangan internasional sehingga akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Bali. Hal tersebut menjadi kekuatan yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV-2022 (y-on-y).

Secara keseluruhan kategori lapangan usaha penyusun PDRB sebanyak 13 kategori tumbuh, namun menyisakan empat kategori yang tercatat mengalami kontraksi pada triwulan IV-2022 yaitu Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), Kategori C (Industri Pengolahan), Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), dan Kategori J (Informasi dan Komunikasi). Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) yaitu sebesar 39,36 persen, diikuti pertumbuhan pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yaitu sebesar 22,56 persen, dan pertumbuhan pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yaitu mencapai 18,05 persen.

c) Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Bali (C to C)

Berdasarkan gabungan pertumbuhan triwulan I-2022 sampai dengan triwulan IV-2022 atau kumulatif triwulan IV-2022, perekonomian Bali tercatat mengakumulasi pertumbuhan sebesar 4,84 persen. Kegiatan besar Presidensi KTT G-20 dan momentum libur Natal dan tahun baru mendorong laju pemulihan ekonomi Bali. Ruang untuk berproduksi bagi lapangan usaha di Bali menjadi semakin luas dengan perbaikan tingkat permintaan yang selanjutnya menyebabkan aktivitas ekonomi Bali mengalami peningkatan secara kumulatif triwulan IV-2022. Hal tersebut tercermin pada laju pertumbuhan tertinggi yang tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 21,55 persen, diikuti Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) sebesar 16,02 persen dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 13,84 persen.

Tingginya pertumbuhan ketiga kategori lapangan usaha tersebut semakin menjadi penegas bahwa roda ekonomi Bali kembali berputar setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut tercermin dari peningkatan lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang mengalami peningkatan sangat drastis. Selama Januari-Desember 2022 keberangkatan penumpang rute penerbangan internasional tercatat sebesar 2.210.048 penumpang jauh meningkat dibanding Januari-Desember 2021 yang hanya 464 penumpang. Kondisi yang sama terjadi pada ASDP yang ditunjukkan oleh dari laporan penyeberangan penumpang yang melalui Gilimanuk dan Padangbai pada periode Januari-Desember 2022 yang tercatat sebanyak 700.092 orang dibandingkan Januari-Desember 2021 yang hanya sebesar 160.825 orang.

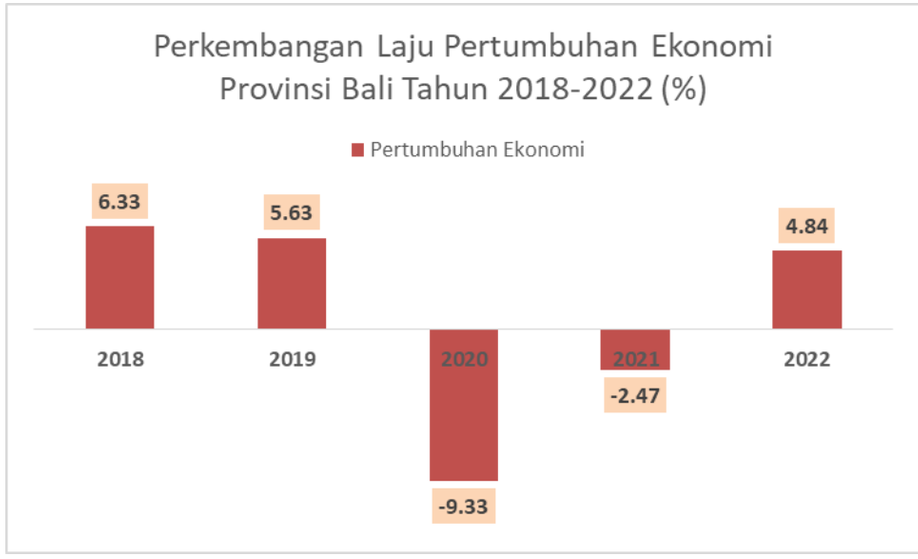
Peningkatan aktivitas ekonomi Bali juga ditunjukkan oleh meningkatnya konsumsi listrik pada tahun 2022. Laporan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi menunjukkan distribusi listrik selama tahun 2022 meningkat pada kisaran 16 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2021. Jika dilihat

menurut segmentasi konsumennya terjadi peningkatan masing-masing pada kelompok multiguna pada kisaran 34 persen, kelompok pengguna bisnis pada kisaran 32 persen, kelompok pengguna sosial 16 persen, kelompok pengguna industri 6 persen.

Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) juga merupakan salah satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi. Situasi ini tidak terlepas dari pengaruh semakin padatnya lalu lintas penerbangan internasional yang berpengaruh positif terhadap kedatangan wisatawan mancanegara. Selama Januari-Desember 2022, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mencapai 2.155.147 kunjungan meningkat hingga lebih dari 2 juta persen dibandingkan periode Januari-Desember 2021 yang hanya tercatat sebanyak 51 kunjungan wisatawan mancanegara. Selain wisatawan mancanegara, peningkatan nilai tambah pada kategori lapangan usaha I (Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum) di Bali juga disumbangkan oleh kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Data Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatatkan jumlah wisnus pada Januari-Desember 2022 sebanyak 8.052.974 kunjungan meningkat dibandingkan selama tahun 2021 yang hanya 4.301.592 kunjungan.

Selain ketiga lapangan usaha tersebut, lapangan usaha lainnya juga secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2022. Namun demikian, dari 17 lapangan usaha penyusun PDRB, masih terdapat empat kategori yang tercatat mengalami kontraksi secara (c-to-c). Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) terkontraksi 3,61 persen, Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) terkontraksi 0,92 persen, Kategori J (Informasi dan Komunikasi) mengalami kontraksi 0,58 persen, dan Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang) mengalami kontraksi 0,51 persen secara (c-to-c).

Bila dilihat berdasarkan penciptaan sumber pertumbuhannya, ekonomi Bali yang tumbuh sebesar 4,84 persen secara kumulatif triwulan IV-2022 (c-to-c) bersumber dari Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan sumbangan sebesar 2,06 persen, Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan sumbangan sebesar 0,99 persen, dan Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dengan sumbangan sebesar 0,56 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan pertumbuhan sebesar 1,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali kumulatif triwulan IV-2022 (c-to-c).

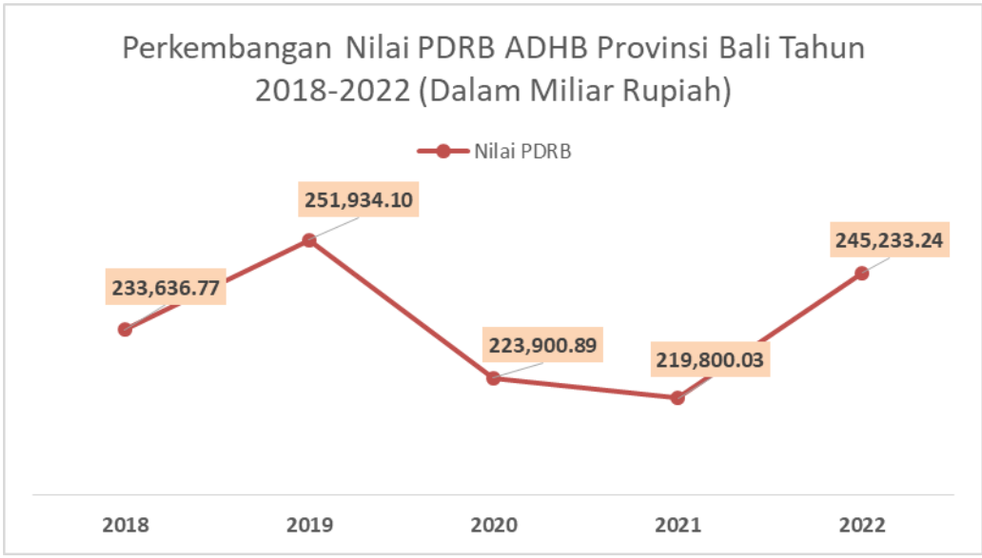


Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.3.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara Kumulatif (C to C) Tahun 2018-2022

Apabila dilihat berdasarkan nilai (nominal) pertumbuhan ekonominya yang direpresentasikan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun 2021. Tahun 2022 tercatat nilai PDRB ADHB Provinsi Bali adalah Rp245.233,24 milyar atau meningkat 11,57% dari tahun 2021 dengan nilai Rp219.800,03 milyar.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.4.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2018-2022

2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Penghitungan inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada wilayah amatan. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. IHK merupakan Indeks yang menghitung rata-rata perubahan hargadari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari

waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Pada bulan Februari 2023, IHK Gabungan Kota Denpasar dan Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi setinggi 0,07 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 114,00 pada Januari 2023 menjadi 114,08 pada Februari 2023. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) Februari 2023 sebesar 0,73 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2023 terhadap Februari 2022 atau YoY) tercatat setinggi 6,35 persen.

Inflasi terjadi karena kenaikan harga barang/jasa konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada lima kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,85 persen; kelompok I (makanan, minuman dan tembakau) setinggi 0,54 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) setinggi 0,30 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,17 persen; dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,05 persen. Sebaliknya, empat kelompok tercatat deflasi, yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sedalam 2,21 persen; kelompok VI (transportasi) sedalam 0,38 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) sedalam 0,09 persen; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) sedalam 0,05 persen.

Dari 90 kota IHK, 63 kota tercatat mengalami inflasi dan 27 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Ternate (Maluku Utara) setinggi 1,85 persen. Sementara itu, inflasi terendah tercatat sebesar 0,04 persen yang terjadi di empat kota, yaitu Kota Denpasar (Bali), Kota Bengkulu (Bengkulu), Kota Madiun (Jawa Timur) dan Kota Lubuklinggau (Sumatera Selatan). Deflasi terdalam tercatat di Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara) 0,98 persen, sementara deflasi terdangkal tercatat di Kota Sumenep (Jawa Timur) 0,02 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar menempati

urutan ke-60 dan Kota Singaraja menempati urutan ke-25 dari 63 kota yang mengalami inflasi.

3. PDRB per Kapita Provinsi Bali

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha.

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.

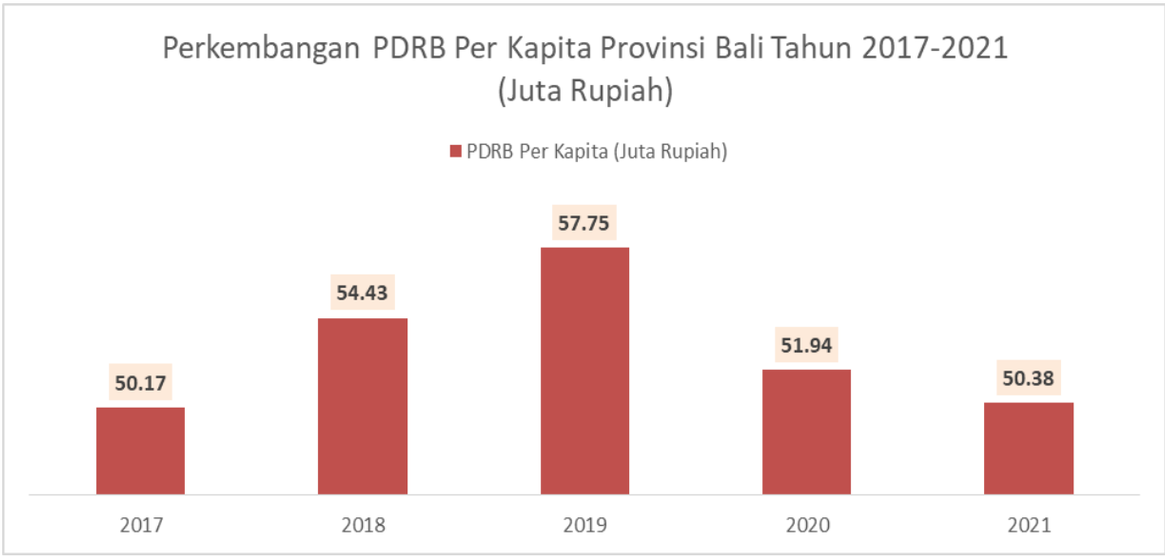
Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun.

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,21 juta pada

tahun 2016 menjadi Rp50,17 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2018 PDRB perkapita Bali sebesar Rp54,43 juta. Pada tahun 2019, PDRB Per Kapita Provinsi Bali meningkat menjadi Rp57,75 juta. Pada tahun 2020, diperkirakan PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi Rp51,94 Juta. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi Rp50,38 Juta.

Namun demikian PDRB per kapita Bali masih berada di bawah angka rata-rata nasional, hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh semua *stakeholder* untuk lebih meningkatkan PDRB per kapita penduduk Bali. Berdasarkan data BPS Nasional, pada tahun 2018, PDRB Perkapita nasional adalah sebesar 55,98 Juta sedangkan Provinsi Bali adalah sebesar 54,43 Juta. Pada tahun 2021, PDRB Perkapita tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 260,44 Juta.

PDRB Perkapita Provinsi Bali tahun 2021 juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada tahun 2021, target PDRB Perkapita yang ditetapkan adalah 56 juta sampai 61 juta. Target ini berada jauh di atas realisasi yaitu yang hanya 50,38 Juta. Dampak dari pandemi Covid-19 turut menjadi andil paling besar penyebab turunnya angka PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.5.
PDRB Per Kapita Bali Tahun 2017-2021

4. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

Tabel 2.11.
Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini

Indeks Gini	Klasifikasi
GR ≤ 0,20	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
0,20 < GR ≤ 0,39	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
0,39 < GR ≤ 0,59	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.

Indeks Gini	Klasifikasi
0,59 < GR ≤ 0,79	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi
GR > 0,79	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

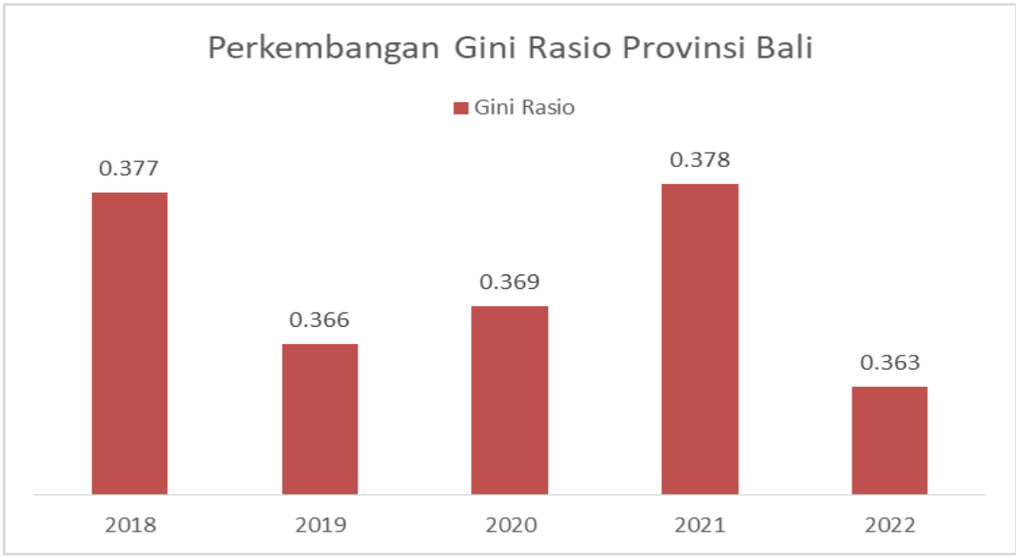
Sumber: BPS

Gini ratio Provinsi Bali pada 2022 tercatat sebesar 0,363 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Nilai ini mengalami penurunan dari kondisi 2021 dengan indeksi Gini 0,378 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali tahun 2022 mengalami penurunan.

Angka Gini Ratio Bali tersebut di atas sudah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan target Gini Ratio sebesar 0,3690. Target Gini Ratio Bali ditetapkan menurun setiap tahun hingga di tahun 2023 target yang harus dicapai adalah 0,3450.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,371, angka ini tidak berubah dibanding nilai gini ratio kondisi Maret 2022. Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio September 2022 tercatat sebesar 0,282, nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,012 poin jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,294. Kedua indeks gini ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kota Denpasar merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,3680. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 0,2810. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada tahun 2022 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.6.
Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2018-2022

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan untuk merepresentasikan ketimpangan pengeluaran adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Bali tercatat sebesar 18,04 persen yang berarti distribusi pengeluaran penduduk Bali berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat 0,19 persen poin dibandingkan dengan Maret 2021 yang tercatat sebesar 17,85 persen, dan mengalami penurunan -0,59 persen poin jika dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 18,63 persen.

Menurut daerah perkotaan dan perdesaan, pada September 2021 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan di Bali tercatat sebesar

17,60 persen, sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 21,35 persen. Dengan demikian daerah perkotaan dan daerah perdesaan di Bali menurut kriteria Bank Dunia berada pada ketimpangan rendah.

5. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

Data mengenai kondisi kemiskinan di Provinsi Bali diperoleh dari BPS Provinsi Bali. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan di Provinsi Bali memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari provinsi lain di Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik kemiskinan di Provinsi Bali:

- Ketergantungan pada Pariwisata: Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia. Namun, sebagian besar penduduk di Bali masih mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber penghasilan utama mereka. Ketika terjadi penurunan pariwisata, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, pendapatan penduduk Bali

yang terkait dengan pariwisata dapat terganggu secara signifikan, menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan.

- Ketimpangan Wilayah: Sebagian besar kemiskinan terkonsentrasi di daerah pedesaan dan terpencil, terutama di wilayah timur Bali. Daerah-daerah ini biasanya memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, yang menyebabkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
- Informalitas dalam Pekerjaan: Banyak penduduk Bali bekerja dalam sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pengrajin, atau pekerja rumah tangga. Pekerjaan informal seringkali tidak stabil dan berbayar rendah, sehingga menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi.
- Keterbatasan Akses ke Pendidikan dan Kesehatan: Meskipun Bali memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang relatif baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, masih terdapat keterbatasan akses terutama di daerah pedesaan.
- Migrasi Internal: Bali juga menghadapi masalah migrasi internal yang signifikan, dengan banyak penduduk desa yang bermigrasi ke daerah perkotaan seperti Denpasar untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2022 sebesar 4,53 persen. turun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,19 persen poin terhadap September 2021.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2022 sebanyak 205,36 ribu orang, turun 0,32 ribu orang terhadap Maret 2022 dan turun 6,10 ribu orang terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 4,12 persen, turun 0,11 persen poin dari kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 4,23 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 5,58 persen, naik 0,19 persen

poin jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 5,39 persen.

Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Bali pada September 2022 di daerah perkotaan turun sebanyak 2,24 ribu orang (dari 136,06 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 133,82 ribu orang pada September 2022). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin Bali di daerah perdesaan naik sebanyak 1,93 ribu orang (dari 69,62 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 71,55 ribu orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan di Bali pada September 2022 tercatat sebesar Rp515.037,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp357.640,- (69,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp157.398,- (30,56 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Bali memiliki 4,29 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.209.509,-/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2022

No	Penduduk Miskin	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah (Ribu Jiwa)	168,34	156,91	165,19	201,97	205,68
2	Persentase (%)	3,91	3,61	3,78	4,53	4,57

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standard hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup yang layak digambarkan oleh

Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan (PPP), yang ditentukan dari nilai pengeluaran riil per kapita dan disparitas daya beli.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Pada tahun 2022, pembangunan manusia di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di tahun ini tercatat sebesar 76,44 atau tumbuh 0,99 persen (meningkat 0,75 poin) dibandingkan capaian tahun 2021.

Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,60 tahun, lebih lama 0,36 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya.

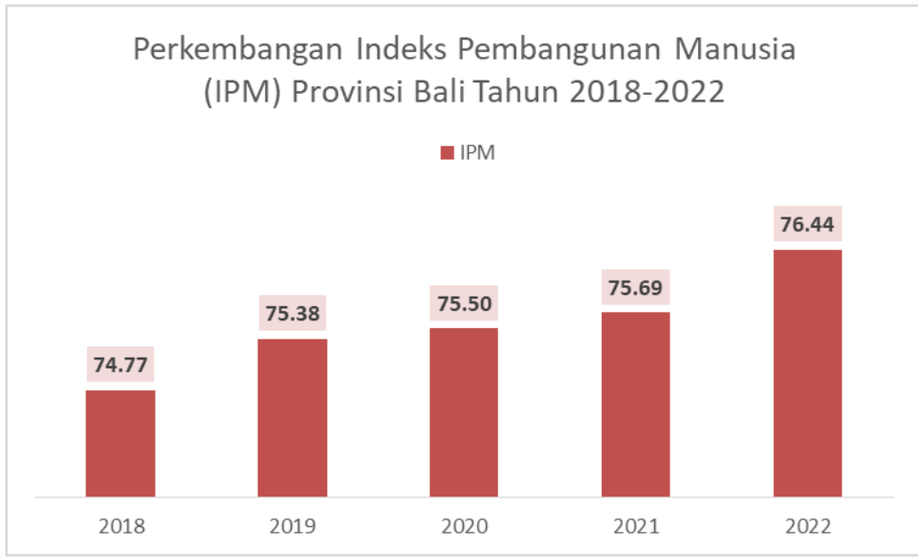
Dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,48 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,40 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,33 tahun, dari 9,06 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,39 tahun pada tahun 2022.

Demikian juga dari dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita, pada tahun ini turut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2022 tercatat sebesar 13,94 juta rupiah per tahun atau meningkat 122 ribu rupiah dibandingkan tahun 2021.

Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2022. IPM

Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 76,44 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,72 persen per tahun dan berada pada level “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Bali terus membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Bali.

Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.7.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2.13.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen
Tahun 2018-2022

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	71,68	71,99	72,13	72,24	72,60
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,33	13,4	13,48
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,65	8,84	8,95	9,06	9,39
Pengeluaran Perkapita	Rp000	13.886	14.146	13.929	13.820	13.942
IPM		74,77	75,38	75,50	75,69	76,44

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan

Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu ini telah mencapai hasil cukup menggembirakan, perkembangan AMH Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2016-2021. Pada tahun 2021, AMH di Provinsi Bali adalah 95,00% yang artinya sebanyak 95,00% penduduk usia 15 tahun ke atas sudah mampu untuk membaca dan menulis latin. Meskipun sudah diatas 90%, angka ini belum belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana di tahun 2021 yaitu sebesar 99,88%.

Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, data disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.14.
Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016-2021

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jembrana	93,74	93,80	93,08	95,40	95,26	95,76
2	Tabanan	93,88	94,00	93,32	94,93	93,19	96,89
3	Badung	97,05	97,10	96,81	99,81	97,71	98,61
4	Gianyar	93,27	93,30	92,35	94,00	95,36	96,01
5	Klungkung	85,82	85,80	86,82	87,81	91,57	88,85
6	Bangli	88,09	88,20	87,43	89,06	90,43	89,16
7	Karangasem	81,74	81,80	84,91	85,01	89,05	84,08
8	Buleleng	89,41	89,50	90,80	91,40	92,13	92,74
9	Kota Denpasar	98,68	98,70	98,02	99,31	99,00	99,30
10	Provinsi Bali	92,82	92,90	92,98	94,53	94,80	95,00

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

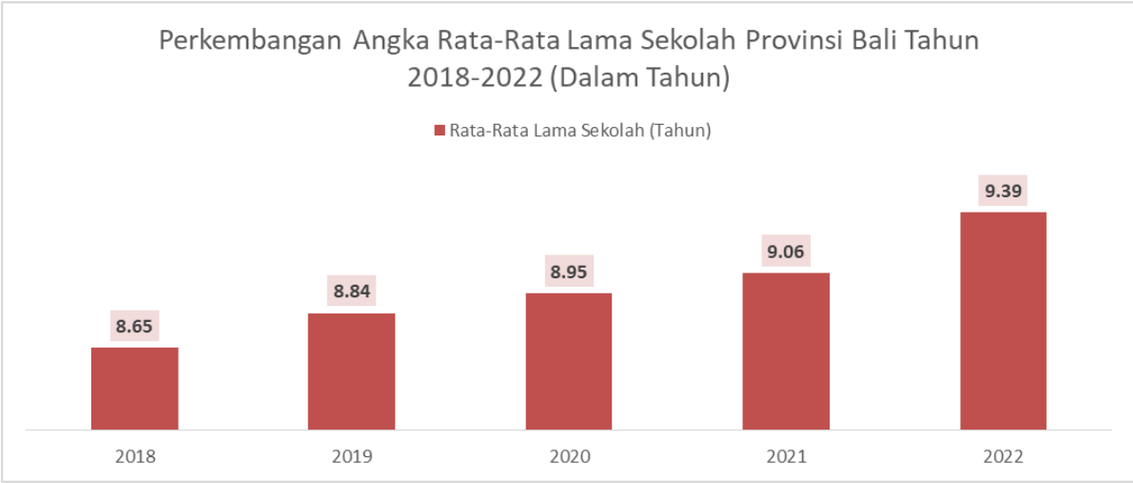
b) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Selama kurun waktu 2018-2022 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 rata-rata lama sekolah adalah sebesar 8,65 tahun dan meningkat menjadi 9,39 pada tahun 2022. Artinya, penduduk Provinsi Bali yang berusia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,39 tahun atau telah menamatkan kelas IX atau kelas 3 SMP.

Angka lama sekolah tahun 2022 ini masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada tahun 2022, target angka lama sekolah adalah 10,56 tahun.

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.8.
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2018-2022

c) Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) didefinisikan sebagai Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya

APK merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya

masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SD pada tahun 2018 mencapai 103,02%. Untuk tahun 2019, APK untuk SD meningkat dari tahun 2018 menjadi 103,52%. Pada tahun 2020, APK untuk SD menurun menjadi 102,87%. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 103,09%.

Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SMP pada tahun 2018 mencapai sebesar 96,14%. Untuk tahun 2019, APK untuk SMP meningkat dari tahun 2018 menjadi 97,26% dan tahun 2020 menjadi 97,40%. Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98,68%.

Untuk jenjang SMA/SMK, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2018 mencapai sebesar 87,74%. Tahun 2019, APK untuk SMA/SMK meningkat dari tahun 2018 menjadi 87,96% dan tahun 2020 menjadi 88,67%. Tahun 2021 meningkat menjadi 89,87%.

Untuk jenjang Perguruan Tinggi, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 30,51% dan di tahun 2019 menurun pada angka yang mencapai 29,84%. Pada tahun 2020 APK Perguruan Tinggi meningkat menjadi 30,55%. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 30,64%

Angka APK perguruan tinggi ini mengindikasikan baru 1/3 jumlah penduduk usia perguruan tinggi di Provinsi Bali yang benar-benar mengenyam bangku perguruan tinggi. Selebihnya mereka tidak mengenyam pendidik tinggi, hanya menamatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Berikut data APK ditampilkan secara tabel, seperti berikut ini :

Tabel 2.15.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD	104,35	103,02	103,52	102,87	103,09
SLTP	96,29	96,14	97,26	97,40	98,68
SLTA	90,04	87,74	87,96	88,67	89,87
Perguruan Tinggi	29,40	30,51	29,84	30,55	30,64

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

d) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2020, struktur demografi penduduk Provinsi Bali pada kelompok usia 15 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi yang ditamatkan masih didominasi pendidikan 12 tahun (SD-SLTA atau sederajat). Apabila diakumulasikan, penduduk usia tersebut memiliki komposisi sebesar 70,09%. Penduduk dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi) yaitu dimulai dari DI hingga S3, komposisinya hanya 14,18%. Pada sisi lainnya, masih terdapat penduduk Provinsi Bali pada usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijasah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk dengan kriteria ini adalah sebesar 14,92%, yang bahkan lebih besar dari jumlah penduduk yang telah mengenyam pendidikan tinggi.

Apabila melihat pada trend komposisi pada masing-masing kelompok: penduduk tanpa ijasah, penduduk yang hanya tamatan SD, dan hanya tamatan SLTP komposisinya mengalami penurunan. Penurunan pada masing-masing kelompok relatif menggemberikan karena pada 2 tahun sebelumnya justru meningkat. Penurunan yang paling tinggi terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki ijasah. Pada tahun 2019, kelompok masyarakat ini memiliki komposisi 17,11% yang bahkan komposisinya lebih besar dari penduduk yang sudah mengenyam pendidikan tinggi (13,26%). Pada tahun 2020, penduduk pada kelompok ini menurun cukup drastis komposisinya menjadi 14,92%.

Besaran komposisi ini bahkan paling rendah selama 5 tahun terakhir (2015-2019).

Pada sisi lainnya, penduduk dengan ijasah tertinggi SLTA sederajat, DI-DIII, DIV-S3, komposisinya terus mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan ini tidak signifikan, namun konsistensi peningkatan komposisi ini mengindikasikan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Bali berdasarkan tingkat pendidikan terus mengalami perbaikan.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah menetapkan target angka kelulusan SD-SLTA adalah 100% dan angka putus sekolah 0% untuk SD, 0,05% untuk SLTP, dan 0,20% untuk SLTA. Dengan penetapan target ini diharapkan nantinya, penduduk dengan kelompok usia di atas 15 tahun namun tidak memiliki ijasah dapat dientaskan.

Tabel 2.16.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2016-2021

No	Uraian	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tidak Punya	16,95	17,70	18,19	17,11	14,92	13,44
2	SD Sederajat	27,06	21,48	20,80	20,02	20,08	20,29
3	SLTP Sederajat	13,27	17,75	17,65	19,05	17,77	19,90
4	SLTA Sederajat	31,05	31,70	31,05	30,55	33,05	32,14
5	DI/DII/DIII	3,75	4,07	3,84	4,05	4,25	3,98
6	DIV/S1/S2/S3	7,92	7,31	8,47	9,21	9,93	10,26

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

e) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa

besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh

Angka Partispasi Murni (APM), merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di tingkat tertentu. Seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2017-2021 berturut-turut adalah sebagai berikut: 96,09; 96,19; 96,78; 96,84; dan 97,20. Angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, target APM tingkat SD/MI/ Paket A adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah 97,20%.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B pada tahun 2016-2021 berturut-turut adalah sebagai berikut: 84,99; 85,32; 86,00; 86,75; 87,26; dan 87,11. Angka tersebut belum mencapai target. Pada tahun 2021, target APM tingkat SMP/MTs/ Paket B adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah 87,11%.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2016-2021 berturut-turut adalah sebagai berikut; 71,71; 72,4; 73,00; 72,93; 73,29; dan 74,82. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, target APM tingkat SMA/MA/ Paket C adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah 74,82%.

Tabel 2.17.
Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2016-2021

No	Uraian	Angka Partisipasi Murni (Persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/Sederajat	95.75	96.09	96.19	96.78	96.84	97,20
2	SMP/Sederajat	84.99	85.32	86.00	86.75	87.26	87.11
3	SMA/Sederajat	71.71	72.40	73.00	72.93	73.29	74,82
4	Perguruan Tinggi	21.80	22.78	24.06	0.00	24.68	25,28

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup sebesar 4,5. Pada tahun 2019, AKB Provinsi Bali adalah 5,00 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan dan tetap 5,51 dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 5,80. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut

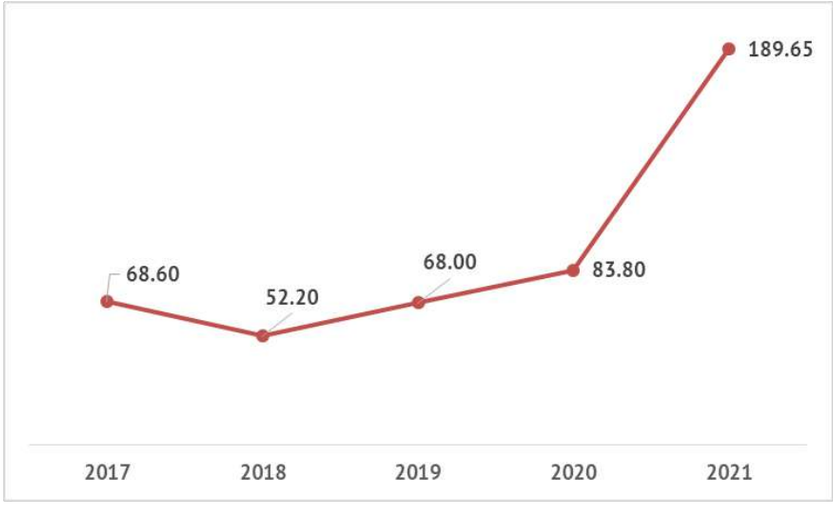


Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.9.
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. AKI di Provinsi Bali dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah mencapai target kurang dari 102/100.000 Kelahiran Hidup. Namun demikian, trendnya cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017, AKI Provinsi Bali tercatat 68,60 yang kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 52,20. Setelah tahun 2018, AKI Provinsi Bali terus mengalami peningkatan hingga di Tahun 2021 mencapai AKI tertinggi yaitu 189,65. Tingginya AKI di Provinsi Bali pada tahun 2021 terjadi terkait dengan tingginya angka kematian akibat Covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.10.
Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

c. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Umur harapan

hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya umur harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan angka yang diterbitkan BPS.

Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Bali selama selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2018, UHH Provinsi Bali tercatat sebesar 71,68 Tahun. Angka usia ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022, UHH Provinsi Bali adalah sebesar 72,60 Tahun. UHH tahun 2021 ini belum melampaui target dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada tahun 2022, target UHH yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah 72,3 tahun.

Apabila diperinci pada masing-masing kabupaten/kota, UHH tertinggi terdapat di Kabupaten Badung yaitu sebesar 75,51 Tahun dan Kota Denpasar yaitu 75, 30 Tahun. UHH terendah terdapat di Kabupaten Karangasem yaitu 70,89 tahun dan Kabupaten Bangli yaitu 70,97 tahun.

Tabel 2.18.
Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

No	Wilayah	Umur Harapan Hidup (UHH)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jembrana	71,91	72,21	72,35	72,46	72,82
2	Tabanan	73,23	73,53	73,65	73,75	74,10
3	Badung	74,71	74,99	75,10	75,18	75,51
4	Gianyar	73,26	73,56	73,68	73,78	74,13
5	Klungkung	70,70	71,06	71,25	71,41	71,83
6	Bangli	70,05	70,37	70,52	70,62	70,97
7	Karangasem	70,05	70,35	70,47	70,56	70,89
8	Buleleng	71,36	71,68	71,83	71,95	72,32
9	Kota Denpasar	74,38	74,68	74,82	74,93	75,30
10	Provinsi Bali	71,68	71,99	72,13	72,24	72,60

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

d. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting dan merupakan penyebab tidak langsung kematian pada balita. Selain kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta, balita gizi buruk juga rentan terkena penyakit infeksi sehingga dibutuhkan penanganan secara cepat dan tepat.



Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

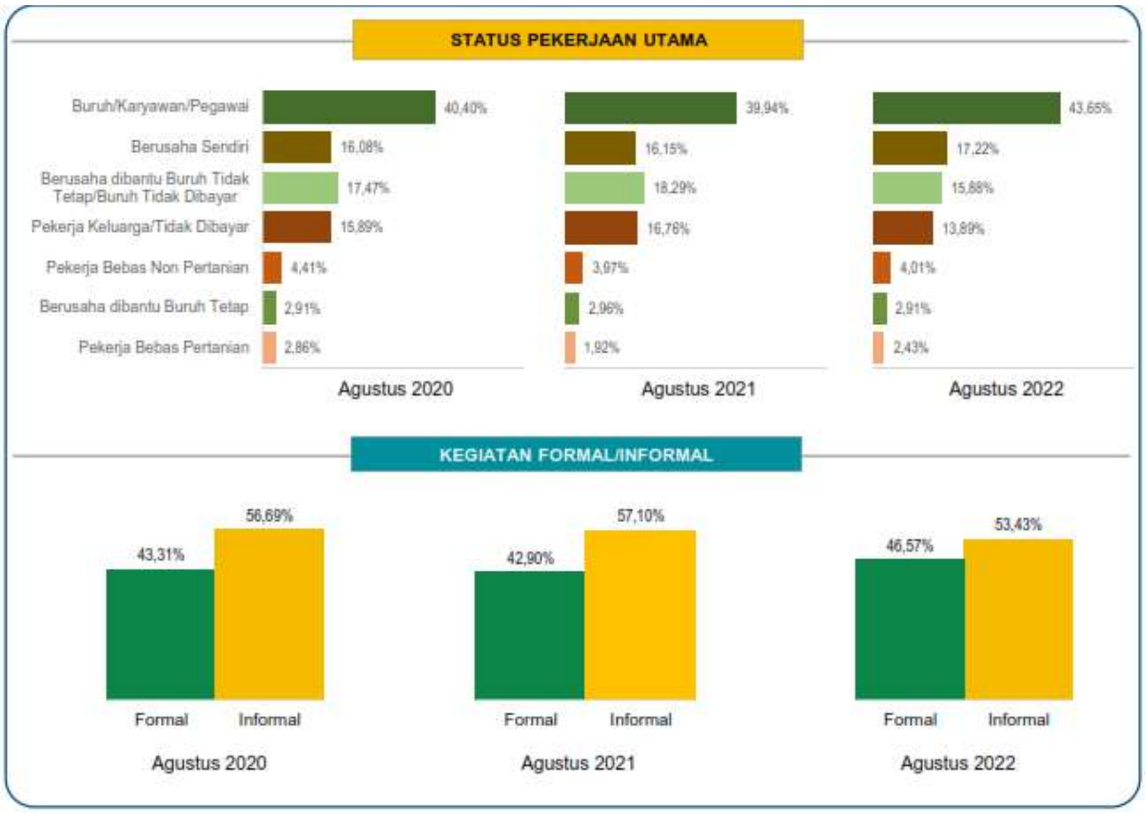
Gambar 2.11.
Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2018-2021

Berdasarkan gambar 2.9 terlihat bahwa proporsi balita gizi buruk/kurang telah mengalami penurunan signifikan dari tahun 2018 sebesar 6,3% menjadi sebesar 3,5% pada tahun 2019, tahun 2020 sebesar 2,1% dan pada tahun 2021 menjadi 1,9%.

3. Ketenagakerjaan

Seperti 2 tahun sebelumnya, pada Agustus 2022 penduduk Bali sebagian besar berstatus buruh/karyawan/pegawai pada pekerjaan utamanya, yaitu sebesar 43,65%, sementara status pekerja bebas pertanian masih yang terendah dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 2,43%. Dibandingkan Agustus 2021, status berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas non pertanian, mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,07 persen poin; 3,71 persen poin; 0,52 persen poin; dan 0,03 persen poin. Status pekerjaan yang lain mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada status pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 2,87 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,39 juta orang (53,43%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,21 juta orang (46,57%). Dibandingkan Agustus 2021, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 3,66 persen poin.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.12.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020-Agustus 2022

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 30,98%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi Universitas sebesar 12,68%.

Dibandingkan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan SMP dan Universitas mengalami penurunan persentase masing-masing sebesar 0,68 persen poin dan 0,87 persen poin. Sementara persentase penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, SMA, SMK, dan Diploma I/II/III mengalami kenaikan, dengan kenaikan terbesar pada pekerja berpendidikan Diploma I/II/III, yakni sebesar 0,67 persen poin.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan merupakan sumber daya utama, penting, dan strategis yang dimiliki oleh Bali. Lahirnya kebudayaan Bali dapat dilihat dan dipahami dari lintasan sejarah panjang. Bali telah dihuni oleh Bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Dari potret perjalanan historis wilayah ini, Bali memiliki komposisi masyarakat dan warisan budaya yang unik, tidak ada satu pun etnis di dunia ini yang persis seperti Bali. Kondisi ini memberi kesan bahwa Bali bukanlah suatu wilayah migrasi yang baru tumbuh. Bukan tempat-tempat orang yang baru bermukim untuk membentuk rumah dan lingkungannya melainkan suatu komunitas yang telah sekian lama menempuh evolusi yang panjang. Keseharian *Krama* Bali dengan budaya yang unik, senantiasa menampilkan kontur budaya lokal dan semua itu menunjukkan bahwa perjalanan Bali telah melewati alur sejarah yang panjang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari sekian banyak temuan arkeologis di berbagai wilayah Bali yang menceritakan tentang masa lalu perjalanan panjang Pulau Bali. Seperti kehidupan pada umumnya, masa lalu Bali direntang dari masa-masa awal kehidupan.

Kebudayaan *Krama* Bali juga tercermin dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali dengan tata kehidupan yang diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* dan memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub dan memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang terikat oleh *Parahyangan, Pawongan,* dan *Palemahan*.

Kehidupan budaya *Krama* Bali juga tercermin dalam pertanian dalam bentuk *Sistem Subak* sebagai manifestasi dari filosofi *Tri Hita Karana*, yang merupakan suatu kearifan lokal dengan budaya

sangat tinggi sehingga dikagumi oleh dunia. Sistem *Subak* sebagai suatu sistem pertanian budaya Bali mendapat pengakuan dan pelindungan dari UNESCO, sebagai Warisan Dunia (*World Heritage*).

Daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan dan *Acropolis* Bedulu, ibukota penting dalam periode Prasejarah dan periode Sejarah Bali adalah situs yang merupakan museum hidup mengenai tampilan tradisi pertanian yang panjang. Ini menunjukkan bukti hidupnya tradisi asketis (*Dharmasunya* di berbagai pasraman/pertapaan), presentasi dari sistem ketatanegaraan klasik (*statecraft*) Bali, dan menyimpan kekayaan artefak serta literasi dari beberapa periode.

Hal itu menunjukkan bahwa, dalam alur sejarah panjang kehidupan *Krama* Bali, kebudayaan merupakan bagian dari keseharian hidupnya, yang dilakukan secara aktif, baik individu maupun kolektif, sehingga kebudayaan Bali terus hidup dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah kehidupan masyarakat sepanjang zaman.

Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, telah menjadikan Bali pulau yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan *mataksu* yang menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, di dalam *Lontar Mpu Kuturan* disebutkan bahwa Bali sebagai *Padma Bhuwana*, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali.

Oleh karena itu, kiranya tepat masyarakat dunia, bahkan pemimpin dunia memberi berbagai julukan atau sebutan untuk Bali, yaitu*: The Island of Gods* (Pulau Dewata*), The Island of Thousand Temple* (Pulau Seribu Pura), *The Morning of the World* (Mentari Pagi di Pulau Bali atau Paginya Dunia), *The Paradise Island* (Pulau Surga), *The Last Paradise* (Surga Terakhir di Bumi), *dan The Island of Love* (Pulau Cinta).

Kondisi seni budaya di Bali perkembangannya selama lima tahun ini cukup baik, penyelenggaran *event-event* seni budaya selalu banyak diminati masyarakat Bali. Hal ini banyak

dilatarbelakangi oleh budaya Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus berlangsung di Bali.

Pusat kegiatan seni budaya di Bali selain berada di Banjar/Desa Adat/Pakraman juga banyak bermunculan dari sanggar-sanggar tari dan budaya yang lokasinya banyak tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Jumlah kelompok kesenian di Provinsi Bali Pada tahun 2021 adalah sebanyak 11.851 kelompok, serta jumlah gedung keseniannya sebanyak 8 gedung.

Tabel 2.19.
Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Gedung Kesenian/Pertunjukkan	Grup Kesenian
1	Karangasem	Gedung Kesenian Amlapura	756
2	Klungkung	Gedung Kesenian Bali Budaya Ida I Dewa Agung Istri Sania	1.860
3	Bangli	Gedung Kesenian Sasana Budaya Giri Kusuma	1.190
4	Gianyar	Gedung Kesenian Bali Budaya	1.113
5	Badung	Gedung Kesenian Jaba Pura Lingga Buana	3.327
6	Denpasar	-	588
7	Tabanan	Gedung Kesenian Ketut Mario	1.078
8	Buleleng	Gedung Kesenian Gede Manik	960
9	Jembrana	Gedung Kesenian Jagat Nata	976
Jumlah		8 gedung	11.851

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2022

Kondisi keolahragaan di Bali cukup berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah cabang olahraga di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 47 cabang olahraga. Sedangkan untuk jumlah gedung olahraga/stadion di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 31 gedung.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Bidang Pendidikan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali, Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan secara berjenjang mulai dari tingkat Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara Gratis (Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Mendirikan Pendidikan berbasis Keagamaan Hindu: PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dalam bentuk *Pasraman* (formal, nonformal, dan informal) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.

Fokus yang akan dituju di Bidang Kesehatan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan *Krama* Bali. Pengembangan sistem dan *data based* riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan *Krama* Bali berbasis Kecamatan yang terintegrasi (RS milik Pemda dan Swasta) di seluruh wilayah Bali

Provinsi Bali memiliki luas daratan sebesar 5.636,66 Km^2, yang dibagi dalam 9 daerah kabupaten/kota dan 57 kecamatan. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah daratan terluas, yaitu 1.365,88 Km^2 (±24,25%) dan Kota Denpasar memiliki luas wilayah terkecil yaitu 127,78 Km^2 (±2,20%). Perkembangan wilayah di Provinsi Bali masih menampakkan adanya kesenjangan perkembangan antarwilayah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perekonomian sekitar 67% PDRB Bali disumbangkan oleh wilayah pembangunan Bali Selatan dan sisanya 33% disumbangkan oleh wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur. Pembangunan pada beberapa wilayah/kawasan dilakukan tanpa mengikuti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang serta tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini disebabkan masih lemahnya penerapan sanksi hukum berkenaan dengan pelanggaran rencana tata ruang serta belum tegasnya

peraturan perundangan tentang rencana rinci dan detail tata ruang. Di samping itu masih belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan tata ruang baik dalam perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun dalam bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat Bali secara umum relatif terkendali. Namun beberapa tahun belakangan ini berbagai tindakan kriminal cenderung meningkat di masyarakat sehingga keamanan tetap masih mengalami gangguan. Konflik sosial dan adat sering terjadi di berbagai tempat, yang dapat meresahkan masyarakat sehingga mereka belum bisa menikmati hidup tenteram. Ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini tampaknya berkurang, karena meningkatnya tindakan-tindakan pelanggaran dan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.

Pembangunan bidang sosial terkait erat dengan kualitas hidup manusia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia tetap menjadi perhatian penting, mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Tingkat kesempatan kerja merupakan suatu ukuran yang menunjukkan proporsi orang yang bekerja dalam angkatan kerjanya. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,80 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang menganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,57 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 5,17%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,35%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,12 persen poin sementara TPT perempuan meningkat sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan pada Agustus 2022 sebesar 5,61%, lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan dengan TPT mencapai 2,97%. Bila dibandingkan dengan TPT Agustus 2021, TPT perkotaan dan TPT perdesaan mengalami penurunan masing masing sebesar 0,60 persen poin dan 0,55 persen poin.

Tabel 2.20.
Karakteristik Pengangguran (Persen) di Provinsi Bali, Agustus 2020-Agustus 2022

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020 - Ags 2021	Perubahan Ags 2021 - Ags 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**5,63**	**5,37**	**4,80**	**-0,25**	**-0,57**
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	6,73	6,29	5,17	-0,44	-1,12
- Perempuan	4,31	4,29	4,35	-0,02	0,06
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	6,57	6,20	5,61	-0,36	-0,60
- Perdesaan	3,61	3,52	2,97	-0,09	-0,55

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT Agustus 2022 tertinggi pada jenjang pendidikan SMP ke bawah sebesar 5,75%, dan terendah pada TPT dengan jenjang pendidikan Universitas yang tercatat sebesar 3,37%. Pada periode Agustus 2021 – Agustus 2022, TPT dari tamatan SMP ke bawah mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen poin. Sementara pada periode yang sama TPT pada tingkat pendidikan lainnya tercatat mengalami penurunan. Sepanjang periode Agustus 2020 - Agustus 2022, TPT pada pendidikan SMA,

SMK, Diploma I/II/III serta Universitas menunjukkan tren yang menurun, sebaliknya TPT pada pendidikan SMP ke bawah terus meningkat.

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 berdasarkan hasil Sakernas dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1) Pengangguran karena COVID-19; (2) Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; (3) Sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan (4) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kondisi (1) dan (2) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja.

Tabel 2.21.
Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2021-Agustus 2022

Komponen	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2021 - Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Pengangguran[1] Karena COVID-19	48,89	7,32	-41,57	-85,03
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK)[2] Karena COVID-19	33,41	13,56	-19,85	-59,41
c. Sementara Tidak Bekerja[3] Karena COVID-19	38,15	3,78	-34,38	-90,10
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	593,75	126,55	-467,21	-78,69
Total	714,21	151,21	-563,00	-78,83
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.509,09	3.563,14		
	persen	persen	persen poin	
Persentase terhadap PUK	20,35	4,24	-16,11	

Keterangan:
1. Pengangguran Karena COVID-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020
3. Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19 adalah penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 151,21 ribu orang, berkurang sebanyak 563,00 ribu orang (78,83%) dibandingkan dengan Agustus 2021.

Pada Agustus 2022, komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 7,32 ribu orang; menjadi Bukan Angkatan Kerja (BAK)

karena COVID-19 sebanyak 13,56 ribu orang; sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 3,78 ribu orang; dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 126,55 ribu orang. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021. Penurunan terbesar pada komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 yang berkurang sebanyak 467,21 ribu orang.

TPT Provinsi Bali tahun 2022 juga sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Tahun 2022, target TPT Provinsi Bali adalah hanya 5,63% dan diharapkan tahun 2023 menurun menjadi 0,91%. Diharapkan dengan adanya stimulasi ekonomi bagi dunia usaha dan pembukaan zona hijau pada beberapa kawasan pariwisata di Provinsi Bali tahun 2022, TPT Provinsi Bali dapat menurun secara perlahan

Penduduk usia kerja Provinsi Bali pada Agustus 2022 sebanyak 3,56 juta orang, meningkat 54,05 ribu orang dibandingkan Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,74 juta orang (76,86%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 824,60 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 2,61 juta orang penduduk yangbekerja dan 131,47 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 158,02 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 165,22 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 7,20 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2022 tercatat sebesar 76,86%, mengalami peningkatan sebesar 3,32 persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2021.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2022 tercatat sebesar 84,06%, lebih tinggi dibandingkan TPAK

perempuan yang tercatat sebesar 69,62%. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 4,62 persen poin dan 2,01 persen poin.

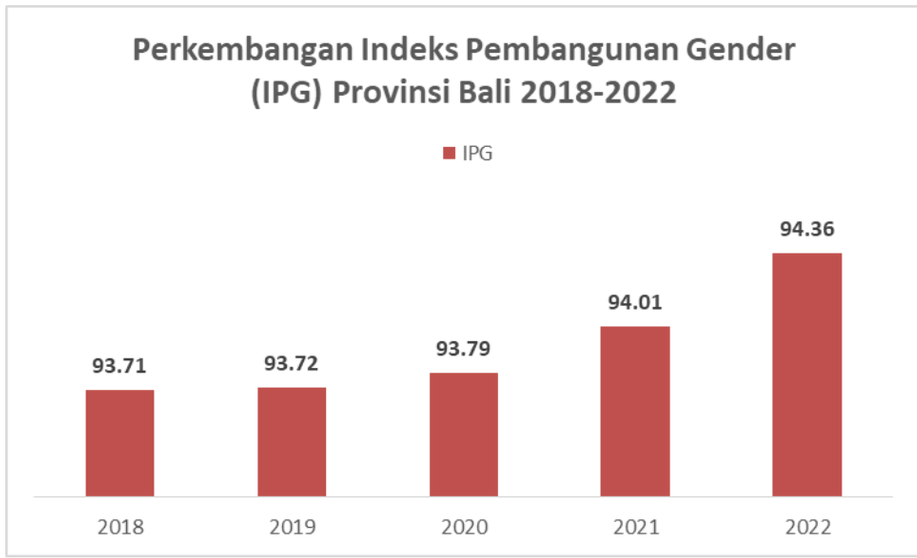
TPAK Bali tahun 2021 masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Target TPAK tahun 2022 Provinsi Bali adalah 76,30%.

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	**3.455,13**	**3.509,09**	**3.563,14**	**53,96**	**1,56**	**54,05**	**1,54**
Angkatan Kerja	**2.567,92**	**2.580,52**	**2.738,54**	**12,60**	**0,49**	**158,02**	**6,12**
- Bekerja	2.423,42	2.441,85	2.607,07	18,43	0,76	165,22	6,77
- Pengangguran	144,50	138,67	131,47	-5,83	-4,04	-7,20	-5,19
Bukan Angkatan Kerja	**887,21**	**928,57**	**824,60**	**41,36**	**4,66**	**-103,96**	**-11,20**
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**74,32**	**73,54**	**76,86**	**-0,78**		**3,32**	
- Laki-Laki	80,75	79,44	84,06	-1,31		4,62	
- Perempuan	67,86	67,61	69,62	-0,25		2,01	

Sumber: BPS Tahun 2023

Gambar 2.13.
Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Agustus 2020-Agustus 2022

Untuk melihat pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Bali dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG). Indikator ini dapat dipakai dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada Tahun 2018 capaian IPG Provinsi Bali mencapai 93,71 dan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 mencapai 94,36. Hal ini menunjukan capaian IPG yang cukup bagus berada di atas rata-rata nasional.

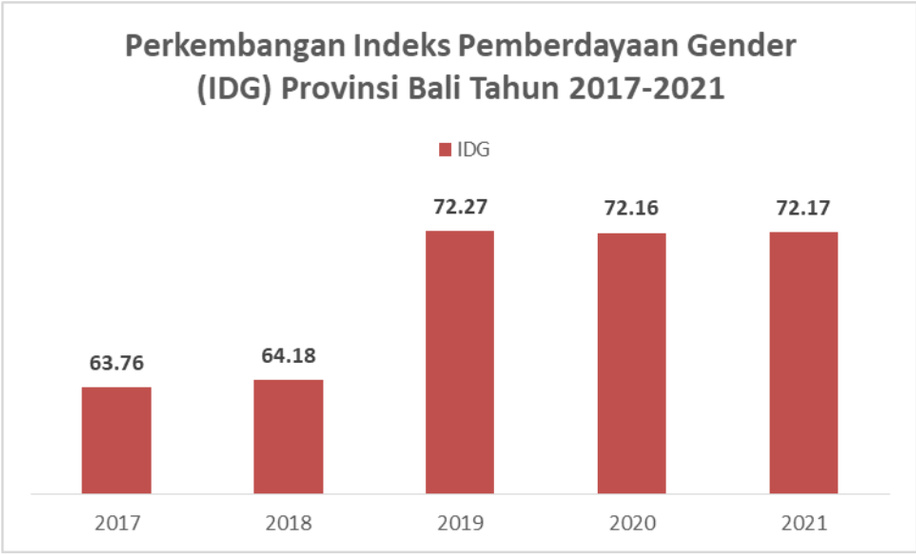


Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.14.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali
Tahun 2018-2022

Selain IPG indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Provinsi Bali selama tahun 2017-2021 menunjukan hasil yang kurang menggembirakan, masih berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang lambat, bahkan sempat turun pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, IDG Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup siginifikan dibandingkan tahun 2018 menjadi 72,27 sedangkan IDG Nasional pada tahun yang sama adalah 75,24.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.15.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali
Tahun 2017-2021

Pembangunan yang berkaitan dengan pangan, mulai dari hulu sampai ke hilir berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk: kebutuhan Krama Bali, kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi untuk ekspor.

Berdasarkan hasil Survei KSA, puncak panen padi pada 2022 selaras dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan April, dengan luas panen mencapai 18.310 hektare. Puncak panen padi pada April 2022 lebih tinggi atau meningkat sekitar 4.824 hektare (35,77 persen) dibandingkan April 2021.

Realisasi panen padi sepanjang Januari–September 2022 sebesar 83.716 hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 7.733 hektare (10,18 persen) dibandingkan Januari–September 2021 yang mencapai 75.983 hektare. Sementara itu, potensi luas panen padi pada OktoberDesember 2022 diperkirakan sekitar 31.075 hektare.

Dengan demikian, total luas panen padi pada 2022 diperkirakan sebesar 114.791 hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 9.590 hektare (9,12 persen) dibandingkan luas panen padi pada 2021 yang sebesar 105.201 hektare.

Produksi padi di Provinsi Bali sepanjang Januari–September 2022 diperkirakan sebesar 499.446 ton GKG, atau mengalami

peningkatan sekitar 59.613 ton GKG (13,55 persen) dibandingkan Januari–September 2021 yang sebesar 439.833 ton GKG. Sementara itu, berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA Padi September 2022, potensi produksi padi sepanjang Oktober–Desember 2022 ialah sebesar 192.373 ton GKG.

Dengan demikian, total produksi padi pada 2022 diperkirakan sebesar 691.819 ton GKG, atau mengalami kenaikan sebanyak 72.908 ton GKG (11,78 persen) dibandingkan 2021 yang sebesar 618.911 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2021 dan 2022 terjadi di bulan April. Produksi padi terendah pada 2021 dan 2022 juga terjadi pada bulan yang sama, yaitu pada bulan Februari. Produksi padi pada April 2022 yaitu sebesar 111.398 ton GKG, sedangkan produksi padi pada Februari 2022 sebesar 33.347 ton GKG.

Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2022 adalah Tabanan, Gianyar, dan Badung. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah yaitu Bangli, Klungkung, dan Denpasar. Pada tahun 2022, tercatat seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami peningkatan produksi padi dibandingkan tahun 2021. Peningkatan produksi padi yang cukup besar pada 2022 terjadi di beberapa wilayah sentra produksi padi seperti Gianyar, Karangasem, dan Buleleng. Sedangkan peningkatan produksi padi terendah pada 2022 terjadi di Klungkung, Bangli, dan Denpasar.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari–September 2022 diperkirakan setara dengan 281.665 ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 33.619 ton (13,55 persen) dibandingkan Januari–September 2021 yang sebesar 248.046 ton. Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober–Desember 2022 ialah sebesar 108.490 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2022 diperkirakan sekitar 390.155 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 41.117 ton (11,78 persen) dibandingkan produksi beras pada 2021 yang sebesar 349.038 ton

Produksi beras tertinggi pada 2022 terjadi di bulan April, yaitu sebesar 62.823 ton. Sementara itu, produksi beras terendah diperkirakan terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 18.806 ton. Kondisi ini sama dengan tahun 2021, di mana produksi beras tertinggi juga terjadi pada bulan April dan produksi beras terendah terjadi pada bulan Februari 2021

Jumlah tanah yang tercatat di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 4.592 bidang tanah dengan luas 2.856,9 ha dan senilai 2,879 triliun rupiah. Dari total tanah tersebut, sebanyak 1.675,3 ha sudah bersertipikat dan 1.181,6 ha belum bersertipikat. Jumlah bidang tanah terbesar Provinsi Bali ada di Kabupaten Badung dengan 1.042 bidang tanah. Dari jumlah bidang tersebut, tercatat 1.027 bidang tanah telah bersertipikat dan 15 bidang tanah belum bersertipikat. Dari sisi luas tanah terbesar ada di Kabupaten Karangasem, yaitu 5.611.030,40 m^2. Dari sisi nilai tanah terbesar ada di Kota Denpasar dengan nilai 1,696 triliun rupiah. Pola pemanfaatan tanah yang paling banyak di Provinsi Bali, yaitu dengan pola pinjam pakai sebanyak 416. Sedangkan, untuk sewa sebanyak 185 dan kerjasama pemanfaatan sebanyak 10.

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali sebagai suatu ekosistem pulau mempunyai peranan penting dalam perekonomian Bali. Kondisi umum yang akan diuraikan meliputi kondisi eksisting sumberdaya hutan, biodiversitas, Daerah Aliran Sungai (DAS), air bawah tanah, ruang terbuka hijau, erosi dan longsor, pencemaran air dan pencemaran lingkungan lainnya, sumberdaya pesisir dan lautan, serta intrusi air laut dan sumberdaya tak terbarukan. Wilayah Bali tengah merupakan daerah resapan air bagi Bali Utara dan Selatan. Namun, daerah tersebut sangat rawan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh meningkatnya bahaya erosi dan longsor. Kemiringan lereng daerah tersebut tergolong curam berkisar antara 15-40% bahkan sampai lebih dari 45%, jenis tanahnya andosol dan regosol yang peka erosi, serta curah hujan di daerah tersebut cukup tinggi berkisar 2.500-3.000 mm per tahun. Penutupan vegetasi yang jarang dan banyaknya pertanian tanaman pangan dengan

konservasi tanah yang kurang memadai juga dapat mempercepat kerusakan lahan dan meningkatnya sedimentasi.

Pembangunan yang berkaitan dengan tradisi, seni, dan budaya dari hulu sampai ke hilir, berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan Kebudayaan Bali yang meliputi: pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi, seni, dan budaya Krama Bali. Kebudayaan Bali merupakan salah satu bagian dari kebudayaan nusantara yang sangat unik dan memiliki jati diri yang khas. Jati diri tersebut merupakan rajutan fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofi. Nilai-nilai universal, seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Bali yang didukung oleh sebagian besar penduduknya yang menganut agama Hindu. Konsep spiritual yang kuat membuat kebudayaan Bali menjadi unik dan terkenal di seluruh dunia. Mengingat kebudayaan Bali seperti juga kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya mengalami transformasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, demografi, ekonomi dan ekologi maka masyarakat Bali yang semula bersifat homogen dan mayoritas penduduk beragama Hindu kini mengalami perubahan, sehingga cenderung bersifat heterogen yang terdiri atas multietnik, multiagama dan sistem kepercayaan, serta multikultur.

Fokus pengembangan infrastruktur merupakan perwujudan dari sistem interkoneksi antar-Kabupaten/Kota untuk memeratakan pembangunan di wilayah Provinsi Bali. Dengan demikian, semestinya dilihat sebagai perwujudan dari berbagai ragam interkoneksitas, mulai dari yang berupa fisik ekologis yang umumnya bersifat tersedia (*given*), interkoneksitas buatan (Interkoneksitas teknologi), berupa jaringan prasarana wilayah, seperti jalan, irigasi, dan telekomonikasi, dan kemudian memicu atau mendukung mewujudnya interkoneksitas yang disebutkan terakhir akan mempengaruhi interkoneksitas buatan, dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pula

interkoneksitas fisik ekologis. Pola keterkaitan itu berlangsung secara berkesinambungan dan bersifat sangat dinamis.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

Optimalisasi sektor perikanan sebagai pendukung perekonomian Bali perlu ditingkatkan karena ekspor hasil perikanan sangat menjanjikan bagi perolehan devisa Bali ke depan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, secara keseluruhan jumlah produksi ikan (perikanan laut dan perikanan darat) selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2017 produksi perikanan adalah sebesar 130.075,4 ton atau turun 44,30% dibandingkan tahun 2016. Meskipun pada tahun 2017 jumlah produksi ikan menurun tajam, nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 2,2% dari Rp2.449 milyar tahun 2016 menjadi Rp2.503 milyar tahun 2017. Pada tahun 2018, jumlah produksi ikan di Provinsi Bali adalah 127.532 ton atau 1,96% dari tahun 2017. Meskipun pada tahun 2018 jumlah produksi ikan menurun tajam, nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 7,03% dari tahun 2017 menjadi Rp2.679 milyar. Pada tahun 2019 baik produksi maupun nilai produksi perikanan Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 112.252 ton dengan nilai produksi 2.757,98 milyar rupiah.

Pada tahun 2020, baik produksi maupun nilai produksi perikanan Provinsi Bali meningkat dari tahun 2019. Tercatat jumlah tangkapan ikan secara akumulasi pada tahun 2020 adalah 127.695 Ton dengan nilai 2.908,66 milyar rupiah. Tahun 2021 jumlah produksi perikanan naik menjadi 141.581 ton dan nilai produksi juga mengalami peningkatan menjadi Rp3,213.43 Milyar.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.16.
Jumlah Produksi Ikan dan Nilai Produksi Ikan
di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek, yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Dalam konteks pariwisata berkualitas, yang menjadi sasaran wisatawan adalah: wisatawan yang waktu tinggalnya lebih lama, wisatawan yang berbelanja lebih banyak, wisatawan yang peduli lingkungan dan kebudayaan, wisatawan yang memberdayakan sumber daya lokal (tenaga kerja lokal, komoditas lokal, produk lokal, investasi lokal).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali, kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Tingginya kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, tidak terlepas dari tingginya *share* lapangan usaha tersebut. Pada tahun 2019, persentase *share* sektor ini meningkat menjadi 23,26% atau lebih dari separuh ekonomi Bali ditopang oleh Sektor Pariwisata. Tahun 2020 dan 2021, share sektor pariwisata mengalami penurunan. Tahun 2020 menurun menjadi 18,37% dan tahun 2021 kembali menurun menjadi 16,13%. Pada

tahun 2022, share pariwisata meningkat kembali ke angka 17,93%.

Tabel 2.22.
Share Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Share (%)
1	2018	23,38
2	2019	23,27
3	2020	18,37
4	2021	16,13
5	2022	17,93

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Untuk pengembangan produksi tanaman pangan, potensi/sumberdaya alam yang dimiliki berupa tanah dan air sangat terbatas, sehingga upaya pengembangan produksi tanaman pangan hanya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi atau peningkatan hasil per satuan luas tanah. Sebaliknya, upaya melalui ekstensifikasi sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang ada. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2015 sampai dengan 2021 mengalami dinamika yang cukup menarik. Pada tahun 2015-2019, share sektor pertanian mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 14,65% dan tahun 2019 menjadi hanya 13,45%. Namun pada tahun 2020, besarnya share sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup baik menjadi 15,09%. Tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 15,92%

Selain itu, perkebunan mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Bali. Apalagi perkebunan di Bali merupakan perkebunan rakyat. Peningkatan kualitas dan produksi hasil perkebunan adalah salah satu tujuan pembangunan sub sektor perkebunan. Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor yang tinggi di Bali adalah kelapa, kopi, cengkeh, vanili, dan jambu mete.

Dalam bidang Peternakan, ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), serta ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras potong, dan itik.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada populasi ternak di Provinsi Bali. Ternak-ternak yang didata populasinya adalah berupa sapi potong, kerbau, kuda, kambing, dan babi. Tahun 2021, jumlah populasi ternak secara total adalah 1.042.839 ekor, naik dari tahun 2020 dengan populasi sebesar 996.337 ekor. Peningkatan jumlah ternak terbanyak terjadi pada populasi ternak babi. Pada tahun 2020 jumlahnya tercatat sebesar 398.291 ekor, meningkat di tahun 2021 menjadi 436.800 ekor.

Tabel 2.23.
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak
di Provinsi Bali Tahun 2018-2021

No	Ternak	Populasi (Ekor)			
		2018	2019	2020	2021
1	Sapi Perah	0	0	0	0
2	Sapi Potong	526,159	544,955	550,350	558,463
3	Kerbau	1,178	2,492	1,390	1,407
4	Kuda	181	254	168	122
5	Kambing	55,769	45,102	46,138	46,047
6	Domba	0	0	0	0
7	Babi	762,409	690,379	398,291	436,800

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Ternak lainnya yang juga dikembangbiakkan di Provinsi Bali adalah ternak unggas. Populasi unggas tahun 2021 terdiri dari Ayam Kampung sebanyak 2.855.497 ekor, Ayam Petelur sebanyak 4.840.537 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 54.256.980 ekor, dan Itik sebanyak 523.888 ekor.

Tabel 2.24.
Populasi Unggas di Provinsi Bali Tahun 2018-2021

No	Unggas	Populasi (ekor)			
		2018	2019	2020	2021
1	Ayam Kampung	3,040,742	2,853,115	2,817,231	2,855,497
2	Ayam Petelur	4,975,545	4,657,290	4,668,076	4,840,537
3	Ayam Pedaging	11,499,099	11,511,225	11,915,534	54,256,980
4	Itik/Itik Manila	495,098	529,483	499,300	523,888

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Bali jumlah total luas hutan di Provinsi Bali adalah sebesar 131.209,83 Ha. Total luas hutan ini meliputi 23 Kelompok Hutan dan 30 RTK. Hutan-hutan ini membentang dari Kabupaten Jembrana hingga Kabupaten Karangasem dengan beragam fungsi seperti misalnya Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Taman Nasional, maupun Taman Hutan Raya.

Sektor pertambangan bukan merupakan sektor unggulan di Provinsi Bali karena Provinsi Bali tidak memiliki potensi sumberdaya mineral, minyak, dan komoditas tambang lainnya. Hanya terdapat potensi pertambangan pasir hasil letusan gunung berapi di Kabupaten Karangasem. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 sektor pertambangan hanya menyumbang share 0,98% dari total PDRB ADHB Provinsi Bali dimana subsector yang tercatat menyumbang share adalah Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Angka distribusi PDRB ini meningkat dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,95%.

Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor dengan share yang cukup besar pada PDRB ADHB Provinsi Bali di tahun 2021. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 tercatat share sektor perdagangan adalah 9,26%. Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 9,05%. Apabila diperinci lagi, sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor yang paling besar sharenya yaitu 7,41%.

Sektor industri dengan nilai share paling tinggi dalam PDRB ADHB Provinsi Bali adalah Industri Makanan dan Minumam yaitu 3,11% atau hampir separuh dari total share Sektor Industri dengan angka 6,70%. Sektor Industri mengalami peningkatan

share dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 tercatat share Sektor Industri adalah 6,44%.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Pengeluaran Perkapita

Perekonomian makro Bali selama ini dapat dikatakan tumbuh dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari tren peningkatan angka total PDRB baik berdasarkan komponen lapngan usaha maupun pengeluran, total PDRB Perkapita, Konsumsi Rumah tangga, proporsi Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB), serta proposi konsumsi pemerintahan. Faktor lain yang menjadi acuan adalah nilai inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan daerah melalui upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Bali. Pengeluaran perkapita rata-rata masyarakat Provinsi Bali untuk setiap bulannya pada tahun 2021 adalah Rp1.468.624 dimana pengeluaran non makanan lebih besar nilainya dibandingkan pengeluaran untuk makanan. Pengeluaran non makanan terdata rata-rata sebesar Rp840.152 setiap bulannya dan pengeluaran makanan rata-rata Rp628.472.

Pengeluaran rata-rata masyarakat Provinsi Bali di tahun 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita masyarakat Provinsi Bali adalah Rp1.509.666 dimana pengeluaran untuk non makanan adalah Rp834.520 dan pengeluaran makanan sebesar Rp675.146. Data tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Provinsi Bali untuk makanan mengalami penurunan di tahun

2021 dan disisi lainnya pengeluaran non makanan meningkat. Terdapat indikasi bahwa peningkatan pengeluaran non makanan dilakukan dengan pengurangan konsumsi untuk makanan.

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar berturut-turut tercatat sebagai dua daerah yang penduduknya memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penduduk di kedua wilayah tersebut relatif lebih sejahtera dibanding daerah lainnya.

Pada tahun 2021, pengeluaran perkapita tertinggi dimiliki oleh penduduk Kota Denpasar yaitu sebesar Rp2.125.061 setiap bulan dan disusul oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp1.811.807. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita terendah dimiliki oleh penduduk Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp803.683.

Tabel 2.25.
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Setiap Bulan Masyarakat Provinsi Bali Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota *Regency/ Municipality*	Makanan/*Food*		Bukan Makanan *Non-Food*		Jumlah/*Total*	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jembrana	564 209	557 566	524 042	557 105	1 088 252	1 114 672
Tabanan	584 746	595 526	718 918	709 218	1 303 664	1 304 744
Badung	816 074	730 046	1 097 757	1 081 761	1 913 831	1 811 807
Gianyar	652 287	629 025	851 551	984 078	1 503 838	1 613 103
Klungkung	608 369	486 600	577 321	484 229	1 185 690	970 829
Bangli	589 409	546 195	515 829	540 712	1 105 238	1 086 908
Karangasem	455 317	416 441	429 222	387 243	884 539	803 683
Buleleng	526 310	523 204	443 654	437 998	969 964	961 202
Denpasar	893 654	796 413	1 354 068	1 328 648	2 247 722	2 125 061
Bali	**675 146**	**628 472**	**834 520**	**840 152**	**1 509 666**	**1 468 624**

Sumber/*Source*: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret/ *BPS - Statistics of Bali Province, National Sosio-Economic Survey-March*

https://bali.bps.go.id

b. Jumlah Konsumsi Kalori

Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan asupan pangan yang dikonsumsi yang menentukan status gizi. Untuk mencapai status gizi yang baik, pangan yang dikonsumsi harus

dalam jumlah yang cukup, bermutu dan beragam untuk memenuhi berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jumlah, mutu dan ragam pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga tergantung pada daya beli rumah tangga tersebut. Semakin tinggi daya beli rumah tangga maka semakin tinggi peluang rumah tangga tersebut untuk memilih pangan yang baik dari sisi jumlah maupun jenisnya (Mangkuprawira dalam Ariani, 1993).

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai status gizi penduduk adalah jumlah konsumsi kalori dan jumlah konsumsi protein. Semakin tinggi konsumsi kalori dan konsumsi protein, mengindikasikan status gizi yang lebih baik.

Penduduk Provinsi Bali selama periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dalam konsumsi kalori sedangkan konsumsi protein cenderung meningkat namun menurun di tahun 2021. Konsumsi kalori per kapita per hari pada tahun 2017 sebesar 2.239,32 kkal, dan 2021 turun menjadi 2.196,81 kkal.

Sementara konsumsi protein tahun 2017 juga meningkat menjadi 64,11 gr/hari dari 62,28 gram/hari pada tahun 2016, Pada tahun 2021 konsumsi protein menurun menjadi 62,84 gram/hari

Tabel 2.26.
Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein
Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2017-2021

No	Tahun	Konsumsi kalori per hari (kkal)	Konsumsi Protein (gr)
1	2017	2.239,32	64,11
2	2018	2.282,83	65,62
3	2019	2.257,48	65,99
4	2020	2.293,11	66,61
5	2021	2.196,81	62,84

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk, tingkat kecukupan gizi dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk.

Penentuan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari menggunakan standar rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2018. Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein.

Secara nasional rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Indonesia pada Maret 2021 sebesar 2.112,06 kkal sudah berada di atas standar kecukupan dan untuk konsumsi protein sebesar 61,98 gram, juga sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein harian.

Begitu pula dengan konsumsi kalori dan protein penduduk Provinsi Bali yang sudah mencapai angka kecukupan gizi tersebut di atas. Pada tahun 2021, rata-rata konsumsi kalori penduduk Provinsi Bali adalah 2.196,81 kkal dan rata-rata konsumsi protein adalah sebesar 62,84 gram/hari.

c. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan kesejahteraan petani secara umum. Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang relatif baik.

Secara Nasional, indeks NTP tercatat sebesar 109,84 atau naik 0,77% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada Januari 2023, Indeks NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat mengalami kenaikan NTP paling tinggi, sebesar 2,27%. Sebaliknya NTP Provinsi Kalimantan Barat tercatat mengalami penurunan yang paling dalam, sebesar -2,11%.

Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Provinsi Bali pada bulan Januari 2023 sebesar 116,10 atau naik sebesar 1,15% dibandingkan kondisi bulan sebelumnya.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Bali Januari 2023 sebesar 97,47 atau turun sebesar -0,35% dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Perkembangan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali tercatat 96,17 pada bulan Januari 2023, turun sedalam 0,90%

dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang tercatat 97,05. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks yang diterima petani (It) sebesar 0,02% yang lebih kecil dibandingkan kenaikan pada indeks yang dibayar petani (Ib) yang tercatat sebesar 0,93%. It tercatat naik dari 111,09 menjadi 111,11 pada bulan Januari 2023 dan Ib juga tercatat naik dari 114,47 menjadi 115,54.

Indeks NTP Provinsi Bali pada bulan Januari 2023 berada di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, yang terdiri atas dua hal pokok, yaitu konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian. Dari 5 subsektor yang menjadi komponen penyusunan indeks NTP, tercatat hanya 1 subsektor yang mampu mencapai angka 100 di bulan Januari 2023, yaitu subsektor perikanan.

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	Desember 2022	Januari 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	96,39	96,14	-0,27
2. Hortikultura	100,26	99,86	-0,39
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	96,11	96,33	0,23
4. Peternakan	99,33	98,27	-1,06
5. Perikanan	96,94	99,61	2,76
a Perikanan Tangkap	96,03	99,10	3,21
b. Perikanan Budidaya	104,70	103,90	-0,76
NTUP Bali	**97,81**	**97,47**	**-0,35**

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Gambar 2.17.
Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali 2022-2023

d. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Pembangunan yang diharapkan dapat membawa penduduk ke arah yang lebih maju masih sering dibarengi dengan tindakan kriminaitas, terutama dari sisi kuantitasnya. Akibatnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terganggu. Sebagian indikator keamanan, pencatatan statistik indikator kriminal menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Sepanjang tahun 2021, jumlah perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Bali adalah sebanyak 2.105 kasus dimana masih terdapat 310 sisa perkara akhir Bulan Desember 2020 yang belum diputus. Pada bagian lain, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 mencapai 2.105 dan masih terdapat sisa perkara 312 yang belum diputus pada akhir Desember 2021.

Untuk perkara perdata, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Denpasar yang dihimpun oleh BPS Provinsi Bali, pada tahun 2021 terdapat 3.412 gugatan dan 1.606 permohonan yang masuk. Gugatan yang telah diputus tahun 2021 adalah sebanyak 3.212 perkara, dan permohonan yang diputus adalah sebanyak 1.299 perkara.

Jumlah kejadian/kecelakaan lalu lintas berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Bali sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 1.984 kejadian dimana Kota Denpasar merupakan wilayah dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tertinggi yaitu 565 kasus dan Kabupaten Gianyar di posisi kedua dengan 336 kasus.

Dari sisi penyalahgunaan narkotika di wilayah Bali terjadi 718 kasus selama tahun 2021. Angka ini menurun dari tahun 2020 yang mencapai 770 kasus.

Pembangunan keamanan Bali harus dirancang dalam konteks untuk memenuhi 3 (tiga) kondisi, yaitu: *pertama*, Bali sebagai suatu wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Hindu dan memiliki kebudayaan tinggi; *kedua*, Bali sebagai suatu wilayah yang menjadi tujuan wisata dunia; dan *ketiga*, Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menempatkan Bali pada konteks tersebut dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, utamanya guna menghadapi permasalahan dan tantangan yang bersifat lokal, nasional, dan global. Konsep Keamanan Bali berbasis kearifan lokal *Tri Hita Karana* adalah keamanan yang memakai pendekatan komprehensif yang menempatkan keamanan sebagai kebutuhan mendasar guna mendukung terwujudnya: kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa; kebutuhan hubungan yang harmonis antara

manusia dengan sesama manusia; dan kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya.

Kebutuhan keamanan yang bersifat mendasar tersebut, harus dirumuskan, dijabarkan, dan diorientasikan dalam perspektif keamanan nasional yang menempatkan keamanan nasional sebagai keamanan manusia bersifat insani (*human security*) yang sejalan dengan keamanan berstandar internasional sebagaimana ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programs), yaitu suatu organisasi dibawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan demikian, konsep pembangunan keamanan Bali di masa yang akan datang, harus dibuat dengan memperhatikan pentingnya perubahan paradigma keamanan dari yang sebelumnya lebih menekankan keamanan negara atau keamanan untuk kepentingan negara semata harus berubah menjadi keamanan yang lebih menekankan kepada kebutuhan manusia yang bersifat insani atau kemanusiaan. Konsep pembangunan keamanan ini sesuai dengan tuntutan nilai-nilai universal dunia Internasional tanpa mengurangi kedaulatan nasional maupun lokal demi menjadikan Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

e. Kondisi Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah Provinsi Bali telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali mengatur mengenai struktur ruang (pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang). Berdasarkan RTRW Provinsi Bali dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tersebut di atas, distribusi peruntukkan ruang Provinsi Bali (Rencana Pola Ruang) adalah sebagai berikut.

Tabel 2.27.
Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

NO	JENIS PERUNTUKAN	LUAS PERUNTUKAN	
		Ha	%
I	**KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**		
1	Kaw. Perlindungan Terhadap Kaw. Bawahannya		
a	Hutan Lindung*	96.667,97	17,28
b	Kawasan Resapan Air	-	-
2	Kawasan Perlindungan Setempat	3.432,17	0,61
3	Kawasan Konservasi		
a	Taman Nasional	14.115,56	2,52
b	Taman Hutan Raya**	1.084,32	0,19
c	Taman Wisata Alam	4.474,84	0,80
d	Cagar Alam	1.749,87	0,31
4	Kawasan Lindung Geologi	-	-
5	Kawasan Rawan Bencana	7.317,29	1,31
6	Kawasan Cagar Budaya	-	-
7	Kawasan Ekosistem Mangrove	345,55	0,06
	Sub Total I	**129.187,57**	**23,09**
II	**KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA**		
1	Kawasan Hutan Produksi***	8.856,35	1,58
2	Kawasan Hutan Rakyat	-	
3	Kawasan Pertanian	-	
a	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	57.024,81	10,19
b	Kawasan Holtikultura	10.643,08	1,90
c	Kawasan Perkebunan	226.055,45	40,41
d	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
4	Kawasan Perikanan	119,76	0,02
5	Kawasan Pertambangan dan Energi	5.291,04	0,95
6	Kawasan Peruntukan Industri	1.924,80	0,34
7	Kawasan Pariwisata	39.369,74	7,04
8	Kawasan Permukiman	81.000,71	14,48
9	Kawasan peruntukkan lainnya	-	-
	Sub Total II	**430.285,34**	**76,91**
	TOTAL	**559.472,91**	**100.00**

Tata ruang merupakan salah satu sektor yang mengalami perubahan cukup signifikan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). UUCK atau yang juga dikenal dengan *omnibus law* merupakan kebijakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal atau mencakup banyak aturan di dalamnya. UUCK sendiri berdasarkan *database* BPK RI telah mengubah setidaknya 56 undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

UUPR merupakan pedoman umum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi penataan ruang di Indonesia. Bagian

dalam UUPR yang diubah dalam UUCK diantaranya adalah pengintegrasian penataan ruang laut dan penataan ruang darat. Sebelumnya dalam UUPR, penataan ruang darat dilaksanakan secara terpisah dengan penataan ruang laut. Penataan ruang darat dilaksanakan melalui rencana tata ruang sedangkan penataan ruang laut dilaksanakan melalui rencana zonasi wilayah pesisir & pulau-pulau kecil (RZWP3K). Sedangkan dalam UUCK disebutkan bahwa rencana tata ruang harus diintegrasikan dengan RZWP3K ke dalam 1 (satu) dokumen yaitu dokumen rencana tata ruang.

Guna melaksanakan amanat dalam UUCK tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pengintegrasian RTRW Provinsi Bali (Perda Nomor 3 Tahun 2020) dengan RZWP3K Provinsi Bali. Hingga saat ini, pelaksanaan pengintegrasian masih berlangsung menyesuaikan dengan runutan prosedural yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

f. Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi terdiri atas sarana prasarana transportasi darat, sarana prasarana transportasi laut, dan sarana prasarana transportasi udara.

1. Transportasi Darat

Jalan dan jembatan merupakan sarana vital dalam mendukung kelancaran transportasi darat. Total panjang jalan yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah 8.685,33 Km dimana terdiri dari Jalan kewenangan nasional (negara) sepanjang 629,39 Km, Jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 743,34 Km, dan jalan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sepanjang 7.312,60 Km.

Tabel 2.28.

Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Status Jalan/*Road Status*			
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah
Jembrana	72,63	29,52	1.075,93	1.178,08
Tabanan	65,73	136,68	863,22	1.065,62
Badung	63,61	61,58	673,37	798,56
Gianyar	64,33	85,74	515,24	665,31
Klungkung	37,72	9,34	453,80	500,86
Bangli	21,19	124,85	905,81	1.051,85
Karangasem	97,97	145,93	1.202,54	1.446,44
Buleleng	156,34	106,47	1.136,60	1.399,41
Denpasar	49,89	43,23	486,08	579,20
Jumlah / *Total :*	**629,39**	**743,34**	**7.312,60**	**8.685,33**

Sumber: BPS Bali 2023

2. Transportasi Udara

a) Penerbangan Internasional

Jumlah penerbangan pada bulan Januari 2023 tercatat naik 7,43 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah keberangkatan penerbangan internasional tercatat sebanyak 2.400 penerbangan naik dari bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.234 penerbangan. Penerbangan internasional Januari 2023 didominasi oleh penerbangan menuju Australia (826 penerbangan), disusul penerbangan ke Singapura (485 penerbangan), Malaysia (401 penerbangan), Thailand (127 penerbangan) dan Vietnam (126 penerbangan).

Dari sisi penumpang, tercatat sebanyak 403.829 orang penumpang yang berangkat melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Bali. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 13,28 persen dibandingkan bulan Desember 2022 yang tercatat sebanyak 356.475 orang penumpang. Keberangkatan penumpang didominasi oleh tujuan keberangkatan menuju Australia sebanyak 140.791 orang penumpang, disusul Singapura 86.638 orang penumpang, Malaysia 47.715 orang penumpang, UAE 23.185 orang penumpang dan Thailand 18.498 orang penumpang.

Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah penerbangan naik 14.017,65 persen dari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 17 penerbangan. Sementara itu, jika dilihat dari sisi keberangkatan penumpang maka terjadi kenaikan jumlah penumpang mencapai puluhan juta persen dari yang sebelumnya tercatat hanya 4 orang penumpang pada bulan Januari 2022.

Jumlah bagasi dan barang yang diangkut dari Bandara Ngurah Rai pada bulan Januari 2023 sebanyak 7.181,32 ton, naik sebesar 15,07 persen dibandingkan jumlah bagasi dan barang yang diangkut bulan Desember 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama, terjadi kenaikan sebesar 13.977,98 persen, dari sebelumnya memuat barang sebanyak 51,01 ton. Pengiriman bagasi dan barang melalui penerbangan internasional dari Bali paling banyak dikirim menuju Australia, yaitu sebesar 2.474,27 ton, diikuti tujuan Singapura 1.352,23 ton, UAE 627,17 ton, Malaysia 612,04 ton dan Taiwan 414,25 ton.

b) Penerbangan Domestik

Jumlah penerbangan domestik dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 3.261 penerbangan, atau naik 13,11 persen dibandingkan kondisi bulan November 2022. Kenaikan tinggi terjadi pada beberapa daerah tujuan seperti Labuhan Bajo (34,07 persen), Bandung (30,95 persen), Jakarta/Soekarno-Hatta (23,22 persen) dan Ujung Pandang (20,92 persen). Sementara itu, terdapat daerah tujuan utama penerbangan domestik di bulan Desember 2022 dari Bali yang mengalami penurunan yaitu Jakarta/Halim Perdanakusuma (23,38 persen) dan Solo (2,53 persen).

Jumlah penerbangan domestik dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada bulan Januari 2023 tercatat sebanyak 3.100 penerbangan, atau turun 4,94 persen dibandingkan kondisi bulan Desember 2022. Penurunan terjadi pada beberapa daerah tujuan seperti Labuhan Bajo (15,57 persen), Ujung Pandang (13,51 persen), Jakarta/Soekarno-Hatta (7,02

persen), Kulon Progo (5,41 persen), Bandung (3,64 persen), Lombok Praya (3,37 persen) dan Solo (2,60 persen). Sementara itu, terdapat daerah tujuan utama penerbangan domestik di bulan Januari 2023 dari Bali yang mengalami kenaikan yaitu Jakarta/Halim Perdanakusuma (2,82 persen), Surabaya (1,44 persen) dan Tambolaka (1,23 persen).

Secara absolut, penerbangan domestik masih didominasi oleh penerbangan tujuan Bandara Jakarta/Soekarno-Hatta sebanyak 1.564 penerbangan, yang mengangkut sebanyak 227.432 orang penumpang. Secara total, jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan domestik dari Bali sebanyak 395.666 orang, 24,35 persen lebih banyak dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2022. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah penumpang tersebut naik sebesar 1,94 persen. Selain tujuan Jakarta/Soekarno-Hatta, keberangkatan penumpang domestik paling banyak menuju Surabaya sebanyak 55.256 orang dan Ujung Pandang sebanyak 21.686 orang.

Jumlah bagasi dan barang penerbangan domestik yang diangkut pada bulan Januari 2023 tercatat sebanyak 4.777,16 ton, naik 2,47 persen dibandingkan Desember 2022 yang tercatat sebanyak 4.662,01 ton. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama, maka terjadi kenaikan sebanyak 2,39 persen dari yang sebelumnya tercatat sebanyak 4.665,86 ton.

3. Transportasi Laut

Pada bulan Januari 2023, jumlah keberangkatan angkutan laut dari sejumlah pelabuhan di Provinsi Bali tercatat sebanyak 6.322 unit kapal. Bila dibandingkan dengan catatan bulan Desember 2022 (m-t-m), jumlah keberangkatan angkutan laut turun sebesar 11,17 persen. Penurunan ini disebabkan turunnya keberangkatan angkutan laut pada kelompok pelabuhan di Benoa-Denpasar dan kelompok lainnya di luar pelabuhan Benoa-Denpasar, yang turun masing-masing sebesar 17,57 persen dan 6,57 persen. Bila dibandingkan bulan Januari 2022 (y-o-y), keberangkatan kapal angkutan laut naik

sebesar 80,42 persen, dari kondisi sebelumnya sebanyak 3.504 unit kapal.

Jumlah penumpang pada bulan Januari 2023 tercatat mengalami penurunan, yaitu dari 326.063 orang penumpang pada bulan sebelumnya menjadi 256.766 orang penumpang, atau turun 21,25 persen. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah penumpang mengalami kenaikan sebesar 111,16 persen, dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 121.595 orang penumpang pada Januari 2022.

Jumlah barang yang diangkut melalui pelabuhan laut di wilayah Bali pada Januari 2023 tercatat turun sebesar 11,89 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dari 50.290 ton pada bulan Desember 2022 menjadi 44.313 ton. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2022, jumlah barang yang diangkut turun 5,45 persen dari kondisi sebelumnya sebesar 46.870 ton.

g. Infrastruktur Lainnya

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi difokuskan pada pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten/Kota yang tidak terpusat dalam satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik se-Bali dalam jangka panjang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan pembangkit listrik adalah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik yang murah untuk *Krama* Bali dan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik untuk industri, perdagangan, dan komersial serta pariwisata. Di antaranya pembangkit listrik tenaga air (air laut, air terjun, danau), pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik dengan energi terbarukan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Bali Tahun 2021, persentase rumah tangga yang sudah teraliri listrik atau sudah mendapatkan pelayanan jaringan listrik di Provinsi Bali sudah mencapai 100%. Angka 100% ini sudah tercapai semenjak tahun 2018. Artinya seluruh rumah tangga di Provinsi Bali sudah mendapatkan pelayanan jaringan

listrik. Begitu pula dengan rasio ketersediaan tenaga listrik Provinsi Bali yang sudah mencapai angka 100% di tahun 2021.

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, perlu dibangun/dikembangkan pusat-pusat perekonomian yang baru di antaranya: pembangunan/pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar-Kabupaten/Kota se-Bali, pembangunan industri kreatif berbasis budaya *branding* Bali yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pelembagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pembangunan kawasan perekonomian untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli, Karangasem, Tabanan, dan Gianyar, pembangunan taman kunjungan wisata di Kabupaten Jembrana. Mengoptimalkan/menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan. Memperkuat Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat. Pembangunan perekonomian tersebut dilakukan sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antarwilayah se-Bali yang dilakukan melalui investasi dengan skema penyertaan Pemerintah Daerah, swasta, dan pelaku ekonomi lokal Bali. Pembangunan pusat-pusat perekonomian tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam

penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi:

1) pendidikan;
2) kesehatan;
3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6) sosial.

Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 2.29**

Tabel 2.29.
Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
1	**PENDIDIKAN**			
1.1	Pendidikan menengah	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
1.2	Pendidikan khusus	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2	**KESEHATAN**			
2.1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2.2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
3	**PEKERJAAN UMUM**			
3.1	penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	Warga Negara.
3.2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.	b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	Warga Negara.
4	**PERUMAHAN RAKYAT**			
4.1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
		b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
4.2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi.
		b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
5	**TRANTIBUMLIMNAS**			
5.1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	100%	warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
6	**SOSIAL**			
6.1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penyandang disabilitas telantar.
6.2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.	b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial.	100%	anak telantar.
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD

Selain melihat konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan, dalam penyusunan perencanaan Tahun 2024 juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 yang dilakukan berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi RKPD juga dilakukan untuk memastikan dan menilai pencapaian target kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun 2022 dan mengarahkan agar target kinerja program dan kegiatan dapat dicapai sesuai dengan target dalam RPJMD. Berikut gambaran mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program/kegiatan.

A. Metode Evaluasi

1. Pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD

Evaluasi terhadap hasil RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 Semester II merupakan suatu kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan RKPD tahun 2022 yang telah dibuat. Evaluasi ini dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, kegiatan evaluasi kebijakan RKPD bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan RKPD ini telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2022.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan evaluasi hasil RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 Semester 2 Tahun 2022 ini disesuaikan dengan formulir E.53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen realisasi fisik dan keuangan triwulan IV Tahun 2022 dari masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 diatas, disebutkan bahwa Kepala Bappeda melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan formulir E.53.

Formulir E.53 memuat beberapa poin penting yaitu nama program/kegiatan, indikator program/kegiatan, jumlah anggaran dan target capaian indikator, serta realisasi capaian kinerja dan keuangan semester I maupun secara kumulatif. Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada formulir E.53 ditambahkan Sub Kegiatan.

Skala nilai peringkat kinerja atau untuk menyimpulkan sejauh mana capaian program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 dengan menggunakan kriteria dalam Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90 %	Tinggi
3	66% ≤ 75 %	Sedang
4	51% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut.

a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi terhadap RKPD dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah. Masing-masing admin Perangkat Daerah menginput capaian kinerja dan realisasi keuangan Program/Kegiatan dalam aplikasi SiDalev setiap triwulan dan menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* laporan paling lambat tanggal 10 pada triwulan berkenaan.

B. Hasil Evaluasi

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp5.044.664.586.100,00, dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, target Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp551.815.264.592,00 sehingga total target Pendapatan Daerah Perubahan sebesar Rp5.596.479.850.692,00 dengan realisasi Pendapatan Daerah di akhir tahun 2022 sebesar Rp5.905.037.523.797,34 atau 105,51% (saldo *unaudited*). Secara kelompok pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.30.

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

URAIAN	REFF CALK	TA 2022			REALISASI TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN DAERAH	**5.1.1**	**5,596,479,850,692.00**	**5,905,037,523,797.34**	**105.51**	**5,923,153,297,394.76**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.1.1.1**	**3,494,115,418,572.00**	**3,862,875,261,848.23**	**110.55**	**3,117,070,012,473.76**
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	2,879,557,806,488.00	3,230,839,407,191.00	112.20	2,458,530,858,700.00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	10,738,252,500.00	14,348,341,509.00	133.62	14,298,569,091.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	220,323,008,100.00	220,323,008,247.47	100.00	160,711,862,041.73
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	383,496,351,484.00	397,364,504,900.76	103.62	483,528,722,641.03
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**2,047,466,392,120.00**	**2,037,237,485,177.00**	**99.50**	**2,801,186,284,925.00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	2,047,466,392,120.00	2,037,237,485,177.00	99.50	2,801,186,284,925.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**5.1.1.3**	**54,898,040,000.00**	**4,924,776,772.11**	**8.97**	**4,896,999,996.00**
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	54,898,040,000.00	4,924,776,772.11	8.97	4,896,999,996.00

Sumber : Bapenda Provinsi Bali

Terealisasinya target PAD sangat dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian Bali dengan telah dibukanya penerbangan domestik maupun mancanegara serta adanya kegiatan Presidensi G20 Indonesia di Bali berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang memberikan *multiplier effect* terhadap daya beli, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak maupun peningkatan atas pemanfaatan aset daerah.

Pencapaian target pendapatan transfer sangat dipengaruhi oleh realisasi pajak pusat yang pencairan pendapatannya dipengaruhi oleh tingkat realisasi penyerapan dana dan tingkat capaian output kegiatan.

Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak terealisasi berdasarkan target yang ditetapkan dipengaruhi oleh belum optimalnya pendapatan dari Kontribusi Wisatawan yang mulai dikenalkan (*launching*) sebagai komponen pendapatan daerah pada tanggal 29 Juli 2022 melalui aplikasi *Love* Bali.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022.

Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.102.490.842.762,00 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, target Belanja Daerah berubah menjadi Rp. 7.541.821.522.461,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp6.749.127.037.109,59 atau 89,49% (saldo *unaudited*). Secara rinci target dan realisasi Belanja Daerah, tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.31.
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

URAIAN	REFF CALK	TA 2022			REALISASI TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	
BELANJA DAERAH	**5.1.2**	**7,541,821,522,461.00**	**6,749,127,037,109.59**	**89.49**	**6,270,667,217,646.29**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**4,076,148,648,130.00**	**3,791,897,703,325.73**	**93.03**	**4,218,534,729,447.08**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1,824,026,422,662.45	1,740,899,431,377.08	95.44	1,653,001,007,665.15
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1,838,472,468,547.55	1,690,049,421,497.65	91.93	1,580,080,276,691.30
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	-	-	-	2,775,000,000.00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	10,350,595,000.00	4,372,945,000.00	42.25	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	403,159,161,920.00	356,436,889,451.00	88.41	982,678,445,090.63
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	140,000,000.00	139,016,000.00	99.30	-
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**1,800,399,412,612.00**	**1,451,748,423,386.86**	**80.63**	**839,010,470,016.80**
Belanja Modal-Tanah	5.1.2.2.1	770,002,219,242.00	623,659,331,572.00	80.99	439,080,181,058.00
Belanja Modal-Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	129,701,330,422.00	109,213,603,835.00	84.20	105,838,658,813.28
Belanja Modal-Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	413,591,434,404.00	340,651,767,017.86	82.36	170,812,068,572.52
Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	452,699,429,919.00	354,881,755,251.00	78.39	92,544,410,552.00
Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	34,329,998,625.00	23,276,736,561.00	67.80	30,735,151,021.00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	75,000,000.00	65,229,150.00	86.97	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**7,848,875,371.00**	**4,759,779,107.00**	**60.64**	**13,503,458,494.00**
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	7,848,875,371.00	4,759,779,107.00	60.64	13,503,458,494.00
TRANSFER DAERAH	**5.1.2.4**	**1,657,424,586,348.00**	**1,500,721,131,290.00**	**90.55**	**1,199,618,559,688.41**
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	1,354,111,107,615.00	1,231,251,353,817.00	90.93	845,466,055,345.93
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	303,313,478,733.00	269,469,777,473.00	88.84	354,152,504,342.48

Sumber: BPKAD Provinsi Bali

3. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.057.826.256.662,00 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, berubah menjadi sebesar Rp1.945.341.671.769, realisasinya sebesar Rp1.193.798.304.068,62 atau 61,37% (saldo *unaudited).* Secara rinci target dan realisasi Pembiayaan Daerah tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.32.

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

URAIAN	REFF CALK	TA 2022			REALISASI TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PEMBIAYAANDAERAH	**5.1.3**	**1,945,341,671,769.00**	**1,193,798,304,068.62**	**61.37**	**1,197,855,592,021.05**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.3.1**	**2,050,341,671,769.00**	**1,293,798,304,068.62**	**63.10**	**1,242,855,592,021.05**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	850,341,671,769.00	850,296,343,468.62	99.99	192,855,592,021.05
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	1,200,000,000,000.00	443,501,960,600.00	36.96	1,050,000,000,000.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.3.2**	**105,000,000,000.00**	**100,000,000,000.00**	**95.24**	**45,000,000,000.00**
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100.00	-
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2	5,000,000,000.00	-	-	45,000,000,000.00
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SiKPA)	**5.1.4**	**-**	**349,708,790,756.37**	**-**	**850,341,671,769.52**

Sumber: BPKAD Provinsi Bali

4. Kesesuaian Jumlah Program RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (periode tahun 2022)

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Pusat memandang perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pedoman tersebut diharapkan dapat diterapkan secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Pusat memandang perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pedoman tersebut diharapkan dapat diterapkan secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dan didukung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dari klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur tersebut ditetapkan untuk Pemerintah Provinsi, terdapat sebanyak 156 Program, 381 kegiatan dan 1.680 sub kegiatan. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 148 program, 323 kegiatan dan 1.481 sub kegiatan

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

a) membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
b) membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
c) membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
d) menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e) mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f) mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah;
g) melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merancang 153 program, sedangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dalam tabel 7.2 b untuk periode tahun 2022 merancang 166 program. Terjadinya perbedaan jumlah program ini dikarenakan beberapa program dalam RPJMD tidak mendapat pendanaan karena terbatasnya

kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Bali. Perbedaan jumlah Program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut ini:

Tabel 2.33.

Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan

RPJMD SB Tahun 2018-2023

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
1	**DISDIKPORA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**1**	**DISDIKPORA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Pendidikan	1			Program Pengelolaan Pendidikan	1
		Program Pengembangan Kurikulum	1			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1			Program Pengembangan Kurikulum	1
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	1
TOTAL			**8**	**TOTAL**			**8**
2	**DINAS KESEHATAN**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**2**	**DINAS KESEHATAN**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1				
				(DINAS +4 UPTD)			**4**
				3	**RSUD BALI MANDARA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
				TOTAL			1
				4	**RUMAH SAKIT JIWA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1
				TOTAL			**2**
				5	**RS MATA BALI MANDARA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
TOTAL			**5**	**TOTAL**			**1**
3	**DISPUPRKIM**	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**6**	**DISPUPRKIM**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1
		Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1
		Penyelenggaraan Jalan	1			Program Penyelenggaraan Jalan	1
		Pengembangan Jasa Konstruksi	1			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	1			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1
		Pengembangan Perumahan	1			Program Pengembangan Perumahan	1
		Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1
		Program Penatagunaan Tanah	1			Program Penatagunaan Tanah	1
TOTAL			**11**	**TOTAL**			**11**
4	**SATPOL PP**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**7**	**SATPOL PP**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1
TOTAL			**2**	**TOTAL**			**2**
5	**BPBD**	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	**8**	**BPBD**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
						Daerah	
		Program Penanggulangan Bencana	1			Program Penanggulangan Bencana	1
		TOTAL	2			**TOTAL**	2
6	**DISSOS P3A**	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**9**	**DISSOS P3A**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Pemberdayaan Sosial	1			Program Pemberdayaan Sosial	1
		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1			Program Rehabilitasi Sosial	1
		Rehabilitasi Sosial	1			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	1			Program Penanganan Bencana	1
		Penanganan Bencana	1			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	1
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1			Program Perlindungan Perempuan	1
		Perlindungan Perempuan	1			Program Perlindungan Khusus Anak	1
		Peningkatan Kualitas Keluarga	1				
		Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1				

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Pemenuhan Hak Anak	1				
		Perlindungan Khusus Anak	1				
TOTAL			**13**	**TOTAL**			**10**
7	**DISNAKER DAN ESDM**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**10**	**DISNAKER DAN ESDM**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1			Program Penempatan Tenaga Kerja	1
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1			Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1
		Program Hubungan Industrial	1			Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1				
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1				
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1				
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1				
TOTAL			**9**	**TOTAL**			**5**
8	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	**11**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	1			Program Penanganan Kerawanan Pangan	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	1			Program Pengawasan Keamanan Pangan	1
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1			Program Penyuluhan Pertanian	1
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1
		Program Penyuluhan Pertanian	1				
TOTAL			**9**	**TOTAL**			**9**
9	**DPMD DUKCAPIL**	Program Pendaftaran Penduduk	1	**12**	**DPMD DUKCAPIL**	Program Pendaftaran Penduduk	1
		Program Pencatatan Sipil	1			Program Pencatatan Sipil	1
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	1			Program Peningkatan Kerjasama Desa	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1			Program Administrasi Pemerintahan Desa	1
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1
TOTAL			**7**	**TOTAL**			**7**
10	**DISHUB**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**13**	**DISHUB**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	1			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1			Program Pengelolaan Pelayaran	1
		Program Pengelolaan Pelayaran	1			Program Pengelolaan Perkkeretaapian	1
TOTAL			**4**	**TOTAL**			**4**
11	**DISKOMINFOS**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**14**	**DISKOMINFOS**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1
TOTAL			**5**	**TOTAL**			**5**
12	**DISKOP DAN UKM**	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi	1	**15**	**DISKOP DAN UKM**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	1
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1
		Program Pemberdayaan UMKM	1				
TOTAL			**7**	**TOTAL**			**6**
13	**DPMPTSP**	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	**16**	**DPMPTSP**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali	1
		Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1
		Promosi Penanaman Modal	1			Program Promosi Penanaman Modal	1
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
						Modal	
		Pelayanan Penanaman Modal	1			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1				
TOTAL			**6**	**TOTAL**			**5**
14	**DINAS KEBUDAYAAN**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**17**	**DINAS KEBUDAYAAN**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengembangan Kebudayaan	1			Program Pembinaan Sejarah	1
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1
		Program Pembinaan Sejarah	1			Program Pengembangan Kebudayaan	1
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1			Program Pengelolaan Permuseuman	1
		Program Pengelolaan Permuseuman	1				
TOTAL			**6**	**TOTAL**			**5**
15	**DPMA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**18**	**DPMA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	1			Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	1
TOTAL			**2**	**TOTAL**			**2**
16	**DISPERINDAG**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**19**	**DISPERINDAG**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1			Program Pengembangan Ekspor	1
		Program Pengembangan Ekspor	1			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1				
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1				
TOTAL			**9**	**TOTAL**			**8**
17	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Program Penunjang Urusan Pemerintahandaerah Provinsi	1	**20**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Danpulau-Pulau Kecil	1			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1				
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasilperikanan	1				
TOTAL			**6**	**TOTAL**			**4**
18	**DINAS PARIWISATA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**21**	**DINAS PARIWISATA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1
		Program Pemasaran Pariwisata	1			Program Pemasaran Pariwisata	1
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
TOTAL			**5**	**TOTAL**			**5**
19	**DISHUT DAN LH**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**22**	**DISHUT DAN LH**	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1			Program Pengelolaan Hutan	1
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1
		Program Pengelolaan Persampahan	1			Program Pengelolaan Persampahan	1
		Program Pengelolaan Hutan	1				
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1				

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1				
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1				
TOTAL			**12**	**TOTAL**			**8**
20	**BAPPEDA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**23**	**BAPPEDA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali	1
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1
TOTAL			**3**	**TOTAL**			**3**
21	**BRIDA**	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**24**	**BRIDA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
		Penelitian dan Pengembangaan Daerah	1			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1
TOTAL			**2**	**TOTAL**			**2**
22	**BADAN PENGHUBUNG**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**25**	**BADAN PENGHUBUNG**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pelayanan Penghubung	1			Program Pelayanan Penghubung	1
TOTAL			**2**	**TOTAL**			**2**
23	**INSPEKTORAT**	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	**26**	**INSPEKTORAT**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
						Daerah Provinsi	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1			Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	1
		Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	1				
TOTAL			**3**	**TOTAL**			**2**
24	**BKPSDM**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**27**	**BKPSDM**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Kepegawaian Daerah	1			Program Kepegawaian Daerah	1
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
TOTAL			**3**	**TOTAL**			**3**
25	**BADAN KESBANGPOL**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**28**	**BADAN KESBANGPOL**	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1
TOTAL			**5**	**TOTAL**			**5**
26	**BPKAD**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**29**	**BPKAD**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
TOTAL			**3**	**TOTAL**			**3**
27	**SEKRETARIAT DAERAH**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	**30**	**BIRO HUKUM**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pembinaan Perpustakaan	1			Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1	**TOTAL**			**2**
		Program Pengelolaan Arsip	1	**31**	**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN**	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali	1
		Program Penataan organisasi	1			Program Perekonomian Dan Pembangunan	1
		Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Provinsi	0			Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1
		Program Administrasi Umum (Menggunakan Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)		**TOTAL**			**4**
				32	**BIRO UMUM DAN PROTOKOL**	Program Pengelolaan Arsip	1
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Perekonomian dan Pembangunan	1	**TOTAL**			**2**
		Kebijakan Administrasi Pembangunan	1	**33**	**BIRO ORGANISASI**	Program Pembinaan Perpustakaan	1
		Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Kesejahteraan Rakyat	1			Program Penataan Organisasi	1
				TOTAL			**3**
				34	**BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
						Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1
						Program Kesejahteraan Rakyat	1
TOTAL			**12**	**TOTAL**			**3**
28	**SEKRETARIAT DPRD**	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	1	**35**	**SEKRETARIAT DPRD**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan	1

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (periode Tahun 2022)				RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022			
NO	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**	**NO**	**NAMA OPD**	**NAMA PROGRAM**	**Jumlah**
						Fungsi DPRD	
TOTAL			2	**TOTAL**			**2**
29	**BAPENDA**	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	**36**	**BAPENDA**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1
TOTAL			**3**	**TOTAL**			**3**
TOTAL SELURUH PROGRAM RPJMD			**166**	**TOTAL SELURUH PROGRAM RKPD**			**153**

Sumber: Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022 Triwulan IV

C. Capaian Target Kinerja

1. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari total jumlah program sebanyak 153 tersebut, diuraikan ke dalam 611 kegiatan dan 1.469 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung 7 prioritas pembangunan Tahun 2022 dengan melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan.

Dengan menggunakan isian Formulir E.53 dalam aplikasi SiDalev dapat diketahui realisasi capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut:

- Program sebanyak 153, terdapat 8 program yang tidak mencapai target kinerja dan sebanyak 145 program mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- Kegiatan sebanyak 611, terdapat 9 kegiatan yang tidak mencapai target kinerja dan sebanyak 602 kegiatan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- Sub Kegiatan sebanyak 1.469, terdapat 29 sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja dan sebanyak 1.440 sub kegiatan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Rincian rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencapai target/tidak mencapai target pada masing-masing Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34.

Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Jumlah			Yang Mencapai Target			Yang Tidak Mencapai Target		
			Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1	8	29	104	4	23	90	4	6	14
2	Dinas Kesehatan	1	4	29	57	4	29	54	0	0	3
3	Rsud Bali Mandara	1	1	3	4	1	3	4	0	0	0
4	Rumah Sakit Jiwa	1	2	4	4	2	4	4	0	0	0
5	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	1	1	2	2	1	2	2	0	0	0
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman	1	11	30	74	11	30	74	0	0	0
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2	7	18	2	7	17	0	0	1
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	10	31	67	10	31	67	0	0	0
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2	13	20	1	13	20	1	0	0
10	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Manusia	2	5	17	40	4	16	39	1	1	1
11	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	2	9	34	75	9	34	75	0	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2	7	12	26	7	12	26	0	0	0
13	Dinas Perhubungan	2	4	30	61	4	30	61	0	0	0
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2	5	11	35	4	11	35	1	0	0
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	6	15	30	6	15	30	0	0	0
16	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2	5	12	21	5	12	21	0	0	0
17	Dinas Kebudayaan	2	5	27	77	5	27	77	0	0	0
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	8	22	40	8	22	35	0	0	5

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Jumlah			Yang Mencapai Target			Yang Tidak Mencapai Target		
			Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	4	22	33	4	21	32	0	1	1
20	Dinas Pariwisata	3	5	12	25	4	12	24	1	0	1
21	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3	8	41	87	8	41	86	0	0	1
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	3	11	41	3	11	41	0	0	0
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4	2	9	28	2	9	28	0	0	0
24	Badan Penghubung	4	2	7	16	2	7	16	0	0	0
25	Inspektorat	4	2	10	32	2	10	32	0	0	0
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	4	3	24	56	3	24	56	0	0	0
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	5	9	20	5	9	20	0	0	0
28	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	4	3	13	28	3	13	28	0	0	0
29	Biro Hukum	4	2	6	13	2	5	11	0	1	2
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	4	4	12	20	4	12	20	0	0	0
31	Biro Umum dan Protokol	4	2	12	24	2	12	24	0	0	0
32	Biro Organisasi	4	3	8	20	3	8	20	0	0	0
33	Biro Pemerintahan dan Kesra	4	3	9	18	3	9	18	0	0	0
34	Sekretariat DPRD	4	2	15	48	2	15	48	0	0	0
35	Badan Pendapatan Daerah	4	3	53	189	3	53	189	0	0	0
36	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	5	2	10	16	2	10	16	0	0	0
Total Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			**153**	**611**	**1.469**	**145**	**602**	**1.440**	**8**	**9**	**29**

2. Capaian Realisasi Keuangan dan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Hasil ringkasan dari isian Formulir E.53 dalam aplikasi SiDalev dapat diketahui realisasi capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan rata-rata Interval Nilai Realisasi Keuangan dan Kinerja sebesar 90,87% katagori "Sangat Tinggi" yang ringkasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.35.

Target kinerja dan penyerapan dana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.36.

Tabel 2.35.

Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Pada Aplikasi Si-Dalev Provinsi Bali Tahun 2022

NO	NAMA OPD	PAGU (Rp.)	Bobot Kinerja per Tahun (%)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN												JUMLAH			Rata-rata Keu dan Kin (%)	Kategori
				TW I			TW II			TW III			TW IV							
				KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (%)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1,509,567,290,021.00	100	196,254,602,555.00	13.00	14.94	349,599,141,484.86	23.16	38.47	360,969,360,512.71	23.91	20.57	441,427,660,181.00	29.24	16.80	1,348,250,764,733.57	89.31	90.78	90.05	T
2	Dinas Kesehatan	130,610,658,889.00	100	14,942,945,203.00	11.44	6.50	32,167,340,056.00	24.63	7.20	31,413,654,882.00	24.05	1.65	33,352,238,263.00	25.54	85.36	111,876,178,404.00	85.66	100.72	93.19	ST
3	RSUD Bali Mandara	278,391,069,924.00	100	40,882,941,990.84	14.69	25.00	58,850,095,430.85	21.14	25.00	42,166,447,173.24	15.15	25.00	129,422,336,880.73	46.49	25.00	271,321,821,475.66	97.46	100.00	98.73	ST
4	Rumah Sakit Jiwa	110,339,146,888.00	100	8,030,338,145.00	7.28	41.93	7,731,286,013.00	7.01	22.17	9,477,309,179.25	8.59	19.72	15,385,072,673.69	13.94	16.19	99,511,883,670.94	90.19	100.01	95.10	ST
5	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	89,149,384,722.00	100	15,697,563,336.00	17.61	16.84	22,604,170,107.00	25.36	21.56	19,953,898,042.00	22.38%	26.72	22,280,401,762.00	24.99	34.88	80,536,033,247.00	90.34	100.00	95.17	ST
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman	1,747,725,763,571.55	100	62,001,268,464.00	3.55	32.77	375,155,966,509.00	21.47	20.51	551,316,552,859.00	31.54%	24.22	584,342,642,596.26	33.43	15.00	1,572,816,430,428.26	89.99	92.49	91.24	ST
7	Satpol PP	40,535,014,866.00	100	8,560,854,405.00	21.12	37.10	10,104,993,973.00	24.93	24.20	10,259,144,484.00	25.31%	20.10	11,170,958,259.00	27.56	19.90	40,095,951,121.00	98.92	101.30	100.00	ST
8	Dinas Sosial P3A	31,054,271,485.00	100	4,883,696,043.00	15.73	52.41	9,487,409,587.00	30.55	26.97	6,142,774,841.00	19.78%	5.71	4,720,544,168.00	15.20	3.82%	25,234,424,639.00	81.26	88.91	85.08	T
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20,245,311,156.00	100	3,680,265,579.00	18.18	17.21	2,325,599,626.00	11.49	19.33	5,398,975,745.00	26.67%	27.67	5,363,100,013.00	26.49	34.08	19,667,645,521.00	97,15	97.92	97.54	ST
10	Disnaker dan ESDM	31,663,582,206.00	100	5,972,747,576.00	18.86	27.71	5,637,239,749.00	17.80	24.32	6,105,072,400.00	19.28%	15.89	17,542,368,321.00	55.40	15.72	29,946,979,578.00	94.58	83.65	89.11	T
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	78,322,654,634.00	100	2,193,645,700.00	2.80	53.13	13,085,505,198.00	16.71	12.40	8,273,461,251.00	10.56%	17.30	14,382,656,308.00	18.36	14.27	75,699,531,497.00	96.65	97.10	96.88	ST
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	27,109,830,101.00	100	3,977,482,549.00	14.67	2.75	4,860,736,987.00	17.93	15.67	6,606,652,525.00	24.37	8.33	10,118,114,039.00	37.32	15.42	25,562,986,100.00	94.29	89.91	92.10	ST
13	Dinas Perhubungan	30,439,092,618.00	100	3,369,278,121.00	11.07	29.37	6,931,223,732.00	22.77	21.86	4,771,974,531.00	15.68	23.05	14,190,898,236.00	46.62	22.67	29,263,374,620.00	96.14	96.94	96.54	ST
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	185,958,156,411.00	100	14,624,258,005.00	7.86	31.08	13,812,806,845.00	7.43	19.67	56,443,278,780.00	30.35	4.55	70,587,954,506.85	37.96	35.38	155,468,298,136.85	83.60	90.68	87.14	T
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23,344,418,533.00	100	3,694,055,133.00	15.82	20.68	4,105,671,517.00	17.59	21.51	5,908,205,073.00	25.31	14.88	6,732,864,359.00	28.84	45.03	20,440,796,082.00	87.56	102.10	94.83	ST
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	19,407,681,922.00	100	3,550,206,438.00	18.29	38.94	2,975,042,786.00	15.33	7.64	5,928,526,898.00	30.55	19.27	4,326,195,333.00	22.29	22.73	16,779,971,455.00	86.46	92.36	89.41	T
17	Dinas Kebudayaan	115,618,540,953.00	100	11,735,936,389.00	10.15	0.00	15,101,411,828.00	13.06	0.00	24,296,807,457.00	21.01	0.00	42,785,713,964.00	37.01	98,75	93,919,869,638.00	81.23	98.75	89.99	T
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22,216,660,585.00	100	4,204,457,667.00	18.92	18.13	1,291,897,291.00	5.81	22.29	7,805,866,601.00	35.14	20.63	8,639,431,011.00	38.89	38.96	21,941,652,570.00	98.76	100.01	99.38	ST
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	28,168,213,819.00	100	2,977,741,436.00	10.57	14.52	4,976,959,171.00	17.67	16.66	3,850,303,816.00	13.67	22.36	14,699,598,487.00	52.19	19.02	26,504,602,910.00	94.09	72.56	83.33	T
20	Dinas Pariwisata	14,105,482,814.00	100	2,785,678,730.00	19.75	7.40	3,814,336,857.00	27.04	7.08	3,714,547,976.00	26.33	39.54	3,289,956,531.00	23.32	58.57	13,604,520,094.00	96.45	112.59	104.52	ST
21	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	56,517,323,564.00	100	5,152,142,732.00	9.12	29.00	8,640,354,169.00	15.29	21.23	5,757,984,610.00	10.19	25.95	34,915,604,215.00	61.78	24.52	54,466,085,726.00	96.37	100.70	98.54	ST
22	Bappeda	22,141,607,206.00	100	4,305,114,931.00	19.44	7.08	4,987,027,876.00	22.52	10.87	4,928,860,458.00	22.26	32.29	6,340,850,624.12	28.64	49.83	20,561,853,889.12	92.87	100.07	96.47	ST
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21,945,908,149.00	100	4,108,738,831.00	18.72	55.69	5,277,125,749.00	24.05	16.05	5,402,653,093.00	24.62	8.44	5,582,743,330.00	25.44	15.61	20,371,261,003.00	92.82	95.79	94.31	ST
24	Badan Penghubung	8,254,930,826.00	100	1,574,311,601.00	19.07	17.66	1,867,581,147.00	22.62	17.93	1,779,763,556.00	21.56	0.00	2,620,358,524.00	31.74	64.40	7,842,014,828.00	95.00	99.99	97.49	ST
25	Inspektorat	27,276,504,592.00	100	6,204,775,538.00	22.75	0.00	7,108,702,925.00	26.06	0.00	6,897,983,894.00	25.29	0.00	6,426,279,908.00	23.56	100.00	26,637,742,265.00	97.66	100.00	98.83	ST
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	54,914,304,935.00	100	7,554,040,336.00	13.76	25.00	12,047,715,067.00	21.94	23.33	16,133,686,944.00	29.38	23.33	14,661,613,749.00	26.70	22.29	50,397,056,096.00	91.77	93.96	92.87	ST
27	Badan Kesbangpol	30,543,632,435.00	100	2,416,834,165.00	7.91	11.74	19,396,233,011.00	63.50	22.18	3,019,641,984.00	9.89	35.88	2,738,901,707.00	8.97	28.62	27,571,610,867.00	90.27	98.42	94.34	ST
28	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	1,715,284,080,941.00	100	1,392,324,672.00	0.08	10.84	357,186,747,408.00	20.82	22.89	2,293,477,482.00	0.13	14.79	2,455,050,665.11	0.14	51.49	1,552,442,230,053.00	90.50	100.00	95.25	ST
29	Biro Hukum	5,873,304,652.00	100	828,350,471.00	14.10	35.00	1,472,903,310.00	25.08	20.60	1,160,846,728.00	19.76	23.20	2,230,860,450.00	37.98	21.20	5,692,960,959.00	96.93	100.00	98.46	ST
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	12,334,963,744.00	100	666,172,806.00	5.40	33.33	1,711,256,680.00	13.87	25.00	1,008,912,641.00	8.18	20.83	2,389,928,184.00	19.38	20.83	11,776,270,311.00	95.47	99.99	97.73	ST
31	Biro Umum dan Protokol	92,821,341,287.00	100	10,832,308,014.00	11.67	20.83	13,764,038,059.00	14.83	20.83	28,663,635,781.00	30.88	20.83	46,729,281,293.00	50.34	37.50	90,989,263,147.00	98.03	99.99	99.01	ST
32	Biro Organisasi	1,997,914,688.00	100	697,857,343.00	34.93	15.89	378,831,545.00	18.96	18.00	244,609,331.00	12.24	26.89	504,284,080.00	25.24	29.11	1,825,582,299.00	91.37	89.89	90.63	ST
33	Biro Pemerintahan dan Kesra	37,967,044,140.00	100	798,072,873.00	2.10	0.00	207,587,358.00	0.55	0.00	206,979,738.00	0.55	0.00	30,382,644,081.00	80.02	100.00	31,595,284,050.00	83.22	100.00	91.61	ST
34	Sekretariat DPRD	206,747,639,925.00	100	32,392,535,720.00	15.67	26.68	22,712,244,401.00	10.99	12.78	44,058,551,558.00	21.31	22.04	46,556,653,734.00	22.52	35.75	145,719,985,413.00	70.48	100.00	85.24	T
35	Badan Pendapatan Daerah	144,944,796,065.00	100	27,533,872,634.00	19.00	23.04	30,123,202,798.00	20.78	28.81	34,752,746,248.00	23.98	24.96	39,430,429,339.00	27.20	18.96%	131,840,251,019.00	90.96	95.76	93.36	ST
36	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	490,199,458,031.00	100	148,296,697,440.00	30.25	0.00	9,918,891,728.00	2.02	0.00	206,282,022,892.00	42.08	0.00	120,820,261,187.00	24.65	100.00	485,317,873,247.00	99.00	100.00	99.50	ST
TOTAL		7,463,736,981,298.55	100	668,774,113,571.84	14.12	21.80	1,441,419,277,978.71	19.08	17.97	1,533,395,171,964.20	20.76	18.13	1,819,546,450,962.76	31.65	38.22	6,743,491,041,093.40	85.61	96.12	90.87	ST

Tabel T-C 19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1.450.911.149.258,00**		**1.346.618.654.825,57**								
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**81,25**	**3.089.294.837.691**		**807.350.812.489,65**	**81**	**nilai**	**849.413.159.140,00**	**80,9**	**818.939.106.929,56**	**99,88%**	**96,41%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu**			**6**	**9.875.300,00**	**8**	**dokumen**	**28.742.900,00**	**8**	**25.086.140,00**	**100,00%**	**87,28%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu			5	6.533.400,00	7	dokumen	24.533.100,00	7	21.317.890,00	100,00%	86,89%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tepat waktu			1	3.341.900,00	1	dokumen	4.209.800,00	1	3.768.250,00	100,00%	89,51%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu**			**100**	**799.111.300.912,65**	12	**dokumen**	**836.981.564.457,00**	**12**	**808.016.757.733,88**	**100,00%**	**96,54%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN dibayar tepat waktu			100	798.967.949.192,65	100	persen	836.822.718.372,00	100	807.879.649.708,88	100,00%	96,54%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi			1000	98.869.220,00	1500	dokumen	78.500.790,00	1500	71.281.625,00	100,00%	90,80%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu			10	44.482.500,00	21	laporan	80.345.295,00	21	65.826.400,00	100,00%	81,93%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah dengan baik dan tepat waktu**			**3**	**57.739.250,00**	**2**	**dokumen**	**49.990.200,00**	**2**	**47.400.100,00**	**100,00%**	**94,82%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD			3	57.739.250,00	3	laporan	49.990.200,00	3	47.400.100,00	100,00%	94,82%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelayanan adminisrasi kepegawaian perangkat daerah**			**100**	**72.121.070,00**	100	**persen**	**27.537.400,00**	100	**26.605.900,00**	**100,00%**	**96,62%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian			266	72.121.070,00	266	laporan	27.537.400,00	266	26.605.900,00	100,00%	96,62%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah**			**100**	**891.314.635,00**	**100**	**persen**	**1.219.646.735,00**	**100**	**1.075.635.936,00**	**100,00%**	**88,19%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			47	536.746.810,00	47	jenis	683.293.435,00	47	602.478.216,00	100,00%	88,17%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			10	49.660.875,00	10	jenis	48.674.300,00	10	28.916.100,00	100,00%	59,41%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia			10	46.780.000,00	2	jenis	30.025.000,00	2	29.832.000,00	100,00%	99,36%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan koordinasi			12	258.126.950,00	12	laporan	457.654.000,00	12	414.409.620,00	100,00%	90,55%					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya layanan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah**			**1**	**99.519.530,00**	**100**	**persen**	**2.188.984.000,00**	**100**	**1.555.642.784,20**	**100,00%**	**71,07%**					**DISDIKPORA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	1.01.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan siap digunakan			1	99.519.530,00	1	unit	2.188.984.000,00	1	1.555.642.784,20	100,00%	71,07%					DISDIKPORA	
	1.01.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah**			**100**	**6.086.255.219,00**	**100**	**persen**	**6.899.266.920,00**	**100**	**6.356.574.538,00**	**100,00%**	**92,13%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu			3	502.943.271,00	3	rekening	682.653.000,00	3	624.114.738,00	100,00%	91,42%					DISDIKPORA	
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai kontrak untuk menunjang kegiatan kantor			6	5.583.311.948,00	163	orang	6.216.613.920,00	163	5.732.459.800,00	100,00%	92,21%					DISDIKPORA	
	1.01.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah**			**100**	**1.022.686.573,00**	**100**	**persen**	**2.017.426.528,00**	**100**	**1.835.403.797,48**	**100,00%**	**90,98%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan			21	445.355.845,00	24	unit	670.870.528,00	24	550.535.400,00	100,00%	82,06%					DISDIKPORA	
	1.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik			1	194.455.100,00	1	unit	913.876.000,00	1	866.231.079,48	100,00%	94,79%					DISDIKPORA	
	1.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik			8	382.875.628,00	8	jenis	432.680.000,00	8	418.637.318,00	100,00%	96,75%					DISDIKPORA	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah**	100	1.125.353.152.828	**100**	**442.805.925.376,53**	**100**	**persen**	**601.468.941.268,00**	**74**	**527.654.453.746,01**	**74,00%**	**87,73%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas**			**100**	**143.669.702.193,53**	**100**	**persen**	**312.677.212.870,00**	**100**	**255.392.261.796,01**	**100,00%**	**81,68%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang dibangun dan siap digunakan			6	39.373.210.786,00	8	sekolah	53.732.869.628,00	6	31.917.336.324,54	75,00%	59,40%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan			30	13.891.682.198,53	21	ruang kelas	15.241.874.304,00	21	9.780.472.651,47	100,00%	64,17%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dibangun siap digunakan					1	ruangan	585.729.000,00	1	585.729.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah ruang laboratorium biologi yang dibangun dan siap digunakan					2	ruangan	1.009.054.600,00	2	1.009.054.600,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang dibangun siap digunakan			1	409.088.000,00	1	ruangan	493.993.800,00	1	493.993.800,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun siap digunakan			1	285.922.000,00	3	ruangan	856.280.000,00	3	856.280.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.19	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan			5	1.226.821.582,00	10	ruangan	1.691.920.000,00	10	1.691.920.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.20	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan			3	958.169.465,00	3	ruangan	784.691.000,00	**3**	784.691.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan			2	508.105.000,00	2	ruangan	521.500.000,00	2	521.500.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.22	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang di Rehabilitasi Sedang/ Berat dan siap digunakan					1	ruangan	260.750.000,00	1	260.750.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.23	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang di Rehabilitasi Sedang/ Berat dan siap digunakan					1	ruangan	268.151.000,00	1	268.151.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.31	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi dan siap digunakan			3	296.691.000,00	1	unit	106.061.000,00	1	106.061.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.36	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					26	Paket	902.330.600,00	26	902.330.600,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.39	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan			6	1.181.775.350,00	1	sekolah	4.515.575.450,00	1	2.414.809.081,00	100,00%	53,48%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.41	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Peserta Dididk sekolah yang diadakan dan siap digunakan			5	1.208.668.000,00	1	sekolah	125.000.000,00	1	124.495.000,00	100,00%	99,60%					DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	1.01.02.1.01.48	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi					86	satuan pendidikan	37.657.700,00	86	31.711.500,00	100,00%	84,21%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.49	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas			3	46.637.475,00	86	sekolah	205.273.300,00	86	187.485.500,00	100,00%	91,33%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.50	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan			80	42.967.671.319,00	84	sekolah	57.846.573.388,00	84	43.868.617.248,00	100,00%	75,84%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.52	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang terbina			84	649.071.696,00	86	sekolah	2.910.538.600,00	86	2.546.446.709,00	100,00%	87,49%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.53	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Atas	Jumlah sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS			160	40.665.321.122,00	160	sekolah	170.560.240.000,00	160	157.020.273.282,00	100,00%	92,06%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.54	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik			160	867.200,00	86	sekolah	21.149.500,00	86	20.153.500,00	100,00%	95,29%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan**			**100**	**278.139.613.477,00**	**100**	**persen**	**263.843.974.848,00**	**100**	**249.535.743.367,00**	**100,00%**	**94,58%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan			3	12.990.647.070,00	3	Sekolah	12.828.359.000,00	3	9.889.230.759,00	100,00%	77,09%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Kelas Baru yang ditambah dan siap digunakan			2	1.159.044.900,00	2	sekolah	1.152.800.000,00	2	664.363.573,00	100,00%	57,63%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan			6	8.675.978.800,00	3	ruangan	4.500.000.000,00	3	4.500.000.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.10	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun dan siap digunakan			3	1.054.852.172,00	3	Sekolah	846.197.000,00	3	658.544.876,00	100,00%	77,82%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.28	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia					3	Paket	585.000.000,00	3	572.900.000,00	100,00%	97,93%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.37	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah personil peserta didik yang tersedia					509	siswa	3.808.855.000,00	509	2.204.059.100,00	100,00%	57,87%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.38	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan			3	62.195.771,00	9	paket	10.970.000.000,00	9	10.970.000.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.41	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kretivitas			53	9.060.000,00	53	orang	87.000.000,00	53	87.000.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.42	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan			670	44.359.832.502,00	53	sekolah	49.610.791.718,00	53	40.711.680.438,00	100,00%	82,06%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.43	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					250	orang	460.000.000,00	250	338.689.176,00	100,00%	73,63%						
	1.01.02.1.02.45	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang terbina			1	833.635.876,00	1	dokumen	269.752.130,00	1	214.055.445,00	100,00%	79,35%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.46	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS			163	208.994.366.386,00	175	sekolah	178.725.220.000,00	175	178.725.220.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Meningkatnya Pelayanan pendidikan khusus**			**100**	**20.996.609.706,00**	**100**	**persen**	**24.947.753.550,00**	**100**	**22.726.448.583,00**	**100,00%**	**91,10%**					**DISDIKPORA**	
	1.01.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan			3	2.703.398.014,00	3	sekolah	611.900.000,00	3	610.544.006,00	100,00%	99,78%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan			1	187.818.250,00	1	ruangan	204.443.100,00	1	204.443.100,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun dan siap digunakan			2	1.607.660.590,00	2	sekolah	2.099.008.244,00	2	1.516.173.785,00	100,00%	72,23%					DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	1.01.02.1.03.08	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumalah Sarana Prasaranan dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					1	Unit	225.886.100,00	1	225.886.100,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.10	Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah yg dibangun dan siap digunakan					3	sekolah	972.864.000,00	2	648.576.000,00	66,67%	66,67%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan			3	789.587.354,00	3	sekolah	3.156.260.000,00	3	3.156.209.335,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang direhab dan siap digunakan					1	sekolah	193.140.000,00	1	193.140.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.35	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					4	Paket	137.458.900,00	4	104.457.552,00	100,00%	75,99%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.36	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Natura dan Pakan Natura Pada Sekolah yang diadakan dan siap konsumsi pada sekolah			9	140.963.530,00	6	sekolah	1.144.709.100,00	6	708.819.465,00	100,00%	61,92%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.40	Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					1	Paket	72.670.000,00	1	70.869.998,00	100,00%	97,52%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.47	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan	jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu					14	dokumen	27.400.400,00	14	21.115.600,00	100,00%	77,06%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.48	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi atau Lomba Akademik dan Non Akademik					135	orang	74.865.400,00	135	70.712.500,00								
	1.01.02.1.03.49	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan			48	5.545.037.852,00	12	sekolah	5.548.936.056,00	12	5.457.783.240,00	100,00%	98,36%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.51	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK			14	305.710.550,00	1	dokumen	304.423.850,00	1	236.106.646,00	100,00%	77,56%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.52	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan Baik			14	9.703.452.716,00	14	sekolah	10.155.530.000,00	14	9.483.891.456,00	100,00%	93,39%					DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.53	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			12	12.980.850,00	1	dokumen	18.258.400,00	1	17.719.800,00	100,00%	97,05%					DISDIKPORA	
	1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan**	100	1.802.715.150	**1**	**75.171.395,00**	86	**persen**	**29.048.850,00**	**100**	**25.094.150,00**	**116,28%**	**86,39%**					DISDIKPORA	
	1.01.04.1.01	**Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	**Meningkatnya kualitas guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus**			**1**	**75.171.395,00**	100	**persen**	**29.048.850,00**	**100**	**25.094.150,00**	**100,00%**	**86,39%**					DISDIKPORA	
	1.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terdistribusikan dengan baik			1	75.171.395,00	1000	orang	29.048.850,00	1000	25.094.150,00	100,00%	86,39%					DISDIKPORA	
	2,19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**1.278.133.100,00**			**58.699.198.455,00**		**56.176.363.491,00**							DISDIKPORA	
	2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan**	81	1.671.495.577	**18**	**178.133.100,00**	82	**persen**	**1.139.905.585,00**	83	**944.315.240,00**	**101,22%**	**82,84%**					DISDIKPORA	
	2.19.02.1.01	**Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**meningkatnya prestasi dan daya saing pemuda**			**18**	**178.133.100,00**	**72**	**orang**	**1.139.905.585,00**	72	**944.315.240,00**	**100,00%**	**82,84%**					DISDIKPORA	
	2.19.02.1.01.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar	Jumlah peserta seleksi Paskibraka, gita bahana nusantara dan jambore pemuda daerah			18	178.133.100,00	178	orang	1.139.905.585,00	72	944.315.240,00	40,45%	82,84%					DISDIKPORA	
	2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional**	**480**	**100.488.299.503**			**100**	**mendali**	**57.059.292.870,00**	**180**	**54.732.048.251,00**	**180,00%**	**95,92%**					DISDIKPORA	
	2.19.03.1.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**Meningkatnya kualitas kompetisi cabang olahraga**					**5**	**kegiatan**	**56.334.292.870,00**	**3**	**54.007.048.251,00**	**60,00%**	**95,87%**					DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.19.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga dan jumlah Atlet serta ofisial yang mengikuti Multi Event dan Single Event			-	-	32	cabang olahraga	52.834.293.440,00	32	50.832.786.549,00	100,00%	96,21%					DISDIKPORA	
	2.19.03.1.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event					150	orang	3.499.999.430,00	150	3.174.261.702,00	100,00%	90,69%						
	2.19.03.1.04	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Meningkatnya jumlah Organisasi keolahragaan tingkat provinsi yang berprestasi yang dibina**					52	**organisasi**	**725.000.000,00**	**59**	**725.000.000,00**	**113,46%**	**100,00%**					**DISDIKPORA**	
	2.19.03.1.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/Organisasi keolahragaan			-	-	7	lembaga	725.000.000,00	7	725.000.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase organisasi kepramukaan yang aktif dalam Satuan Karya Pramuka**	52	1.850.000.000	**20**	**1.100.000.000,00**	50	**persen**	**500.000.000,00**	60	**500.000.000,00**	**120,00%**	**100,00%**					DISDIKPORA	
	2.19.04.1.01	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pramuka pada satuan pendidikan**			**20**	**1.100.000.000,00**	100	**persen**	**500.000.000,00**	100	**500.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					DISDIKPORA	
	2.19.04.1.01.05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat provinsi			20	1.100.000.000,00	25	kegiatan	500.000.000,00	25	500.000.000,00	100,00%	100,00%					DISDIKPORA	
	1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1.320.673.100,00**		**1.306.325.370,00**								
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**80,9**	**513.468.177,00**	**81**	**nilai**	**507.722.990,00**	**80,9**	**500.085.120,00**	**99,88%**	**98,50%**					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah**			**100**	**75.170.067,00**	**100**	**persen**	**63.236.110,00**	**100**	**58.035.640,00**	**100,00%**	**91,78%**					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Keadaan Baik			43	56.684.067,00	43	Jenis	48.157.110,00	43	44.450.890,00	100,00%	92,30%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia			4	1.916.000,00	4	Jenis	4.194.000,00	4	3.546.500,00	100,00%	84,56%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia			3	2.800.000,00	3	Jenis	3.500.000,00	3	3.089.000,00	100,00%	88,26%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			19	13.770.000,00	30	Laporan	7.385.000,00	30	6.949.250,00	100,00%	94,10%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah**			**100**	**375.764.510,00**	**100**	**persen**	**376.764.480,00**	**100**	**376.764.480,00**	**100,00%**	**100,00%**					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat			700	1.000.000,00	800	Surat	2.000.000,00	800	2.000.000,00	100,00%	100,00%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor			10	374.764.510,00	10	Orang	374.764.480,00	10	374.764.480,00	100,00%	100,00%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah**			**100**	**62.533.600,00**	**100**	**persen**	**67.722.400,00**	**100**	**65.285.000,00**	**100,00%**	**96,40%**					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan atau pakai			2	58.808.600,00	2	Kendaraan	54.832.400,00	2	53.615.000,00	100,00%	97,78%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dalam keadaan baik			1	1.400.000,00	1	paket	3.000.000,00	1	2.950.000,00	100,00%	98,33%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik			1	2.325.000,00	1	paket	9.890.000,00	1	8.720.000,00	100,00%	88,17%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK**	75	3.992.003.505		**768.271.400,00**	**50**	**persen**	**812.950.110,00**	**57**	**806.240.250,00**	**114,00%**	**99,17%**					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah atas**			**100**	**477.517.850,00**	**100**	**persen**	**496.027.530,00**	**100**	**492.280.600,00**	**100,00%**	**99,24%**					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.01.47	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada jenjang SMA			84	462.453.800,00	88	sekolah	481.648.560,00	88	478.461.200,00	100,00%	99,34%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.01.51	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas			435	15.064.050,00	270	orang	14.378.970,00	270	13.819.400,00	100,00%	96,11%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.02	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah kejuruan**			**100**	**290.753.550,00**	**100**	**persen**	**316.922.580,00**	**100**	**313.959.650,00**	**100,00%**	**99,07%**					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.02.39	Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMK			53	285.037.250,00	55	sekolah	302.654.650,00	55	300.686.950,00	100,00%	99,35%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.02.43	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			1	5.716.300,00	270	orang	14.267.930,00	270	13.272.700,00	100,00%	93,02%					UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**349.769.088,00**		**325.784.538,00**								
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**80,9**	**259.412.238,00**	**81**	**nilai**	**316.515.738,00**	**80,9**	**293.857.138,00**	**99,88%**	**92,84%**					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah**			**100**	**24.265.750,00**	**100**	**persen**	**25.401.050,00**	**100**	**23.997.050,00**	**100,00%**	**94,47%**					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia dan siap digunakan			20	13.920.750,00	20	jenis	6.781.850,00	20	6.550.050,00	100,00%	96,58%					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			4	4.305.000,00	4	jenis	6.255.200,00	4	5.201.000,00	100,00%	83,15%					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi			18	6.040.000,00	31	laporan	12.364.000,00	31	12.246.000,00	100,00%	99,05%					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah**			**100**	**225.858.688,00**	100	**persen**	**225.858.688,00**	100	**225.858.688,00**	**100,00%**	**100,00%**					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang teregistrasi dengan baik			200	1.000.000,00	200	surat	1.000.000,00	200	1.000.000,00	100,00%	100,00%					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor			6	224.858.688,00	6	orang	224.858.688,00	6	224.858.688,00	100,00%	100,00%					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah**			**100**	**9.287.800,00**	**100**	**persen**	**65.256.000,00**	100	**44.001.400,00**	**100,00%**	**67,43%**					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan			1	9.287.800,00	1	unit	65.256.000,00	1	44.001.400,00	100,00%	67,43%					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai- nilai kearifan lokal**	51,87	718.101.500		**28.550.300,00**	51,37	**persen**	**33.253.350,00**	**55,7**	**31.927.400,00**	**108,43%**	**96,01%**					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.01	**Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah**			**100**	**12.683.300,00**	**100**	**persen**	**15.777.450,00**	**70,07**	**14.952.400,00**	**70,07%**	**94,77%**					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen kompetensi dasar muatan lokal pada satuan pendidikan menengah					0	dokumen	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah analisis dokumen awal penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menengah					0	dokumen	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.01.04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen pendukung pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah			1	12.683.300,00	1	dokumen	15.777.450,00	1	14.952.400,00	100,00%	94,77%					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.02	**Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan khusus**			**1**	**15.867.000,00**	100	**persen**	**17.475.900,00**	**85,71**	**16.975.000,00**	**85,71%**	**97,13%**					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Pendukung Pelatihan Penyusunan kurikulum Muatan lokal pendidikan khusus			1	15.867.000,00	**1**	dokumen	17.475.900,00	1	16.975.000,00	100,00%	97,13%					UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
Diskes																					
RSBM																					
	1.02.0.00.0.00.01.0005	**UPTD. RUMAH SAKIT JIWA**			**109.424.976.088,00**	**0**	**93.883.926.251,94**			**110.339.146.888**		**99.511.883.670,94**		**90,19%**		**193.395.809.923**			**Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali**																**Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)**	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**81 nilai**				**81**	**nilai**		**82,69**		**102,09%**							**Data capaian SAKIP RSJ 2021**
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	**81 nilai**	**107.424.975.188,00**	**84,9**	**80.118.899.571,94**	**81**	**nilai**	**97.258.199.656**	**88,66**	**86.982.939.717,94**	**109,46%**	**89,44%**	**173,56**	**167.101.839.290**				**capaian Survey kepuasan masyarakat**
	1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu**			**100**	**57.954.158.708,00**	**100**	**%**	**68.788.737.914**	**100**	**61.233.976.660**	**100,00%**	**89,02%**	**200,00**	**119.188.135.368**			**Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan sesuai SOP**	**100%**	**70.591.077.586,00**															**perubahan indikator kinerja kegiatan di tahun 2023, Pagu masih berupa kebutuhan Dana**
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			1	57.954.158.708,00	1	tahun	68.788.737.914	1	61.233.976.660	100,00%	89,02%	2,00	119.188.135.368			Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)	
		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	436 or/bln	70.591.077.586,00															perubahan indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023, Pagu masih berupa kebutuhan Dana

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan**			**100**	**823.186.586,00**	**100**	**%**	**969.461.742**	**100**	**756.944.406**	**100,00%**	**78,08%**	**200,00**	**1.580.130.992**			**Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	12.833.897.602,00															perubahan indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia			9	823.186.586,00	9	Rekening	969.461.742	9	756.944.406	100,00%	78,08%	18,00	1.580.130.992			Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	1.114.110.402,00															perubahan indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	11.719.787.200,00															penambahan kegiatan baru berikut indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023
	1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah Pasien yang dilayani sesuai dengan standar pelayanan**			**100**	**21.341.554.277,94**	**100**	**%**	**27.500.000.000**	**100**	**24.992.018.651,94**	**100,00%**	**90,88%**	**200,00**	**46.333.572.930**			**Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)**	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Jiwa Provinsi Bali**	**81,5 nilai**	**24.000.000.000,00**															**perubahan indikator kinerja kegiatan di tahun 2023**
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali			15514	21.341.554.277,94	18.983	kunjungan	27.500.000.000	16.969	24.992.018.651,94	89,39%	90,88%	32483	46.333.572.930			Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	24.000.000.000,00															perubahan indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan ODGJ Berat yang Dilayani**			**51,77**	**13.765.026.680,00**												**Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)**	
			Percentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	**87%**	**2.000.000.900,00**			**87**	**%**	**13.080.947.232**	**84,48**	**12.528.943.953**	**97,10%**	**95,78%**						**Data capaian tahun 2022 di ampu Dinas Kesehatan**
	1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana**			**97,33**	**13.765.026.680,00**	**100**	**%**	**13.080.947.232**	**100**	**12.528.943.953**	**100,00%**	**95,78%**	**197,33**	**26.293.970.633**			**Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**Percentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan**	**100%**	**2.000.000.900,00**															perubahan indikator kinerja kegiatan di tahun 2023
	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Sarana,Prasarana dan Gedung/Bangunan Rumah Sakit yang diadakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Tersedianya Tenaga Kesehatan			1	13.765.026.680,00	1	tahun	13.080.947.232	1	12.528.943.953	100,00%	**95,78%**	**2,00**	26.293.970.633			Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)	
						1		1	tahun		1		100,00%		**2,00**					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1 unit	2.000.000.900,00														perubahan indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023
rs mata																				
dispuprkim																				
	1,05	Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	SATPOL PP	
	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja					38.871.629.275			40.535.014.866		40.095.951.121							SATPOL PP	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			82,09	20.149.697.372	82,5	Nilai	22.336.389.692	83,89	21.927.948.139	102%	98,17%	82,09	42.077.645.511,00			SATPOL PP	
	1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24	17.670.969	24	dokumen	13.000.000	24	10.871.250	100%	83,63%	48	28.542.219,00			SATPOL PP	
	1.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9	4.095.040	13	dokumen	5.000.000	13	4.535.500	100%	90,71%	22	8.630.540,00			SATPOL PP	
	1.05.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman			1	2.264.103	-	-	-	-	-	-	-	1	2.264.103,00			SATPOL PP	
	1.05.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman			1	2.033.275	-	-	-	-	-	-	-	1	2.033.275,00			SATPOL PP	
	1.05.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman			1	2.264.103	-	-	-	-	-	-	-	1	2.264.103,00			SATPOL PP	
	1.05.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman			1	2.033.275	-	-	-	-	-	-	-	1	2.033.275,00			SATPOL PP	
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman			3	4.065.173	11	dokumen	8.000.000	11	6.335.750	100%	79,20%	14	10.400.923,00			SATPOL PP	
	1.05.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman			8	916.000	-	-	-	-	-	-	-	8	916.000,00			SATPOL PP	
	1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	17.199.021.900	100	%	19.302.790.772	100	19.045.756.516	100%	98,67%	100	36.244.778.416			SATPOL PP	
	1.05.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN			102	17.186.524.425	149	dokumen	19.302.790.772	136	19.045.756.516	91%	98,67%	238	36.232.280.941			SATPOL PP	
	1.05.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi			1499	1.369.100	-	-	-	-	-	-	-	-	1.369.100			SATPOL PP	
	1.05.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan			7	9.731.375	-	-	-	-	-	-	-	-	9.731.375			SATPOL PP	
	1.05.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan			2	1.397.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397.000			SATPOL PP	
	1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			9	15.345.000	-	-	-	-	-	-	-	9	15.345.000			SATPOL PP	
	1.05.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai			9	15.345.000	-	-	-	-	-	-	-	9	15.345.000			SATPOL PP	
	1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			8	222.472.332	5	jenis	258.672.200	5	206.861.325	100%	79,97%	5	429.333.657			SATPOL PP	
	1.05.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik			12	20.075.000	12	bulan	29.783.000	12	17.685.630	100%	59,38%	24	37.760.630			SATPOL PP	
	1.05.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia			2	70.057.341	2	jenis	55.536.800	2	47.192.550	100%	84,98%	4	117.249.891			SATPOL PP	
	1.05.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan			12	65.320.000	12	bulan	75.000.000	12	70.020.000	100%	93,36%	24	135.340.000			SATPOL PP	
	1.05.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang siap edar			12	14.687.640	100	%	34.130.400	100	27.856.175	100%	81,62%	100	42.543.815			SATPOL PP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	1.05.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan/koran/media cetak			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			SATPOL PP	
	1.05.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji			50	1.106.250	-	-	-	-	-	-	-	50	1.106.250			SATPOL PP	
	1.05.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun			12	51.226.101	12	bulan	64.222.000	12	44.106.970	100%	68,68%	24	95.333.071			SATPOL PP	
			Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji			770		640	kotak		620		97%		1390				SATPOL PP	
	1.05.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**			**1**	**11.550.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	1	**11.550.000**			**SATPOL PP**	
	1.05.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Kursi Rapat yang tersedia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			SATPOL PP	
	1.05.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang tersedia			1	11.550.000	-	-	-	-	-	-	-	1	11.550.000			SATPOL PP	
	1.05.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah**			**12**	**977.885.033**	**12**	**bulan**	**1.149.880.272**	**12**	**1.089.289.569**	**100%**	**94,73%**	**24**	**2.067.174.602**			**SATPOL PP**	
	1.05.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia			150	1.500.000	300	materai	3.000.000	300	3.000.000	100%	100,00%	450	4.500.000			SATPOL PP	
	1.05.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu			12	112.139.001	12	bulan	142.000.000	12	104.235.714	100%	73,41%	24	216.374.715			SATPOL PP	
	1.05.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu			12	69.278.278	12	bulan	80.210.000	12	72.241.023	100%	90,06%	24	141.519.301			SATPOL PP	
	1.05.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu			12	794.967.754	12	bulan	924.670.272	12	909.812.832	100%	98,39%	24	1.704.780.586			SATPOL PP	
	1.05.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**12**	**1.705.752.138**	**12**	**bulan**	**1.612.046.448**	**12**	**1.575.169.479**	**100%**	**97,71%**	**24**	3.280.921.617			**SATPOL PP**	
	1.05.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai			24	1.705.752.138	39	unit	1.612.046.448	39	1.575.169.479	100%	97,71%	63	3.280.921.617			SATPOL PP	
	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengembangan SDA Pol PP**			**-**		**-**	**-**		**-**		**-**		**-**					
			Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi			**100**	**18.721.931.903**	**100**	**%**	**18.198.625.174**	**100**	**18.168.002.982**	**100%**	**99,83%**	**100**	**36.889.934.885**			**SATPOL PP**	
			Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti			**100**		**100**	**%**		**100**		**100%**		**100**					
	1.05.02.1.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti**			**215**	**18.395.971.943**	**205**	**pelanggaran**	**18.030.106.358**	**215**	**18.000.874.086**	**105%**	**99,84%**	**430**	**36.396.846.029**			**SATPOL PP**	
	1.05.02.1.01.01	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali			1080	3.285.069.357	1080	obs	2.910.124.694	1080	2.903.959.074	100%	99,79%	2160	6.189.028.431			SATPOL PP	
			Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum			215		205	orang/badan hukum		215		105%		430				SATPOL PP	
			Jumlah Obyek Sasaran Pengawalan yang dilaksanakan			906		600	obs		1303		217%		2209				SATPOL PP	
	1.05.02.1.01.03	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rumusan Rekomendasi hasil Rapat Kerja Pol PP yang ditindaklanjuti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			SATPOL PP	
			Jumlah Apel Siaga Gelar Pasukan yang dilaksanakan			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			SATPOL PP	
	1.05.02.1.01.04	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat			-	148.919.854	-	-	37.476.448	-	37.476.448	-	100,00%	-	186.396.302			SATPOL PP	
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat			50		-	-		-		-		50				SATPOL PP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
			Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas			1		1	dokumen		1		100%		1				SATPOL PP	
	1.05.02.1.01.05	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas	Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat			-	163.403.713	-	-	-	-	-	-	-	-	163.403.713			SATPOL PP	
			Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat			60		-	-		-		-		60				SATPOL PP	
	1.05.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan			4	65.368.404	4	laporan	74.952.896	4	74.952.896	100%	100,00%	8	140.321.300			SATPOL PP	
	1.05.02.1.01.07	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tenaga Satpam yang handal			350	14.714.929.770	350	orang	15.007.552.320	350	14.984.485.668	100%	99,85%	700	29.699.415.438			SATPOL PP	
			Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia			-		-	-		-		-		-				SATPOL PP	
	1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur yang terlayani			100	18.280.845	-	-	-	-	-	-	-	100	18.280.845			SATPOL PP	
	1.05.02.1.02	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi**			**776**	**325.959.960**	**210**	**kasus**	**168.518.816**	**238**	**167.128.896**	**113%**	**99,18%**	**1014**	**493.088.856**			**SATPOL PP**	
	1.05.02.1.02.01	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang tersosialisasi			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			SATPOL PP	
	1.05.02.1.02.02	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			48	84.665.042	-	-	-	-	-	-	-	48	84.665.042			SATPOL PP	
	1.05.02.1.02.03	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi			776	241.294.918	210	orang/badan hukum	168.518.816	238	167.128.896	113%	99,18%	1014	408.423.814			SATPOL PP	
	1.05.02.1.03	**Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina**			**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**SATPOL PP**	
	1.05.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengikuti pembinaan			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**SATPOL PP**	
1	Dinas									**19.703.830.442,00**		**18.676.695.008,00**	**100%**	**94,79%**						
	1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**		**0**	**0**		**A**	**nilai**	**14.563.757.272,00**	**A**	**14.585.675.357,00**	**100,0%**	**100,15%**		**14.585.675.357,00**			**DISSOS**	
	1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja**	**0**	**0**	**0**	**-**	**7**	**Dokumen**	**27.080.700,00**	**7**	**22.412.500,00**	**100%**	**82,76%**		**22.412.500,00**			**DISSOS**	
	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	0	0	0		5	dokumen	21.834.700	5	17.407.250,00	100%	79,72%		**17.407.250,00**			DISSOS	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja	0	0	1		2	Laporan	5.246.000	2	5.005.250,00	100%	0,00%		**5.005.250,00**			DISSOS	
	1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik**	**0**	**0**	**0**	**-**	**1**	**Layanan**	**11.520.724.334,00**	1	**11.732.395.050,00**	**100%**	**101,84%**		**11.732.395.050,00**			**DISSOS**	
	1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	14	Dokumen	11.520.724.334	14	11.732.395.050,00	100%	101,84%		**11.732.395.050,00**			DISSOS	
	1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah**	**0**	**0**	**0**	**-**	**7**	**Layanan**	**155.146.300,00**	7	**124.015.987,00**	**100%**	**79,93%**		**124.015.987,00**			**DISSOS**	
	1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor	0	0	0		3	jenis	9.997.900	3	7.416.687,00	100%	74,18%		**7.416.687,00**			DISSOS	
	1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor	0	0	0		7	jenis	37.750.000	7	29.970.000,00	100%	79,39%		**29.970.000,00**			DISSOS	
	1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga	0	0	1		6	jenis	100.955.000	6	82.783.920,00	100%	82,00%		**82.783.920,00**			DISSOS	
	1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggadaan	0	0	2		5	jenis	6.443.400	5	3.845.380,00	100%	59,68%		**3.845.380,00**			DISSOS	
	1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**0**	**0**	**0**	**-**	**3**	**layanan**	**371.247.040,00**	3	**348.141.209,00**	**100%**	**93,78%**		**348.141.209,00**			**DISSOS**	
	1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis tersedianya sarana surat menyurat	0	0	3		1	jenis	1.250.000	1	1.250.000,00	100%	100,00%		**1.250.000,00**			DISSOS	
	1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air telepon dan internet	0	0	0		1	tahun	180.000.000	1	162.830.193,00	100%	90,46%		**162.830.193,00**			DISSOS	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Jasa kebersihan kantor yang terpenuh	0	0	0		100	persen	189.997.040	100	184.061.016,00	100%	96,88%		**184.061.016,00**			DISSOS	
	1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**0**	**0**	**0**	**-**	**3**	**layanan**	**2.489.558.898**	3	**2.358.710.611,00**	**100%**	**94,74%**		**2.358.710.611,00**			**DISSOS**	
	1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran dinas yang terpelihara	0	0	10		42	unit	953.225.168	42	907.873.908,00	100%	95,24%		**907.873.908,00**			DISSOS	
			Jumlah tenaga pengemudi kendaraan dinas					16	orang		16		100%			**-**				
	1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor	0	0	0		3	unit	382.231.136	3	381.126.135,00	100%	99,71%		**381.126.135,00**			DISSOS	
			jumlah tenaga pengamanan gedung kantor					7	orang		7		100%			**-**				
	05:02:03	Belanja modal Gedung dan bangunan						1	unit		1,00		100,00%							
		Belanja Modal Bangunan Gedung kantor						1	unit		1,00		1,00							
	1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Alat Tulis Kantor	0	0	0		20	jenis	1.154.102.594	20	1.069.710.568,00	100%	92,69%		**1.069.710.568,00**			DISSOS	
			Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor	0	0	0		10	jenis		10		100%			**-**				
			Jumlah Tenaga Administasi tersedia					27	orang		27		100%			**-**				
2	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**0**	**0**	**0**		**8,22**	**persen**	**42.150.165,00**	8,22	**41.022.200,00**	**100%**	**97,32%**		**41.022.200,00**			**DISSOS**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	**0**	**0**	**0**		**27**	**Kelompok Dunia Usaha**	**3.530.110,00**	27	**3.338.950,00**	**100%**	**94,58%**		**3.338.950,00**			**DISSOS**	
	1.06.02.1.01.01	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	0	0	3		27	Klp. dunia usaha/LKS	3.530.110	27	3.338.950,00	100%	94,58%		**3.338.950,00**			DISSOS	
	1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis**	**0**	**0**	**0**		**57**	**TKSK**	**38.620.055,00**	57	**37.683.250,00**	**100%**	**97,57%**		**37.683.250,00**			**DISSOS**	
	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis	0	0	57		57	orang	38.620.055	57	37.683.250,00	100%	97,57%		**37.683.250,00**			DISSOS	
3	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial**	**0**	**0**	**0**		**17,91**	**persen**	**4.030.712.935,00**	17,91	**2.990.213.849,00**	**100%**	**74,19%**		**2.990.213.849,00**			**DISSOS**	
	1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**Jumlah layanan bagi penyandang disabilitas terlantar dalam panti swasta**	**0**	**0**	**0**		**1**	**layanan**	**379.899.555,00**	1	**353.045.482,00**	**100%**	**92,93%**		**353.045.482,00**			**DISSOS**	
	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT	0	0	0		160	orang	52.560.755	160	51.512.070,00	100%	98,00%		**51.512.070,00**			DISSOS	
	1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					50	orang	8.664.800	50	3.990.900,00	100%			**3.990.900,00**				
	1.06.04.1.01.07.	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari-hari (DJD)								318.674.000		297.542.512,00	100%							
	1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial**	**0**	**0**	**0**		**3**	**layanan**	**239.399.255,00**	3	**232.630.170**	**100%**	**97,17%**		**232.630.170,00**			**DISSOS**	
	1.06.004.1.01.02.	**Penyediaan makanan**								213.195.700,00		209.380.020	**100%**							
	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	0	0	0		40	cota	26.203.555	61	23.250.150	100%	88,73%		**23.250.150,00**			DISSOS	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	**Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial**	**0**		**0**		**3**	**layanan**	**119.766.055,00**	3	**119.392.020,00**	**100%**	**99,69%**		**119.392.020,00**			**DISSOS**	
	1.06.004.1.01.02.	Penyediaan Permakanan								3.032.400		2.988.320,00	**100%**							
	1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	0	0	0		300	orang	8.999.600	300	8.937.900	100%	99,31%		**8.937.900,00**			DISSOS	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasi	0	0	0		13	paket	107.734.055	13	107.465.800	100%	99,75%		**107.465.800,00**			DISSOS	
	1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	Jumlah layanan pemulangan orang terlantar bagi gelandangan dan pengemis	**0**	**0**	**0**		**1**	**layanan**	**3.284.398.200**	1	**2.278.719.777,00**	**100%**	**69%**		**2.278.719.777,00**			**DISSOS**	
	1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya	0	0	0		300	orang	**3.284.398.200**	292	2.278.719.777,00	100%	0,69		**2.278.719.777,00**			DISSOS	
			Jumlah pembayaran perawatan pasien terlantar di RSJ Provinsi Bali					1	tahun		1		100%			**-**				
	1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**Tersedianya sandang bagi PMKS**					**25**	**orang**	**7.249.870,00**	25	**6.426.400,00**	**100%**	**88,64%**		**6.426.400,00**				
	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi PMKS					25	orang	7.249.870	25	6.426.400,00				**6.426.400,00**				
4	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin**	**0**	**0**	**0**		**1**	**laporan**	**19.905.370,00**	1	**19.829.400,00**	**100%**	**99,62%**		**19.829.400,00**			**DISSOS**	
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	**0**	**0**	**0**		**1**	**Laporan**	**19.905.370,00**	1	**19.829.400,00**	**100%**	**99,62%**		**19.829.400,00**			**DISSOS**	
	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pendataan fakir miskin	0	0	1		1	laporan	19.905.370	1	19.829.400,00	100%	99,62%		**19.829.400,00**			DISSOS	
5	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosia	**0**	**0**	**0**		**100**	**persen**	**255.939.600**	100	**255.768.500,00**	**100%**	**99,93%**		**255.768.500,00**			**DISSOS**	
	1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Jumlah layanan untuk perlindungan korban bencana alam dan sosia**	**0**	**0**	**0**		**2**	**layanan**	**255.939.600**	2	**255.768.500,00**	**100%**	**99,93%**		**255.768.500,00**			**DISSOS**	
	1.06.006.1.01.04.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provins	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	0	0	0		629	orang	255.939.600	629	255.768.500,00	100%	99,93%		**255.768.500,00**			DISSOS	
6	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**8,22**	**persen**	**127.164.000**	8,22	**125.502.452,00**	**99%**	**98,69%**		**125.502.452,00**				
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provins	Terpeliharanya TMPN Pancaka Tirta Tabanan dan terusulkannya gelar pahlawan nasional					100	persen	127.164.000	100	125.502.452,00	99%	98,69%		**125.502.452,00**			**DISSOS**	
	1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TMPN Pancaka Tirta yang terpelihara					1	TMP	127.164.000	1	125.502.452,00	99%	98,69%		**125.502.452,00**				
			Terlaksananya usulan gelar pahlawan nasional					1	usulan		1					**-**				
7	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja					98,75	prosentase	11.100.100	98,75	10.120.350,00	91%	91,17%		**10.120.350,00**			DISSOS	
	2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah organisasi masyarakat yang melakukan pemberdayaan perempuan**					**1**	**lembaga**	**11.100.100**	1	**10.120.350,00**	**91%**	**91,17%**		**10.120.350,00**			**DISSOS**	
	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman gender bagi partai politik					15	orang	11.100.100	15	10.120.350,00	91%	91,17%		**10.120.350,00**				
8	**02:08:06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya**					**100**	**persen**	**653.101.000**	100	**648.562.900,00**				**648.562.900,00**			DISSOS	
	02.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan bagi lembaga penyediaan layanan kualitas hidup anak					2	layanan	653.101.000	2	648.562.900,00				**648.562.900,00**			DISSOS	
	2.08.1.06.2.006.1.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak					12	rekomendasi	653.101.000	12	648.562.900,00				**648.562.900,00**				
2	***UPTD PELY.SOSIAL***									***8.333.659.346,00***	***0***	***7.692.980.785,00***				***7.692.980.785,00***				
	1.06.001.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**0**	**0**	**0**				**7.113.286.846,00**	0	**6.681.339.887,00**	**94%**	**93,93%**		**6.681.339.887,00**			**UPTD PEL. SOSIAL**	
	1.06.01.1.02	**Administerasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	**0**	**0**	**0**		**1**	**layanan**	**4.446.378.026,00**	1	**4.165.095.249,00**	**94%**	**93,67%**		**4.165.095.249,00**			**UPTD PEL. SOSIAL**	
	1.06.001.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial	0	0	3		12	bulan	4.446.378.026	12	4.165.095.249,00	94%	93,67%		**4.165.095.249,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.01.1.06	**Administerasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	**0**	**0**	**0**		**6**	**layanan**	**115.668.600,00**	6	**110.336.155,00**	**95%**	**95,39%**		**110.336.155,00**			**UPTD PEL. SOSIAL**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	1.06.001.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dan Panti	0	0	1		1	tahun	13.359.400	1	13.331.655,00	100%	99,79%		**13.331.655,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.001.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0		1	unit	12.000.000	1	11.877.000,00	0%	0,00%		**11.877.000,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.001.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0	1		1	jenis	85.000.000	1	82.020.000	96%	96,49%		**82.020.000,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.001.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	0	0	0		5	jenis	3.409.200	5	1.207.500,00	35%	35,42%		**1.207.500,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.001.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat	0	0	0		60	kotak	1.900.000	60	1.900.000,00	0%	0,00%		**1.900.000,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
			Jumlah Perjalanan Dinas					20	orang/kali		20					-				
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					3	layanan	676.491.300	3	673.386.960,00				**673.386.960,00**				
	1.06.001.1.07.05	Pengadaan Mebel						2	paket	550.000.000		548.250.000,00								
	1.06.001.1.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya					3	jenis	126.491.300	3	125.136.960,00				**125.136.960,00**				
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2	layanan	234.459.000	2	178.079.082,00				**178.079.082,00**				
	1.06.001.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi,listrik,air,telepon dan internet					4	jenis	209.500.000	4	153.141.822,00				**153.141.822,00**				
	1.06.001.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor yang terpenuhi					100	persen	24.959.000	100	24.937.260,00				**24.937.260,00**				
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah	**0**	**0**	**0**		**3**	**layanan**	**1.640.289.920,00**	3	**1.554.442.441,00**	**95%**	**94,77%**		**1.554.442.441,00**			**UPTD PEL. SOSIAL**	
	1.06.001.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang terpelihara	0	0	0		4	unit	203.699.344	4	155.868.744,00	**0%**	0,00%		**155.868.744,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
			jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang terpelihara					5	unit		5					-				
			jumlah tenaga pengemudi					4	orang		4					-				
			Tersedianya Bahan bakar minyak/gas untuk kelancaran oprasional dan pelayanan kantor dan panti	0	0	0		1	tahun		1					-				
	1.06.001.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa tenaga keamanan	0	0	1		8	orang	344.803.584	8	344.733.198,00	100%	99,98%		**344.733.198,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
			Tersedianya pemeliharaan gedung kantor/panti					1	tahun		1					-				
	1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor					1	tahun	1.091.786.992	1	1.053.840.499,00				**1.053.840.499,00**				
			Jumlah tenaga administrasi, Tenaga Juru Masak dan Tenaga Pengasuh					29	orang		29					-				
			Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor					1	tahun		1					-				
	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosia	**0**	**0**	**0**		17,91	**persen**	**1.220.372.500,00**	17,91	**1.011.640.898,00**	**83%**	**82,90%**		**1.011.640.898,00**			**UPTD PEL. SOSIAL**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosia	**0**	**0**	**0**		**8**	**layanan**	**589.870.000,00**	8	**445.119.970,00**	**75%**	**75,46%**		**445.119.970,00**			**UPTD PEL. SOSIAL**	
	1.06.004.1.02.01.	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	0	0	10		70	orang	42.500.000	43	42.490.494,00	100%	99,98%		**42.490.494,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.004.1.02.02.	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT	0	0	0		70	orang	190.000.000	43	189.504.000,00	100%	99,74%		**189.504.000,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.004.1.02.03.	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sandang	0	0	0		70	orang	77.500.000	43	59.965.530,00	100%	77,37%		**59.965.530,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.004.1.02.05.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	0	0	0		70	orang	15.800.000	43	11.150.000,00	100%	70,57%		**11.150.000,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.004.1.02.06.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	10		70	orang	37.344.000	43	33.490.098,00	100%	89,68%		**33.490.098,00**			UPTD PEL. SOSIAL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	1.06.004.1.02.07.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	0	0	10		70	orang	55.926.000	43	38.504.348,00	100%	68,85%		**38.504.348,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.004.1.02.09.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0	0	0		70	orang	165.100.000	43	64.315.500,00	100%	38,96%		**64.315.500,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.004.1.02.10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	0	0	10		70	orang	5.700.000	43	5.700.000,00	100%	100,00%		**5.700.000,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**umlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial**	**0**	**0**	**0**		**5**	**layanan**	**630.502.500,00**	5	**566.520.928,00**	**100%**	**89,85%**		**566.520.928,00**			**UPTD PEL. SOSIAL**	
	1.06.004.1.03.01.	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti	0	0	100		130	orang	465.000.000	87	414.450.000,00	100%	89,13%		**414.450.000,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.004.1.03.05.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	0	0	130		130	orang	10.000.000	87	8.585.816,00	100%	85,86%		**8.585.816,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.004.1.03.07.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Har	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	0	0	130		130	orang	117.902.500	87	111.025.112,00	100%	94,17%		**111.025.112,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	0	0	95		130	orang	7.600.000	87	6.460.000,00	100%	85,00%		**6.460.000,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasin dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah	0	0	16		130	orang	30.000.000	87	26.000.000,00	100%	86,67%		**26.000.000,00**			UPTD PEL. SOSIAL	
3	***UPTD ANAK***			***0***	***0***					***3.016.781.697,00***		***2.285.496.214,00***	***100%***	***75,76%***		***2.285.496.214,00***			***UPTD ANAK***	
	2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**0**	**0**	**0**		**A**	**nilai**	**2.558.141.697,00**	A	**2.046.209.128,00**	**100%**	**79,99%**		**2.046.209.128,00**			**UPTD. ANAK**	
	2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik**	**0**	**0**	**0**		**1**	**layanan**	**2.048.003.410,00**	1	**1.550.322.088,00**	**100%**	**75,70%**		**1.550.322.088,00**			**UPTD. ANAK**	
	2.08.1.06.001.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN di UPTD.PPA	0	0	1		12	bulan	2.048.003.410	12	1.550.322.088,00	100%	75,70%		**1.550.322.088,00**			UPTD. ANAK	
	2.08.01.1,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	**0**	**0**	**0**		**5**	**layanan**	**12.690.500,00**	5	**11.265.200,00**	**100%**	**88,77%**		**11.265.200,00**			**UPTD. ANAK**	
	2.08.1.06.001.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	0	0	0		5	jenis	1.967.100	5	1.818.000,00	100%	92,42%		**1.818.000,00**			UPTD. ANAK	
	2.08.1.06.001.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis tersedianya perlengkapan gedung kantor	0	0	0		2	jenis	7.000.000	2	6.904.200,00	100%	98,63%		**6.904.200,00**			UPTD. ANAK	
	2.08.1.06.001.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan					5	jenis	3.723.400	5	2.543.000,00	100%	68,30%		**2.543.000,00**				
	2.08.01.1,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**0**	**0**	**0**		**1**	**layanan**	**5.000.000,00**	1	**4.837.433,00**	**100%**	**96,75%**		**4.837.433,00**			**UPTD. ANAK**	
	2.08.1.06.001.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	0	0	1		1	jenis	5.000.000,00	1	4.837.433,00	100%	96,75%		**4.837.433,00**			UPTD. ANAK	
	2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan pemeliharaan bagi barang milik daerah	**0**	**0**	**0**		**3**	**layanan**	**492.447.787,00**	3	**479.784.407,00**	**100%**	**97,43%**		**479.784.407,00**			**UPTD. ANAK**	
	2.08.1.06.001.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah tenaga pengemudi	0	0	0		5	unit	124.545.896	5	113.849.146,00	100%	91,41%		**113.849.146,00**			UPTD. ANAK	
			Jumlah tenaga pengemudi	0	0	2		2	orang		2		100%			-				
	2.08.1.06.001.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor	0	0	0		1	unit	40.299.668	1	40.103.263	100%	99,51%		**40.103.263,00**			UPTD. ANAK	
			Jumlah tenaga pengamanan	0	0	1		2	orang		2		100%			-				
	2.08.1.06.001.1.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	0	0	0		3	jenis	327.602.223	3	325.831.998,00	100%	99,46%		**325.831.998,00**			UPTD. ANAK	
			Jumlah jenis alat tulis kantor	0	0	0		1	tahun		1		100%			-				
			Jumlah tenaga administrasi					1	orang		1		100%			-				
			Jumlah tenaga penyuluhan atau pendampingan	0	0	1		6	orang		6		100%			-				
2	2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Jumlah masyarakat yang mengerti tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan/anak dan TPPO	**0**	**0**	**0**		**45**	**orang**	**381.834.000,00**	45	**167.426.986,00**	**100%**	**43,85%**		**167.426.986,00**			**UPTD. ANAK**	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengerti tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan/anak dan TPPO	**0**	**0**	**0**		**45**	**orang**	112.950.000	45	**87.322.986,00**	**100%**	**77,31%**		**87.322.986,00**			**UPTD. ANAK**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan Ktp/A dan TPPO	**0**				**100**	**persen**	112.950.000	100	**87.322.986,00**	**100%**	**77,31%**						
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	**0**				**80**	**0rang**	6.840.000	55	**6.840.000,00**	**100%**	**100,00%**		**6.840.000,00**				
	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan Ktp/A dan TPPO	**0**	**0**	**0**		**80**	**orang**	6.840.000	55	6.840.000,00	**100%**	100,00%		6.840.000,00			UPTD. ANAK	
			Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan dan anak	**0**		**0**		**80**	**orang**		55	**-**	**100%**							
			Jumlah penerimaan kasus yang tertangani dan terselesaikan	**0**		**0**		**80**	**orang**		55	**-**	**100%**							
	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	0				80	orang	262.044.000	55	73.264.000,00	100%	27,96%					UPTD. ANAK	
3	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang tertangani Sesuai dengan Standar					100	persen	76.806.000	100	71.860.100,00	100%	0,94		**71.860.100,00**				
	: 2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Persentase pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	0				100	persen	76.806.000	100	71.860.100,00	100%	93,56%		**71.860.100,00**				
	2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang paham terhadap layanan Ktp/TPPO	0				35	orang	76.806.000	35	71.860.100,00	100%	93,56%		**71.860.100,00**				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**20.244.311.156,00**		**19.667.645.521,00**							**BPBD**	
	1,05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**20.244.311.156,00**		**19.667.645.521,00**							**BPBD**	
1	**1.05.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**83%**	**43.803.385.631**	**83,35**	**9.799.487.949,00**	**82,93**		**11.020.370.920,00**	**0**	**10.619.703.323,00**	**0,00%**	**96,36%**	83,35	20.419.191.272,00			**BPBD**	
	1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun**			**83,35**	**36.294.900,00**	**82,93**	**persen**	**4.376.600,00**	**84,05**	**3.686.050,00**	**100,00%**	**84,22%**	167,4	39.980.950,00			**BPBD**	
	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah1.05.01.1.02			1	2.208.950,00	12	dokumen	2.554.700,00	12	2.082.200,00	100,00%	81,50%	13	4.291.150,00			BPBD	
	1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun			1	1.063.700,00	0		-	0	-			1	1.063.700,00			BPBD	
	1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang terverifikasi			1	64.100,00	0		-	0	-			1	64.100,00			BPBD	
	1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang terinput			1	973.650,00	0		-	0	-			1	973.650,00			BPBD	
	1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang terverifikasi			1	1.343.400,00	0		-	0	-			1	1.343.400,00			BPBD	
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen LKjIP yang tersusun			1	9.258.900,00	21	dokumen	1.821.900,00	21	1.603.850,00	100,00%	88,03%	22	10.862.750,00			BPBD	
	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun			1	21.382.200,00	0		-	0	-			1	21.382.200,00			BPBD	
	1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu**			**100**	**7.695.868.397,00**	**100**	**persen**	**9.246.726.602,00**	**100**	**8.915.649.787,00**	**100,00%**	**96,42%**	200	16.611.518.184,00			**BPBD**	
	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN			100	7.684.183.297,00	100	persen	9.246.726.602,00	100	8.915.649.787,00	100,00%	96,42%	200	16.599.833.084,00			BPBD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi			70	946.900,00	0		-					70	946.900,00			BPBD	
	1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun			1600	5.899.950,00	0		-					1600	5.899.950,00			BPBD	
	1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan			7	4.838.250,00	0		-					7	4.838.250,00			BPBD	
	1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara**			**100**	**49.720.000,00**	**0**		**-**		**-**			100	49.720.000,00			**BPBD**	
	1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah sarana dan prasarana (pakaian lapangan) BPBD yang dibutuhkan			200	49.720.000,00	0		-		-			200	49.720.000,00			BPBD	
	1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu**			**100**	**386.184.184,00**	**100**	**persen**	**103.194.640,00**	**100**	**100.143.616,00**	**100,00%**	**97,04%**	200	486.327.800,00			**BPBD**	
	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik ysng tersedia			4	5.625.631,00	0		-		-			4	5.625.631,00			BPBD	
	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			28	265.583.787,00	23	jenis	25.628.640,00	23	24.492.616,00	100,00%	95,57%	51	290.076.403,00			BPBD	
	1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia			12	72.970.616,00	12	bulan	75.000.000,00	12	73.771.000,00	100,00%	98,36%	24	146.741.616,00			BPBD	
	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia			9	16.542.900,00	5	jenis	2.566.000,00	5	1.880.000,00	100,00%	73,27%	14	18.422.900,00			BPBD	
	1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia			12	9.195.000,00	0		-	0				12				BPBD	
	1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah rapat-rapat konsultasi OPD yan diselenggarakan			12	15.390.000,00	0		-	0	-			12	15.390.000,00				
	1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia			12	876.250,00	0		-	0				12	876.250,00			BPBD	
	1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terselesaikan**			**100**	**17.975.000,00**	**100**	**persen**	**13.760.000,00**	**100**	**10.657.000,00**	**100,00%**	77,45%	200	28.632.000,00			**BPBD**	
	1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan yang tersedia			5	17.975.000,00	4	jenis	13.760.000,00	4	10.657.000,00	100,00%	77,45%	9	28.632.000,00			BPBD	
	1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu**			**100**	**317.980.408,00**	**100**	**persen**	**318.803.190,00**	**100**	**305.787.687,00**	**100,00%**	**95,92%**	200	623.768.095,00			**BPBD**	
	1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia			300	3.300.000,00	150	lembar	1.500.000,00	150	1.500.000,00	100,00%	**100,00%**	450	4.800.000,00			BPBD	
	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan			12	106.920.647,00	12	bulan	120.000.750,00	12	107.865.583,00	100,00%	**89,89%**	24	214.786.230,00			BPBD	
	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia			12	207.759.761,00	12	bulan	197.302.440,00	12	196.422.104,00	100,00%	**99,55%**	24	404.181.865,00			BPBD	
	1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terselesaikan**			**100**	**1.295.465.060,00**	**100**	**persen**	**1.333.509.888,00**	**100**	**1.283.779.183,00**	**100,00%**	**96,27%**	200	2.579.244.243,00			**BPBD**	
	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku			12	980.289.015,00	12	bulan	1.333.509.888,00	12	1.283.779.183,00	100,00%	**96,27%**	24	2.264.068.198,00			BPBD	
	1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan kantor yang iperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik			12	315.176.045,00	0		-	0				12	315.176.045,00			BPBD	
	1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat atau aparatur yang dibina dalam menghadapi bencana**	**60%**	**3.105.987.319,00**	**60**	**923.951.547,49**	**0**		**-**		**-**			60	923.951.547,49			**BPBD**	
			Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	**100%**	**1.973.361.109,00**	**100**	**-**	**0**							100	-			**BPBD**	
			Persentase penanganan pasca bencana	**100%**	**987.546.010,00**	**100**	**-**	**0**							100	-			**BPBD**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan**			**0**	**-**	**0**		**-**	**0**	**-**			0	-			**BPBD**	
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana			0	-	0	0	-	0	-			0	-			BPBD	
	1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana**			**100**	**74.820.974,00**	**0**		**-**	**0**	**-**			100	74.820.974,00			**BPBD**	
	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah masyarakat dan aparatur daerah rawan bencana yang mendapat pelatihan dan pengetahuan penanggulangan bencana			100	-	0		-	0	-			100	-			BPBD	
	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Prosentase peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia			100	17.087.124,00	0		-	0				100	17.087.124,00			BPBD	
	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapat penguatan kapasitas pengelolaan resiko bencana			100	1.130.000,00	0		-	0				100	1.130.000,00			BPBD	
	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana yang dibentuk, J dan Jumlah pembuatan dan			0	-	0		-	0				0	-			BPBD	
			jumlah dibentuknya sekolah aman dari bencana			0	-	0			0				0	-			BPBD	
			pemasangan Peta/ Tanda/ Rambu Rawan bencana			0	-	0			0				0	-			BPBD	
	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pasca bencana Provinsi	Persentase penanganan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia			100	56.603.850,00	100		-	100				200	56.603.850,00			BPBD	
	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah anggota tim TRC yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana			0	-	0		-	0	-			0	-			BPBD	
	1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran**			**9**	**827.962.004,49**	**0**		**-**	**0**				9	827.962.004,49			**BPBD**	
	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon cepat penanganan darurat bencana			9	648.681.990,49	0		-	0				9	648.681.990,49			BPBD	
	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase logistik untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia			100	179.280.014,00	0		-	0				100	179.280.014,00			BPBD	
	1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana**			**2**	**21.168.569,00**	**0**		**-**	**0**				2	21.168.569,00			**BPBD**	
	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen peraturan penanggulangan bencana yang tersedia			1	21.168.569,00	0		-	0				1	21.168.569,00			BPBD	
	1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur terkait penangulangan bencana yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana			70	-	0		-	0				70	-			BPBD	
							9.815.639.978,00					9.047.942.198,00								
	1.05.01	**Program Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**83%**	**17.363.771.758,00**	**83,35**	**4.158.721.141,00**	**82.93**	**persen**	**7.246.338.336,00**	**84,05**	**7.138.590.350,00**	**100,00%**	**98,51%**	**167,4**	**11.297.311.491,00**			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	
	1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu**			**100**	**3.236.329.421,00**	**100**	**persen**	**3.222.422.856,00**	**100**	**3.172.892.213,00**	**100,00%**	**98,46%**	**200**	**6.409.221.634,00**			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	
	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/ SPM gaji dan tunjangan ASN			12	3.236.329.421,00	12	bulan	3.222.422.856,00	12	3.172.892.213,00	100,00%	98,46%	24	6.409.221.634,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum**			**100**	**72.215.250,00**	**100**	**persen**	**4.910.350,00**	**100**	**4.801.416,00**	**100,00%**	**97,78%**	200	77.016.666,00			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	
	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia			2	846.000,00	72	jenis	4.910.350,00	72	4.801.416,00	100,00%	97,78%	74	5.647.416,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			1	49.500.000,00	0		-	0				1	49.500.000,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia			12	4.915.000,00	0		-	0				12	4.915.000,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia			1	3.000.000,00	0		-	0				1	3.000.000,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia			12	13.585.500,00	0		-	0				12	13.585.500,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia			12	368.750,00	0		-	0				12	368.750,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terselesaikan**			**12**	**9.845.000,00**	**0**		**-**	**0**				12	9.845.000,00			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	
	1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan yang tersedia			1	9.845.000,00	0		-	0				1	9.845.000,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu**			**100**	**400.469.070,00**	**100**	**persen**	**372.763.784,00**	**100**	**364.241.964,00**	**100,00%**	**97,71%**	200	764.711.034,00			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	
	1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia			100	1.000.000,00	0		-	0				100	1.000.000,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan			12	235.907.258,00	12	bulan	214.861.292,00	12	206.606.842,00	100,00%	96,16%	24	442.514.100,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan rumahtangga OPD yang tersedia			12	163.561.812,00	12	bulan	157.902.492,00	12	157.635.122,00	100,00%	99,83%	24	321.196.934,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**			**12**	**439.862.400,00**	**12**	**bulan**	**3.646.241.346,00**	**12**	**3.596.654.757,00**	**100,00%**	**98,64%**	**24**	**4.036.517.157,00**			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	
	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku			12	266.396.900,00	12	bulan	3.548.130.396,00	12	3.500.373.207,00	100,00%	98,65%	24	3.766.770.107,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan kantor yang diperbaiki/terpelihara/ terjaga dengan baik			2	14.300.000,00	0		-	0	-			2	14.300.000,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/terjaga dengan baik			20	159.165.500,00	24	jenis	98.110.950,00	24	96.281.550,00	100,00%	98,14%	44	255.447.050,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan**	**100%**	**30.007.168.856,59**	**100**	**5.656.918.837,00**	**100**	**persen**	**1.977.601.900,00**	**100**	**1.909.351.848,00**	**100,00%**	**96,55%**	**200**	**7.566.270.685,00**			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	
	1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan**			**9**	**492.657.900,00**	**9**	**kab/kota**	**426.624.000,00**	**9**	**426.623.988,00**	**100,00%**	**100,00%**	18	919.281.888,00			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana			9	492.657.900,00	9	kab/kota	426.624.000,00	9	426.623.988,00	100,00%	100,00%	18	919.281.888,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana**			**100**	**913.748.782,00**	**100**	**persen**	**524.867.900,00**	**100**	**506.079.260,00**	**100,00%**	**96,42%**	**200**	**1.419.828.042,00**			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah daerah resiko bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana			9	913.748.782,00	9	kab/kota	524.867.900,00	9	506.079.260,00	100,00%	96,42%	18	1.419.828.042,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran**			**100**	**3.053.098.655,00**	**0**		**-**	**0**	**-**			100	3.053.098.655,00			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	
	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah personil Tim ESR yang dibina kapasitas penanggulangan bencana			12	3.053.098.655,00	0		-	0				12	3.053.098.655,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana**			**100**	**1.197.413.500,00**	**100**	**persen**	**1.026.110.000,00**	**100**	**976.648.600,00**	**100,00%**	**95,18%**	200	2.174.062.100,00			**UPTD PENGENDALIAN BENCANA**	
	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik			100	1.197.413.500,00	100	persen	1.026.110.000,00	100	976.648.600,00	100,00%	95,18%	200	2.174.062.100,00			UPTD PENGENDALIAN BENCANA	
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM + UPTD						**25.794.530.682**			**31.663.582.206**		**29.946.979.578**								
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN**					**25.569.059.493**			**31.477.534.614**		**29.761.001.586**								
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**25.569.059.493**			**31.477.534.614**		**29.761.001.586**								
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM						**18.804.986.128**			**29.559.490.425**		**27.902.746.725**								
	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**83**	**28.312.926.528**	**86,54**	**18.515.998.838**	**82,5**		**29.166.932.733**	**86,79**	**27.536.105.759**	**105,20%**	**94,41%**	**173,33**	**46.052.104.597**	**2,09**	**163%**	**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.01.1.01	**Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**			**100**	**28.575.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**100**	**28.575.480**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	9.843.500	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	9.843.500			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1	5.100.120	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	5.100.120			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	2.336.620	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	2.336.620			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1	4.760.620	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	4.760.620			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	3.433.620	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	3.433.620			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	3.101.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	3.101.000			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.02	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**			**100**	**15.563.490.312**	**100**		**25.814.719.773**	**100**	**24.692.758.672**	**100,00%**	**95,65%**	**200**	**40.256.248.984**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			14	15.543.859.160	14	dokumen	25.814.719.773,00	14	24.692.758.672,00	100,00%	95,65%	28	40.236.617.832			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan			12	12.686.952	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	12	12.686.952			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akutansi			12	5.703.300	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	12	5.703.300			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan			1	1.240.900	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	1.240.900			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.06	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**			**100**	**141.292.814**	**100**	**Persen**	**251.999.200**	**100**	**157.134.516**	**100,00%**	**62,36%**	**200**	**298.427.330**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia			14	9.552.224	9	jenis	13.500.000	9	11.807.625	100,00%	87,46%	23	21.359.849			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			45	40.175.850	16	jenis	52.966.800	16	50.923.549	100,00%	96,14%	61	91.099.399			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan			2	36.909.728	2	jenis	94.250.000	2	57.889.000	100,00%	61,42%	4	94.798.728			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
			Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan					1	jenis		1		100,00%		1	0				
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan			10	9.029.000	2	jenis	60.008.400	2	19.894.342	100,00%	33,15%	12	28.923.342			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia			1	9.480.000	1	jenis	9.000.000	1	8.435.000	100,00%	93,72%	2	17.915.000			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu			1	360.000	1	jenis	1.500.000	1	860.000	100,00%	57,33%	2	1.220.000			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan			5	35.786.012	2	kegiatan	20.774.000	2	7.325.000	100,00%	35,26%	7	43.111.012			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
			Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat			2		2	jenis		2		100,00%		4	0				
	2.07.01.1.07	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100**	**250.205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**100**	**250.205.000**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor			1	250.205.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	250.205.000			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100**	**869.979.243**	**100**		**1.176.500.032**	**100**	**882.355.208**	**100,00%**	**75,00%**	**200**	**1.752.334.451**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia			1	1.200.000	1	jenis	1.500.000	1	1.500.000	100,00%	100,00%	2	2.700.000			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan			3	299.432.810	3	jenis	576.000.000	3	293.248.324	100,00%	50,91%	6	592.681.134			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan			1	569.346.433	1	jenis	599.000.032	1	587.606.884	100,00%	98,10%	2	1.156.953.317			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.09	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100**	**1.662.455.989**	**100**		**1.923.713.728**	**100**	**1.803.857.363**	**100,00%**	**93,77%**	**200**	**3.466.313.352**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas			11	563.993.679	13	unit	764.011.184	13	662.066.384	100,00%	86,66%	24	1.226.060.063			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			1	161.845.738	1	unit	169.905.792	1	162.052.067	100,00%	95,38%	2	323.897.805			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			9	936.616.572	8	jenis	989.796.752	8	979.738.912	100,00%	98,98%	17	1.916.355.484			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi**	**55,21**	**24.997.600**	**51,02**	**141.875.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**51,02**	**141.875.740**	**0,92**	**568%**	**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.03.1.04	**Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Bersertifikat Kompetensi**			**130**	**141.875.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**130**	**141.875.740**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pengukuran kompetensi dan produktivitas			130	141.875.740	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	130	141.875.740			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Jumlah Kawasan Pekerja Sektor Informal yang Tumbuh dan Berkembang Berciri Khas Bali**	**4**	**173.010.100**	**1**	**59.677.150**	**4**	**kawasan**	**179.010.100**	**4**	**153.707.124**	**100,00%**	**85,87%**	**5**	**213.384.274**	**1,25**	**123%**	**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.04.1.01	**Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Kawasan Pekerja Sektor Informal Berbasis Lokal**			**1**	**40.589.500**	**4**	**kawasan**	**179.010.100**	**4**	**153.707.124**	**100,00%**	**85,87%**	**5**	**194.296.624**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal			1	40.589.500	4	kawasan	179.010.100	4	153.707.124	100,00%	85,87%	5	194.296.624			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.07.04.1.03	**Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Presentase Penurunan Jumlah Pencari Kerja**			**25**	**19.087.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**25**	**19.087.650**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar melalui bursa kerja online dan Informasi Pasar Kerja Online			2160	17.316.850	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	2160	17.316.850			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang terserap untuk mendapatkan pekerjaan			0	1.770.800	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1.770.800			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja**	**7,2**	**11.279.900**	**6,22**	**87.434.400**	**6,71**	**persen**	**27.500.000**	**6,71**	**26.955.850**	**100,00%**	**98,02%**	**12,93**	**114.390.250**	**1,80**	**1014%**	**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.06.1.01	**Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Terpenuhinya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan**			**88**	**87.434.400**	**64**	**perusahaan**	**27.500.000**	**60**	**26.955.850**	**93,75%**	**98,02%**	**148**	**114.390.250**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan dan pekerja yang paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan data Hubungan Industrial			18	87.434.400	48	perusahaan	27.500.000	44	26.955.850	91,67%	98,02%	62	114.390.250			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
			Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan			70		16	perusahaan		16		100,00%		86	0				
			Keputusan Gubernur tentang UMP, UMK dan UMSK			2		2	KepGub		2		100,00%		4	0				
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA						**4.043.111.248**			**1.537.649.344**		**1.490.237.885**		**96,92%**	**0**	**5.533.349.133**				
	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**83**	**786.756.828**	**86,54**	**3.953.246.776**	**82,5**	**Nilai**	**832.730.244**	**86,79**	**812.424.991**	**105,20%**	**97,56%**	**173,33**	**4.765.671.767**	**2,09**	**606%**	**UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**	
	2.07.01.1.02	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**			**100**	**3.324.199.659**	**100**	**Persen**	**148.084.516**	**100**	**148.084.516**	**100,00%**	**100,00%**	**200**	**3.472.284.175**			**UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**	
	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			14	3.324.199.659	14	dokumen	148.084.516	14	148.084.516	100,00%	100,00%	28	3.472.284.175			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.06	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**			**100**	**66.908.249**	**100**	**Persen**	**29.285.100**	**100**	**28.213.600**	**100,00%**	**96,34%**	**200**	**95.121.849**			**UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**	
	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia			2	976.000	2	jenis	3.188.400	2	2.873.000	100,00%	90,11%	4	3.849.000			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia			4	46.751.800	4	jenis	10.396.700	4	10.353.975	100,00%	99,59%	8	57.105.775			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan			2	14.256.500	2	jenis	13.000.000	2	13.000.000	100,00%	100,00%	4	27.256.500			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan			0	0	1	jenis	1.800.000	1	1.157.125	100,00%	64,28%	1	1.157.125			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu			0	0	1	jenis	900.000	1	829.500	100,00%	92,17%	1	829.500			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan			1	4.923.949	0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	1	4.923.949			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.07	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100**	**23.880.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**100**	**23.880.500**			**UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**	
	2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor			7	23.880.500	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	7	23.880.500			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.07.01.1.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100**	**223.496.430**	**100**	**Persen**	**211.374.092**	**100**	**204.290.639**	**100,00%**	**96,65%**	**200**	**427.787.069**			**UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**	
	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan			1	20.280.638	1	jenis	24.000.000	1	17.170.857	100,00%	71,55%	2	37.451.495			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan			1	203.215.792	1	jenis	187.374.092	1	187.119.782	100,00%	99,86%	2	390.335.574			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.09	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100**	**314.761.938**	**100**	**Persen**	**443.986.536**	**100**	**431.836.236**	**100,00%**	**97,26%**	**200**	**746.598.174**			**UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**	
	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			1	282.430.938	2	unit	301.036.536	2	289.525.236	100,00%	96,18%	3	571.956.174			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			3	18.799.000	2	jenis	120.000.000	2	119.766.000	100,00%	99,81%	5	138.565.000			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			3	13.532.000	3	jenis	22.950.000	3	22.545.000	100,00%	98,24%	6	36.077.000			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Calon Tenaga Kerja yang Bersertifikat dan Mengisi Pasar Kerja Sesuai Kompetensi**	**30**	**125.150.500**	**25**	**89.864.472**	**30**	**Persen**	**704.919.100**	**87,5**	**677.812.894**	**291,67%**	**96,15%**	**112,5**	**767.677.366**	**3,75**	**613%**	**UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**	
	2.07.03.1.01	**Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten**			**32**	**89.864.472**	**64**	**orang**	**704.919.100**	**64**	**677.812.894**	**100,00%**	**96,15%**	**96**	**767.677.366**			**UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**	
	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi			32	89.864.472	64	orang	704.919.100	64	677.812.894	100,00%	96,15%	96	767.677.366			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	
	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA						**2.946.433.306**			**566.442.437**		**553.994.968**		**97,80%**	**0**	**3.500.428.274**				
	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**83**	**283.678.996**	**86,54**	**2.821.133.406**	**82,5**	**Nilai**	**415.442.437**	**86,79**	**406.847.818**	**105,20%**	**97,93%**	**173,33**	**3.227.981.224**	**2,09**	**1138%**	**UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**	
	2.07.01.1.02	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**			**100**	**2.601.788.973**	**100**	**Persen**	**133.607.201**	**100**	**133.607.201**	**100,00%**	**100,00%**	**200**	**2.735.396.174**			**UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**	
	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			14	2.601.788.973	14	dokumen	133.607.201	14	133.607.201	100,00%	100,00%	28	2.735.396.174			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.06	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**			**100**	**18.684.520**	**100**	**Persen**	**29.150.140**	**100**	**27.319.102**	**100,00%**	**93,72%**	**200**	**46.003.622**			**UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**	
	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia			0	0	1	jenis	5.081.200	1	4.667.920	100,00%	91,87%	1	4.667.920			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			13	13.297.020	4	jenis	11.068.940	4	10.601.182	100,00%	95,77%	17	23.898.202			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan			1	5.000.000	1	jenis	13.000.000	1	12.050.000	100,00%	92,69%	2	17.050.000			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan			1	387.500	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	387.500			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.07	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**0**	**0**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**0**	**0**			**UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**	
	2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor			0	0	0	unit	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100**	**91.189.713**	**100**	**Persen**	**91.319.096**	**100**	**87.836.667**	**100,00%**	**96,19%**	**200**	**179.026.380**			**UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**	
	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia			1	900.000	1	jenis	1.200.000	1	1.200.000	100,00%	100,00%	2	2.100.000			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan			1	8.609.217	1	jenis	12.000.000	1	8.527.211	100,00%	71,06%	2	17.136.428			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan			1	81.680.496	1	jenis	78.119.096	1	78.109.456	100,00%	99,99%	2	159.789.952			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.09	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100**	**109.470.200**	**100**	**Persen**	**161.366.000**	**100**	**158.084.848**	**100,00%**	**97,97%**	**200**	**267.555.048**			**UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**	
	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas			2	20.031.800	3	unit	81.620.000	3	80.562.348	100,00%	98,70%	5	100.594.148			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			1	3.800.000	1	unit	20.000.000	1	19.640.000	100,00%	98,20%	2	23.440.000			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			2	85.638.400	5	jenis	59.746.000	5	57.882.500	100,00%	96,88%	7	143.520.900			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja**	**100**	**138.248.002**	**100%**	**125.299.900**	**100**	**Persen**	**151.000.000**	**100%**	**147.147.150**	**1,00%**	**97,45%**	**2**	**272.447.050**	**0,02**	**197%**	**UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**	
	2.07.06.1.01	**Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Terwujudnya kesehatan kerja bagi pekerja dan aspek keselamatan kerja di perusahaan**			**100%**	**125.299.900**	**100**	**Persen**	**151.000.000**	**100%**	**147.147.150**	**1,00%**	**97,45%**	**2**	**272.447.050**			**UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**	
	2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya			100%	125.299.900	100	Persen	151.000.000	100%	147.147.150	1,00%	97,45%	2	272.447.050			UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**0**	**225.471.189**			**186.047.592**		**185.977.992**			**0**	**411.449.181**				
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA**				**0**	**225.471.189**			**186.047.592**		**185.977.992**			**0**	**411.449.181**				
	3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Persentase Pengusahaan Sumber Daya Mineral yang Sesuai Ketentuan**	**60**	**8.000.000**	**50**	**198.401.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**50**	**198.401.739**	**0,83**	**2480%**	**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	3.29.03.1.03	**Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah**	**Persentase Jumlah Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah yang Melaksanakan Kewajiban Sesuai Ketentuan**			**55**	**198.401.739**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**55**	**198.401.739**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terbitnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut dan Rekomendasi teknis layanan perijinan dan informasi ijin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan ijin pengusahaan Air Tanah			368	198.401.739	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	368	198.401.739			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
	3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang Sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)**	**13**	**20.141.800**	**8,62**	**27.069.450**	**11**	**MW**	**186.047.592**	**10,6**	**185.977.992**	**96,36%**	**99,96%**	**19,22**	**213.047.442**	**1,48**	**1058%**	**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	3.29.05.1.04	**Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Laporan Bauran Energi Baru Terbarukan**			**8,62**	**27.069.450**	**1**	**Laporan/Dokumen**	**186.047.592**	**1**	**185.977.992**	**100,00%**	**99,96%**	**9,62**	**213.047.442**			**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM**	
	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pengusahaan Sektor Sumber Daya Mineral			62	27.069.450	200	Pengusaha	186.047.592	205	185.977.992	102,50%	99,96%	267	213.047.442			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	
			Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan					1,1	persen		1,26		114,55%		1,26	0				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**53.412.556.206**			**67.226.197.244**	**2.766**	**62.734.656.320**								
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**773.654.862**			**2.153.265.846**		**1.999.429.060**							**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Kelompok yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Pengolah Hasil Pertanian**	**70 Ton**	**2.995.169.181**	**35**	**232.271.188**	**35**	**Persen**	**1.271.465.438**	**35**	**1.146.559.288**	**100,00%**	**90,18%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang Dikembangkan**			**35**	**232.271.188**	**18**	**Kelompok**	**1.271.465.438**	**18**	**1.146.559.288**	**100,00%**	**90,18%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang Dikembangkan			18	232.271.188	18	kelompok	1.271.465.438	18	1.146.559.288	100,00%	90,18%					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Kelompok yang Mengikuti Bimtek Pengolahan dan Pemasaran Hasil di 9 Kab/Kota kajian Sentra Daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar			9		9	kelompok		9		100,00%							
	2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**2.460 kkal/kapita/hari**	**1.853.543.585**	**2.649**	**353.999.532**	**2.440**	**Kkal/kapita/hari**	**523.099.224**	**2.440**	**522.114.854**	**100,00%**	**99,81%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	2.09.04.1.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan**			**3**	**193.720.690**	**2**	**Dokumen**	**202.464.540**	**2**	**201.838.745**	**100,00%**	**99,69%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Data Ketersediaan Pangan			3	193.720.690	2	Jenis	202.464.540	2	201.838.745	100,00%	99,69%					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina**			**3**	**160.278.842**	**3**	**Unit**	**320.634.684**	**3**	**320.276.109**	**100,00%**	**99,89%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina			5	160.278.842	5	Unit	320.634.684	5	320.276.109	100,00%	99,89%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi**	**4 persen**	**2.547.531.955**	**95,8**	**187.384.142**	**82**	**Persen**	**358.701.184**	**82**	**330.754.918**	**100,00%**	**92,21%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji**			**95,8**	**187.384.142**	**20**	**Sampel**	**358.701.184**	**20**	**330.754.918**	**100,00%**	**92,21%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji			20	187.384.142	20	Sampel	358.701.184	20	330.754.918	100,00%	92,21%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**52.638.901.344**			**65.072.931.398**		**60.735.227.260**							**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**85**	**195.690.844.424**	**83**	**47.561.510.927**	**84**	**nilai**	**47.203.148.947**	**84**	**45.797.479.237**	**100,00%**	**70,38%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**83**	**395.077.200**	**6**	**Dokumen**	**596.276.720**	**6**	**588.246.470**	**100,00%**	**98,65%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersedia			2	160.552.592	5	Dokumen	317.784.084	5	314.585.834	100,00%	98,99%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia			1	234.524.608	1	Dokumen	278.492.636	1	273.660.636	100,00%	98,26%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1**	**44.118.469.664**	**1**	**Dokumen**	**43.223.690.060**	**1**	**42.148.442.773**	**100,00%**	**97,51%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jenis Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN			1	43.768.017.732	1	Jenis	42.827.072.580	1	41.760.233.778	100,00%	97,51%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan			1	350.451.932,00	1	Jenis	396.617.480	1	388.208.995	100,00%	97,88%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1**	**100.500.472**	**1**	**Tahun**	**94.570.935**	**1**	**85.405.792**	**100,00%**	**90,31%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik yang Siap Pakai			1	19.905.600,00	1	Tahun	17.764.705	1	15.405.412	100,00%	86,72%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai			1	18.065.172	1	Tahun	14.076.530	1	12.901.180	100,00%	91,65%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan			1	44.800.000	1	Tahun	45.000.000	1	45.000.000	100,00%	100,00%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor			1	17.729.700	1	Tahun	17.729.700	1	12.099.200	100,00%	68,24%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1**	**522.408.999**	**1**	**Tahun**	**718.806.944**	**1**	**649.206.758**	**100,00%**	**90,32%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1	322.785.399	1	Tahun	407.000.000	1	337.979.924	100,00%	83,04%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor dalam Keadaan Bersih			1	199.623.600	1	Tahun	311.806.944	1	311.226.834	100,00%	99,81%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pennjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1**	**2.425.054.592**	**1**	**Tahun**	**2.569.804.288**	**1**	**2.326.177.444**	**100,00%**	**90,52%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai			1	1.498.838.724	1	Tahun	1.814.024.672	1	1.571.486.848	100,00%	86,63%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara			1	823.905.868,00	1	Tahun	647.099.616	1	646.813.781	100,00%	99,96%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara			1	102.310.000,00	1	Tahun	108.680.000	1	107.876.815	100,00%	99,26%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian**	**90 Persen**	**12.086.429.363**	**77,95**	**4.154.699.503**	**90**	**Persen**	**14.141.216.705**	**90**	**12.069.778.706**	**100,00%**	**85,35%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**			**9**	**222.835.892**	**9**	**Kabupaten/Kota**	**5.985.706.892**	**9**	**4.405.691.292**	**100,00%**	**73,60%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			18	222.835.892	18	Kali	5.985.706.892	18	4.405.691.292	100,00%	73,60%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian**			**62**	**1.275.577.796**	**80**	**Persen**	**2.011.082.946**	**80**	**1.622.963.787**	**100,00%**	**80,70%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Buku Laporan SP Tanaman Pangan dan Hortikultura			5	449.717.376	5	Buku	667.785.326	5	566.677.864	100,00%	84,86%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
			Meningkatnya Luas Pengembangan Tanaman Buah di Kabupaten Karanganem			1		1	Hektar		1		100,00%							
			Meningkatnya Luas Pengembangan Tanaman Sayuran di Kabupaten Gianyar			1		1	Hektar		1		100,00%							
			Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hortikultura			1		1	Paket		1		100,00%							
	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani/Subak Sawah yang Menghasilkan Padi Hibrida			5	77.739.096	5	Kelompok	427.901.196	5	264.487.396	100,00%	61,81%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jenis Pengadaan, Fasilitasi Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau			1	748.121.324	1	Jenis	915.396.424	1	791.798.527	100,00%	86,50%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
			Peningkatan Kompetensi Petani dan Petugas Dalam Budidaya Tembakau			120		120	Petani dan Petugas		120		100,00%						**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Kelompok yang Menerima Bibit Ternak dan Kelompok yang Memahami Kualitas Pakan**			**29**	**2.656.285.815**	**29**	**Kelompok**	**6.144.426.867**	**29**	**6.041.123.627**	**100,00%**	**98,32%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan	Jumlah Jenis Data Peternakan			3	2.656.285.815	3	Jenis	6.144.426.867	3	6.041.123.627	100,00%	98,32%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN**	
			Jumlah yang Menerima Bibit Ternak			29		29	Kelompok		29		100,00%							
	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian**	**30 persen**	**1.920.475.235**		**462.046.526**	**15**	**Persen**	**936.817.188**	**15**	**833.754.802**	**100,00%**	**89,00%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
	3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian**			**3**	**462.046.526**	**3**	**Kegiatan**	**936.817.188**	**3**	**833.754.802**	**100,00%**	**89,00%**					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi serta Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani																	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	
	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terbinanya Perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan				376.802.630	3	PBSN	680.832.480	3	580.580.864	100,00%	85,28%					**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	
			Tersedianya Alat Pemarut Kelapa					35	Unit		35		100,00%							
			Tersedianya Gerobak Dorong / Arco					18	Unit		18		100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
			Tersedianya Mesin Pemotong Rumput					6	Unit		6		100,00%							
	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Kategori Penataan Prasarana Pertanian di 9 Kabupaten/Kota			3	85.243.896	3	Jenis	255.984.708	3	253.173.938	100,00%	98,90%					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis**	**10 persen**	**729.201.695**	**5**	**347.599.544**	**5**	**Persen**	**2.670.845.214**	**5**	**1.913.497.671**	**100,00%**	**71,64%**					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Ternak Hewan yang Tervaksin dan Jumlah Terenak/Hewan yang Dieliminasi**			**52.700**	**303.440.896**	**52.700**	**Dosis/Ekor**	**2.623.229.966**	**52.700**	**1.907.620.396**	**100,00%**	**72,72%**					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengawasan Lalu Lintas Ternak/Hewan			9	303.440.896	9	Lokasi	2.623.229.966	9	1.907.620.396	100,00%	72,72%					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Ternak/Hewan yang Dieliminasi			150		150	Ekor		150		100,00%							
			Jumlah Ternak/Hewan yang Tervakasin			522.000		522.000	Dosis		522.000		100,00%							
	3.27.04.1.05	**Kesejahteraan Hewan**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan**				**44.158.648**	**2**	**Kali**	**47.615.248**	**2**	**5.877.275**	**100,00%**	**12,34%**					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan			1	44.158.648	1	kali	47.615.248	1	5.877.275	100,00%	12,34%					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok**	**31 persen**	**247.851.855**	**15**	**113.044.844**	**15**	**Persen**	**120.903.344**	**15**	**120.716.844**	**100,00%**	**99,85%**					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani**			**20**	**113.044.844**	**20**	**Kelompok**	**120.903.344**	**20**	**120.716.844**	**100,00%**	**99,85%**					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Tani yang Terbina			25	113.044.844	25	Kelompok	120.903.344	25	120.716.844	100,00%	99,85%					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
							3.209.885.213			5.454.371.788	164	5.301.155.880								
	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**85**	**195.690.844.424**	**84**	**328.383.301**	**84**	**Nilai**	**836.761.960**	**84**	**748.549.601**	**100,00%**	**89,46%**					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1**	**36.692.975**	**1**	**Tahun**	**92.040.480**	**1**	**86.700.928**	**100,00%**	**94,20%**					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1	4.183.400	1	Tahun	13.202.600	1	12.782.600	100,00%	96,82%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai			1	4.046.875	1	Tahun	11.650.980	1	10.502.128	100,00%	90,14%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana Upacara Keagamaan			1	25.000.000	1	Tahun	55.000.000	1	55.000.000	100,00%	100,00%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor			1	3.462.700	1	Tahun	12.186.900	1	8.416.200	100,00%	69,06%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1**	**113.371.030**	**1**	**Tahun**	**418.456.440**	**1**	**352.813.933**	**100,00%**	**84,31%**					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1	51.619.230	1	Tahun	223.606.000	1	159.191.568	100,00%	71,19%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor dalam Keadaan Bersih			1	61.751.800	1	Tahun	194.850.440	1	193.622.365	100,00%	99,37%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1**	**178.319.296**	**1**	**Tahun**	**326.265.040**	**1**	**309.034.740**	**100,00%**	**94,72%**					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai			1	130.952.848	1	Tahun	220.912.144	1	212.281.844	100,00%	96,09%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara			1	47.366.448	1	Tahun	105.352.896	1	96.752.896	100,00%	91,84%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran**	**90 persen**	**3.865.411.310**	**80**	**2.881.501.912**	**80**	**Persen**	**4.617.609.828**	**80**	**4.552.606.279**	**100,00%**	**98,59%**					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran**			**85**	**1.702.502.082**	**85**	**Persen**	**3.438.609.998**	**85**	**3.376.536.779**	**100,00%**	**98,19%**					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten			**1**		**1**	**Persen**		**1**		**100,00%**							
			Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu			**5**		**5**	**Persen**		**5**		**100,00%**							
	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih yang Diterbitkan			25	187.969.740	25	Sertifikat	736.389.362	25	722.333.946	100,00%	98,09%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan,	
			Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan			15		15	Buah		15		100,00%							
			Pengawasan Peredaran Benih			9		9	Kabupaten		9		100,00%							
	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Perbanyakan Benih Jamur			5.000	117.521.738	5.000	Baglog	756.810.346	5.000	715.836.633	100,00%	94,59%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi	
			Jumlah Sampel Pengujian Mutu Benih			97		97	Sampel		97		100,00%							
	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Penanaman Bibit Padi Untuk Ketersediaan Benih Padi			3	316.465.584	3	Ton	864.865.270	3	861.405.580	100,00%	99,60%					UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Terlaksananya Pengenalan Varietas Tanaman Pangan			5		5	Varietas		5		100,00%							
			Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Benih			12		12	Laporan		12		100,00%							
			Tersedianya Data Inventarisasi Penyebaran Varietas			12		12	Laporan		12		100,00%							
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan	Benih Kelapa Salak yang Berkualitas			1.750		1.750	Butir		1.750		100,00%					UPTD Balai Perbenihan,	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Entres Kopi Robusta			50.000	1.080.545.020	50.000	Batang	1.080.545.020	50.000	1.076.960.620	100,00%	99,67%					Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan	
			Jumlah Produksi Benih Kopi Arabika			1.000.000		1.000.000	Butir		1.000.000		100,00%							
	3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Perakitan Marigold (Gumitir) warna warni, Pengembangan Tanaman Puspa Dewata dan Tanaman Usada**			**1**	**1.178.999.830**	**1**	**Paket**	**1.178.999.830**	**1**	**1.176.069.500**	**100,00%**	**99,75%**					**UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Perakitan Marigold (Gumitir) warna warni, Pengembangan Tanaman Puspa Dewata dan Tanaman Usada			1	1.178.999.830	1	Tahun	1.178.999.830	1	1.176.069.500	100,00%	99,75%					**UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**84**	**661.523.514**	**84**	**Nilai**	**852.199.168**	**84**	**750.687.480**	**100,00%**	**88,09%**					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1**	**35.448.370**	**1**	**Tahun**	**69.608.410**	**1**	**65.865.750**	**100,00%**	**94,62%**					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan dan Siap Pakai			4	4.739.460	4	Jenis	4.003.800	4	3.138.300	100,00%	78,38%					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan kantor yang Siap Pakai			1	2.982.000	1	Tahun	7.015.610	1	6.013.800	100,00%	85,72%					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang Diadakan			1	24.760.000	2	Jenis	50.000.000	2	49.804.000	100,00%	99,61%					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor			1	2.966.910	1	Tahun	8.589.000	1	6.909.650	100,00%	80,45%					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1**	**136.397.364**	**1**	**Tahun**	**406.020.374**	**1**	**318.934.416**	**100,00%**	**78,55%**					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1	58.946.364	1	Tahun	211.170.000	1	125.477.976	100,00%	59,42%					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih			1	77.451.000	1	Tahun	194.850.374	1	193.456.440	100,00%	99,28%					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1**	**489.677.780**	**1**	**Tahun**	**376.570.384**	**1**	**365.887.314**	**100,00%**	**97,16%**					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai			1	137.789.748	1	Tahun	137.061.696	1	126.693.996	100,00%	92,44%					**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara			1	342.238.032	1	Tahun	229.858.688	1	229.668.318	100,00%	99,92%					UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabiliasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara			1	9.650.000	1	Tahun	9.650.000	1	9.525.000	100,00%	98,70%					UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan**	**5 Persen**	**4.646.084.833**	**5**	**864.907.706**	**5**	**Persen**	**2.295.861.869**	**5**	**2.250.947.991**	**100,00%**	**98,04%**					UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)**			**9**	**864.907.706**	**9**	**Kabupaten/Kota**	**2.295.861.869**	**9**	**2.250.947.991**	**100,00%**	**98,04%**					UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			6	350.685.982	6	Kabupaten	756.741.987	1	754.071.001	16,67%	99,65%					UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ditanggulanginya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			4	345.025.982	4	Kabupaten	1.048.290.586	4	1.008.829.432	100,00%	96,24%					UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.05.1.01.04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ditanggulanginya DPI dan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura			9	169.195.742	9	Kabupaten/Kota	490.829.296	9	488.047.558	100,00%	99,43%					UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**84**	**1.005.786.346**	**84**	**nilai**	**535.347.578**	**84**	**445.984.177**	**100,00%**	**83,31%**					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1**	**558.463.513**	**1**	**Tahun**	**56.852.170**	**1**	**49.269.334**	**100,00%**	**86,66%**					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan danSiap Pakai			1	4.944.500	1	Paket	19.778.075	1	18.664.983	100,00%	94,37%					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai			1	527.269.013	1	Tahun	6.482.095	1	5.466.681	100,00%	84,34%					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Upacara yang Diadakan			1	25.000.000	2	Jenis	25.000.000	2	24.500.000	100,00%	98,00%					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor			1	1.250.000	1	Tahun	5.592.000	1	637.670	100,00%	11,40%					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1**	**108.499.779**	**1**	**Tahun**	**207.820.816**	**1**	**185.769.501**	**100,00%**	**89,39%**					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1	77.169.779	1	Tahun	51.000.000	1	29.439.251	100,00%	57,72%					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih			1	31.330.000	1	Tahun	156.820.816	1	156.330.250	100,00%	99,69%					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1**	**338.823.054**	**1**	**Tahun**	**270.674.592**	**1**	**210.945.342**	**100,00%**	**77,93%**					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai			1	67.457.898	1	Tahun	210.244.592	1	202.434.892	100,00%	96,29%					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara			1	265.935.156	1	Tahun	55.000.000	1	4.914.050	100,00%	8,93%					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara			1	5.430.000	1	Tahun	5.430.000	1	3.596.400	100,00%	66,23%					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak**	**91 Persen**	**3.888.437.688**	**81**	**1.896.798.872**	**81**	**Persen**	**2.225.762.872**	**81**	**2.072.735.116**	**100,00%**	**93,12%**					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**			**3**	**1.896.798.872**	**3**	**Jenis**	**2.225.762.872**	**3**	**2.072.735.116**	**100,00%**	**93,12%**					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengembangan Bibit Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit			20	1.896.798.872	20	Ekor	2.225.762.872	20	2.072.735.116	100,00%	93,12%					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			Jumlah Pengembangan Hijauan Pakan Ternak yang Menghasilkan Mutu Benih/Bibit			5.000		5.000	HPT		5.000		100,00%						
			Produksi Semen			1.000.000		1.000.000	Dosis		1.000.000		100,00%						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.198.766.578**			**2.198.766.978**		**2.143.364.533**							UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**2.198.766.578**			**2.198.766.978**		**2.143.364.533**		**97,48%**					UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	
	2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**				**725.784.574**	**84**	**Nilai**	**725.784.974**	**84**	**695.560.989**	**100,00%**	**95,84%**					UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	
	2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**52.521.400**	**1**	**Tahun**	**52.521.800**	**1**	**47.123.236**	**100,00%**	**89,72%**					UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	
	2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Alat-Alat Listrik yang Disediakan dan Siap Pakai				10.143.000	10	Jenis	10.143.400	10	8.274.700	100,00%	81,58%					UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	
	2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor yang Siap Pakai				6.278.400	1	Tahun	6.278.400	1	5.369.100	100,00%	85,52%					UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	
	2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang Diadakan				30.000.000	2	Jenis	30.000.000	2	29.375.000	100,00%	97,92%					UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	
	2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis dan Peralatan Kantor				6.100.000	1	Tahun	6.100.000	1	4.104.436	100,00%	67,29%					UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**323.118.582**	**1**	**Tahun**	**323.118.582**	**1**	**309.234.176**	**100,00%**	**95,70%**					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.224.000	1	Tahun	202.224.000	1	190.785.742	100,00%	94,34%					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Ruangan/Lingkungan Kantor Dalam Keadaan Bersih				120.894.582	1	Tahun	120.894.582	1	118.448.434	100,00%	97,98%					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**350.144.592**	**1**	**Tahun**	**350.144.592**	**1**	**339.203.577**	**100,00%**	**96,88%**					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Siap Pakai				125.891.696	1	Tahun	125.891.696	1	121.155.096	100,00%	96,24%					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Kantor yang Terpelihara				100.000.000	1	Tahun	100.000.000	1	99.011.800	100,00%	99,01%					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Terpelihara				124.252.896	1	Tahun	124.252.896	1	119.036.681	100,00%	95,80%					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Bersertifikat Keamanan Pangan**	**83 persen**	**735.337.427**		**760.959.222**	**3**	**Persen**	**760.959.222**	**3**	**744.086.716**	**100,00%**	**97,78%**					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Teregistrasi**				**760.959.222**	**4**	**Produk PSAT**	**760.959.222**	**4**	**744.086.716**	**100,00%**	**97,78%**					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi				361.690.887	4	Produk PSAT	361.690.887	4	352.540.144	100,00%	97,47%					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk PSAT yang Tersertifikasi				399.268.335	4	Produk PSAT	399.268.335	4	391.546.572	100,00%	98,07%					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesmavet**	**85,81**	**4.783.858.285**		**712.022.782**	**84,97**	**Nilai**	**712.022.782**	**84,97**	**703.716.828**	**100,00%**	**98,83%**					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesmavet**				**712.022.782**	**84,97**	**Nilai**	**712.022.782**	**84,97**	**703.716.828**	**100,00%**	**98,83%**					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Sampel Produk Hewan yang Tersertifikasi dan Teruji				340.118.240	1.000	Sampel	340.118.240	1.000	337.877.840	100,00%	99,34%					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel yang Diuji				371.904.542	50	LHU	371.904.542	50	365.838.988	100,00%	98,37%					**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	
I.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target**	**100**	**173.673.414**	**100**	**504.640.791,00**	**100**	**Persen**	**563.506.377,00**	**100**	**501.631.132,00**	**100%**	**89,02%**	**200**	**1.006.271.923,00**	**200**	**579,4046998**	**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
1	2.12.02.1.01	**Kegiatan:** Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	**- Output Kegiatan:** Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk			**99**	**504.640.791,00**	**99**	**Persen**	**563.506.377,00**	**99**	**501.631.132,00**	**100,00%**	**89,02%**	**198**	**1.006.271.923,00**			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
a	2.12.02.1.01.01	**Sub Kegiatan:** Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Kesepakatan Kebijakan Teknis Pindah Datang Penduduk			1	157.735.334,00								1	Rp 157.735.334			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Output Sub Kegiatan: Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk			1	-								1				**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
b	2.12.02.1.01.03	**Sub Kegiatan:** Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen			2	72.841.123,00								2	Rp 72.841.123			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen;			1	-								1				**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi			226.000	-								226.000				**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
c	2.12.02.1.01.04	**Sub Kegiatan:** Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Profil Kependudukan Provinsi			1	274.064.334,00	1	Profil Kependudukan		1		100,00%	89,02%	**2**	Rp 775.695.466			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah Data Agregat			2	-	2	Data Agregat		2				**4**				**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah PKS Pemanfaatan Data Kependudukan;			5	-	0	PKS		0				**5**				**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi					150.000	Keping Blanko KTP-el		251.000		167,33%		**251000**					
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen					2	Laporan Pendataan	Rp 563.506.377	2	Rp 501.631.132	100,00%		**2**					
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen					1	Kali Sosialisasi		1		100,00%		**1**					
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah Data Agregat					2	Data Agregat		2		100,00%		**2**					
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Monitoring Kependudukan Provinsi					2	Laporan		2		100,00%		**2**					
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah profil Kependudukan					1	Profil Kependudukan		0		0,00%		**0**					
II.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target**	**100**	**133.195.744**	**100**	**540.444.491,00**	**100**	**Persen**	**133.195.744,00**	**100**	**132.686.994,00**	**100%**	**99,62%**	**200**	**673.131.485,00**	**200**	**505,3701153**	**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
1	2.12.03.1.01	**Kegiatan:** Pelayanan Pencatatan Sipil	**- Output Kegiatan:** Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			**75**	**540.444.491,00**	**77**	**Persen**	**133.195.744,00**	**77,53**	**132.686.994,00**	**101%**	**99,62%**	**152,53**	**673.131.485,00**			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Hasil Kegiatan: Cakupan penerbitan akta kelahiran di kabupaten/Kota					**9**	**Kab/Kota**	**133.195.744,00**	**9**	**132.686.994,00**	100%	**99,62%**	**9**					
a	2.12.03.1.01.02	**Sub Kegiatan:**Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			3	203.896.102,00	1	Kali	Rp 133.195.744	1	Rp 132.686.994	100%	99,62%	**4**	Rp 336.583.096			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil			1									**1**				**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
b	2.12.03.1.01.04	**Sub Kegiatan:**Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan			4	336.548.389,00								**4**	Rp 336.548.389			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
III.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**82,65**	**15.402.711.807**	**82,6**	**11.534.072.787,00**	**82,65**	**'Nilai**	**14.051.861.577,00**	**0**	**13.101.340.555,00**	**0%**	**93,24%**	**82,6**	**24.635.413.342,00**	**99,93950393**	**159,9420521**	**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
1	2.13.01.1.01	**Kegiatan:** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Output Kegiatan:** Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja			**0,88**	**251.825.302,00**	**0,06**	**Persen**	**211.187.044,00**	**-**	**209.876.894,00**	**0%**	**99,38%**	**0,88**	**461.702.196,00**			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
a	2.13.01.1.01.01	**Sub Kegiatan:** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Output Sub Kegiatan:** Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	4.347.700,00	1	Dokumen	Rp 14.659.300	1	Rp 13.799.650	100%	94,14%	**3**	Rp 18.147.350			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
b	2.13.01.1.01.02	**Sub Kegiatan:** Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah			1	-								**1**	Rp -			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
c	2.13.01.1.01.03	**Sub Kegiatan:** Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah			1	585.500,00								**1**	Rp 585.500			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
d	2.13.01.1.01.04	**Sub Kegiatan:** Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah			1	-								**1**	Rp -			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
e	2.13.01.1.01.05	**Sub Kegiatan:** Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah			1	1.740.550,00								**1**	Rp 1.740.550			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
f	2.13.01.1.01.06	**Sub Kegiatan:** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Output Sub Kegiatan:** Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan			1	3.162.000,00								**1**	Rp 3.162.000			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
g	2.13.01.1.01.07	**Sub Kegiatan:** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Output Sub Kegiatan:** Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	241.989.552,00	1	Dokumen	Rp 196.527.744	1	Rp 196.077.244	100%	99,77%	**2**	Rp 438.066.796			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
2	2.13.01.1.02	**Kegiatan :** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**- Output Kegiatan:** Persentase pelayanan administrasi keuangan			**100**	**9.520.496.165,00**	**100**	**Persen**	**11.614.197.599,00**	**100**	**10.760.988.011,00**	**100%**	**92,65%**	**200**	**20.281.484.176,00**			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
a	2.13.01.1.02.01	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			64	9.381.113.863,00	64	Pegawai	Rp 11.479.066.725	64	Rp 10.627.414.267	100%	92,58%	**128**	Rp 20.008.528.130			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
b	2.13.01.1.02.03	**Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Dokumen verifikasi			9	93.572.968,00	9	Dokumen	Rp 135.130.874	9	Rp 133.573.744	100%	98,85%	**18**	Rp 227.146.712			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
c	2.13.01.1.02.04	**Sub Kegiatan :** Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu			4	43.770.284,00								**4**	Rp 43.770.284			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
d	2.13.01.1.02.06	**Sub Kegiatan :** Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan			1	2.039.050,00								**1**	Rp 2.039.050			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
3	2.13.01.1.06	**Kegiatan:** Administrasi Umum Perangkat Daerah	**- Output Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum			**12**	**544.203.230,00**	**12**	**Bulan**	**269.215.930,00**	**12**	**239.416.212,00**	**100%**	**88,93%**	**24**	**783.619.442,00**			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
a	2.13.01.1.06.01	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia			12	5.000.000,00	12	Bulan	Rp 5.495.900	12	Rp 5.466.000	100%	99%	**24**	Rp 10.466.000			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
b	2.13.01.1.06.02	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor yang tersedia			12	300.712.900,00	12	Bulan	Rp 19.146.030	12	Rp 18.593.900	100%	97,12%	**24**	Rp 319.306.800			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
c	2.13.01.1.06.04	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang tersedia			12	77.877.000,00	12	Bulan	Rp 93.000.000	12	Rp 91.218.500	100%	98,08%	**24**	Rp 169.095.500			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
d	2.13.01.1.06.05	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan			12	8.166.750,00	12	Bulan	Rp 5.649.000	12	Rp 5.105.000	100%	90,37%	**24**	Rp 13.271.750			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
e	2.13.01.1.06.06	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya han bacaan/koran/media cetak yang tersedia			12	4.084.800,00	12	Bulan	Rp 4.200.000	12	Rp 4.051.500	100%	96,46%	**24**	Rp 8.136.300			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
f	2.13.01.1.06.08	**Sub Kegiatan :** Fasilitasi Kunjungan Tamu	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat - rapat, tamu, lembur yang tersedia			12	43.443.550,00	12	Bulan	Rp 7.575.000	12	Rp 7.428.750	100%	98,07%	**24**	Rp 50.872.300			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
g	2.13.01.1.06.09	**Sub Kegiatan :** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan			12	104.918.230,00	12	Bulan	Rp 134.150.000	12	Rp 107.552.562	100%	80,17%	**24**	Rp 212.470.792			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
4	2.13.01.1.07	**Kegiatan:** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**- Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan**			100	4.920.000,00	**100**	**Persen**	**7.340.000,00**	**100**	**5.840.000,00**	**100%**	**79,56%**	**200**	10.760.000,00			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
a	2.13.01.1.07.10	**Sub Kegiatan :** Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor			12	4.920.000,00	12	Bulan	Rp 7.340.000	12	Rp 5.840.000	100%	79,56%	**24**	Rp 10.760.000			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
5	2.13.01.1.08	**Kegiatan:** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**- Output Kegiatan :** Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan			100	647.200.216,00	**100**	**Persen**	**643.532.076,00**	**100**	**618.172.750,00**	**100%**	**96,06%**	**200**	1.265.372.966,00			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
a	2.13.01.1.08.02	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	123.263.612,00	12	Bulan	Rp 160.000.000	12	Rp 135.089.874	100%	84,43%	**24**	Rp 258.353.486			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
b	2.13.01.1.08.04	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**'- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor			12	523.936.604,00	12	Bulan	Rp 483.532.076	12	Rp 483.082.876	100%	99,91%	**24**	Rp 1.007.019.480			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
6	2.13.01.1.09	**Kegiatan:** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**- Output Kegiatan :** Persentase barang milik daerah yang terselesaikan			100	565.427.874,00	**100**	**Persen**	**1.306.388.928,00**	**100**	**1.267.046.688,00**	**100%**	**96,99%**	**200**	1.832.474.562,00			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
a	2.13.01.1.09.01	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak u Kendaraan Dinas Jabatan			12	535.597.874,00	12	Bulan	Rp 1.267.788.928	12	Rp 1.228.578.728	100%	96,91%	**24**	Rp 1.764.176.602			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
b	2.13.01.1.09.06	**Sub Kegiatan :** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya			12	29.830.000,00	12	Bulan	Rp 38.600.000	12	Rp 38.467.960,00	100%	99,66%	**24**	Rp 68.297.960			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
	2.13.01.1.09.09	**Sub Kegiatan :** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**- Output Sub Kegiatan :** Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor					12 Bulan							**0**				**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
															0						
IV.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes**	**25**	**114.915.006**	**0**	**100.947.068,00**	**25**	**Desa**	**114.915.006,00**	**34**	**111.541.297,00**	**136%**	**97,06%**	**34**	**212.488.365,00**	**136**	**184,91**	**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
1	2.13.03.1.01	**Kegiatan:** Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	**- Output Kegiatan:** Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan			2,04	100.947.068,00	**3,93**	**Persen**	**114.915.006,00**	**4,40**	**111.541.297,00**	**112%**	**97,06%**	**6,44**	212.488.365,00			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Hasil Kegiatan: Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes					**25**	**Desa**	**114.915.006,00**	**28**	**111.541.297,00**	**112%**	**97,06%**	**28**	-			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
a	2.13.03.1.01.01	**Sub Kegiatan:**Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota			2	100.947.068,00	25	Desa	Rp 114.915.006	0	Rp 111.541.297	0%	97,06%	**2**	Rp 212.488.365			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
															0						
V.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Cepat Berkembang**	**66,98**	**727.309.784**	**58,96**	**875.375.022,00**	**66,98**	**Persen**	**727.309.784,00**	**67,92**	**715.064.910,00**	**101%**	**98,32%**	**126,88**	**1.590.439.932,00**	**189,4296805**	**218,6743485**	**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
1	2.13.04.1.01	**Kegiatan:** Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**- Output Kegiatan:** Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa			58,96	875.375.022,00	**71,70**	**Persen**	**727.309.784,00**	**67,14**	**715.064.910,00**	**94%**	**98,32%**	**126,1**	1.590.439.932,00			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Hasil Kegiatan: Persentase Desa Cepat Berkembang					**66,98**	**Persen**	**727.309.784,00**	**67,92**	**715.064.910,00**	**101%**	**98,32%**	**67,92**	17.427.266.038,00				
a	2.13.04.1.01.02	**Sub Kegiatan:** Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	**- Output Sub Kegiatan:** Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa			58,18	104.959.868,00	71,70	Persen	Rp 227.318.792	67,14	Rp 220.859.192	94%	97,16%	**125,32**	Rp 325.819.060			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
b	2.13.04.1.01.05	**Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	**- Output Sub Kegiatan:** Persentase desa yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel			58,96	146.562.302,00								**58,96**	Rp 146.562.302			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
c	2.13.04.1.01.06	**Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	**- Output Sub Kegiatan:** Persentase desa yang mampu menyajikan laporan aset pemerintahan desa yang akuntabel			58,02	27.963.000,00								**58,02**	Rp 27.963.000			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
d	2.13.04.1.01.08	**Sub Kegiatan:** Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	**- Output Sub Kegiatan:** Persentase desa yang mengikuti lomba desa			8,18	423.280.000,00	9,59	Persen	Rp 499.990.992	9,59	Rp 494.205.718	100%	98,84%	**17,77**	Rp 917.485.718			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
e	2.13.04.1.01.09	**Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	**- Output Sub Kegiatan:** Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa			13,36	142.261.052,00								**13,36**	Rp 142.261.052			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
f	2.13.04.1.01.19	**Sub Kegiatan:** Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**- Output Sub Kegiatan:** Persentase angota BPD yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa			58,33	30.226.500,00								**58,33**	Rp 30.226.500			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
g	2.13.04.1.01.21	**Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	**- Output Sub Kegiatan:** Persentase desa yang inovasinya dipamerkan			7,08	122.300,00								**7,08**	Rp 122.300			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
VI.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif**	**100**	**5.037.683.662**		**6.237.261.146,00**	**100**	**Persen**	**11.169.545.762,00**	**100**	**10.603.493.292,00**	**100%**	**94,93%**	**100**	**16.162.645.166,00**	**100**	**320,8348569**	**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif			97,49	-								**97,49**				**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa			75		**80**	**Persen**	**Rp 11.169.545.762**	**80**	**Rp 10.603.493.292**	**100%**	**94,93%**	**155**	**-**				
1	2.13.05.1.01	**Kegiatan:** Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**- Output Kegiatan:** Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif			75	6.237.261.146,00	**80**	**Persen**	**11.169.545.762,00**	**80**	**10.603.493.292,00**	**100%**	**94,93%**	**155**	16.162.645.166,00			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Hasil Kegiatan: Persentase Kelembagaan Desa yang aktif					**100**	**Persen**	**11.169.545.762,00**	**100**	**10.603.493.292,00**	**100%**	**94,93%**	**100**	2.162.647.294,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
a	2.13.05.1.01.03	**Sub Kegiatan** :Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	**- Output Sub Kegiatan:** Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina			6,23	96.259.368,00	18,86	Persen		10,53				**16,76**	Rp 96.259.368			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Output Sub Kegiatan: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat			5,17		6	Persen		6,07				**11,24**				**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
b	2.13.05.1.01.04	**Sub Kegiatan :** Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	**- Output Sub Kegiatan:**Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana			60	115.459.968,00	60	Desa	Rp 202.835.892	65	Rp 201.791.092	108%	99,48%	**125**	Rp 317.251.060			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
c	2.13.05.1.01.05	**Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	**- Output Sub Kegiatan:**Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa			9	249.595.134,00	9	Desa	Rp 357.108.592	9	Rp 352.849.992	100%	98,81%	**18**	Rp 602.445.126			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
d	2.13.05.1.01.06	**Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	**- Output Sub Kegiatan:**Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna			15	392.592.086,00								**15**	Rp 392.592.086			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah Potensi Sumber Daya Alam yang terdata			11		67	Potensi SDA	Rp 760.591.394	0	Rp 678.109.272	0%	89,16%	**11**	Rp 678.109.272			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
e	2.13.05.1.01.09	**Sub Kegiatan :** Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	**- Output Sub Kegiatan:** Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK			8,56	5.383.354.590,00	15,84	Persen	Rp 9.849.009.884	15,84	Rp 9.370.742.936	100%	95,14%	**24,4**	Rp 14.754.097.526			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
VII.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana**	**7**	**349.495.851**	**6**	**11.750.457.840,00**	**7**	**Sektor**	**370.403.511,00**	**7**	**347.036.328,00**	**100%**	**93,69%**	**13**	**489.500.810,00**	**185,7142857**	**140,059119**	**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
1	2.14.03.1.01	**Kegiatan**: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**- Output Kegiatan:** Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali			0	11.750.457.840,00	**1.350**	**Orang**	**370.403.511,00**	**1.350**	**347.036.328,00**	**100%**	**93,69%**	**1350**	489.500.810,00			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
a	2.14.03.1.01.01	**Sub Kegiatan:** Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah kebijakan operasional yang dipromosikan kepada Krama Bali			0	104.524.568,00								**0**	Rp 104.524.568			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
			- Hasil Kegiatan: Jumlah Kab/Kota yang memahami Program KB Krama Bali					**9**	**Kab/Kota**	**Rp 349.495.851**	**9**	**Rp 327.982.808**	**100%**	**93,84%**	**9**	384.976.242,00				
b	2.14.03.1.01.02	**Sub Kegiatan:** Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**- Output Sub Kegiatan:** Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali			0	56.993.434,00	7	Sektor	Rp 349.495.851	7	Rp 327.982.808	100%	93,84%	**7**	Rp 384.976.242			**DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali**	
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**91,67**	**11.588.939.838,00**	**83,99**	**persen**	**20.907.660,00**	**76,54**	**19.053.520,00**	**91%**	**91,13%**					**DISHUB**	
	2.15.01.1.01	**Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi bali**			**47,01**	**14.143.800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							**DISHUB**	
	2.15.01.1.01	**Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**-**	**-**	**100**	**persen**	**20.907.660,00**	**91,13**	**19.053.520,00**	**91%**	**91,13%**					**DISHUB**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.15.01.1.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman			2	5.101.000,00	5	dokumen	13.512.870,00	5	12.603.840,00	100%	93,27%					DISHUB	
	2.15.01.1.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan RKA-SKPD			1	2.545.250,00	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.01.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan perubahan RKA-SKPD			1	-	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.01.04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen rumus program dan kegiatan pada DPA-SKPD yang sesuai ketentuan			1	2.529.000,00	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.01.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada perubahan DPA-SKPD yang sesuai ketentuan			1	-	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase Dokumen Evaluasi perangkat daerah			100	176.700,00	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					3	dokumen	7.394.790	3	6.449.680,00	100%	87,22%					DISHUB	
	2.15.01.1.01.07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan			1	3.791.850,00												DISHUB	
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**					79	persen	17.670.699.948,00		17.409.165.168,00	0%	98,52%					DISHUB	
	2.15.01.1.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan**			**93**	**8.943.077.597**												DISHUB	
	2.15.01.1.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase meningkatnya kinerja keuangan perangkat daerah**					**100**	**persen**	**15.647.017.073,00**	**98,77**	**15.454.563.788**	**99%**	**98,77%**					DISHUB	
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanya pemenuhan gaji dan tunjangan			1	8.928.027.959,00	1	tahun	15.625.444.253,00	1	15.434.509.328,00	**100%**	98,78%					DISHUB	
	2.15.01.1.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN			1	10.892.818,00	1	dokumen	21.572.820,00	1	20.054.460,00	100%	92,96%					DISHUB	
	2.15.01.1.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi			1	1.787.100,00	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.02.06	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan			1	822.820,00	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.02.07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun			7	1.546.900,00	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.05	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Displin Sumber Daya Aparatur**			**0**	**-**							**0,00%**					DISHUB	
	2.15.01.1.05.09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formula untuk peningkatan kualitas kinerja pegawai			0	-							0,00%					DISHUB	
	2.15.01.1.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**78,06**	**288.852.289,00**	**100**	**persen**	**253.682.875,00**	**72,77**	**184.601.380,00**	**73%**	**72,77%**					DISHUB	
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik			1	2.894.100,00	1	tahun	3.031.200,00	1	2.796.200,00	100%	92,25%					DISHUB	
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor			1	110.969.650,00	1	tahun	30.863.875,00	1	29.634.642,00	100%	96,02%					DISHUB	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan siap pakai			8		1	tahun		1		100%						DISHUB	
			Jumlah Peralatan Pompa Air			1													DISHUB	
			Jumlah Peralatan Siap Pakai : Microphone			0													DISHUB	
			Jumlah Perlengkapan siap pakai : AC			1													DISHUB	
	2.15.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan sarana sesajen dan upakara			1	66.325.000,00	1	tahun	75.000.000,00	1,00	74.998.500,00	100%	100,00%					DISHUB	
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan			1	3.650.000,00	1	tahun	3.156.800,00	1,00	2.631.600,00	100%	83,36%					DISHUB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
blm	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia			1	19.908.000,00	1	tahun	20.000.000,00	1,00	19.928.000,00	100%	99,64%					DISHUB	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan			1	85.105.539,00	-	-	-	-	-							DISHUB	
			Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji			1		-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan, - jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji					1	tahun	121.631.000	1,00	54.612.438,00	100%	44,90%					DISHUB	
	2.15.01.1.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**100**	**150.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							**DISHUB**	
	2.15.01.1.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan operasional/patroli pecalang (hibah)			1	150.000.000,00	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan yang siap di pakai : meja kmputer, kursi rapat, meja rapat			0	-	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.07.08	Sub Kegiatan : Pengadaann Aset Tak Berwujud	Jumlah dokumen kajian lingkungan			0	-	-	-	-	-	-							DISHUB	
	2.15.01.1.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**					**100**	**persen**	**1.770.000.000,00**	**100**	**1.770.000.000,00**	100%	**100,00%**					**DISHUB**	
	2.15.01.1.07.01	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Pengorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana yang dihibahkan					1	tahun	1.770.000.000,00	1	1.770.000.000,00	100%	**100,00%**					DISHUB	
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**					100	persen	2.544.178.674,00	90,19	2.294.495.828,00	90%	**90,19%**					**DISHUB**	
	2.15.01.1.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**91,17**	**535.172.423,00**	**100**	**persen**	**633.948.082,00**	**81,93**	**519.386.980,00**	**82%**	**81,93%**					**DISHUB**	
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai			1	2.000.000,00	200	lembar	2.000.000,00	200	2.000.000,00	100%	100,00%					DISHUB	
	2.15.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komuniksi, sumber daya air dan listrik yang dibayar perbulan tepat waktu			1	206.644.795,00	1	tahun	275.000.000,00	1,00	171.816.331,00	100%	62,48%					DISHUB	
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu			1	326.527.628,00	1	tahun	356.948.082,00	1,00	345.570.649,00	100%	96,81%					DISHUB	
	2.15.01.1.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**87,61**	**1.657.693.729,00**	**100**	**persen**	**1.910.230.592,00**	**92,93**	**1.775.108.848,00**	**93%**	**92,93%**					**DISHUB**	
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : roda 4 dan roda 2			9	455.464.079,00												DISHUB	
	2.15.01.1.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : roda 4 dan roda 2					1	tahun	623.359.392,00	1,00	490.187.661,00	100%	78,64%					DISHUB	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai			1	33.254.210,00	1	tahun	39.960.000,00	1,00	38.616.987,00	100%	96,64%					DISHUB	
	2.15.01.1.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai			3	1.168.975.440,00	5	gedung	1.046.911.200,00	5	1.046.611.200,00	100%	99,97%					DISHUB	
	2.15.01.1.09.11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai					1	tahun	200.000.000,00	1	199.693.000,00	100%	99,85%					DISHUB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan**			**97,65**	**882.567.669,00**												**DISHUB**	
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Konektivitas layanan Angkutan**					**0,78**	**rasio**	**772.986.012,00**		**755.831.252,00**	**0%**	**97,78%**					**DISHUB**	
	2.15.02.1.05	**Kegiatan : Pelaksananaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi**	**Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan**			**99,03**	**849.937.269,00**	**100**	**persen**	**772.986.012,00**		**755.831.252,00**	**0%**	**97,78%**					**DISHUB**	
	2.15.02.1.05.04	Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti			3600	849.937.269,00	38	kali	772.986.012,00	38	755.831.252,00	100%	97,78%					**DISHUB**	
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 am/100km dari KSP menuju jalan Nasional**					**50**	**persen**	25.829.560,00		23.836.510,00	0%	92,28%					**DISHUB**	
	2.15.02.1.06	**Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti**			**53,79**	**32.630.400,00**	**100**	**persen**	**25.829.560,00**		**23.836.510,00**	**0%**	**92,28%**					**DISHUB**	
	2.15.02.1.06.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang ditindaklanjuti			8	13.718.200,00												**DISHUB**	
	2.15.02.1.06.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan					8	rekomendasi	13.025.960,00	7	11.367.710,00	88%	87,27%					**DISHUB**	
	2.15.02.1.06.04	Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			8	18.912.200,00												**DISHUB**	
	2.15.02.1.06.04	Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah lokasi pengawasan rekomendasi andalalin yang dikeluarkan					8	lokasi	12.803.600,00	7	12.468.800,00	88%	97,39%					**DISHUB**	
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Peningkatan Pelayanan angkutan**			**85,97**	**577.101.632,00**	**100**	**persen**	**529.018.468,00**	**39,79**	**525.745.949,00**	**40%**	**99,38%**					**DISHUB**	
	2.15.02.1.13	**Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi**	**Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang tertib sesuai SOP**			**68,78**	**577.101.632,00**												**DISHUB**	
	2.15.02.1.13	**Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Abdiyasa yang dibina serta rekomendasi izin penyeenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan sesuai SOP**					**100**	**persen**	**529.018.468,00**	**39,79**	**525.745.949,00**	**40%**	**99,38%**					**DISHUB**	
	2.15.02.1.13.02	Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi yang membuat masyarakat/penyelenggaraan angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi			100	577.101.632,00	1	paket	529.018.468,00	1	525.745.949,00	100%	99,38%					**DISHUB**	
			Tersedianya penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis batrai					4	dokumen		4								**DISHUB**	
			Penilaian penerapan protokol tatanan kehidupan era baru sektor transportasi					1	dokumen		1								**DISHUB**	
	2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan**			**98,68**	**1.195.268.184,00**												**DISHUB**	
	2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM**					**25**	**persen**	**1.598.937.510,00**	**1,16**	**74.359.380,00**	**5%**	**4,65%**					**DISHUB**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.15.03.1.08	**Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Linkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persentase Pelabuhan pengumpan regional yang sudah memiliki rencana induk dan daerah lingkungan kerja(DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP)**			**32,56**	**1.195.268.184,00**												**DISHUB**	
	2.15.03.1.08	**Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Linkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persentase Tersusunnya kajian rencana induk pelabuhan**					**100**	**persen**	1.598.937.510,00	11,03	**1.559.607.540,00**	**11%**	**97,54%**					**DISHUB**	
	2.15.03.1.08.01	Sub Kegiatan :Pelaksanaan, Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumah dokumen kajian			2	1.195.268.184,00	2	dokumen	1.598.937.510,00	2	1.559.607.540	100%	97,54%					**DISHUB**	
			Persentase pelabuhan pengumpan regional yang menerapkan manajemen keselamatan					33	persen		33								**DISHUB**	
	2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKKERETAAPIAN**	**Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik**			**9,67**	**206.427.124,00**												**DISHUB**	
	2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKKERETAAPIAN**	**Persentase lintasan Kereta Api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan**					**50**	**persen**	**217.150.340,00**	**47,75**	**207.399.840,00**	**96%**	**95,51%**					**DISHUB**	
	2.15.05.1.01	**Kegiatan : Penetapan rencana induk perkeretaapian**	**Persentase dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur**			**96,78**	**206.427.124,00**	**100**	**persen**	**217.150.340,00**	**100**	**207.399.840,00**	**100%**	**95,51%**					**DISHUB**	
	2.15.05.1.01.01	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen rencanan induk perkeretaapian yang disusun sesuai ketentuan			1	206.427.124,00												**DISHUB**	
	2.15.05.1.01.01	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksannaya perencanaan dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkkan dengan keputusan gubernur					100	persen	217.150.340,00	100	207.399.840,00	**100%**	**95,51%**					**DISHUB**	
		UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ																		
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**94,71**	**1.649.145.475,00**	**79**	**persen**	**166.406.036,00**	**73,73**	**155.301.519,00**	**93%**	**93,33%**					**UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ**	
	2.15.01.1.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan**			**95,18**	**1.505.823.655,00**												**UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ**	
	2.15.01.1.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**					**100**	**persen**	**63.145.000,00**			**0%**	**0,00%**					**UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ**	
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN			1	1.505.823.655,00	1	tahun	63.145.000,00		-	**0%**	0,00%					**UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ**	
	2.15.01.1.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**68,91**	**17.062.000,00**	**100**	**persen**	**39.308.640,00**	**80,82**	**31.770.974,00**	**81%**	**80,82%**					**UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ**	
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi dengan baik			100	1.746.000,00												**UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ**	
			Cuk roll Airo ukuran 10 m/ kapasitas 600 watt					2	buah	2.160.600,00	2	2.080.100,00	100%	96,27%					**UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ**	
			Lampu (Meiwa) kapasitas 20 watt					36	buah		36		100%	96,27%					**UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ**	
			Obeng bolak balik (Pluto) obeng ukuran 15 cm					1	buah		1		100%	96,27%					**UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ**	
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Alat Tulis Kantor			1	5.053.500,00												**UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
			Jumlah Alat tulis kantor, kertas, dan cover dan bahan komputer yang tersedia					1	paket	11.522.040,00	1	10.501.500,00	100%	91,14%					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dokumen dicetak dan digandakan			100	1.312.500,00												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
			Jumlah foto copy yang tersedia					2750	lembar	1.100.000,00	2750	1.099.000,00	100%	99,91%					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar			100	1.920.000,00												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
			Jumlah Bahan Bacaan/koran/media cetak yang tersedia					1	tahun	3.000.000,00	1	2.880.000,00	100%	96,00%					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan konsultasi			100	7.030.000,00												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
			Jumlah Biaya Perjalanan Dinas dan Perjalanan Dinas dalam kota yang tersedia					1	tahun	21.526.000,00	1	15.210.374,00	100%	70,66%					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.01.1.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**99,80**	**41.673.535,00**	**100**	**persen**	**42.422.148,00**	**99,94**	**42.395.198,00**	**100%**	**99,94%**					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai			90	900.000,00												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
			Jumlah materai yang tersedia					100	lembar	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100%	100,00%					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang dibayar tepatwaktu yang tersedia dan siap pakai			100	40.773.535,00												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
			Jumlah Paket Perabot					1	paket	41.422.148,00	1	41.395.198,00	100%	99,93%					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
			Jumah Tenaga Kebersihan kantor yang tersedia					1	orang		1		100%	99,93%					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.01.1.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**91,31**	**84.586.285,00**	**100**	**persen**	**84.675.248,00**	**95,82**	**81.135.347,00**	**96%**	**95,82%**					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai			2	77.046.635,00												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
			Jumlah bahan bakar dan pelumas, tenaga pengemudi, pembayaran pajak kendaran pemeliharaan peraltan dan mesin, pemeliharaan alat angkutan					1	paket	76.425.248,00	1	72.995.348,00	100%	95,51%					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase perlatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik			100	7.539.650,00												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
			Jumlah pemeliharaan alat pendingin, pemeliharaan komputer					1	paket	8.250.000,00	1	8.139.999,00	100%	98,67%					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Tingkat Pelayanan Simpang**				**629.905.764,00**												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
			Rasio Konektivotas Layanan Angkutan					**0,78**	**Rasio**	**619.811.584,00**	**0,78**	**619.309.134,00**	**100%**	**99,92%**					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.02.1.02	**Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan perangkat ATCS dalam kondisi baik dan siap pakai**			**87,80**	**629.905.764,00**												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.02.1.05	**Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Persentase perlengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap, persentase alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dalam kondisi baik dan siap pakai**					**100**	**persen**	**619.811.584,00**	**99,92**	**619.309.134,00**	**100%**	**99,92%**					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.15.02.1.02.04	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase perlengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap pakai, persentase alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dalam kondisi baik dan siap pakai			100	629.905.764,00												UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.02.1.02.05.01	Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Berkurangnya tundaan lalu lintas di simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali					14	simpang	349.811.584,00	14	349.684.584,00	100%	99,96%	dr pakman				UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
			Tenaga Administrasi					8	orang		8		100%	13,90%					UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.02.1.02.05.02	Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan , perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapa Jalan dalam rangka manajemn dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali yang terpelihara sarana dan prasarananya					14	simpang	270.000.000,00	14	269.624.550,00	100%	99,86%	dr pakman				UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
		UPTD TRANS SARBAGITA																	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**85,12**	**1.737.362.251,00**	**79**	**persen**	**370.047.088,00**		**359.672.924,00**	**0%**	**97,20%**					UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan**			**1**	**1.369.492.136,00**	**1**	**tahun**	**70.388.000,00**		**-**	**0%**	**0,00%**					UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN			1	1.369.492.136,00												UPTD TRANS SARBAGITA	
			Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan					1	tahun	70.388.000,00			0%	0,00%					UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**85,13**	**46.456.050,00**	**100**	**persen**	**32.322.400,00**		**29.847.369,00**	**0%**	**92,34%**					UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu hemat energi 8 wat dan lampu hemat energi 23 watt yang tersedia			34	1.872.000,00												UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor siap pakai			1	9.028.050,00	1	paket	6.428.500,00	1	5.013.619,00	100%	77,99%					UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sesajen yang tersedia			1	14.980.000,00												UPTD TRANS SARBAGITA	
			Jumlah Bahan logistik kantor yang tersedia					1	tahun	25.893.900,00	1	24.833.750,00	100%	95,91%					UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Buku Operasional yang tersedia			120	8.736.000,00												UPTD TRANS SARBAGITA	
			fotocopy			5415													UPTD TRANS SARBAGITA	
			map			200													UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia			1	1.750.000,00												UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman dan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia			91	10.090.000,00												UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**79,66**	**31.626.420,00**	**100**	**persen**	**37.700.000,00**		**33.116.067,00**	**0%**	**87,84%**					UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia			150	1.500.000,00												UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang terbayarkan			1	10.176.420,00	1	tahun	17.700.000,00	1	13.156.067,00	100%	74,33%					UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia			1	19.950.000,00	1	paket	20.000.000,00	1	19.960.000,00	100%	99,80%					UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**89,43**	**289.787.645,00**	**100**	**persen**	**300.024.688,00**		**296.709.488,00**	**0%**	**98,90%**					UPTD TRANS SARBAGITA	
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bakar minyak dan oli			7436	284.752.645,00												UPTD TRANS SARBAGITA	
			jumlah jasa tenaga kerja administrasi dan jasa tenaga sopir			7													UPTD TRANS SARBAGITA	
			pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan			1													UPTD TRANS SARBAGITA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.15.01.1.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi					1	orang	290.974.688,00	1,00	288.209.488,00	100%	**99,05%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi					6	orang		6		100%	**99,05%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Jumlah Pertamax					1930	liter		1971		102%	**99,05%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Jumlah solar non subsidi					1000	liter		1000		100%	**99,05%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia					1	tahun		1		100%	**99,05%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan AC, komputer(PC), laptop dan printer yang tersedia			7	5.035.000,00	13	unit	9.050.000,00	13	8.500.000,00	100%	93,92%					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum trans sarbagita**			**72,56**	**2.872.024.201,00**												**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem transportasi bali					**75**	**persen**	**4.319.102.200,00**		**3.919.947.713,00**	**0%**	**90,76%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
	2.15.02.1.08	**Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**load faktor angkutan umum trans sarbagita**			**32,8**	**2.872.024.201,00**												**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Persentase Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dalam kondisi baik dan layak pakai					**100**	**persen**	**4.319.102.200,00**		**3.919.947.713,00**	**0%**	**90,76%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
	2.15.02.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah jasa angkutan umum akdp yang tersedia sesuai standar			5688	2.872.024.201,00												**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Biaya Tenaga Pengawas					1	Tahun	4.319.102.200,00	1	3.919.947.713,00	**100%**	**90,76%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP Trans Sarbagita yang tersedia sesuai standar					7300	RIT		7367		**101%**	**0,00%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Pembelian kuota data internet					1	tahun		1		**100%**	**0,00%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Pembelian layanan bus PATAS (Renon-GWK)					1	paket		1		**100%**						**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Pembelian Layanan angkutan umum denpasar-bangli (gor ngurah rai-penglipuran)					1	paket		1		**100%**						**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			pemeliharaan halte bus					1	paket		1		**100%**						**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			perawatan peralatan pembayaran elektronik Tab					1	Tahun		1		**100%**						**UPTD TRANS SARBAGITA**	
			Perawatan rutin dan insidentil bus trans Sarbagita					1	tahun		1		**100%**	**0,00%**					**UPTD TRANS SARBAGITA**	
		UPTD PERLENGKAPAN JALAN				**96,30**	**1.856.561.414,00**												**UPTD TRANS SARBAGITA**	
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**96,12**	**1.396.131.210,00**	**79**	**persen**	**112.592.358,00**		**100.827.783,00**	**0%**	**89,55%**					**UPTD PERLENGKAPAN JALAN**	
	2.15.01.1.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan**			**97,13**	**1.283.050.955,00**												**UPTD PERLENGKAPAN JALAN**	
			Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah					**100**	**persen**	**63.628.000,00**		**-**	**0%**	**0,00%**					**UPTD PERLENGKAPAN JALAN**	
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN			1	1.283.050.955,00												**UPTD PERLENGKAPAN JALAN**	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1	tahun	63.628.000,00			0%	0,00%					**UPTD PERLENGKAPAN JALAN**	
	2.15.01.1.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**77,58**	**22.236.520,00**			**13.563.510,00**		**11.386.310,00**		**83,95%**					**UPTD PERLENGKAPAN JALAN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor			1	6.072.520,00												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1	tahun	5.178.710,00	1	3.413.810,00	100%	65,92%					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah amplop yang dicetak dan dokumen digandakan			3400	204.000,00												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan rapat dan konsultasi			100	15.960.000,00												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
			Tersedianya Kebutuhan rapat dan konsultasi					1	tahun	8.384.800,00	1	7.972.500,00	100%	95,08%					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.01.1.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**100**	**990.000,00**												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai			99	990.000,00												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.01.1.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**88,19**	**89.853.735,00**	**100**	**persen**	**99.028.848,00**		**89.441.473,00**	**0%**	**90,32%**					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai			3	87.268.735,00												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
			Jasa tenaga kerja administrasi/tenaga jasa sopir					1	orang	93.078.848,00	1	83.700.723,00	100%	89,92%					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
			Jumlah BBM					5490	liter		3570		65%	43,85%					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
			Pajak Kendaraan, dan biaya pemeliharan kendaraan yang tersedia					1	tahun		1		100%	43,85%					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik			4	2.585.000,00												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
			Jumlah pemeliharaan AC, PC, Laptop dan Printer					10	unit	5.950.000,00	10	5.740.750,00	100%	96,48%					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Tingkat Pelayanan Ruas Jalan**			**C Tingkat**	**460.430.204,00**												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
			Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju Jalan Nasional					**50**	**persen**	**725.156.300,00**		**717.486.353,00**	**0%**	**98,94%**					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.02.1.02	**Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai**			**96,87**	**460.430.204,00**			**725.156.300,00**		**717.486.353,00**		**98,94%**					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.02.1.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan			4	460.430.204,00	1	tahun	447.666.950,00	**1,00**	440.886.840,00	100%	98,49%					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
	2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan					1	tahun	277.489.350,00	1	276.599.513,00	100%	99,68%					UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
		UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN																	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**93,47**	**1.396.770.011,00**	**79**	**persen**	**531.427.880,00**		**456.119.430,00**	**0%**	**85,83%**					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan**			**94,45**	**1.344.883.161,00**	**100**	**persen**	**72.845.000,00**		**-**	**0%**	**0,00%**					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN			1	1.344.883.161,00	1	tahun	72.845.000,00			**0%**	0,00%					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**88,26**	**12.332.550,00**	**100**	**persen**	**388.734.080,00**		**388.222.630,00**	**0%**	**99,87%**					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kompoen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik			100	492.300,00												UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor			1	8.840.250,00												UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Jumlah alat tulis kantor tersedia					1	paket	7.004.600,00	1	6.593.150,00	100%	94,13%					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotocopy dan penjilidan					1	tahun	1.715.000,00	1	1.715.000,00	100%	100,00%					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan/koran			1	3.000.000,00												UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Jumlah kebutuhan bahan bacaan /koran tersedia					1	tahun	3.000.000,00	1	3.000.000,00	100%	100,00%					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan konsultasi SPKD			0	-												UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Tersedianya makan minum rapat dan konsultasi SKPD, perjalanan dinas dalam dan luar daerah					1	tahun	377.014.480,00	1	376.914.480,00	100%	99,97%					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah mebel dan kursi yang siap pakai			0	-							0,00%					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**100**	**1.200.000,00**	**100**	**persen**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**0%**	**100,00%**					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai			120	1.200.000,00	150	lembar	1.500.000,00	120	1.500.000,00	80%	100,00%					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan administrasi perkantoran**			**69,25**	**38.354.300,00**	**100**	**persen**	**68.348.800,00**		**66.396.800,00**	**0%**	**97,14%**					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai			2	35.419.300,00												UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas operasional ataupun lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik dan siap pakai					1	tahun	62.948.800,00	1	61.196.800,00	100%	97,22%					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik			5	2.935.000,00												UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Komputer					3	unit	5.400.000,00	3	5.200.000,00	100%	96,30%					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Printer dalam kondisi baik					2	unit		2		100%						UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa AC					3	unit		3		100%						UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional**			**12**	**405.014.350,00**												UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Persentase Pelabuhan Pengumpang Regional ang operasinalnya menerapkan SPM					**25**	**persen**	**17.680.000,00**		**17.060.000,00**	**0%**	**96,49%**					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.03.1.09	**Kegiatan : Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpal Regional**	**Persentase pelabuhan pengumpan regional yang dibangun sesuai aturan**			**32,96**	**405.014.350,00**	**75**	**persen**	**17.680.000,00**		**17.060.000,00**	**0%**	**96,49%**					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.03.1.09.03	Sub Kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional					1	tahun	8.840.000,00	1	8.640.000,00	**100%**	**97,74%**					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.15.03.1.09.04	Sub Kegiatan : Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengumpan regional yang disusun dan ditindaklanjuti			1	405.014.350,00												UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pegawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional					1	tahun	8.840.000,00	1	8.420.000,00	100%	95,25%					UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2	**URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR**								**185.958.156.411,00**		**155.468.298.136,00**								
	2.16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**185.085.310.557,00**		**154.628.513.692,00**								
	2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**82,5**	**19.815.219.146,00**	**80,43**	**17.998.386.157,24**	**82**		**19.730.139.026,00**	**0**	**19.124.553.577,00**	**0,00%**	**96,93%**	**80,43**	**37.122.939.734,24**	**97,49%**	**187,35%**	**DISKOMINFOS**	
	2.16.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia**			**16**	**26.238.090,00**	**16**		**23.090.900,00**	**16**	**19.050.400,00**	**100,00%**	**82,50%**	**32**	**45.288.490,00**			**DISKOMINFOS**	
	2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman			3	16.505.340,00	3		12.763.590,00	3	10.532.175,00	**100,00%**	**82,52%**	**6**	**27.037.515,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan			1	4.415.450,00	1		4.738.970,00	1	3.872.500,00	**100,00%**	**81,72%**	**2**	**8.287.950,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan			12	5.317.300,00	12		5.588.340,00	12	4.645.725,00	**100,00%**	**83,13%**	**24**	**9.963.025,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia**			**76**	**12.838.695.292,00**	**75**		**14.977.874.628,00**	75	**14.523.565.531,00**	**100,00%**	**96,97%**	**151**	**27.362.260.823,00**			**DISKOMINFOS**	
	2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)			64	11.438.695.292,00	64		13.492.874.628,00	64	13.279.065.531,00	**100,00%**	**98,42%**	**128**	**24.717.760.823,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi			12	1.400.000.000,00	11		1.485.000.000,00	11	1.244.500.000,00	**100,00%**	**83,80%**	**23**	**2.644.500.000,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia**			**6**	**1.103.291.010,00**	**12**		**591.291.650,00**	**12**	**561.354.086,00**	**100,00%**	**94,94%**	**18**	**1.664.645.096,00**			**DISKOMINFOS**	
	2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik			1	4.498.890,00	1		4.615.500,00	1	4.264.662,00	**100,00%**	**92,40%**	**2**	**8.763.552,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai			12	863.803.120,00	12		354.987.750,00	12	335.990.000,00	**100,00%**	**94,65%**	**24**	**1.199.793.120,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan			12	79.992.000,00	12		80.000.000,00	12	79.992.000,00	**100,00%**	**99,99%**	**24**	**159.984.000,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan Spanduk yang dicetak dan digandakan			1	19.935.950,00	1		8.930.400,00	1	5.884.800,00	**100,00%**	**65,90%**	**2**	**25.820.750,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan / koran / media cetak yang tersedia dan siap edar			12	35.772.000,00	12		35.805.000,00	12	35.772.000,00	**100,00%**	**99,91%**	**24**	**71.544.000,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji			1150	11.264.000,00	0		-	0	-			**1150**	**11.264.000,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu			15	88.025.050,00	10		106.953.000,00	10	99.450.624,00	**100,00%**	**92,99%**	**25**	**187.475.674,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan			**3**	**355.166.000,00**	**1**		**17.154.000,00**	**1**	**16.910.000,00**	**100,00%**	**98,58%**	**4**	**372.076.000,00**			**DISKOMINFOS**	
	2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai			2	265.186.000,00	0		-	0	-			**2**	**265.186.000,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai			1	89.980.000,00	1		17.154.000,00	1	16.910.000,00	**100,00%**	**98,58%**	**2**	**106.890.000,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan**			**12**	**336.796.022,00**	**12**		**421.135.000,00**	**12**	**400.280.437,00**	**100,00%**	**95,05%**	**24**	**737.076.459,00**			**DISKOMINFOS**	
	2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai			12	3.020.000,00	12		3.020.000,00	12	3.020.000,00	**100,00%**	**100,00%**	**24**	**6.040.000,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu			12	216.093.322,00	12		282.605.000,00	12	263.304.301,00	**100,00%**	**93,17%**	**24**	**479.397.623,00**			DISKOMINFOS	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			
	2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor			12	117.682.700,00	12	135.510.000,00	12	133.956.136,00	100,00%	98,85%	24	251.638.836,00			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai**			**539**	**3.338.199.743,24**	**539**	**3.699.592.848,00**	**539**	**3.603.393.123,00**	**100,00%**	**97,40%**	**1078**	**6.941.592.866,24**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 yang Terpelihara dan Siap Pakai			28	1.658.332.372,33	30	1.866.980.272,00	30	1.846.436.503,00	**100,00%**	**98,90%**	**58**	**3.504.768.875,33**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai			489	960.000,00	489	4.800.000,00	489	4.695.200,00	**100,00%**	**97,82%**	**978**	**5.655.200,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya			12	74.515.000,00	12	129.740.000,00	12	125.143.346,00	**100,00%**	**96,46%**	**24**	**199.658.346,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai			2	1.451.121.870,91	7	1.537.138.576,00	7	1.471.293.792,00	**100,00%**	**95,72%**	**9**	**2.922.415.662,91**			DISKOMINFOS	
	2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai			12	153.270.500,00	51	160.934.000,00	51	155.824.282,00	**100,00%**	**96,82%**	**63**	**309.094.782,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.02	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	**93,2**	**16.638.436.826,00**	**93,62**	**24.138.102.673,57**	**81**	**32.971.039.965,00**	**81**	**32.557.715.805,00**	**100,00%**	**98,75%**	**174,62**	**56.695.818.478,57**	**187,36%**	**340,75%**	**DISKOMINFOS**	
	2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi**			**93,62**	**24.138.102.673,57**	**81**	**32.971.039.965,00**	**81**	**32.557.715.805,00**	**100,00%**	**98,75%**	**174,62**	**56.695.818.478,57**			**DISKOMINFOS**	
	2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang			120	2.259.927.339,13	120	2.723.947.578,00	120	2.528.933.338,00	**100,00%**	**92,84%**	**240**	**4.788.860.677,13**			DISKOMINFOS	
	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online			30000	16.997.844.505,48	30000	24.941.595.944,00	30000	24.887.645.764,00	**100,00%**	**99,78%**	**60000**	**41.885.490.269,48**			DISKOMINFOS	
	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukan Kesenian Rakyat dan Layanan informasi			117	499.394.886,12	117	302.514.518,00	117	293.424.924,00	**100,00%**	**97,00%**	**234**	**792.819.810,12**			DISKOMINFOS	
	2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID			77	2.490.075.525,01	77	2.451.333.968,00	77	2.443.985.302,00	**100,00%**	**99,70%**	**154**	**4.934.060.827,01**			DISKOMINFOS	
	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Literasi Informasi dan Media serta jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan			10	806.295.077,83	16	939.788.587,00	16	924.432.483,00	**100,00%**	**98,37%**	**26**	**1.730.727.560,83**			DISKOMINFOS	
	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis			14000	1.084.565.340,00	14000	1.611.859.370,00	14000	1.479.293.994,00	**100,00%**	**91,78%**	**28000**	**2.563.859.334,00**			DISKOMINFOS	
	2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**3**	**122.574.692.872,00**	**3,68**	**20.801.298.331,98**	**2,52**	**132.384.131.566,00**	**3,68**	**102.946.244.310,00**	**146,03%**	**77,76%**	**7,36**	**123.747.542.641,98**	**245,33%**	**100,96%**	**DISKOMINFOS**	
	2.16.03.1.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik**			**25**	**20.801.298.331,98**	**25**	**132.384.131.566,00**	**25**	**102.946.244.310,00**	**100,00%**	**77,76%**	**50**	**123.747.542.641,98**			**DISKOMINFOS**	
	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi			2	11.009.668.257,36	2	118.398.012.339,00	2	89.204.375.148,00	**100,00%**	**75,34%**	**4**	**100.214.043.405,36**			DISKOMINFOS	
	2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet			39	6.041.012.056,91	39	9.323.310.969,00	39	9.176.145.212,00	**100,00%**	**98,42%**	**78**	**15.217.157.268,91**			DISKOMINFOS	
	2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE			25	3.750.618.017,71	25	4.662.808.258,00	25	4.565.723.950,00	**100,00%**	**97,92%**	**50**	**8.316.341.967,71**			DISKOMINFOS	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**0**	**332.481.819,59**		**486.822.218,00**		**458.815.228,00**								
	2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase data statistik sektoral yang valid**	**100**	**511.163.329,00**	**100**	**332.481.819,59**	**100**	**486.822.218,00**	**100**	**458.815.228,00**	**100,00%**	**94,25%**	**200**	**791.297.047,59**	**200,00%**	**154,80%**	**DISKOMINFOS**	
	2.20.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi**			**11**	**332.481.819,59**	**11**	**486.822.218,00**	**11**	**458.815.228,00**	**100,00%**	**94,25%**	**22**	**791.297.047,59**			**DISKOMINFOS**	
	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan			1	157.781.806,53	2	220.504.016,00	2	203.301.736,00	**100,00%**	**92,20%**	**3**	**361.083.542,53**			DISKOMINFOS	
	2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang terbangun			1	88.748.906,53	1	140.047.996,00	1	133.681.196,00	**100,00%**	**95,45%**	**2**	**222.430.102,53**			DISKOMINFOS	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik			11	85.951.106,53	11		126.270.206,00	11	121.832.296,00	100,00%	96,49%	22	207.783.402,53			DISKOMINFOS	
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**0**	**311.260.434,25**			**386.023.636,00**		**380.969.216,00**								
	2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase Keamanan Transaksi Data Informasi Publik**	**100**	**358.578.398,00**	**100**	**311.260.434,25**	**80**		**386.023.636,00**	**80**	**380.969.216,00**	**100,00%**	**98,69%**	**180**	**692.229.650,25**	**180,00%**	**193,05%**	**DISKOMINFOS**	
	2.21.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan**			**38**	**169.684.374,34**	**38**		**253.636.678,00**	**38**	**248.992.998,00**	**100,00%**	**98,17%**	**76**	**418.677.372,34**			**DISKOMINFOS**	
	2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi			1	103.510.621,11	2		149.977.778,00	2	146.131.358,00	**100,00%**	**97,44%**	**3**	**249.641.979,11**			DISKOMINFOS	
	2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pengamanan data dan informasi Pemerintah Provinsi Bali			1	66.173.753,23	38		103.658.900,00	38	102.861.640,00	**100,00%**	**99,23%**	**39**	**169.035.393,23**			DISKOMINFOS	
	2.21.02.1.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun**			**38**	**141.576.059,91**	**38**		**132.386.958,00**	**38**	**131.976.218,00**	**100,00%**	**99,69%**	**76**	**273.552.277,91**			**DISKOMINFOS**	
	2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali			1	141.576.059,91	38		132.386.958,00	38	131.976.218,00	**100,00%**	**99,69%**	**39**	**273.552.277,91**			DISKOMINFOS	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**17.038.893.361**		**16.376.967.736**		**96,12%**						
	2.17.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**83**	**11.725.071.149**	**83,5**	**Persen**	**15.058.868.555**		**14.463.273.014**	**0,00%**	**96,04%**					**DISKOP**	
	2.17.1.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu***			***3***	***91.432.296***	***3***	***Dokumen***	***80.630.016***	***3***	***80.033.676***	***100,00%***	***99,26%***					**DISKOP**	
	2.17.1.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu			3	78.422.546	2	Dokumen	78.417.006	2	78.049.876	100,00%	99,53%					**DISKOP**	
	2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD			1	7.279.700					-							**DISKOP**	
	2.17.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD			1	-					-							**DISKOP**	
	2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD			1	2.007.050					-							**DISKOP**	
	2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD			1	-					-							**DISKOP**	
	2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja			4	985.000					-							**DISKOP**	
	2.17.1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja PD			7	2.738.000	1	Dokumen	2.213.010	1	1.983.800	100,00%	89,64%					**DISKOP**	
	2.17.1.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu***			***4***	***9.436.382.044***	***1***	***Layanan***	***12.586.926.541***	***14***	***12.215.344.802***	***1400,00%***	***97,05%***					**DISKOP**	
	2.17.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN			66	9.424.070.886	14	Dokumen	12.586.926.541	14	12.215.344.802	100,00%	97,05%					**DISKOP**	
	2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi			12	4.806.859												**DISKOP**	
	2.17.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan			4	1.513.600												**DISKOP**	
	2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun			12	5.990.699												**DISKOP**	
	2.17.1.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik***			***5***	***94.068.306***	***6***	***Layanan***	***96.895.770***	***4***	***85.069.060***	***66,67%***	***87,79%***					**DISKOP**	
	2.17.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	12.339.580	1	Layanan	9.999.250	1	9.585.873	100,00%	95,87%					**DISKOP**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	2.17.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	51.173.979	1	Layanan	64.931.520	1	56.770.136	100,00%	87,43%					DISKOP	
	2.17.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	10.487.497	1	Layanan	14.965.000	1	12.311.051	100,00%	82,27%					DISKOP	
	2.17.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	4.656.000	1	Layanan	7.000.000	1	6.402.000	100,00%	91,46%					DISKOP	
	2.17.1.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu					1	Layanan	-		-	0,00%						DISKOP	
	2.17.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu					1	Layanan	-		-	0,00%						DISKOP	
	2.17.1.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan***					***5***	***Jenis***	***-***	***-***	***-***	***0,00%***						DISKOP	
	2.17.1.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan					1	Paket	-		-	0,00%						DISKOP	
	2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan kunjungan tamu yang baik			-	-												DISKOP	
	2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	15.411.250												DISKOP	
	2.17.01.1.07	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu***			***1***	***121.710.250***												DISKOP	
	2.17.01.1.07.11	Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan			13	121.710.250												DISKOP	
	2.17.1.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu***			***3***	***1.182.776.520***	***3***	***Layanan***	***1.335.111.200***	***3***	***1.229.595.356***	***100,00%***	***92,10%***					DISKOP	
	2.17.1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	2.000.000	1	Layanan	2.000.000	1	2.000.000	100,00%	100,00%					DISKOP	
	2.17.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	157.713.768	1	Layanan	271.200.000	1	178.654.156	100,00%	65,88%					DISKOP	
	2.17.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	1.023.062.752	1	Layanan	1.061.911.200	1	1.048.941.200	100,00%	98,78%					DISKOP	
	2.17.1.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara***			***3***	***798.701.733***	***3***	***Jenis***	***959.305.028***	***6***	***853.230.120***	***200,00%***	***88,94%***					DISKOP	
	2.17.1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara			2	621.324.456	2	Jenis	729.460.536	2	633.589.352	100,00%	86,86%					DISKOP	
	2.17.1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara			3	17.240.000	2	Jenis	50.000.000	2	46.465.000	100,00%	92,93%					DISKOP	
	2.17.1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1	160.137.277	2	Unit	179.844.492	2	173.175.768	100,00%	96,29%					DISKOP	
	2.17.2	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi yang bankable**			**3,62**	**209.808.840**	**83,33**	**Persen**	**255.064.240**	**24,01**	**239.330.844**	**28,82%**	**93,83%**					DISKOP	
	2.17.2.1.01	***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan***			***10***	***201.143.840***	***71***	***Koperasi***	***17.956.000***	***71***	***16.111.052***	***100,00%***	***89,73%***					DISKOP	
	2.17.2.1.01.1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam			10	201.143.840	71	Koperasi	17.956.000	71	16.111.052	100,00%	89,73%					DISKOP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	2.17.2.1.02	***Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan***			***1***	***8.665.000***	***5***	***Koperasi***	***237.108.240***	***2***	***223.219.792***	***40,00%***	***94,14%***					**DISKOP**	
	2.17.2.1.02.1	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang			1	8.665.000	5	Koperasi	237.108.240	2	223.219.792	40,00%	94,14%					**DISKOP**	
	2.17.3	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas**			**14,80**	**115.346.945**			**-**	**-**	**-**							**DISKOP**	
	2.17.3.1.01	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah Koperasi Nivo Provinsi yang diperiksa dan diawasi***			***28***	***104.667.895***			**-**	**-**	**-**							**DISKOP**	
	2.17.3.1.01.1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntable			7	50.215.348			-									**DISKOP**	
	2.17.3.1.01.2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian			21	54.452.547			-									**DISKOP**	
	2.17.3.1.02	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang diperiksa dan diawasi***			***17***	***10.679.050***			**-**	**-**	**-**							**DISKOP**	
	2.17.3.1.02.1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntable			17	10.679.050			-									**DISKOP**	
	2.17.4	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas**			**6,91**	**58.738.398**	**78,89**	**Persen**	**118.552.896**	**32,89**	**118.314.446**	**41,70%**	**99,80%**					**DISKOP**	
	2.17.4.1.01	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya***			***21***	***58.738.398***	***142***	***KSP/USP Koperasi***	***118.552.896***	***100***	***118.314.446***	***70,42%***	***99,80%***					**DISKOP**	
	2.17.4.1.01.1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri			11	47.390.498			-									**DISKOP**	
	2.17.4.1.01.2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat			10	11.347.900	100	KSP/USP Koperasi	118.552.896	100	118.314.446	100,00%	99,80%					**DISKOP**	
	2.17.6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta**			**6,45**	**293.861.990**	**3,08**	**Persen**	**468.864.290**	**3,42**	**442.710.474**	**111,06%**	**94,42%**					**DISKOP**	
	2.17.6.1.01	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi***			***264***	***293.861.990***	***126***	***Koperasi***	***468.864.290***	***124***	***442.710.474***	***98,41%***	***94,42%***					**DISKOP**	
	2.17.6.1.01.1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra			10	156.617.244	60	Koperasi	315.246.554	60	292.723.244	100,00%	92,86%					**DISKOP**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	2.17.6.1.01.2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya			64		64	Koperasi	153.617.736	64	149.987.230	100,00%	97,64%					DISKOP	
			Jumlah koperasi tenun yang aktif			1		1	Koperasi		-		0,00%						DISKOP	
			Jumlah subak sebagai koperasi tani			1		1	Koperasi		-		0,00%						DISKOP	
	2.17.7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang bankable**			**0,04**	**446.845.380**	**0,12**	**Persen**	**1.137.543.380**	**0,04**	**1.113.338.958**	**35,94%**	**97,87%**					**DISKOP**	
	2.17.7.1.01	***Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan***	***Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid***			***185***	***446.845.380***	***190***	***UMKM***	***1.137.543.380***	***190***	***1.113.338.958***	***100,00%***	***97,87%***					**DISKOP**	
	2.17.7.1.01.1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM			185	446.845.380	190	UMKM	1.137.543.380	190	1.113.338.958	100,00%	97,87%					**DISKOP**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	**UPTD**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**6.305.525.172**		**5.944.578.640**		**94,28%**					**UPTD**	
	2.17.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**83**	**1.715.656.597**	**83,5**	**Persen**	**482.271.956**	**12**	**444.122.270**	**14,37%**	**92,09%**					**UPTD**	
	2.17.1.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu***			***14***	***1.274.327.845***	***1***	***Layanan***	***64.396.000***	***-***	***62.543.376***	***0,00%***	***97,12%***					***UPTD***	
	2.17.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN			14	1.274.327.845	14	Dokumen	64.396.000		62.543.376	0,00%	97,12%					UPTD	
	2.17.1.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***umlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu***			***5***	***20.821.081***	***5***	***Layanan***	***4.416.220***	***3***	***3.609.815***	***60,00%***	***81,74%***					***UPTD***	
	2.17.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	1.988.866	1	Layanan	689.500	1	376.500	100,00%	54,60%					UPTD	
	2.17.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	6.817.765	1	Layanan	2.726.720	1	2.521.965	100,00%	92,49%					UPTD	
	2.17.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	1.884.250	1	Layanan	1.000.000	1	711.350	100,00%	71,14%					UPTD	
	2.17.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	648.000	1	Layanan	-		-	0,00%						UPTD	
	2.17.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	9.482.200	1	Layanan	-		-	0,00%						UPTD	
	2.17.1.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu***			***3***	***243.135.827***	***3***	***Layanan***	***239.452.392***	***3***	***209.168.740***	***100,00%***	***87,35%***					***UPTD***	
	2.17.1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	1.000.000	1	Layanan	1.000.000	1	1.000.000	100,00%	100,00%					UPTD	
	2.17.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	16.354.391	1	Layanan	48.500.000	1	18.665.823	100,00%	38,49%					UPTD	
	2.17.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	225.781.436	1	Layanan	189.952.392	1	189.502.917	100,00%	99,76%					UPTD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	2.17.1.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara***			***3***	***177.371.844***	***3***	***Jenis***	***174.007.344***	***6***	***168.800.339***	***200,00%***	***97,01%***					***UPTD***	
	2.17.1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara			2	75.940.448	2	Jenis	95.784.448	2	90.723.443	100,00%	94,72%					UPTD	
	2.17.1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara			3	11.478.500	2	Jenis	3.270.000	3	3.124.000	150,00%	95,54%					UPTD	
	2.17.1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1	89.952.896	1	Unit	74.952.896	1	74.952.896	100,00%	100,00%					UPTD	
	2.17.5	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat**			**990**	**3.036.733.273**	**0,25**	**Persen**	**5.823.253.216**	**7,56**	**5.500.456.370**	**3025,44%**	**94,46%**					**UPTD**	
	2.17.5.1.01	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	***Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan***			***990***	***3.036.733.273***	***50***	***Orang***	***5.823.253.216***	***1.519***	***5.500.456.370***	***3038,00%***	***94,46%***					***UPTD***	
	2.17.5.1.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten			990	3.036.733.273	50	Orang	5.823.253.216	1.519	5.500.456.370	3038,00%	94,46%					UPTD	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**100**	**15.958.106.344,00**	**100**		**19.407.681.922**		**18.036.579.074**	**87,56%**	**92,94%**	**100**	**33.994.685.418,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BALI**		**77**	**19.830.824.907**	**86,3**	**14.321.657.462,28**	**77**	**nilai**	**16.601.080.594**	**77**	**15.377.546.540**	**100,00%**	**92,63%**	**163,3**	**29.699.204.002,28**			**DPMPTSP**	
	2.18.01.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				**11**	**33.897.945,00**													
	2.18.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah				9	26.691.335,00													
	2.18.01.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2	7.206.610,00													
	2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**			**36**	**11.619.466.930**	**44**	**dokumen**	**13.475.311.409**	**44**	**12.391.435.310**	**100,00%**	**91,96%**	**80**	**24.010.902.240,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis dokumen administrasi keuangan			14	11.613.331.680	44	dokumen	13.475.311.409	44	12.391.435.310	100,00%	**91,96%**	58	24.004.766.990,00			DPMPTSP	
	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja			22	6.135.250,00													
	2.18.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Peserta Diklat					**1**	**dokumen**	**85.200.200**	1	**83.164.000**	**100,00%**	**97,61%**	**1**	**83.164.000,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Diklat					1	dokumen	85.200.200	1	83.164.000	100,00%	**97,61%**	1	83.164.000,00			DPMPTSP	
	2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah**				**476.196.916**	**100**	**persen**	**191.395.285**	100	**172.745.824**	100,00%	**90,26%**	100	648.942.740,00			DPMPTSP	
	2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			10	22.239.650,00	4	jenis	18.638.850	4	18.519.666	**100%**	**99,36%**	**14**	**40.759.316,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah ATK dan Peralatan Komputer, Laptop, Printer sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			2	318.819.566,00	2	jenis	41.177.845	2	38.078.808	100%	**92,47%**	4	356.898.374,00			DPMPTSP	
	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor			3	50.609.000,00	4	jenis	61.466.990	4	61.313.000	100%	**99,75%**	7	111.922.000,00			DPMPTSP	
	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan foto copy sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			2	19.463.500,00	2	jenis	16.231.600	2	13.616.731	100%	**83,89%**	4	33.080.231,00			DPMPTSP	
	2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			0	20.146.500,00													
	2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu																	
	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			1015	44.918.700,00	1	Tahun	53.880.000	1	41.217.619	100%	**76,50%**	1016	86.136.319,00			DPMPTSP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	2.18.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**			8	**50.144.000,00**	**1**	**dokumen**	**599.187.500**	**1**	**581.755.990**	**100%**	**97,09%**	**9**	**631.899.990,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung			8	50.144.000,00	1	jenis	599.187.500	1	581.755.990	100%	**97,09%**	9	631.899.990,00			DPMPTSP	
	2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah**			**86,3**	**1.477.537.398**	**1**	**dokumen**	**1.333.728.960**	1	**1.256.607.619**	100%	**94,22%**	87,3	2.734.145.017,12			DPMPTSP	
	2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1	2.700.000,00													
	2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			2	115.213.289,00	2	jenis	178.000.000	2	118.780.267	100%	**66,73%**	4	233.993.556,00			DPMPTSP	
	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan gedung			1	1.359.624.109,12	1	unit	1.155.728.960	1	1.137.827.352	100%	**98,45%**	2	2.497.451.461,12			DPMPTSP	
	2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah barang milik daerang yang dipelihara**				**664.414.273**	**1**	**dokumen**	**916.257.240**	1	891.837.797	100%	**97,33%**	1	1.556.252.070,16			DPMPTSP	
	2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara Roda 4 da roda 2			20	619.934.273,16	20	unit	784.372.240	20	763.692.813	100%	**97,36%**	40	1.383.627.086,16			DPMPTSP	
	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara			8	44.480.000,00	7	jenis	131.885.000	7	128.144.984	100%	**97,16%**	15	172.624.984,00			DPMPTSP	
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan nilai investasi /penanaman modal di luar Sarbagita	**14**	**450.080.316**	**15,56**	**117.139.022**	15	persen	**450.080.316**	**15**	**82.879.636**	**100%**	**18,41%**	**30,56**	**200.018.658,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi dan MOU antar Perusahaan			4	117.139.022,08													
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi bali	tersedianya produk hukum daerah					2	dokumen	84.523.746	2	82.879.636	100%	**98,05%**	2	82.879.636,00			DPMPTSP	
	2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan daerah dam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah produk hukum daerah yang disusun					2	dokumen	84.523.746	**2**	82.879.636	**100%**	**98,05%**	**2**	**82.879.636,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha**			100	117.139.022	2	dokumen	**365.556.570**	2	**349.246.027**	100%	**95,54%**	102	466.385.049,00			DPMPTSP	
	2.18.02.1.02.02	penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah peta potensi dan MOU antar perusahaan					2	dokumen	365.556.570	2	349.246.027	100%	**95,54%**	2	349.246.027,00			DPMPTSP	
	2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Presentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali**	**22,66**	**458.026.986**	**18,3**	**182.429.744**	**22,66**	**persen**	**458.026.986**	24,92	**427.125.693**	0,02%	**93,25%**	43,22	609.555.437,00			DPMPTSP	
	2.18.03.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Informasi Peluang Penanaman Modal**			**6**	**18.238.224,00**													
	2.18.03.1.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Provinsi Bali			1	172.898.808,12													
	2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**jumlah dokumentasi publik promosi penanaman modal**					**5**	**dokumen**	**458.026.986**	**6**	**427.125.693**	**120%**	**93,25%**	**600%**	**427.125.693,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	jumlah dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal					2	dokumen	168.678.196	2	157.610.208	100%	**93,44%**	2	157.610.208,00			DPMPTSP	
	2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal					1	kali	289.348.790	4	269.515.485	400%	**93,15%**	4	269.515.485,00			DPMPTSP	
	2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Indeks kepuasan masyarakat**	**87,5**	**1.047.798.138**			**87,5**	**persen**	**927.272.138**	**93,68**	**908.212.765**	**107%**	**97,94%**	**93,68**					
	2.18.04.1.02	**Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Prosentase Jenis Izin dan nonizin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi**			**87**	**915.734.519**	**100**	**persen**	**927.272.138**	**100**	**908.212.765**	**100%**	**97,94%**	**187**	**1.823.947.283,52**			**DPMPTSP**	
	2.18.04.1.02.01	1. Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik			92	417.886.350,00													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.18.04.1.02.02	2. Sub. Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen Perizinan dan nonperizinan penanaman modal			17	497.848.168,52													
	2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal					400	pemantauan	820.783.972	284	804.592.738	71,0%	**98,03%**	284	804.592.738,00			DPMPTSP	
	2.18.04.1.02.03	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan, penyuluhan dan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani					100	persen	106.488.166	**100**	103.620.027	**100%**	**97,31%**	**100**	**103.620.027,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal**	**91**	**792.840.792**	**107,5**	**430.676.533**	**91**	**persen**	**792.840.792**	**91**	**741.402.792**	**100,0%**	**93,51%**	**198,5**	**1.172.079.325,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal**				**430.676.533**	**91**	**persen**	**792.840.792**	**91**	**741.402.792**	100,0%	**93,51%**	91	1.172.079.325,00			DPMPTSP	
	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang memahami peraturan perundang undangan			321	56.998.812,00	329	perusahaan	655.191.792	774	627.386.792	235,26%	**95,76%**	1095	**684.385.604,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal			340	256.088.271,00	100	perusahaan	137.649.000	**109**	114.016.000	109,00%	**82,83%**	**0**	**370.104.271,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal			157	117.589.450,00													
	2.18.06	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Presentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	**100**	**178.381.096**			100	persen	**178.381.096**	**100**	**150.165.621**	100,00%	**84,18%**	**100**	**150.165.621,00**			**DPMPTSP**	
	2.18.06.01.01	**Urusan PengeloalaData dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintergarasi pada tingkat daerah provinsi bali**	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi					3	dokumen	178.381.096	3	150.165.621	100,00%	**84,18%**	3	150.165.621,00			DPMPTSP	
	2.18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha teritegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen realisasi penanaman modal di provinsi					3	dokumen	178.381.096	3	150.165.621	100,00%	**84,18%**	3	150.165.621,00			DPMPTSP	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**55.839.494.797,00**			**115.618.540.953**		**108.314.957.630**		**93,68%**	**-**	**108.314.957.630**				
	2.22	**Dinas Kebudayaan**					**42.462.896.800,00**			**97.445.821.229**		**91.761.243.314**		**94,17%**	**-**	**91.761.243.314**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**72,728571**	**21.506.048.498,00**	**81**	**Poin**	**27.992.541.605**	**#REF!**	**25.332.688.264**	**#REF!**	**90,50%**	**73**	**25.332.688.264**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**			**10**	**110.819.709,00**	**10**	**Dokumen**	**118.609.696**	**-**	**90.382.996**	**0,00%**	**76,20%**	**10**	**90.382.996**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			**2**	**104.303.209,00**	6	Dokumen	110.637.696		87.655.996	0,00%	79,23%	**2**	**87.655.996**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			**1**	**2.465.450,00**	4	Dokumen	7.972.000	-	2.727.000	0,00%	34,21%	**1**	**2.727.000**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi Keuangan**			**100**	**18.394.738.810,00**	**100**	**Persen**	**22.064.265.145**	**#REF!**	**21.345.828.455**	**#REF!**	**96,74%**	**100**	**21.345.828.455**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan			**125**	**17.684.106.749,00**	138	ASN	21.709.685.413	-	20.993.330.823	0,00%	96,70%	**125**	**20.993.330.823**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai dengan regulasi			**1000**	**382.814.725,00**	1000	Dokumen	349.539.732		348.448.532	0,00%	99,69%	**1.000**	**348.448.532**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD					100	Persen	5.040.000		4.049.100			**-**	**4.049.100**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana**			**78,571429**	**276.984.942,00**	**100**	**Persen**	**1.764.832.000**	**7,14**	**464.409.700**	**7,14%**	**26,31%**	**79**	**464.409.700**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia			**20**	**42.449.300,00**	31	Jenis	49.625.000		44.669.700	0,00%	90,01%	**20**	**44.669.700**			**Dinas Kebudayaan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik			3	98.818.000,00	5	Jenis	1.516.197.000		245.810.000	0,00%	16,21%	3	245.810.000			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Penyediaan bahan logistik kantor dalam kondisi baik			3	85.000.000,00	12	Bulan	95.000.000	3	94.920.000	25,00%	99,92%	3	94.920.000			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan			2	24.932.680,00	6	Jenis	18.850.000		18.850.000	0,00%	100,00%	2	18.850.000			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia			4	22.320.000,00	3	Jenis	25.000.000		22.320.000	0,00%	89,28%	4	22.320.000			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu layanan fasilitasi kunjungan tamu (makanan dan minuman) yang tersedia			9	663.750,00	12	Bulan	18.000.000		14.903.000	0,00%	82,79%	9	14.903.000			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana			9	2.801.212,00	12	Bulan	42.160.000	3	22.937.000	25,00%	54,40%	9	22.937.000			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**			**100**	**961.747.115,00**	**100**	**Persen**	**1.558.898.980**	**31,25**	**1.159.424.212**	**31,25%**	**74,37%**	**100**	**1.159.424.212**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia			2	5.000.000,00	2	Jenis	5.000.000	2	5.000.000	100,00%	100,00%	2	5.000.000			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia			3	211.877.286,00	3	Jenis	500.000.000		269.788.942	0,00%	53,96%	3	269.788.942			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik			4	26.657.575,00	4	Jenis	299.930.000		194.763.800	0,00%	64,94%	4	194.763.800			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia			12	718.212.254,00	12	Bulan	753.968.980	3	689.871.470	25,00%	91,50%	12	689.871.470			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**70,37037**	**1.761.757.922,00**	**100**	**Persen**	**2.485.935.784**	**-**	**2.272.642.901**	**0,00%**	**91,42%**	**70**	**2.272.642.901**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik			14	627.162.852,00	14	Kendaraan	828.136.688	-	665.131.188	0,00%	80,32%	14	665.131.188			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik			5	9.305.000,00	5	Jenis	46.175.000	-	22.675.000	0,00%	49,11%	5	22.675.000			Dinas Kebudayaan	
	2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik			1	1.125.290.070,00	3	Gedung	1.611.624.096	-	1.584.836.713	0,00%	98,34%	1	1.584.836.713			Dinas Kebudayaan	
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra**			**2,851153**	**10.471.768.006,00**	**5**	**Persen**	**67.074.787.802**	**-**	**64.308.771.522**	**0,00%**	**95,88%**	**3**	**64.308.771.522**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali**			**2500**	**4.316.490.094,00**	**2500**	**Orang**	**28.898.824.802**	**-**	**27.883.860.608**	**0,00%**	**96,49%**	**2.500**	**27.883.860.608**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan termanfaatkan			2500	2.546.382.750,00	40	Jenis	1.705.149.208		1.320.785.210	0,00%	77,46%	2.500	1.320.785.210			Dinas Kebudayaan	
	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pemanfaatan bahasa aksara dan sastra Bali dan Dokumen yang dihasilkan			15	1.770.107.344,00	2000	Orang	27.193.675.594		26.563.075.398	0,00%	97,68%	15	26.563.075.398			Dinas Kebudayaan	
								115	Dokumen				0,00%		-	-				
	2.22.02.1.02	**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi**			**67**	**6.155.277.912,00**	**365**	**Komunitas Seni**	**21.628.007.190**	**-**	**20.047.886.534**	**0,00%**	**92,69%**	**67**	**20.047.886.534**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni yang berpartisipasi			40	1.687.091.957,00	365	Komunitas Seni	20.134.095.435		18.611.639.684	0,00%	92,44%	40	18.611.639.684			Dinas Kebudayaan	
	2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian			27	4.468.185.955,00	477	Orang/ Lembaga	1.493.911.755		1.436.246.850	0,00%	96,14%	27	1.436.246.850			Dinas Kebudayaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	2.22.02.1.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana lembaga adat**					**110**	**Organisasi**	**16.547.955.810**	**-**	**16.377.024.380**	0,00%	98,97%	**-**	**16.377.024.380**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.02.1.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat					110	Organisasi	16.547.955.810	-	16.377.024.380	0,00%	98,97%	**-**	**16.377.024.380**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan**			**5,0965251**	**8.894.865.086,00**	**5**	**Persen**	**1.380.477.902**	**#REF!**	**1.267.722.132**	**#REF!**	**91,83%**	**5**	**1.267.722.132**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.03.1.01	**Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina**			**528**	**8.894.865.086,00**	**518**	**Lembaga**	**1.380.477.902**	**#REF!**	**1.267.722.132**	**#REF!**	**91,83%**	**528**	**1.267.722.132**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah masyarakat/komunitas seni yang mengikuti Utsawa Dharmagita			**50**	**123.722.300,00**	135	Orang	648.430.100	-	608.592.075	0,00%	93,86%	**50**	**608.592.075**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Lembaga/SDM kesenian tradisional yang terstandarisasi dan tersertifikasi			**168**	**5.607.783.936,00**	200	Lembaga	732.047.802	-	659.130.057	0,00%	90,04%	**168**	**659.130.057**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi**			**0**	**663.750,00**	**5**	**Persen**	**336.500.000**	**#REF!**	**320.656.400**	**#REF!**	**95,29%**	**-**	**320.656.400**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.04.1.01	**Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina**			**0**	**663.750,00**	**119**	**Lembaga**	**336.500.000**	**#REF!**	**320.656.400**	**#REF!**	**95,29%**	**-**	**320.656.400**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.04.1.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun			**0**	**663.750,00**	2	Purana dan Vide	336.500.000	-	320.656.400	0,00%	95,29%	**-**	**320.656.400**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju**			**0**	**1.589.551.460,00**	**520**	**Cagar Budaya**	**661.513.920**	**-**	**531.404.996**	**0,00%**	**80,33%**	**-**	**531.404.996**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.05.1.01	**Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan**			**0**	**68.889.300,00**	**5**	**Cagar Budaya**	**124.999.900**	**-**	**106.460.035**	**0,00%**	**85,17%**	**-**	**106.460.035**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan			**0**	**68.889.300,00**	5	Cagar Budaya	124.999.900		106.460.035	0,00%	85,17%	**-**	**106.460.035**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.05.1.02	**Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola**			**0**	**1.520.662.160,00**	**80**	**Objek**	**536.514.020**	**-**	**424.944.961**	**0,00%**	**79,20%**	**-**	**424.944.961**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang			**0**	**188.917.210,00**	35	Objek	405.623.020		349.463.260	0,00%	86,15%	**-**	**349.463.260**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Termanfaatkan			**0**	**-**	5	Cagar Budaya	130.891.000		75.481.701	0,00%	57,67%	**-**	**75.481.701**			**Dinas Kebudayaan**	
	2.22	**UPTD Taman Budaya**				**0**	**5.718.526.247,00**			**8.402.662.736**		**7.672.848.244**		**91,31%**	**-**	**7.672.848.244**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**80,15625**	**4.158.399.797,00**	**81**	**Poin**	**6.972.662.736**	**1,01**	**6.375.898.244**	**1,25%**	**91,44%**	**80**	**6.375.898.244**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana**			**95,833333**	**325.299.588,00**	**100**	**Persen**	**347.742.600**	**-**	**255.514.940**	**0,00%**	**73,48%**	**96**	**255.514.940**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia			**35**	**179.545.000,00**	42	Jenis	199.995.500		185.347.000	0,00%	92,68%	**35**	**185.347.000**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan			**6**	**87.346.600,00**	15	Jenis	7.545.700		6.249.000	0,00%	82,82%	**6**	**6.249.000**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan yang tersedia)			**3**	**44.941.000,00**	5	Jenis	45.000.000		42.484.000	0,00%	94,41%	**3**	**42.484.000**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan			**4**	**3.186.200,00**	2	Jenis	8.496.400		4.050.500	0,00%	47,67%	**4**	**4.050.500**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia			**6**	**7.060.000,00**	5	Jenis	8.000.000		5.160.000	0,00%	64,50%	**6**	**5.160.000**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana			**9**	**3.220.788,00**	12	Bulan	78.705.000		12.224.440	0,00%	15,53%	**9**	**12.224.440**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100**	**261.842.192,00**	**100**	**Persen**	**756.678.200**	**-**	**652.103.600**	**0,00%**	**86,18%**	**100**	**652.103.600**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan			**4**	**261.842.192,00**	14	Jenis	756.678.200		652.103.600	0,00%	86,18%	**4**	**652.103.600**			**UPTD Taman Budaya**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	2.22.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**			**100**	**2.276.457.727,00**	**100**	**Persen**	**2.840.681.392**	**5,00**	**2.519.291.243**	**5,00%**	**88,69%**	**100**	**2.519.291.243**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia			**1**	**1.270.000,00**	1	Jenis	1.270.000		1.270.000	0,00%	100,00%	**1**	**1.270.000**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia			**3**	**636.169.485,00**	2	Jenis	1.204.000.000		968.591.259	0,00%	80,45%	**3**	**968.591.259**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik			**8**	**109.608.500,00**	9	Jenis	313.880.000		258.330.000	0,00%	82,30%	**8**	**258.330.000**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia			**12**	**1.529.409.742,00**	12	Bulan	1.321.531.392	3	1.291.099.984	25,00%	97,70%	**12**	**1.291.099.984**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100**	**1.294.800.290,00**	**100**	**Persen**	**3.027.560.544**	**-**	**2.948.988.461**	**0,00%**	**97,40%**	**100**	**2.948.988.461**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik			**6**	**95.944.234,00**	6	Kendaraan Dinas	163.770.000		110.439.300	0,00%	67,44%	**6**	**110.439.300**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik			**8**	**125.244.200,00**	7	Jenis	199.450.000		180.177.692	0,00%	90,34%	**8**	**180.177.692**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik			**23**	**1.073.611.856,00**	23	Gedung	2.664.340.544		2.658.371.469	0,00%	99,78%	**23**	**2.658.371.469**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra**			**0**	**1.560.126.450,00**	**5**	**Persen**	**1.430.000.000**	**#REF!**	**1.296.950.000**	**#REF!**	**90,70%**	**-**	**1.296.950.000**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali**			**2500**	**1.560.126.450,00**	**75**	Persen	**1.430.000.000**		**1.296.950.000**	**0,00%**	**90,70%**	**2.500**	**1.296.950.000**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kelompok Seni yang Berpartisipasi			**450**	**1.062.250.450,00**	24	Kelompok Seni	1.430.000.000		1.296.950.000	0,00%	90,70%	**450**	**1.296.950.000**			**UPTD Taman Budaya**	
	2.22	**UPTD Museum Bali**				**0**	**3.478.020.925,00**			**4.586.447.856**		**4.126.781.720**		**89,98%**	**-**	**4.126.781.720**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**27,083333**	**2.034.989.650,00**	**81**	**Poin**	**2.786.447.856**	**#REF!**	**2.467.217.813**	**#REF!**	**88,54%**	**27**	**2.467.217.813**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana**			**41,666667**	**141.386.090,00**	**100**	**Persen**	**180.851.720**	**#REF!**	**156.772.612**	**#REF!**	**86,69%**	**42**	**156.772.612**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia			**8**	**26.413.900,00**	16	Jenis	35.976.720		30.374.800	0,00%	84,43%	**8**	**30.374.800**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia			**0**	**75.790.000,00**	3	Jenis	101.000.000		100.555.000	0,00%	99,56%	**-**	**100.555.000**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan			**0**	**9.940.940,00**	6	Jenis	19.199.000		13.513.372	0,00%	70,39%	**-**	**13.513.372**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia			**0**	**3.285.000,00**	1	Jenis	5.500.000		3.312.000	0,00%	60,22%	**-**	**3.312.000**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana			**6**	**1.106.250,00**	12	Bulan	19.176.000		9.017.440	0,00%	47,02%	**6**	**9.017.440**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**0**	**240.120.084,00**	**100**	**Persen**	**251.865.000**	**-**	**216.040.000**	**0,00%**	**85,78%**	**-**	**216.040.000**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan			**0**	**240.120.084,00**	12	Jenis	251.865.000		216.040.000	0,00%	85,78%	**-**	**216.040.000**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**			**66,666667**	**822.144.402,00**	**100**	**Persen**	**1.000.268.528**	**-**	**844.851.982**	**0,00%**	**84,46%**	**67**	**844.851.982**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia			**2**	**5.500.000,00**	2	Jenis	6.250.000		4.500.000	0,00%	72,00%	**2**	**4.500.000**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia			**0**	**101.375.131,00**	3	Jenis	197.000.000		120.085.314	0,00%	60,96%	**-**	**120.085.314**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik			**6**	**42.515.503,00**	6	Jenis	98.778.360		44.823.500	0,00%	45,38%	**6**	**44.823.500**			**UPTD Museum Bali**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia			9	672.753.768,00	12	Bulan	698.240.168		675.443.168	0,00%	96,74%	9	675.443.168			UPTD Museum Bali	
	2.22.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**0**	**831.339.074,00**	**100**	**Persen**	**1.353.462.608**	**-**	**1.249.553.219**	**0,00%**	**92,32%**	**-**	**1.249.553.219**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik			**0**	**54.480.500,00**	4	Kendaraan	121.297.200		91.538.250	0,00%	75,47%	**-**	**91.538.250**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik			**0**	**25.073.000,00**	5	Jenis	67.270.000		14.436.500	0,00%	21,46%	**-**	**14.436.500**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor maupun bangunan lainnya yang terawat dengan baik			**0**	**751.785.574,00**	2	Gedung	1.164.895.408		1.143.578.469	0,00%	98,17%	**-**	**1.143.578.469**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali**			**81,25**	**1.443.031.275,00**	**75**	**Persen**	**1.800.000.000**	**-**	**1.659.563.907**	**0,00%**	**92,20%**	**81**	**1.659.563.907**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.06.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi**	**Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola**			**650**	**1.443.031.275,00**	**600**	**Koleksi**	**1.800.000.000**	**-**	**1.659.563.907**	**0,00%**	**92,20%**	**650**	**1.659.563.907**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi UPTD. Museum Bali yang dikelola secara Terpadu			**650**	**464.430.125,00**	650	Koleksi	540.000.000		530.842.510	0,00%	98,30%	**650**	**530.842.510**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum			**5059**	**714.124.950,00**	6000	Orang	900.000.000		830.630.076	0,00%	92,29%	**5.059**	**830.630.076**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah jenis sarana dan prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara			**5**	**264.476.200,00**	4	Jenis	360.000.000		298.091.321	0,00%	82,80%	**5**	**298.091.321**			**UPTD Museum Bali**	
	2.22	**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**				**0**	**4.180.050.825,00**			**5.183.609.132**		**4.754.084.352**		**91,71%**	**-**	**4.754.084.352**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**71,15625**	**2.805.446.775,00**	**81**	**Poin**	**3.383.609.132**	**#REF!**	**3.108.340.560**	**#REF!**	**91,86%**	**71**	**3.108.340.560**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana**			**62,5**	**148.191.570,00**	**100**	**Persen**	**274.704.200**	**#REF!**	**251.458.855**	**#REF!**	**91,54%**	**63**	**251.458.855**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia			**31**	**99.861.740,00**	31	Jenis	77.985.100		77.822.655	0,00%	99,79%	**31**	**77.822.655**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia			**3**	**7.843.580,00**	48	Jenis	127.528.100		114.692.700	0,00%	89,94%	**3**	**114.692.700**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Tersedia			**1**	**34.366.000,00**	6	Jenis	49.025.000		43.920.000	0,00%	89,59%	**1**	**43.920.000**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia			**4**	**2.075.250,00**	6	Jenis	15.066.000		11.003.500	0,00%	73,04%	**4**	**11.003.500**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia			**3**	**4.045.000,00**	3	Jenis	5.100.000		4.020.000	0,00%	78,82%	**3**	**4.020.000**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai**			**100**	**-**	**100**	**Persen**	**18.000.000**	**-**	**17.697.000**	**0,00%**	**98,32%**	**100**	**17.697.000**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**4**	**-**	1	Jenis	18.000.000		17.697.000	0,00%	98,32%	**4**	**17.697.000**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**			**100**	**1.508.430.413,00**	**100**	**Persen**	**1.601.163.344**	**31,25**	**1.454.598.467**	**31,25%**	**90,85%**	**100**	**1.454.598.467**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia			**1**	**1.980.000,00**	1	Jenis	2.500.000	1	2.500.000	100,00%	100,00%	**1**	**2.500.000**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia			**3**	**153.671.655,00**	3	Jenis	350.000.000		209.466.080	0,00%	59,85%	**3**	**209.466.080**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara dengan baik			**5**	**20.559.124,00**	6	Jenis	87.000.000		86.976.500	0,00%	99,97%	**5**	**86.976.500**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia			**12**	**1.332.219.634,00**	12	Bulan	1.161.663.344	3	1.155.655.887	25,00%	99,48%	**12**	**1.155.655.887**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	2.22.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**88,888889**	**1.148.824.792,00**	**100**	**Persen**	**1.489.741.588**	**-**	**1.384.586.238**	**0,00%**	**92,94%**	**89**	**1.384.586.238**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara			**4**	**63.030.800,00**	4	Kendaraan	150.050.000		82.179.450	0,00%	54,77%	**4**	**82.179.450**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara dengan baik			**4**	**6.860.000,00**	6	Jenis	72.921.700		36.000.000	0,00%	49,37%	**4**	**36.000.000**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara			**1**	**1.078.933.992,00**	1	Gedung	1.266.769.888		1.266.406.788	0,00%	99,97%	**1**	**1.266.406.788**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**			**75**	**1.374.604.050,00**	**75**	**Persen**	**1.800.000.000**	**-**	**1.645.743.792**	**0,00%**	**91,43%**	**75**	**1.645.743.792**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.06.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi**	**Terpenuhinya kepuasan masyarakat**			**5000**	**1.374.604.050,00**	**75**	**Persen**	**1.800.000.000**	**-**	**1.645.743.792**	**0,00%**	**91,43%**	**5.000**	**1.645.743.792**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terpenuhinya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu					75	Persen	540.000.280		457.309.300			**-**	**457.309.300**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Terpenuhinya pelayanan dan akses masyarakat			**5000**	**1.374.604.050,00**	75	Persen	900.000.370		850.415.700	0,00%	94,49%	**5.000**	**850.415.700**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana museum					75	Persen	359.999.350		338.018.792			**-**	**338.018.792**			**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	
	3.30.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**82,2**	**15.300.064.479**	**83,08**	**13.834.855.684,00**	**82,2**		**18.402.890.294,00**	**82,2**	**17.466.413.602,00**	**100**	**94,91**					**DISPERINDAG**	
	3.30.01.1.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**			**100**	**9.863.164.638,00**	**100**	**%**	**14.886.890.178,00**	**100**	**14.577.491.494,00**	**100**	**97,92**					**DISPERINDAG**	
	3.30.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN			43	**9.863.164.638,00**	26	Dokumen	16.122.734.404	**97**	14.577.491.494	**373,08**	**90,42**					DISPERINDAG	
	3.30.01.1.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**			**100**	**475.788.690,00**	**100**	**%**	**1.237.551.280,00**	**100**	**1.282.974.939,00**	**100**	**103,67**					**DISPERINDAG**	
	3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan			9	9.524.812,00	9	Jenis	11.955.100	9	11.050.490	**100**	**92,43**					DISPERINDAG	
	3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan					103	Buah	1.182.975.980,00	83	1.081.379.526,00	80,58	91,41					DISPERINDAG	
			Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan					210	m2		210		100								
			Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan					24	Unit		34		100,00								
			Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan					8	Tabung		8		100								
			Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan					3	Paket		3		100								
			Jumlah Jenis alat tulis kantor,Kertas dan Cover,Bahan Komputer, Alat Listrik dan Bahan Kegiatan Kantor yang disediakan yang disediakan			48	Jernis	48	Jenis		49		100								
	3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan			2	64.868.600,00	2	Jenis	75.000.000	2	63.113.000	**100**	**84,15**					DISPERINDAG	
	3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan			7	7.737.680,00	8	Jenis	14.217.200	**8**	6.896.226	**100**	**48,51**					DISPERINDAG	
	3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan			1	8.976.200,00	1	Jenis	5.840.000	1	5.046.800	**100**	**86,42**					DISPERINDAG	
	3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas			1	16.346.296,00	2	Jenis	202.894.000,00	2	115.488.897,00	**100**	5,59					DISPERINDAG	
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan			460		2022	Kotak		**775**		**38,33**						DISPERINDAG	
	3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100**	**735.577.662,00**	**100**	**%**	**901.673.700,00**	**100**	**768.278.770,00**	**100**	**85,21**					**DISPERINDAG**	
	3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik			3	120.991.424,00	3	Jenis	210.000.000	3	167.718.467	100	79,87					DISPERINDAG	
	3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			61	415.344.338,00	113	Unit	491.673.700	**23**	407.085.958	20,35	82,80					DISPERINDAG	
	3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan			1	199.241.900,00	1	Tahun	200.000.000	1	193.474.345	100	96,74					DISPERINDAG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**100**	**2.742.012.038,00**	**100**	**%**	**1.376.775.136,00**	**100**	**837.668.399,00**	**100**	**60,84**					**DISPERINDAG**	
	3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara			11	421.995.696,00	17	Unit	959.822.240	17	714.773.996	**100**	**74,47**					DISPERINDAG	
	3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor			1	2.320.016.342,00	1	Tahun	324.502.896,00	1	122.894.403	**100**	5,59					DISPERINDAG	
			Jumlah Taman yang dipelihara			1		1	Tahun		1		**100**							
	3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**84%**	**334.463.198**	**(22.90)**	**286.848.234,00**	**84**	**%**	**334.463.198,00**	**84**	**252.028.155,00**	**100**	**75,35**					**DISPERINDAG**	
	3.30.02.1.04	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**Persentase Peningkatan Nilai Ekspor**			**(22.90)**	**286.848.234,00**	**3**	**%**	**334.463.198,00**	3	252.028.155,00	**100**	**75,35**					**DISPERINDAG**	
	3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir			18127	256.321.354,00	14000	Dokumen	334.463.198,00	**17640**	252.028.155,00	**126**	**75,35**					DISPERINDAG	
	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Jumlah Pasar ber SNI**	**4**	**95.778.800**	**0**	**6.711.795,00**	**4**	**Pasar**	**95.778.800,00**	**4**	**81.663.505,00**	**100**	**85,26**					**DISPERINDAG**	
	3.30.03.1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**Jumlah Pasar yang dikembangkan**			**8**	**6.711.795,00**	**8**	**Pasar**	**95.778.800,00**	**8**	**81.663.505,00**	**100**	**85,26**					**DISPERINDAG**	
	3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pasar yang dibina			**8**	**6.711.795,00**	**8**	**Pasar**	95.778.800,00	**8**	81.663.505,00	**100**	**85,26**					DISPERINDAG	
	3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**	**Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif**	**64,95%**	**8.483.820**	**(22.90)**	**31.372.806,00**	**64,95**	**%**	**8.483.820,00**	**64,95**	**8.370.700,00**	**100**	**98,67**					**DISPERINDAG**	
	3.30.05.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya**			**0**	**5.384.785,00**	**2**	Pelaku Usaha	**8.483.820,00**	**2**	**8.370.700,00**	**100**	**98,67**					**DISPERINDAG**	
	3.30.05.1.01.05	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promos	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi			27	25.988.021,00	15	Pelaku Usaha	8.483.820,00	15	8.370.700,00	**100,00**	**98,67**					DISPERINDAG	
	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Indeks Keberdayaan Konsumen**	**38,8**	**557.962.876**	**2**	**195.648.155,00**	**38,8**		**557.962.876,00**	**38,8**	**548.417.016,00**	**100**	**98,29**					**DISPERINDAG**	
	3.30.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Konsumen Cerdas**			**100**	**164.259.205,00**	**100**	**%**	**494.826.448,00**	**100**	**485.646.448,00**	**100**	**98,14**					**DISPERINDAG**	
	3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen yang diedukasi			70	164.259.205,00	100	Orang	494.826.448,00	100	485.646.448,00	**100**	5,59					DISPERINDAG	
			Operasional BPSK Kota Denpasar			1		1	Tahun		1		**100**							
	3.30.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Produk yang diawasi sesuai ketentuan**			**100**	**31.388.950,00**	**100**	**%**	**63.136.428,00**	**100**	**62.770.568,00**	**100**	**99,42**					**DISPERINDAG**	
	3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Produk yang diawasi			10	31.388.950,00	10	Produk	63.136.428,00	10	62.770.568,00	**100**	**99,42**					DISPERINDAG	
	3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali**	**30%**	**48.516.758**	**30**	**48.806.958,00**	**30**	**%**	**206.056.068,00**	**30**	**193.462.608,00**	**100**	**93,89**					**DISPERINDAG**	
	3.30.07.1.03	**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar**			**30**	**48.806.958,00**	**30**	**%**	**206.056.068,00**	**30**	**193.462.608,00**	**100**	**93,89**					**DISPERINDAG**	
	3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar			126	48.806.958,00	141	Produk	206.056.068,00	141	193.462.608,00	**100**	93,89					DISPERINDAG	
			Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali			60		80	Toko		80		**100**						DISPERINDAG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang**	**1,50%**	**4.087.383.454**	**1,5**	**2.290.270.603,00**	**1,5**	**%**	**6.957.112.254,00**	**1,5**	**6.261.120.552,00**	**100**	**90,00**					**DISPERINDAG**	
	3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang**			**1,5**	**2.290.270.603,00**	**1,5**	**%**	**6.957.112.254,00**	**1,5**	**6.261.120.552,00**	**100**	**90,00**					DISPERINDAG	
	3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah RPIK yang di evaluasi			-	-	7	RPIK	11.222.420,00	**7**	10.694.800,00	**100,00**	**95,30**					DISPERINDAG	
	3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sentra yang difasilitasi sarana dan prasarana industri			-	-	4	Sentra	2.322.169.110,00	**4**	1.728.551.800,00	**100**	**74,44**					DISPERINDAG	
	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah perajin yang difasilitasi pameran			250	2.290.270.603,00	250	Perajin	4.623.720.724,00	**250**	4.521.873.952,00	**100**	**97,80**					DISPERINDAG	
			Jumlah Produsen Produk Sandang Lokal Bali yang difasilitasi Fashion Show					10	Perajin		**10**		**100**							
	3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Ketersediaan Data Industri**	**100%**	**135.704.088**	**0**	**-**	**100**	**%**	**135.704.088,00**	**100**	**133.157.848,00**	**100**	**98,12**						
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul			0	-	**100**	**%**	**135.704.088,00**	**100**	133.157.848,00	**100**	**98,12**						
	3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Industri yang terdata			0	-	270	Industri	135.704.088,00	**270**	133.157.848,00	**100,00**	**98,12**						
										UPTD RUMAH KREATIF										
	3.31.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**82,2**	**2.033.565.404**	**83,08**	**1.687.719.221,00**	**82,2**		**467.532.276,00**	**83,08**	**432.622.653,00**	**101,07**	**92,53**					**UPTD Rumah Kreatif**	
	3.31.01.1.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**			**100**	**1.557.650.004,00**	**100**	**%**	**278.439.000,00**	**100**	**266.282.199,00**	**100**	**95,63**					**UPTD Rumah Kreatif**	
	3.31.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN			43	1.178.753.515,00	26	Dokumen	278.439.000	**97**	266.282.199,00	**373,077**	**95,63**					UPTD Rumah Kreatif	
	3.31.01.1.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**			**100**	**25.862.221,00**	**100**	**%**	**24.990.380,00**	**25**	**23.665.878,00**	**25**	**94,70**					UPTD Rumah Kreatif	
	3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan			10	22.749.421,00	12	Jenis	17.710.380,00	12	17.023.053,00	**100**	**96,12**					UPTD Rumah Kreatif	
	3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan			3	984.000,00	2500	Lembar	1.000.000,00	2500	650.025,00	**100**	**65,00**					UPTD Rumah Kreatif	
	3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan			2	2.128.800,00	2	Jenis	4.000.000,00	2	3.712.800,00	**100**	**92,82**					UPTD Rumah Kreatif	
	3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas			-	-	1	Jenis	2.280.000,00	1	2.280.000,00	**100**	**100,00**						
	3.31.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100**	**42.131.435,00**	**100**	**%**	**53.506.448,00**	**100**	**48.096.450,00**	**100**	**89,89**					UPTD Rumah Kreatif	
	3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Layanan Kemasan yang dipelihara			0	53.775.238,00	5	Unit	53.506.448,00	**5**	48.096.450,00	**100**	**89,89**					UPTD Rumah Kreatif	
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			9	-	19	Unit		**19**		**100**							
	3.31.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**100**	**62.075.561,00**	**100**	**%**	**110.596.448,00**	**100**	**94.578.126,00**	**100**	**85,52**					UPTD Rumah Kreatif	
	3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara			2	62.075.561,00	1	Unit	110.596.448,00	1	94.578.126,00	**100**	**85,52**					UPTD Rumah Kreatif	
	3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang**	**1,50%**	**83.575.000**	**1,5**	**49.745.221,00**	**1,5**	**%**	**209.575.000,00**	**1,5**	121.539.822,00	**100**	**57,99**					**UPTD Rumah Kreatif**	
	3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang**			**1,5**	**49.745.221,00**	**1,5**	**%**	**209.575.000,00**	**1,5**	**121.539.822,00**	**100**	**57,99**					**UPTD Rumah Kreatif**	
	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi kemasan			0	49.745.221,00	20	Pelaku Industri	209.575.000,00	**20**	121.539.822,00	**100**	0,00					UPTD Rumah Kreatif	
			Jumlah IKM yg mengikuti sosialisasi industri digital			0	-	20	Pelaku Industri		**20**		**100**							
			pelaksanaan Lomba desain kemasa			1	-	2	Kali		**2**		**100**							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
										UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG										
	3.30.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**83,08**	**1.586.734.997,00**	**82,2**		**419.164.363,00**	**83,08**	**396.432.880,00**	**101,07**	**94,58**					**UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**	
	3.30.01.1.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**			**100**	**1.401.620.715,00**	**100**	**%**	**194.496.997,00**	**100**	**194.496.997,00**	**100**	**100,00**					**UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**	
	3.30.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN			43	1.401.620.715,00	26	Dokumen	194.496.997,00	**97**	194.496.997,00	**373,0769231**	**100,00**					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	3.30.01.1.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**			**100**	**26.218.034,00**	**100**	**%**	**43.476.070,00**	**100**	**40.462.209,00**	**100**	**93,07**					**UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**	
	3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan			4	944.800,00	4	Jenis	997.000,00	4	835.400,00	**100**	**83,79**					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan			36	14.022.234,00	25	Jenis/Alat	19.021.270,00	25	18.158.969,00	**100**	**95,47**					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan			1	9.996.000,00	1	Jenis	10.000.000,00	1	9.999.500,00	**100**	**100,00**					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan			1	1.255.000,00	1	Jenis	1.999.800,00	1	1.675.500,00	**100**	0,00					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
			Jumlah Fotocopy			1000	-	2082	Lembar		2082		**100**						UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas			0	-	1	Jenis	11.458.000,00	1	9.792.840,00	**100**	**85,47**					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100**	**52.947.209,00**	**100**	**%**	**60.196.448,00**	**10**	**54.045.657,00**	**10**	**89,78**					**UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**	
	3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik			1	6.580.774,00	1	Jenis	12.000.000,00	1	6.419.209,00	**100**	**53,49**					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			14	45.366.435,00	16	Unit	48.196.448,00	16	47.626.448,00	**100**	**98,82**					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**100**	**105.949.039,00**	**100**	**%**	**120.994.848,00**	**100**	**107.428.017,00**	**100**	**88,79**					**UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**	
	3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara			3	133.610.446,00	3	Unit	120.994.848,00	3	107.428.017,00	**100**	**88,79**					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Indeks Keberdayaan Konsumen**	**38,8**	**103.869.848**	**2**	**104.838.316,00**	**38,8**		**103.869.848,00**	**38,8**	**106.451.645,00**	**100**	**102,49**					**UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**	
	3.30.06.1.01	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			**0**	**104.838.316,00**	**82**	**%**	**103.869.848,00**	**87,43**	**106.451.645,00**	**106,62**	**102,49**					**UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**	
		Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang			93	104.838.316,00	55	Pengujian	116.028.664,00	**84**	106.451.645,00	**152,73**	**91,75**					UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**34.389.553.173**	**78**	**1.440.230.194**	**79**	**Nilai**	**20.388.956.132**	**79**	**20.079.122.495**	**100,00%**	**98,48%**	**79**	**21.519.352.688,76**	**99%**	**63%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**	**100%**	46.619.470	**0**	0	**0**	**Persen**	0	**0**	0	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	4.800.000	0	0		Dokumen	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	4.800.000	0	0		Dokumen	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	12	4.800.000	0	0		Dokumen	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12	4.800.000	0	0		Dokumen	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	27.419.470	0	0		Laporan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**260**	**26.870.106.000**	**52**		**52**	**Dokumen**	**18.688.578.276**	**52**	**18.397.912.225**	**100,00%**	**98,44%**	**104**	**18.397.912.225,00**	**40%**	**68%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	26.870.106.000	12	9.245.338.075	12	Bulan	18.688.578.276	12	18.397.912.225	**100,00%**	**98,44%**	**12**	**27.643.250.300,00**	**100%**	**103%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**	**100%**	**248.128.224**	**100%**	**75.000.000**	**100%**	**Persen**	**124.712.380**	**100%**	**121.691.768**	**100,00%**	**97,58%**	**100%**	**196.691.768,00**	**100%**	**79%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	656.500.000	12	23.516.630	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**23.516.630,00**	**100%**	**4%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	248.128.224	12	75.000.000	12	Bulan	124.712.380	12	121.691.768	**100,00%**	**97,58%**	**12**	**196.691.768,00**	**100%**	**79%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	84.404.200	12	12.839.325	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**12.839.325,00**	**100%**	**15%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.242.044.500	12	33.908.750	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**33.908.750,00**	**100%**	**3%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik**	**100%**	333.500.000	**100%**	2.440.000	**0%**	**Persen**	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**100%**	**2.440.000,00**	**100%**	**1%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	333.500.000	12	2.440.000	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**2.440.000,00**	**100%**	**1%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik**	**100%**	426.865.076	**100%**	110.123.663	**0%**	**Persen**	0	**0**	0	**0,00%**	**0,00%**	**100%**	**110.123.663,00**	**100%**	**26%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	10.500.000	12	3.000.000	0	BUlan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**3.000.000,00**	**100%**	**29%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	416.365.076	12	107.123.663	0	BUlan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**107.123.663,00**	**100%**	**26%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik**	**100%**	**6.464.334.403**	**100%**	**1.252.666.531**	**100%**	Persen	**1.575.665.476**	**100%**	**1.559.518.502**	**100,00%**	**98,98%**	**100%**	**2.812.185.032,76**	**100%**	**44%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	2.407.468.713	12	523.588.024	12	Bulan	533.237.984	12	531.162.599	**100,00%**	**99,61%**	**12**	**1.054.750.623,00**	**100%**	**44%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	3.764.640.640	12	690.942.707	12	Bulan	807.877.492	12	795.453.754	**100,00%**	**98,46%**	**12**	**1.486.396.461,12**	**100%**	**39%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	292.225.050	12	38.135.800	12	Bulan	234.550.000	12	232.902.148,64	**100,00%**	**99,30%**	**12**	**271.037.948,64**	**100%**	**93%**	**DINAS KELAUTAN**	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya**	**5**	**2.060.151.129**	**5**	**88.409.946**	**5**	**Kawasan**	**147.182.196**	**5**	**146.925.676**	**100,00%**	**99,83%**	**5**	**235.335.622,00**	**100%**	**11%**	**DINAS KELAUTAN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.	**Jumlah Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**5**	1.078.000.000	**5**	45.728.498	**0**	**Kawasan**	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**5**	**45.728.498,00**	**100%**	**4%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali	3	750.000.000	1	42.517.448	0	Dokumen	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**1**	**42.517.448,00**	**33%**	**6%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengelolalaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	5	328.000.000	5	3.211.050	0	Kawasan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**5**	**3.211.050,00**	**100%**	**1%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	**Jumlah Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil**	**40**	300.000.000	**40**	42.681.448	**0**	**Pelaku Usaha**	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**40**	**42.681.448,00**	**100%**	**14%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	5	300.000.000	5	42.681.448	0	Kawasan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**5**	**42.681.448,00**	**100%**	**14%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	**Meningkatnya kesejahteraan petani garam**	**12**	**682.151.129**	**0**	**0**	**4**	**Kelompok**	**147.182.196**	**4**	**146.925.676**	**100,00%**	**99,83%**	**4**	**146.925.676,00**	**33%**	**22%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok usaha garam yang difasilitas	12	682.151.129	0		4	Kelompok	147.182.196	4	146.925.676	**100,00%**	**99,83%**	**4**	**146.925.676,00**	**33%**	**22%**	**DINAS KELAUTAN**	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**########**	**525.966.592**	**100.755,76**	**145.300.248**	**105.165,51**	**Ton**	**569.284.796**	**103.173,63**	**568.703.896**	**98,11%**	**99,90%**	**203.929,39**	**714.004.144,00**	**190%**	**136%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	**Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap**	**3**	**525.966.592**	**1**	**145.300.248**	**1**	**Dokumen**	**569.284.796**	**1**	**568.703.896**	**100,00%**	**99,90%**	**2**	**714.004.144,00**	**67%**	**136%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyusunan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	8	437.966.592	8	41.606.048	0	Kabupaten	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**8**	**41.606.048,00**	**100%**	**9%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisai Perizinan Perikanan Tangkap	3	88.000.000	1	103.694.200	1	Dokumen	569.284.796	1	568.703.896	**100,00%**	**99,90%**	**2**	**672.398.096,00**	**67%**	**764%**	**DINAS KELAUTAN**	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah produksi perikanan budidaya**	**56.951,04**	**1.698.076.125**	**33.455,34**	**38.306.448**	**19.360,82**	**Ton**	**3.099.640.250**	**24.307,84**	**2.549.480.000**	**125,55%**	**82,25%**	**57.763**	**2.587.786.448,00**	**101%**	**152%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	**Jumlah Monitoring Kesehaatan Ikan dan Lingkungan**	**40**	**1.698.076.125**	**17**	**38.306.448**	**32**	**Kali**	**3.099.640.250**	**32**	**2.549.480.000**	**100,00%**	**82,25%**	**49**	**2.587.786.448,00**	**123%**	**152%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10	1.476.076.125	0	0	10	Unit	3.099.640.250	110	2.549.480.000	**1100,00%**	**82,25%**	**110**	**2.549.480.000,00**	**1100%**	**173%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di laut dan lintas darat	Jumlah monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	40	222.000.000	17	38.306.448	0	Kali				**0,00%**	**0,00%**	**17**	**38.306.448,00**	**43%**	**17%**	**DINAS KELAUTAN**	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA LAUT DAN PERIKANAN	**Jumlah pelaku usaha taat Hukum**	**59**	248.945.100	**50**	18.240.000	**0**	**Pelaku Usaha**	0	**0**	0	**0,00%**	**0,00%**	**50**	**18.240.000,00**	**85%**	**7%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	**Jumlah Pelaku usaha taat hukum**	**44**	165.963.400	**23**	13.680.000	**0**	**Pelaku Usaha**	0	**0**	0	**0,00%**	**0,00%**	**23**	**13.680.000,00**	**52%**	**8%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidangh Kelautan Yang diawasi	15	82.981.700	13	9.120.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**13**	**9.120.000,00**	**87%**	**11%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi	15	49.881.700	8	3.040.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**8**	**3.040.000,00**	**53%**	**6%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan Budidaya yang diawasi	9	33.100.000	2	1.520.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**2**	**1.520.000,00**	**22%**	**5%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1 [satu} daerah provinsi	**Jumlah pelaku usaha taat hukum**	**15**	82.981.700	**10**	4.560.000	**0**	**Pelaku Usaha**	0	**0**	0	**0,00%**	**0,00%**	**10**	**4.560.000,00**	**67%**	**5%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi	15	82.981.700	10	4.560.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**10**	**4.560.000,00**	**67%**	**5%**	**DINAS KELAUTAN**	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Jumlah produk yang bersertifikat**	**449**	**1.259.561.984**	**309**	**96.744.048**	**149**	**SKP**	**306.356.916**	**282**	**287.258.896**	**189,26%**	**93,77%**	**591**	**384.002.944,00**	**132%**	**30%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menanggah dan besar	**Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi standar**	**25**	**1.259.561.984**	**25**	**96.744.048**	**25**	**UPI**	**306.356.916**	**25**	**287.258.896**	**100,00%**	**93,77%**	**50**	**384.002.944,00**	**200%**	**30%**	**DINAS KELAUTAN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah Penerima Paket Gemarikan	500	1.259.561.984	200	96.744.048	150	Paket	306.356.916	150	287.258.896	100,00%	93,77%	350	384.002.944,00	70%	30%	DINAS KELAUTAN	
		Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	**Jumlah produk yang bersertifikat**	**449**	**272.264.800**	**309**	**13.053.100**	**0**	**SKP**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**309**	**13.053.100,00**	**69%**	**5%**	**DINAS KELAUTAN**	
		Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan	100	272.264.800	100	13.053.100	0	Buku	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**100**	**13.053.100,00**	**100%**	**5%**	**DINAS KELAUTAN**	
					2.215.414.365		**2.619.866.795**			**1.742.674.848**		**548.979.331**		**31,50%**	**0**	**3.168.846.126,46**		**143%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**394.914.365**	**78**	**1.449.226.078**	**79**	**Nilai**	**596.421.348**	**79**	**496.815.831**	**100,00%**	**83,30%**	**79**	**1.946.041.909,00**	**99%**	**493%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**260**	**0**	**52**	**1.355.773.799**	**52**	**Dokumen**	**65.206.000**	**52**	**65.206.000**	**100,00%**	**100,00%**	**104**	**1.420.979.799,00**	**40%**	**#DIV/0!**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	0	12	1.355.773.799	12	Bulan	65.206.000	12	65.206.000	**100,00%**	**100,00%**	**12**	**1.420.979.799,00**	**100%**	**#DIV/0!**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Administrasi Umum Perangkap Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**	**100%**	**132.597.855**	**100%**	**21.701.130**	**100%**	**Bulan**	**25.768.420**	**100%**	**16.184.401**	**100,00%**	**62,81%**	**100%**	**37.885.531,00**	**100%**	**29%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	3.646.125	12	921.000	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**921.000,00**	**100%**	**25%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	18.751.500	12	9.915.105	12	Bulan	6.682.000	12	5.524.000	**100,00%**	**82,67%**	**12**	**15.439.105,00**	**100%**	**82%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	22.619.865	12	9.782.500	12	Bulan	19.086.420	12	10.660.401	**100,00%**	**55,85%**	**12**	**20.442.901,00**	**100%**	**90%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	6.125.490	12	722.525	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**722.525,00**	**100%**	**12%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	12	6.250.500	12	360.000	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**360.000,00**	**100%**	**6%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3.150.000	0	0	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	72.054.375	0	0	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik**	**100%**	**5.400.000**	**100%**	**5.291.000**	**0**	**Bulan**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**100%**	**5.291.000,00**	**100%**	**98%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	5.400.000	12	5.291.000	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**5.291.000,00**	**100%**	**98%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik**	**100%**	43.170.000	**100%**	4.603.550	**0**	**Bulan**	0	**0**	0	**0,00%**	**0,00%**	**1**	**4.603.550,00**	**100%**	**11%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.500.000	12	450.000	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**450.000,00**	**100%**	**30%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyediaan Jasa Komiunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	41.670.000	12	4.153.550	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**4.153.550,00**	**100%**	**10%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik**	**100%**	**213.746.510**	**100%**	**61.856.599**	**100%**	Bulan	**505.446.928**	**100%**	**415.425.430**	**100,00%**	**82,19%**	**100%**	**477.282.029,00**	**100%**	**223%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	153.776.885	12	61.856.599	12	Bulan	73.282.000	12	57.208.482	**100,00%**	**78,07%**	**12**	**119.065.081,00**	**100%**	**77%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	47.399.625	0	0	12	Bulan	427.294.928	12	357.667.498	100,00%	83,71%	12	357.667.498,00	100%	755%	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12.570.000	0	0	12	Bulan	4.870.000	12	549.450	100,00%	11,28%	12	549.450,00	100%	4%	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola**	**1**	**1.820.500.000**	**1**	**1.170.640.717**	**1**	**Kawasan**	**1.146.253.500**	**1**	**52.163.500**	**100,00%**	**4,55%**	**1**	**1.222.804.217,46**	**100%**	**67%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi	**Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan**	**1**	**1.820.500.000**	**1**	**1.170.640.717**	**1**	**Kawasan**	**1.146.253.500**	**1**	**52.163.500**	**100,00%**	**4,55%**	**1**	**1.222.804.217,46**	**100%**	**67%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
		Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	1.820.500.000	1	1.170.640.717	1	Kawasan	1.146.253.500	1	52.163.500	**100,00%**	**4,55%**	**1**	**1.222.804.217,46**	**100%**	**67%**	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	
					920.653.083		**1.781.931.755**			**275.398.856**		**252.288.827**		**91,61%**	**0**	**2.034.220.582,00**		**221%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**920.653.083**	**78**	**1.781.931.755**	**79**	**Nilai**	**275.398.856**	**79**	**252.288.827**	**100,00%**	**91,61%**	**79**	**2.034.220.582,00**	**99%**	**221%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**260**	**0**	**52**	**1.663.435.882**	**52**	**Dokumen**	**74.254.000**	**52**	**74.254.000**	**100,00%**	**100,00%**	**104**	**1.737.689.882,00**	**40%**	**#DIV/0!**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	0	12	1.663.435.882	12	Bulan	74.254.000	12	74.254.000	**100,00%**	**100,00%**	**12**	**1.737.689.882,00**	**100%**	**#DIV/0!**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**	**100%**	**297.993.300**	**100%**	**12.586.950**	**100%**	**Bulan**	**45.483.180**	**100%**	**41.856.280**	**100,00%**	**92,03%**	**100%**	**54.443.230,00**	**100%**	**18%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	13.650.000	12	1.305.500	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**1.305.500,00**	**100%**	**10%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	46.895.940	12	9.316.950	12	Bulan	6.700.380	12	5.894.370	**100,00%**	**87,97%**	**12**	**15.211.320,00**	**100%**	**32%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	103.782.800	0	0	12	Bulan	38.782.800	12	35.961.910	**100,00%**	**92,73%**	**12**	**35.961.910,00**	**100%**	**35%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	6.466.560	12	1.334.500	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**1.334.500,00**	**100%**	**21%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	12	1.800.000	12	630.000	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**630.000,00**	**100%**	**35%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	125.398.000	0	0	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik**	**100%**	60.281.239	**100%**	7.220.875	**0**	**Bulan**	0	**0**	0	**0,00%**	**0,00%**	**100%**	**7.220.875,00**	**100%**	**12%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	60.281.239	12	7.220.875	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**7.220.875,00**	**100%**	**12%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik**	**100%**	**562.378.544**	**100%**	**98.688.048**	**100%**	Bulan	**155.661.676**	**100%**	**136.178.547**	**100,00%**	**87,48%**	**100%**	**234.866.595,00**	**100%**	**42%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	278.096.000	12	41.814.600	12	Bulan	64.148.000	12	57.310.200	**100,00%**	**89,34%**	**12**	**99.124.800,00**	**100%**	**36%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	284.282.544	12	56.873.448	12	Bulan	91.513.676	12	78.868.347	**100,00%**	**86,18%**	**12**	**135.741.795,00**	**100%**	**48%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan**	**2**	**376.154.300**	**1**	**37.476.448**	**0**	**Pelabuhan**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**100%**	**37.476.448,00**	**50%**	**10%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	**Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan**	**116**	**376.154.300**	**60**	**37.476.448**	**0**	**Nelayan**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**60**	**37.476.448,00**	**52%**	**10%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Terlaksananya Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Nelayan	116	376.154.300	60	37.476.448	0	Nelayan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**60**	**37.476.448,00**	**52%**	**10%**	**UPTD PELABUHAN PERIKANAN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
					5.999.496.533		2.385.420.436			848.158.871		784.962.378		92,55%	0	3.170.382.814,00	#DIV/0!	53%	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	2.648.988.740	**78**	2.079.690.636	**79**	**Nilai**	634.162.271	**79**	577.512.978	**100,00%**	**91,07%**	**79**	**2.657.203.614,00**	**99%**	**100%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**260**	**0**	**52**	**1.555.963.276**	**52**	**Dokumen**	**77.064.587**	**52**	**77.064.587**	**100,00%**	**100,00%**	**104**	**1.633.027.863,00**	**40%**	**#DIV/0!**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	0	12	1.555.963.276	12	Bulan	77.064.587	12	77.064.587	**100,00%**	**100,00%**	**12**	**1.633.027.863,00**	**100%**	**#DIV/0!**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Administrasi Umum perangkat daerah	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**	**100%**	**83.820.000**	**100%**	**19.483.350**	**100%**	**Bulan**	**34.688.900**	**100%**	**31.189.880**	**100,00%**	**89,91%**	**100%**	**50.673.230,00**	**100%**	**60%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	50.325.000	12	3.008.000	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**3.008.000,00**	**100%**	**6%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	15.100.000	12	14.989.600	12	Bulan	34.688.900	12	31.189.880	**100,00%**	**89,91%**	**12**	**46.179.480,00**	**100%**	**306%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	18.395.000	12	1.485.750	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**1.485.750,00**	**100%**	**8%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik**	**100%**	760.000.000	**100%**	176.682.926	**0**	**Bulan**	0	**0**	0	**0,00%**	**0,00%**	**100%**	**176.682.926,00**	**100%**	**23%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.000.000	12	750.000	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**750.000,00**	**100%**	**25%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Penyediaan Jasa Komiunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	408.000.000	12	62.297.283	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**62.297.283,00**	**100%**	**15%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	349.000.000	12	113.635.643	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**113.635.643,00**	**100%**	**33%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik**	**100%**	**1.805.168.740**	**100%**	**327.561.084**	**100%**	Bulan	**522.408.784**	**100%**	**469.258.511**	**100,00%**	**89,83%**	**100%**	**796.819.595,00**	**100%**	**44%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	425.161.984	12	94.569.396	12	Bulan	123.950.096	12	118.812.476	**100,00%**	**95,86%**	**12**	**213.381.872,00**	**100%**	**50%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	207.880.992	12	45.609.448	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**45.609.448,00**	**100%**	**22%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	1.172.125.764	12	187.382.240	12	Bulan	398.458.688	12	350.446.035	**100,00%**	**87,95%**	**12**	**537.828.275,00**	**100%**	**46%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Jumlah hasil uji yang dikeluarkan**	**14.850**	**3.350.507.793**	**5.039**	**305.729.800**	**4.950**	**Sample**	**213.996.600**	**2.695**	**207.449.400**	**54,44%**	**96,94%**	**7.734**	**513.179.200,00**	**52%**	**15%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	**Rekomendasi hasil ujiproduk perikanan, Terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI**	**14.850**	**3.350.507.793**	**5.039**	**305.729.800**	**4.950**	**Sample**	**213.996.600**	**2.695**	**207.449.400**	**54,44%**	**96,94%**	**7.734**	**513.179.200,00**	**52%**	**15%**	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolah dan pemasaran skala menengah dan besar.	Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji	14.850	2.910.752.793	5.039	283.629.800	4.950	Smaple	205.496.600	2.695	198.949.400	**54,44%**	**96,81%**	**7.734**	**482.579.200,00**	**52%**	**17%**	**UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN**	
		Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Jumlah UPI Yang Disurveilance	7	439.755.000	7	22.100.000	7	UPI	8.500.000	7	8.500.000	**100,00%**	**100,00%**	**7**	**30.600.000,00**	**100%**	**7%**	**UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN**	
					4.914.407.378		**6.578.629.973**			**790.660.954**		**760.501.062**		**96,19%**	**0**	**7.339.131.034,54**		**149%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**2.485.789.709**	**78**	**3.666.479.490**	**79**	**Nilai**	**690.661.184**	**79**	**668.057.171**	**100,00%**	**96,73%**	**79**	**4.334.536.661,00**	**99%**	**174%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**260**	**0**	**52**	**3.105.149.602**	**52**	**Dokumen**	**125.999.200**	**52**	**125.999.200**	**100,00%**	**100,00%**	**104**	**3.231.148.802,00**	**40%**	**#DIV/0!**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	0	12	3.105.149.602	12	Bulan	125.999.200	12	125.999.200	**100,00%**	**100,00%**	**12**	**3.231.148.802,00**	**100%**	**#DIV/0!**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Administrasi Umum perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**	**100%**	**289.008.655**	**100%**	**33.534.058**	**100%**	**Bulan**	**36.504.600**	**100%**	**35.334.751**	**100,00%**	**96,80%**	**100%**	**68.868.809,00**	**100%**	**24%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	4.672.000	12	1.304.181	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**1.304.181,00**	**100%**	**28%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	259.621.165	12	2.714.002	12	Bulan	3.570.000	12	2.955.000	**100,00%**	**82,77%**	**12**	**5.669.002,00**	**100%**	**2%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	11.515.490	12	28.398.000	12	Bulan	32.934.600	12	32.379.751	**100,00%**	**98,32%**	**12**	**60.777.751,00**	**100%**	**528%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	13.200.000	12	1.117.875	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**1.117.875,00**	**100%**	**8%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik**	**100%**	384.331.500	**100%**	80.107.385	**0**	**Bulan**	0	**0**	0	**0,00%**	**0,00%**	**100%**	**80.107.385,00**	**100%**	**21%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.530.000	12	510.000	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**510.000,00**	**100%**	**33%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	382.801.500	12	79.597.385	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**79.597.385,00**	**100%**	**21%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik**	**100%**	**1.812.449.554**	**100%**	**447.688.445**	**100%**	Bulan	**528.157.384**	**100%**	**506.723.220**	**100,00%**	**95,94%**	**100%**	**954.411.665,00**	**100%**	**53%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	532.027.518	12	122.447.791	12	Bulan	124.727.896	12	106.367.188	**100,00%**	**85,28%**	**12**	**228.814.979,00**	**100%**	**43%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	1.280.422.036	12	325.240.654	12	Bulan	403.429.488	12	400.356.032	**100,00%**	**99,24%**	**12**	**725.596.686,00**	**100%**	**57%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut**	**3**	**2.428.617.669**	**3**	**2.912.150.483**	**3**	**Komoditas**	**99.999.770**	**3**	**92.443.891**	**100,00%**	**92,44%**	**3**	**3.004.594.373,54**	**100%**	**124%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	**Tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air tawar dan payau**	**3.310.000**	**2.428.617.669**	**1.100.000**	**2.912.150.483**	**1.000.000**	**Ekor**	**99.999.770**	**2.692.450**	**92.443.891**	**269,25%**	**92,44%**	**3.792.450**	**3.004.594.373,54**	**115%**	**124%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang pengguaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	tersedianya benih, benih calon induk, calon induk, induk ikan air payau/laut dan ikan air tawar yang unggul	12	1.241.750.969	12	853.180.488	12	Bulan	99.999.770	12	92.443.891	**100,00%**	**92,44%**	**12**	**945.624.379,00**	**100%**	**76%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
		Penyediaan sarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang pengguaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	Tersedianya calon induk dan induk ikan air tawar	12	1.186.866.700	12	2.058.969.995	0	Bulan	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**12**	**2.058.969.994,54**	**100%**	**173%**	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	
	3.26.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**83**	**45.961.496.110**	**82,02**	**11.501.608.807,00**	**82**		**12.417.107.365,00**	**82,65**	**11.952.042.851,00**	**100,79%**	**96,25%**	**164,67**	**23.453.651.658,00**	**198,40**	**51,03**	**DISPAR**	
	3.26.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**-**	**-**	**24**	**117.652.731,00**	**22**	**dokumen**	**116.597.394,00**	**22**	**115.808.035,00**	**100,00%**	**99,32%**	**46**	**233.460.766,00**			**DISPAR**	
	3.26.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	-	4	40.220.385,00	6	dokumen	40.313.098,00	6	39.774.278,00	100,00%	98,66%	**10**	79.994.663,00			DISPAR	
	3.26.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	-	-	1	398.700,00	-		-	-	-	-	-	**1**	398.700,00			DISPAR	Sudah di gabung ke Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.26.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	-	-	1	269.500,00	-		-	-	-	-	-	**1**	269.500,00			DISPAR	Sudah di gabung ke Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.26.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	-	-	1	301.000,00	-		-	-	-	-	-	**1**	301.000,00			DISPAR	Sudah di gabung ke Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.26.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA yang disusun	-	-	1	301.000,00	-		-	-	-	-	-	**1**	301.000,00			DISPAR	Sudah di gabung ke Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.26.01.1.01.06	Sub Kegatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	-	-	15	38.416.398,00	16	dokumen	76.284.296,00	16	76.033.757,00	100,00%	99,67%	**31**	114.450.155,00			DISPAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	3.26.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	1	37.745.748,00	-		-	-	-	-	-	1	37.745.748,00			DISPAR	Sudah di gabung ke Sub Kegatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3.26.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan**	**-**	**-**	**534**	**9.964.654.604,00**	**534**	**dokumen**	**10.630.383.940,00**	**544**	**10.250.660.040,00**	**101,87%**	**96,43%**	**1078**	**20.215.314.644,00**			**DISPAR**	
	3.26.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	-	-	86	9.964.654.604,00	86	dokumen	10.630.383.940,00	76	10.250.660.040,00	88,37%	96,43%	**162**	20.215.314.644,00			DISPAR	
	3.26.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**-**	**-**	**6**	**127.480.901,00**	**6**	**jenis**	**107.556.500,00**	**6**	**95.009.421,00**	**100,00%**	**88,33%**	**12**	**222.490.322,00**			**DISPAR**	
	3.26.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan baterai yang disediakan	-	-	6	4.654.221,00	6	jenis	4.178.000,00	6	3.085.295,00	100,00%	73,85%	**12**	7.739.516,00			DISPAR	
	3.26.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat-alat kantor yang disediakan	-	-	31	17.295.665,00	24	jenis	16.321.200,00	24	13.433.444,00	100,00%	82,31%	**55**	30.729.109,00			DISPAR	
	3.26.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	-	-	4	50.351.600,00	4	jenis	55.000.000,00	4	53.263.000,00	100,00%	96,84%	**8**	103.614.600,00			DISPAR	
	3.26.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	10	7.708.290,00	8	jenis	7.838.300,00	8	4.944.082,00	100,00%	63,08%	**18**	12.652.372,00			DISPAR	
	3.26.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan	-	-	1	6.992.000,00	1	jenis	2.220.000,00	1	2.220.000,00	100,00%	100,00%	**2**	9.212.000,00			DISPAR	
	3.26.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-	-	2	40.479.125,00	2	jenis	21.999.000,00	2	18.063.600,00	100,00%	82,11%	**4**	58.542.725,00			DISPAR	
	3.26.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**-**	**-**	**3**	**355.009.452,00**	**3**	**jenis**	**344.140.823,00**	**3**	**294.288.572,00**	**100,00%**	**85,51%**	**6**	**649.298.024,00**			**DISPAR**	
	3.26.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi	-	-	1	3.000.000,00	1	jenis	2.000.000,00	1	2.000.000,00	100,00%	100,00%	**2**	5.000.000,00			DISPAR	
	3.26.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik	-	-	4	142.854.972,00	3	jenis	138.000.000,00	3	88.777.772,00	100,00%	64,33%	**7**	231.632.744,00			DISPAR	
	3.26.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman	-	-	5	209.154.480,00	2	jenis	204.140.823,00	2	203.510.800,00	100,00%	99,69%	**7**	412.665.280,00			DISPAR	
	3.26.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**-**	**-**	**3**	**936.811.119,00**	**3**	**jenis**	**1.218.428.708,00**	**3**	**1.196.276.783,00**	**100,00%**	**98,18%**	**6**	**2.133.087.902,00**			**DISPAR**	
	3.26.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi yang dipelihara	-	-	4	220.657.300,00	4	jenis	266.162.300,00	4	256.447.310,00	100,00%	96,35%	**8**	477.104.610,00			DISPAR	
	3.26.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya urusan pemerintah	-	-	3	640.139.320,00	6	jenis	887.005.408,00	7	886.449.953,00	116,67%	99,94%	**10**	1.526.589.273,00			DISPAR	
	3.26.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	-	-	3	76.014.499,00	4	jenis	65.261.000,00	5	53.379.520,00	125,00%	81,79%	**8**	129.394.019,00			DISPAR	
	3.26.02	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing**	**11,54**	**473.092.789**	**2,56**	**120.272.339,00**	**3,85**	**persen**	**358.469.345,00**	**3,85**	**346.842.212,00**	**100,00%**	**96,76%**	**6,41**	**467.114.551,00**	**55,55**	**98,74**	**DISPAR**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
			Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	**2**	**1.445.056.206**			**1**	**persen**		**1**		**100,00%**		**0**				**DISPAR**	
	3.26.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing**	**-**	**-**	**13**	**120.272.339,00**	**72**	**DTW**	**2.077.500,00**	**94**	**-**	**130,56%**	0,00%	**107**	**120.272.339,00**			**DISPAR**	
	3.26.02.1.01.04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Pedoman Pengelolaan Desa Wisata	-	-		120.272.339,00	1	Dokumen	2.077.500,00	1	-	**100,00%**	**0,00%**	**1**	120.272.339,00			DISPAR	
			Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan			8									**8**					
			Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi			5									**5**					
			Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif			0									**0**					
			Jumlah peningkatan Desa Wisata berbasis budaya			0									**0**					
	3.26.02.1.03	**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**Pedoman jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal**	**-**	**-**			**1**	**Dokumen**	**216.204.749,00**	**1**	**210.513.262,00**	**100,00%**	**97,37%**	**1**	**210.513.262,00**			**DISPAR**	
	3.26.02.1.03.02	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Buku Acuan Pola Perjalanan Wisata Deskritif Melalui Jalur Darat di Bali	-	-			1	Dokumen	216.204.749,00	1	210.513.262,00	100,00%	97,37%	**1**	210.513.262,00			DISPAR	
	3.26.02.1.04	**Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan**	**-**	**-**			**3**	**Usaha Pariwisata**	**140.187.096,00**	**3**	**136.328.950,00**	**100,00%**	**97,25%**	**3**	**136.328.950,00**			**DISPAR**	
	3.26.02.1.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah buku direktori Usaha Pariwisata yang tersusun	-	-			100	Buku	115.548.996,00	**100**	113.880.596,00	100,00%	98,56%	**100**	113.880.596,00				
			Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	-	-			90	Usaha Pariwisata		**90**		100,00%		**90**				DISPAR	
	3.26.02.1.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah industri dan usaha pariwisata yang sesuai standar	-	-			3	Usaha Pariwisata	24.638.100,00	25	22.448.354,00	833,33%	91,11%	**25**	22.448.354,00			DISPAR	
	3.26.03	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**45,45**	**4.707.221.614**	**-28,79**	**229.042.288,00**	**37,50**	**persen**	**580.213.291,00**	**78,75**	**572.110.553,00**	**210,00%**	**98,60%**	**49,96**	**801.152.841,00**	**109,92**	**17,02**	**DISPAR**	
	3.26.03.1.01	**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi pariwisata**	**-**	**-**	**3500000**	**229.042.288,00**	**2.754.700**	**orang**	**580.213.291,00**	**5.480.002**	**572.110.553,00**	**198,93%**	**98,60%**	**8.980.002**	**801.152.841,00**			**DISPAR**	
	3.26.03.1.01.01	Sub kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah tayangan informasi pariwisata di media	-	-	341	37.476.448,00	9.000	Tayangan	227.487.896,00	50.751	227.091.969,00	563,90%	99,83%	**51.092**	264.568.417,00			DISPAR	
	3.26.03.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	-	-	0	37.476.448,00	0		-	0	-	-	-	**-**	37.476.448,00			DISPAR	
	3.26.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi	-	-	1	77.356.496,00	1	dokumen	80.046.751,00	1	73.576.088,00	100,00%	91,92%	**2**	150.932.584,00			DISPAR	
	3.26.03.1.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi wisata digital	-	-	1	76.732.896,00	4	Video	272.678.644,00	4	271.442.496,00	100,00%	99,55%	**5**	348.175.392,00			DISPAR	
	3.26.04	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**9**	**1.708.288.920**	**0**	**190.523.506,00**	**3**	**persen**	**235.133.799,00**	**2,2**	**233.657.198,00**	**73,33%**	**99,37%**	**-**	**424.180.704,00**	**-**	**24,83**	**DISPAR**	
	3.26.04.1.01	**Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**-**	**-**	**9**	**151.414.468,00**	**9**	**sarana dan prasarana**	**117.725.051,00**	**9**	**117.095.096,00**	**100,00%**	**99,46%**	**18**	**268.509.564,00**			**DISPAR**	
	3.26.04.1.01.02	Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah pameran produk kreatif	-	-	-	1.504.410,00	-		-	0	-	-	-	**-**	1.504.410,00			DISPAR	
	3.26.04.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang	Jumlah jaringan orang kreatif	-	-	8	76.520.056,00	-		-	0	-	-	-	**8**	76.520.056,00			DISPAR	
			Jumlah ruang kreasi	-	-	6		-			0		-	-	**6**					
	3.26.04.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah usaha kreatif terutama bagi usaha pemula yang mendapatkan pembinaan	-	-		73.390.002,00	90	Usaha	117.725.051,00	90	117.095.096,00	100,00%	99,46%	**-**	190.485.098,00			DISPAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
			Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun			-															
			Jumlah usaha kreatif bagi usaha pemula			18									18						
	3.26.04.1.02	**Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**-**	**-**	**-**	**39.109.038,00**	**9**	**ekosistem**	**117.408.748,00**	**9**	**116.562.102,00**	**100,00%**	**99,28%**	**-**	**155.671.140,00**			**DISPAR**	
	3.26.04.1.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya Bali yang disusun	-	-		39.109.038,00	1	dokumen	117.408.748,00	1	116.562.102,00	100,00%	99,28%	-	155.671.140,00			DISPAR	
			Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun			-															
	3.26.05	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat**	**45**	**3.486.597.433**	**75**	**1.170.342.848,00**	**44**	**Persen**	**514.559.014,00**	**44**	**499.867.280,00**	**100,00%**	**97,14%**	**119**	**1.670.210.128,00**	**264,44**	**47,90**	**DISPAR**	
	3.26.05.1.01	**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan**	**-**	**-**	**375**	**1.170.342.848,00**	**203**	**orang**	**514.559.014,00**	**203**	**499.867.280,00**	**100,00%**	**97,14%**	**578**	**1.670.210.128,00**			**DISPAR**	
	3.26.05. 1.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan	-	-		227.849.739,00	26	Orang	514.559.014,00	26	499.867.280,00	100,00%	97,14%	-	727.717.019,00			DISPAR	
			Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	-	-			177	Orang		177		100,00%		-					
			Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan																	
			jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisasi			40									40					
	3.26.05.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan	-	-	2	442.384.003,00	-		-	-	-	-	-	2	442.384.003,00			DISPAR	
			Jumlah pengelola desa wisata yang mendapatkan pelatihan			40									40					
			jumlah pengelola kuliner yang mendapatkan pelatihan			40									40					
			jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan			40									40					
			Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata			20									20					
	3.26.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan	-	-	120	342.955.860,00	-		-	-	-	-	-	120	342.955.860,00			DISPAR	
	3.26.05.1.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan	-	-	30	157.153.246,00	-		-	-	-	-	-	30	157.153.246,00			DISPAR	
			Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata			45									45					
	3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**21.795.571.825**	**78**	**12.991.594.668,00**	**79**	**nilai**	**35.179.205.450,00**	**79**	**33.569.660.348,00**	100,00%	**95,42%**	**78**	**46.561.255.016,00**	**97,50%**	**213,63%**	**DISHUT DAN LH**	
	3.28.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun**			**2**	**37.343.425,00**	**2**	**dokumen**	**27.649.550,00**	**2,00**	**26.010.050,00**	100,00%	**94,07%**	**2**	**63.353.475,00**			**DISHUT DAN LH**	
	3.28.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun			1	17.332.925,00	2	dokumen	27.649.550,00	2,00	26.010.050,00	100,00%	94,07%	1	43.342.975,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring yang disusun			1	20.010.500,00	-	-				#VALUE!	#DIV/0!		20.010.500,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**10.469.071.458,00**	**1**	**tahun**	**32.030.002.594,00**	**1,00**	**31.341.784.644,00**	100,00%	**97,85%**	**1**	**41.810.856.102,00**			**DISHUT DAN LH**	
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			1	10.425.365.923,00	1	tahun	31.988.472.824,00	1,00	31.306.379.469,00	100,00%	97,87%	1	41.731.745.392,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN;			196	43.705.535,00	55	dokumen	41.529.770,00	264	35.405.175,00	480,00%	85,25%	460	79.110.710,00			DISHUT DAN LH	
						690		600	dokumen		681		113,50%		1371					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
			Jumlah SPJ yang diverifikasi;			14		14	laporan		14		100,00%		28						
			Jumlah laporan keuangan yang disusun;			27		37	dokumen		37		100,00%		64						
	3.28.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kualitasnya**			**0**	**3.080.600,00**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**		**#DIV/0!**		**3.080.600,00**			**DISHUT DAN LH**	
	3.28.01.1.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pembinaan sumberdaya aparatur			0	3.080.600,00	-	-	-				#DIV/0!		3.080.600,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**215.506.515,00**	**1**	**tahun**	**409.969.410,00**	**1,00**	**243.868.893,00**	100,00%	**59,48%**	**2,00**	**459.375.408,00**			**DISHUT DAN LH**	
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor			1	25.992.400,00	1	tahun	16.266.750,00	1,00	16.051.700,00	100,00%	98,68%	2,00	42.044.100,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor			1	24.323.805,00	1	tahun	53.028.860,00	1,00	51.708.825,00	100,00%	97,51%	2,00	76.032.630,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan			1	69.702.048,00	1	tahun	93.000.000,00	1,00	62.799.000,00	100,00%	67,53%	2,00	132.501.048,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan			1	69.488.262,00	1	tahun	42.001.800,00	1,00	23.713.335,00	100,00%	56,46%	2,00	93.201.597,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan			1	7.827.500,00	-	-	-	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	7.827.500,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman			1	18.172.500,00	1	tahun	26.250.000,00	1,00	18.597.000,00	100,00%	70,85%	2,00	36.769.500,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			0	-	1	tahun	179.422.000,00	1,00	70.999.033,00	100,00%	39,57%	1,00	70.999.033,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**190.131.500,00**	**1**	**tahun**	**149.570.000,00**	**1,00**	**61.334.000,00**	100,00%	**41,01%**	**2,00**	**251.465.500,00**			**DISHUT DAN LH**	
	3.28.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			1	190.131.500,00	1	tahun	149.570.000,00	1,00	61.334.000,00	100,00%	41,01%	2,00	251.465.500,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**455.914.845,00**	**1**	**tahun**	**557.643.032,00**	**1,00**	**516.331.382,00**	100,00%	**92,59%**	**2,00**	**972.246.227,00**			**DISHUT DAN LH**	
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air			1	147.105.855,00	1	tahun	187.200.000,00	1,00	146.623.717,00	100,00%	78,32%	2,00	293.729.572,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor			1	308.808.990,00	1	tahun	370.443.032,00	1,00	369.707.665,00	100,00%	99,80%	2,00	678.516.655,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**1.620.546.325,00**	**1**	**tahun**	**2.004.370.864,00**	**1,00**	**1.380.331.379,00**	100,00%	**68,87%**	**2,00**	**3.000.877.704,00**			**DISHUT DAN LH**	
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			1	554.909.745,00	1	tahun	1.100.543.488,00	1,00	676.964.543,00	100,00%	61,51%	2,00	1.231.874.288,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1	479.620.055,00	1	tahun	231.710.000,00	1,00	227.635.760,00	100,00%	98,24%	2,00	707.255.815,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1	586.016.525,00	1	tahun	672.117.376,00	1,00	475.731.076,00	100,00%	70,78%	2,00	1.061.747.601,00			DISHUT DAN LH	
	3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan**	**2,41**	**6.119.960.700**	**3,61**	**117.328.770,00**	**3,04**	**persen**	**122.507.686,00**	**3,04%**	**118.501.098,00**	100,00%	**96,73%**	**3,61**	**235.829.868,00**	**149,79%**	**3,85%**	**DISHUT DAN LH**	
	3.28.03.1.05	**Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**			**1**	**117.328.770,00**	**1**	**tahun**	**122.507.686,00**	**1,00**	**118.501.098,00**	100,00%	**96,73%**	**2,00**	**235.829.868,00**			**DISHUT DAN LH**	
	3.28.03.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pengendalian ilegal loging,			10	117.328.770,00	20	patroli	122.507.686,00	20	118.501.098,00	100,00%	96,73%	30	235.829.868,00			DISHUT DAN LH	
			perambahan dan kebakaran hutan;			5		2	kasus		2		100,00%		7						
			Jumlah penanganan kasus kehutanan;			5		2	pengguna		2		100,00%		7						
			Jumlah monev penggunaan kawasan			3		1	kajian teknis		1		100,00%		4						
			hutan;			5		5	industri		5		100,00%		10						
	3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Persentase Penurunan Lahan Kritis di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan**	**4,75**	**937.026.300**	**16,24**	**58.835.085,00**	**4,83**	**persen**	**137.662.183,00**	**4,88**	**122.350.463,00**	101,04%	**88,88%**	**1**	**181.185.548,00**	**21,05%**	**19,34%**	**DISHUT DAN LH**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	3.28.06.1.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**			**1**	**58.835.085,00**	**1**	**tahun**	**137.662.183,00**	**1,00**	**122.350.463,00**	100,00%	**88,88%**	**2,00**	**181.185.548,00**			**DISHUT DAN LH**	
	3.28.06.1.01.02	Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah gerakan penanaman bersama Gotong Royong Sad Kerthi;			5	58.835.085,00	4	lokasi	137.662.183,00	4	122.350.463,00	100,00%	88,88%	9	181.185.548,00			DISHUT DAN LH	
			Jumlah monitoring dan evaluasi KBR dan KBD di 4 KPH;			3		4	lokasi		4		100,00%		7					
			Jumlah monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial;			5		25	Kelompok		25		100,00%		30					
			Jumlah pengembangan hutan rakyat pada lahan kritis/agak kritis;					5	hektar		5		100,00%		5					
			Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan;					29	penyuluh		28		96,55%		28					
								3	kelompok		3		100,00%		3					
								5	KTH		5		100,00%		5					
								10	Kelompok		11		110,00%		11					
								5	Kelompok		10		200,00%		10					
	01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**					**5.119.976.664,00**			**651.568.716,00**		**627.048.205,00**		**96,24%**		**5.747.024.869,00**				
	3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**4.056.901.791**	**78**	**2.139.668.139,00**	**79**	**nilai**	**651.568.716,00**	**76**	**627.048.205,00**	96,24%	**96,24%**	**78**	**2.766.716.344,00**	**97,50%**	**68,20%**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	
	3.28.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**2.006.218.146,00**	**1**	**tahun**	**272.287.150,00**	**1,00**	**272.287.150,00**	100,00%	**100,00%**	**2,00**	**2.278.505.296,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			1	2.006.218.146,00	1	tahun	272.287.150,00	1,00	272.287.150,00	100,00%	100,00%	2,00	2.278.505.296,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**16.719.395,00**	**1**	**tahun**	**62.022.100,00**	**1,00**	**54.940.900,00**	100,00%	**88,58%**	**2,00**	**71.660.295,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor			1	1.287.000,00	1	tahun	2.994.700,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	1.287.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor			1	4.355.850,00	1	tahun	26.667.500,00	1,00	25.808.900	100,00%	96,78%	2,00	30.164.750,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan			1	9.616.000,00	1	tahun	30.000.000,00	1,00	27.080.000,00	100,00%	90,27%	2,00	36.696.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan			1	560.545,00	1	tahun	2.359.900,00	1,00	2.052.000,00	100,00%	86,95%	2,00	2.612.545,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan			1	900.000,00	-	-		0,3		#VALUE!	#DIV/0!	1,30	900.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**53.847.050,00**	**1**	**tahun**	**62.776.348,00**	**1,00**	**57.529.009,00**	100,00%	**91,64%**	**2,00**	**111.376.059,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air			1	14.573.602,00	1	tahun	22.800.000,00	1,00	18.250.561,00	100,00%	80,05%	2,00	32.824.163,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor			1	39.273.448,00	1	tahun	39.976.348,00	1,00	39.278.448,00	100,00%	98,25%	2,00	78.551.896,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**62.883.548,00**	**1**	**tahun**	**254.483.118,00**	**1,00**	**242.291.146,00**	100,00%	**95,21%**	**2,00**	**305.174.694,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			1	25.407.100,00	1	tahun	169.550.222,00	1,00	159.618.250,00	100,00%	94,14%	2,00	185.025.350,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1	37.476.448,00	1	tahun	84.932.896,00	1,00	82.672.896,00	100,00%	97,34%	2,00	120.149.344,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan**			**3,61%**	**1.875.530.625,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	#VALUE!	**#DIV/0!**		**1.875.530.625,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	
	3.28.03.1.04	**Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**			**1**	**1.875.530.625,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	#VALUE!	**#DIV/0!**		**1.875.530.625,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat			300	1.572.573.525,00	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		1.572.573.525,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.03.1.04.06	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pembangunan Sumber Benih Unggul			1	302.957.100,00	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		302.957.100,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan**			**16,24%**	**1.104.777.900,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	#VALUE!	**#DIV/0!**		**1.104.777.900,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	
	3.28.05.1.01	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan**			**1**	**1.104.777.900,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	#VALUE!	**#DIV/0!**		**1.104.777.900,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	
	3.28.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif			7	1.104.777.900,00	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		1.104.777.900,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	
	01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**					**5.317.776.609,00**			**2.693.333.030,00**		**2.629.296.794,00**		**97,62%**		**7.947.073.403,00**				
	3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**6.046.436.459**	**78**	**4.114.193.109,00**	**79**	**nilai**	**944.122.430,00**	**79**	**908.186.194,00**	100,00%	**96,19%**	**78**	**5.022.379.303,00**	**97,50%**	**83,06%**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**	
	3.28.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**3.845.263.474,00**	**1**	**tahun**	**523.844.180,00**	**1,00**	**523.844.180,00**	100,00%	**100,00%**	**2,00**	**4.369.107.654,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**	
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			1	3.845.263.474,00	1	tahun	523.844.180,00	1,00	523.844.180,00	100,00%	100,00%	2,00	4.369.107.654,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**81.373.362,00**	**1**	**tahun**	**78.718.300,00**	**1,00**	**73.272.132,00**	100,00%	**93,08%**	**2,00**	**154.645.494,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**	
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor			1	4.293.850,00	1	tahun	2.219.500,00	1,00	1.945.000,00	100,00%	87,63%	2,00	6.238.850,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor			1	15.448.017,00	1	tahun	10.998.800,00	1,00	10.679.000,00	100,00%	97,09%	2,00	26.127.017,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan			1	19.580.000,00	1	tahun	25.000.000,00	1,00	20.680.000,00	100,00%	82,72%	2,00	40.260.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan			1	2.288.495,00	1	tahun	2.500.000,00	1,00	1.968.132,00	100,00%	78,73%	2,00	4.256.627,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan			1	1.703.000,00	-	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	1.703.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman			1	630.000,00	-	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	630.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			1	37.430.000,00	1	tahun	38.000.000,00	1,00	38.000.000,00	100,00%	100,00%	2,00	75.430.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**43.096.926,00**	**1**	**tahun**	**143.481.502,00**	**1,00**	**120.362.500,00**	100,00%	**83,89%**	**2,00**	**163.459.426,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**	
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air			1	5.033.240,00	1	tahun	28.495.242,00	1,00	5.996.266,00	100,00%	21,04%	2,00	11.029.506,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor			1	38.063.686,00	1	tahun	114.986.260,00	1,00	114.366.234,00	100,00%	99,46%	2,00	152.429.920,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**144.459.347,00**	**1**	**tahun**	**198.078.448,00**	**1,00**	**190.707.382,00**	100,00%	**96,28%**	**2,00**	**335.166.729,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**	
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			1	143.034.347,00	1	tahun	188.088.448,00	1,00	180.902.382,00	100,00%	96,18%	2,00	323.936.729,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1	1.425.000,00	1	tahun	9.990.000,00	1,00	9.805.000,00	100,00%	98,15%	2,00	11.230.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan**	**0,25**	**4.332.405.000**	**3,61%**	**1.203.583.500,00**	**0,31**	**persen**	**1.749.210.600,00**	**0,31**	**1.721.110.600,00**	100,00%	**98,39%**	**0,31**	**2.924.694.100,00**	**124,00%**	**67,51%**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**	
	3.28.03.1.04	**Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**			**1**	**1.203.583.500,00**	**1**	**tahun**	**1.749.210.600,00**	**1,00**	**1.721.110.600,00**	100,00%	**98,39%**	**2,00**	**2.924.694.100,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**	
	3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat					100	ha	1.187.210.600,00	100	1.187.210.600,00	100,00%	100,00%	100	1.187.210.600,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	
	3.28.03.1.04.05	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun			30	1.203.583.500,00	10	unit	562.000.000,00	10	533.900.000,00	100,00%	95,00%	40	1.737.483.500,00				
	01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**					**8.961.030.547,00**			**4.895.003.727,00**		**4.812.327.935,00**		**98,31%**		**13.773.358.482,00**				
	3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**9.286.072.319**	**78**	**7.171.251.172,00**	**79**	**nilai**	**1.470.777.327,00**	**79**	**1.412.650.110,00**	100,00%	**96,05%**	**78**	**8.583.901.282,00**	**97,50%**	**92,44%**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	
	3.28.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**6.607.414.961,00**	**1**	**tahun**	**830.955.000,00**	**1,00**	**830.955.000,00**	100,00%	**100,00%**	**2,00**	**7.438.369.961,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			1	6.607.414.961,00	1	tahun	830.955.000,00	1,00	830.955.000,00	100,00%	100,00%	2,00	7.438.369.961,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**60.888.554,00**	**1**	**tahun**	**62.594.595,00**	**1,00**	**59.333.044,00**	100,00%	**94,79%**	**2,00**	**120.221.598,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor			1	500.005,00	1	tahun	2.982.150,00	1,00	2.778.441,00	100,00%	93,17%	2,00	3.278.446,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor			1	8.885.689,00	1	tahun	19.116.245,00	1,00	17.342.513,00	100,00%	90,72%	2,00	26.228.202,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan			1	20.000.000,00	1	tahun	38.000.000,00	1,00	37.680.000,00	100,00%	99,16%	2,00	57.680.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan			1	2.032.860,00	1	tahun	2.496.200,00	1,00	1.532.090,00	100,00%	61,38%	2,00	3.564.950,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan			1	380.000,00	-	-	-	0,3		#VALUE!	#DIV/0!	1,30	380.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman			1	3.060.000,00	-	-	-	0,3		#VALUE!	#DIV/0!	1,30	3.060.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			1	26.030.000,00	1	tahun		0,3		30,00%	#DIV/0!	1,30	26.030.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**53.807.973,00**	**1**	**tahun**	**58.566.548,00**	**1,00**	**50.643.657,00**	100,00%	**86,47%**	**2,00**	**104.451.630,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air			1	13.068.800,00	1	tahun	18.600.000,00	1,00	10.962.483,00	100,00%	58,94%	2,00	24.031.283,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor			1	40.739.173,00	1	tahun	39.966.548,00	1,00	39.681.174,00	100,00%	99,29%	2,00	80.420.347,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**449.139.684,00**	**1**	**tahun**	**518.661.184,00**	**1,00**	**471.718.409,00**	100,00%	**90,95%**	**2,00**	**920.858.093,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			1	394.926.684,00	1	tahun	508.681.184,00	1,00	461.948.409,00	100,00%	90,81%	2,00	856.875.093,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1	49.613.000,00	-	-	-	0,50	-	#VALUE!	#DIV/0!	1,50	49.613.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1	4.600.000,00	1	tahun	9.980.000,00	1,00	9.770.000,00	100,00%	97,90%	2,00	14.370.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur**	**0,38**	**4.332.405.000**	**3,61%**	**1.280.887.375,00**	**0,48**	**persen**	**3.024.226.500,00**	**0,48**	**3.019.830.995,00**	100,00%	**99,85%**	**3,61**	**4.300.718.370,00**	**950,00%**	**99,27%**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	
	3.28.03.1.04	**Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**			**0**	**1.280.887.375,00**	**1**	**tahun**	**3.024.226.500,00**	**1,00**	**3.019.830.995,00**	100,00%	**99,85%**	**1,00**	**4.300.718.370,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	
	3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat			250	1.280.887.375,00	250	ha	2.968.026.500,00	250	2.966.440.995,00	100,00%	99,95%	500	4.247.328.370,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	3.28.03.1.04.05	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun					1	unit	56.200.000,00	1	53.390.000,00	100,00%		1	53.390.000,00				
	3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Timur**	**2,82**	**1.746.937.500**	**16,24%**	**508.892.000,00**	**2,25**	**persen**	**399.999.900,00**	**2,25**	**379.846.830,00**	100,00%	**94,96%**	**16,24**	**888.738.830,00**	**575,89%**	**50,87%**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	
	3.28.05.1.01	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**			**1**	**508.892.000,00**	**1**	**tahun**	**399.999.900,00**	**1**	**379.846.830,00**	100,00%	**94,96%**	**2,00**	**888.738.830,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	
	3.28.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif			3	508.892.000,00	2	kelompok	399.999.900,00	2	379.846.830,00	100,00%	94,96%	5	888.738.830,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	
	01.00	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**				**0**	**6.763.551.257,00**			**1.307.262.001,00**		**1.266.381.715,00**		**96,87%**		**8.029.932.972,00**				
	3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**9.247.293.070**	**78**	**6.232.715.457,00**	**79**	**nilai**	**1.307.262.001,00**	**79**	**1.266.381.715,00**	100,00%	**96,87%**	**78**	**7.499.097.172,00**	**97,50%**	**81,10%**	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**	
	3.28.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**5.796.949.141,00**	**1**	**tahun**	**723.730.721,00**	**1,00**	**723.730.721,00**	100,00%	**100,00%**	**2,00**	**6.520.679.862,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**	
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			1	5.796.949.141,00	1	tahun	723.730.721,00	1	723.730.721,00	100,00%	100,00%	2,00	6.520.679.862,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	3.28.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**38.799.650,00**	**1**	**tahun**	**57.083.100,00**	**1**	**55.915.740,00**	100,00%	**97,95%**	**2,00**	**94.715.390,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**	
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor			1	2.846.800,00	1	tahun	2.999.300,00	1	2.999.300,00	100,00%	100,00%	2,00	5.846.100,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor			1	10.188.150,00	1	tahun	19.833.800,00	1	18.981.940,00	100,00%	95,71%	2,00	29.170.090,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan			1	14.500.000,00	1	tahun	33.000.000,00	1	32.950.000,00	100,00%	99,85%	2,00	47.450.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan			1	2.182.700,00	1	tahun	1.250.000,00	1	984.500,00	100,00%	78,76%	2,00	3.167.200,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan			1	1.292.000,00	-	-		0,3		#VALUE!	#DIV/0!	1,30	1.292.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			1	7.790.000,00	-	-		0,3		#VALUE!	#DIV/0!	1,30	7.790.000,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	3.28.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**60.317.282,00**	**1**	**tahun**	**63.976.348,00**	**1,00**	**58.934.972,00**	100,00%	**92,12%**	**2,00**	**119.252.254,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**	
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air			1	18.770.234,00	1	tahun	24.000.000,00	1	18.958.624,00	100,00%	78,99%	2,00	37.728.858,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor			1	41.547.048,00	1	tahun	39.976.348,00	1	39.976.348,00	100,00%	100,00%	2,00	81.523.396,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	3.28.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**336.649.384,00**	**1**	**tahun**	**462.471.832,00**	**1**	**427.800.282,00**	100,00%	**92,50%**	**2,00**	**764.449.666,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**	
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			1	36.837.800,00	1	tahun	153.040.248,00	1	119.083.698,00	100,00%	77,81%	2,00	155.921.498,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1	299.811.584,00	1	tahun	309.431.584,00	1	308.716.584,00	100,00%	99,77%	2,00	608.528.168,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan**			**16,24%**	**530.835.800,00**	**-**		**-**		**-**	#VALUE!	**#DIV/0!**		**530.835.800,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**	
	3.28.05.1.01	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**			**1**	**530.835.800,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	#VALUE!	**#DIV/0!**		**530.835.800,00**			**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**	
	3.28.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif			3	530.835.800,00	-	-	-		-	#VALUE!	#DIV/0!		530.835.800,00			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	
	01.00	**UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**					**1.860.162.040,00**			**435.921.218,00**		**422.724.169,00**		**96,97%**		**2.282.886.209,00**				
	3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**3.114.082.150**	**78**	**1.808.210.930,00**	**79**	**nilai**	**435.921.218,00**	**79**	**422.724.169,00**	100,00%	**96,97%**	**78**	**2.230.935.099,00**	**97,50%**	**71,64%**	**UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**	
	3.28.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**1.712.486.209,00**	**1**	**tahun**	**251.684.370,00**	**1**	**251.684.370,00**	100,00%	**100,00%**	**2,00**	**1.964.170.579,00**			**UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**	
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			1	1.712.486.209,00	1	tahun	251.684.370,00	1	251.684.370,00	100,00%	100,00%	2,00	1.964.170.579,00			UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
	3.28.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**25.525.673,00**	**1**	**tahun**	**48.859.200,00**	**1**	**44.109.375,00**	100,00%	**90,28%**	**2,00**	**69.635.048,00**			**UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**	
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor			1	1.796.000,00	1	tahun	2.470.100,00	1	2.467.960,00	100,00%	99,91%	2,00	4.263.960,00			UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor			1	6.831.545,00	1	tahun	28.895.200,00	1	27.879.280,00	100,00%	96,48%	2,00	34.710.825,00			UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan			1	12.657.080,00	1	tahun	15.000.000,00	1	11.638.000,00	100,00%	77,59%	2,00	24.295.080,00			UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan			1	2.550.048,00	1	tahun	2.493.900,00	1	2.124.135,00	100,00%	85,17%	2,00	4.674.183,00			UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan			1	1.691.000,00	-	-	-	0		#VALUE!	#DIV/0!	1,30	1.691.000,00			UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
	3.28.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**38.768.248,00**	**1**	**tahun**	**39.517.648,00**	**1**	**39.329.908,00**	100,00%	**99,52%**	**2,00**	**78.098.156,00**			**UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**	
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor			1	38.768.248,00	1	tahun	39.517.648,00	1	39.329.908,00	100,00%	99,52%	2,00	78.098.156,00			UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
	3.28.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**31.430.800,00**	**1**	**tahun**	**95.860.000,00**	**1**	**87.600.516,00**	100,00%	**91,38%**	**2,00**	**119.031.316,00**			**UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**	
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			1	31.430.800,00	1	tahun	95.860.000,00	1	87.600.516,00	100,00%	91,38%	2,00	119.031.316,00			UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
	3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan**			**3,61%**	**51.951.110,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#VALUE!	**#DIV/0!**		**51.951.110,00**			**UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**	
	3.28.04.1.0	**Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**			**1**	**51.951.110,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#VALUE!	**#DIV/0!**		**51.951.110,00**			**UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**	
	3.28.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Dokumen Revisi Blok yang dikoordinasikan;			1	51.951.110,00	-	-	-			#VALUE!	#DIV/0!		51.951.110,00			UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
			Jumlah Patroli Pengamanan Hutan			207	-	-	-				#VALUE!	#DIV/0!		-				
	01.00	**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**					**1.926.646.004,34**			**541.627.598,00**		**532.584.928,00**		**98,33%**		**2.459.230.932,34**				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**2.162.467.575**	**78**	**1.759.551.860,34**	**79**	**nilai**	**541.627.598,00**	**79**	**532.584.928,00**	100,00%	**98,33%**	**78**	**2.292.136.788,34**	**97,50%**	**106,00%**	**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	
	2.11.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**1.351.473.119,00**	**1**	**tahun**	**178.310.848,00**	**1,00**	**178.310.848,00**	100,00%	**100,00%**	**2,00**	**1.529.783.967,00**			**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	
	2.11.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			1	1.351.473.119,00	1	tahun	178.310.848,00	1,00	178.310.848,00	100,00%	100,00%	2,00	1.529.783.967,00			UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**9.828.975,00**	**1**	**tahun**	**7.368.510,00**	**1,00**	**6.734.500,00**	100,00%	**91,40%**	**2,00**	**16.563.475,00**			**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	
	2.11.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor			1	7.355.275,00	1	tahun	3.330.510,00	1,00	3.206.000,00	100,00%	96,26%	2,00	**10.561.275,00**			UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan			1	2.473.700,00	1	tahun	4.038.000,00	1,00	3.528.500,00	100,00%	87,38%	2,00	**6.002.200,00**			UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**26.334.000,00**	**1**	**tahun**	**17.286.000,00**	**1,00**	**16.081.500,00**	100,00%	**93,03%**	**2,00**	**42.415.500,00**			**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	
	2.11.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			1	26.334.000,00	1	tahun	17.286.000,00	1,00	16.081.500,00	100,00%	93,03%	2,00	**42.415.500,00**			UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**371.915.766,34**	**1**	**tahun**	**338.662.240,00**	**1,00**	**331.458.080,00**	100,00%	**97,87%**	**2,00**	**703.373.846,34**			**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	
	2.11.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1	248.774.870,34	-	-	-	0,3		#VALUE!	#DIV/0!	1,30	**248.774.870,34**			UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	
	2.11.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1	123.140.896,00	1	tahun	338.662.240,00	1,00	331.458.080,00	100,00%	97,87%	2,00	**454.598.976,00**			UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	
	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan**			**92**	**167.094.144,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	#VALUE!	**#DIV/0!**		**167.094.144,00**			**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	
	2.11.03.1.01	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi**			**20**	**167.094.144,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	#VALUE!	**#DIV/0!**		**167.094.144,00**			**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	
	2.11.03.1.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi			20	167.094.144,00	-	-	-			#VALUE!	#DIV/0!		**167.094.144,00**			UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	
	01.00	**UPTD Pengelolaan Sampah**					**11.267.065.165,00**			**10.105.469.544,00**		**7.620.753.696,00**		**75,41%**		**18.887.818.861,00**				
	2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80**	**3.722.060.662**	**78**	**1.908.640.773,00**	**79**	**nilai**	**738.720.488,00**	**79**	**678.744.875,00**	100,00%	**91,88%**	**78**	**2.587.385.648,00**	**97,50%**	**69,51%**	**UPTD Pengelolaan Sampah**	
	2.11.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**1.415.062.599,00**	**1**	**tahun**	**208.297.000,00**	**1**	**208.297.000,00**	100,00%	**100,00%**	**2,00**	**1.623.359.599,00**			**UPTD Pengelolaan Sampah**	
	2.11.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			1	1.415.062.599,00	1	tahun	208.297.000,00	1	208.297.000,00	100,00%	100,00%	2,00	1.623.359.599,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			**1**	**43.459.665,00**	**1**	**tahun**	**73.874.800,00**	**1**	**64.658.575,00**	100,00%	**87,52%**	**2,00**	**108.118.240,00**			**UPTD Pengelolaan Sampah**	
	2.11.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor			1	4.268.000,00	1	tahun	3.000.000,00	1	2.958.150,00	100,00%	98,61%	2,00	7.226.150,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor			1	9.527.375,00	1	tahun	9.999.800,00	1	9.157.975,00	100,00%	91,58%	2,00	18.685.350,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan			1	25.831.494,00	1	tahun	55.875.000,00	1	48.042.450,00	100,00%	85,98%	2,00	73.873.944,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan			1	3.832.796,00	1	tahun	5.000.000,00	1	4.500.000,00	100,00%	90,00%	2,00	8.332.796,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**1**	**408.308.510,00**	**1**	**tahun**	**456.548.688,00**	**1**	**405.789.300,00**	100,00%	**88,88%**	**2,00**	**814.097.810,00**			**UPTD Pengelolaan Sampah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.11.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			1	297.190.510,00	1	tahun	346.278.688,00	1	297.848.742,00	100,00%	86,01%	2,00	595.039.252,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1	97.343.000,00	1	tahun	100.000.000,00	1	97.935.558,00	100,00%	97,94%	2,00	195.278.558,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1	13.775.000,00	1	tahun	10.270.000,00	1	10.005.000,00	100,00%	97,42%	2,00	23.780.000,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional**	**100**	**16.543.309.650**	**100**	**9.358.424.392,00**	**100**	**persen**	**9.366.749.056,00**	**100,00**	**6.942.008.821,00**	100,00%	**74,11%**	**100**	**16.300.433.213,00**	**100,00%**	**98,53%**	**UPTD Pengelolaan Sampah**	
	2.11.11.1.01	**Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional**			**1**	**9.358.424.392,00**	**1**	**tahun**	**9.366.749.056,00**	**1**	**6.942.008.821,00**	100,00%	**74,11%**	**2,00**	**16.300.433.213,00**			**UPTD Pengelolaan Sampah**	
	2.11.11.1.01.02	Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional			1	2.767.993.385,00	1	tahun	3.083.508.596,00	1	2.734.674.188,00	100,00%	88,69%	2,00	5.502.667.573,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.11.1.01.03	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional;			1	6.242.879.943	1	tahun	6.169.646.700,00	1	4.098.016.678,00	100,00%	66,42%	2,00	10.340.896.621,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
								1	paket		1		100,00%		1,00					
	2.11.11.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah penanganan khusus di TPA Regional			1	45.095.964,00	1	tahun	9.068.110,00	1	8.706.180,00	100,00%	96,01%	2,00	53.802.144,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.11.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah koordinasi dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA Regional			1	18.385.100,00	1	tahun	30.875.650,00	1	28.198.570,00	100,00%	91,33%	2,00	46.583.670,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	2.11.11.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kerjasama dengan pihak lain di TPA Regional			1	284.070.000,00	1	tahun	73.650.000,00	1	72.413.205,00	100,00%	98,32%	2,00	356.483.205,00			UPTD Pengelolaan Sampah	
	5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**82**	**63.337.465.830,36**			**Nilai 82 (100%)**		**17.152.664.247,00**	**0**	**16.097.575.611,12**	**#VALUE!**	**93,85%**	**0**	**16.097.575.611,12**	**0%**	**25%**	**BAPPEDA**	
	5.01.01.101	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**840**	**176.151.956**	**588**	**dokumen**	**263.275.530,00**	**588**	**243.684.335,00**	**100,00%**	**92,56%**	**1428**	**419.836.291,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman			7	164.435.456	91	dokumen	239.812.600,00	91	229.262.624,00	100,00%	**95,60%**	**98**	**393.698.080,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah			59	3.292.400	0		-	0	-			**0**	**3.292.400,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah			59	954.100	0		-	0	-			**0**	**954.100,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah			1	1.310.150	0		-	0	-			**0**	**1.310.150,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah			1	1.507.450	0		-	0	-			**0**	**1.507.450,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5	1.958.600	497	dokumen	23.462.930,00	497	14.421.711,00	100,00%	**61,47%**	**502**	**16.380.311,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			708	2.693.800		dokumen						**0**	**2.693.800,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.01.102	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1354**	**11.541.908.284**	**766**	**dokumen**	**13.414.410.139,00**	**766**	**12.999.900.018,00**	**100,00%**	**96,91%**	**2120**	**24.541.808.302,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN			48	11.267.272.591	48	dokumen	13.128.389.548,00	48	12.719.682.868,00	**100,00%**	**96,89%**	**96**	**23.986.955.459,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.102.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi			1288	193.809.745	700	dokumen	198.117.995,00	700	196.369.136,00	**100,00%**	**99,12%**	**1988**	**390.178.881,00**			BAPPEDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.01.01.102.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan			16	79.584.298	18	laporan	87.902.596,00	18	83.848.014,00	100,00%	95,39%	34	163.432.312,00			BAPPEDA	
	5.01.01.102.04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan Hasil Pemeriksaaan			2	1.241.650								0	1.241.650,00			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.01.106	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah**			**66**	**704.825.646**	**62**	jenis	**1.165.865.986,00**	**62**	**904.622.700,00**	**100,00%**	**77,59%**	**128**	**1.609.448.346,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik			15	45.221.474	10	jenis	43.703.698,00	10	43.128.568,00	**100,00%**	**98,68%**	**25**	**88.350.042,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dan berfungsi baik			33	249.982.349	30	jenis	474.633.548,00	30	320.642.183,00	**100,00%**	**67,56%**	**63**	**570.624.532,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor			3	120.351.762	3	jenis	126.276.448,00	3	123.026.448,00	**100,00%**	**97,43%**	**6**	**243.378.210,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan			9	47.338.181	11	jenis	73.884.948,00	11	66.820.112,00	**100,00%**	**90,44%**	**20**	**114.158.293,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			1	74.903.449	1	jenis	74.916.448,00	1	74.916.448,00	**100,00%**	**100,00%**	**2**	**149.819.897,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu			2	48.083.448	2	jenis	52.926.448,00	2	52.668.948,00	**100,00%**	**99,51%**	**4**	**100.752.396,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3	118.944.983	5	jenis	319.524.448,00	5	223.419.993,00	**100,00%**	**69,92%**	**8**	**342.364.976,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.107	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan**			**2**	**141.847.944**	**6**	**jenis**	**-**	**0**	**-**			**0**	**141.847.944,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai			0	37.476.448		jenis						0	37.476.448,00			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap pakai			2	104.371.496		jenis						0	104.371.496,00			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.01.108	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**9**	**784.810.994**	**9**	**jenis**	**965.606.216,00**	**1**	**815.287.899,00**	**11,11%**	**84,43%**	**10**	**1.600.098.893,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia			300	3.000.000	300	materai	40.476.448,00	300	40.476.448,00	**100,00%**	**100,00%**	**600**	**43.476.448,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu			4	212.389.259	4	jenis	342.276.448,00	4	201.866.879,00	**100,00%**	**58,98%**	**8**	**414.256.138,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu			4	569.421.735	4	jenis	582.853.320,00	4	572.944.572,00	**100,00%**	**98,30%**	**8**	**1.142.366.307,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.109	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik**			**46**	**920.267.552**	**47**	**jenis**	**1.343.506.376,00**	**47**	**1.134.080.659,12**	**100,00%**	**84,41%**	**93**	**2.054.348.211,12**			**BAPPEDA**	
	5.01.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai			35	758.147.853	35	jenis	779.224.480,00	35	618.519.340,00	**100,00%**	**79,38%**	**70**	**1.376.667.193,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan mesin dalam kondisi baik			10	89.369.699	10	jenis	141.986.448,00	10	94.792.408,00	**100,00%**	**66,76%**	**20**	**184.162.107,00**			BAPPEDA	
	5.01.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik			1	72.750.000	2	unit	422.295.448,00	2	420.768.911,12	**100,00%**	**99,64%**	**3**	**493.518.911,12**			BAPPEDA	
	5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan**	**100**	**25.719.853.036,00**	**51**	**4.961.100.799**	**40**		**2.978.680.162,00**	**40**	**2.696.217.764,00**	**100,00%**	**90,52%**	**91**	**7.657.318.563,00**	**91%**	**30%**	**BAPPEDA**	
	5.01.02.101	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi**			**8**	**2.771.245.495**	**3**	**dokumen**	**2.148.234.380,00**	**3**	**1.975.144.334,00**	**100,00%**	**91,94%**	**11**	**4.746.389.829,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Kesepakatan Forum Konsultasi Publik			2	2.720.000								0	2.720.000,00			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang			3	42.279.500	1	dokumen	53.568.940,00	1	22.702.100,00	**100,00%**	**42,38%**	**4**	**64.981.600,00**			BAPPEDA	
	5.01.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun dan Ditetapkan			3	2.726.245.995	2	dokumen	2.094.665.440,00	2	1.952.442.234,00	**100,00%**	**93,21%**	**5**	**4.678.688.229,00**			BAPPEDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.01.02.102	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**			**6**	**379.583.376**	**6**	**dokumen**	**357.236.742,00**	**6**	**327.069.963,00**	**100,00%**	**91,56%**	**12**	**706.653.339,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.02.102.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah			4	129.651.408	4	dokumen	246.343.626,00	4	219.128.408,00	**100,00%**	**88,95%**	**8**	**348.779.816,00**			BAPPEDA	
	5.01.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD			2	249.931.968	2	dokumen	110.893.116,00	2	107.941.555,00	**100,00%**	**97,34%**	**4**	**357.873.523,00**			BAPPEDA	
	5.01.02.103	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah**			**33**	**1.810.271.928**	**31**	**dokumen**	**473.209.040,00**	**31**	**394.003.467,00**	**100,00%**	**83,26%**	**64**	**2.204.275.395,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi			8	86.461.460	8	dokumen	142.021.200,00	8	79.354.290,00	**100,00%**	**55,87%**	**16**	**165.815.750,00**			BAPPEDA	
	5.01.02.103.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah			1	1.457.900								**0**	**1.457.900,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			5	258.455.879	5	laporan	309.568.240,00	5	296.714.677,00	**100,00%**	**95,85%**	**10**	**555.170.556,00**			BAPPEDA	
	5.01.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			19	1.463.896.689	18	rekomendasi	21.619.600,00	18	17.934.500,00	**100,00%**	**82,95%**	**37**	**1.481.831.189,00**			BAPPEDA	
	5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**6.211.698.937,00**	**29**	**1.866.791.592**	**26**		**2.010.262.797,00**	**26**	**1.768.060.524,00**	**100,00%**	**87,95%**	**55**	**3.634.852.116,00**	**55%**	**59%**	**BAPPEDA**	
			Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**100**	**3.541.741.149,00**										**0**	**-**	**0%**		**BAPPEDA**	
			Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**100**	**5.655.181.588,00**										**0**	**-**	**0%**		**BAPPEDA**	
	5.01.03.101	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			**10**	**577.401.550**	**9**	**dokumen**	**667.077.160,00**	**9**	**626.110.297,00**	**100,00%**	**93,86%**	**19**	**1.203.511.847,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dan diasistensi			2	80.290.548	1	dokumen	84.967.696,00	1	82.390.900,00	**100,00%**	**96,97%**	**3**	**162.681.448,00**			BAPPEDA	
	5.01.03.101.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi sesuai aturan			1	39.736.749	1	dokumen	40.529.728,00	1	39.555.451,00	**100,00%**	**97,60%**	**2**	**79.292.200,00**			BAPPEDA	
	5.01.03.101.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1	44.426.709	1	dokumen	44.527.748,00	1	42.844.948,00	**100,00%**	**96,22%**	**2**	**87.271.657,00**			BAPPEDA	
	5.01.03.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1	39.883.149	1	dokumen	40.341.648,00	1	39.438.946,00	**100,00%**	**97,76%**	**2**	**79.322.095,00**			BAPPEDA	
	5.01.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan dan diasistensi			1	53.046.749	1	dokumen	89.572.488,00	1	73.515.091,00	**100,00%**	**82,07%**	**2**	**126.561.840,00**			BAPPEDA	
	5.01.03.101.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi sesuai aturan			1	41.819.499	1	dokumen	44.966.908,00	1	42.825.201,00	**100,00%**	**95,24%**	**2**	**84.644.700,00**			BAPPEDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.01.03.101.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			2	235.725.298	2	dokumen	272.469.196,00	2	257.427.361,00	100,00%	94,48%	4	493.152.659,00			BAPPEDA	
	5.01.03.101.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1	42.472.849	1	dokumen	49.701.748,00	1	48.112.399,00	100,00%	96,80%	2	90.585.248,00			BAPPEDA	
	5.01.03.102	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**			**9**	**475.256.362**	**4**	**dokumen**	**655.640.162,00**	**4**	**526.204.560,00**	**100,00%**	**80,26%**	**13**	**1.001.460.922,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.03.102.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan dan diasistensi			2	158.418.806								**0**	**158.418.806,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.03.102.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi sesuai aturan			1	2.908.500								**0**	**2.908.500,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.03.102.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			1	3.937.360	1	dokumen	168.775.054,00	1	145.025.694,00	100,00%	85,93%	2	148.963.054,00			BAPPEDA	
	5.01.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			1	100.077.748	1	dokumen	196.484.514,00	1	163.824.652,00	100,00%	83,38%	2	263.902.400,00			BAPPEDA	
	5.01.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan dan diasistensi			1	78.536.698								**0**	**78.536.698,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.03.102.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistensi sesuai aturan			1	1.152.373								**0**	**1.152.373,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.03.102.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			1	1.512.128	1	dokumen	8.778.500,00	1	6.214.600,00	100,00%	70,79%	2	7.726.728,00			BAPPEDA	
	5.01.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			1	128.712.749	1	dokumen	281.602.094,00	1	211.139.614,00	100,00%	74,98%	2	339.852.363,00			BAPPEDA	
	5.01.03.103	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi**			**10**	**814.133.680**	**13**	**dokumen**	**687.545.475,00**	**13**	**615.745.667,00**	**100,00%**	**89,56%**	**23**	**1.429.879.347,00**			**BAPPEDA**	
	5.01.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan dan diasistensi			1	194.520.765	5	dokumen	235.629.195,00	5	216.841.440,00	100,00%	92,03%	6	411.362.205,00			BAPPEDA	
	5.01.03.103.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi sesuai aturan			1	3.789.160								**0**	**3.789.160,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.03.103.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			1	8.259.070								**0**	**8.259.070,00**			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			2	119.663.810	1	dokumen	40.416.740,00	1	37.289.825,00	100,00%	92,26%	3	156.953.635,00			BAPPEDA	
	5.01.03.103.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Koordinasikan dan diasistensi			1	377.883.495	5	dokumen	236.831.540,00	5	222.762.736,00	100,00%	94,06%	6	600.646.231,00			BAPPEDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.01.03.103.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi sesuai aturan			1	6.852.230								0	6.852.230,00			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.03.103.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			1	2.013.100								0	2.013.100,00			BAPPEDA	Tidak di anggarkan di tahun 2022
	5.01.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			2	101.152.050	2	dokumen	174.668.000,00	2	138.851.666,00	100,00%	79,49%	4	240.003.716,00			BAPPEDA	
	5.05.0.00.0.00.02.00	**Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali**		**0**		**92,772254**	**19.686.977.180,00**	**100**	**Persen**	**21.945.908.149,00**	**95,02**	**20.853.813.037**	**95,02%**	**95,02%**	**187,80**	**40.540.790.217**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**78 Nilai**	**47.196.828.864**	**92,814528**	**11.834.498.807,00**	**100**	**Persen**	**12.820.054.549,00**	**94,01**	**12.052.295.173,00**	**94,01%**	**94,01%**	**186,83**	**23.886.793.980**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.01	**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**					**22.632.450,00**	**17**	**dokumen**	**65.692.750,00**	**17**	**64.220.600**	**97,76%**	**97,76%**	**17,00**	**86.853.050**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.01.5.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu			1	20.035.000,00	12	dokumen	27.660.750,00	**12**	27.010.200	**97,65%**	**97,65%**	**13,00**	**47.045.200**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.01.5.05.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan dokumen Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisas realisasi kinerja SKPD disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			1	2.597.450,00	5	dokumen	38.032.000,00	**5**	37.210.400	**97,84%**	**97,84%**	**6,00**	**39.807.850**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.02	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**					**8.476.564.188,00**	**630**	**dokumen**	**9.579.050.835,00**	**630**	**8.938.444.187**	**93,31%**	**93,31%**	**630,00**	**17.415.008.375**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.02.5.05.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar			1	8.469.466.138,00	28	dokumen	9.564.395.435,00	**28**	8.925.744.187	**93,32%**	**93,32%**	**29,00**	**17.395.210.325**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.02.5.05.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi			1	5.582.150,00	600	dokumen	9.593.400,00	**600**	8.738.400	**91,09%**	**91,09%**	**601,00**	**14.320.550**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.02.5.05.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi keuangan			0,8	1.269.250,00	5	laporan	2.304.400,00	**5**	1.859.400	**80,69%**	**80,69%**	**5,80**	**3.128.650**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.02.5.05.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan			1	246.650,00	1	dokumen	2.757.600,00	**1**	2.102.200	**76,23%**	**76,23%**	**2,00**	**2.348.850**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.06	**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**					**264.357.925,00**	**63 100**	**jenis persen**	**384.082.800,00**	**63 100**	**364.466.579,00**	**94,89%**	**94,89%**	**100,00**	**628.824.504**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.06.5.05.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			1	23.285.400,00	10	jenis	12.524.000,00	**10**	12.383.000	**98,87%**	**98,87%**	**11,00**	**35.668.400**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.06.5.05.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan			1	40.884.050,00	28	jenis	34.752.900,00	**28**	32.817.500	**94,43%**	**94,43%**	**29,00**	**73.701.550**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.06.5.05.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1	106.342.000,00	9	jenis	142.416.500,00	**9**	137.192.250	**96,33%**	**96,33%**	**10,00**	**243.534.250**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.06.5.05.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1	9.999.900,00	12	jenis	11.940.400,00	**12**	10.872.500	**91,06%**	**91,06%**	**13,00**	**20.872.400**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.06.5.05.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan			1	14.508.625,00	4	jenis	37.200.000,00	**4**	36.300.000	**97,58%**	**97,58%**	**5,00**	**50.808.625**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.06.5.05.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	69.337.950,00	100	persen	145.249.000,00	**100**	134.901.329	**92,88%**	**92,88%**	**101,00**	**204.239.279**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.07	**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**					**280.059.200,00**	**7**	**jenis**	**79.520.000,00**	**7**	**67.640.700**	**85,06%**	**85,06%**	**7,00**	**347.699.900**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.07.5.05.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel			1	38.000.000,00	0	0	-	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**38.000.000**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.07.5.05.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			1	242.059.200,00	7	jenis	79.520.000,00	**7**	67.640.700	**85,06%**	**85,06%**	**8,00**	**309.699.900**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.01.1.08	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					**469.442.724,00**	**38**	**jenis**	**532.496.036,00**	**38**	**482.552.034**	**90,62%**	**90,62%**	**38,00**	**951.994.758**	**-**	**-**	**BRIDA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	5.05.01.1.08.5.05.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan			1	2.250.000,00	1	jenis	2.480.000,00	1	2.480.000	100,00%	100,00%	2,00	4.730.000	-	-	BRIDA	
	5.05.01.1.08.5.05.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1	163.611.354,00	3	jenis	226.000.000,00	3	176.927.898	78,29%	78,29%	4,00	340.539.252	-	-	BRIDA	
	5.05.01.1.08.5.05.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan			1	303.581.370,00	34	jenis	304.016.036,00	34	303.144.136	99,71%	99,71%	35,00	606.725.506	-	-	BRIDA	
	5.05.01.1.09	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					**2.321.442.320,00**	**23**	**jenis**	**2.179.212.128,00**	**23**	**2.134.971.073**	**97,97%**	**97,97%**	**23,00**	**4.456.413.393**	-	-	**BRIDA**	
	5.05.01.1.09.5.05.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara			1	769.304.448,00	10	unit	761.128.032,00	10	747.860.640	98,26%	98,26%	11,00	1.517.165.088	-	-	BRIDA	
	5.05.01.1.09.5.05.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya			1	1.552.137.872,00	13	jenis	1.418.084.096,00	13	1.387.110.433	97,82%	97,82%	14,00	2.939.248.305	-	-	BRIDA	
	5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**80%**	**63.125.706.693**	**1,03**	**7.852.478.373,00**	**75**	**persen**	**9.125.853.600,00**	**75**	**8.801.517.864**	**96,45%**	**96,45%**	**75,00**	**16.653.996.237**	-	-	**BRIDA**	
	5.05.02.1.01	**KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGKAJIAN PERATURAN**					**7.471.920.463,00**	**14**	**dokumen**	**8.151.466.000,00**	**14**	**7.868.602.492**	**96,53%**	**96,53%**	**14,00**	**15.340.522.955**	-	-	**BRIDA**	
	5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi,Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Jumlah laporan FGD terkait kajian kebijakan pemerintah			0,5	6.600.319.013,00	5	dokumen	7.389.304.700,00	5	7.234.066.859	97,90%	97,90%	5,50	13.834.385.872	-	-	BRIDA	
	5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban danKetentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kajian/Penelitian			1	264.960.650,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	264.960.650	-	-	BRIDA	
	5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.08	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Analisa sensus			1	492.520.050,00	1	dokumen	286.742.700,00	1	258.333.950	90,09%	90,09%	2,00	750.854.000	-	-	BRIDA	
	5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	Indeks daya Saing Daerah, Innovative Government Award ,IPKD, Penerbitan Buku dan E- jurnal Bali Membangun Bali			1	100.880.100,00	5	dokumen	215.359.800,00	5	192.055.383	89,18%	89,18%	6,00	292.935.483	-	-	BRIDA	
	5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.13	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan	Dokumen Evaluasi			1	13.240.650,00	3	dokumen	260.058.800,00	3	184.146.300	70,81%	70,81%	4,00	197.386.950	-	-	BRIDA	
	5.05.02.1.03	**KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**					**336.183.010,00**	**7**	**dokumen**	**615.586.500,00**	**7**	**605.538.500**	**98,37%**	**98,37%**	**7,00**	**941.721.510**	-	-	**BRIDA**	
	5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Hasil Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi dan Pelaksanaan Seminar			1	33.338.200,00	4	dokumen	73.682.500,00	4	65.961.800	89,52%	89,52%	5,00	99.300.000	-	-	BRIDA	
	5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.03	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kajian BUMD			2	209.528.660,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00	209.528.660	-	-	BRIDA	
	5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.04	Sub Kegiatan Penelitian Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	Jumlah Kajian/Penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan Pelaksanaan Fgd bidang pertanian, perkebunan dan pangan Persentase Kajian/penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan yang direkomendasikan			1	81.726.450,00	2	Dokumen	300.730.300,00	2	300.377.600	99,88%	99,88%	3,00	382.104.050	-	-	BRIDA	
	5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.06	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah kajian/penelitian pengembangan energi dan sumber daya mineral					1	dokumen	241.173.700,00	1	239.199.100	99,18%	99,18%	1,00	239.199.100			BRIDA	
	5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Jumlah kajian / penelitian bidang perhubungan			1	11.589.700,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	11.589.700	-	-	BRIDA	
	5.05.02.1.04	**KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI**					**44.374.900,00**	**3**	**dokumen**	**358.801.100,00**	**3**	**327.376.872**	**91,24%**	**91,24%**	**3,00**	**371.751.772**	-	-	**BRIDA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	5.05.02.1.04.5.05.02.1.04.02	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumken laporan pelaksanaan Roadmap penguatan SIDa Jumlah koordinasi penelitian, pengembangan, penghargaan dan penerapan IPTEKS					1	dokumen	104.534.150,00	1	**101.398.286**	**97,00%**	**97,00%**	**1,00**	**101.398.286**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.02.1.04.5.05.02.1.04.04	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi hasil kelitbangn Mengikuti pameran tingkat nasional (Harteknas) Peresentase inovas dan penerapan teknologi yang dilaksanakan					1	dokumen	52.293.150,00	1	**48.920.950**	**93,55%**	**93,55%**	**1,00**	**48.920.950**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.05.02.1.04.5.05.02.1.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Invetarisasi data permohonan HKI di Kab/Kota (9 Kab/Kota) Jumlah Fasilitasi Permohonan HKI			105,33333	44.374.900,00	1	dokumen	201.973.800,00	1	177.057.636	**87,66%**	**87,66%**	**106,33**	**221.432.536**	**-**	**-**	**BRIDA**	
	5.07.01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**			**80,96**	**5.576.853.002**	**82**		**6.950.325.966**	**(belum keluar LHE dari Inspektorat)**	**6.568.848.835**		**94,51%**		**12.145.701.837**		Banhub		
	5.07.01.1.01.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat**			**100**	**4.618.700**	**100**	**%**	**2.688.600**	**71%**	**2.688.600**	**71,43%**	**100,00%**		**7.307.300**		Banhub		
	5.07.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan			2	3.748.400	7	dokumen	2.688.600	7	2.688.600	100,00%	100,00%		6.437.000		Banhub		
	5.07.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah			1	870.300													
	5.07.01.1.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan**			**100**	**3.588.204.931**	**100**	**%**	**4.388.972.107**	**100%**	**4.071.484.712**	**100,00%**	**92,77%**		**7.659.689.643**		Banhub		
	5.07.01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan			18	3.586.639.831	18	PNS	4.388.972.107	18	4.071.484.712	100,00%	92,77%		7.658.124.543		Banhub		
	5.07.01.1.02.03.	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi			12	870.300	-	-	-	-	-				870.300				
	5.07.01.1.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD			12	694.800	-	-	-	-	-				694.800				
	5.07.01.1.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan																	
	5.07.01.1.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor**			**100**	**122.749.400**	**100**	**%**	**149.248.300**	**100%**	**149.061.042**	**100,00%**	**99,87%**		**271.810.442**		Banhub		
	5.07.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor			14	10.482.000	2	jenis	14.652.000	2	14.652.000	100,00%	100,00%		25.134.000		Banhub		
	5.07.01.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			3	14.947.000	3	jenis	19.506.200	3	19.506.200	100,00%	100,00%		34.453.200		Banhub		
	5.07.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan			3	80.000.000	2	jenis	80.000.000	2	80.000.000	100,00%	100,00%		160.000.000		Banhub		
	5.07.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen			7	4.892.000	4	jenis	4.075.100	4	4.074.150	100,00%	99,98%		8.966.150		Banhub		
	5.07.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan/ koran			4	2.340.000	-	-	-	-	-				2.340.000				
	5.07.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dan jumlah makanan dan minuman untuk koordinasi dan konsultasi			12	10.088.400	12	bulan	31.015.000	12	30.828.692	100,00%	99,40%		40.917.092		Banhub		
	5.07.01.1.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya kinerja perangkat daerah**			**100**	**75.981.999**	**100**	**%**	**57.575.575**	**100%**	**52.492.600**	**100,00%**	**91,17%**		**128.474.599**		**Banhub**		
	5.07.01.1.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			2	75.981.999	10	unit	57.575.575	10	52.492.600	100,00%	91,17%		128.474.599		Banhub		
	5.07.01.1.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**			**100**	**951.568.063**	**100**	**%**	**1.049.692.636**	**100%**	**1.017.648.457**	**100,00%**	**96,95%**		**1.969.216.520**		**Banhub**		
	5.07.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu			12	5.621.300	12	bulan	6.000.000	12	5.995.100	100,00%	99,92%		11.616.400		Banhub		
	5.07.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu			12	151.900.079	12	bulan	205.000.000	12	196.541.694	100,00%	95,87%		348.441.773		Banhub		
	5.07.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu			12	794.046.684	12	bulan	838.692.636	12	815.111.663	100,00%	97,19%		1.609.158.347		Banhub		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.07.01.1.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah**			**100**	**833.729.909**	**100**	**%**	**1.302.148.748**	**100%**	**1.275.473.424**	**100,00%**	**97,95%**		**2.109.203.333**		**Banhub**		
	5.07.01.1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik			13	727.407.271	13	unit	869.519.776	13	861.574.792	100,00%	99,09%		1.588.982.063		Banhub		
	5.07.01.1.09.10.	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik			12	35.000.000	12	bulan	347.688.000	12	331.186.728	100,00%	95,25%		366.186.728		Banhub		
	5.07.01.1.09.11.	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik			12	71.322.638	12	bulan	84.940.972	12	82.711.904	100,00%	97,38%		154.034.542		Banhub		
	5.07.02.	**Program Pelayanan Penghubung**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung**			**89,64**	**940.035.698**	**90**		**1.304.604.860**	**89,27**	**1.273.165.993**	**99,19%**	**97,59%**		2.213.201.691		Banhub		
	5.07.02.1.01.	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung**			**89,64**	**940.035.698**	**90**		**1.304.604.860**	**89,27**	**1.273.165.993**	**99,19%**	**97,59%**		**2.213.201.691**		**Banhub**		
	5.07.02.1.01.01.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta			1	36.450.000	-	-	-	-	-				**36.450.000**				
	5.07.02.1.01.04.	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan promosi dan jumlah latihan Tari Bali			12	128.713.138	12	bulan	293.560.972	12	293.530.965	100,00%	99,99%		422.244.103		Banhub		
	5.07.02.1.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik			12	774.872.560	12	bulan	1.011.043.888	12	979.635.028	100,00%	96,89%		1.754.507.588		Banhub		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																		
	0,250694444	**INSPEKTORAT DAERAH**								**25.502.504.746,00**		**24.920.653.977,00**								
	0,250706019	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**1048,67**	**20.264.480.884,84**			**24.451.238.281,00**	**1.200,87**	**23.958.374.012,00**	**0,00%**	**97,98%**	**2.249,54**	**44.222.854.896,84**		**INSPEKTORAT**		
	6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**200**	**15.477.380,00**			**16.299.750,00**	**200,00**	**16.299.750,00**	**0,00%**	**100,00%**	**400,00**	**31.777.130,00**		**INSPEKTORAT**		
	6.01.01.1.01.01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.			100	8.235.610,00	100	persen	8.549.930,00	100,00	8.549.930,00	100,00%	100,00%	**200,00**	**16.785.540,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu			100	7.241.770,00	100	persen	7.749.820,00	100,00	7.749.820,00	100,00%	100,00%	**200,00**	**14.991.590,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**86,3**	**17.158.899.976,00**			**21.375.293.026,00**	**100,00**	**21.022.731.481,00**	**0,00%**	**98,35%**	**186,30**	**38.181.631.457,00**		**INSPEKTORAT**		
	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			86,3	17.158.899.976,00	100	persen	21.375.293.026,00	100,00	21.022.731.481,00	100,00%	98,35%	**186,30**	**38.181.631.457,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**200,87**	**490.367.600,00**			**493.696.685,00**	**200,87**	**473.357.785,00**	**0,00%**	**95,88%**	**401,74**	**963.725.385,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			100	30.719.400,00	100	persen	23.500.400,00	100	23.500.000,00	100,00%	100,00%	**200,00**	**54.219.400,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			99,26	58.043.300,00	100	persen	72.497.885,00	100,00	58.117.000,00	100,00%	80,16%	**199,26**	**116.160.300,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			94,24	107.376.000,00	100	persen	114.840.400,00	100,00	114.750.000	100,00%	99,92%	**194,24**	**222.126.000,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			96	31.036.670,00	100	persen	15.000.000,00	100,00	14.997.445,00	100,00%	99,98%	**196,00**	**46.034.115,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi			91	36.333.000,00	100	persen	40.000.000,00	100,00	39.998.000,00	100,00%	100,00%	**191,00**	**76.331.000,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan			75	33.250.000,00	100	persen	13.000.000,00	100,00	12.806.250,00	100,00%	98,51%	**175,00**	**46.056.250,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana			92,88	193.609.230,00	100	persen	214.858.000	100,00	209.189.090,00	100,00%	97,36%	**192,88**	**402.798.320,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**71,55**	**486.249.697,00**			**118.021.000,00**	**100**	**111.273.913,00**	**0,00%**	**94,28%**	**171,55**	**597.523.610,00**		**INSPEKTORAT**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	6.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			71,55	486.249.697,00	100	persen	118.021.000,00	100	111.273.913,00	100,00%	94,28%	**171,55**	**597.523.610,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.08	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**221,36**	**410.138.933,00**			**590.854.088,00**	**300,00**	**564.974.417,00**	**0,00%**	**95,62%**	**521,36**	**975.113.350,00**		**INSPEKTORAT**		
	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			65	1.807.500,00	100	persen	1.000.000,00	100	935.000,00	100,00%	93,50%	**165,00**	**2.742.500,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				69,23	164.365.443,00	100	persen	265.000.000,00	100,00	245.077.329,00	100,00%	92,48%	**169,23**	**409.442.772,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				87,13	243.965.990,00	100	persen	324.854.088,00	100,00	318.962.088,00	100,00%	98,19%	**187,13**	**562.928.078,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**268,59**	**1.703.347.298,84**			**1.857.073.732,00**	**300,00**	**1.769.736.666,00**	**0,00%**	**95,30%**	**568,59**	**3.473.083.964,84**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajakdan perijinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi			88,6	809.629.440,00	100	persen	934.243.032,00	100,00	925.176.317,00	100,00%	99,03%	**188,60**	**1.734.805.757,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dilaksanakan			86,57	633.039.278,84	100	persen	710.401.356,00	100,00	634.247.092,00	100,00%	89,28%	**186,57**	**1.267.286.370,84**		INSPEKTORAT		
	6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana ngedung kantor yang telah			93,42	260.678.580,00	100	persen	212.429.344,00	100,00	210.313.257	100,00%	99,00%	**193,42**	**470.991.837,00**		INSPEKTORAT		
						177	2.178.131.411,00													
	6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**177**	**1.323.679.994,00**			**1.277.511.854,00**	**185**	**1.256.776.912,00**	**0,00%**	**98,38%**	**362,00**	**2.580.456.906,00**		**INSPEKTORAT**		
	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pembinaandan pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota			55	485.713.680,00	9	Laporan	172.962.324,00	9	168.982.584,00	100,00%	97,70%	**64,00**	**654.696.264,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			2	188.224.857,00	4	Laporan PA PBJ	286.368.162,00	4	281.322.622,00	100,00%	98,24%	**6,00**	**469.547.479,00**		INSPEKTORAT		
								4	LHR DAK		4		100,00%							
								7	LHR Perencanaan		7		100,00%							
	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang direview dan dievaluasi			45	8.678.475,00	45	LKJIP	26.217.165,00	45	22.874.187,00	100,00%	87,25%	**90,00**	**31.552.662,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan			2	101.725.803,00	2	LHR LK	126.697.896,00	2	125.594.646,00	100,00%	99,13%	**4,00**	**227.320.449,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum danTeknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota			3	148.497.263,00	3	laporan	402.401.996,00	3	398.390.896,00	100,00%	99,00%	**6,00**	**546.888.159,00**		INSPEKTORAT		
						9	-	55	LHP		55		100,00%		**64,00**	**-**				
	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah			6	271.496.115,00	1	laporan	98.361.915,00	1	98.193.213,00	100,00%	99,83%	**7,00**	**369.689.328,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal			55	119.343.801,00	55	LHP	164.502.396,00	55	161.418.764	100,00%	98,13%	**110,00**	**280.762.565,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				**0**	**854.451.417,00**			**496.487.992,00**		**460.311.376,00**	**0,00%**	**92,71%**	**-**	**1.314.762.793,00**		**INSPEKTORAT**		
	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugian daerah, pengamanan pemerintah, dan pembangunan pemerintah			1	58.945.027,00	1	laporan	57.790.648,00	1	57.020.018,00	100,00%	98,67%	**2,00**	**115.965.045,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu. Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan Whistle Blower System yang ditindaklanjuti. Jumlah Laporan Evaluasi PPRG.			8	795.506.390,00	8	laporan	438.697.344,00	8	403.291.358,00	100,00%	91,93%	**16,00**	**1.198.797.748,00**		INSPEKTORAT		
						1	-	1			1		100,00%		**2,00**	**-**				
						3	-	3			3		100,00%		**6,00**	**-**				
						2	-	2	laporan dana desa		2		100,00%		**4,00**	**-**				
	6.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi**				**0**	**910.414.058,00**			**1.051.266.465,00**		**962.279.965,00**	**0,00%**	**91,54%**	**-**	**1.872.694.023,00**		**INSPEKTORAT**		
	6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**				**0**	**396.149.634,00**			**495.386.224,00**		**475.784.536,00**	**0,00%**	**96,04%**	**-**	**871.934.170,00**		**INSPEKTORAT**		
	6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah objek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan inspektorat provinsibali			105	217.699.757,00	105	objek pemeriksaan	251.065.432,00	105	242.040.156,00	100,00%	96,41%	**210,00**	**459.739.913,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.03.1.01.02	Perumusan KebijakanTeknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional dilingkungan provinsi bali dan kabupaten/kota			2	178.449.877,00	2	laporan	244.320.792,00	2	233.744.380,00	100,00%	95,67%	**4,00**	**412.194.257,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**				**0**	**514.264.424,00**			**555.880.241,00**		**486.495.429,00**	**0,00%**	**87,52%**	**-**	**1.000.759.853,00**		**INSPEKTORAT**		
	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas			12	376.116.047,00	12	bulan	342.216.448,00	12	279.320.400,00	100,00%	81,62%	**24,00**	**655.436.447,00**		INSPEKTORAT		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas			41	11.801.150,00	41	perangkat daerah	38.385.375,00	41	36.632.311,00	100,00%	95,43%	**82,00**	**48.433.461,00**		INSPEKTORAT		
						2		2	laporan		2		100,00%		**4,00**					
	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingandan asistensi yang telah dilaksanakan			3	65.576.750,00	3	laporan	110.550.970,00	3	105.894.270,00	100,00%	95,79%	**6,00**	**171.471.020,00**		INSPEKTORAT		
	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensidan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas, unit pengendalian gratifikasidan tunas integritas anti korupsi			1	60.770.477,00	1	laporan	64.727.448,00	1	64.648.448,00	100,00%	99,88%	**2,00**	**125.418.925,00**		INSPEKTORAT		
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI								**34.968.943.446,00**	**100,00**	**25.807.762.529,00**								
	5 03	**KEPEGAWAIAN**								**33.791.581.652,00**		**24.990.834.540,00**							**BKPSDM**	
	5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**83**	**130.372.962.889**	**100**	**13.907.735.403,00**	**82,5**	**nilai**	**26.736.138.138,00**	**86,23**	**24.990.834.540,00**	**104,52%**	**93,47%**	**186,23**	**38.898.569.943,00**	**2,24373494**	**0,298363779**	**BKPSDM**	
	5 03 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana**			**13**	**114.145.250,00**	**13**	**dokumen**	**121.435.800,00**	**13**	**119.404.000,00**	**100,00%**	**98,33%**	**26,00**	**233.549.250,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			12	94.966.250,00	12	dokumen	106.953.800,00	12	104.962.000	100,00%	98,14%	**24,00**	**199.928.250,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah			1	19.179.000,00	1	dokumen	14.482.000,00	1	14.442.000	100,00%	99,72%	**2,00**	**33.621.000,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan yang disusun**			**3**	**11.484.289.127,00**	**3**	**laporan**	**23.451.577.676,00**	**3**	**22.506.986.270,00**	**100,00%**	**95,97%**	**6,00**	**33.991.275.397,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan			3	11.473.399.187,00	28	dokumen	23.451.577.676,00	28	22.506.986.270	100,00%	95,97%	**31,00**	**33.980.385.457,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana**			5	10.889.940,00	**6**	**administrasi**	**604.889.240,00**	**6**	**540.546.322,00**	**100,00%**	**89,36%**	**11,00**	**551.436.262,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia			6	357.666.400,00	2	jenis	7.818.000,00	2	7.424.000	100,00%	94,96%	**8,00**	**365.090.400,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			10	17.896.300,00	3	jenis	146.299.440,00	3	140.375.168	100,00%	95,95%	**13,00**	**158.271.468,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logisitik yang diadakan			21	71.599.350,00	2	jenis	92.275.000,00	2	92.202.602	100,00%	99,92%	**23,00**	**163.801.952,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan			3	89.914.000,00	7	dokumen	15.763.800,00	7	12.248.582	100,00%	77,70%	**10,00**	**102.162.582,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia			200	16.664.150,00	5	jenis bacaan	19.764.000,00	5	19.763.898	100,00%	100,00%	**205,00**	**36.428.048,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah			5	19.764.000,00	12	bulan	322.969.000,00	12	268.532.072	100,00%	83,14%	**17,00**	**288.296.072,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis layanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana**			1	141.828.600,00	**1**	**jenis**	**325.215.000,00**	**1**	**296.684.994,00**	**100,00%**	**91,23%**	**2,00**	**438.513.594,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			**19**	**585.673.838,00**	5	jenis	325.215.000,00	5	296.684.994	100,00%	91,23%	**24,00**	**882.358.832,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia**			13	585.673.838,00	**3**	**jasa**	**1.281.938.205,00**	**3**	**1.222.977.913,00**	**100,00%**	**95,40%**	**16,00**	**1.808.651.751,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia			**3**	**1.059.516.167,00**	300	surat	3.000.000,00	300	3.000.000	100,00%	100,00%	**303,00**	**1.062.516.167,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			500	3.000.000,00	2	jasa	279.000.000,00	2	225.028.845	100,00%	80,66%	**502,00**	**228.028.845,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor			2	202.830.836,00	10	jenis	999.938.205,00	10	994.949.068	100,00%	99,50%	**12,00**	**1.197.779.904,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			2	853.685.331,00	**4**	**pemeliharaan**	**951.082.217,00**	**4**	**304.235.041,00**	**100,00%**	**31,99%**	**6,00**	**1.157.920.372,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			**4**	**1.365.960.788,00**	9	jenis	592.579.587,00	9	197.995.499	100,00%	33,41%	**13,00**	**1.563.956.287,00**			**BKPSDM**	
	5 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya			18	1.006.352.621,00	1	jenis	175.314.299,00	1	22.500.000	100,00%	12,83%	**19,00**	**1.028.852.621,00**			**BKPSDM**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			1	78.830.810,00	2	pemeliharaan	74.338.653,00	2	49.549.589	100,00%	66,65%	3,00	128.380.399,00			BKPSDM	
	5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			4	156.187.357,00	15	jenis	108.849.678,00	15	34.189.953	100,00%	31,41%	19,00	190.377.310,00			BKPSDM	
	5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Merit Sistem**	**81%**	**28.858.175.001**	5	124.590.000,00	**0,8**	**nilai**	**7.055.443.514,00**	**0,8**	**6.491.698.838,00**	**100,00%**	**92,01%**	**5,80**	**6.616.288.838,00**	**7,160493827**	**0,229269136**	**BKPSDM**	
	5 03 02 1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah kebutuhan ASN yang terpenuhi**			**330**	**2.381.518.978,00**	**9**	**jenis**	**6.178.959.186,00**	**9**	**5.646.612.934,00**	**100,00%**	**91,38%**	**339,00**	**8.028.131.912,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Susunan Rencana Kebutuhan ASN			**9**	**1.324.396.240,00**	1	laporan	8.072.265,00	1	7.665.749	100,00%	94,96%	**10,00**	**1.332.061.989,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah formasi ASN yang diadakan			1	27.663.600,00	999	formasi	5.903.470.768,00	1047	5.378.727.541	104,80%	91,11%	**1.048,00**	**5.406.391.141,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan			1109	1.019.018.124,00	700	SK	125.186.809,00	707	124.572.042	101,00%	99,51%	**1.816,00**	**1.143.590.166,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data yang termuktahirkan dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian			1544	82.750.672,00	1900	berkas	142.229.344,00	8004	135.647.602	421,26%	95,37%	**9.548,00**	**218.398.274,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Layanan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana**			2513	194.963.844,00	**3**	**jenis**	**309.995.744,00**	**3**	**302.703.362,00**	**100,00%**	**97,65%**	**2.516,00**	**497.667.206,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan mutasi antar Instansi yang diterbitkan			**3**	**442.295.983,00**	12	laporan	63.784.848,00	12	61.934.865	100,00%	97,10%	**15,00**	**504.230.848,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi IPT			50	79.462.261,00	2500	SK	69.300.448,00	3272	68.498.880	130,88%	98,84%	**3.322,00**	**147.961.141,00**			**BKPSDM**	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang dipromosikan			2744	98.702.211,00	67	orang	176.910.448,00	22	172.269.617	32,84%	97,38%	**2.766,00**	**270.971.828,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN**			23	264.131.511,00	**4**	**jenis**	**239.221.792,00**	**4**	**233.997.979,00**	**100,00%**	**97,82%**	**27,00**	**498.129.490,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan Ijin/Tugas Belajar, Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Pencantuman Gelar			**5**	**264.317.122,00**	300	PNS	120.232.896,00	717	119.718.521	239,00%	99,57%	**722,00**	**384.035.643,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya			278	106.534.711,00	1000	PNS	52.976.448,00	697	52.507.698	69,70%	99,12%	**975,00**	**159.042.409,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional			1000	87.372.411,00	300	SK	66.012.448,00	555	61.771.760	185,00%	93,58%	**1.555,00**	**149.144.171,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Layanan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur**			150	-	**4**	**jenis**	**327.266.792,00**	**4**	**308.384.563,00**	**100,00%**	**94,23%**	**154,00**	**308.384.563,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki hasil penilaian kinerja kategori Baik			532	70.410.000,00	97	persen	90.402.448,00	96,63	88.783.423	99,62%	98,21%	**628,63**	**159.193.423,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi			**4**	**350.509.633,00**	1000	orang	124.483.448,00	1517	115.747.844	151,70%	92,98%	**1.521,00**	**466.257.477,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PD yang mendapatkan Pembinaan Disiplin			100	155.562.211,00	36	PD	94.072.896,00	36	93.872.896	100,00%	99,79%	**136,00**	**249.435.107,00**			**BKPSDM**	
	5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang di proses			1935	122.775.211,00	3	kasus	18.308.000,00	3	9.980.400	100,00%	54,51%	**1.938,00**	**132.755.611,00**			**BKPSDM**	
	5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**32**	**71.972.211,00**			**1.177.361.794,00**	**100**	**816.927.989,00**			**132,00**	**888.900.200,00**			**BKPSDM**	
	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi**	**100**	**65.722.160.573**	**5**	**200.000,00**	**100**	**persen**	**1.177.361.794,00**	**100**	**816.927.989,00**			**105,00**	**817.127.989,00**			**BKPSDM**	
	5 04 02 1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**-**					**1**	**jenis**	**1.177.361.794,00**		**816.927.989,00**	**0,00%**	**69,39%**	**-**	**816.927.989,00**			**BKPSDM**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi kepemimpinan dan Prajabatan serta jabatan fungsional					3	dokumen	527.938.994	3	268.352.753	100,00%	50,83%	**3,00**	**268.352.753,00**			**BKPSDM**	
	5 04 02 1.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota					115	orang	444.542.300	115	399.788.650	100,00%	89,93%	**115,00**	**399.788.650,00**			**BKPSDM**	
	5 04 02 1.02 05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga					1	paket	204.880.500	1	148.786.586	100,00%	72,62%	**1,00**	**148.786.586,00**			**BKPSDM**	
		UPTD. PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI								**761.527.656,00**		**656.872.154,00**									
	5 03	**KEPEGAWAIAN**								**761.527.656,00**	**0,80**								**BKPSDM**	
	5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**0**			**100**	**2.204.557.702,00**	**0**	**0**	**400.839.856,00**	**0**	**400.839.856,00**	**#DIV/0!**	**100,00%**					**BKPSDM**	
	5 03 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan yang disusun**			**5**	**1.861.399.261,00**	**3**	**laporan**	**95.809.000,00**	**3**	**95.809.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**BKPSDM**	
	5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan			3	1.861.399.261,00	3	dokumen	95.809.000,00	3	95.809.000,00	100,00%	100,00%					**BKPSDM**	
	5 03 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana**			**2**	**25.628.305,00**	**2**	**administrasi**	**25.405.720,00**	**2**	**22.231.471,00**	**100,00%**	**87,51%**					**BKPSDM**	
	5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			29	11.948.305,00	3	jenis	6.539.720,00	3	6.069.671	100,00%	92,81%					**BKPSDM**	
	5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah			8	13.680.000,00	12	bulan	18.866.000,00	12	16.161.800	100,00%	85,67%					**BKPSDM**	
	5 03 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia**			**3**	**293.100.136,00**	**3**	**jasa**	**267.735.136,00**	**3**	**265.612.636,00**	**100,00%**	**99,21%**					**BKPSDM**	
	5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor			1	293.100.136,00	2	layanan	267.735.136,00	2	265.612.636	100,00%	99,21%					**BKPSDM**	
	5 03 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**4**	**24.430.000,00**	**1**	**pemeliharaan**	**11.890.000,00**	**1**	**11.504.990,00**	**100,00%**	**96,76%**					**BKPSDM**	
	5 03 01 1.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			5	24.430.000,00	3	jenis	11.890.000,00	2	11.504.990,00	66,67%	96,76%					**BKPSDM**	
	5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Merit Sistem**			**330**	**519.453.820,00**	**0,8**	**nilai**	**360.687.800,00**	**0,8**	**256.032.298,00**	**100,00%**	**70,98%**					**BKPSDM**	
	5 03 02 1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN**			**5**	**519.453.820,00**	**1**	**jenis**	**360.687.800,00**	**1**	**256.032.298,00**	**100,00%**	**70,98%**					**BKPSDM**	
	5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang diberikan ijin/tugas belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah			3	519.453.820,00	3	metode	360.687.800,00	3	256.032.298	100,00%	70,98%					**BKPSDM**	
		UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA					**16.034.724.160,00**			**19.157.231.998,00**		**16.232.069.740,00**									
	5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**16.034.724.160,00**			**19.157.231.998,00**									**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Terlaksana Baik**				**4.650.760.130,00**	**100**	**persen**	**15.073.946.018,00**	**100**	**12.881.814.203,00**	**100,00%**	**85,46%**	**100,00**	**17.532.574.333,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5 04 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen keuangan tersusun tepat waktu**				**10.505.961.841,00**	**100**	**persen**	**327.251.000,00**	**100**	**327.251.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**10.833.212.841,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan			14	10.505.961.841,00	14	dokumen	327.251.000,00	3	327.251.000,00	21,43%	100,00%	**17,00**	**10.833.212.841,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum yang terlaksana**				**157.663.690,00**	**100**	**persen**	**268.398.410,00**	**100**	**254.165.070,00**	**100,00%**	**94,70%**	**100,00**	**411.828.760,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia			12	99.026.200,00	5	komponen	99.992.900,00	5	98.569.000,00	100,00%	98,58%	**17,00**	**197.595.200,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			12	58.637.490,00	13	jenis	49.355.510,00	13	44.086.070	100,00%	89,32%	**25,00**	**102.723.560,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logisitik yang diadakan				-	1	logistik	85.000.000,00	1	84.960.000	100,00%	99,95%	**1,00**	**84.960.000,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah				-	12	bulan	34.050.000,00	12	26.550.000	100,00%	77,97%	**12,00**	**26.550.000,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana**				**1.089.397.803,00**	**19**	**jenis**	**828.500.000,00**	**19**	**633.046.750,00**	**100,00%**	**76,41%**	**19,00**	**1.722.444.553,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			12	1.089.397.803,00	5	jenis	828.500.000,00	5	633.046.750	100,00%	76,41%	**17,00**	**1.722.444.553,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia**				**1.477.430.085,00**	**3**	**jasa**	**2.213.807.264,00**	**3**	**2.172.916.417,00**	**100,00%**	**98,15%**	**3,00**	**3.650.346.502,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	494.174.924,00	2	jasa	510.000.000,00	2	469.373.153	100,00%	92,03%	**14,00**	**963.548.077,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor			12	983.255.161,00	3	jenis	1.703.807.264,00	3	1.703.543.264	100,00%	99,98%	**15,00**	**2.686.798.425,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**				**1.926.268.552,00**	**4**	**pemeliharaan**	**978.676.344,00**	**4**	**944.907.391,00**	**100,00%**	**96,55%**	**4,00**	**2.871.175.943,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			12	373.966.015,00	9	unit	274.786.344,00	9	245.182.844	100,00%	89,23%	**21,00**	**619.148.859,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			12	1.207.266.387,00	2	pemeliharaan	499.500.000,00	2	496.739.879	100,00%	99,45%	**14,00**	**1.704.006.266,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			12	345.036.150,00	16	jenis	204.390.000,00	16	202.984.668	100,00%	99,31%	**28,00**	**548.020.818,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusi**				**-**	**100**		**10.457.313.000,00**	**100**	**8.549.527.575,00**	**100,00%**	**81,76%**	**100,00**	**8.549.527.575,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			0	-	100	persen	10.457.313.000,00	100	8.549.527.575	100,00%	81,76%	**100,00**	**8.549.527.575,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi**				**11.383.964.030,00**	**100**	**nilai**	**4.083.285.980,00**	**100**	**3.350.255.537,00**	**100,00%**	**82,05%**	**100,00**	**14.734.219.567,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 02 1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test**				**307.556.137,00**	**100**	**jenis**	**597.046.790,00**	**100**	**484.888.710,00**	**100,00%**	**81,21%**	**100,00**	**792.444.847,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 02 1.01 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah standar pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum			3	5.103.530,00	1	dokumen	5.264.650,00	1	4.381.050	100,00%	83,22%	**4,00**	**9.484.580,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 02 1.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang lulus evaluasi yang berbasis uji kompetensi teknis			60	302.452.607,00	90	orang	591.782.140,00	90	480.507.660	100,00%	81,20%	**150,00**	**782.960.267,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 02 1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan**				**11.076.407.893,00**	**864**	**orang**	**3.486.239.190,00**	**4**	**2.865.366.827,00**	**0,46%**	**82,19%**	**4,00**	**13.941.774.720,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 02 1.02 06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah standar pembelajaran pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional			1	4.528.950,00	0	dokumen	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	**1,00**	**4.528.950,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5 04 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan			1382	11.071.878.943,00	266	orang	3.486.239.190	266	2.865.366.827	100,00%	82,19%	**1.648,00**	**13.937.245.770,00**			**UPTD. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5.02	**KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**					**1.641.992.052.130,00**	**100**	**Persen**	**1.715.284.080.941,00**	**100,00**	**1.550.232.219.751,43**	**100,00%**	**90,38%**					**BPKAD**	
	5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**88,6**	**21.914.951.310,00**	**88,6**	**Nilai**	**24.530.539.364,00**	**20,57**	**22.051.882.817,11**	**23,22%**	**89,90%**	**88,60**	**43.966.834.127,11**			**BPKAD**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**			**100**	**21.720.200,00**	**100**	**persen**	**31.381.270,00**	**100,00**	**26.894.742,00**	**100,00%**	**85,70%**	**100,00**	**48.614.942,00**			**BPKAD**	
	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun			9	11.517.800,00	12	dokumen	32.029.670,00	12	26.894.742,00	100,00%	83,97%	9	38.412.542,00			BPKAD	
	5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu			42	7.600.000,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	42	7.600.000,00			BPKAD	
	5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun			10	2.602.400,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	10	2.602.400,00			BPKAD	
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu**			**100**	**18.907.713.058,00**	**2244**	**dokumen**	**20.368.499.433,00**	**2244**	**18.787.889.917,00**	**100,00%**	**92,24%**	**2344,00**	**37.695.602.975,00**			**BPKAD**	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN			44	18.689.195.958,00	44	dokumen	20.160.965.713,00	44	18.605.408.235,00	100,00%	92,28%	88	37.294.604.193,00			BPKAD	
	5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi			2935	174.361.700,00	2200	dokumen	207.533.720,00	2200	182.481.682,00	100,00%	87,93%	5135	356.843.382,00			BPKAD	
	5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntasi dan pelaporan keuangan yang disusun			7	22.385.400,00	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%	7	22.385.400,00			BPKAD	
	5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu			1	21.770.000,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	**1**	**21.770.000,00**			BPKAD	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu**			**100**	**833.941.000,00**	**1**	**tahun**	**1.275.639.160,00**	**1**	**1.067.189.939,00**	**100,00%**	**83,66%**	**101,00**	**1.901.130.939,00**			**BPKAD**	
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan alat listrik/ penerangan bangunan kantor			1	171.990.000,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	1	171.990.000,00			BPKAD	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			1	313.768.500,00	1	tahun	416.849.000,00	1	361.304.900,00	100,00%	86,68%	2	675.073.400,00			BPKAD	Rasionalisasi
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor			1	194.999.900,00	1	Tahun	858.790.160,00	1	705.885.039,00	100,00%	82,20%	2	900.884.939,00			**BPKAD**	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan			2	14.999.900,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	2	14.999.900,00			**BPKAD**	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan			2	12.785.700,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	2	12.785.700,00			BPKAD	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis penyediaan makan dan minuman untuk kunjungan tamu			2	116.175.000,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	2	116.175.000,00			**BPKAD**	Penambahan Pagu
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi			2	9.222.000,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	2	9.222.000,00			BPKAD	
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu			**100**	**601.800.000,00**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**			**100,00**	**601.800.000,00**			**BPKAD**	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat			2	1.800.000,00	0	-	0	0	0			2	1.800.000,00			BPKAD	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			4	600.000.000,00	0	-	0	0	0			4	600.000.000,00			**BPKAD**	
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu**			**100**	**1.549.777.052,00**	**100**	**Persen**	**1.952.939.640,00**	**100**	**1.635.261.502,11**	**100,00%**	**83,73%**	**200,00**	**3.185.038.554,11**			BPKAD	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4			3	266.974.836,00	1	tahun	591.134.496,00	1	466.357.546,00	100,00%	78,89%	4	733.332.382,00			BPKAD	
	5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis pemeliharaan mebel			1	10.000.000,00	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	1	10.000.000,00			BPKAD	
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			1	147.480.000,00	1	tahun	154.070.700,00	1	114.384.902,00	100,00%	74,24%	2	261.864.902,00			BPKAD	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor			2	1.125.322.216,00	1	tahun	1.207.734.444,00	1	1.054.519.054,11	100,00%	87,31%	3	2.179.841.270,11			BPKAD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu**			**100**	**1.615.952.381.130,00**	**100**	**Persen**	**1.686.574.514.975,00**	**100,00**	**1.525.387.945.397,00**	**100,00%**	**90,44%**	**200,00**	**3.141.340.326.527,00**			BPKAD	
	5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu**			**100**	**2.442.241.368,00**	**100**	**persen**	**2.709.169.262,00**	**100,00**	**2.342.057.533,00**	**100,00%**	**86,45%**	**200,00**	**4.784.298.901,00**			**BPKAD**	
	5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah rancangan dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu			1	24.518.700,00	0	-	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**1**	**24.518.700,00**			**BPKAD**	
	5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rancangan dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu			1	29.691.940,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	1	29.691.940,00			BPKAD	
	5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen RKA-SKPD yang diteliti			500	315.143.300,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	500	315.143.300,00			BPKAD	
	5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan RKA-SKPD yang diteliti			250	69.494.810,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	250	69.494.810,00			BPKAD	
	5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	jumlah rancangan dokumen DPA-SKPD yang diteliti			500	315.143.300,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	500	315.143.300,00				
	5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan DPA-SKPD yang diteliti			250	69.494.810,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	**250**	**69.494.810,00**				
	5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD			2	744.704.884,00	4	dokumen	2.709.169.262,00	4	2.342.057.533,00	100,00%	86,45%	6	3.086.762.417,00			BPKAD	
	5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD			2	684.457.194,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	2	684.457.194,00				
	5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah juknis dan SOP penyusunan anggaran SKPD yang disusun			2	137.847.430,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	2	137.847.430,00				
	5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen Regulasi bidang anggaran yang disusun			1	51.745.000,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	1	51.745.000,00				
	5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan tepat waktu**			**9**	**71.803.800,00**	**9**	**kab/kota se-Bali**	**213.748.700,00**	**9**	**118.511.478,00**	**100,00%**	**55,44%**	**18,00**	**173.895.200,00**			BPKAD	
	5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang APBD kab/kota dan penjabaran APBD Kab/Kota			9	17.838.900,00	9	dokumen	213.748.700,00	9	118.511.478,00	100,00%	55,44%	18	14.650.000,00			BPKAD	
	5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD			9	23.241.000,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	9	23.241.000,00				
	5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	umlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi			9	6.410.900,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	9	6.410.900,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi kebijakan penyusunan APBD			9	24.313.000,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	9	24.313.000,00				
	5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**persentase laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu**			**100**	**697.822.481,00**	**100**	**Persen**	**200.692.050,00**	**100**	**183.997.201,00**	**100,00%**	**91,68%**	**200,00**	**881.819.682,00**			BPKAD	
	5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah			36	268.365.778,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	36	268.365.778,00				
	5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji dan Laporan PFK			34	290.128.455,00	4	dokumen	200.692.050,00	4	183.997.201,00	100,00%	91,68%	34	290.128.455,00			BPKAD	
	5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan			172	139.328.248,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	172	139.328.248,00				
	5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase laporan akuntansi dan keuangan daerah disusun tepat waktu**			**100**	**322.530.828,00**	**100**	**Persen**	**402.443.244,00**	**100,00**	**384.949.182,00**	100,00%	95,65%	200	**322.530.828,00**			BPKAD	
	5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu			2	149.079.428,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	2	149.079.428,00				
	5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	jumlah dokumen laporan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu			2	72.600.000,00	2	dokumen	402.443.244,00	2	384.949.182,00	100,00%	95,65%	2	72.600.000,00			BPKAD	
	5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan			68	100.851.400,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	68	100.851.400,00				
	5.02..02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase laporan pelaksanaan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu**			**100**	**1.611.353.865.153,00**	**100**	**Persen**	**1.683.048.461.719,00**	**100,00**	**1.522.358.430.003,00**	**100,00%**	**90,45%**	**100,00**	**1.611.353.865.153,00**			BPKAD	
	5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok yang terlaksana			1	20.375.000.000,00	1	dokumen	17.775.000.000,00	1	16.877.519.606,00	100,00%	94,95%	1	20.375.000.000,00			BPKAD	
	5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus			1	372.476.037.244,00	1	dokumen	303.313.478.733,00	1	269.469.777.473,00	100,00%	88,84%	1	372.476.037.244,00			BPKAD	
	5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga			1	91.118.471.313,00	1	dokumen	7.848.875.371,00	1	4.759.779.107,00	100,00%	60,64%	1	91.118.471.313,00			BPKAD	
	5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi			1	1.127.384.356.596,00	1	dokumen	1.354.111.107.615,00	1	1.231.251.353.817,00	100,00%	90,93%	1	1.127.384.356.596,00			BPKAD	
	5.02.02.1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah yang dialksanakan sesuai ketentuan**			**100**	**1.064.117.500,00**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**100**	**1.064.117.500,00**			**BPKAD**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi terkait aplikasi SIPD			9	1.064.117.500,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	9	1.064.117.500,00			BPKAD	
	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu**			**100**	**1.777.288.360,00**	**100**	**Persen**	**4.179.026.602,00**	**100,00**	**2.792.391.537,32**	**100,00%**	66,82%	**100,00**	**1.777.288.360,00**			BPKAD	
	5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu**			**100**	**1.777.288.360,00**	**100**	**Persen**	**1.319.805.882,00**	**100**	**1.117.027.952,00**	**100,00%**	84,64%	**100,00**	**1.777.288.360,00**			BPKAD	
	5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu			1	164.083.118,00	1	dokumen	127.649.680,00	1	123.827.000,00	100,00%	97,01%	1	164.083.118,00			BPKAD	
	5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah laporan standar kebutuhan, laporan pengadaan dan tipe barang milik daerah yang disusun tepat waktu			1	163.265.118,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	1	163.265.118,00			BPKAD	
	5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu			4	43.989.248,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	4	43.989.248,00			BPKAD	
	5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu			1	90.307.496,00	1	dokumen	302.560.800,00	1	298.592.453,00	100,00%	98,69%	1	90.307.496,00			BPKAD	
	5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah laporan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah			5	1.197.058.480,00	4	dokumen	889.595.402,00	4	694.608.499,00	100,00%	78,08%	5	1.197.058.480,00			BPKAD	
	5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi yang disusun tepat waktu			2	11.196.400,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	2	11.196.400,00			BPKAD	
	5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu			2	107.388.500,00	0	-	0	0	0	0,00%	0,00%	2	107.388.500,00			BPKAD	
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			**88,6**	**151.332.110,00**	**88,6**	**Persen**	**902.079.861,00**	**0,00**	**534.646.717,00**	0,00%	59,27%	**88,60**	**151.332.110,00**			**UPTD**	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu**			**100**	**39.196.910,00**	**100**	**Persen**	**67.798.025,00**	**100,00**	**35.739.243,00**	100,00%	52,71%	**100,00**	**39.196.910,00**			**UPTD**	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor			1	23.497.110,00	1	tahun	67.798.025,00	1	35.739.243,00	100,00%	52,71%	1	23.497.110,00			UPTD	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan			2	11.499.800,00	0		-	0	-	0,00%	0,00%	2	11.499.800,00			UPTD	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan			2	4.200.000,00	0		-	0	-	0,00%	0,00%	2	4.200.000,00			UPTD	
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi			1	-	0		-	0	-	0,00%	0,00%	1	-			UPTD	
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu**			**100**	**3.000.000,00**	**0**		**-**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100**	**3.000.000,00**			**UPTD**	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat			2	3.000.000,00	0		-	0	-	0,00%	0,00%	2	3.000.000,00			UPTD	
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu**			**100**	**109.135.200,00**	**1**	**tahun**	**834.281.836,00**	**1,00**	**498.907.474,00**	100,00%	59,80%	100	**109.135.200,00**			UPTD	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4			2	104.385.200,00	1	tahun	173.895.200,00	1	117.792.337,00	100,00%	67,74%	2	104.385.200,00			UPTD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor			1	4.750.000,00	1	tahun	14.650.000,00	1	10.195.400,00	100,00%	69,59%	1	4.750.000,00			UPTD	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor					1	tahun	645.736.636,00	1	370.919.737,00	100,00%	57,44%	0	-			UPTD	
	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu**			**100**	**2.196.099.220,00**	**100**	**Persen**	**2.859.220.720,00**	**100,00**	**1.675.363.585,32**	100,00%	58,60%	100	**2.196.099.220,00**			UPTD	
	5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu**			**100**	**2.196.099.220,00**	**100**	**Persen**	**2.859.220.720,00**	**100,00**	**1.675.363.585,32**	100,00%	58,60%	100	**2.196.099.220,00**			UPTD	
	5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	-Jumlah penyelesaian permasalahan tanah, - Jumlah sertifikat tanah, - Jumlah Laporan Pemasangan patok batas, -Jumlah laporan Pemasangan papan nama kepemilikan -Jumlah Laporan hasil pendataan, - Jumlah laporan klaim asuransi barang milik daerah			6	2.196.099.220,00	6	dokumen	2.859.220.720,00	6	1.675.363.585,32	100,00%	58,60%	6	2.196.099.220,00			UPTD	
										5.873.004.652		**5.692.960.959**								
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**82**	**26.378.878.964**		**6.032.288.456**	**81**	**persen**	**1.519.234.764**	**n/a**	**1.437.508.703**	**23%**	**94,62%**	**81**	**7.469.797.159**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan**			**100**	**4.956.245.469**	**100**	**persen**	**258.226.000**	**100**	**258.526.000**	**100%**	**100,12%**	**200**	**5.214.771.469**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN			37	4.953.341.469	37	orang	258.526.000	37	258.526.000	**100%**	100,00%	**74**	**5.211.867.469**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.01.1.06	**KegiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan**			**100**	**111.665.264**	**100**	**persen**	**81.445.500**	**100**	**78.618.395**	**100%**	**96,53%**	**200**	**190.283.659**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/instalasi yang disediakan			0,5	9.848.300	1	tahun	13.000.000	1	12.183.270	**100%**	93,72%	**2**	**22.031.570**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan			1	52.434.852	1	paket	58.369.300	1	56.675.125	**100%**	97,10%	**2**	**109.109.977**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			3	27.274.700	4	jenis	10.076.200	4	9.760.000	**100%**	96,86%	**7**	**37.034.700**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**			**97,8**	**956.155.173**	**100**	**persen**	**1.179.563.264**	**100**	**1.100.364.308**	**100%**	**93,29%**	**198**	**2.056.519.481**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik			4	339.597.780	4	unit	455.550.096	4	417.492.317	**100%**	91,65%	**8**	**757.090.097**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional degan kondisi baik			8	525.718.993	10	unit	656.483.168	10	619.217.832	**100%**	94,32%	**18**	**1.144.936.825**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik			69	82.396.400	69	unit	67.530.000	69	63.654.159	**100%**	94,26%	**138**	**146.050.559**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum**	**100%**	**22.273.637.764**	**71**	**4.132.736.415**	**100**	**persen**	**4.353.769.888**	**100**	**4.255.452.256**	**100%**	**97,74%**	**171**	**8.388.188.671**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.05.1.01	**Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum			**100**	**1.823.467.232**	**100**	**persen**	**1.928.481.856**	**100**	**1.910.243.632**	**100%**	**99,05%**	**200**	**3.733.710.864**			**BIRO HUKUM**	
	4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD			11	1.221.926.483	5	Ranperda	1.253.905.792	14	1.253.905.792	**280%**	100,00%	**25**	**2.475.832.275**			**BIRO HUKUM**	
			Jumlah Pergub yang diselesaikan			62		40	Pergub		81		**203%**		**143**	-			**BIRO HUKUM**	
	4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan			1127	166.396.357	250	Kepgub	187.382.240	1446	169.144.016	**578%**	90,27%	**2573**	**335.540.373**			**BIRO HUKUM**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	4.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi			132	118.494.954	50	produk hukum	149.905.792	95	149.905.792	190%	100,00%	227	268.400.746			BIRO HUKUM	
			Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan					50	produk hukum		122		244%		122				BIRO HUKUM	
	4.01.05.1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang telah Terfasilitasi			308	316.649.438	75	Produk Hukum	337.288.032	477	337.288.032	636%	100,00%	785	337.288.340			BIRO HUKUM	
	4.01.05.1.02	**Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan**			**100**	**2.309.269.183**	**100**	**persen**	**2.425.288.032**	**40**	**2.345.208.624**	**40%**	**96,70%**	**140**				BIRO HUKUM	
	4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum			13	1.971.672.039	18	perkara	2.237.905.792	17	2.163.905.792	94%	96,69%	30	4.135.577.831			BIRO HUKUM	
			Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum			7		30	pendampingan hukum		9		30%		16				BIRO HUKUM	
	4.01.05.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM			100	337.597.144	30	aparatur	187.382.240	30	181.302.832	100%	96,76%	130	518.899.976			BIRO HUKUM	
			Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan			1000		50	orang		5000		10000%		6000				BIRO HUKUM	
			Jumlah NPHD yang dihasilkan			407		400	NPHD		585		146%		992	-			BIRO HUKUM	
			Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani			11		9	perkara non litigasi		9		100%		20		-		BIRO HUKUM	
	4.01	**Sekretariat Daerah**								**1.997.914.688,00**	**0**	**1.828.622.003,00**							BIRO HUKUM	
	4.01.0.00.0.00.01.0005	**Biro Organisasi**				**100,00%**	**5.936.287.034,00**	**83**	**persen**	**1.997.914.688,00**	**83**	**1.828.622.003,00**	**100,00%**	**91,53%**	**8400,00%**	**7.764.909.037,00**			BIRO HUKUM	
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik**			**0**	**-**	**52**	**persen**	**444.857.938,00**	**52**	**419.865.580,00**	**100,00%**	**94,38%**	**5200%**	**419.865.580,00**			BIRO HUKUM	
	2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan**			**0**	**-**	**85**	**persen**	**307.381.840,00**	**85**	**293.744.106,00**	**100,0%**	**95,56%**	**8500,00%**	**293.744.106,00**			BIRO HUKUM	
	2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dalam Basis Data			**0**	**-**	2500	Judul OPAC	9.999.850,00	2500	8.943.575,00	**100,00%**	89,44%	**2500**	8.943.575,00			BIRO HUKUM	
	2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina			**0**	**-**	39	Perpustakaan	50.000.140,00	39	44.878.240,00	**100,00%**	89,76%	**39**	44.878.240,00			BIRO HUKUM	
	2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Minat Literasi			**0**	**-**	20	persen	209.905.402,00	20	202.445.843,00	**100,00%**	96,45%	**20**	202.445.843,00			BIRO HUKUM	
	2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka dan Meningkatnya Kualitas Fisik Bahan Pustaka			**0**	**-**	5000	Eks	37.476.448,00	5000	37.476.448,00	**100,00%**	100,00%	**5000**	37.476.448,00			BIRO HUKUM	
	2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat**			**0**	**-**	**39**	**persen**	**137.476.098,00**	**39**	**126.121.474,00**	**100,00%**	**91,74%**	**39**	**126.121.474,00**			BIRO HUKUM	
	2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembudayaan Kegemaran Membaca			**0**	**-**	30	orang	137.476.098,00	30	126.121.474,00	**100,00%**	91,74%	**30**	126.121.474,00			BIRO HUKUM	
	4.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali**			**81,50%**	**5.707.108.732,00**								**82%**						
	4.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali**				**5.707.108.732,00**	**84,5**	**Nilai**	**1.226.191.344,00**	**84,50**	**1.104.844.186,00**	**100%**	90,10%		**6.811.952.918,00**			**BIRO ORGANISASI**	
	4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai peratutan dan disampaikan tepat waktu**			**3**	**4.630.900,00**	**0**	**dokumen**	**-**	**0**	**-**			**3**	4.630.900,00			**BIRO ORGANISASI**	
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Setda yang disusun sesuai kebutuhan dan disampaikan tepat waktu			2	3.571.650,00	0	dokumen	-	0	-			**2**	3.571.650,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Setda yang disusun dan disampaikan tepat waktu			1	1.059.250,00	0	laporan	-	0	-			**1**	1.059.250,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu**			**5**	**5.189.828.597,00**	**5**	**dokumen**	**568.676.000,00**	**5**	**568.676.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**10**	**5.758.504.597,00**			**BIRO ORGANISASI**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN			5	5.189.828.597,00	5	dokumen	568.676.000,00	5	568.676.000,00	100,00%	100,00%	**10**	5.758.504.597,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu**			**13**	**3.186.365,00**	**13**	**dokumen**	**7.379.510,00**	**13**	**5.827.920,00**	**100,00%**	**78,97%**	**26**	**9.014.285,00**			BIRO ORGANISASI	
	4.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu			100%	3.186.365,00	100	persen	7.379.510,00	100	5.827.920,00	100%	78,97%	10100%	9.014.285,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu**			**100,00%**	**98.527.574,00**	**100**	**persen**	**118.380.290,00**	**100**	**105.362.063,00**	**100%**	**89,00%**	**10100%**	**203.889.637,00**			**BIRO ORGANISASI**	
	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang berpungsi baik			4	4.499.900,00	4	jenis	3.900.000,00	4	3.900.000,00	100,00%	100,00%	8	8.399.900,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			24	28.350.410,00	20	jenis	35.141.290,00	20	32.229.570,00	100,00%	91,71%	44	60.579.980,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	umlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang siap edar			0	-	0	jenis	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-			BIRO ORGANISASI	
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun			1	65.677.264,00	1	tahun	79.339.000,00	1	69.232.493,00	100,00%	87,26%	2	134.909.757,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Barang milik daerah pada Biro Organisasi yang terinventaris dengan baik**			**1**	**410.935.296,00**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**			**1**	**410.935.296,00**				
	4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Barang milik daerah yang terinventaris dengan baik**			**1**	**410.935.297,00**	**1**	**laporan**	**531.755.544,00**	**1**	**424.978.203,00**	**100,00%**	**79,92%**	**2**	**835.913.500,00**			**BIRO ORGANISASI**	
	4.01..01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai			16	389.365.344,00	16	unit	472.795.544,00	16	378.197.705,00	100,00%	79,99%	32	767.563.049,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara			4	21.569.952,00	5	jenis	58.960.000,00	5	46.780.498,00	100,00%	79,34%	9	68.350.450,00			BIRO ORGANISASI	
																-				
	4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik**			**82,00%**	**229.178.302,00**	**83**	**persen**	**326.865.406,00**	**83,86%**	**303.912.237,00**	**101,04%**	**92,98%**	**166%**	**533.090.539,00**			**BIRO ORGANISASI**	
	4.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran**			**81,00%**	**137.110.364,00**	**83**	**persen**	**141.467.058,00**	**83,00%**	**136.437.683,00**	**100,00%**	**96,44%**	**164%**	**273.548.047,00**			**BIRO ORGANISASI**	
	4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali			1	19.912.355,00	0	0	-	0	-			1	19.912.355,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran			1		83	persen	25.453.855,00	83	23.217.313,00	100,00%	91,21%	8400%	23.217.313,00				
	4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan			100,00%	36.135.145,00	100	persen	46.670.955,00	100%	45.596.335,00	100,00%	97,70%	200%	81.731.480,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01..02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah			36	81.062.864,00	36	dokumen	69.342.248,00	36	67.624.035,00	100,00%	97,52%	72	148.686.899,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik**			**83,00%**	**92.067.938,00**	**83**	**persen**	**185.398.348,00**	**84,73%**	**167.474.554,00**	**102,08%**	**90,33%**	**168%**	**259.542.492,00**			**BIRO ORGANISASI**	
	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik			89,74%	11.912.590,00	83	persen	55.452.940,00	94,44%	49.443.902,00	**113,78%**	89,16%	184%	61.356.492,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya Minimal BB			81,00%	16.111.800,00	83	persen	38.539.400,00	83,00%	35.971.600,00	100,00%	93,34%	164%	52.083.400,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01..02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik			82,00%	4.568.200,00	83	persen	11.249.350,00	83,00%	6.205.560,00	100,00%	55,16%	165%	10.773.760,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01..02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik			81,00%	9.031.300,00	100	persen	14.021.610,00	100%	11.688.320,00	100,00%	83,36%	181%	20.719.620,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik			81,00%	50.444.048,00	83	persen	66.135.048,00	83%	64.165.172,00	100,00%	97,02%	164%	114.609.220,00			BIRO ORGANISASI	
	4.01	**BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI**				**0**	**26.153.224.853,00**			**43.885.906.669,00**		**43.070.713.142,00**	**0,00%**	**98,14%**					**Biro Pemerintahan dan Kesra**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**			**0**	**6.242.620.069,00**	**77**		**7.635.001.546,00**	**80,10**	**7.935.733.515,00**	**104,03%**	**103,94%**					**Biro Pemerintahan dan Kesra**	
	4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**1**	**192.793.240,00**	**100**	**%**	**383.737.132,00**	**100**	**370.027.332,00**	**100,00%**	**96,43%**					**Biro Pemerintahan dan Kesra**	
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perencanaan Perangkat Daerah			2	40.181.448,00	2	dokumen	383.737.132,00	2	370.027.332,00	**100,00%**	**96,43%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**			**1**	**5.422.358.060,00**	**100%**		**6.188.300.529,00**	**100%**	**6.609.887.465,00**	**100,00%**	**106,81%**					**Biro Pemerintahan dan Kesra**	
	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu			36	5.346.169.664,00	36	orng	6.188.300.529,00	36	6.609.887.465,00	**100,00%**	**106,81%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**			**1**	**163.954.623,00**	**100**	**%**	**275.874.685,00**	**100**	**252.672.288,00**	**100,00%**	**91,59%**					**Biro Pemerintahan dan Kesra**	
	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia			1	26.530.350,00	1	paket	37.766.650,00	1	31.927.350,00	**100,00%**	**84,54%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			1	13.299.300,00	1	paket	41.901.335,00	1	39.189.700,00	**100,00%**	**93,53%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan			1	11.137.500,00	1	paket	23.016.700,00	1	16.682.500,00	**100,00%**	**72,48%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi			1	112.987.473,00	1	tahun	173.190.000,00	1	164.872.738,00	**100,00%**	**95,20%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang tertata**			**1**	**463.514.146,00**	**100%**		**787.089.200,00**	**100%**	**703.146.430,00**	**100,00%**	**89,34%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan			9	115.714.999,00	15	unit	668.209.200,00	15	595.698.980,00	**100,00%**	**89,15%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			3	33.484.000,00	5	jenis	88.880.000,00	5	78.731.250,00	**100,00%**	**88,58%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung			1	52.406.492,00	2	paket	30.000.000,00	2	28.716.200,00	**100,00%**	**95,72%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali**			**0**	**1.041.933.806,00**	**2,4**	**peringkat**	**2.184.010.227,00**	**2,40**	**1.651.142.870,00**	**100,00%**	**75,60%**					**Biro Pemerintahan dan Kesra**	
	4.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung penyelenggaraan**			**0**	**424.196.130,00**	**100**	**%**	**182.449.668,00**	**100**	**171.699.198,00**	**100,00%**	**94,11%**					**Biro Pemerintahan dan Kesra**	
	4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)			2	266.420.832,00	2	dokumen	138.656.788,00	2	131.838.448,00	**100,00%**	**95,08%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik			1	142.039.898,00	1	dokumen	43.792.880,00	1	39.860.750,00	**100,00%**	**91,02%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti**			**0**	**295.375.672,00**	**100**	**%**	**311.937.690,00**	**100**	**304.268.262,00**	**100,00%**	**97,54%**					**Biro Pemerintahan dan Kesra**	
	4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD			1	189.666.976,00	1	dokumen	203.521.144,00	1	197.899.110,00	**100,00%**	**97,24%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal			1	23.155.850,00	1	dokumen	108.416.546,00	1	106.369.152,00	**100,00%**	**98,11%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti**			**3**	**322.362.004,00**	**100**	**%**	**1.689.622.869,00**	**100**	**1.175.175.410,00**	**100,00%**	**69,55%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti			1	168.297.244,00	1	dokumen	163.461.209,00	1	154.006.865,00	**100,00%**	**94,22%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Potensi Kerjasama			1	140.960.000,00	1	dokumen	1.526.161.660,00	1	1.021.168.545,00	**100,00%**	**66,91%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kerthi**			**0**	**18.868.670.978,00**	**78**		**34.066.894.896,00**	**80,00**	**33.483.836.757,00**	**102,56%**	**98,29%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Persentase Pengembangan Mental Spiritual**			**0**	**8.901.382.874,00**	**100**	**%**	**10.049.871.726,00**	**100**	**9.609.025.467,00**	**100,00%**	**95,61%**					**Biro Pemerintahan dan Kesra**	
	4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan			471	8.608.255.680,00	445	upacara	9.115.491.970,00	445	8.681.777.451,00	**100,00%**	**95,24%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			6	293.127.194,00	6	dokumen	934.379.756,00	6	927.248.016,00	**100,00%**	**99,24%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**			**1**	**4.121.631.430,00**	**100**	**%**	**24.017.023.170,00**	**100**	**23.874.811.290,00**	**100,00%**	**99,41%**					**Biro Pemerintahan dan Kesra**	
	4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			1	4.121.631.430,00	1	dokumen	24.017.023.170,00	1	23.874.811.290,00	**100,00%**	**99,41%**					Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**			82	73.846.993.117,00	**82**	**nilai**	**88.612.446.888,00**	**0,00**	**82.882.734.628,00**	**99,17**	**93,53**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.01.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja daerah**	**Persentase kesesuaian perencanaan terhadap penganggaran belanja OPD**			100	**88.050.096,00**	**100**	**persen**	**421.670.946,00**	**0,00**	**380.037.054,00**	**100,00**	**90,13**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.01.01.	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	45.166.448,00	2	dokumen	297.800.898	2	269.788.006	**100,00**	**90,59**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai Anggaran	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			12	42.883.648,00	12	dokumen	123.870.048	12	110.249.048	**100,00**	**89,00**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.02	**Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			100	8.000.667.397,00	100	persen	10.389.249.275,00	0	**9.671.515.940,00**	**100,00**	**93,09**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.02.01	Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			55	7.915.836.501,00	55	orang	10.150.831.979	55	9.442.688.064	**100,00**	**93,02**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.02.03	sub. Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan Verifikasi			34	41.983.848,00	34	bahan	118.984.648	34	111.969.148	**100,00**	**94,10**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.02.07	sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan /Smesteran			14	42.847.048,00	14	dokumen	119.432.648	14	116.858.728	**100,00**	**97,84**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.06	**keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			100	**3.115.343.144,00**	**100**	**persen**	**9.160.784.853,00**	**0**	**7.517.936.721,00**	**100,00**	**82,07**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.06.01	sub. Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalansi listrik dan penerangan kantor yang tersedia			33	83.006.500,00	40	jenis	132.238.775	40	117.461.825	**100,00**	**88,83**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.06.02	sub. Keg Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor			71	409.109.600,00	71	jenis	366.232.480	71	348.772.100	**100,00**	**95,23**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.06.04	sub. Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia			3	421.765.900,00	3	jenis	1.206.934.254	3	939.894.000	**100,00**	**77,87**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.06.05	sub. Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan pengadaan yang tersedia			26	111.417.000,00	26	jenis	62.269.400	26	47.782.500	**100,00**	**76,74**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.06.06	sub. Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis koran dan perundang-undangan untuk masing-masing anggota DPRD yang tersedia			17	912.150.000,00	17	jenis	930.000.000	17	926.514.003	**100,00**	**99,63**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.06.09	sub. Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, menghadiri undangan, konsultasi, koordinasi, seminar, bimtek dan pameran yang dibayarkan per bulan			12	1.177.894.144,00	12	dokumen	6.463.109.944	12	5.137.512.293	**100,00**	**79,49**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.07	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**			100	**211.199.000,00**	**100**	**persen**	**728.416.326,00**	**0,00**	**594.276.975,00**	**100,00**	**81,58**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.07.10	sub. Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis sarana dan prasarana yang tersedia			53	211.199.000,00	20	jenis	728.416.326	20	594.276.975	**100,00**	**81,58**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.08	**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas**			100	**2.029.789.695,00**	**100**	**persen**	**2.422.535.832,00**	**0,00**	**2.092.935.478,00**	**100,00**	**86,39**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.08.01	sub. Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang tersedia			100	7.500.000,00	1000	lembar	7.500.000	1000	7.500.000	**100,00**	**100,00**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.08.02	sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penggunaan telepon, air dan listrik serta pulsa modem untuk Sekretariat DPRD Provinsi bali yang terbayar			144	548.720.463,00	144	rekening	890.000.000	144	570.222.054	**100,00**	**64,07**					**Sekretariat DPRD**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	4.02.01.1.08.04	sub. Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia			4	1.473.569.232,00	4	jasa	1.525.035.832	4	1.515.213.424	**100,00**	**99,36**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.09	**Keg Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik			100	**2.764.346.571,00**	**100**	persen	4.090.788.996,00	0,00	**3.424.311.828,00**	**100,00**	**83,71**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.09.02	sub. Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			49	2.381.119.296,00	49	kendaraan	3.167.244.096	49	2.936.140.184	**100,00**	**92,70**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.09.09	sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara			2	110.238.275,00	4	gedung	243.458.400	4	175.231.604	**100,00**	**71,98**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.09.10	sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik			22	272.989.000,00	22	jenis	680.086.500	22	312.940.040	**100,00**	**46,01**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.15	**Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD**			99,34	**56.708.809.949,00**	**100**	persen	**59.737.549.098,00**	**0,00**	**58.284.539.503,00**	**99,84**	**97,57**					**Sekretariat DPRD**	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu			12	**56.415.021.201,00**	**12**	dokumen	58.218.735.000	**12**	57.173.208.355	**100,00**	**98,20**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.15.02	sub. Keg Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pakaian dinas dan atribur DPRD yang tersedia			60	204.430.000,00	351	stel	1.244.334.000	351	933.583.100	**100,00**	**75,03**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.15.03	sub. Keg Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check up			22	89.358.748,00	55	orang	274.480.098	26	177.748.048	**47,27**	**64,76**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.16	**Keg. Layanan Administrasi DPRD**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik			100	**928.787.265,00**	**100**	**persen**	**1.661.451.562,00**	**0,00**	**917.181.129,00**	**100,00**	**55,20**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.16.02	sub. Keg Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah dokumen pandangan umum fraksi DPRD yang terhi9mpun			1	200.970.545,00	1	dokumen	229.421.490	1	204.816.340	**100,00**	**89,28**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.1.16.03	sub. Keg Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jumlah rapat DPRD yang terfasilitasi dalam setahun			48	727.816.720,00	48	laporan	1.432.030.072	48	712.364.789	**100,00**	**49,75**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali serta masyarakat**			5	**43.134.066.762,00**	**5**	**persen**	**118.135.193.037,00**	**0,00**	**62.832.981.850,00**	**95,37**	**53,19**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.01.	**Keg. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persentase terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD**			100	**4.771.203.140,00**	**100**	**Persen**	**18.798.328.998,00**	**0,00**	**5.349.580.246,00**	**100,00**	**28,46**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.01.01.	sub. Keg Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah keputusan DPRD tentang Propemperda			1	596.016.496,00	1	keputusan	1.553.992.906	1	770.367.414	**100,00**	**49,57**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.01.02.	sub. Keg Pembahasan Rancangan Perda	jumlah keputusan DPRD/keputusan Pimpinan DPRD/Rekomendasi yang terlaksana			7	3.924.563.696,00	12	keputusan	9.410.956.006	12	4.277.419.836	**100,00**	**45,45**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian PerundangUndangan	jumlah dokumen penyelenggaraan kajian perundang-undangan					3	Dokumen	7.174.700.680	0	0	**0,00**	**0,00**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.01.04.	sub. Keg Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah dokumen studi penelitian yang tersusun			3	250.622.948,00	4	dokumen	658.679.406	4	301.792.996	**100,00**	**45,82**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.02	**Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase terbentuknya Kebijakan Anggaran untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD**			100	**1.166.552.490,00**	**100**	**persen**	**4.578.041.440,00**	**0,00**	**2.909.082.296,00**	**100,00**	**63,54**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.02.01	sub. Keg Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS yang dihasilkan			1	40.341.448,00	1	keputusan	285.754.048	1	130.715.318	**100,00**	**45,74**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.02.02	sub. Keg Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan perubahan KUA dan PPAS yang dihasilkan			1	41.735.448,00	1	keputusan	235.278.098	1	196.459.810	**100,00**	**83,50**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.02.03	sub. Keg Pembahasan APBD	Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan			1	744.279.498,00	1	keputusan	1.609.146.098	1	602.269.102	**100,00**	**37,43**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.02.04	sub. Keg Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Peubahan APBD yang dihasilkan			1	298.401.048,00	1	keputusan	1.463.005.798	1	1.165.444.940	**100,00**	**79,66**					**Sekretariat DPRD**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	4.02.02.1.02.06	sub. Keg Pembahasan Pertanggunhjawaban APBD	Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan kesepakatan terkait pertanggungjawaban yang dihasilkan			1	41.795.048,00	1	keputusan	984.857.398	1	814.193.126	**100,00**	**82,67**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.03	**Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD**			100	**3.034.412.758,00**	100	persen	**34.957.877.284,00**	0,00	**9.470.261.469,00**	**100,00**	**27,09**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.03.01	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang pemerintahan dan hukum			12	766.889.542,00	12	laporan	8.278.061.692	12	2.408.361.893	**100,00**	**29,09**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.03.02	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			12	231.695.800,00	12	laporan	9.128.836.200	12	1.822.278.266	**100,00**	**19,96**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.03.03	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			12	670.312.496,00	12	laporan	7.908.179.516	12	1.902.545.741	**100,00**	**24,06**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.03.04	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			12	798.215.124,00	12	laporan	8.436.010.196	12	2.376.845.569	**100,00**	**28,17**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.03.08	sub. Keg Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah			1	567.299.796,00	1	rekomendasi	1.206.789.680	1	960.230.000	**100,00**	**79,57**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.02.04	**Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD**			87,68	**8.327.425.270,00**	100	persen	**14.941.157.586,00**	0,00	**11.304.734.321,00**	**100,00**	**75,66**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.04.02	sub. Keg Bimbingan Teknis	Jumlah pelaksanaan Bimtek			6	2.290.075.214,00	6	kali	5.412.289.344	6	3.625.462.820	**100,00**	**66,99**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.04.03	sub. Keg Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah peliputan dan penyebarluasan baik cetak maupun online			60	1.422.220.628,00	24	publikasi	3.436.479.596	24	2.502.016.206	**100,00**	**72,81**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.04.04	sub. Keg Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah dokumen pembayaran honor kelompok dan tim ahli			12	3.251.091.500,00	12	dokumen	3.246.703.500	12	3.246.672.900	**100,00**	**100,00**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.04.05	sub. Keg Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah dokumen pembayaran tenaga ahli fraksi			12	905.761.450,00	12	dokumen	903.498.650	12	903.467.600	**100,00**	**100,00**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.04.07	sub. Keg Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah keputusan DPRD tentang program kerja DPRD			1	458.276.478,00	1	keputusan	1.942.186.496	1	1.027.114.795	**100,00**	**52,88**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.05	**Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase terserap dan terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk menunjang tugas dan Fungsi DPRD**			100	**24.067.736.740,00**	100	persen	**31.252.704.985,00**	0,00	**29.351.129.879,00**	**100,00**	**93,92**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.05.01	sub. Keg Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah			4	1.233.804.746,00	4	dokumen	2.569.789.896	4	1.832.544.691	**100,00**	**71,31**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.05.02	sub. Keg Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah keputusan pokok pokok pikiran DPRD			2	732.085.200,00	2	keputusan	2.170.509.050	2	1.515.106.744	**100,00**	**69,80**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.05.03	Sub. Keg Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD			3	22.101.846.794,00	3	dokumen	26.512.406.039	3	26.003.478.444	**100,00**	**98,08**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.06	**Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Prosentase pelaksanaan pengawasan kode etikDPRD dalam rangka menunjang tugas dan Fungsi DPRD**			100	**82.633.978,00**	100	persen	**811.631.096,00**	0,00	**176.949.229,00**	**100,00**	**21,80**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.06.02	sub. Keg Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan kode etik DPRD			5	82.633.978,00	5	laporan	811.631.096	5	176.949.229	**100,00**	**21,80**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.08	**Keg. Fasilitas Tugas DPRD**	**Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan menunjang tugas dan fungsi DPRD**			100	**1.684.102.386,00**	100	persen	**12.795.451.648,00**	0,00	**4.271.244.410,00**	**100,00**	**33,38**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.08.01	sub. Keg Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD			10	1.611.747.044,00	10	laporan	11.614.198.984	10	3.717.017.064	**100,00**	**32,00**					**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.1.08.02	sub. Keg Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	jumlah buku kinerja pimpinan DPRD yang tersusun			3	72.355.342,00	3	buku	1.181.252.664	3	554.227.346	**100,00**	**46,92**					**Sekretariat DPRD**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
	5.02	**KEUANGAN**								**114.656.008.756,00**		**108.476.902.427,00**								
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**88**	**304.875.051.669,53**	**38,688023**	**53.838.631.433,00**	**79**	**%**	**113.663.121.626,00**		**107.526.881.078,00**	**0,00**	**94,60%**		**161.365.512.511,00**			**BAPENDA**	
	5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**100**	**13.208.010,00**	**100**	**%**	**20.621.700,00**	**100,00**	**16.058.168,00**	**1,00**	**77,87%**		**29.266.178,00**			**BAPENDA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu			100	9.888.130,00	100	%	11.091.400,00	100,00	8.845.933,00	1,00	79,75%		18.734.063,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu			100	3.319.880,00	100	%	9.530.300,00	100,00	7.212.235,00	1,00	75,68%		10.532.115,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**72,26**	**49.363.883.606,00**	**100**	**%**	**102.670.455.641,00**	**100,00**	**98.453.489.620,00**	**1,00**	**95,89%**		**147.817.373.226,00**			**BAPENDA**	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			72,26	49.363.883.606,00	100	%	102.670.455.641,00	100,00	98.453.489.620,00	**1,00**	95,89%		147.817.373.226,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	**-**			**-**		**-**				-			BAPENDA	
	5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti diklat dan kompeten			0	-			-		-				-			BAPENDA	
	5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti Bimtek				-									-			BAPENDA	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase layanan administrasi umum yang tersedia**			**43,952618**	**924.166.980,00**	**100**	**%**	**2.306.833.725,00**	**100,00**	**1.508.484.444,00**	**1,00**	**65,39%**		**2.432.651.424,00**			**BAPENDA**	
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			100	10.872.180,00	100	%	11.392.500,00	100,00	11.379.165,00	1,00	99,88%		22.251.345,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			100	84.469.150,00	100	%	111.449.225,00	100,00	104.890.175,00	1,00	94,11%		189.359.325,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			38	74.547.000,00	100	%	75.000.000,00	100,00	74.800.000,00	1,00	99,73%		149.347.000,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			0,7157089	680.798.700,00	100	%	1.719.510.000,00	100,00	1.177.281.500,00	1,00	68,47%		1.858.080.200,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			25	10.064.000,00	100	%	2.442.000,00	100,00	2.220.000,00	1,00	90,91%		12.284.000,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			0	4.493.500,00	200	nasi kotak	13.500.000,00	172,00	11.337.400,00	0,86	83,98%		15.830.900,00			BAPENDA	
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia					500	snack kotak		489									
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			2000	58.922.450,00	1700	nasi kotak	373.540.000,00	1540	126.576.204,00	0,91	33,89%		185.498.654,00			BAPENDA	
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia					1900	snack kotak		1787									
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana			2000		50	DL		12,00									
	5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib terukur, dan sesuai ketentuan**			**0,6666667**	**74.057.596,00**	**100**	**%**	**2.898.137.700,00**	**100,00**	**2.730.412.670,00**	**1,00**	**94,21%**		**2.804.470.266,00**			**BAPENDA**	
	5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis pengadaan kendaraan yang terlaksana			0	-	30	unit	582.242.000,00	30,00	531.429.040,00	1,00	91,27%		531.429.040,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana			0	73.480.000,00	3	jenis	1.868.000.000,00	3,00	1.783.246.050,00	1,00	95,46%		1.856.726.050,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terlaksana			2	577.596,00	7	jenis	447.895.700,00	7	415.737.580,00	1,00	92,82%		416.315.176,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia**			**46,696274**	**517.856.317,00**	**100**	**%**	**653.000.000,00**	**100,00**	**550.181.007,00**	**1,00**	**84,25%**		**1.068.037.324,00**			**BAPENDA**	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			95	2.850.000,00	100	%	3.000.000,00	100,00	2.850.000,00	1,00	95,00%		5.700.000,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			39,5	266.202.817,00	100	%	400.000.000,00	100,00	297.767.407,00	1,00	74,44%		563.970.224,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi			5,5888224	248.803.500,00	100	%	250.000.000,00	100,00	249.563.600,00	1,00	99,83%		498.367.100,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan**			**7,240602**	**2.945.458.924,00**	**100**	**%**	**5.114.072.860,00**	**45,00**	**4.268.255.169,00**	**0,45**	**83,46%**		**7.213.714.093,00**			**BAPENDA**	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			1	210.878.548,00	5	unit roda 4	303.762.048,00	1	184.796.248,00	0,20	60,84%		395.674.796,00			BAPENDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			2	526.851.488,00	10	unit roda 4	1.195.786.440,00	10	874.615.940,00	1,00	73,14%		1.401.467.428,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			18,625413	386.397.532,00	100	%	526.257.376,00	100,00	522.315.326,00	1,00	99,25%		908.712.858,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana			1	562.450.000,00	14	paket	1.917.882.900,00	14	1.519.086.559,00	1,00	79,21%		2.081.536.559,00			BAPENDA	
	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara			13,577597	1.258.881.356,00	100	%	1.170.384.096,00	100,00	1.167.441.096,00	1,00	99,75%		2.426.322.452,00			BAPENDA	
	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota**	**100%**	**318.672.057,00**	**49,974528**	**19.448.250,00**	**100**	**%**	**41.142.340,00**	**100,00**	**34.133.300,00**	**1,00**	**82,96%**		**53.581.550,00**			**BAPENDA**	
	5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina**			**49,974528**	**19.448.250,00**	**100**	**%**	**41.142.340,00**	**100,00**	**34.133.300,00**	**1,00**	**82,96%**		**53.581.550,00**			**BAPENDA**	
	5.02.02.1.02.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi			49,974528	19.448.250,00	100	%	41.142.340,00	100,00	34.133.300,00	1,00	82,96%		53.581.550,00			BAPENDA	
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**60,62%**	**12.618.679.676,00**	**27,469268**	**1.914.054.526,00**	**58,58**	**%**	**951.744.790,00**	**65,46**	**915.888.049,00**	**1,12**	**96,23%**		**2.829.942.575,00**			**BAPENDA**	
	5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Prosentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah**			**27,469268**	**1.914.054.526,00**	**58,58**	**%**	**951.744.790,00**	**65,46**	**915.888.049,00**	**1,12**	**96,23%**		**2.829.942.575,00**			**BAPENDA**	
	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan			2	122.934.550,00	1	inovasi	135.726.190,00	1	133.608.900,00	1,00	98,44%		256.543.450,00			BAPENDA	
			Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan			0		100	%		109,68									
			Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan			0		2	%		14,59									
	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti			0	55.123.401,00	4	rekomendasi	60.062.890,00	4	55.586.295,00	1,00	92,55%		110.709.696,00			BAPENDA	
			Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi			36,31		100	%		100,00									
			Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan			0		100	%		100,00									
	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak			71,468339	278.324.995,00	100	%	200.849.460,00	100,00	192.365.300,00	1,00	95,78%		470.690.295,00			BAPENDA	
	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD			1,2403649	1.446.096.400,00	83,71	%	519.603.910,00	92,46	507.289.674,00	1,10	97,63%		1.953.386.074,00			BAPENDA	
			Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun			0		20	%		56,10									
			Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun			0		23,97	%		8,99									
			Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti			0		90	%		100,00									
	5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD			26,327636	11.575.180,00	16,29	%	35.502.340,00	17,73	27.037.880,00	1,09	76,16%		38.613.060,00			BAPENDA	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG						**0**	7.928.247.132,00			5.327.722.767,00		5.108.152.717,00								
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**78,50**	**20.913.464.884,67**	**35,380844**	**4.768.972.052,00**	**79**	**%**	**1.787.811.791,00**		**1.684.517.861,00**	**0,00**	**94,22%**		**6.453.489.913,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**21,65382**	**3.495.028.730,00**	**100**	**%**	**241.047.595,00**	**100,00**	**241.047.595,00**	**1,00**	**100,00%**		**3.736.076.325,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG**	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			21,65382	3.495.028.730,00	100	%	241.047.595,00	41,95	241.047.595,00	0,42	100,00%		3.736.076.325,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**			**62,026491**	**207.981.400,00**	**100**	**%**	**262.680.640,00**	**100,00**	**250.985.350,00**	**1,00**	**95,55%**		**458.966.750,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG**	
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			50,728185	3.155.000,00	100	%	4.935.600,00	100,00	4.935.600,00	**1,00**	100,00%		8.090.600,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			99,626109	127.404.800,00	100	%	166.879.440,00	100,00	155.409.150,00	**1,00**	93,13%		282.813.950,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			66,1	25.000.000,00	100	%	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	**1,00**	100,00%		50.000.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			67,731141	12.181.600,00	100	%	11.805.600,00	100,00	11.805.600,00	**1,00**	100,00%		23.987.200,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			25	3.675.000,00	100	%	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	**1,00**	100,00%		8.175.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			25	8.250.000,00	360	galon air	9.000.000,00	360	9.000.000,00	**1,00**	100,00%		17.250.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			100	28.315.000,00	648	nasi kotak	40.560.000,00	643	40.335.000,00	**0,99**	99,45%		68.650.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			100		648	snack kotak		643									
			Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana			0		60	DD		60									
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia**			**41,949597**	**398.509.442,00**	**100**	**%**	**466.900.000,00**	**100,00**	**424.254.202,00**	**1,00**	**90,87%**		**822.763.644,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			100	2.250.000,00	100	%	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	1,00	100,00%		4.650.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			25,848791	196.586.842,00	100	%	264.000.000,00	100,00	222.133.202,00	1,00	84,14%		418.720.044,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi			0	199.672.600,00	100	%	200.500.000,00	100,00	199.721.000,00	1,00	99,61%		399.393.600,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan**			**15,89347**	**667.452.480,00**	**100**	**%**	**817.183.556,00**	**100,00**	**768.230.714,00**	**1,00**	**94,01%**		**1.435.683.194,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG**	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara			1	29.818.900,00	1	unit roda 4	31.703.200,00	1	31.657.600,00	1,00	99,86%		61.476.500,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			1	105.351.748,00	1	unit roda 4	154.476.148,00	1	139.403.048,00	1,00	90,24%		244.754.796,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			2		9	unit roda 2		9									
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			28,571429	29.820.000,00	100	%	38.140.000,00	100,00	38.140.000,00	1,00	100,00%		67.960.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana			20,351877	480.441.832,00	100	%	579.444.208,00	100,00	545.610.066,00	1,00	94,16%		1.026.051.898,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			26,544043	22.020.000,00	100	%	13.420.000,00	100,00	13.420.000,00	1,00	100,00%		35.440.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	**100%**	**15.581.063.658**	**22,750577**	**3.159.275.080,00**	**56,40**	**%**	**3.539.910.976,00**	**65,46**	**3.423.634.856,00**	**1,16**	**96,72%**		**6.582.909.936,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG**	
	5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (1)**			**22,750577**	**3.159.275.080,00**	**100**	**%**	**3.539.910.976,00**	**110,71**	**3.423.634.856,00**	**1,11**	**96,72%**		**6.582.909.936,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1)			21,841284	1.236.840.544,00	78	nilai IKM	1.366.182.784,00	83	1.357.937.784,00	**1,06**	99,40%		2.594.778.328,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (1)			23,65987	1.922.434.536,00	20	%	2.173.728.192,00	48,35	2.065.697.072,00	**2,42**	95,03%		3.988.131.608,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA						**0**	3.967.979.346,00			1.902.808.228,00		1.811.515.605,00								
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**78,50**	**14.000.145.324**	**32,501716**	**3.215.654.436,00**	**79**	**%**	**1.048.315.716,00**		**979.688.093,00**	**0,00**	**93,45%**		**4.195.342.529,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA**	
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**21,51247**	**2.272.614.436,00**	**100**	**%**	**163.001.800,00**	**100,00**	**163.001.800,00**	**1,00**	**100,00%**		**2.435.616.236,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA**	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			21,51247	2.272.614.436,00	100	%	163.001.800,00	100,00	163.001.800,00	**1,00**	100,00%		2.435.616.236,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**			**52,331952**	**193.651.055,00**	**100**	**%**	**156.158.680,00**	**100,00**	**148.127.980,00**	**1,00**	**94,86%**		**341.779.035,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA**	
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			100	3.685.000,00	100	%	2.297.000,00	100,00	1.836.000,00	1,00	79,93%		5.521.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			0	132.539.105,00	100	%	100.791.680,00	100,00	94.224.730,00	1,00	93,48%		226.763.835,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			68	24.975.000,00	100	%	25.000.000,00	100,00	24.975.000,00	1,00	99,90%		49.950.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			53,323667	12.001.950,00	100	%	5.820.000,00	100,00	5.367.250,00	1,00	92,22%		17.369.200,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			25	1.435.000,00												UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			60	3.220.000,00	240	galon air	6.000.000,00	240	5.520.000,00	1,00	92,00%		8.740.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			60	15.795.000,00	150	nasi kotak	16.250.000,00	149	16.205.000,00	0,99	99,72%		32.000.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			120		150	snack kotak		149					-				
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana			12		50	DD		50					-				
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia**			**30,284175**	**270.238.509,00**	**100**	**%**	**314.600.000,00**	**100,00**	**277.155.977,00**	**1,00**	**88,10%**		**547.394.486,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA**	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			62,264151	1.050.000,00	100	%	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1,00	100,00%		2.050.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			28,588375	125.023.757,00	100	%	168.600.000,00	100,00	131.540.577,00	1,00	78,02%		256.564.334,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi			0	144.164.752,00	100	%	145.000.000,00	100,00	144.615.400,00	1,00	99,73%		288.780.152,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan**			**25,878266**	**479.150.436,00**	**100**	**%**	**414.555.236,00**	**100,00**	**391.402.336,00**	**1,00**	**94,42%**		**870.552.772,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA**	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			1	24.029.000,00	1	unit roda 4	13.883.000,00	1	7.689.300,00	1,00	55,39%		31.718.300,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			1	84.631.448,00	1	unit roda 4	89.056.148,00	1	80.385.448,00	1,00	90,26%		165.016.896,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			2		9	unit roda 2		9									
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			60	5.297.000,00	100	%	7.100.000,00	100,00	6.770.000,00	1,00	95,35%		12.067.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana			9,8215928	358.107.988,00	100	%	293.858.688,00	100,00	287.612.588,00	1,00	97,87%		645.720.576,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			55,569737	7.085.000,00	100	%	10.657.400,00	100,00	8.945.000,00	1,00	83,93%		16.030.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**100%**	**3.802.023.847**	**17,022292**	**752.324.910,00**	**56,40**	**%**	**854.492.512,00**	**65,46**	**831.827.512,00**	**1,16**	**97,35%**		**1.584.152.422,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA**	
	5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (2)**			**17,022292**	**752.324.910,00**	**100**	**%**	**854.492.512,00**	**111,14**	**831.827.512,00**	**1,11**	**97,35%**		**1.584.152.422,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA**	
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2)			16,598439	354.948.327,00	78	nilai IKM	439.140.928,00	81,15	438.555.928,00	1,04	99,87%		793.504.255,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (2)			17,446146	397.376.583,00	20	%	415.351.584,00	41,35	393.271.584,00	2,07	94,68%		790.648.167,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN						**0**	5.862.574.148,00			2.493.682.172,00		2.348.991.231,00								
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**78,50**	**22.760.378.045**	**32,843316**	**4.994.735.188,00**	**79**	**%**	**1.609.663.212,00**		**1.477.527.271,00**	**0,00**	**91,79%**		**6.472.262.459,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN**	
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**21,590626**	**3.801.074.261,00**	**100**	**%**	**241.700.000,00**	**100,00**	**241.700.000,00**	**1,00**	**100,00%**		**4.042.774.261,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN**	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			21,590626	3.801.074.261,00	100	%	241.700.000,00	100,00	241.700.000,00	1,00	100,00%		4.042.774.261,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**			**59,695512**	**219.619.075,00**	**100**	**%**	**242.495.160,00**	**100,00**	**217.729.625,00**	**1,00**	**89,79%**		**437.348.700,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN**	
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			100	9.660.750,00	100	%	9.982.500,00	100,00	7.086.500,00	1,00	70,99%		16.747.250,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			100	166.456.725,00	100	%	177.572.660,00	100,00	166.703.125,00	1,00	93,88%		333.159.850,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			16,5	25.000.000,00	100	%	25.000.000,00	100,00	14.000.000,00	1,00	56,00%		39.000.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			66,49867	7.011.600,00	100	%	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00	1,00	100,00%		14.211.600,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			24,869911	3.870.000,00	100	%	3.240.000,00	100,00	3.240.000,00	1,00	100,00%		7.110.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			60	3.000.000,00	240	galon air	6.000.000,00	240	6.000.000,00	1,00	100,00%		9.000.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			50	4.620.000,00	300	nasi kotak	13.500.000,00	300	13.500.000,00	1,00	100,00%		18.120.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			50		300	snack kotak		300									
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia**			**41,663333**	**336.175.776,00**	**100**	**%**	**420.720.000,00**	**100,00**	**332.795.220,00**	**1,00**	**79,10%**		**668.970.996,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN**	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			100	3.819.000,00	100	%	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1,00	100,00%		4.819.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			24,99	133.696.176,00	100	%	220.220.000,00	100,00	132.890.420,00	1,00	60,34%		266.586.596,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi			0	198.660.600,00	100	%	199.500.000,00	100,00	198.904.800,00	1,00	99,70%		397.565.400,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan**			**8,4237915**	**637.866.076,00**	**100**	**%**	**704.748.052,00**	**100,00**	**685.302.426,00**	**1,00**	**97,24%**		**1.323.168.502,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN**	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya				20.452.500,00	1	unit roda 4	32.148.000,00	1	30.559.100,00	1,00	95,06%		51.011.600,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			1	130.059.096,00	1	unit roda 4	148.004.496,00	1	144.450.846,00	1,00	97,60%		274.509.942,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			2		11	unit roda 2		11									
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			0	4.190.000,00	100	%	7.300.000,00	100,00	3.635.000,00	1,00	49,79%		7.825.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana			18,958688	476.364.480,00	100	%	486.537.456,00	100,00	479.749.480,00	1,00	98,60%		956.113.960,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			19,160269	6.800.000,00	100	%	30.758.100,00	100,00	26.908.000,00	1,00	87,48%		33.708.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**100%**	**4.194.978.677**	**22,731418**	**867.838.960,00**	**56,40**	**%**	**884.018.960,00**	**65,46**	**871.463.960,00**	**1,16**	**98,58%**		**1.739.302.920,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN**	
	5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (3)**			**22,731418**	**867.838.960,00**	**100**	**%**	**884.018.960,00**	**109,75**	**871.463.960,00**	**1,10**	**98,58%**		**1.739.302.920,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN**	
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)			23,976704	413.514.480,00	78	nilai IKM	422.614.480,00	0,00	422.299.480,00	0,00	99,93%		835.813.960,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3)			21,486132	454.324.480,00	20	%	461.404.480,00	52,11	449.164.480,00	2,61	97,35%		903.488.960,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG							11.418.652.792,00			4.955.801.094,00		4.824.788.070,00								
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**78,50**	**35.746.580.299**	**23,233053**	**8.697.086.080,00**	**79**	**%**	**2.042.320.662,00**		**1.967.592.638,00**	**0,00**	**96,34%**		**10.664.678.718,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG**	
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**21,806119**	**7.117.332.339,00**	**100**	**%**	**358.300.000,00**	**100,00**	**358.300.000,00**	**1,00**	**100,00%**		**7.475.632.339,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG**	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			21,806119	7.117.332.339,00	100	%	358.300.000,00	100,00	358.300.000,00	1,00	100,00%		7.475.632.339,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**			**29,30797**	**265.147.350,00**	**100**	**%**	**337.989.650,00**	**100,00**	**298.280.275,00**	**1,00**	**88,25%**		**563.427.625,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG**	
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			24,365624	4.729.000,00	100	%	7.400.000,00	100,00	7.347.600,00	**1,00**	99,29%		12.076.600,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			0	161.058.750,00	100	%	200.489.650,00	100,00	191.309.575,00	**1,00**	95,42%		352.368.325,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			22,6	25.000.000,00	100	%	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	**1,00**	100,00%		50.000.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			21,190165	40.634.600,00	100	%	61.000.000,00	58,25	30.808.100,00	**0,58**	50,51%		71.442.700,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			25	5.850.000,00	100	%	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00	**1,00**	100,00%		15.450.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			32	19.925.000,00	480	galon air	12.000.000,00	480	12.000.000,00	**1,00**	100,00%		31.925.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			80	7.950.000,00	500	nasi kotak	22.500.000,00	500	22.215.000,00	**1,00**	98,73%		30.165.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			55		500	snack kotak		481									
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia**			**21,508564**	**504.744.367,00**	**100**	**%**	**488.160.000,00**	**100,00**	**480.170.631,00**	**1,00**	**98,36%**		**984.914.998,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG**	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			39,525692	2.530.000,00	100	%	2.660.000,00	100,00	2.660.000,00	1,00	100,00%		5.190.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			25	302.647.367,00	100	%	285.000.000,00	100,00	277.958.331,00	1,00	97,53%		580.605.698,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi			0	199.567.000,00	100	%	200.500.000,00	100,00	199.552.300,00	1,00	99,53%		399.119.300,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan**			**20,30956**	**809.862.024,00**	**100**	**%**	**857.871.012,00**	**100,00**	**830.841.732,00**	**1,00**	**96,85%**		**1.640.703.756,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG**	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara			1	15.752.000,00	1	unit roda 4	27.118.100,00	1	23.744.600,00	1,00	87,56%		39.496.600,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			1	118.139.348,00	2	unit roda 4	144.659.088,00	1	135.844.808,00	0,50	93,91%		253.984.156,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			2		10	unit roda 2		9									
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			31,883775	51.185.000,00	100	%	55.420.000,00	100,00	53.435.000,00	1,00	96,42%		104.620.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana			35,194689	587.964.676,00	100	%	576.193.824,00	100,00	574.537.324,00	1,00	99,71%		1.162.502.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			30,469335	36.821.000,00	100	%	54.480.000,00	100,00	43.280.000,00	1,00	79,44%		80.101.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**100%**	**13.350.816.368**	**27,277499**	**2.721.566.712,00**	**56,40**	**%**	**2.913.480.432,00**	**65,46**	**2.857.195.432,00**	**1,16**	**98,07%**		**5.578.762.144,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG**	
	5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (4)**			**27,277499**	**2.721.566.712,00**	**100**	**%**	**2.913.480.432,00**	**120,14**	**2.857.195.432,00**	**1,20**	**98,07%**		**5.578.762.144,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG**	
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4)			32,195196	1.834.835.680,00	78	nilai IKM	1.954.478.576,00	85,90	1.929.593.576,00	1,10	98,73%		3.764.429.256,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (4)			22,359803	886.731.032,00	20	%	959.001.856,00	63,99	927.601.856,00	3,20	96,73%		1.814.332.888,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR							11.665.148.439,00			5.458.548.756,00		5.198.100.110,00								
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**78,50**	**35.729.454.639**	**30,638179**	**8.762.753.183,00**	**79**	**%**	**2.488.163.792,00**		**2.287.791.737,00**	**0,00**	**91,95%**		**11.050.544.920,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR**	
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**23,466708**	**7.287.726.500,00**	**100**	**%**	**438.800.000,00**	**100,00**	**438.800.000,00**	**1,00**	**100,00%**		**7.726.526.500,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR**	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			23,466708	7.287.726.500,00	100	%	438.800.000,00	100,00	438.800.000,00	1,00	100,00%		7.726.526.500,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**			**32,519033**	**247.358.175,00**	**100**	**%**	**509.950.820,00**	**100,00**	**422.961.110,00**	**1,00**	**82,94%**		**670.319.285,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			22,563602	7.552.000,00	100	%	10.952.000,00	100,00	8.800.035,00	1,00	80,35%		16.352.035,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			99,691416	144.676.675,00	100	%	276.570.520,00	94,81	259.184.400,00	0,95	93,71%		403.861.075,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			30,8	25.000.000,00	100	%	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	1,00	100,00%		50.000.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			24,571554	48.087.500,00	100	%	63.828.300,00	100,00	60.392.675,00	1,00	94,62%		108.480.175,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			25,001858	4.292.000,00	100	%	16.150.000,00	100,00	12.210.000,00	1,00	75,60%		16.502.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			25,0048	17.750.000,00	510	nasi kotak	84.450.000,00	0	41.630.000,00	0,00	49,30%		59.380.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			0		610	snack kotak		50									
			Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			0		2400	galon air		1338									
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			0	-	600	nasi kotak	33.000.000,00	275	15.744.000,00	0,46	47,71%		15.744.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			0		1000	snack kotak		545									
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia**			**49,979803**	**533.465.576,00**	**100,00**	**%**	**581.990.000,00**	**100,00**	**531.798.092,00**	**1,00**	**91,38%**		**1.065.263.668,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR**	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			100	1.230.000,00	100,00	%	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1,00	100,00%		2.730.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			25,003	332.710.976,00	100,00	%	380.000.000,00	100,00	330.217.392,00	1,00	86,90%		662.928.368,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi			24,936409	199.524.600,00	100,00	%	200.490.000,00	100,00	200.080.700,00	1,00	99,80%		399.605.300,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan**			**16,587172**	**694.202.932,00**	**100**	**%**	**957.422.972,00**	**100,00**	**894.232.535,00**	**1,00**	**93,40%**		**1.588.435.467,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR**	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara			25,017925	23.478.400,00	1	unit roda 4	47.471.000,00	1	41.450.500,00	1,00	87,32%		64.928.900,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13	
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			24,043239	110.093.196,00	6	unit roda 2	124.658.596,00	2	116.505.496,00	0,33	93,46%		226.598.692,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebel	Persentase mebeleur yang terpelihara			0	-			-		-							UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			26,057441	17.280.000,00	100	%	19.150.000,00	100,00	18.023.500,00	1,00	94,12%		35.303.500,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana			24,404428	501.787.836,00	100	%	710.277.376,00	100,00	681.118.039,00	1,00	95,89%		1.182.905.875,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			37,57098	41.563.500,00	100	%	55.866.000,00	100,00	37.135.000,00	1,00	66,47%		78.698.500,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**100%**	**13.855.570.838**	**20,664552**	**2.902.395.256,00**	**56,40**	**%**	**2.970.384.964,00**	**65,46**	**2.910.308.373,00**	**1,16**	**97,98%**		**5.812.703.629,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR**	
	5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (5)**			**20,664552**	**2.902.395.256,00**	**100,00**	**%**	**2.970.384.964,00**	**114,40**	**2.910.308.373,00**	**1,14**	**97,98%**		**5.812.703.629,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR**	
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5)			26,706567	2.764.751.360,00	78	nilai IKM	2.752.107.524,00	86,70	2.702.265.133,00	1,11	98,19%		5.467.016.493,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (5)			14,622537	137.643.896,00	20	%	218.277.440,00	65,93	208.043.240,00	3,30	95,31%		345.687.136,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR							6.723.026.665,00			3.557.452.332,00		3.411.510.733,00									
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**78,50**	**23.055.124.597**	**32,966918**	**4.896.815.553,00**	**79**	**%**	**1.748.734.412,00**		**1.688.050.149,00**	**0,00**	**96,53%**		**6.584.865.702,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR**	
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**23,241521**	**3.414.892.740,00**	**100**	**%**	**297.704.000,00**	**100,00**	**297.704.000,00**	**1,00**	**100,00%**		**3.712.596.740,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR**	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			23,241521	3.414.892.740,00	100	%	297.704.000,00	100,00	297.704.000,00	1,00	100,00%		3.712.596.740,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**			**57,46021**	**212.162.350,00**	**100**	**%**	**236.883.940,00**	**100,00**	**230.580.900,00**	**1,00**	**97,34%**		**442.743.250,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			54,672664	14.007.000,00	100	%	15.000.600,00	100,00	15.000.600,00	1,00	100,00%		29.007.600,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			0	135.782.950,00	100	%	147.298.340,00	100,00	140.995.300,00	1,00	95,72%		276.778.250,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			15	25.000.000,00	100	%	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	1,00	100,00%		50.000.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			43,548806	15.322.400,00	100	%	16.225.000,00	100,00	16.225.000,00	1,00	100,00%		31.547.400,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			25	3.360.000,00	100	%	5.760.000,00	100,00	5.760.000,00	1,00	100,00%		9.120.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			224	13.850.000,00	960	galon air	24.000.000,00	960	24.000.000,00	1,00	100,00%		37.850.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			40	4.840.000,00	80	nasi kotak	3.600.000,00	80	3.600.000,00	1,00	100,00%		8.440.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			40		80	snack kotak		80									
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia**			**44,433903**	**387.558.091,00**	**100**	**%**	**430.900.000,00**	**100,00**	**384.319.077,00**	**1,00**	**89,19%**		**771.877.168,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR**	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			100	1.860.000,00	100	%	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	1,00	100,00%		3.860.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			33,301708	185.808.791,00	100	%	228.400.000,00	100,00	182.414.377,00	1,00	79,87%		368.223.168,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi			0	199.889.300,00	100	%	200.500.000,00	100,00	199.904.700,00	1,00	99,70%		399.794.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan**			**6,7320379**	**882.202.372,00**	**100**	**%**	**783.246.472,00**	**100,00**	**775.446.172,00**	1,00	99,00%		1.657.648.544,00			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR**	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara			1	24.827.700,00	1	unit roda 4	28.828.100,00	1	28.783.100,00	**1,00**	99,84%		53.610.800,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			2	109.194.848,00	9	unit roda 2	127.494.648,00	9	122.730.848,00	**1,00**	96,26%		231.925.696,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			0	17.715.000,00	100	%	27.100.000,00	100,00	27.025.000,00	**1,00**	99,72%		44.740.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana			30,660189	699.449.824,00	100	%	560.093.824,00	100,00	559.579.724,00	**1,00**	99,91%		1.259.029.548,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			0	31.015.000,00	100	%	39.729.900,00	100,00	37.327.500,00	**1,00**	93,95%		68.342.500,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**100%**	**8.707.973.058**	**23,764966**	**1.826.211.112,00**	**56,40**	**%**	**1.808.717.920,00**	**65,46**	**1.723.460.584,00**	**1,16**	**95,29%**		**3.549.671.696,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR**	
	5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (6)**			**23,764966**	**1.826.211.112,00**	**100**	**%**	**1.808.717.920,00**	**118,21**	**1.723.460.584,00**	**1,18**	**95,29%**		**3.549.671.696,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR**	
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6)			32,103419	934.778.960,00	78	nilai IKM	921.372.512,00	85,25	915.772.512,00	**1,09**	99,39%		1.850.551.472,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (6)			15,426512	891.432.152,00	20	%	887.345.408,00	51,40	807.688.072,00	**2,57**	91,02%		1.699.120.224,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI							4.249.504.385,00			2.046.785.820,00		1.973.240.882,00								
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**78,50**	**14.634.656.054**	**25,172186**	**3.269.563.185,00**	**79**	**%**	**1.050.474.620,00**		**997.644.682,00**	**0,00**	**94,97%**		**4.267.207.867,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI**	
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**25**	**2.421.069.291,00**	**100**	**%**	**156.500.000,00**	**100,00**	**156.500.000,00**	**1,00**	**100,00%**		**2.577.569.291,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			25	2.421.069.291,00	100	%	156.500.000,00	100,00	156.500.000,00	1,00	100,00%		2.577.569.291,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**			**36,399996**	**155.176.400,00**	**100**	**%**	**160.723.240,00**	**100,00**	**156.225.275,00**	**1,00**	**97,20%**		**311.401.675,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI**	
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			25	9.345.000,00	100	%	9.500.000,00	100,00	9.412.000,00	1,00	99,07%		18.757.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			100	105.528.000,00	100	%	119.723.240,00	100,00	115.313.275,00	1,00	96,32%		220.841.275,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			15,8	25.000.000,00	100	%	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	1,00	100,00%		50.000.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			24,999974	7.768.400,00	100	%	6.500.000,00	100,00	6.500.000,00	1,00	100,00%		14.268.400,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			25	3.825.000,00												UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			64	3.710.000,00												UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana			0	-												UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia**			**33,843282**	**228.232.972,00**	**100**	**%**	**271.500.000,00**	**100,00**	**225.358.527,00**	**1,00**	**83,00%**		**453.591.499,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI**	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			51,612903	3.100.000,00	100	%	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1,00	100,00%		4.100.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			25	75.096.904,00	100	%	120.000.000,00	100,00	74.775.027,00	1,00	62,31%		149.871.931,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi			24,916944	150.036.068,00	100	%	150.500.000,00	100,00	149.583.500,00	1,00	99,39%		299.619.568,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan**			**5,4454662**	**465.084.522,00**	**100**	**%**	**461.751.380,00**	**100,00**	**459.560.880,00**	**1,00**	**99,53%**		**924.645.402,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara			1	16.203.334,00	1	unit roda 4	19.134.000,00	1	19.133.600,00	1,00	100,00%		35.336.934,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			2	42.365.300,00	1	unit roda 4	48.772.900,00	1	46.582.800,00	1,00	95,51%		88.948.100,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			0		9	unit roda 2		3									
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			0	14.970.000,00	100	%	14.200.000,00	100	14.200.000,00	1,00	100,00%		29.170.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana			24,227331	383.264.480,00	100	%	374.764.480,00	100,00	374.764.480,00	1,00	100,00%		758.028.960,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			0	8.281.408,00	100	%	4.880.000,00	100,00	4.880.000,00	1,00	100,00%		13.161.408,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**100%**	**4.556.723.851**	**23,624736**	**979.941.200,00**	**56,40**	**%**	**996.311.200,00**	**65,46**	**975.596.200,00**	**1,16**	**97,92%**		**1.955.537.400,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI**	
	5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (7)**			**23,624736**	**979.941.200,00**	**100**	**%**	**996.311.200,00**	**113,64**	**975.596.200,00**	**1,14**	**97,92%**		**1.955.537.400,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI**	
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7)			24,007699	536.820.272,00	78	nilai IKM	549.720.272,00	81,31	549.405.272,00	1,04	99,94%		1.086.225.544,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (7)			23,241773	443.120.928,00	20	%	446.590.928,00	42,55	426.190.928,00	2,13	95,43%		869.311.856,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG							**4.423.212.082,00**			**2.702.665.182,00**		**2.398.611.881,00**								
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**78,50**	**16.565.155.297**	**35,016884**	**3.684.701.042,00**	**79**	**%**	**1.864.684.118,00**		**1.620.367.665,00**	**0,00**	**86,90%**		**5.305.068.707,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG**	
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**21,620725**	**2.525.610.924,00**	**100**	**%**	**207.827.390,00**	**100,00**	**207.827.390,00**	**1,00**	**100,00%**		**2.733.438.314,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG**	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			21,620725	2.525.610.924,00	100	%	207.827.390,00	100,00	207.827.390,00	1,00	100,00%		2.733.438.314,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**			**56,702036**	**123.412.650,00**	**100**	**%**	**279.189.660,00**	**100,00**	**222.870.600,00**	1,00	79,83%		346.283.250,00			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			50	2.634.000,00	100	%	2.967.600,00	100,00	2.804.100,00	1,00	94,49%		5.438.100,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			99,35181	75.279.650,00	100	%	148.118.060,00	99,46	142.477.500,00	0,99	96,19%		217.757.150,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			45,472	24.596.000,00	100	%	25.000.000,00	100,00	24.136.000,00	1,00	96,54%		48.732.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			76,090442	4.818.000,00	100	%	32.744.000,00	82,49	7.658.000,00	0,82	23,39%		12.476.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			25	1.500.000,00	100	%	2.700.000,00	100,00	2.700.000,00	1,00	100,00%		4.200.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			66	4.050.000,00	304	galon air	7.600.000,00	302	7.550.000,00	0,99	99,34%		11.600.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			35	10.535.000,00	360	nasi kotak	60.060.000,00	250	35.545.000,00	0,69	59,18%		46.080.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			35		484	snack kotak		250									
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana			0		0	DL		0									
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana			0		81	DD		58									
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia**			**45,953679**	**240.301.332,00**	**100**	**%**	**344.200.000,00**	**100,00**	**252.640.019,00**	**1,00**	**73,40%**		**492.941.351,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG**	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			87,603306	1.500.000,00	100	%	1.900.000,00	84,21	1.600.000,00	0,84	84,21%		3.100.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			25	94.138.132,00	100	%	196.800.000,00	100,00	105.782.219,00	1,00	53,75%		199.920.351,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi			25,257732	144.663.200,00	100	%	145.500.000,00	100,00	145.257.800,00	1,00	99,83%		289.921.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan**			**15,791096**	**795.376.136,00**	**100**	**%**	**1.033.467.068,00**	**100,00**	**937.029.656,00**	**1,00**	**90,67%**		**1.732.405.792,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG**	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara			1	23.780.000,00	1	unit roda 4	38.485.500,00	1	20.901.500,00	**1,00**	54,31%		44.681.500,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			1	73.877.468,00	2	unit roda 4	177.222.500,00	2	123.434.600,00	**1,00**	69,65%		197.312.068,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			2		10	unit roda 2		10									
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase mebeleur yang terpelihara			25,000007	3.422.500,00	100	%	21.500.000,00	100,00	4.917.500,00	**1,00**	22,87%		8.340.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana			30,257351	679.672.268,00	100	%	771.623.168,00	100,00	770.140.256,00	**1,00**	99,81%		1.449.812.524,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			19,698124	14.623.900,00	100	%	24.635.900,00	100,00	17.635.800,00	**1,00**	71,59%		32.259.700,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**100%**	**3.715.108.572**	**24,122592**	**738.511.040,00**	**56,40**	**%**	**837.981.064,00**	**65,46**	**778.244.216,00**	**1,16**	**92,87%**		**1.516.755.256,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG**	
	5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (8)**			**24,122592**	**738.511.040,00**	**100**	**%**	**837.981.064,00**	**113,97**	**778.244.216,00**	**1,14**	**92,87%**		**1.516.755.256,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG**	
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)			25,263146	440.420.916,00	78	nilai IKM	498.700.928,00	83,06	464.837.492,00	1,06	93,21%		905.258.408,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (8)			22,982038	298.090.124,00	20	%	339.280.136,00	44,64	313.406.724,00	2,23	92,37%		611.496.848,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	
UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM							3.646.301.647,00			1.843.330.958,00		1.775.973.902,00								
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**78,50**	**13.516.217.214**	**20,537466**	**2.891.845.583,00**	**79**	**%**	**1.038.694.894,00**	**79,00**	**995.831.838,00**	**1,00**	**95,87%**		**3.887.677.421,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan**			**22,186699**	**1.921.348.119,00**	**100**	**%**	**146.732.760,00**	**100,00**	**146.732.760,00**	**1,00**	**100,00%**		**2.068.080.879,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM**	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu			22,186699	1.921.348.119,00	100	%	146.732.760,00	100,00	146.732.760,00	1,00	100,00%		2.068.080.879,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum yang tersedia**			**21,81912**	**185.406.775,00**	**100**	**%**	**180.618.850,00**	**100,00**	**166.302.200,00**	**1,00**	**92,07%**		**351.708.975,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM**	
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi			51,471211	4.113.400,00	100	%	2.551.000,00	100,00	2.506.000,00	1,00	98,24%		6.619.400,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			0	134.396.125,00	100	%	117.687.850,00	100,00	111.151.200,00	1,00	94,45%		245.547.325,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi			15	25.000.000,00	100	%	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	1,00	100,00%		50.000.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			21,262626	8.612.250,00	100	%	3.920.000,00	100,00	2.700.000,00	1,00	68,88%		11.312.250,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi			25	3.360.000,00	100	%	3.360.000,00	100,00	3.100.000,00	1,00	92,26%		6.460.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia			40	3.375.000,00	200	galon air	6.000.000,00	200	6.000.000,00	1,00	100,00%		9.375.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			0	6.550.000,00	220	nasi kotak	22.100.000,00	96	15.845.000,00	0,44	71,70%		22.395.000,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
			Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia			0		400	snack kotak		400									
			Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana			0		50	DD		50									
	5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia**			**30,247326**	**268.203.916,00**	**100**	**%**	**280.300.000,00**	**100,00**	**264.372.594,00**	**1,00**	**94,32%**		**532.576.510,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi			65,227273	1.619.980,00	100	%	800.000,00	100,00	800.000,00	1,00	100,00%		2.419.980,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			25,514706	122.260.036,00	100	%	135.000.000,00	100,00	119.699.694,00	1,00	88,67%		241.959.730,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi			0	144.323.900,00	100	%	144.500.000,00	100,00	143.872.900,00	1,00	99,57%		288.196.800,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan**			**7,90**	**516.886.773,00**	**100**	**%**	**431.043.284,00**	**100,00**	**418.424.284,00**	**1,00**	**97,07%**		**935.311.057,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM**	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara			1	23.969.000,00	1	unit roda 4	20.294.200,00	1	18.795.900,00	1,00	92,62%		42.764.900,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			1	64.501.648,00	1	unit roda 4	72.386.548,00	1	66.040.048,00	1,00	91,23%		130.541.696,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya			2		10	unit roda 2		6									
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			15,452539	8.723.000,00	100	%	11.360.000,00	100,00	10.627.900,00	1,00	93,56%		19.350.900,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana			9,4969311	413.086.836,00	100	%	284.101.136,00	100,00	283.898.436,00	1,00	99,93%		696.985.272,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			10,534132	6.606.289,00	100	%	42.901.400,00	100,00	39.062.000,00	1,00	91,05%		45.668.289,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**100%**	**3.795.526.025**	**16,275021**	**754.456.064,00**	**56,40**	**%**	**804.636.064,00**	**65,46**	**780.142.064,00**	**1,16**	**96,96%**		**1.534.598.128,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM**	
	5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) (9)**			**16,275021**	**754.456.064,00**	**100**	**%**	**804.636.064,00**	**115,30**	**780.142.064,00**	**1,15**	**96,96%**		**1.534.598.128,00**			**UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9)			16,523197	435.980.928,00	78	nilai IKM	460.420.928,00	83,00	458.501.928,00	1,06	99,58%		894.482.856,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (9)			16,026846	318.475.136,00	20	%	344.215.136,00	43,27	321.640.136,00	2,16	93,44%		640.115.272,00			UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM	
	2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								**490.199.458.031,00**		**485.317.873.247,00**		**99,00%**					**DPMA**	
	2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**								**490.199.458.031,00**		**485.317.873.247,00**		**99,00%**					**DPMA**	
	2.22.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**			**80,39**	**12.486.999.231,00**	**82**	**Nilai Evaluasi**	**15.956.211.537,00**	**82**	**14.262.060.815,00**	**100,00%**	**89,38%**					**DPMA**	
	2.22.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**11**	**7.988.550,00**	**9**		**13.861.000,00**	**9**	**10.963.237,00**	**100,00%**	**79,09%**					**DPMA**	
	2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			4	2.208.750,00	9	dokumen	13.861.000,00	9	10.963.237,00	100,00%	79,09%					DPMA	
	2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun			1	1.007.700,00	0	dokumen	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun			1	16.250,00	0	dokumen	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun			1	878.000,00	0	dokumen	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun			1	2.796.000,00	0	dokumen	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja danIkhtiar dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD			1	577.850,00	0	dokumen	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahyang tersusun			2	504.000,00	0	dokumen	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diproses**			**2537**	**8.267.905.364,00**	**52**		**9.567.807.463,00**	**52**	**9.447.574.993,00**	**100,00%**	**98,74%**					**DPMA**	
	2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses			52	8.233.594.164,00	52	dokumen	9.567.807.463,00	52	9.447.574.993,00	100,00%	98,74%					DPMA	
	2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi			2430	25.798.550,00	0	dokumen	-	0	-	-						DPMA	
	2.22.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan			2	451.100,00	0	dokumen	-	0	-	-						DPMA	
	2.22.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun			53	8.061.550,00	0	dokumen	-	0	-	-						DPMA	
	2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah pengadaan barang dan jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diproses**			**3213**	**500.727.240,00**	**4096**		**926.368.900,00**	**4084**	**551.318.542,00**	**99,71%**	**59,51%**					**DPMA**	
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai			794	61.635.420,00	794	unit	24.354.200,00	794	22.318.000,00	100,00%	91,64%					DPMA	
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekwensi upacara keagamaan yang dilasanakan			2	325.775.000,00	0	jenis	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jasa penggandaan yang diproses			12	79.587.520,00	0	bulan	46.565.700,00	0	40.782.956,00	-	87,58%					DPMA	
			Jumlah jasa pengadaan dan cetak yang diproses dan siap pakai			1909		2937	unit		2937		100,00%						DPMA	
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan			459	1.453.500,00	12	Bulan	17.216.000,00	12	7.467.000,00	100,00%	43,37%					DPMA	
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan			37	32.275.800,00	341	kali	838.233.000,00	341	480.750.586,00	100,00%	57,35%					DPMA	
	2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang diadakan dan siap pakai**			**26**	**1.023.111.250,00**	**15**		**1.213.206.000,00**	**15**	**995.083.221,00**	**100,00%**	**82,02%**					**DPMA**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
	2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses			26	1.023.111.250,00	15	unit	1.213.206.000,00	15	995.083.221,00	100,00%	82,02%					DPMA	
	2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dan siap pakai**			**168**	**370.727.528,00**	**35**		**944.382.250,00**	**35**	**379.184.214,00**	**100,00%**	**40,15%**					**DPMA**	
	2.22.01.1.08.01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai			102	1.020.000,00	0	lembar	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang diproses			36	246.770.928,00	0	dokumen	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia dan siap pakai			30	122.936.600,00	35	unit	944.382.250,00	35	379.184.214,00	100,00%	40,15%					DPMA	
	2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai**			**492**	**2.316.539.299,00**	**30**		**3.290.585.924,00**	**30**	**2.877.936.608,00**	**100,00%**	**87,46%**					**DPMA**	
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai			11	397.009.900,00	6	unit	1.384.600.896,00	6	1.010.644.796,00	100,00%	72,99%					DPMA	
	2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2	84.352.916,00	0	unit	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan			395	1.607.996.336,00	0	Bulan	1.905.985.028,00	0	1.867.291.812,00	-	97,97%					DPMA	
			Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan			12		12	bulan	0	12	0	100,00%						DPMA	
			Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan			12		12	bulan	0	12	0	100,00%						DPMA	
	2.22.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantoryang dipelihara			60	227.180.147,00	0	unit	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.09	**Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali**	**Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan**			**99,93**	**458.655.364.017,00**	**100%**	**Persen**	**474.243.246.494,00**	**99,97%**	**471.055.812.432,00**	**99,97%**	**99,33%**					**DPMA**	
			Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan			**97,76**		**100%**	**Persen**		**98%**		**98,00%**							
	2.22.09.1.01	**Pembinaan Kelembagaan Desa Adat**	**Jumlah keluaran pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat**			**6213**	**456.962.879.341,00**	**6652**	**Dokumen**	**469.896.605.985,00**	**7545**	**467.816.542.067,00**	**113,42%**	**99,56%**					**DPMA**	
	2.22.09.1.01.01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan			1364	8.026.995.026,00	300	Desa Adat	468.700.600.241,00	1432	467.170.470.712,00	477,33%	99,67%					DPMA	
			Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan			1492	448.472.007.455,00	1493	Desa Adat	-	1492	-	99,93%						DPMA	
			Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan			1492		1493	Desa Adat		1492		99,93%						DPMA	
			Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun			1		1	juknis		0		0,00%						DPMA	
			Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi			1492		1493	proposal		1492		99,93%						DPMA	
	2.22.09.1.01.02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah produk hukum Desa Adat yang diregistrasi			3	463.876.860,00	500	produk hukum	1.196.005.744,00	294	646.071.355,00	58,80%	54,02%					DPMA	
			Jumlah Produk Hukum Adat yang terapload melalui aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)			363		375	produk hukum		1338		356,80%						DPMA	
			Jumlah Wicara Adat yang difasilitasi			6		4	wicara adat		5		125,00%						DPMA	
	2.22.09.1.01.03	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan			1492	448.472.007.455,00	0	Desa Adat	-	0	-	-	-					DPMA	
			Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan			1492		0	Desa Adat		0		-						DPMA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			
			Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun			1		0	juknis		0		-						DPMA	
			Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi			1492		0	proposal		0		#DIV/0!						DPMA	
	2.22.09.1.02	**Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat**	**Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses**			**22**	**207.419.420,00**	**36**		**705.727.988,00**	**43**	**648.307.963,00**	**119,44%**	**91,86%**					**DPMA**	
	2.22.09.1.02.01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah LPD yang mengikat kreterianya menjadi sehat			4	20.321.000,00	15	LPD	151.055.550,00	10	119.517.625,00	66,67%	79,12%					DPMA	
			Jumlah Pararem LPD yang tersusun					1	Pararem		0		0,00%							
	2.22.09.1.02.02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi			15	181.180.420,00	15	BUPDA	554.672.438,00	33	528.790.338,00	220,00%	95,33%					DPMA	
			Jumlah Desa Adat yang memiliki kerjasama					2	dokumen		0		0,00%							
			Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun					1	pararem		0		0,00%							
			Jumlah Pararem Kerjasama yang tersusun					1	pararem		0		0,00%							
	2.22.09.1.02.03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi			3	5.918.000,00	0	dokumen	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.09.1.03	**Penyelenggaraan Desa Adat**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses**			**3080**	**272.611.482,00**	**2930**	**Dokumen**	**632.068.892,00**	**2832**	**440.117.542,00**	**96,66%**	**69,63%**					**DPMA**	
			Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan					**0**	**persen**											
	2.22.09.1.03.01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Jumlah laporan pendataan penyelenggaraan pembangunan di desa adat			1	61.395.550,00	0	laporan	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.09.1.03.02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumenperencanaan pembangunan Desa Adat yang berkualitas			400	170.406.232,00	0	Desa Adat	-	0	-	-	-					DPMA	
			Jumlah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Desa Adat yang tersusun			1		0	dokumen		0		-						DPMA	
	2.22.09.1.03.03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi Desa Adat yang tersusun			1	40.809.700,00	1	Dokumen	632.068.892,00	1	440.117.542,00	100,00%	69,63%					DPMA	
			Jumlah proposal pencairan dana Subak dan SubakAbian yang diverifikasi			2677		2726	proposal		2830		103,82%						DPMA	
			Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun					1	Dokumen		1		100,00%							
	2.22.09.1.04	**Pembinaan Sumber Daya Manusia**	**Jumlah Dokumen, SDM, dan Lembaga Adat yang berkualitas**			**305**	**1.212.453.774,00**	**2330**	**Dokumen**	**3.008.843.629,00**	**7836**	**2.150.844.860,00**	**336,31%**	**71,48%**					**DPMA**	
	2.22.09.1.04.01	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tatakelola pemerintahan Desa Adat			300	27.119.450,00	0	orang	-	0	-	-	-					DPMA	
	2.22.09.1.04.02	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Pasraman Non Formal di Desa Adat yang dikembangkan			0	11.983.500,00	0	pasraman non formal	-	0	-	-	-					DPMA	
			Jumlah pedoman / juknis pembentukan Pasraman yang disusun			1		0	pedoman/ juknis		0		-						DPMA	
	2.22.09.1.04.03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk			1	1.173.350.824,00	2000	paiketan/ juknis	3.008.843.629,00	7833	2.150.844.860,00	391,65%	71,48%					DPMA	
			Jumlah buku/pedoman/juknis Lembaga Adat yang disusun			3	-	3	buku/pedoman/juknis		3		100,00%						DPMA	

A. Kendala/Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya-Upaya Penyelesaian Permasalahan.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah, secara umum terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Adanya sub kegiatan yang dihapuskan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, sehingga mengakibatkan perubahan input realisasi anggaran dan kinerja pada triwulan sebelumnya.
2. Sub kegiatan pendukung indikator kinerja belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022
3. Realisasi pelaksanaan sub kegiatan tidak maksimal sebagaimana yang direncanakan karena terkendala kebijakan dan aturan yang terbit pertengahan tahun.
4. Realisasi belanja yang tidak mencapai target karena direalisasikan sesuai dengan kebutuhan (seperti Belanja Listrik, Air danTelepon).
5. Keterlambatan proses pengadaan karena terkendala juknis dan ketentuan pengadaan, barang yang akan diadakan belum tayang atau baru tayang pada pertengahan tahun di *e-katalog* dan beberapa barang di *e-katalog* mengalami penurunan harga sehingga dana banyak yang efisensi.
6. Sering terjadi keterlambatan penyampaian data laporan bulanan/triwulanan secara berjenjang dari kelompok ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi sehingga data yang ada bukan data terbaru hal ini menyebabkan sulit dipergunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan.
7. Terbatasnya personil dalam penyelesaian administrasi kegiatan/sub kegiatan dengan sumber pendanaan khusus seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).
8. Adanya pergantian admin SiDalev pada beberapa Perangkat Daerah sehingga admin yang baru perlu waktu untuk mempelajari SiDalev.

9. Adanya kelambatan admin SiDalev pada beberapa Perangkat Daerah dalam melakukan input realisasi anggaran dan capaian target kinerja.
10. Perbaikan pagu anggaran dan target indikator kinerja pada triwulan sebelumnya akibat perubahan anggaran pada aplikasi SiDalev, masih memerlukan waktu dan dilakukan secara per tahap (per triwulan)

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan:

1. Mengoptimalkan pelaksaaan program/kegitan/sub kegiatan sesuai dengan perencanaan/aliran kas.
2. Program/kegiatan yang direncanakan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga apa yang ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal .
3. Bersinergi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/lembaga terkait dalam pencapaian target karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.
4. Menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian serta instansi terkait lainnya.
6. Melaksanakan pengembangan sistem untuk menunjang pemanfaatan data cepat dan akurat, baik berupa data spasial maupun data tektual yang mampu mengintegrasikan antar data-data tersebut.
7. Merencanakan pengusulan bimbingan teknis administrasi keuangan
8. Melakukan penginputan realisasi anggaran dan capaian kinerja langsung di Bappeda Provinsi Bali bagi admin SiDalev yang baru dan yang lambat dalam melakukan penginputan.
9. Tetap melakukan penyempurnaan aplikasi sehingga SiDalev semakin mudah dan cepat dioperasionalkan.

2.2.2. Realisasi RPJMD

Pelaksanaan Urusan dan Program Kegiatan sampai dengan tahun 2022 mengacu pada target Pembangunan Provinsi Bali tahun 2018-2023 yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Evaluasi tahun 2022 merupakan tahun ketiga dalam mendukung pencapaian pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Berdasarkan RPJMD tersebut diatas, sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali dalam setiap tahunnya telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai kewenangan pelaksanaan urusan yang selanjutnya dituangkan dalam RKPD, KUA, PPAS, dan APBD.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.

Mengacu pada penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terdapat 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Utama, yang realisasi capaian pada Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 2.37 berikut:

Tabel 2.37.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target Tahun 2022		Target Kondisi Akhir 2023
			Target	Realisasi*	
1	Tingkat Inflasi Bali	%	3.00±1%	6,44	3,00% ±1% (yoy)
2	Ketersediaan pangan utama	%	100	104,007	100
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	22.00	14.85 (SMT I)	25

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target Tahun 2022		Target Kondisi Akhir 2023
			Target	Realisasi*	
4	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	%	33	36	35
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	105.50	95.43	106
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	118.5	100.44	119.2
7	Umur Harapan Hidup (UHH)	Dalam tahun	72.5	72.6	72.5
8	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10.84	9.39	11.4
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16 -18 tahun	%	83,11	(belum rilis)	83.3
10	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.91	13,48	14.05
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	76,93 (75.61-78.25)	76.44	77,78 (75,56-80,00)
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	Indeks	69,09	69,09	74.55
13	Persentase Kemiskinan	%	4,25 (4,00-4,50)	4,53	3,75 (3,50-4,00)
14	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,19 (2.77-3.61)	4.8	2,32 (1,90-2,74)
15	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76.55	76.86	76.8
16	Indeks Kebahagiaan	Indeks	73.98	71,44 (realisasi 2021, perhitungan dilakukan 2 tahun sekali)	74.98
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	20,86	17,93	25.93
18	Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	2.642.000	1.223.000.000	17,373,460
19	Indeks kepuasan wisatawan	%	83	(belum rilis)	85
20	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,10 (2,70-3,50)	3.05 (SMT I)	5,00 (4,60-5,40)
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	%	12,5	(belum rilis)	13
22	Indeks konektivitas	Rata-rata waktu tempuh (jam/100km)	2,4	(belum rilis)	2.3
23	Angka kriminalitas	Kasus	2,731	1,533	2,262
24	Indeks demokrasi	%	81	(belum rilis)	81
25	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	64,9	(belum rilis)	65

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi dan Target Tahun 2022		Target Kondisi Akhir 2023
			Target	Realisasi*	
26	Daya dukung lingkungan	%	17.64	(belum rilis)	17.82
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	63.77	70,89	64.34
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	14.8	(belum rilis)	15
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	%	1,2	1,26	1.4
30	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74	(BB, nilai RB belum rilis)	76

Ket. Data realisasi sementara per 31 Januari 2023

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 seperti pada Tabel 2.37 diatas, dari 30 IKU terdapat 6 indikator yang telah mencapai/melebihi target kinerja akhir periode Tahun 2023, sebanyak 5 indikator yang capaiannya 90% s.d <100%, 9 indikator yang capaiannya dibawah 90%, 1 indikator yang datanya tidak tersedia karena pengukurannya dilakukan setiap 2 tahun dan terdapat 9 indikator yang datanya belum rilis sampai laporan ini disusun.

b. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara umum penetapan target-target IKK cenderung moderat dan mendukung secara langsung capaian IKU Daerah. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja Pemerintahan Provinsi Bali pada masing-masing aspek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.38.

Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.33	3.10 (2.70-3.50)	4,84	BPS	pertumbuhan c-to-c (akumulasi) triwulan I- triwulan IV tahun 2022
2	Laju Inflasi	%	3.4	3.00±1%	6,20	BPS	Inflasi gabungan Kota Denpasar dan Kota SIngaraja tahun ke tahun (YoY) Desember 2021 – Desember 2022
3	PDRB per kapita	Jumlah	54.62 juta	62 juta – 67 juta	55,54 juta	BPS	
4	Indeks Gini	%	0.364	0.357	0,362	BPS	angka semester II dari Susenas Sept
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	3.91	4.25 (4.00-4.50)	4,53	BPS	angka semester II dari Susenas Sept
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	74.45	76.93 (75.61-78.25)	76.44	BPS	IPM Tahun 2022
7	Angka Melek Huruf	%	89.17	92.9	95.53	BPS	Statistik Pendidikan 2022 (AMH penduduk 15 tahun ke atas) bersumber dari Susenas Maret 2022. AMH 15-24 thn : 99,94 AMH 15-59 thn : 99,09
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9.72	10.84	9.39	BPS	
9	Angka usia harapan hidup	tahun	71.4	72.5	72.6	BPS	
10	Persentase balita gizi buruk	%	2	1	0.2	Dinkes	
11	Prevalensi balita gizi kurang	%	13.1	8.5	1.8	Dinkes	
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	Dinkes	
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Jumlah	2,561,518	2,723,567	2,738,539	BPS	Sakernas Agustus 2022
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	76.56	76.55	76.86	BPS	Sakernas Agustus 2022
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	1.37	3.19 (2.77-3.61)	4.8	BPS	Sakernas Agustus 2022
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	81	N/A	BPS	Data tidak tersedia
17	Opini BPK	Status	Belum	WTP	WTP	Inspektorat	Berdasarkan LHP BPK No.

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							65/LHP/XIX.DPS/05/2022 tanggal 13 Mei 2022
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	95.90	96.62	88.3	Distan TP	
19	Penguatan cadangan pangan	%	20	20	20	Distan TP	
20	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	14.38	14.57	9,93%	BPS	Keseluruhan kontribusi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian) dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
21	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	2.52	1.93	1,65	BPS	Kontribusi sub sektor Tanaman Pangan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
22	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	1.48	1.43	1,47	BPS	Kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	16.84	14.38	-	BPS	PDRB tidak menghitung kontribusi kelompok petani

Sumber: Evaluasi RKPD Semesta Berencana Tahun 2022

Tabel 2.39.

Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	%	17.45	16.21	18.81	BPS	
2	Nilai Tukar Petani	%	103.87	105.50	95.43	BPS	Menggunakan angka indeks NTP berjalan dgn keterangan sbb: Semester I : NTP berjalan bulan Januari-Juni 2022 (BRS No. 38/07/51/Th. XVI, 1 Juli 2022) Semester II : NTP berjalan bulan Januari-Desember 2022 (BRS No. 02/01/51/Th. XVII, 2 Januari 2023)
3	Angka kriminalitas	Kasus	4,607	2,731	1,533	Polda Bali	
4	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72.48 (2017)	73.98	-	BPS	Diperoleh dari hasil survey pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2021
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase (%)	23.40	20.86	17,93	BPS	Dalam klasifikasi PDRB, secara khusus tidak disebutkan kategori lapangan usaha pariwisata. Karena aktivitas pariwisata sangat luas dan saling terkait satu sama lain. Namun aktivitas pariwisata pada umumnya sangat terkait dengan aktivitas pada Kategori lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan makan minum, sehingga seringkali Pariwisata didekati dengan kategori tersebut.
							Namun sebagai catatan, bahwa kategori lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tidak 100% menggambarkan pariwisata. Terdapat Kategori lapangan usaha lain yang juga berhubungan dengan pariwisata, misalnya Perdagangan, Transportasi, Jasa Perusahaan serta Jasa lainnya. Dan sebaiknya perlu diketahui pula bahwa yang dicakup dalam Kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dan Makan Minum juga tidak hanya kegiatan pariwisata, tapi juga aktivitas lain yang tidak terkait dengan pariwisata.
							Angka pada kolom realisasi adalah kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2022
6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	15	22.00	14,68	BPS	Kontribusi Lapangan Usaha A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Sumber: Evaluasi RKPD Semesta Berencana Tahun 2022

Tabel 2.40.

Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali

Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	**Pendidikan**						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	79.1	83.1	29.58	Disdikpora	
1.2	**Angka Partisipasi Kasar**						
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	105.9	109.052	101.72	Disdikpora	
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	106.95	112.39	95.76	Disdikpora	
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	%	100.4	103.616	100.51	Disdikpora	
1.3	**Angka Pendidikan yang Ditamatkan**						
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	%	24.55	25.73	20.67	Disdikpora	
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B	%	11.73	12.91	19.51	Disdikpora	
1.3.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/ MA/Paket C	%	23.41	24.59	32.77	Disdikpora	
1.4	**Angka Partisipasi Murni**						
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96.06	100	93.38	Disdikpora	
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	84.54	100	78.92	Disdikpora	
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	73.15	100.00	74.00	Disdikpora	
1.5	**Angka Partisipasi Sekolah**						
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99.56	99.56	93.38	Disdikpora	
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah	%	97.92	97.92	78.92	Disdikpora	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(APS) SMP/MTs/Paket B						
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	82.35	82.35	74.00	Disdikpora	
1.6	**Angka Putus Sekolah**						
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.05	0.01	0.00	Disdikpora	
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.10	0.06	0.00	Disdikpora	
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0.25	0.21	0.03	Disdikpora	
1.7	**Angka Kelulusan**						
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	Disdikpora	
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	99.99	Disdikpora	
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99.99	100	99.98	Disdikpora	
1.8	**Angka Transisi (AT)**						
1.8.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	%	96.24	100.47	104.83	Disdikpora	
1.8.2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	%	95.85	100.47	94.14	Disdikpora	
1.9	**Fasilitas Pendidikan**						
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	93.28	96.26	62.38	Disdikpora	
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	92.07	95.05	69.04	Disdikpora	Kewenangan disdikpora kabupaten/kota
1.9.3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	96.00	97.87	71.72	Disdikpora	Adanya recofusing anggaran dan perlunya koordinasi yang lebih intensif
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	63.77	63.97	49.26	Disdikpora	Kewenangan disdikpora kabupaten/kota
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah	%	18.12	23.95	20.32	Disdikpora	karena adanya recofusing anggaran dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah						perlunya koordinasi yang lebih intensif
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	%	60.61	66.09	62.03	Disdikpora	Kewenangan disdikpora kabupaten/kota
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	%	61.27	65.37	63.38	Disdikpora	
	- SMA/MA (per 1000 murid)	%	78.88		62.04	Disdikpora	
	- SMK (per 1000 murid)	%	70.05		64.92	Disdikpora	
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata						
1.14.1	SD/MI	%	0.03	0.03	0.01	Disdikpora	
1.14.2	SMP/MTS	%	0.09	0.09	0.07	Disdikpora	
1.14.3	SMA/SMK/MA	%	0.10	0.10	0.10	Disdikpora	
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100.00	108.72	108.20	Disdikpora	
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	99.87	99.90	99.94	BPS	
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	92.98	93.22	95.53	Disdikpora	
1.18	**Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV**						
1.18.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	%	87.96	77.26	70.73	Disdikpora	
1.18.2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	%	93.16	96.84	95.88	Disdikpora	
1.18.3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	%	95.91	97.95	97.27	Disdikpora	
1.18.4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	%	96.39	97.55	93.95	Disdikpora	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(SMA/SMK/MA)						
2	**Kesehatan**						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4,55	10	4.83	Dinas Kesehatan	Data absolut sampai bulan oktober 319 dengan jumlah LH 66008
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	5.17	6.5	4.95	Dinas Kesehatan	Data absolut sampai bulan oktober 325 dengan jumlah LH 66008
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	3.2	4.41	4.27	Dinas Kesehatan	Data absolut sampai bulan oktober 282 dengan jumlah LH 66008
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	54.03	66	84.83	Dinas Kesehatan	Data absolut sampai bulan oktober 56 dengan jumlah LH 66008
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	%	1.45	1.52	1.61	Dinas Kesehatan	Data dipakai data tahunan sesuai profil kesehatan
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk						
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	%	1.17	0.027	0.027	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas 120
2.6.2	Rasio klinik	%	0.021	0.032	0.05	Dinas Kesehatan	Jumlah klinik 220
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	%	0.12	0.12	0.12	Dinas Kesehatan	Jumlah pustu 515
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0.016	0.0018	0.0021	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit 74
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.35	0.97	0.93	Dinas Kesehatan	data mg II des 2022
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	%				Dinas Kesehatan	
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	%	1.85	2.60	2.75	Dinas Kesehatan	data mg II des 2022
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	%	1.07	1.25	1.27	Dinas Kesehatan	data mg II des 2022
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	86.53	88.50	100.00	Dinas Kesehatan	
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	%	95.97	96.7	100	Dinas Kesehatan	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kompetensi kebidanan						
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	99.16	100	0.67	Dinas Kesehatan	data bulan November 2022
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.14	Case Detection Rate TBC	%	30	36	0.3	Dinas Kesehatan	Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	%	89	90	0.8232	Dinas Kesehatan	Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	1	Dinas Kesehatan	Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022
2.17	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	21.1	104	108	Dinas Kesehatan	Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022
2.18	Penderita diare yang ditangani	%	70.20	100	100	Dinas Kesehatan	Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022
2.19	Angka kematian Malaria	%	0	<1	0	Dinas Kesehatan	data s/d bln November tahun 2022
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	%	0.02	< 1	0.005	Dinas Kesehatan	data s/d bln November tahun 2022
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	%	66.4	85	84	Dinas Kesehatan	Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022
2.22	Persentase Kasus HIV yang diobati	%	57.54	55	55	Dinas Kesehatan	Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022
2.23	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	21	22.2	22	Dinas Kesehatan	Capaian sampai dengan tanggal 14/12/2022
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.25	Cakupan kunjungan bayi	%	102.92	100	83.53	Dinas Kesehatan	Data Cakupan sampai dengan bulan Oktober
2.26	Cakupan Kunjungan Puskesmas	%	80	100	100	Dinas Kesehatan	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.27	Cakupan puskesmas pembantu	%	0.12	0.12	0.12	Dinas Kesehatan	
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	94.49	96	70.89	Dinas Kesehatan	Data Cakupan sampai dengan bulan Oktober
2.29	Cakupan Pelayanan nifas	%	96.81	98.5	73.37	Dinas Kesehatan	Data Cakupan sampai Oktober
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	58.88	Dinas Kesehatan	Data Cakupan sampai dengan bulan Oktober
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	68.84	Dinas Kesehatan	Data Cakupan sampai dengan bulan Oktober
2.32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.33	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	98.54	Dinas Kesehatan	data sampai tgl 15 Des 2022
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.36	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	%	100	100	100	Dinas Kesehatan	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	71.51	77.96	76.84	Dinas PUPR Perkim	
3.2	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	%	68.00	48.33	49.00	Dinas PUPR Perkim	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.4	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	%	80.81	76.89	74.00	Dinas PUPR Perkim	
3.5	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	%	58	72.00	72.00	Dinas PUPR Perkim	
3.6	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi yang bersertifikat	%	70	16.51	16.51	Dinas PUPR Perkim	
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	%	100	100	100	Dinas PUPR Perkim	
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan pengujian Jasa Konstruksi	%	100	90.00	100.00	Dinas PUPR Perkim	
3.9	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	%	100	41.00	50.31	Dinas PUPR Perkim	Data 2021 Semester 2, Karena Belum Dilakukan Survei Tahun 2022
3.10.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	%	86	92.00	92.00	Dinas PUPR Perkim	
3.10.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	%	82	89.79	89.79	Dinas PUPR Perkim	
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang	%	90	94	94.0	Dinas PUPR Perkim	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**						
4.5	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah	%	12	70.0	70.0	Dinas PUPR Perkim	Thn 2022 terbangun 2 unit rumah pasca bencana/ dampak proyek pemerintah Provinsi dengan lokasi Desa Tista. Kec Abang. Kab Karangasem (DPA: DPPA/A.2/I.03.I.04.2.10.01.0000/001/2022)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.6	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	%	8.2	8.0	45.0	Dinas PUPR Perkim	Tahun 2021 dalam tahap perencanaan dgn no. DPA: DPPA/A.2/I.03.I.04.2.10.01.0000/001/2022, Keg: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, Sub Keg: Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Paket Pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi PSU Permukiman, Lokasi : Desa Serahi, Desa Mengani dan Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
5	**Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat**						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	29.83	30.39	30.26	Satpol PP	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	Satpol PP	
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	35.54	35.58	60	Satpol PP	
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	44.62	44.66	73.20	Satpol PP	
5.5	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	Satpol PP	
6	**Sosial**						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	0.58	0.31	0,40	Dinsos P3A	Tidak terdapat bansos pada APBD Dinsos P3A Provinsi Bali sejak tahun 2021
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	0.67	1.05	0,98	Dinsos P3A	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	0.41	0.7	0,51	Dinsos P3A	
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	3,8	60	60	Dinsos P3A	
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	25	20	N/A	Dinsos P3A	Tidak teralokasi anggaran untuk untuk WKBSM
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	Dinsos P3A	
6.7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	BPBD	
6.8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	60.03	60	11,27	Dinsos P3A	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	**Tenaga Kerja**						
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 perusahaan	0,006:1000 perusahaan	0,004:1000 perusahaan	0,002: 1000 perusahaan	Disnaker ESDM	
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100	47.83	Disnaker ESDM	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	78.05	100	73.84	Disnaker ESDM	
1.4	Keselamatan dan perlindungan	%	0.94	6.28	7, 16	Disnaker ESDM	
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	29.93	36.39	49.40	Disnaker ESDM	
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	4.49	7.40	5, 13	Disnaker ESDM	
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	42.26	19.37	39.95	Disnaker ESDM	
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	38.4	18.01	12.34	Disnaker ESDM	
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100	100.00	Disnaker ESDM	
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	80	-	-	Disnaker ESDM	Dari tahun 2021 tidak ada dilaksanakan secara khusus terkait pelatihan kewirausahaan.
1.11	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Pendu duk	0.073:10.000 penduduk	0.069:10.000 penduduk	0,075: 10.000 penduduk	Disnaker ESDM	Data jumlah lulusan menggunakan data tahun sebelumnya, karena data tahun 2022 belum tersdia, dan data jumlah penduduk menggunakan data proyeksi BPS.
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	46.03	46.83	49,65	Dinsos P3A	
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	9.09	15.90	16,36	Dinsos P3A	
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	46.70	48.60	52,00	Dinsos P3A	
2.4	Rasio KDRT	%	0.056	0.046	0,442	Dinsos P3A	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	-	-		Dinsos P3A	Belum rilis
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	72.55	72.95	69,5	Dinsos P3A	
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	Dinsos P3A	
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	0	Dinsos P3A	
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	74,14	Dinsos P3A	
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	1,72	Dinsos P3A	
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	%	100	100	74,14	Dinsos P3A	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	74,14	Dinsos P3A	
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	88.50	88.5	74,14	Dinsos P3A	
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	1.01	1.00	1,00	Dinsos P3A	
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	0.97	1.00	0,99	Dinsos P3A	
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	0.94	0.97	0,99	Dinsos P3A	
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	%	0.93	0.97	-	BPS	Belum rilis untuk tahun 2022. Data terakhir adalah 2021 yaitu 25,28 (akumulasi laki-laki dan perempuan)
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	0.93	0.97	1.00	BPS	
3	**Pangan**						
3.1	Ketersediaan Pangan Utama						
3.1.1	Padi	Ton	847,523	855,523	814,434	Distan TP	
3.1.2	Jagung	Ton	43,892	45,500	61,310	Distan TP	
3.1.3	Kedelai	Ton	2,500	2,706	2,945	Distan TP	
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	4,408	4,871	5,541	Distan TP	
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	53,267	55,500	80,946	Distan TP	
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	170	179	213	Distan TP	
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	25,042	27,106	19,734	Distan TP	
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2,646	2,650	2,672	Distan TP	Ketersediaan energi sudah melebihi angka rekomendasi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari
		Gram/Kap/Hari	63	63	72.01	Distan TP	Ketersediaan protein sudah melebihi angka rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 63 gram protein/kapita/hari
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80.00	95	85	Distan TP	
4	**Pertanahan**						
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	%	0	40	99	BPN	1. Adanya sengketa adat yang membutuhkan Perarem/ awig/ aturan yang tegas (komunal/ perorangan); 2. Arsip BT dan SU yang hilang/ rusak/ terbakar/ tidak tersedia menghambat proses K4; 3. Bidang PTSL tumpang Tindih dengan K4 yang baru terplotting, dan hasil pengukuran pihak ketiga yang butuh pengukuran ulang; 4. Untuk bidang K3, subyek tidak diketahui pemiliknya perangkat desa atau tidak berdomisili di Bali; 5. Kesulitan penunjukan batas untuk topografi yang curam/di sempadan sungai/ batas hutan.
5	**Lingkungan Hidup**						
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Dishut dan LH	
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Dishut dan LH	
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Dishut dan LH	
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	15 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	Dishut dan LH	Pemuthakiran dan Finalisasi Dokumen RPPLH Prov. Bali

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	ya	ya	Ya	Dishut dan LH	
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	91.89	87.38	89.19	Dishut dan LH	
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	63,17	68.03	53.5	Dishut dan LH	
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	38,57	41.49	43.36	Dishut dan LH	
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Jumlah	N/A	62.24	88.49	Dishut dan LH	
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	6	1	-	Dishut dan LH	Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi untuk tahun 2022 tidak dapat terlaksana karena tidak adanya anggaran pelaksanaan kegiatan
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	1		Dinas PUPR Perkim	
5.12	Jumlah limbah B3 yag dikelola			9 Kab/Kota	Ada	Dinas PUPR Perkim	Pembinaan dan pengawasan dilakukan ke 9 Kab/Kota, namun belum semua Kab/Kota menginput data limbah B3.
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	%	100	100	-	Dishut dan LH	Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 sudah tidak ada izin pengumpulan Limbah B3, namun berubah menjadi Persetujuan Tenis. Tahun 2021 ada 1 perusahaan yang memperpanjang izin menjadi persetujuan teknis yaitu PT. Bali Bumi Berkarya dan 1 perusahaan yang mengajukan Persetujuan teknis yaitu PT. Bakti Bumi Berseri. Untuk Tahun 2022 belum ada perusahan yang mengajukan persetujuan teknis.
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	Perusahaan	17 perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Dishut dan LH	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1	Dishut dan LH	Pejabat Pengawas PPLHD belum dikukuhkan kembali
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	100	100	-	Dishut dan LH	Penetapan MHA dimaksud termasuk dalam Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tahun 2022 belum dilaksanakan fasilitasi MHA dalam menghimpun data dan informasi profil MHA kearifan lokasi atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	%	100	100	-	Dishut dan LH	
5.18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	%	100	100	-	Dishut dan LH	
5.19	Penetapan hak MHA	%	100	100	100	Dishut dan LH	
5.20	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	30	30	108	Dishut dan LH	Terlaksananya penguatan dan pendampingan pengelolaan sampah sebanyak 16 TPS3R di Kabupaten Tabanan dan Gianyar, dengan jumlah lebih kuran 48 orang.
5.21	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	100	100	100	Dishut dan LH	Tidak adanya alokasi anggaran untuk penyediaan sarana/prasarana dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota
5.22	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	30	30	48	Dishut dan LH	Terlaksananya penguatan dan pendampingan pengelolaan sampah sebanyak 16 TPS3R di Kabupaten Tabanan dan Gianyar, dengan jumlah lebih kuran 48 orang.
5.23	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan	Jumlah	30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1	30 Adiwiyata	17 Adiwiyata	Dishut dan LH	Adanya perubahan target menjadi 10 orang/kelompok/sekolah. Usulan calon

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	hidup		Kalpataru				penghargaan nasional 7 Kalpataru dan 17 Adiwiyata (10 Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan 7 Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri). Target 30 Adiwiyata merupakan penghargaan Adiwiyata Provinsi, namun tidak dilaksanakan.
5.24	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	15 kasus	2 Kasus	8 Kasus	Dishut dan LH	-
5.25	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/ tahun	9,305,453	991,573,370	584,896.25	Dishut dan LH	
5.26	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	%	73	73	0.55	Dishut dan LH	
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	%	0.93	0.99	0.99	DPMD Dukcapil	
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	84	94.17	96.68	DPMD Dukcapil	
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	40	60.38	55.2	DPMD Dukcapil	
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada	ada	DPMD Dukcapil	
6.5	Penerapan KTP Nasional	Sudah/Belum	sudah	sudah	sudah	DPMD	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	berbasis NIK					Dukcapil	
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	94.62	99.5	99.7	DPMD Dukcapil	
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	33.64	54	49.7	DPMD Dukcapil	
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	43.78	75.94	75.31	DPMD Dukcapil	
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	%	12.29	12.29	12.29	DPMD Dukcapil	
7.3	Persentase LPM Berprestasi	%	14.24	20.79	18.93	DPMD Dukcapil	
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	%	60.61	100	100	DPMD Dukcapil	
7.5	Persentase Posyandu aktif	%	69.8	75.8	78.13	DPMD Dukcapil	
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	200	300	300	DPMD Dukcapil	
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50	76.92	98.43	DPMD Dukcapil	
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2.15	2.15	0.19	DPMD Dukcapil	Data Agregat Kependudukan Prov. Bali Semester I Tahun 2022
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.1	2.3	1.98	DPMD Dukcapil	Data PK21 (sampai September 2022 TFR belum dapat diukur, menunggu hasil survey lebih lanjut)
8.3	Persentase Perangkat	%	29	40	100	DPMD	Data BKKBN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB					Dukcapil	
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	13.73	25	25	DPMD Dukcapil	Bappeda, PKK, BKKBN Kanwil Agama, Koalisi Kependuduka n
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	2	1	DPMD Dukcapil	Instruksi Gubernur Nomor 1545 Tahun 2019
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	3	6	6	DPMD Dukcapil	BKKBN,PKK, DINKES, DISDIK, Dinas PMA, Perangkat Desa
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	2	10	14	DPMD Dukcapil	7 Sekolah dan 7 DISDIK Kab/Kota
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2.02	2,3	1.41	DPMD Dukcapil	Data Agregat Kependudukan Prov. Bali Smt I Tahun 2022
8.9	Angka pemakain	%	57,9	57	53.38	DPMD	SIGA (sampai September 2022)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49					Dukcapil	
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	36	28.02	15.5	DPMD Dukcapil	Data PK21 (sampai September 2022 ASFR belum dapat diukur, menunggu hasil survey lebih lanjut)
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	35.12	38.20	N/A	DPMD Dukcapil	Hanya terdapat data untuk WUS Kawin Pertama <20 Tahun (Data Adpin BKKBN) Capaian = 20
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	18.56	9.86	17.9	DPMD Dukcapil	Data PK21 (smp September 2022 Unmet Need belum dapat diukur, menunggu hasil survey lebih lanjut)
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	43.46	41.5	44.35	DPMD Dukcapil	SIGA (sampai September 2022)
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	29.6	23	15.1	DPMD Dukcapil	Data PK21 (Adpin BKKBN)
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	87.80	88.90	60.62	DPMD Dukcapil	Data PK 21
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	85.2	89.0	59.9	DPMD Dukcapil	Data PK 21
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	70.48	73	26.03	DPMD Dukcapil	Data PK 21
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	77.2	90	40.35	DPMD Dukcapil	Baru mencapai 23 Kegiatan yang memiliki PPKS, Data BKKBN
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	266	520	308	DPMD Dukcapil	308 Jumlah Kelompok (Data SIGA)
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang	%	100	100	100	DPMD	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk					Dukcapil	
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	88.6	93	49.5	DPMD Dukcapil	Data PK 21
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1	1	DPMD Dukcapil	Terdapat 1 PPKDB di setiap Desa/Kelurahan
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	DPMD Dukcapil	
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	7	14	14	DPMD Dukcapil	Tidak ada menyebut secara spesifik 8 fungsi keluarga tersebut (Data SIGA)
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	22,7	21,64	N/A	DPMD Dukcapil	Hanya terdapat Data Median Usia Kawin Pertama Wanita dari Data PK21 Capaian = 22,4
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	9.4	15.5	N/A	DPMD Dukcapil	Hanya dari dana APBD
9	**Perhubungan**						
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum						
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	351,739	492,431	2,825,131	Dishub	Bidang Angkutan (Dishub)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	13,958,286	13,958,286	20,634,800	Dishub	Bidang Angkutan (Dishub)
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	23,779,178	24,500,000	8,224,824	Dishub	Bidang Moda (Dishub)
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	141	160	387	Dishub	Bidang Angkutan (Dishub)
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	146,324	156,817	81,466	Dishub	Pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan di kabupaten klungkung dan jembrana tidak melaksanakan uji berkala karena tidak memiliki sertifikat akredibiltas pengujian kendaraan bermotor yang dikeluarkan ditjen perhubungan darat sesuai dengan PM No. 19 Tahun 2021, selain itu melakukan uji kir berkala sebanyak 2 kali dalam setahun untuk masing-masing kendaraan wajib uji
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	8	9	42	Dishub	Sesuai dgn KP 432 thn 2017
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	2	1	Dishub	
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20	Dishub	
9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	3	3	3	Dishub	
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	%	25.41	55.00	29.43	Dishub	
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:470	1:350	0,000237538	Dishub	
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum						
9.9.1	Angkutan Darat						
	- Orang	Jumlah	351,739	492,431	2,825,131	Dishub	
	- Barang	Jumlah	121,818	148,068	66,656	Dishub	
9.9.2	Angkutan Laut						
	- Orang	Jumlah	13,958,286	16,749,943	20,634,800	Dishub	
	- Barang	Jumlah	543,159,485	651,791,382	11,256,303	Dishub	
9.9.3	Angkutan Udara						
	- Orang	Jumlah	23,779,178	24,500,000	8,224,824	Dishub	
	- Barang	Jumlah	313,520,106	354,644,551	111,831,240	Dishub	
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	per tahun						
9.10.1	Dermaga						
	- Orang	Jumlah	13,958,286	16,749,943	20,634,800	Dishub	
	- Barang	Jumlah	543,159,485	651,791,382	11,256,303	Dishub	
9.10.2	Bandara						
	- Orang	Jumlah	23,779,178	24,500,000	8,224,823	Dishub	
	- Barang	Jumlah	313,520,106	354,644,551	111,831,240	Dishub	
9.10.3	Terminal						
	- Orang / Barang	Jumlah	351739 / 121818	492431/ 148068	2825131/ 66656	Dishub	
10	**Komunikasi dan Informatika**						
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kim			120	Diskominfos	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	50.00	80.00	100.00	Diskominfos	Data berdasarkan penerimaan sinyal telepon sesluler di desa/kelurahan
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon						
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	%	93.62	94.20	83.51	Diskominfos	Data berdasarkan Penduduk yang menggunakan HP. Data Rumah Tangga menggunakan HP rilis pada Agustus 2023
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	%	5.34	3.44	2.37	Diskominfos	Data berdasarkan Rumah Tangga dengan KRT Laki-Laki. Data Rumah Tangga rilis pada Agustus 2023
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	%	46.42	68.41	70.59	Diskominfos	Data yang digunakan Penduduk dengan akses internet. Data Rumah Tangga rilis pada Agustus 2023
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	%	33.25	50.00	27.72	Diskominfos	
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.1	Persentase Koperasi Aktif	%	87.42	89.42	78.98	Diskop UKM	
11.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	312,967	440,609	440,609	Diskop UKM	
11.3	Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk local	%	4.1	6,85	6.440351239	Diskop UKM	
12	**Penanaman Modal**						
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	166	174		DPMPTSP	Tahun 2022 menunggu data di Publish di NSWI dari BKPM RI
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	4.46	5.16		DPMPTSP	Tahun 2022 menunggu data di Publish di NSWI dari BKPM RI
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	34.16	28.81		DPMPTSP	Tahun 2022 menunggu data di Publish di NSWI dari BKPM RI
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	0.16	0.16		DPMPTSP	Tahun 2022 menunggu data di Publish di NSWI dari BKPM RI
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86		DPMPTSP	
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**						
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	76	80	40	Disdikpora	
13.2	Persentase Wirausaha Muda	%	0.82	0.86	0.5	Disdikpora	
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	51.2	58	60	Disdikpora	
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	38.88	46	50	Disdikpora	
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	%	3.31	12.5	15	Disdikpora	
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	924 orang	199 orang	226 orang	Disdikpora	
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	20 cabor	28 cabor	33 cabor	Disdikpora	
14	**Statistik**						
14.1	Buku "Kabupaten dalam	Jumlah	9	9	9	Diskominfos	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	angka"						
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Diskominfos	
15	**Persandian**						
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	91.30	97.82	100.00	Diskominfos	
16	**Kebudayaan**						
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3	2	Disbud	Kegiatan Bulan Bahasa Bali dan Pesta Kesenian Bali
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan						
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19,336	19,336	483	Disbud	Cagar Budaya registrasi nasional + Cagar Budaya Penetapan + Benda Museum Bali + Benda Taman Budaya
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	97	9	Disbud	Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	611	691	23	Disbud	Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5	0	Disbud	Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	328	328	13	Disbud	Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu						
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19,336	19,336	483	Disbud	
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	97	9	Disbud	
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	611	691	23	Disbud	
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5	0	Disbud	
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	233	341	0	Disbud	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	**Perpustakaan**						
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	%	6	8.5	6	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	225.450	2.500	105,189	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	-	N/A	N/A	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	61.823	38,000	3,968	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	9,651	1,250	56,498	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	124	35	39	B. Organisasi Setda Prov. Bali	
18	**Kearsipan**						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	42	20	28	B. Umum dan Protokol Setda Prov. Bali	4 Perangkat Daerah memperoleh nilai pengawasan kearsipan internal kategori Sangat Baik dan 6 Perangkat Daerah memperoleh nilai pengawasan kearsipan internal kategori Baik
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	70	30	100	Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali	Seluruh SDM pengelola Kearsipan telah mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi pengelolaan kearsipan
LAYANAN URUSAN PILIHAN							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Pariwisata**						
1.1	Kunjungan Wisatawan						
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	9,757,991	5,000,000	8,052,974	Dispar	
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	6,070,473	500,000	1,778,471	Dispar	
1.2	Lama Tinggal Wisatawan						
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	4.00	2.45	1.97	Dispar	
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	10.45	3.55	2.50	Dispar	
1.3	PAD Sektor Pariwisata	%	48.51	20.86	25.74	Dispar	
2	**Pertanian**						
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	14.38	14.57	14,68	BPS	
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	2.25	1.93	1,65	BPS	
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	1.48	1.43	1,47	BPS	
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	%	13.81	14.38	N/A	BPS	Yang dirilis BPS adalah kontribusi lapangan usaha/sektor pertanian, bukan kelompok tani.
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar						
2.5.1	Padi	Jumlah	60.70	58.80	61.29	Distan TP	Anomali iklim yang bagus, serangan OPT yang rendah serta perawatan dan pemupukan yang tepat guna menyebabkan naiknya produktivitas.
2.5.2	Jagung	Jumlah	43,892	31.22	40.97	Distan TP	Anomali iklim yang bagus, serangan OPT yang rendah serta perawatan dan pemupukan yang tepat guna menyebabkan naiknya produktivitas.
2.5.3	Kedelai	Jumlah	2,687	12.92	13.96	Distan TP	Anomali iklim yang bagus, serangan OPT yang rendah serta perawatan dan pemupukan yang tepat guna menyebabkan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							naiknya produktivitas.
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	9,011	9.011	9.011	Distan TP	
3	**Kehutanan**						
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	1.6	1.48	4.88	Dishut dan LH	RHL = 550 Ha. Target penurunan luas lahan kritis tahun 2022 yaitu 27.190 Ha.
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	105.50	835.00	835.00	Dishut dan LH	Kerusakan kawasan hutan 0 Ha dari target penanganan penurunan kerusakan hutan 835 Ha.
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	%	60	60	71.19	Dishut dan LH	HL = 97.405,95 Ha total luas kawasan hutan 136.827,05 Ha sesuai dengan SK Penetapan kawasan Hutan Provinsi Bali.
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**						
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	100	100	100	Disnaker ESDM	Dari akhir tahun 2018 telah mencapai 100 persen
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	80	100	100	Disnaker ESDM	Dari akhir tahun 2018 telah mencapai 100 persen
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	%	-	-	-	Disnaker ESDM	Data yang dikelola hanya data dari pelaku usaha pertambangan yang melakukan perizinan. Sejak terbitnya UU Nomor 3 tahun 2020 (yang efektif berlaku 11 Desember 2020), kewenangan pengelolaan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
5	**Perdagangan**						
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	%	2	2.85	95.45	Disperindag	Angka target 2022 merupakan nilai PENINGKATAN Ekspor Bersih Perdagangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							sedangkan angka capaian merupakan nilai ekspor bersih perdagangan
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	%	15.09	30.19	17.25	Disperindag	
6	**Perindustrian**						
6.1	Cakupan Bina Perajin	%	3.35	3.91	8.36	Disperindag	Sudah sesuai rumus
7	**Transmigrasi**						
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	%	-	-	-	Disnaker ESDM	Tidak terdapat transmigran swakarsa
8	**Kelautan dan Perikanan**						
8.1	Produksi Perikanan	Jumlah	136,496.55	124,147.71	133,667.74	Dinas Kelautan dan Perikanan	
8.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	34.56	35.57	44.81	Dinas Kelautan dan Perikanan	Masih menggunakan data sementara, karena rilis dibulan Pebruari 2022
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	100	90	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	Untuk Pembinaan tidak dilaksanakan karena terbatasnya anggaran tahun 2022
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	107.36	97	78.91	Dinas Kelautan dan Perikanan	
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	97,157.60	105,166.51	100,801.60	Dinas Kelautan dan Perikanan	
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	%	80	80	80	Dinas Kelautan dan Perikanan	
8.7	Nilai Tukar Nelayan	%	104.64	118.5	100.44	Dinas Kelautan dan Perikanan	
PENUNJANG URUSAN							
1	**Perencanaan Pembangunan**						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	%	100	100	100	Bappeda	
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	%	100	100	100	Bappeda	
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	%	100	100	100	Bappeda	
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Dinas PUPR Perkim	
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	Bappeda	
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	Bappeda	
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	Bappeda	
2	**Keuangan**						
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	-	BPKAD	Untuk WTP Tahun 2022 Hasil Audit BPK disampaikan pd tahun 2023
2.2	Persentase SiLPA	%	6	6	11.27	BPKAD	Angka merupakan angka realisasi un audited
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	6	6	5.56	BPKAD	Angka merupakan angka realisasi un audited
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	0	0	0	BPKAD/ Bappeda	Tidak tersedianya data terkait program/kegiatan yg tidak terlaksana di bpkad
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20	20	20.38	BPKAD	Data persentase belanja Pendidikan mengunakan data APBD Induk dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Perubahan TA 2022
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	10	10	10.11	BPKAD	Data persentase belanja Kesehatan mengunakan data APBD Induk dan Perubahan TA 2022
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	26,70 : 73,30	29,28 : 70,71	N/A	BPKAD	Dengan Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, terdapat perubahan struktur belanja APBD Belanja Langsung dan Tidak langsung menjadi Belanja Operasi
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1,249,485,906,461	1,900,172,786,199	1,231,251,353,817	BPKAD	Angka merupakan angka realisasi un audited
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD	
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**						
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	20	20	30	BKPSDM	
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	32	3	29,11	BKPSDM	
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	7.61	36.00	39,46	BKPSDM	
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	45	52	38	BKPSDM	
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	4,355	3,981	3,783	BKPSDM	
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	6,924	6,869	7,137	BKPSDM	
4	**Penelitian dan Pengembangan**						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100	100	BRIDA	
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	BRIDA	
	Penerapan SIDa:		-	-	-	BRIDA	
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	13,6 6/44	14%7/50	90,90 27/33	BRIDA	
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	%	66,6% 6/9	70%7/10	96,6 30/36	BRIDA	
5	**Pengawasan**		,				
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	9	27		Inspektorat	- Per 1 Juli 2022 jumlah rekomendasi 2005-2021= 1287, - Sesuai rekomendasi= 1254 - Belum sesuai = 13 - Tindak lanjut BPK tdk bisa ditentukan setiap tahun, melainkan akumulasi dari tahun 2005-2022.
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0.06	5	0,009	BKPSDM	
5.3	Jumlah Temuan BPK	%	14	10		Inspektorat	
6	**Sekretariat Dewan**						
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD	Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi Bali telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun Sidang 2022
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD	Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) selalu mengacu kepada rencana Kerja DPRD sebagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2022		Sumber Data	Keterangan
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)						DPRD mendukung rencana kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD	Anggaran Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD telah tertuang dalam DPA No: DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 3 Januari 2022, Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022

Sumber: Evaluasi RKPD Semesta Berencana Tahun 2022

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, berupa: peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang juga telah menimbulkan permasalahan dan tantangan besar yang berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan wilayah Bali pada masa kini maupun masa mendatang. Munculnya permasalahan tersebut tidak saja bersumber dari masalah lokal di Bali, melainkan juga bersumber dari interaksi kehidupan masyarakat dan dampak pembangunan pada tataran nasional dan global.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun pada masa mendatang mencakup 3 (tiga) area kunci, yakni yang berkaitan dengan:

(1) Alam Bali;
(2) *Krama* (manusia) Bali; dan
(3) Kebudayaan Bali.

a. Permasalahan yang berkaitan dengan Alam Bali mencakup masalah pertanian, subak, air dan sumber mata air, seperti laut, danau, sungai, air terjun, mata air *kelebutan,* dan sumber lainnya, serta masalah lingkungan.

   Masalah utama dalam bidang pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata, perumahan, dan properti lainnya. Selain itu, bidang pertanian juga menghadapi masalah derasnya perpindahan kepemilikan lahan kepada pihak luar Bali. Derasnya alih fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan tergerusnya subak sebagai penyangga utama budaya pertanian Bali. Di Kota

Denpasar, misalnya, tiga subak telah tereliminasi, yaitu Subak Kreneng, Subak Yang Batu, dan Subak Sanglah, sehingga Kota Denpasar sekarang ini hanya memiliki 36 subak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tabanan, yang semula memiliki jumlah subak terbesar di Bali, kini jumlah subak telah menurun drastis, sehingga mengancam posisi Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung beras Bali. Penurunan lahan pertanian telah mengakibatkan penurunan produksi pangan serta hilangnya investasi untuk irigasi dan sarana prasarana pertanian lainnya. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di bidang pariwisata dan industri jasa juga mengakibatkan semakin rusaknya pantai akibat abrasi, terjadinya penggerusan dan pendangkalan danau, berkurangnya jumlah sungai (termasuk *tukad, telabah, jelinjingan*) yang mengalirkan air, berkurangnya sumber mata air yang aktif mengalirkan air, serta semakin berkurangnya air terjun. Bersamaan dengan itu juga terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air, serta rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai. Tidak terkecuali juga muncul masalah-masalah lingkungan lain yang semakin kompleks, seperti perusakan hutan, pencemaran udara yang berupa polusi dan kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, serta penumpukan sampah.

Pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Bali belum tertata dengan baik dari sisi legislasi, kebijakan, maupun program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi, promosi, produk, industri, dan jasa pariwisata, serta sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar-Kabupaten/Kota di Bali. Lebih jauh lagi hal ini berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian antar-Kabupaten/Kota. Kondisi ini secara struktural dan sistematis mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan, baik dalam level antar-Kabupaten/Kota di Bali, pendapatan per kapita masyarakat Bali, maupun kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara wilayah Bali Utara dengan Bali Selatan.

Demikian juga halnya dengan pembangunan pertanian dan budaya pertanian masyarakat Bali belum tertata dengan baik di

seluruh wilayah Bali. Baik legislasi, kebijakan, maupun program pertanian dari hulu sampai ke hilir belum digarap sesuai dengan potensi alamiah yang dimiliki Kabupaten/Kota, khususnya pada bagian hilir masih sangat tertinggal baik dari segi jumlah maupun kualitas produksi/komoditas. Kondisi ini telah mengakibatkan tidak tersedianya pangan untuk beberapa jenis pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali serta para wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Bali, sehingga harus didatangkan dari luar Bali. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara adat dan keagamaan pun, seperti janur, bunga, dan buah-buahan sebagian sudah mulai didatangkan dari luar Bali.

b. Permasalahan dalam hubungan dengan sumber daya manusia adalah bahwa *Krama* Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap, dan perilaku kehidupan, baik dalam level individual maupun level sosial kolektif. Perubahan mendasar pada level individual, antara lain, berupa: dekadensi dan degradasi etika dan moral; pragmatisme; individualisme; materialisme; kehilangan identitas dan jati diri ke-Bali-an; kehilangan rasa percaya diri; dan meningkatnya penyakit gangguan mental. Adapun perubahan pada level sosial, antara lain, berupa: semakin renggangnya kohesi dan solidaritas sosial/*manyama braya*; melemahnya semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan; melemahnya kesadaran kolektif; melemahnya etika sosial; meningkatnya kriminalitas dan premanisme; meningkatnya perilaku asosial, seperti pelacuran, pelecehan seksual, fedofilia. Selain itu juga terjadi peningkatan korban akibat penyalahgunaan narkoba, semakin padatnya penduduk akibat membanjirnya pendatang yang mencari nafkah di Bali, meningkatnya konflik sosial, penyalahgunaan dan ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan meningkatnya peluang Bali menjadi target ancaman terorisme.
c. Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta keaarifan lokal juga terus mengalami kemunduran yang mencakup kuantitas dan kualitas,

baik dari segi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, maupun pranata budaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari sisi politik legislasi dan politik anggaran, serta kurangnya komitmen, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir belum berjalan secara optimal, bahkan masih jauh dari harapan dan potensi besar yang dimiliki Bali.

Dari permasalahan pembangunan Daerah Bali tersebut, teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Bali. Isu-isu strategis dimaksud terutama mencakup tiga hal, yakni kebijakan, regulasi, dan tata kelola.

Dalam hal kebijakan, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

a. Arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan yang menjaga keharmonisan/keseimbangan/ keselarasan secara *sakala* dan *niskala* yang bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam ajaran *Sad Kerthi*, mencakup: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*). Kondisi demikian telah, sedang, dan akan mengakibatkan pudarnya kesucian, spiritualitas, dan *taksu* Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat/muara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dunia.
b. Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan; pembangunan pertanian jauh tertinggal,

tidak selaras, dibandingkan dengan pembangunan kepariwisataan sehingga sektor pertanian tidak mampu menjadi penopang pembangunan kepariwisataan, selain juga tidak mampu memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Kondisi ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor kepariwisataan yang justru terus meningkat terhadap PDRB.

c. Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik lokal masyarakat Bali dan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas dan kemacetan di beberapa wilayah tertentu, seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang berakibat pada menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Dalam hal regulasi, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan negara dari sumber daya alam kurangmendukung/menguntungkan Pemerintah Bali secara keseluruhan, mengingat Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diperhitungkan sebagai hasil berupa sumber pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, Bali harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya kebudayaan yang kaya raya, khas/unik, indah, dan menarik, agar bisa menjadi sumber perekonomian guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun dalam hal tata kelola, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

a. Bali merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kondisi fiskal sangat kecil atau jauh dari kebutuhan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang. Kondisi fiskal yang sangat kecil ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali Kabupaten Badung, di mana besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi fiskal yang sangat rendah ini mengakibatkan Pemerintah Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (kecuali Kabupaten Badung) tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, khususnya untuk: memelihara alam dan lingkungan Bali; memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali; serta pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi.

b. Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri; kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali. Kondisi yang bersifat distorsi ini diakibatkan oleh adanya ego wilayah dan ego sektoral dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kepala Daerah yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Selain akibat berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, kondisi distorsi tersebut juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang bersifat politis, mengingat Kepala Daerah berasal dari partai politik yang berbeda-beda serta akibat dari kurangnya spirit kebersamaan dalam membangun wilayah Bali secara utuh. Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata

pengelolaan pembangunan Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam ego wilayah dan ego sektoral per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelolamenerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana, satu pulau satu tata kelola satu komando (*one island one management one command*).

Perekonomian Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata membuatnya sangat rentan akan bencana atau pandemi yang harus memaksa dilakukannya pembatasan aktivitas maupun perjalanan. Beberapa bencana alam maupun tragedy kemanusiaan sempat membuat kepariwisataan Bali terpuruk seperti misalnya Tragedi Bom Bali, Letusan Gunung Agung maupun gunung berapi aktif di sekitar Bali, dan yang terakhir adalah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman paling serius yang dirasakan oleh Bali yang menyebabkan pariwisata Bali lumpuh dari awal tahun 2020 hingga awal tahun 2022 ini. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 yang terkait dengan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.

1. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Bali hingga menyentuh minus.
2. Menurunnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang tiba di Bandara Ngurah Rai.
3. Ditutupnya hampir seluruh daerah wisata yang membuat jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel di sekitarnya menjadi anjlok.
4. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali akibat banyaknya pekerja sektor pariwisata yang harus dirumahkan
5. Meningkatknya jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Bali

Menindaklanjuti upaya mengembalikan kondisi perekonomian Provinsi Bali yang mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19, salah satu sektor yang perlu didorong peran dan pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Mendorong peran

sektor pertanian dalam arti luas agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menopang tumbuhnya gairah ekonomi masyarakat Bali serta dapat merangsang niat generasi muda untuk kembali ke desa dengan menggeluti sektor pertanian.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

a) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi guru dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
b) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pendukung Pendidikan.
c) Belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi.

2. Kesehatan

a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu
b) Masih tingginya kejadian Penyakit Menular (Demam Berdarah Dengue/DBD)
c) Digitalisasi pelayanan kesehatan belum terintegrasi
d) Cakupan kepesertaan JKN-KBS belum konsisten setiap tahun
e) Pelayanan kesehatan tradisional belum terintegrasi serta Industri kesehatan tradisional Bali yang belum berkembang sesuai dengan harapan
f) Standar kualitas pelayanan kesehatan belum terstandar internasional (Kendala menyongsong *Medical Tourism*)
g) Sistem Penanggulangan Gawat Darurat belum terintegrasi
h) Belum terdeteksinya seluruh kasus Stunting

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah;
b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik;
c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit;
d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi;
e) Masih rendahnya kapasitas dan daya dukung jalan provinsi;

f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan;
g) Kerusakan jalan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati melebihi tonase dari rencana;
h) Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tiak sesuai dengan fungsinya;
i) Pelayanan air minum baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku;
j) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal;
k) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
l) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan;
m) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang;
n) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU);
c) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

a) Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Perda/Perkada di Bali.

6. Sosial

a) Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan penanganan.
b) Masih adanya penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang belum mendapat penanganan rehabilitas sosial.

c) Belum optimalnya peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
d) Belum optimalnya perlindungan kepada korban bencana serta jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
e) Masih adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandangnya.
f) Belum optimalnya pelayanan sosial bagi penyandang keterlantaran.

7. Bencana

a) Masih terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bencana;
b) Kurang optimalnya kesadaran pengurangan risiko bencana dari aparatur, masyarakat, dan dunia usaha secara terpadu;
c) Belum optimalnya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
d) Belum optimalnya layanan akses peringatan dini bencana untuk seluruh masyarakat dan wisatawan;
e) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengurangan risiko bencana.

B. URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

a) Pandemi Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi minus 9-->meningkatnya jumlah pengangguran
b) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi --> meningkatkan daya saing tenaga kerja.
c) Terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata.
d) Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya --> penempatan PMI tidak sesuai ketentuan.

e) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) IDG Provinsi Bali pada tahun 2020 adalah sebesar 72,16% masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 75,57%

b) Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Provinsi Bali Tahun 2020 mencapai 16,36%. Perempuan yang menduduki jabatan struktural sebesar 36,55% dari total 7.198 pejabat structural.

c) Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2020 sebesar 67,86% mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 65,67%, namun masih lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 80,75% (Data Sakernas, 2020).

d) Belum semua OPD memiliki data terpilah sehingga menyulitkan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

e) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2020 sebesar 48,31% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 51,69%.

f) Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2020 sebesar 48,21% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 51,79%.

g) Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 252 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak..

3. Pangan

a) Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum Optimal

b) Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit

c) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi

d) Akses Pemasaran dan Permodalan Petani Lemah

e) Penguasaan teknologi bagi petani lemah

f) Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan.

g) Koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal.

4. Pertanahan

a) Belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan di daerah.

5. Lingkungan Hidup

a) TPA Sarbagita dan TPA Kabupaten/Kota sebagian besar sudah overload
b) Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis sumber
c) Belum semua desa/kelurahan dan desa adat memiliki TPS3R dan TPST
d) Belum optimalnya pembangunan rendah karbon menuju ekonomi hijau
e) Masih adanya pencemaran air, air laut, dan udara
f) Belum optimalnya pengawasan implementasi regulasi pemanfaatan lahan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan dan dokumen atas peristiwa penting

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Masih lemahnya kemampuan aparatur dan peran kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
b) Belum optimalnya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
c) Kondisi prasarana/sarana desa dan teknologi tepat guna belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan
d) Peran lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang optimal.
e) Rendahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Pertumbuhan penduduk Krama Bali stagnan.

9. Perhubungan

a) Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata masih kurang dari waktu tempuh rata-rata 2,5 Km/100Km;

b) Masih tingginya korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana 1.984 kejadian kecelakaan 318 (16,02%) korban meninggal dunia;
c) Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana load factor angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita pada tahun 2022 sebesar 23,39% masih berada jauh di bawa persentase ideal sebesar 70%;
d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal);
e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

10. Komunikasi dan Informatika

a) Literasi informasi terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah untuk mencegah penyebarluasan informasi yang tidak benar belum optimal
b) Keterbukaan informasi publik yang dirasakan masyarakat belum optimal
c) Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan belum optimal
d) Kualitas tata kelola pemerintahan secara elektronik belum optimal

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a) Belum optimalnya jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM
b) Sebagian besar pelaku UMKM merupakan Usaha Mikro
c) Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM
d) Rendahnya daya saing, produktivitas, dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM
e) Belum ada peta data perkembangan usaha koperasi dan UMKM yang komprehensif dan terkini

12. Penanaman Modal

a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.
b) Belum memadainya infrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.
d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing–masing Kabupaten/Kota.
e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

a) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri dan kreatif.
b) Belum optimalnya budaya gerak dan berolahraga di masyarakat.
c) Belum optimalnya sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga.
d) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

14. Statistik

a) Pengolahan, analisis data dan informasi sektoral belum optimal;.

15. Persandian

a) Pengamanan data dan informasi belum optimal.

16. Kebudayaan

a) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman
b) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi
c) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Kesenian
d) Perlunya pengoptimalan Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan
e) Perlunya pengoptimalan Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali

f) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra
g) Perlu ditingkatkannya sistem informasi dan *database* mengenai kekayaan seni dan budaya Bali
h) Perlu ditingkatkannya sistem informasi dan *database* mengenai kekayaan seni dan budaya Bali
i) Kapasitas prajuru desa adat dalam pemerintahan desa adat belum optimal
j) Masih ada desa adat yang menyampaikan LPJ Desa Adat tidak tepat waktu yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun 2022
k) Prajuru Desa Adat belum menyusun awig-awig dan perarem sesuai ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sehingga registrasi awig-awig dan perarem desa adat belum berjalan maksimal
l) Terjadi penurunan LPD dengan kriteria sehat dibandingkan tahun sebelumnya
m) Pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di desa adat belum maksimal
n) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa adat belum maksimal
o) Pendataan subak dan subak abian belum maksimal

17. Perpustakaan

a) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
b) Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional
c) Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan
d) Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan *E-Library*
e) Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan

18. Kearsipan

a) Terbatasnya SDM Pengelola Kearsipan
b) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi yang mendukung Penyelenggaraan Kearsipan
c) Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip

d) Kurangnya pemahaman terhadap keberadaan dan manfaat tentang arsip
e) Pemerataan Pembinaan Arsip belum optimal.

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

a) Aktualisasi Tradisi/Budaya Bahari Dan Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bali Semakin Luntur;
b) Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Belum Didukung Oleh Tata Kelola Yang Baik, Terutama Kebijakan Dan Regulasi
c) Eksplorasi Dan Pemanfaatan/Pengusahaan Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal
d) Produktivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Masih Rendah
e) Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem & Konservasi Untuk Keberlanjutan Masih Lemah
f) Perlindungan Terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan-Kecil Dan Pengerajin Garam Belum Optimal
g) Penerapan Teknologi Dan Modernisasi Perikanan Belum Optimal
h) Kapasitas Dan Kualitas SDM Masih Rendah
i) Pelaku Utama Kelautan Dan Perikanan Cenderung Menurun Seiring Dengan Kemajuan Pariwisata
j) Tingkat Kegemaran Konsumsi Ikan Masih Rendah
k) Akses Masyarakat Terhadap Pembiayaan Dan Permodalan Usaha Masih Rendah
l) Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal
m) Hilirisasi Produk Perikanan, Jaringan Dan Outlet Pemasaran Belum Berkembang Optimal Sehingga Daya Saing Produk Dan Nilai Tambah Masih Rendah
n) Pembangunan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Berbasis Kawasan Dari Hulu Sampai Hilir Belum Berkembang Secara Optimal

o) Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan Masih Rendah

p) Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Bagi Pelaku Utama, Literasi, Kewirausahaan Dan Kelembagaan Usaha Terhadap Bisnis Kelautan Dan Perikanan Masih Lemah.

2. Pariwisata

a) Belum terkelolanya keseimbangan pengembangan destinasi antara Kawasan Pariwisata Bali Selatan dengan Bali Utara

b) Masih banyak SDM yang tidak berkompeten sesuai bidangnya

c) Belum optimalnya koordinasi tata kelola pemasaran pariwisata antara pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota dan stakeholder pariwisata

d) Belum optimalnya penerapan standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya bali pada industri pariwisata.

3. Pertanian

a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian.

b) Alih fungsi lahan pertanian produktif

c) Persaingan pemanfaatan air irigasi

d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal

e) Menurunnya kesuburan lahan

f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif

g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan

h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil

i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistim pemasaran hasil

j) Akses permodalan usaha tani terbatas

k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil

l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal

m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis
n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak

4. Kehutanan

a) Masih adanya perambahan kawasan, *illegal logging*, dan kebakaran hutan.
b) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan
c) Masih banyaknya permasalahan tata batas
d) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan
e) Masih adanya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Pengembangan energi terbarukan belum optimal -->risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi.
b) Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
c) Pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali -->potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang.
d) Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan--> penurunan kualitas hidup dan Lingkungan

6. Perdagangan

a) Masih banyak pasar yang terkesan kumuh
b) Kurangnya pelayanan dengan pemanfaatan teknologi
c) Kurangnya pelayanan kepada pelanggan
d) Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama
e) Belum optimalnya menggunakan *E-Money*
f) *Display* barang kurang menarik
g) Pedagang kurang memperhatikan kualitas produk
h) Belum tersedianya penyimpanan untuk barang pokok

i) Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk lokal
j) Masih rendahnya permodalan
k) Kurangnya promosi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri
l) Kurangnya Kemampuan Pelaku Usaha menganalisa pasar
m) Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri
n) Kurangnya kemampuan Eksportir/Importir memanfaatkan hasil perundingan perdagangan
o) Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan
p) Belum Optimalnya Kelembagaan Ekspor/Impor
q) Kurangnya Sarana Pengujian Mutu Barang
r) Kurangnya Jumlah SDM dan Kemampuan Penguji Mutu Barang
s) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan
t) Masih rendahnya edukasi konsumen tentang haknya.
u) Belum optimalnya penyaluran distribusi produk lokal yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
v) Semakin tingginya impor barang dari luar Bali
w) Belum optimalnya akses dan pemasaran virtual

7. Perindustrian

a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun
b) Keterbatasan bahan baku industri
c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing
d) Jumlah produksi masih rendah
e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah
f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah
g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki sertifikat mutu produk
h) Masih Banyaknya Produk kayu yang belum memiliki SVLK
i) Kemasan produk masih belum sesuai standar
j) Kurangnya Inovasi desain produk
k) Kurangnya pendampingan

l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/Jiwa Kewirausahaan
m) Kurangnya kesadaran tentang HKI
n) Belum jelasnya kebijakan hilirisasi produk pertanian pengolahan dan industri kreatif
o) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian
p) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif
q) Belum optimalnya hilirisasi produk industri.

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a) Biro Hukum

1) Pengawalan efektifitas produk hukum Daerah belum optimal;
2) Sinergitas antar perangkat daerah dalam penyusunan produk hukum daerah belum optimal.
3) Penyusunan produk hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara digital;
4) Kesadaran hukum aparat dan masyarakat masih rendah;
5) Kompetensi sumberdaya manusia (SDM); dan
6) Kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi yang masih kurang

b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1) Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya, dan layanan)
2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan
3) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-sd 40% dari total APBD)
4) Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah.

5) Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah terkait pengendalian inflasi dan penguatan akses keuangan daerah.
6) Belum optmalnya pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

c) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali yang mencakup:
   - Belum optimalnya perolehan nilai/skor penyusunan LPPD
   - Masih adanya potensi sengketa batas wilayah
   - Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah
2) Belum optimalnya pelaksanaan *sradha* dan bhakti di kalangan Krama Bali

d) Biro Umum dan Protokol

1) Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat
2) Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola kantor virtual, keuangan, dan BMD/Aset dan kearsipan
3) Belum memadainya tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing
4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip
5) Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan

2. Sekretariat DPRD

a) Belum optimalnya kualitas layanan pimpinan dan anggota DPRD;
b) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat;
c) Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah–ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarkat yang terus

berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat;

d) Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik; dan

e) Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur dalam memberikan hasil yang maksimal untuk mendukung tugas, pokok, dan fungsi secretariat DPRD.

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset

a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

b) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah

2. Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan

a) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retirbusi daerah

b) Kurangnya sarana prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak khususnya kendaraan operasional samling dan motor untuk optimalisasi razia door to door

c) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah yang disebabkan masih lemahnya aturan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak tertib

d) Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur dalam pengelolaan PAD dan pengasaan IT

e) Kondisi sosial ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan untuk membayar pajak menurun.

3. Kepegawaian

a) Pengembangan aparatur dan kinerja pengawai belum optimal

b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi

4. Pendidikan dan Pelatihan

a) Pengembangan aparatur dan kinerja pengawai belum optimal

b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi

5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

a) Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional hubungan antar lembaga

b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan teknis promosi seni budaya

c) Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di Jakarta

d) Pemanfaatan anjungan daerah Bali sebagai *Show Window* penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal.

F. UNSUR PENGAWAS

1. Inspektorat Daerah
   a. Perlu penerapan SPIP/MRI di lingkungan Pemprov Bali yang efektif
   b. Perlunya penguatan APIP yang lebih optimal
   c. Perlunya memberikan pelayanan publik yang prima
   d. Perlunya optimalisasi pencegahan korupsi melalui MCP, Stranas PK, dan SPI
   e. Perlunya pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal.

G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesejahteraan Bangsa
   a. Radikalisme dan Terorisme masih berpotensi menjadi ancamana bagi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Bali
   b. Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu 2024 serta terbatasnya pendidik politik pda masyarakat dan generasi muda
   c. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus dasar nasional
   d. Belum maksimalnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang *multi culture* secara nasional dan akhirnya berimbas ke daerah

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Urgensi dari perencanaan pembangunan daerah, diantaranya berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal "*Branding* Bali" serta memperluas pemasarannya mendukung transformasi ekonomi kerthi Bali
2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	a. Mengembangkan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		b. Meningkatkan SDM Pariwisata dan pemasaran pariwisata
3	Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi lainnya	Mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa serta kemudahan ekspor
4	Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi	Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	a. Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
		b. Memberikan Insentif dan Disinsentif Pajak
		c. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
6	Meningkatkan kerjasama daerah	Mendorong kerjasama promosi dan pemasaran produk lokal Bali
7	Meningkatkan investasi daerah	a. Mendorong kerjasama, promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
		b. Memberikan insentif investasi
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
9	Menurunkan angka pengangguran terbuka	a. Mengupayakan peningkatan akses dan kesempatan kerja
		b. Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari kerja
10	Meningkatkan kemandirian PMKS	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial
11	Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya	a. Mendorong ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah
		b. Mendorong kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah
		c. Mendorong penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok
12	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian	a. Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani
		b. mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian
		c. Mendorong penguatan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
13	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan	a. Meningkatkan produksi, ketersedian dan keragaman bahan pangan
		b. Mengembangkan aneka olahan pangan yang bergizi aman dikonsumsi
		c. meningkatkan akses pangan masyarakat
		d. Mendorong pemerataan distribusi bahan pangan yang terjangkau
14	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat rentan
		b. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
		c. Transformasi bidang kesehatan pada upaya pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan serta Upaya Kesehatan Tradisional
15	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	a. Meningkatan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan
		b. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
		c. Mendorong pengembangan pendidikan vokasi
		d. Meningkatkan capaian literasi dan numerasi
16	Meningkatkan peran *stakeholder* pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	a. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
		b. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
		c. Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
17	Meningkatkan partisipasi perempuan	a. Meningkatkan pengarusutamaan gender
		b. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan
18	Memperkuat sistem perlindungan anak	a. Meningkatkan kualitas keluarga
		b. Meningkatkan sistem data gender dan anak
		c. Meningkatkan pemenuhan hak anak
		d. Meningkatkan perlindungan khusus anak
19	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi	Mendorong peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi
20	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja
21	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat	a. Memperkuat Pemerintahan Desa Adat.
		b. Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat
		c. Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat
		d. Memantapkan pembangunan Desa Adat

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
22	Penguatan penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Pengembangan sarana prasarana Bina Mental Spiritual yang mendukung penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar
23	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali	a. Memberdayakan lembaga , tenaga dan pranata kebudayaan dalam melestarikan dan membina seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk generasi muda
		b. Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah serta Event, atraksi budaya, pameran kesenian, serta kegiatan adat dan budaya
		c. Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, karya Seni, sastra dan budaya
		d. Melestarikan cagar budaya
24	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Krama Bali secara Menyeluruh di setiap sektor pembangunan
25	Mewujudkan Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal, dan Mitigasi Bencana/Pengurangan Resiko Bencana	a. Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal dan mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana
		b. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah
		c. Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM Penataan Ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi tata ruang, Pengawasan Teknis Kinerja TURBINLAK Penyelenggaraan Penataan Ruang serta penguatan regulasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
		d. Meningkatkan penegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
26	Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan	Mendorong pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan
27	Menurunkan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Mendorong masyarakat/penghasil sampah melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber
28	Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur darat, laut dan udara secara merata
29	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh
30	Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik	Peningkatan fasilitas/sarana prasarana perhubungan

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
31	Meningkatkan fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi	Membangun, peningkatan, dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi
32	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	a. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional
		b. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
33	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945
34	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	a. Peningkatan Investasi pengurangan RB
		b. Meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam PRB, penanganan darurat dan pemulihan
		c. Peningkatan Penanggulangan bencana secara inklusif
35	Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan	Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penanganan korban kebencanaan
36	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	Mendorong pelaksanaan merit sistem untuk mewujudkan
37	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah
		b. Meningkatkan sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasisi teknologi informasi
		c. Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan
38	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	a. optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah
		b. Mendorong Implementasi Riset dan Inovasi daerah

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri.

Berdasarkan hasil pemaparan Outlook Ekonomi Jangka Menengah 2023-2026 pada bulan Desember 2022 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2024 ini adalah menghadapi resesi global yang akan dialami sebagian negara-negara berpengaruh di dunia. Setelah membaik di tahun 2022, diperkirakan

di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh lebih rendah dari perkiraan bahkan disertai resiko resesi di beberapa negara. Revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju terutama AS dan Eropa, dan juga di Tiongkok. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi perekonomian, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Dampak rambatan dari fregmentasi ekonomi global juga akan menyebabkan perlambatan ekonomi di *Emerging Market Economies* (EMEs).

Seiring dengan berlanjutnya gangguan rantai pasokan, tekanan inflasi global masih tinggi sehingga mendorong bank sentral di banyak negara menempuh kebijakan moneter yang lebih agresif. Kenaikan *Federal Funds Rate* (FFR) yang diprakirakan lebih tinggi dengan siklus yang lebih panjang (*higher for longer*) mendorong semakin kuatnya mata uang dolar AS sehingga memberikan tekanan depresiasi terhadap nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Terkanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin tinggi seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat, dan di Indonesia diperberat dengan aliran keluar investasi portofolio asing

Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diperkriakan membaik pada tahun 2022 dan cukup tinggi pada tahun 2023. Kondisi ini disertai dengan tingkat inflasi Indonesia yang masih tergolong lebih rendah dibandingkan global.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Bali akan menyamai level tahun 2019 di tahun 2024. Hal ini karena dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,6% dan dengan asumsi pertumbuhan PDRB konsisten 5% setiap tahun. Sementara Bappenas memproyeksikan ekonomsi Bali akan pulih paling cepat 2025 (optimis) atau 2025 (moderat).

Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2022 diproyeksikan menguat didukung oleh penlonggaran PPLN yang diiringi dengan berlanjutnya restrukturisasi, perkembangan pariwisata, (penambahan jumlah maskapai, dan frekuensi direct flight), dan perkembangan kapasitas pertambangan. Oleh karena itu proyeksi pertumuhan ekonomi juga

akan sangat dipengaruhi oleh percepatan pemulihan dan perkembangan pembiayaan ke depan. Meskipun demikian, ekonomi 2023 diperkirakan sedikit melambat akibat ketidakpastian ekonomi dan ancaman resesi global. Pada tahun 2023, BI memperkirakan perekonomian Bali akan tumbuh pada angka 4.40% hingga 5,20%.

Rekomendasi oleh BI untuk Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi resiko global adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan dari strategi ini adalah pariwisata Bali diarahkan untuk mempertahankan identitasnya sebagai destinasi unggulan namun berkualitas dan berkelanjutan.

Strategi ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Mengurangi ketimpangan pariwisata

Ketimpangan pariwisata dapat dikurangi dengan cara:

a) Pembangunan infrastruktur yang mendukung destinasi pariwisata potensial
b) Peningkatan investasi antraksi dan amenitas pariwisata Bali Utara dan Bali Timur.
c) Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media

2) Peningkatan pariwisata Bali dan Kawasan Sekitar Dilakukan Untuk Mendorong Pembangunan Balinusra

a) Pembuatan alur berwisata dengan tujuan Senggigi, Mataram, Gili Trawangan, Mandalika, dan Labuan Bajo.
b) Investasi untuk melengkapi sarana atraksi pariwisata
c) Peningkatan infrastruktut konektivitas

3) Program Penguatan Pariwisata
4) Penguatan SDM Pariwisata Bali yang berlandaskan kearifan lokal dan berkelanjutan.

Kunjungan wisatawan diperkirakan membaik di tahun 2023 yang ditopang oleh pelaksanaan event strategis dan penetapan berbagai kebijakan pelonggaran mobilitas. Sampai Juli 2022 jumlah wisman yang datang ke Indonesia didominasi oleh wisman yang datang ke Bali.

Kunjungan wisatawan di Balinusra membaik sejalan dengan penambahan jumlah maskapai dan frekwensi penerbangan melayani *international direct flight* khususnya ke Bali. Pada tahun 2022, *share* wisman Bali terhadap wisman nasional lebih dari 50%.

Faktor-faktor pendorong pemulihan perekonomian Bali hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1) Faktor Penyelenggaraan MICE
   - Pelaksanaan KTT G20 dan KTT AIS pada bulan November 2022
   - Bali Democracy Forum di bulan Desember 2022
   - KTT ASEAN Summit di NTT pada bulan Februari tahun 2023 dimana Provinsi Bali sebagai hub
   - Paris Fashion Week di bulan Juni Tahun 2023
   - Euro Trading Event di bulan September Tahun 2023
   - World Superbike dan IAMRA Conference di bulan November Tahun 2023

2) Faktor Kebijakan
   - Pembukaan border internasional pada Februari 2022
   - Pemberian Visa On Arrival bagi wisman ke Indonesia pada Maret 2022
   - Pemberian izin melepas masker di ruang terbuka pada Mei 2022
   - Penghapusan kewajiban PCR untuk kedatangan dan asuransi pada Juni 2022
   - Perluasan VoA ke 86 negara pada September 2022
   - Ketersediaan 26 penerbangan langsung ke Bandara Ngurah Rai pada Oktober 2022

BI memperkirakan di tahun 2023 ini jumlah wisman yang akan berkunjung ke Bali adalah sebesar 51% dari level tahun 2019. Pariwisata Bali akan ditunjang oleh penambahan akses *international direct flight* dari negara kantong wisman utama. Proyeksi wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Bali pada tahun 2023 adalah 3,29 Juta dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara diproyeksikan 11.63 Juta.

b. Pengembangan UMKM Bali yang tangguh dan berorientasi ekspor guna mendorong perekonomian

Ekonomi kreatif di Bali mempunyai potensi besar ditinjau dari jumlah pelaku usaha yang mencapai 196,999 pelaku dan tersebar di 9 kab/kota. Namun, ekonomi kreatif masih menghadapi beberapa kendala, utamanya perluasan pasar, kompetensi SDM, dan akses ke lembaga keuangan.

Pengembangan UMKM Bali bertujuan untuk Menjadikan Bali sebagai hub etalase ekspor produk kreatif dan hub produk digital. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Penguatan akses permodalan bagi usaha ekraf menjadi prasyarat pelaku usaha ekraf untuk meningkatkan ekspor.
2) Kompetensi dan ketersediaan SDM ekraf menjadi persyaratan dasar untuk mampu bersaing di pasar global.
3) Perluasan pemasaran produk ekonomi kreatif perlu diperkuat dengan inovasi diversifikasi produk bernilai tambah tinggi dan global branding seperti “Made in Bali”
4) Penguatan sarana dan prasarana serta teknologi sebagai penunjang daya saing ekonomi kreatif
5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ekraf perlu diperluas dan diperkuat kelembagaannya.

c. Perluasan digitalisasi

Implementasi digitalisasi terbukti dapat mendorong aktivitas ekonomi dalam kondisi apapun (termasuk saat terjadi pembatasan mobilisasi di masa Pandemi COVID-19). Selain transaksi retail, digitalisasi juga mampu mendorong penerimaan Pemerintah Daerah, tercermin dari peningkatan penerimaan pajak dan retribusi di Provinsi Bali melalui kanal digital.

d. Transformasih ekonomi Bali (Bali *Kerthi*)

Pengembangan enam sektor unggulan untuk pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan yaitu:

1) Sektor pertanian dalam arti luas
2) Sektor Kelautan dan Perikanan
3) Sektor IKM dan UMKM
4) Sektor Industri Branding Bali

5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital
6) Sektor Pariwisata

e. Kebutuhan pembiayaan Investasi Bali
f. Keberlanjutan proyek konstruksi menopang perekonomian Bali.
Berbagai proyek pembangunan multi-years yang masih berlanjut pada tahun 2022 dan tahun 2023 juga diperkirakan mampu menopang perekonomian Bali secara keseluruhan. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan diantaranya proyek pemerintah dalam rangka pengembangan pariwisata Bali dan pengembangan KEK Kesehatan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu

penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
   a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, Penerimaan jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan denda pemanfaatan asset daerah, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan badan layanan umum daerah, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
   a. Transfer Pemerintah Pusat; dan
   b. Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
   a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
   b. Dana Darurat; dan
   c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah, intensifikasi, dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu:

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
   - ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
   - ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
   - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
   - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali.
   - ✓ Mengembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Samsat melalui Samsat Online, E-Samsat Bali, Samsat Qris, Samsat Ibu jari dan Samsat Vast.
   - ✓ Mengembangkan dan mengoptimalkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT Keliling dan SAMSAT Ke Rumah Tinggal (Kerti) serta layanan Samsat Gelis (Samsat Drivethru).
   - ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota dan kepada Perangkat Daerah Penghasil.
   - ✓ Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti LPD dan BUMDes dengan harapan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor.

c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
   - ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
   - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
   - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi

komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan

- ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.

d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melaui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 3.2.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Permendagri 13 Tahun 2006)

No Rek	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**3,041,192,945,534.15**	**3,398,472,278,306.41**	**3,718,499,635,346.14**	**3,762,785,679,903.00**	**3.069.474.217.923,49**
4.1.1	Pajak Daerah	2,593,093,540,850.00	2,872,354,212,630.00	3,230,732,169,802.50	3,235,176,956,048.00	2.607.990.396.693,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	63,858,566,092.00	46,431,881,689.84	40,241,780,029.00	49,803,474,650.00	18.966.859.393,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	172,408,361,957.52	188,456,139,544.28	170,219,137,368.48	170,885,580,850.00	177.395.020.194,90
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	211,832,476,634.63	291,230,044,442.29	277,306,548,146.16	306,919,668,355.00	265.121.941.642,59
4.2	**Dana Perimbangan**	**1,867,010,930,284.00**	**2,535,995,754,659.00**	**2,493,979,973,047.00**	**2,662,026,888,500.00**	**2.564.355.199.688,00**
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	171,994,343,152.00	169,597,184,795.00	182,554,549,512.00	185,994,009,500.00	206.614.864.352,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	850,144,224,000.00	1,260,842,523,000.00	1,268,585,388,000.00	1,325,847,555,000.00	1.204.700.789.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	844,872,363,132.00	1,105,556,046,864.00	1,042,840,035,535.00	1,150,185,324,000.00	1.153.039.546.336,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**340,811,565,515.65**	**57,693,635,493.03**	**46,888,000,000.00**	**74,038,406,000.00**	**84.510.282.004,00**
4.3.1	Hibah	4,890,000,000.00	15,654,526,300.77	5,388,000,000.00	5,604,000,000.00	5.708.000.004,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,000,000,000.00	7,500,000,000.00	41,500,000,000.00	68,434,406,000.00	78.802.282.000,00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	330,921,565,515.65	34,539,109,192.26	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pendapatan Daerah	**5,249,015,441,333.80**	**5,992,161,668,458.44**	**6,259,367,608,393.14**	**6,498,850,974,403.00**	**5.718.339.699.615,49**

Sumber : Realisasi APBD 2016-2020

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Ringkasan Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024
(PP Nomor 12 Tahun 2019)

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp)
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.923.153.297.394,76**	**5.905.037.523.797,34**	**6.933.947.319.883,00**	**5.041.197.053.961,00**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.117.070.012.473,76**	**3.862.875.261.848,23**	**4.731.419.182.089,00**	**3.547.130.530.639,00**
4.1.1.	Pajak Daerah	2.458.530.858.700,00	3.230.839.407.191,00	2.960.437.850.589,00	2.970.671.152.089,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	14.298.569.091,00	14.348.341.509,00	59.595.436.500,00	59.413.399.000,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	160.711.862.041,73	220.323.008.247,47	810.711.860.000,00	143.435.645.800,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	483.528.722.641,03	397.364.504.900,76	900.674.035.000,00	373.610.333.750,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.801.186.284.925,00**	**2.037.237.485.177,00**	**2.146.820.137.794,00**	**1.438.358.523.322,00**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.801.186.284.925,00	2.037.237.485.177,00	2.146.820.137.794,00	1.438.358.523.322,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.763.602.021.925,00	1.986.877.822.177,00	2.084.419.079.794,00	1.438.358.523.322,00
	- ***DBH***	217.120.439.637,00	180.221.083.308,00	136.760.061.000,00	194.793.770.322,00
	- ***DAU***	1.201.511.839.000,00	1.194.632.100.845,00	1.243.564.753.000,00	1.243.564.753.000,00
	- ***DAK***	1.344.969.743.288,00	612.024.638.024,00	704.094.265.794,00	0,00
4.2.1.2	Dana insentif Daerah	37.584.263.000,00	50.359.663.000,00	62.401.058.000,00	0,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1	Bagi Hasil Dari Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp)
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**4.896.999.996,00**	**4.924.776.772,11**	**55.708.000.000,00**	**55.708.000.000,00**
4.3.1	Hibah	4.896.999.996,00	4.924.776.772,11	55.708.000.000,00	55.708.000.000,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai PUU	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : LRA APBD 2021, LRA APBD 2022, Ringkasan APBD Tahun 2023, dan RPD Tahun 2024-2026

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara

berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.

3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Belanja Operasi.

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

   a. Belanja pegawai
   b. Belanja barang dan jasa
   c. Belanja bunga
   d. Belanja subsidi
   e. Belanja hibah
   f. Belanja bantuan sosial

2. Belanja Modal

   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

3. Belanja Tak Terduga

   Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

   Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerag kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

   a. Belanja Bagi Hasil
   b. Belanja Bantuan Keuangan

Tabel 3.4.

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Provinsi Bali Tahun 2016-2020

No Rek	Uraian	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**3,857,591,080,125.33**	**4,348,259,186,136.59**	**4,495,096,869,911.27**	**4,960,823,190,882.47**	**4.273.707.904.538,51**
5.1.1	Belanja Pegawai	753,995,649,371.00	1,493,989,761,722.94	1,571,381,339,168.00	1,673,097,219,437.27	1.572.773.890.739,53
5.1.3	Belanja Subsidi	9,990,000,000.00	10,000,000,000.00	9,566,400,000.00	10,000,000,000.00	4.936.000.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	1,116,809,328,526.00	1,122,239,172,548.00	1,072,780,454,888.96	1,065,541,042,600.00	916.157.568.906,50
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	155,774,827,000.00	11,143,000,000.00	3,189,000,000.00	4,220,000,000.00	3.581.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	1,026,250,937,576.02	1,098,555,278,556.60	1,207,451,785,444.09	1,339,553,585,283.20	1.054.748.783.171,60
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	794,578,160,468.85	612,177,419,409.05	630,540,390,410.22	856,313,067,054.00	386.649.305.012,58
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	192,177,183.46	154,553,900.00	187,500,000.00	12,098,276,508.00	334.861.356.708,30
5.2	**Belanja Langsung**	**1,563,344,832,441.20**	**1,722,277,737,598.69**	**1,503,450,162,370.54**	**2,240,373,168,887.00**	**2.084.413.570.725,10**
5.2.1	Belanja Pegawai	96,558,764,493.00	13,311,657,356.00	19,056,178,494.00	26,560,930,404.00	24.912.936.161,15
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	735,861,830,573.66	1,048,533,246,877.49	1,043,683,821,530.14	1,439,077,715,343.00	1.601.051.747.498,12
5.2.3	Belanja Modal	730,924,237,374.54	660,432,833,365.20	440,710,162,346.40	760,471,523,140.00	458.448.887.065,83
	Jumlah Belanja Daerah	**5,420,935,912,566.53**	**6,070,536,923,735.28**	**5,998,547,032,281.81**	**7,201,196,359,769.47**	**6.358.121.475.263,61**

Sumber : Realisasi APBD 2016-2020

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Belanja Daerah. Belanja Daerah dirinci menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Tidak lagi diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung. Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Ringkasan Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

NO	URAIAN	REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	RINGKASAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2024 (Rp)
5.	**BELANJA DAERAH**	**6.270.667.217.646.29**	**6.749.127.037.109,59**	**7.522.393.048.914,00**	**5.983.126.584.360,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**4.218.534.729.447,08**	**3.791.897.703.325,73**	**4.343.716.844.932,00**	**4.064.814.021.476,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.653.001.007.665,15	1.740.899.431.377,08	2.072.564.871.779,00	1.998.902.326.497,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.580.080.276.691,00	1.690.049.421.497,65	1.348.709.586.876,00	1.123.403.993.138,00
5.1.3	Belanja Bunga	2.775.000.000,00	0,00	0,00	2.506.377.057,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	4.372.945.000,00	10.025.000.000,00	5.025.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	982.678.445.090,63	356.436.889.451,00	881.696.186.277,00	915.976.324.784,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	139.016.000,00	30.721.200.000,00	19.000.000.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**839.010.470.016,80**	**1.451.748.423.386,86**	**1.419.978.951.582,00**	**407.304.736.275,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	439.080.181.058,00	623.659.331.572,00	182.964.805.976,00	10.416.000.000,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	105.838.658.813,28	109.213.603.835,00	207.854.510.993,00	51.344.864.147,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	170.812.068.572,52	340.651.767.017,86	705.969.048.170,00	294.957.001.088,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.544.410.552,00	354.881.755.251,00	269.502.569.533,00	47.798.872.640,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	30.735.151.021,00	23.276.736.561,00	53.688.016.910,00	1.595.000.000,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.192.998.400,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**13.503.458.494,00**	**4.759.779.107,00**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.503.458.494,00	4.759.779.107,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**1.199.618.559.688,41**	**1.500.721.131.290,00**	**1.708.697.252.400,00**	**1.461.007.826.609,18**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	845.466.055.345,93	1.231.251.353.817,00	1.186.722.448.892,00	1.189.858.039.342,30
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	354.152.504.342,48	269.469.777.473,00	521.974.803.508,00	271.149.787.266,88

Sumber : LRA APBD 2021, LRA APBD 2022, Ringkasan APBD Tahun 2023, dan RPD Tahun 2024-2026

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembagan keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pemberian pinjaman daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang digunakan unuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
2. Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
3. Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.6.

Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020

No Rek	Uraian	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	674.677.370.022,76	486.687.088.163,58	441.914.809.255,14	702.345.385.366,47	832.637.635.863,48
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	674.677.370.022,76	452.761.594.975,09	404.137.168.978,49	702.345.385.366,47	831.863.603.723,48
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	33.925.493.188,49	37.777.640.276,65	0,00	774.032.140,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	674.677.370.022,76	486.687.088.163,58	441.914.809.255,14	702.345.385.366,47	832.637.635.863,48
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	0,00	390.000.000,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.000.000.000,00	0,00	390.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	624.677.370.022,76	486.687.088.163,58	441.524.809.255,14	702.345.385.366,47	832.637.635.863,48
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	452.756.898.790,03	408.311.832.886,74	702.345.385.366,47	0,00	192.855.860.215,36

Sumber : Realisasi APBD 2016- 2020

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, Ringkasan PembiayaanTahun 2023, dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024.

NO	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	RINGKASAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp)
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.197.855.592.021,05**	**1.193.798.304.068,62**	**588.445.729.031,00**	**941.929.530.399,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.242.855.592.021,05**	**1.293.798.304.068,62**	**1.025.945.729.031,00**	**1.190.846.543.751,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	192.855.592.021,05	850.296.343.468,62	1.025.945.729.031,00	1.043.238.669.351,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	147.607.874.400,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.050.000.000.000,00	443.501.960.600,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**45.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**437.500.000.000,00**	**248.917.013.352,00**
6.1.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	187.500.000.000,00	248.917.013.352,00
6.1.2	Penyertaan Modal	45.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00	0,00
6.1.3	Pembentukan Dana Cadangan		100.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00
6.1.4	Pemberian Dana Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	RINGKASAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**850.341.671.769,52**	**349.708.790.756,37**	**0,00**	**0,00**

Sumber : LRA APBD 2021, LRA APBD 2022, Ringkasan APBD Tahun 2023, dan RPD Tahun 2024-2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 disusun mengacu pada sasaran pada Peraturan Gubernur RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2024 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2024.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2024 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang disusun dengan tema ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
   a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
   b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;

e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

   - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
   - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
   - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
   - Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
   b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

   - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
   - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.

7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

   Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:

   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

   - MP Ibu Kota Nusantara;
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

   a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

   - Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;

6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

B. Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
    2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
    3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
    4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
    5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
    2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
    3) penyediaan air untuk pertanian;
    4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
    5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
    6) pengembangan waduk multiguna.
c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
    2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
    3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;

4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;

5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) pengembangan industri halal.

g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) pengelolaan impor;
4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
7) peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;

b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. pengentasan kemiskinan; dan
g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
    1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
    2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
    3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
    4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) sistem jaminan sosial nasional;
    2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
    3) kesejahteraan sosial.

c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
    2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
    3) peningkatan pengendalian penyakit;
    4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
    5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
        - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
        - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
        - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,
        - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
        - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
    2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
    3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
    4) penjaminan mutu pendidikan; dan
    5) peningkatan tata kelola pendidikan.
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
    2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
    3) kualitas pemuda.
f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
    2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
    3) reforma agraria; dan
    4) perhutanan sosial.

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
    2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
    3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
    4) prestasi olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

   a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
   b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
   c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

   a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
      2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
      3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
      4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
      5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
   2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
   3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
   4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
   5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
   2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
   3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
   4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
   5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan budaya literasi;
   2) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
   3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
   4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
    2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
    3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
    4) keselamatan dan keamanan transportasi;
    5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
    6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) konektivitas jalan;
    2) konektivitas kereta api;
    3) konektivitas laut;
    4) konektivitas udara; dan
    5) konektivitas darat.
c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) transportasi perkotaan; dan
    2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
    2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
    3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.

e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
    2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
    3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

   Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

   a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
   c. pembangunan rendah karbon

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

   a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
      2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
      3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
      4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
   b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) penanggulangan bencana; dan
      2) peningkatan ketahanan iklim.
   c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) pembangunan energi berkelanjutan;
      2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan

3) pengembangan industri hijau

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

   a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
   c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iuar negeri.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

   a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
      2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
      3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
   b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
      2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
   c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) penguatan implementasi manajemen ASN;
      2) transformasi pelayanan publik;
      3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
      4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
   d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) penguatan keamanan dalam negeri;
      2) penguatan keamanan laut; dan
      3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama tiga tahun mendatang yaitu tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran
1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali 2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali 3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan 4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan

No	Tujuan	Sasaran
	dan berdaya saing	3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali
3	Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali	1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat 2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali 3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayan Bali
4	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatnya kualitas lingkungan 2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah 3. Meningkatnya penggunaan energi bersih 4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik 2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik 3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat 2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat 3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

4.2. Prioritas Pembangunan

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata

Prioritas 2 : Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
Prioritas 3 : Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
Prioritas 4 : Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
Prioritas 5 : Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
Prioritas 6 : Infrastruktur
Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2024, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut :

"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"

4.3. Paradigma Pembangunan Bali

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi *Krama* Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi *Sakala Niskala*

Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala* yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan *Hyang Widhi Wasa* sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, suksses dan rahayu.

2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4) Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, *lascarya*, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin Gumi Bali*, guna menjaga dan memelihara *Genuine* Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Provinsi Bali terdiri dari 9 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Jembrana. Masing-masing wilayah kabupaten dan kota memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Provinsi Bali sendiri memiliki arah pengembangan wilayah yang disusun untuk dapat menjadi *guide lines* bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayahnya. Tujuannya adalah agar tercipta keserasian dan keterpaduan pengembangan baik antar wilayah maupun dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.

5.1. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota

Sebagai bentuk optimal dalam membangun wilayah Provinsi Bali maka ditetapkan arahan pengembangan skala wilayah kabupaten/kota sebagai bentuk implementasi yang lebih teknis sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.

A. Kabupaten Badung

Kabupaten Badung, yang menjadi pintu gerbang internasional Provinsi Bali sekaligus pusat pariwisatanya, terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan. Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 Km^2 atau 7,42% dari luas wilayah Provinsi Bali.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Badung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator

yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

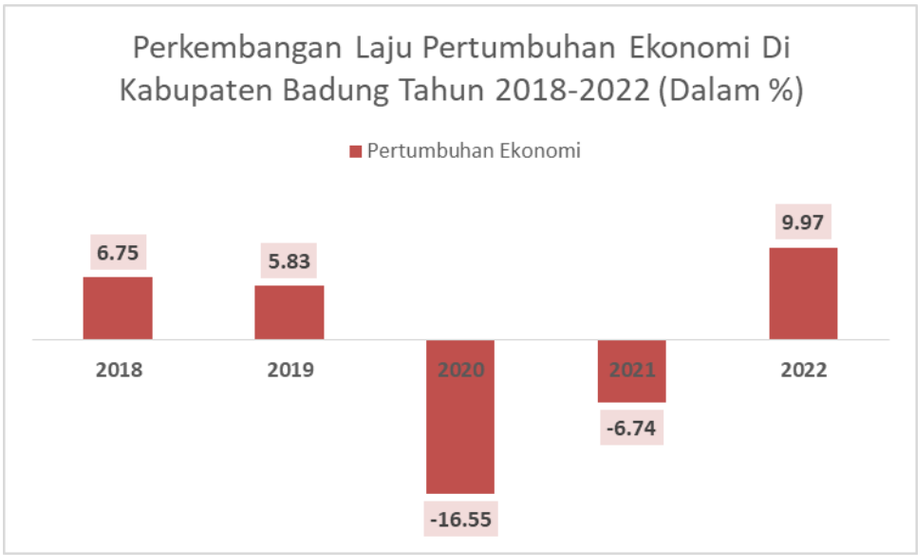
a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun dengan kecenderungan menurun pada periode tahun 2018-2022. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 9,97% dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -16,52%.

Kontraksi pada laju pertumbuhan ekonomi Badung pada tahun 2020 merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Bahkan angka ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mengalami kontraksi -9,31% pada tahun 2020.

Kabupaten Badung yang mengandalkan sektor pariwisata dan transportasi sebagai tulang punggung ekonominya tentu mengalami dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 paling besar di Provinsi Bali. Adanya penutupan pintu masuk internasional bagi wisatawan asing, pembatasan wisatawan domestik, dan penutupan sebagian kawasan wisata menyebabkan perekonomian Kabupaten Badung mengalami penurunan di tahun 2020.

Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Badung sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka -6,74%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami peningkatan sangat signfikan bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sektor pariwisata merupakan tulang punggu Kabupaten Badung, dengan dibukanya kembali Pintu Pariwisata secara penuh membuat banyak sektor kembali bangkit dari keterpurukan.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023

Gambar 5.1.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2018-2022

b. Angka Kemiskinan

Meskipun pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, namun angka kemiskinan Kabupaten Badung memiliki trend yang tidak terlalu bagus selama periode 2018-2021. Angka kemiskinan di Kabupaten Badung sebelum terjadinya pandemi COVID-19 mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2016 tercatat terdapat 2,06% penduduk di Kabupaten Badung yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2019, angka penduduk miskin ini berkurang menjadi hanya 1,78%. Namun, pasca Pandemi COVID-19 angka kemiskinan perlahan meningkat. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,02% dan 2021 meningkat ke angka 2,62%.

Angka kemiskinan Kabupaten Badung pada tahun 2022 akhirnya mengalami penurunan yaitu 2,53%. Penurunan angka kemiskinan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 oleh Pemerintah. Indonesia yang statusnya sudah menuju endemic memberikan kelonggaran pada penyelenggaraan aktivitas masyarakat dengan salah satunya pembukaan pintu

pariwisata. Kembali bangkitnya pariwisata Bali sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Badung sehingga mampu menekan pertumbuhan angka kemiskinannya.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023

Gambar 5.2.

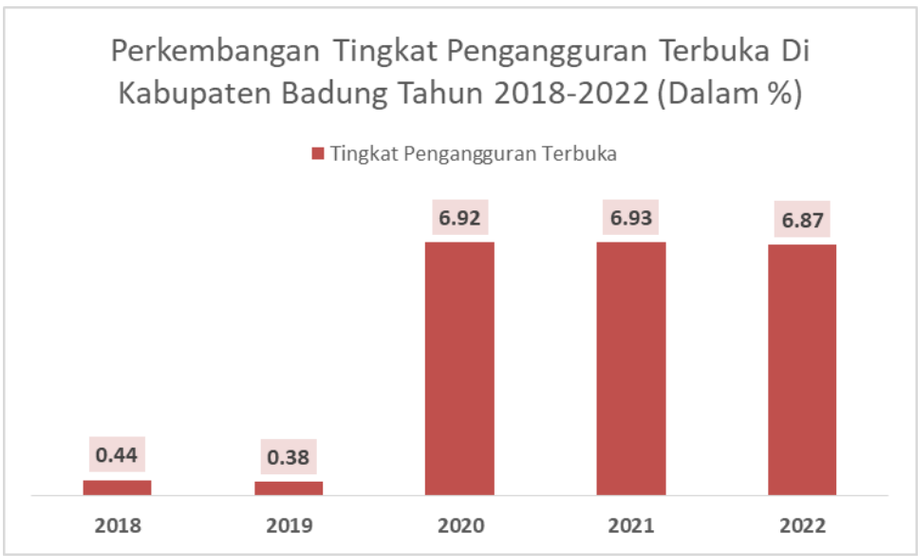
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2018-2022

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun pada jalur yang positif pada periode 2018-2022. Pada tahun 2017 angka pengangguran mengalami peningkatan menjadi 0,48% atau meningkat 0,14 poin. Namun, trend positif terjadi yaitu angka pengangguran mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 0,44% dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 0,38%.

Pada tahun 2020 terjadi lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung menjadi 6,92% dan kembali meningkat menjadi 6,93% di tahun 2021. Lonjakan secara massif dan dalam waktu singkat ini merupakan imbas dari pembatasan sosial skala besar yang dilakukan di Kabupaten Badung.

Pada tahun 2022 TPT Kabupaten Badung mengalami penurunan ke angka 6,87%. Meskipun masih tergolong tinggi namun penurunan TPT ini merupakan dampak dari kembali bangkitnya pariwisata di Kabupaten Badung. Penurunan TPT ini akan terus berlanjut selama pariwisata Badung dapat terus mengalami peningkatan hingga mencapai kondisi seperti sebelum tahun 2019.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023

Gambar 5.3.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2018-2022

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2018-2022 yang menandakan kualitas sumber daya manusia-nya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Badung adalah 80,87 dan pada tahun 2022 meningkat 82,13.

IPM Kabupaten Badung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali IPM Nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Badung lebih baik dari rata-rata wilayah lainnya baik di Provinsi Bali maupun nasional. Pada tahun 2022,

IPM Badung merupakan tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang memiliki IPM di atas Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023

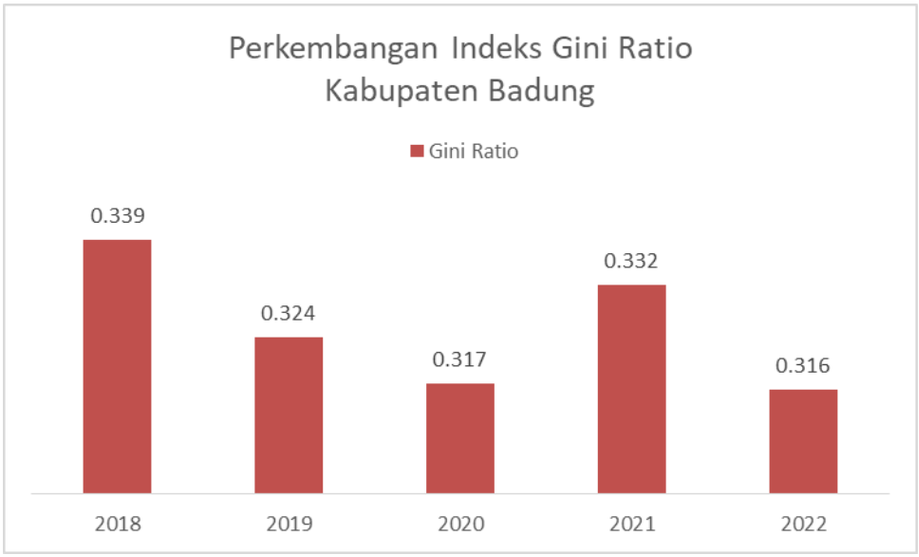
Gambar 5.4.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2018-2022

e. Gini Ratio

Gini ratio di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama periode 2018-2022 namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam Kabupaten Badung semakin menurun meskipun tidak secara signifikan. Berdasarkan klasifikasi ketimpangan yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2018-2022, Kabupaten Badung tergolong pada kelompok wilayah dengan ketimpangan rendah.

Indeks Gini Ratio tertinggi dialami oleh Kabupaten Badung pada tahun 2018 yaitu dengan indeks 0,340 meningkat dari tahun 2017 dengan indeks 3,20. Pada tahun 2019 Gini Ratio Badung menurun menjadi 0,324 dan kembali menurun tahun berikutnya menjadi 0,317.

Meskipun pada tahun 2021 Kabupaten Badung mengalami imbas yang cukup signifikan akibat Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan jatuhnya laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran, dan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan antar kelompok penduduk. Pada tahun 2022, ketimpangan penduduk Kabupaten Badung semakin menurun (0,332) berkat mulai dilonggarkannya protokol kesehatan oleh pemerintahan dimana pariwisata sudah mulai dibuka kembali.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023

Gambar 5.5.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung

Tahun 2018-2022

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Penyelarasan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Badung terhadap tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG
"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"	"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH"

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024 yang sudah terselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	1. Pangan, Sandang dan Papan 5. Pariwisata
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	2. Kesehatan dan Pendidikan
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Lingkungan Hidup	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
6	Infrastruktur	6. Infrastruktur 8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023

Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung 2023 adalah sebagai berikut.

A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan :

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
2. Revitalisasi sistem pertanian organik
3. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian
4. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah
5. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan

B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :
1. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga
2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif
4. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan
5. Peningkatan kualitas layanan mulai pustu, puskesmas hingga RSUD
6. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru
7. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan

C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :
1. Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah
2. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan Ekonomi
3. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja
4. Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja
5. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja
6. Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja

D. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya :
1. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama

2. Memperkuat pelaksanaan *sradha bakti* yang berbasis pada penguatan budi pekerti
3. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya
4. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka
5. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.

E. Bidang Pariwisata :
1. Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan
2. Memperkuat citra dan "*positioning*" kepariwisataan Kabupaten Badung
3. Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan
4. Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan
5. Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi-destinasi baru yang berkualitas
6. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata.

F. Penguatan Infrastruktur :
1. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pedidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata
2. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
3. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).
4. Pembangunan daya tarik wisata baru

G. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
4. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
7. Meningkatkan Profesionalitas ASN
8. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
9. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Badung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Indikator	Target Capaian 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,00-6,50%
2	Angka Kemiskinan	2,17%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4%
4	Indeks Pembangunan Manusia	82,33
5	Gini Ratio	0,31

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2023

B. Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem, yang merupakan kabupaten di ujung timur Provinsi Bali sekaligus menjadi pintu gerbang bagian Timur Pulau Bali. Kabupaten Karangasem memiliki luas wilayah 839,54 Km^2 atau 14,89% dari total luas wilayah Provinsi Bali. Secara adminsitrasi Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan

Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Selat.

1. Kondisi Umum Wilayah

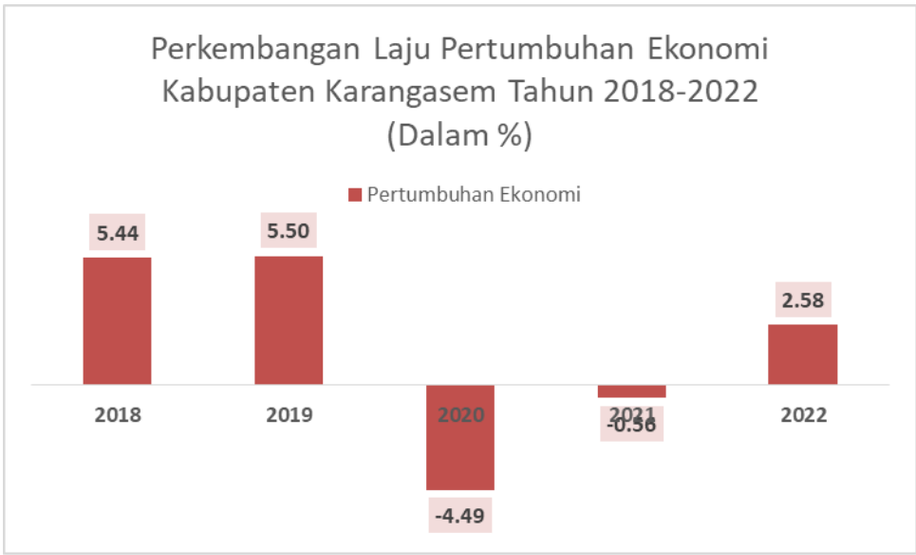
Kondisi umum wilayah Kabupaten Karangasem merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem pada periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi ekonomi Kabupaten Karangasem terjadi pada tahun 2019 yaitu berada pada angka 5,50%. Namun, angka ini kemudian menurun menjadi -4,49% di tahun 2020.

Kabupaten Karangasem juga mengalami dampak kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang dapat terlihat pada laju pertumbuhan ekonominya yang terkontraksi ke angka -4,49%. Angka ini adalah yang terendah selama lima tahun terakhir. Namun, seiring dengan semakin terkendalinya penyebaran covid-19 di Bali dan Karangasem, perlahan pertumbuhan ekonominya mulai membaik. Tahun 2021 tercatat pertumbuhan ekonomi Karangasem masih terkontraksi ke angka -0,56% namun jauh membaik dari tahun 2020.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Karangasem meningkat pesat ke angka 2,58%. Pembukaan kembali pintu pariwisata Bali setelah pandemi melandai dan akan memasuki endemic memberikan dampak instan dan signifikan pada perekonomian Kabupaten Karangasem.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Gambar 5.6.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Angka kemiskinan Kabupaten Karangasem pada periode tahun 2018-2022 mengalami trend peningkatan akibat pandemi. Tahun 2018 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Karangasem adalah 6,28% dan menurun terus hingga tahun 2020 menjadi 5,91%. Pada tahun 2021 angka kemiskinan ini meningkat cukup signifikan menjadi 6,78%. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem ini merupakan salah satu dampak dari Pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2022 kemiskinan di Karangasem kembali meningkat menjadi 6,98%.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Gambar 5.7.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 3,09%. Artinya terdapat 3,09% penduduk yang menganggur pada penduduk usia kerja di Kabupaten Karangasem.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem tahun 2022 jauh berada di bawah Provinsi Bali yaitu dengan angka 4,80%. Artinya, tingkat pengangguran di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali. Namun demikian, lonjakan TPT Karangasem tergolong signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2019 TPT Kabupaten Karangasem tercatat hanya 0,60%. Tahun 2021, TPT Karangasem berangsur menurun ke angka 2,32% seiring semakin membaiknya perekonomian akibat semakin terkendalinya penyebarluasan covid-19 di Karangasem maupun Bali.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Gambar 5.8.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki manfaat, salah satunya, adalah sebagai tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka kualitas sumber daya manusia masyarakatnya juga semakin baik.

IPM Kabupaten Karangasem mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir dimana secara bertahap terus meningkat selama periode 2018-2022. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Karangasem adalah 66,49 dan pada tahun 2022 adalah 68,28.

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 ini masih berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 76,44. Artinya kualitas sumberdaya manusia masyarakat di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali bahkan menjadi yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Gambar 5.9.

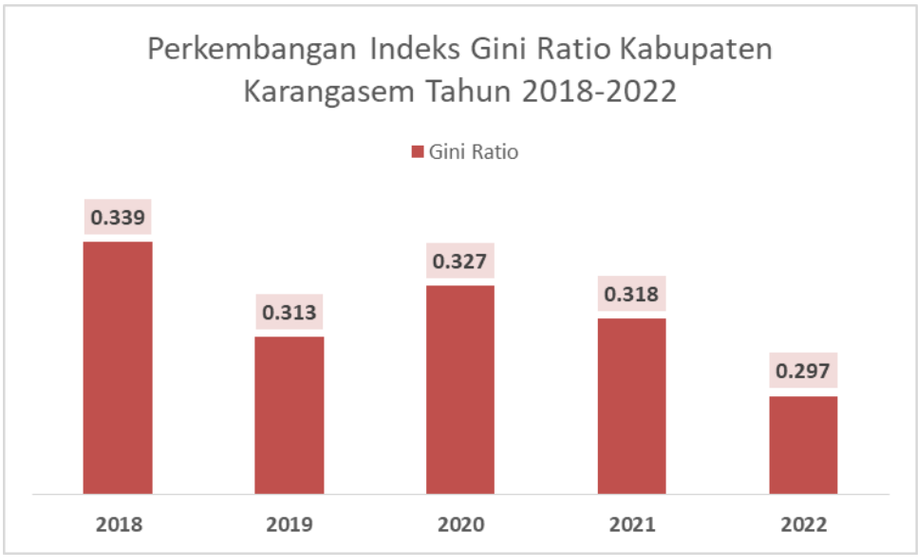
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.

e. Gini Ratio

Gini Ratio Kabupaten Karangasem, sebagai salah satu indikator ketimpangan antar wilayah, menunjukkan angka yang fluktuatif selama periode 2018-2022. Gini ratio tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 0,339 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 0,297.

Kecenderungan indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem mengalami penurunan pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 tercatat gini ratio Karangasem adalah 0,339 dan terakhir di tahun 2022 telah jauh menurun menjadi 0,297. Semakin kecilnya Gini Rasio menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut menjadi semakin kecil pula. Tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan yang terlalu mencolok.

Apabila disandingkan dengan Provinsi Bali, Gini Rasio Kabupaten Karangasem masih berada di bawahnya dan merupakan yang terendah ketiga setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Gambar 5.10.

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Penyelarasan tema pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM
"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"	"PENGUATAN EKONOMI DAN SOSIAL MELALUI PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG TANGGUH DAN MANDIRI, PENGEMBANGAN SDM YANG HANDAL, PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN BUDAYA, PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI"

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Keselarasan antara prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Bidang Pangan, Sandang dan Papan (mendukung Prioritas Provinsi nomor 1)
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Bidang Kesehatan dan Pendidikan (mendukung Prioritas Provinsi nomor 2)
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan (mendukung Prioritas Provinsi nomor 3)
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya (mendukung Prioritas Provinsi nomor 4)
5	Lingkungan Hidup	Bidang Pariwisata (mendukung Prioritas Provinsi nomor 1)
6	Infrastruktur	Penguatan Insfrastruktur (mendukung Prioritas Provinsi nomor 1, 5 dan 6)
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik (mendukung Prioritas Provinsi nomor 7)

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Arah kebijakan Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui :
   a. Pemetaan dan pengembangan potensi pertanian, revitaliasasi subak, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian.
   b. Pengembangan kawasan wisata terpadu berbasis Desa Adat, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
2. Menurunkan Kemiskinan melalui :
   a. Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, pemberian santunan dan tunjangan kepada disabilitas dan lansia.
   b. Pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terutama bagi masyarakat miskin.

c. Penuntasan kemiskinan ekstrem melalui pemutakhiran DTKS dan P3KE serta pengurangan beban pegeluaran masyarakat miskin.

3. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui :
   a. Peningkatan akses dan layanan kesehatan berbasis sistem dan data based riwayat Kesehatan.
   b. Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat daruratan) atau antar jemput pasien.
   c. Penyediaan tenaga kesehatan dan peningkatan sarana prasarana serta alat kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap dan RSUD.
   d. Peningkatan akses dan layanan pendidikan, pengembangan pendidikan non formal dan peningkatan sarana dan prasara pendidikan.

4. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui :
   a. Pengembangan IKM, UMKM dan ekonomi kreatif, Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi, Fasilitasi program magang tenaga kerja ke luar negeri bagi lulusan LPKS di Kabupaten Karangasem.
   b. Menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi dan kemudahan berusaha.
   c. Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja sektor di lingkungan setempat (Desa Adat).

5. Menurunkan Indeks Gini Rasio melalui :
   a. Pemerataan pembangunan sampai dengan ke tingkat Desa.
   b. Peningkatan lapangan kerja di sektor formal.

6. Meningkatkan Ketahanan Bencana melalui :
   a. Pembangunan keamanan dan ketertiban serta memperkuat ketahanan masyarakat Karangasem dalam menghadapi bencana secara terpadu.

b. Pemenuhan sarana/prasarana penanggulangan bencana untuk peningkatan pelayanan, mitigasi bencana, serta memenuhi tanggap cepat darurat.

Untuk dapat mencapai arah pembangunan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan Kabupaten Karangasem yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2024

No	Indikator	Target Capaian 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	(3,80%-4,20%)
2	Angka Kemiskinan	(5,85%-6,34%)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	(2,98%-3,09%)
4	Indeks Pembangunan Manusia	(69,20-69,34)
5	Gini Ratio	(0,2962-0,2970)

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2023

C. Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar, yang menjadi salah satu episentrum pariwisata budaya dan sejarah di Provinsi Bali, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Payangan. Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 368 Km^2 atau 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali.

1. Kondisi Umum Wilayah

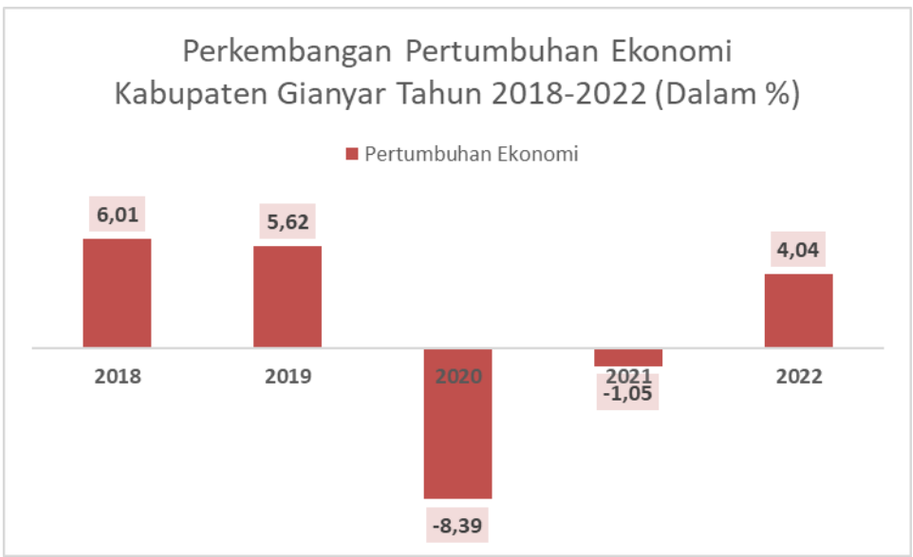
Kondisi umum wilayah Kabupaten Gianyar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022 namun cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 6,01%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya mengalami

penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 menurun menjadi 5,62% dan tahun 2020 kontraksi ke angka -8,40% dan merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar mulai membaik meski masih terkontraksi di angka -1,07%.

Pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Gianyar mengalami pertumbuhan sebesar 4,04%. Angka ini sedikit berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu -2,47%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023

Gambar 5.11.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar mengalami kecenderungan peningkatan selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan yaitu 4,19% menjadi 3,88%. Pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan Kabupaten Gianyar terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 meningkat menjadi 4,08% dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 4,85%. Angka

kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi selama periode tahun 2018-2022.

Angka kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2022 berada di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53% dan di bawah angka kemiskinan Nasional yaitu 10,14%. Hanya Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar saja yang memiliki angka kemiskinan di bawah Provinsi Bali.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023

Gambar 5.12.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang positif. Pada tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,60% namun menurun di tahun 2019 menjadi 1,42% dan meningkat dengan signifikan di tahun 2020 menjadi 7,53%.

Pada tahun 2022, mengalami penurunan menjadi 6,78%. Angka ini berada jauh di atas Provinsi Bali yaitu 5,37%. Bahkan, Kabupaten Gianyar merupakan wilayah

dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023

Gambar 5.13.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Gianyar sebesar 76,61 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 78,39 di tahun 2022. IPM Kabupaten Gianyar pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023

Gambar 5.14.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Gianyar pada tahun 2022 adalah sebesar 0,307 atau meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,317. Peningkatan Indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Gianyar semakin meningkat jaraknya mengingat pendapatan masyarakat cenderung kurang tersebar.

Apabila ditarik ke 5 tahun ke belakang, pada periode 2018-2022, Indeks Gini Ratio Kabupaten Gianyar memang mengalami kecenderungan meningkat. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Gianyar tercatat terjadi di tahun 2021 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 0,288. Angka Gini Ratio di Kabupaten Gianyar pada tahun 2022 berada jauh di atas Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,378.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023

Gambar 5.15.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2022

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2024 dengan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN GIANYAR
"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"	"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT GIANYAR YANG BAHAGIA, SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI, MANDIRI, BERINTEGRITAS"

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2022

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.8.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024.

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Pertanian, Perikanan, IKM UMKM, dan Pariwisata
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pendidikan, Kesehatan dan IPTEK
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Adat, Budaya, Tradisi dan Seni
5	Lingkungan Hidup	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
6	Infrastruktur	
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gianyar pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2024

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan dan memperluas akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan jumlah fasilitas, inovasi pelayanan kesehatan dan ketersedian obat
		Meningkatkan pengelolaan jaminan kesehatan
2	Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri kreatif dan berdaya saing
		Mengoptimalkan kapasitas daya saing keolahragaan masyarakat
3	Meningkatkan literasi masyarakat dalam pelayanan perpustakaan	Peningkatan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan perpustakaan
4	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun
5	Meningkatkan partisipasi perempuan dan	Peningkatan pemenuhan hak perempuan

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	perlindungan anak	Peningkatan pemenuhan hak anak
6	Optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan daerah	Implementasi Digitalisasi Desa dalam mengembangkan potensi desa wisata
7	Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan PAD
8	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi	Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
9	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
10	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Mendorong pembukaan lapangan usaha baru berbasis kewirausahaan
11	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Mengoptimalkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam perlindungan, pengembangan dan pembinaan serta pemanfaatan warisan budaya
12	Penguatan penyelenggaraan bina mental spiritual yang mendukung pengembangan budaya spiritual	Pengembangan sarana prasarana bina mental spiritual
13	Mengembangkan produk unggulan Gianyar dan pemasarannya	Mengembangkan kelembagaan pemangku kepentingan terkait kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang berdampak pada peningkatan ekonomi
		Meningkatkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku IKM melalui pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan menumbuhkan kemitraan dengan usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat
14	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah , luar daerah maupun luar negeri
15	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
16	Meningkatkan pengelolaan kebencanaan daerah	Menerapkan sikap Tanggap,Tangkas, Tangguh dalam menghadapi bencana alam
17	Merancang kegiatan untuk	Meningkatkan kualitas

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur.	infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis
18	Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	Mensosialisasikan dan penegakan pelaksanaan Perda dan Perkada
19	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan peraturan
20	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi
		Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
21	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	Mengoptimalkan pelayanan publik cepat dan mudah serta mendorong implementasi riset dan inovasi daerah

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Gianyar yang harus terwujud di Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.10.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2024

No	Indikator	Target Capaian 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,80 (5,30 – 6,30)
2	Angka Kemiskinan	4,10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,60
4	Indeks Pembangunan Manusia	79,60
5	Gini Ratio	0,279

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2023

D. Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku. Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bali yang tidak memiliki garis pantai. Kabupaten Bangli memiliki luas 520,81 Km^2 atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali.

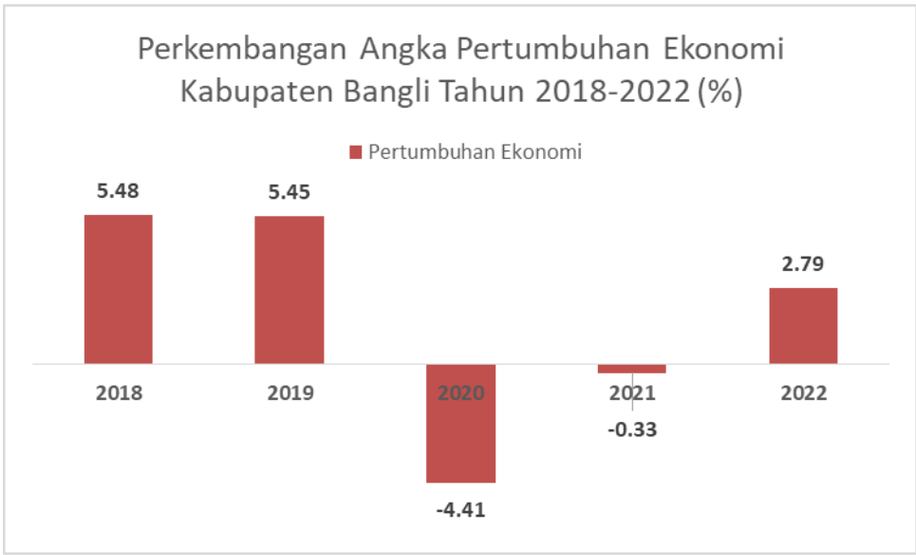
1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Bangli merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022. Terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2020. Tahun 2019 tercatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli adalah 5,45% menurun dari tahun 2018 yaitu 5,48%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu -4,41%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dengan dimulainya Pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bangli membaik ke angka -0,33% dan pada tahun 2022 meningkat signifikan ke angka 2,79%. Pembukaan aktivitas masyarakat secara penuh setelah sebelumnya selalu dibatasi untuk penanggulangan pandemi ternyata membawa dampak signfikan dan instan pada pertumbuhan ekonomi Bangli. Tahun 2022 sebagai tahun pembukaan kembali pariwisata Bali secara penuh dan pembukaan aktivitas masyarakat menyebabkan perekonomian Bangli kembali bangkit dan pertumbuhannya langsung melesat ke angka 2,79%



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023

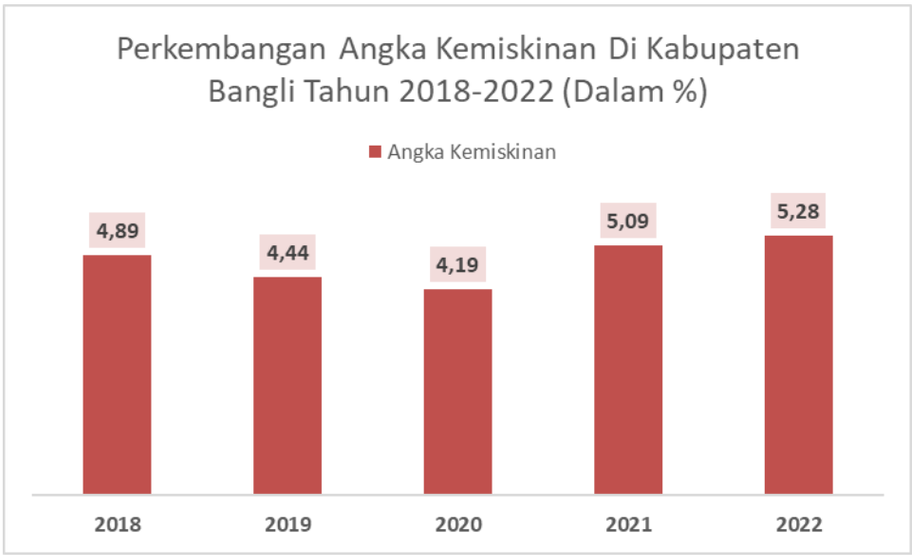
Gambar 5.16.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli mengalami kondisi positif selama periode tahun 2018-2022. Tahun 2018 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Bangli adalah 5,23% dan tahun 2020 menurun menjadi 4,19%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Bangli meningkat cukup signifikan menjadi 5,28%.

Angka kemiskinan Kabupaten Bangli pada tahun 2022 berada jauh di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Bangli menempati urutan ke-5 tertinggi pada tahun 2022.



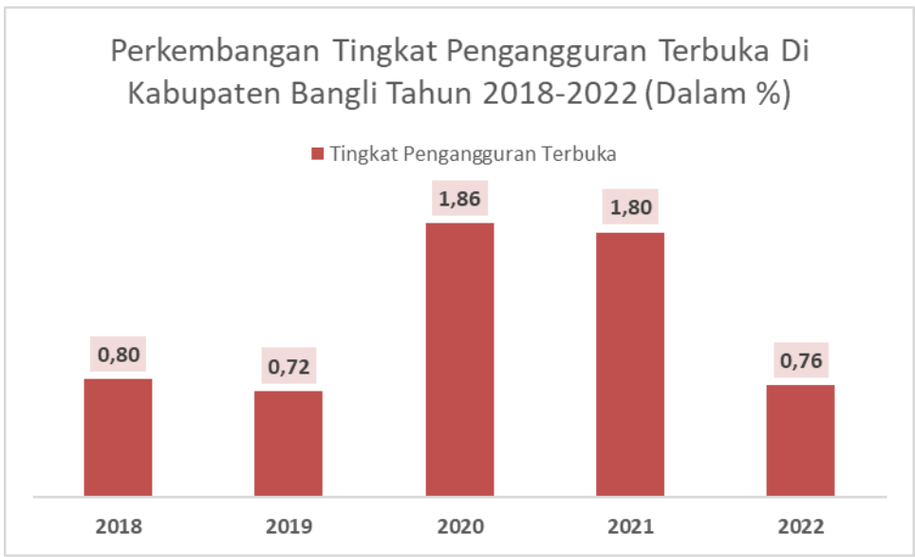
Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023

Gambar 5.17.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang tidak menggembirakan. Pada tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 0,80% dan meningkat di tahun berikutnya yaitu 0,80%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 0,72% namun meningkat sangat tajam di tahun 2020 menjadi 1,86%. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Bangli menurun menjadi 1,80%. Peningkatan TPT pada tahun 2020 ini ditenggarai terjadi karena dampak merebaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023

Gambar 5.18.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Bangli sebesar 68,96 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 70,26 di tahun 2022. Peningkatan IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2021-2022 merupakan peningktan tertinggi yang terjadi pada rentan waktu 2018-2022.

IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2021 ini berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29. Apabila disandingkan dengan IPM kabupaten/kota lainnya, IPM Kabupaten Bangli tahun 2021 merupakan kedua terendah di Provinsi Bali setelah Kabupaten Karangasem.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023

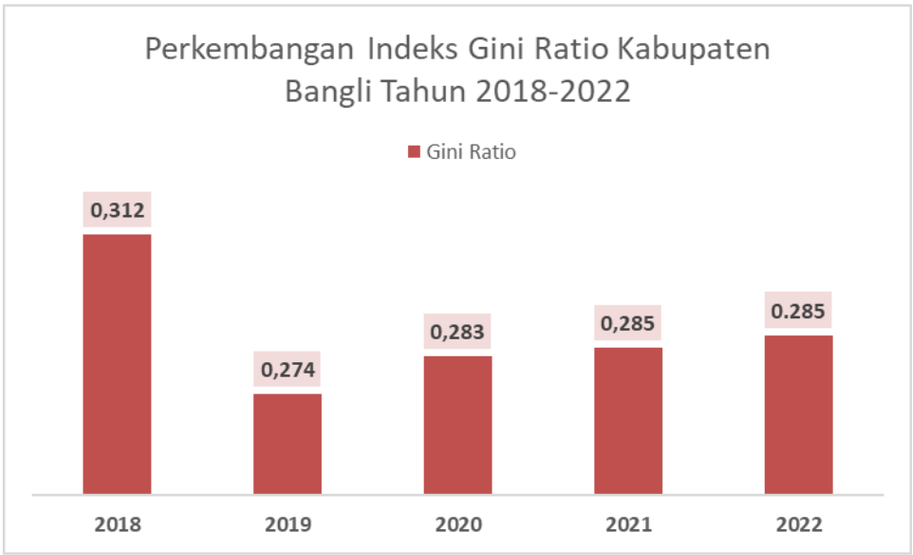
Gambar 5.19.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Bangli pada tahun 2020 adalah sebesar 0,283 atau naik 0,009 poin dari tahun 2019 sebesar 0,274. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Bangli semakin lebar jaraknya meskipun tidak signifikan. Pada periode tahun 2018-2022, kecenderungan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bangli adalah menurun meski di tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Bangli tercatat terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,312. Secara umum ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam wilayah Kabupaten Bangli merupakan yang terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023

Gambar 5.20.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli Tahun 2018-2022

2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Bangli terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.11.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI
"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"	"PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, PEREKONOMIAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN DIDUKUNG OLEH TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN"

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023

Dalam menyelaraskan antara tema dan prioritas pembangunan antara Provinsi Bali, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

Tabel 5.12.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pemenuhan kebutuhan dasar krama Bangli di Bidang Pangan, Sandang, dan Papan dengan Kualitas yang Layak
		Memperkuat sektor perekonomian melalui penguatan sektor pariwisata dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian
2.	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Penguatan Kualitas SDM melalui Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan
3.	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jaminan Sosial Terpadu dan Ketenagakerjaan
4.	Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya	Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi
5.	Lingkungan Hidup	Memantapkan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
6.	Infrastruktur	
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Birokrasi yang mengelola pembangunan yang efektif dan efisien

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023

Guna mewujudukan prioritas pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

1. Stabilitas harga pangan Krama Bangli
2. Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bangli"

3. pembangunan industri kerajinan rakyat yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan krama dan wisatawan yang berorientasi ekspor
4. Meningkatkan kualitas permukiman melalui pembangunan RTLH
5. penempatan transmigran untuk layak huni, layak usaha dan layak pengembangan
6. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
9. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
10. Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
11. Mendorong peningkatan pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
12. mendorong peningkatan pengelolaan unsur pembangunan literasi masyarakat
13. Mendorong Peningkatan Pelayanan, Kapasitas dan Peran serta Kepemudaan
14. mendorong peningkatan penyediaan sarana prasarana olahraga dan pembinaan atlet
15. Meningkatkan jaminan sosial dan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin) atau terdampak bencana
16. Membangun sistem, sarana dan prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten
17. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja
18. Memperkuat Desa Adat dalam melaksankana fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig

dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa

19. penguatan kelembagaan seni dan budaya tradisional Bali
20. Penguatan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan
21. Penguatan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan
22. Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis
23. Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru
24. pengembangan Rumah kreatif untuk pelaku industri kreatif pariwisata
25. Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
26. Memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi
27. Meningkatkan perekonomian yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi serta Pengembangan industri kreatif skala kecil dan menengah
28. Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan
29. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
30. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah
31. meningkatkan kemitraan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang responsif
32. Mewujudkan Bangli yang hijau, produktif dan berkelanjutan Melalui Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur berwawasan Lingkungan

Untuk dapat mencapai arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Bangli Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.13.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2024

No	Indikator	Target Capaian 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5%
2	Angka Kemiskinan	4,19%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,75%
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,78
5	Gini Ratio	0,280

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2023

E. Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten satu-satunya yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan (Kecamatan Nusa Penida). Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah 315 Km^2 atau 5,59% dari wilayah Provinsi Bali yang menjadikannya kabupaten dengan luas wilayah paling kecil kedua setelah Kota Denpasar.

1. Kondisi Umum Wilayah

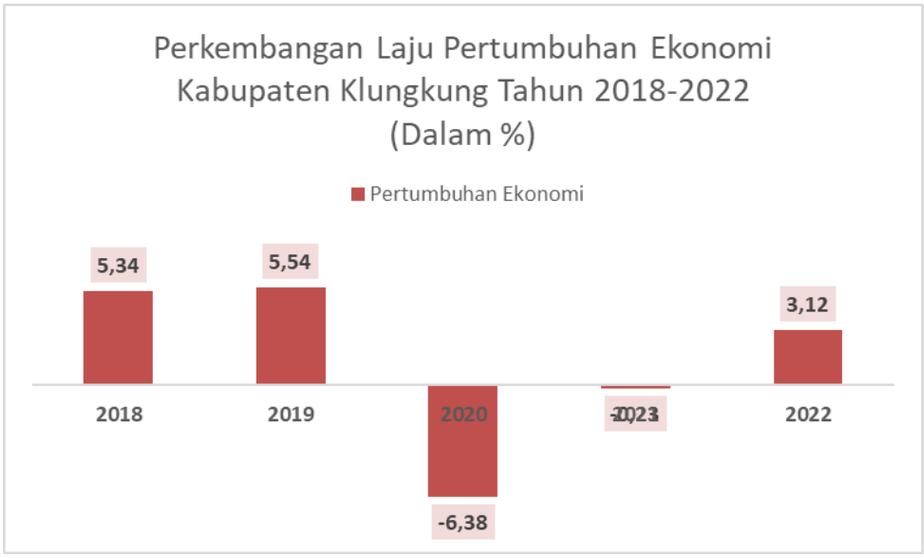
Kondisi umum wilayah Kabupaten Klungkung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mengalami trend fluktuatif pada periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Klungkung (5,44%) mengalami pertumbuhan yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%.

Tahun 2020, ekonomi Klungkung mengalami kontraksi paling dalam selama 5 tahun terakhir menjadi -6,35%. Kondisi ini terjadi akibat imbas pandemi Covid-19 yang menghantam sektor pariwisata. Pada tahun 2022, perekonomian Klungkung mulai mengalami perbaikan yang

ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik ke angka 3,12%.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023

Gambar 5.21.

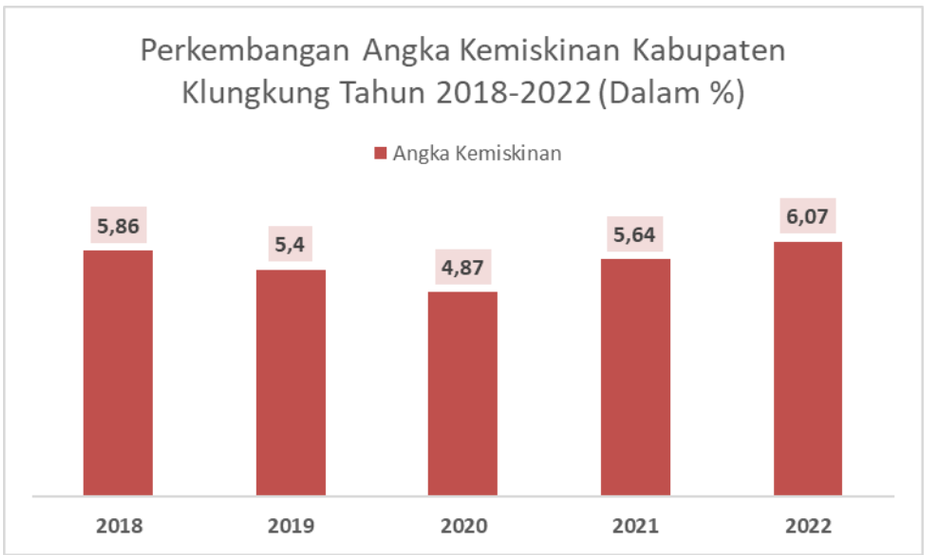
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung mengalami kondisi positif selama tahun 2018-2022. Pada periode tahun 2018-2022, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan dengan gap yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,86% dan menurun secara signifikan pada tahun 2020 menjadi 4,87%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Klungkung meningkat menjadi 6,07%.

Angka kemiskinan Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 masih berada di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, angka kemiskinan Kabupaten Klungkung merupakan tertinggi ketiga di

Provinsi Bali di bawah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023

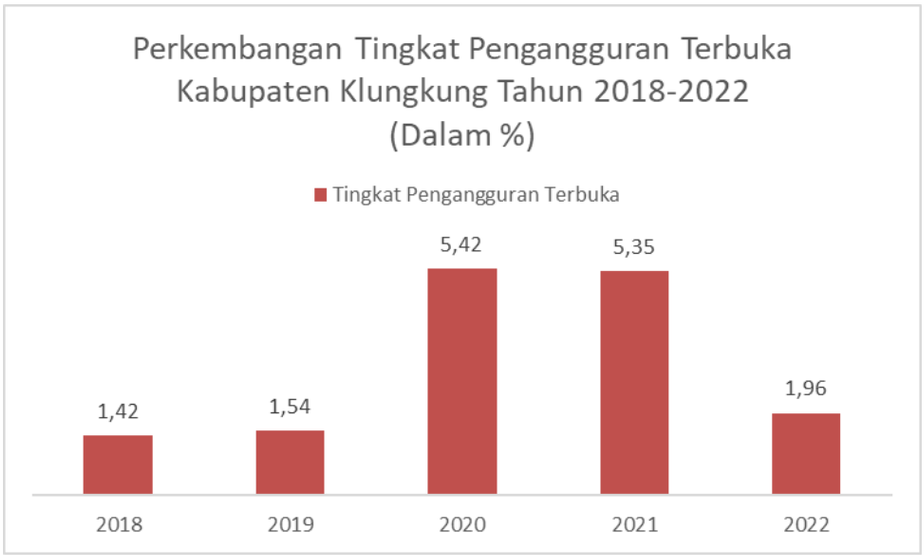
Gambar 5.22.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Klungkung mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Terjadi peningkatan pada angka pengangguran terbuka meskipun tidak terlalu signifikan.

Pada tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,42% dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung menjadi 5,42%, tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang cukup signifikan pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan di Kabupaten Klungkung yang berimbas pada tingkat pengangguran terbuka meningkat secara drastis. Pada tahun 2022, pengangguran berkurang ke angka 1,96%.



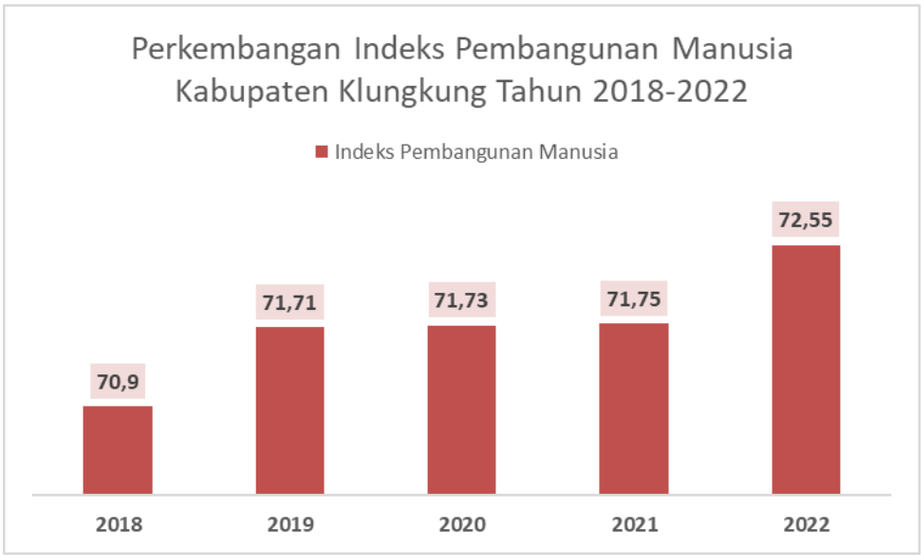
Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023

Gambar 5.23.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Klungkung sebesar 70,90 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 72,55 di tahun 2022. IPM Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023

Gambar 5.24.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022

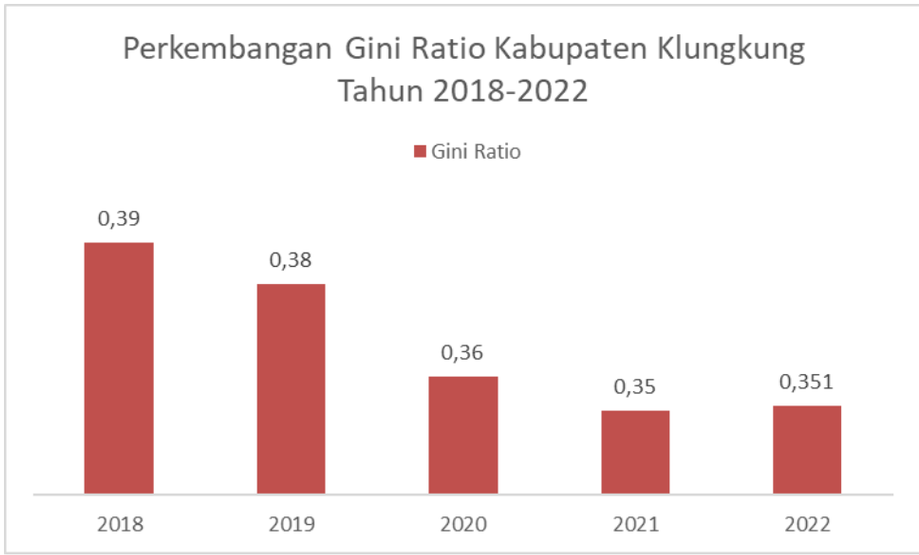
e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah. Indeks Gini Ratio Kabupaten Klungkung mengalami dinamika yang positif selama 5 tahun terakhir. Selama periode tahun 2018-2022, Indeks Gini Ratio terus mengalami penurunan yang mengindikasikan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk mengalami penurunan

Indeks Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,39 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 0,35. Dengan semakin baiknya pemerataan pendapatan diantara kelompok penduduk, mengindikasikan pembangunan di Kabupaten Klungkung sudah semakin merata. Kabupaten Klungkung sendiri merupakan wilayah yang meliputi daratan dan kepulauan yang menyebabkan pemerataan pembangunan menjadi salah satu kendala. Pembangunan di Klungkung kepulauan cenderung lebih lamban dibandingkan dengan di daratan akibat kendala aksesibilitas. Namun dengan berkembangnya pariwisata di

Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan menyebabkan perekonomian masyarakat di Klungkung kepulauan mengalami peningkatan dan turut memberikan andil penurunan Indeks Gini Ratio.

.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023

Gambar 5.25.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.14.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KLUNGKUNG
" PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"	" MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA UNTUK MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI"

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia
5	Lingkungan Hidup	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia
6	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023

Untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia
2. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan public
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

Dengan arah pembangunan wilayah tersebut, sasaran atau target capaian pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024

No	Indikator	Target Capaian 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,86%
2	Angka Kemiskinan	4,85%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,85%
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,55
5	Gini Ratio	0,34

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2023

F. Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan. Kabupaten Tabanan memiliki

luas wilayah 839,33 Km^2 atau 14,89% dari luas wilayah Provinsi Bali.

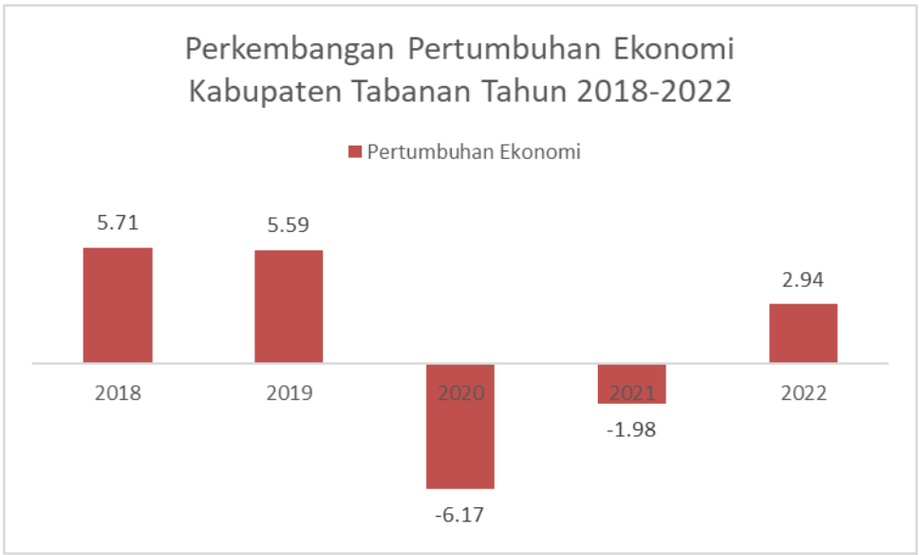
1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Tabanan merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan mengalami trend penurunan pada periode tahun 2018-2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 5,71%. Pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Tabanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,59% atau sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali namun menurun cukup signifikan di tahun selanjutnya.

Tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan mengalami kontraksi yang sangat dalam akibat pandemi covid-19. Tahun 2020 kontraksi ke angka -6,14% dan tahun 2021 mengalami peningkatan meski masih terkontraksi ke angka -1,97%. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan perlahan membaik menjadi 2,94%



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023

Gambar 5.26.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat sebesar 4,46% menurun menjadi 4,21% tahun 2019. Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 4,27%. Tahun 2021 kembali meningkat cukup signifikan menjadi 5,12% dan 2022 meningkat kembali menjadi 5,15%.

Angka kemiskinan Kabupaten Tabanan di tahun 2022 berada di atas angka kemiskinan Provinsi Bali. Angka kemiskinan Provinsi Bali adalah 4,53%. Namun lebih baik dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,14%.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023

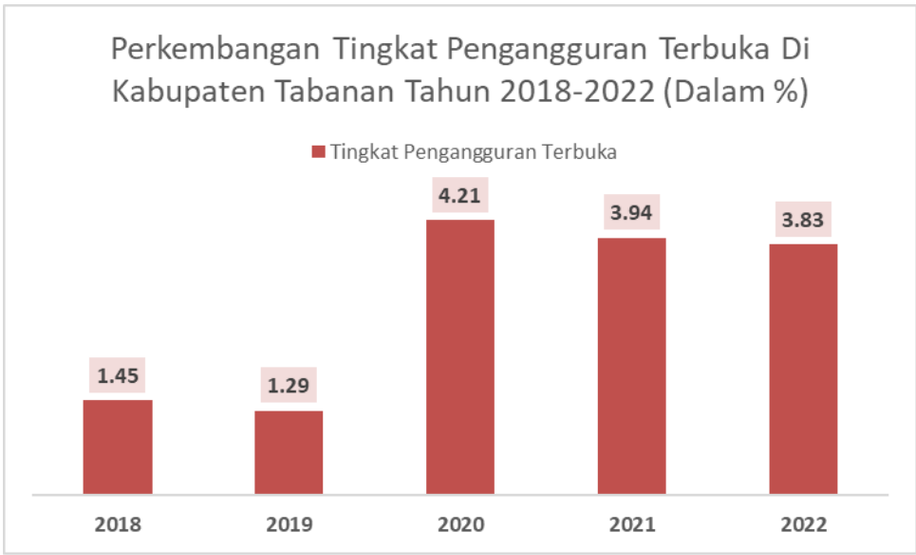
Gambar 5.27.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di wilayahnya dengan cukup baik. Tahun 2017 tercatat TPT Kabupaten Tabanan adalah 1,79% dimana kemudian menurun menjadi 1,29% pada tahun 2019. Pada periode ini, TPT Kabupaten Tabanan selalu berada di bawah TPT Provinsi Bali.

Namun pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tabanan melonjak tajam menjadi 4,21%. Seperti halnya kabupaten lainnya yang mengalami kondisi serupa, imbas pandemi Covid-19 merupakan faktor utama penyebab banyaknya pengangguran yang muncul secara tiba-tiba di tahun 2020. Pada tahun 2021 TPT Tabanan menurun menjadi 3,94% seiring dapat semakin terkendalinya pandemi covid-19. Tahun 2022 TPT Tabanan turun menjadi 3,83%



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023

Gambar 5.28.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Tabanan sebesar 75,45 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 76,75 di tahun 2022. IPM Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29. Bahkan selama 5 tahun terakhir, IPM Kabupaten Tabanan selalu berada di atas IPM Provinsi Bali. Artinya adalah kualitas SDM penduduk Kabupaten Tabanan di atas rata-rata Provinsi Bali dan nasional.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023

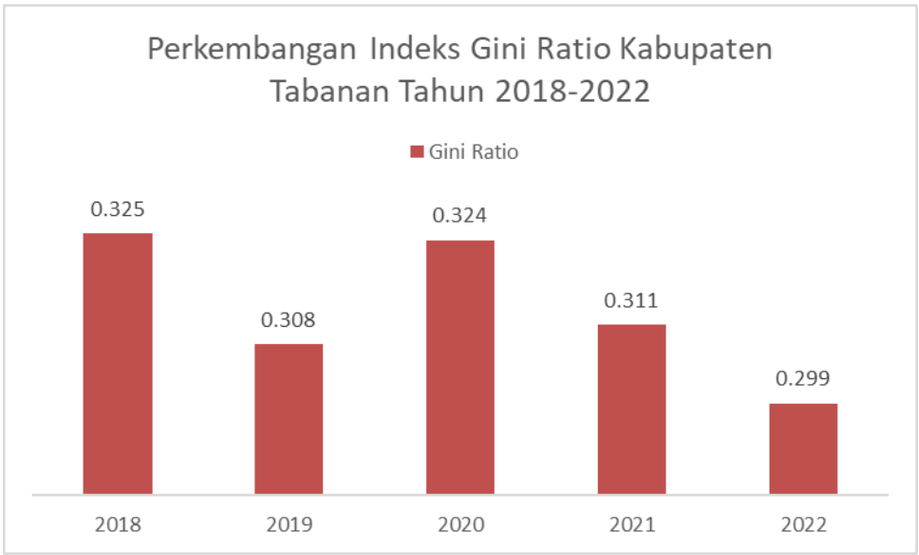
Gambar 5.29.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 adalah sebesar 0,299 atau menurun dari tahun 2021 sebesar 0,311. Penurunan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kabupaten Tabanan semakin sempit jaraknya.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,325. Sedangkan terendah terjadi di tahun 2022 yaitu 0,299.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023

Gambar 5.30.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.17.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN TABANAN
" PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"	“PENGEMBANGAN LANJUT INFRASTRUKTUR MENUJU AWAL KEMAJUAN TEKNIS DAN PROFESIONAL PENUNJANG DAERAH AGROWISATA”

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN TABANAN
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	1. Pangan, Sandang dan Papan 2. Pariwisata
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	3. Pendidikan dan Kesehatan
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	4. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	5. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Lingkungan Hidup	6. Bidang Prioritas Penunjang
6	Infrastruktur	6. Bidang Prioritas Penunjang
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	6. Bidang Prioritas Penunjang

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penanganan Bencana
2. Implementasi Smart City
3. Pelaksanaan Pelayanan Publik Sesuai Standar Mutu
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persampahan)
5. Penerapan Inovasi Program Berbasis Riset
6. Pemenuhan Sarana Prasarana Pengembangan Sdm
7. Transparansi Perijinan Dan Jaminan Keamanan Investasi
8. Update Data Desa Yang Presisi Secara Kontinyu
9. Pemasaran Produk Pertanian & Penciptaan Branding Produk Lokal Tabanan
10. Pengembangan Kelompok Ukm Ikm Bidang Seni Budaya
11. Mengembangkan Paket-Paket Wisata Terintegrasi
12. Meningkatkan Daya Tarik Obyek Wisata Agro, Desa Wisata, Dan Pengembangan Pariwisata Spriritual

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Tabanan yang harus terwujud di Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.19.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No	Indikator	Target Capaian 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,75 (4,9-6,6)
2	Angka Kemiskinan	2,53%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,22%
4	Indeks Pembangunan Manusia	77,68
5	Gini Ratio	0,301

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2023

G. Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng, yang merupakan wilayah paling utara di Provinsi Bali yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busung Biu, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan Tejakula. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365,88 Km^2 atau sebesar 24,23% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya kabupaten dengan wilayah terluas.

1. Kondisi Umum Wilayah

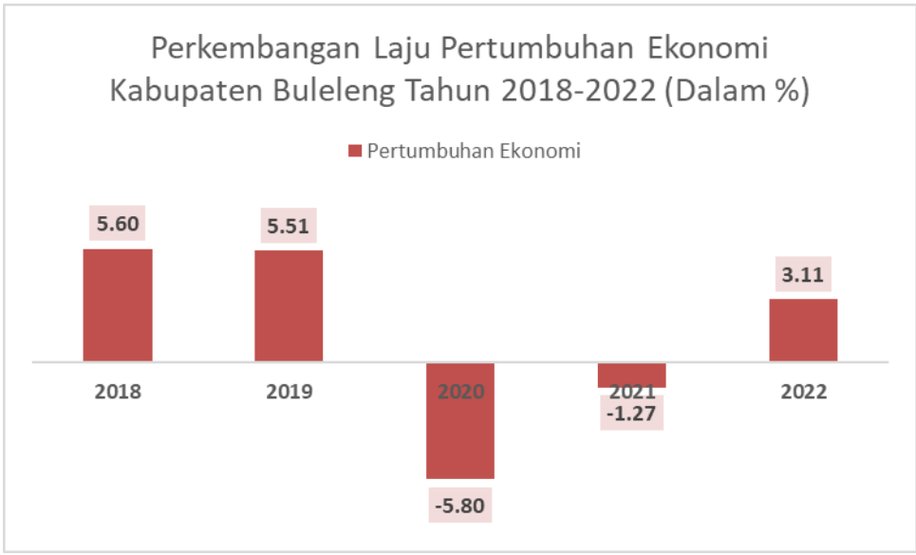
Kondisi umum wilayah Kabupaten Buleleng merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 5,60%. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 5,51%. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Artinya adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tergolong

rendah dibandingkan dengan rata-rata wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -5,76% sebagai akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka -1,22%. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng sudah mencapai angka 3,11%



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023

Gambar 5.31.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami kondisi positif selama tahun 2018-2022. Pada periode tahun 2018 - 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,36% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 5,32%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Buleleng meningkat cukup

signifikan menjadi 6,21% bahkan menjadi yang tertinggi selama tahun 2018-2022.

Angka kemiskinan Kabupaten Buleleng masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Tahun 2022 persentase penduduk miskin di Provinsi Bali adalah 4,53%. Namun, masih jauh di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,19%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Buleleng merupakan yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Karangasem.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023

Gambar 5.32.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022

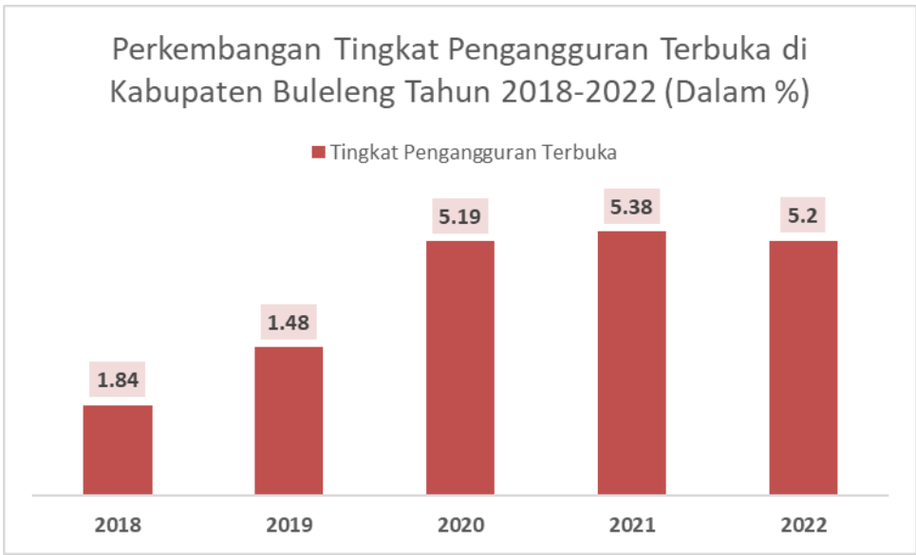
c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,84% dan kemudian meningkat secara drastis di tahun 2021 menjadi 5,38%.

Tahun 2020 merupakan tahun dimulainya pandemi Covid-19 di Indonesia dan Provinsi Bali dimana sektor-

sektor ekonomi unggulan mengalami penghentian secara paksa dan mendadak selama kurun waktu yang belum bisa dipastikan. Akibatnya banyak tenaga kerja yang harus dirumahkan termasuk di Kabupaten Buleleng. Itulah menjadi penyebab mengapa pada tahun 2020 lonjakan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka kembali menurun ke angka 5,2%.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023

Gambar 5.33.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Buleleng sebesar 71,70 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 73,45 di tahun 2022. IPM Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 namun lebih tinggi dari IPM Nasional yaitu 72,29. Artinya, secara

rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buleleng tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



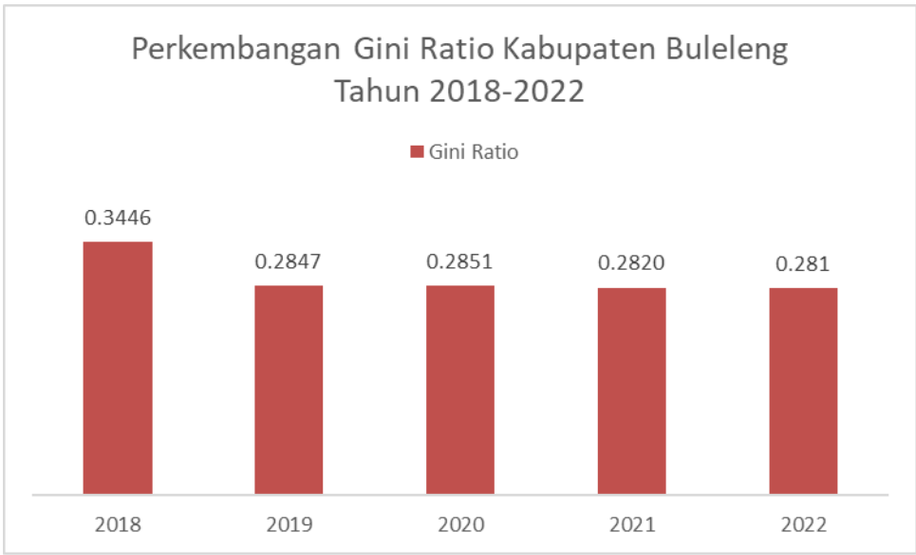
Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023

Gambar 5.34.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 adalah sebesar 0,281 atau menurun dari tahun 2020 dengan indeks 0,2851. Selama 5 tahun terakhir, ketimpangan antar kelompok penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif. Meskipun fluktuatif pada periode 2016-2018, namun pada periode 2018-2022, Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,3446 dan menurun drastis di tahun 2022 menjadi 0,281. Gini Ratio Kabupaten Buleleng merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Bangli.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023

Gambar 5.35.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng

Tahun 2018-2022

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.20.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BULELENG
" PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"	“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK PENGUATAN DAYA SAING DAERAH”

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.21.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

NO	PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KABUPATEN BULELENG
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial
5	Lingkungan Hidup	Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
6	Infrastruktur	Pelestarian Adat dan Budaya Lokal
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
8		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1) Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
3) Meningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
4) Konvergensi integrasi penurunan stunting
5) Pemenuhan layanan pendidikan merata dan berkualitas
6) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan
7) Mengembangkan Pendidikan dan pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
8) Mengembangkan Pendidikan dan latihan kewirausahaan di tingkat pemula dan menengah
9) Meningkatkan pelayanan perijinan berbasis elektronik
10) Pengembangan sentra- sentra produksi dan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan
11) Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif

12) Pengembangan sentra- sentra industri pengolahan dan kawasan industri
13) Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM
14) Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
15) Meningkatkan kualitas konektivitas pusat-pusat kegiatan wilayah
16) Meningkatkan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi
17) Mengembangkan jaringan air minum perpipaan dan prasaran air limbah domistik
18) Meningkatkan kualitas jaringan drainase
19) Mengembangkan prasarana persampahan skala kabupaten dan skala Kawasan
20) Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial
21) Meningkatkan penanganan RTLH dan kawasan kumuh
22) Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial
23) Peningkatan deteksi dini dan desa tangguh bencana
24) Peningkatan sarana prasarana kebencanaan
25) Melestarikan benda situs dan cagar budaya
26) Pengembangan dan pelestarian lembaga adat dan kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan adiluhung
27) Pengendalian pencemaran air dan udara
28) Pengelolaan RTH publik dan Gerakan penghijauan
29) Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana E-Government
30) Peningkatan kualitas perencanaan kinerja daerah
31) Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan daerah

Untuk mendukung arah pembangunan di atas, target capaian pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.22.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,6%
2	Persentase Kemiskinan	4,9%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3%
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,75
5	Gini Ratio	0,2827

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2023

H. Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten paling barat di Provinsi Bali yang menjadi pintu gerbang dengan kawasan Barat Indonesia. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jembrana, Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan. Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah 841,80 Km^2 atau 14,93% dari luas wilayah Provinsi Bali atau terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng.

1. Kondisi Umum Wilayah

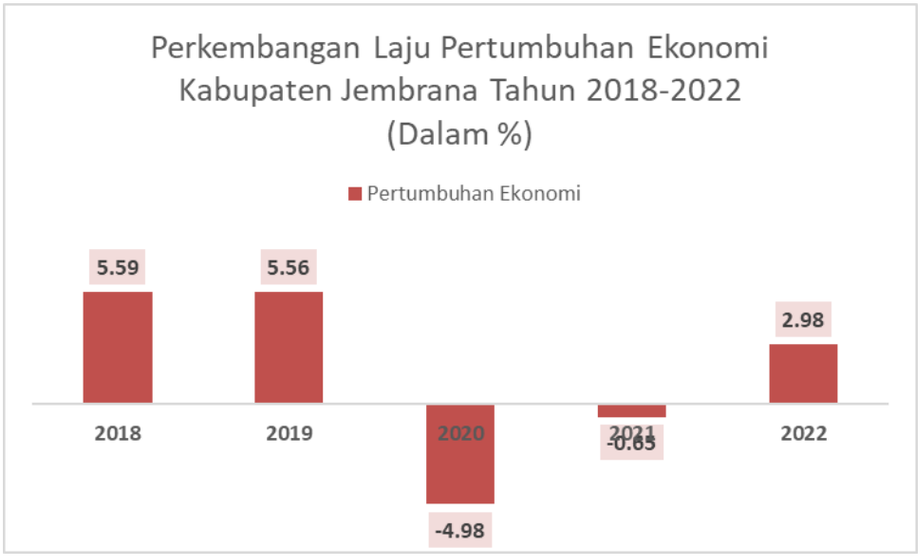
Kondisi umum wilayah Kabupaten Jembrana merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 5,59%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2020 yaitu sebesar -4,96%.

Sebelum tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi. Tertinggi tercatat di tahun 2018 yaitu 5,59% dan terendah di tahun 2019 yaitu dengan laju 5,56%.

Pada tahun 2020 dan 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana anjlok. Seperti halnya daerah lain dengan LPE yang mengalami kontraksi, Kabupaten Jembrana mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Meskipun secara struktur sektor pertanian masih mendominasi PDRBnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor transportasi dan pariwisata memegang peranan penting bagi roda perekonomian Kabupaten Jembrana. Kedua sektor ini merupakan yang paling terpuruk pada era pandemi sehingga menyebabkan daerah dengan pendapatan dominan dari kedua sektor pasti mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana telah mencapai 2,98%



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023

Gambar 5.36.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami kondisi positif selama tahun 2018-2022. Pada periode tahun 2018-2022, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan hingga tahun

2020 meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,20% dan menurun secara signifikan hingga tahun 2020 menjadi 4,51%. Namun pada tahun 2021, seperti kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Jembrana meningkat cukup signifikan ke angka 5,06%.

Angka kemiskinan Kabupaten Jembrana pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali dengan angka kemiskinan 5,3% namun lebih rendah daripada nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Jembrana terendah keempat setelah Kabupaten Gianyar dengan angka kemiskinan 4,85%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023

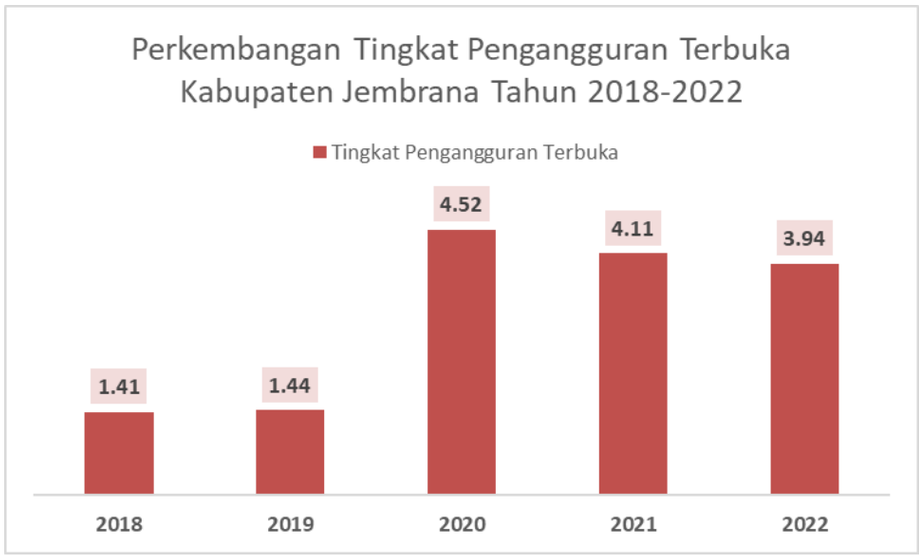
Gambar 5.37.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018

tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1.41%. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jembrana meningkat sangat signifikan menjadi 4,52%. Peningkatan yang sangat signfikan ini terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang memaksa banyak usaha khususnya di bidang pariwisata, perdagangan, industri, dan transportasi tutup dalam waktu yang belum bisa dipastikan. Sehingga banyak karyawan yang harus dirumahkan. Namun pada tahun 2021, TPT Kab Jembrana berangsur menurun ke angka 4,11%. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran di Kabupaten Jembrana sudah menurun menjadi 3,94%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023

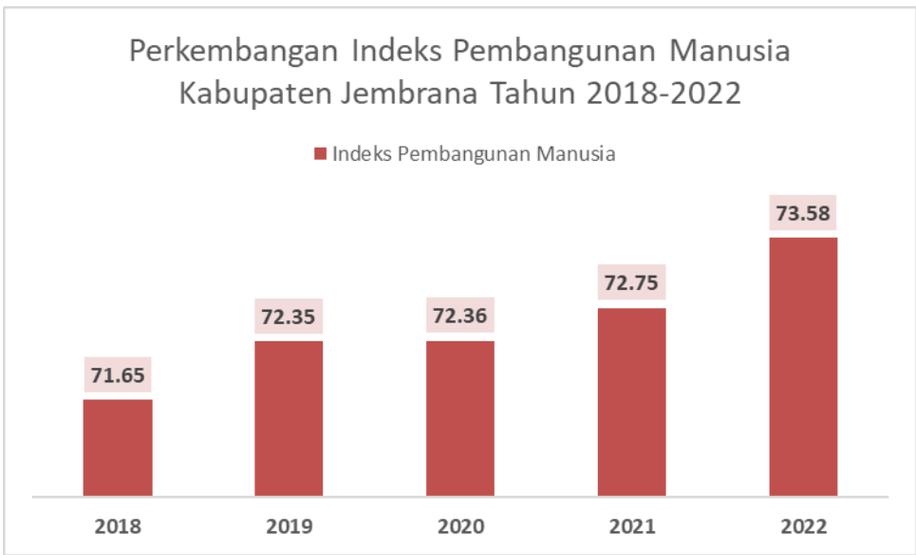
Gambar 5.38.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kabupaten Jembrana sebesar 71,65 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 73,58 di tahun 2022.

IPM Kabupaten Jembrana pada tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 namun lebih tinggi dari IPM Nasional yaitu 72,29. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jembrana tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023

Gambar 5.39.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022

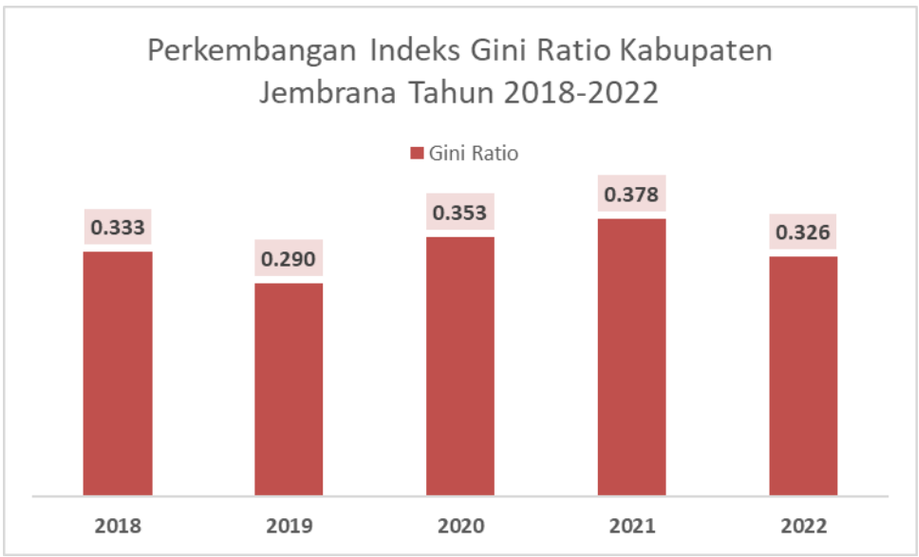
e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Jembrana pada tahun 2022 adalah sebesar 0,326 atau meningkat dari tahun 2020 dengan indeks 0,353.

Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana merupakan kedua tertinggi di Provinsi Bali setelah Kabupaten Klungkung. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Jembrana merupakan salah satu wilayah dengan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk tertinggi di Provinsi Bali.

Meskipun tertinggi di Bali, namun Kabupaten Jembrana termasuk ke dalam wilayah dengan ketimpangan antar

kelompok penduduk rendah karena memiliki Indeks Gini Ratio <0,390.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023

Gambar 5.40.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2018-2022

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.23.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBRANA
" PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"	“MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DENGAN OPTIMALISASI SEKTOR DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA”

Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2022

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.24.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	3. Peningkatan Perekonomian
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	3. Peningkatan Perekonomian
5	Lingkungan Hidup	2. Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
6	Infrastruktur	
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penguatan eksistensi lembaga agama dan adat.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga dalam pelestarian adat, seni, dan budaya.
3. Pengembangan inovasi dan pemanfaatan IPTEKs.
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas generasi muda dan olahraga.
7. Penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data.
8. Meningkatkan daya saing SDM dan keterampilan tenaga kerja.
9. Peningkatan peran perempuan dan pemenuhan hak anak.
10. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan sosialisasi KB.
11. Pemerataan jaringan transportasi konektivitas antar wilayah.

12. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
14. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah.
15. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.
16. Peningkatan akses pelayanan dasar serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PMKS.
18. Meningkatkan hasil produksi dan kualitas pertanian berkelanjutan.
19. Meningkatkan kuantitas dan pemasaran hasil produk perikanan.
20. Peningkatan kualitas dan kapasitas IKM dan UMKM melalui digitalisasi.
21. Pengembangan dan promosi pariwisata.
22. Menggerakkan industri kreatif yang mampu menghasilkan produk unggulan melalui ekonomi kreatif.
23. Peningkatan kerjasama dan investasi serta potensi peluang usaha.
24. Optimalisasi peran koperasi dan Perumda.
25. Pemberdayaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
26. Pelayanan publik terselenggara dengan tepat, mudah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
27. Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.
28. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan yang tepat guna.
29. Peningkatan PAD dan pengelolaan aset daerah.
30. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi

Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka target capaian pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 5.25.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,03 – 5, 53
2	Persentase Kemiskinan	4,58 – 4,61
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,50 – 3,87
4	Indeks Pembangunan Manusia	74,41 – 74,61
5	Gini Ratio	0,3130 – 0,3230

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Jembrana Tahun 2023

I. Kota Denpasar

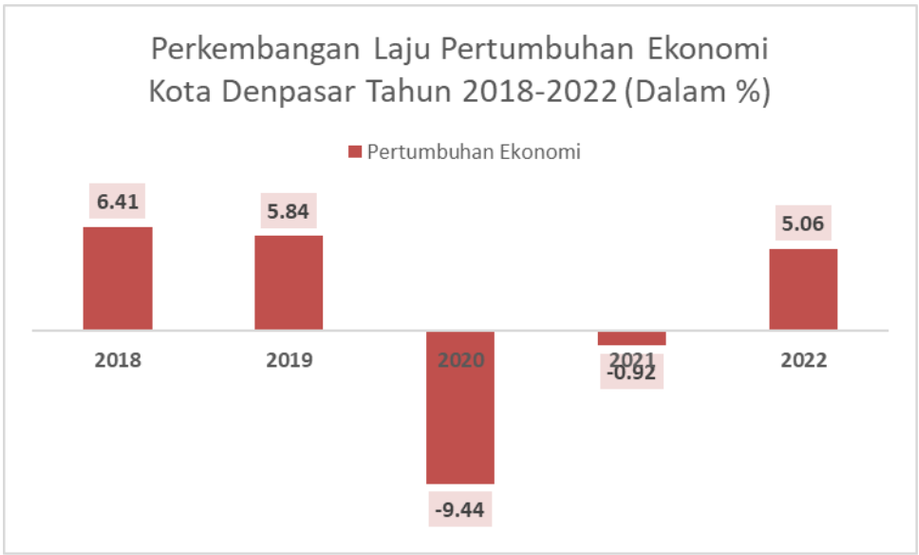
Kota Denpasar merupakan satu-satunya kota yang terdapat di Provinsi Bali yang sekaligus menjadi Ibu Kota dan pusat kegiatan di Provinsi Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,78 Km^2 atau 2,27% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya wilayah dengan luas terkecil.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kota Denpasar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018-2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 6,41%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2020 yaitu sebesar -9,44%. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,84%. Namun, pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat dalam ke angka -9,42% akibat Pandemi COVID-19. Tahun 2022, perekonomian Kota Denpasar sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka 5,06%.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023

Gambar 5.41.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2018-2022

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kota Denpasar mengalami kondisi positif selama tahun 2018-2022. Pada periode tahun ini, angka kemiskinan terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat sebesar 2,24% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 2,14%. Namun, angka kemiskinan Kota Denpasar tahun 2022 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan 5 tahun terakhir ke angka 2,97% dan menjadi tertinggi selama periode 2018-2022

Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kota Denpasar pada tahun 2022 berada jauh di bawah Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53% dan Nasional dengan angka kemiskinan 10,14%.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023

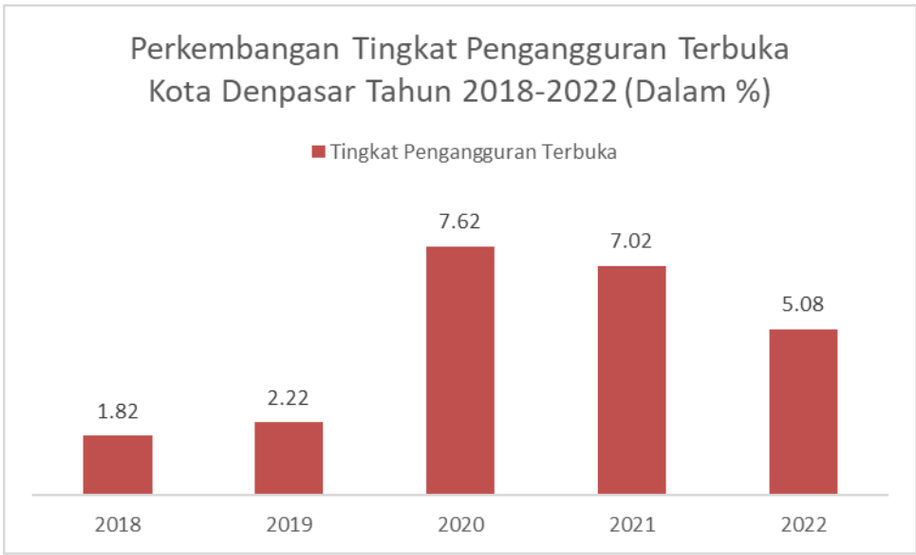
Gambar 5.42.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar

Tahun 2018-2022

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,82% dimana kemudian mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2020 menjadi 7,62%. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar berada pada angka 7,02%. Angka ini berada jauh di atas Provinsi Bali yaitu 1,52%. Artinya, secara rata-rata, tingkat pengangguran di Kota Denpasar tergolong tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2022, angka tingkat pengangguran Kota Denpasar mulai menurun menjadi 5,08%.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023

Gambar 5.43.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2018-2022

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tercatat IPM Kota Denpasar sebesar 83,30 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 84,37 di tahun 2022 dan menjadi yang tertinggi diantara wilayah lainnya di Provinsi Bali. IPM Kota Denpasar pada tahun 2022 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun Nasional yaitu 72,29. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kota Denpasar tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023

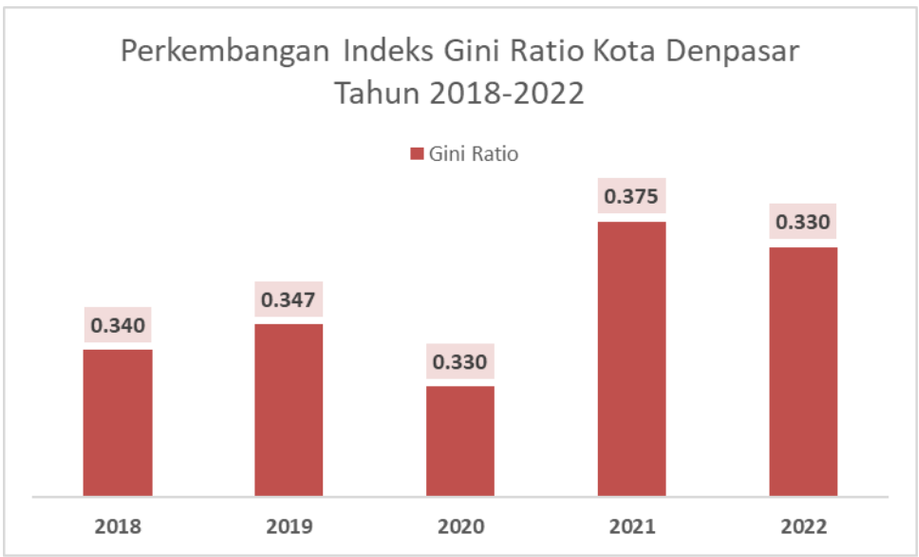
Gambar 5.44.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2018-2022

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah sebesar 0,368 atau mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu sebesar 0,375. Menurunnya indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan, semakin menyempit. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kota Denpasar cenderung untuk semakin merata, dimana antar kecamatan atau kawasan memiliki tingkat perekonomian yang cenderung merata.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 0,347 sedangkan terendah terjadi di tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Gini Ratio Kota Denpasar berada di atas Provinsi Bali dengan indeks 0,369



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023

Gambar 5.45.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar

Tahun 2018-2022

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasan tema pembangunan Kota Denpasar terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.26.

Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR
" PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"	“MEMPERKUAT DAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH UNTUK DENPASAR MAJU”

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023

Keselarasan prioritas pembangunan Kota Denpasar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.27.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Lingkungan Hidup	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Infrastruktur	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Reformasi Birokrasi

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan di atas adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan dan Kesehatan : Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; Peningkatan sarana prasarana kesehatan; Peningkatan layanan Pendidikan dan Kesehatan; dan Penanganan Stunting
2. Ekonomi Kreatif, Pariwisata & Kebudayaan : Pengendalian Inflasi; Pariwisata Budaya; Pemberdayaan Ekonomi Kreatif; Pemberdayaan UMKM dan IKM
3. Sosial dan Ketenagakerjaan : Penanganan Kemiskinan Ekstrem; Peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja; dan menciptakan Wirausaha Baru
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan : Penataan Wajah Kota; dan Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
5. Reformasi dan Birokrasi : Peningkatan potensi PAD dan Investasi; Peningkatan SAKIP dan Pencapaian Indeks RB; dan Peningkatan SPBE (Transformasi Digital)

Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka ditetapkan target capaian pembangunan di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.28.

Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4%
2	Persentase Kemiskinan	1,99%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,95%
4	Indeks Pembangunan Manusia	84,55
5	Gini Ratio	0,36

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan, selain memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)* yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), *dan Spatial* (titik koordinat) lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program pembangunan yang dirancang harus memperhatikan :

1. Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
2. Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

PRIORITAS 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata



Gambar 6.1.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1

Berdasarkan gambar 6.1 yang menempatkan bidang Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah

kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) penanganan rentan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Peningkatan Pemasaran Produk Lokal, (2) Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar, dan (3) Pelaksanaan IKM Bali Bangkit.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, dan (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pangan melalui kegiatan prioritas pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam mejaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan koperasi tenun.
7. Pariwisata melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan Pemasaran Parwisata, (2) Pengembangan SDM Pariwisata, dan (3) Pengembangan Produk Pariwisata.

PRIORITAS 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan.



Gambar 6.2.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2

Berdasarkan Gambar 6.2 yang menggambarkan prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik*, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan kesehatan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) upaya kesehatan olah raga, (6) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (7) memantapkan pelaksanaan progam pencegahan dan penanganan stunting, (8) memantapkan pelayanan kesehatan tradisional Bali, dan (9) memantapkan koordinasi penanganan covid-19.
3. Jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, dilakukan melalui meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN Krama Bali Sejahtera (KBS).

4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium dan sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah Provinsi Bali, (3) penetapan pemenuhan sarana prsarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan, dan (4) pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterserapan tamatan SMK bekerja di dunia usaha/dunia industri.

PRIORITAS 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan



Gambar 6.3.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3

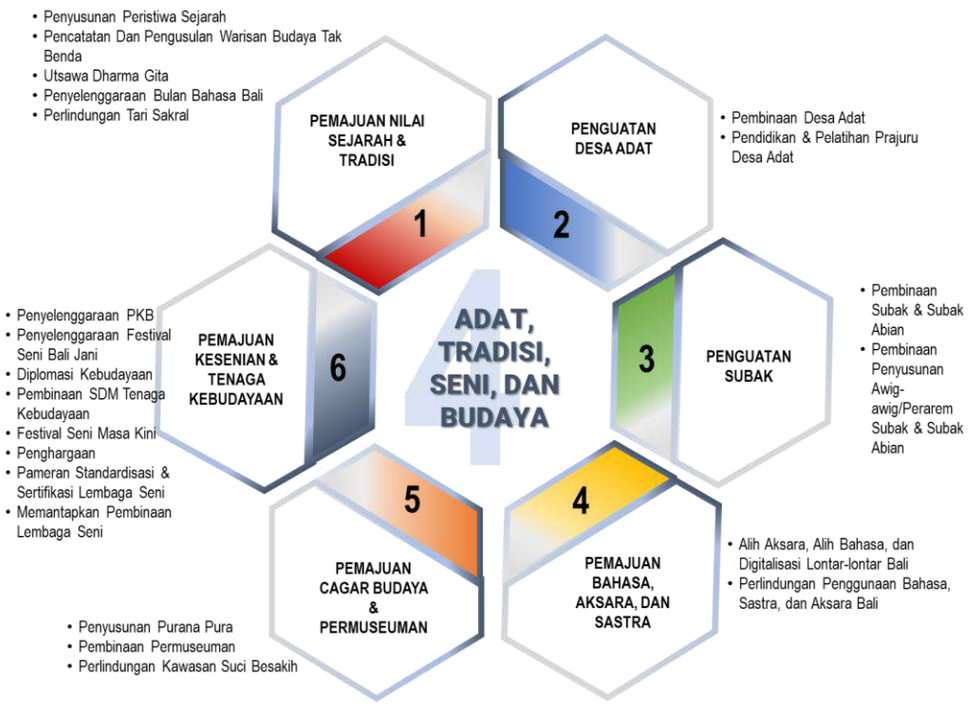
Berdasarkan Gambar 6.3 yang menguraikan tentang prioritas 3 yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan ditentukan oleh empat (empat) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan jumlah tenaga kerja yang

bersertifikasi kompetensi dan pelatihan calon tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.

2. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, dan (3) pelayanan lanjut usia di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
3. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui: (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
4. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (*job fair*), (2) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (3) pengelolaan informasi pasar kerja, (4) penumbuhan dan pengembangan kawasan pekerja sektor informal berciri khas Bali.

PRIORITAS 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya



Gambar 6.4.

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4

Berdasarkan Gambar 6.4 yang menguraikan tentang prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dalam rangka pengembangan pembinaan dalam rangka mengembangkan tata kehidupan karma Bali ditentukan oleh 6 (enam) dimensi yaitu:

1. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui: (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita, (4) penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, dan (5) Perlindungan tari sakral.
2. Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui: (1) pembinaan desa adat, dan (2) pendidikan dan pelatihan prajuru desa adat.
3. Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan: (1) pembinaan subak dan subak abian, dan (2) pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
4. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra, melalui kegiatan: (1) alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar, dan (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
5. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan: (1) penyusunan purana pura, (2) pembinaan permuseuman, (3) perlindungan Kawasan Suci Besakih.
6. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui (1) penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) penyelenggaraan festival seni Bali Jani, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan SDM tenaga kebudayaan, (5) festival seni masa kini, (6) penghargaan seni, (7) pameran standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa), dan (8) memantapkan pembinaan lembaga seni.

PRIORITAS 5: Lingkungan Hidup



Gambar 6.5.

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5

Berdasarkan Gambar 6.5 yang menguraikan tentang prioritas 5, yaitu Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. Terdapat 3 Program Prioritas yaitu:

1. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, (2) pengelolaan, perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam, dan (3) pengendalian/pengamanan pantai.
2. Ketangguhan Terhadap Bencana, yang dilakukan melalui kegiatan: (1) Kapasitas dalam mengantisipasi bencana, (2) Kapasitas dalam kesiapsiagaan bencana, dan (3) Kapasitas dalam merespon dan pulih dari dampak bencana.
3. Pelayanan Korban Bencana, yang dilakukan melalui kegiatan: (1) Penanganan korban bencana, dan (2) Penanganan kebutuhan korban tanggap darurat.

PRIORITAS 6: Infrastruktur



Gambar 6.6.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6

Berdasarkan Gambar 6.6 yang menggambarkan Prioritas Penguatan Infrastruktur (darat, laut dan udara) untuk mendukung semua program prioritas**.** Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pembangunan jalan, jembatan, waduk, pabrik, pasar, sentra industry yang akan mendukung konektifitas antar daerah. Terdapat 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan: (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, dan (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) peningkatan penyebarluasan informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, (3) pengembangan data/informasi/statistik daerah, dan (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.
3. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan: (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan

perencanaan penataan ruang, dan (3) pengendalian dan pengawasan penataan ruang.

4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, dan (3) peningkatan layanan air limbah.

PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi



Gambar 6.7.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7

Berdasarkan Gambar 6.7 yang menguraikan Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanaka melalui kegiatan: (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.
2. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.

3. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui: (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, dan (3) perumusan kebijakan daerah.
4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan: (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, dan (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan kepemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya: (1) untuk mengetahui tingkat indek kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan publik, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.

Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2024. Program-program diatas akan di *break down* ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024

Program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2023 dilihat berdasarkan urusan sebagaimana ditunjukkan pada ***Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024.***

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI BALI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**1.334.722.386.877,00**							**1.399.935.894.235,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.274.584.543.677,00**							**1.366.035.894.235,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.274.584.543.677,00**							**1.366.035.894.235,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Disdikpora)***	**-**			**81.50 Nilai**	**949.457.688.459,00**						**-**	**1.031.534.122.835,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu*	-			8 Dokumen	140.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	144.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	95.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		97.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	45.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		47.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu*	-			59 Laporan	922.100.582.241,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	1.006.963.622.835,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7684 Orang/ Bulan	921.839.383.341,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		1.006.693.622.835,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	102.942.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				28 Dokumen	158.256.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah*	-			4 Jenis	43.025.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	43.025.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik*	-			100 Persen	43.675.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	43.675.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu*	-			100 Persen	1.013.806.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	2.286.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 Paket	544.956.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		1.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.840.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	31.526.250,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		33.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	426.484.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan*	-			100 Persen	14.660.790.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	14.660.790.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah*	-			100 Persen	9.836.834.918,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	9.975.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.050.981.150,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		1.075.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.785.853.768,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		8.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan*	-			100 Persen	1.618.975.050,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	2.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				24 Unit	540.910.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	695.875.550,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	382.189.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun***	**-**			**100 Persen**	**325.051.856.418,00**						**-**	**334.301.771.400,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Indeks Iklim Keamanan SMA* *Indeks Iklim Kebinekaan SMA* *Indeks Inklusivitas SMA* *Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK* *Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas* *Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional*	-			92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	189.069.426.292,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA	-	191.790.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				12 Unit	122.000.000.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		122.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				127 Paket	1.266.324.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				90 Unit	2.250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6761 Peserta didik	8.339.250.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		8.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				910 Peserta Didik	1.270.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1249 Orang	53.163.853.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		53.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	125.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				89 Satuan Pendidikan	149.999.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				89 Orang	29.999.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	99.999.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	124.999.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				89 Satuan Pendidikan	249.999.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMA		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Indeks Iklim Keamanan SMK* *Indeks Iklim Kebinekaan SMK* *Indeks Inklusivitas SMK* *Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK* *Tingkat Penyerapan Lulusan SMK*	-			92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	124.592.187.118,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK	-	133.260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				6 Unit	62.500.000.000,00	- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Banjar, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Sukasada, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK		65.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				58 Unit	1.450.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				7909 Peserta didik	11.521.196.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK		14.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				680 Peserta Didik	1.600.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK		2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1325 Orang	46.870.991.118,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK		47.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				375 Orang	125.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK		775.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				58 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK		375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				173 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				200 Orang	124.999.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar SMK		375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Indeks Iklim Keamanan SDLB* *Indeks Iklim Keamanan SMALB* *Indeks Iklim Keamanan SMPLB* *Indeks Iklim Kebinekaan SDLB* *Indeks Iklim Kebinekaan SMALB* *Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB* *Indeks Inklusivitas SDLB* *Indeks Inklusivitas SMALB* *Indeks Inklusivitas SMPLB* *Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional* *Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional* *Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional* *Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional* *Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional*	-			92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai	11.390.243.008,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar Disabilitas	-	9.251.771.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia				6 Paket	3.396.220.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar Disabilitas		1.140.284.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				12 Unit	429.560.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar Disabilitas		430.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				430 Peserta Didik	512.250.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar Disabilitas		563.475.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	1.087.180.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar Disabilitas		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				149 Orang	5.602.213.808,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar Disabilitas		5.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				14 Satuan Pendidikan	210.079.200,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar Disabilitas		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				84 Orang	16.547.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar Disabilitas		18.202.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				14 Dokumen	17.559.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar Disabilitas		19.315.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				14 Satuan Pendidikan	118.632.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pelajar Disabilitas		130.495.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik***	**-**			**100 Persen**	**74.998.800,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	*Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal*	-			66.00 Persen	74.998.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				2 Dokumen	34.999.300,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				3 Laporan	39.999.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**60.137.843.200,00**							**33.900.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**60.137.843.200,00**							**33.900.000.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan***	**-**			**71.5 Persen**	**1.499.999.100,00**						**-**	**2.325.000.000,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	*Jumlah pemuda yang berprestasi*	-			90 Orang	1.499.999.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda	-	2.325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi				1 Dokumen	199.999.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				100 Persentase	299.999.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				90 Orang	499.999.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda		525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				90 Orang	499.999.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi***	**-**			**50.00 Persen**	**58.137.844.100,00**						**-**	**29.575.000.000,00**	
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	*Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan*	-			4 Kejuaraan	7.787.844.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Atlet	-	23.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event				250 Orang	2.500.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Atlet		11.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi				2 Dokumen	5.287.844.100,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Atlet		12.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	*Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional*	-			250 Orang	300.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Atlet	-	325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	300.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Atlet		325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan*	-			59 Organisasi	50.050.000.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Organisasi Olahraga	-	5.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				2 Dokumen	50.050.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Organisasi Olahraga		5.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan***	**-**			**52.5 Persen**	**500.000.000,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka*	-			50 Persen	500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Organisasi Kepramukaan	-	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi				1 Laporan	500.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Organisasi Kepramukaan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN						**2.606.105.320,00**							**4.104.250.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.606.105.320,00**							**4.104.250.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.606.105.320,00**							**4.104.250.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen***	**-**			**81.5 Nilai**	**1.000.751.320,00**						**-**	**1.254.250.000,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	132.973.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	319.250.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	59.988.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		165.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2.999.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		4.250.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	69.985.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		150.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia*	-			100 Persen	751.317.920,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	785.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	751.317.920,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		785.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan*	-			100 Persen	116.460.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	150.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	103.340.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		125.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		7.500.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10.120.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		17.500.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK***	**-**			**77.5 Persen**	**1.605.354.000,00**						**-**	**2.850.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK*	-			88 sekolah	917.726.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMA	-	1.630.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				750 Orang	103.520.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMA		300.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				12 Konten Digital	211.851.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMA		315.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				182 Orang	61.705.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMA		315.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				91 Satuan Pendidikan	540.650.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMA		700.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK*	-			56 Sekolah	687.628.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMK	-	1.220.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				895 Orang	83.400.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMK		175.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	186.636.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMK		325.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				118 Orang	61.705.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMK		325.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				59 Satuan Pendidikan	355.887.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMK		395.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN						**1.005.756.340,00**							**1.298.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.005.756.340,00**							**1.298.500.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.005.756.340,00**							**1.298.500.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen***	**-**			**81.5 Nilai**	**700.757.340,00**						**-**	**688.500.000,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu*	-			100 Persen	46.458.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	61.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	8.623.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		15.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.547.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		11.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	31.288.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		35.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia*	-			100 Persen	563.488.440,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	535.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	563.488.440,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		535.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan*	-			100 Persen	90.810.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	92.500.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	90.810.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		92.500.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
2.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal***	**-**			**60 Persen**	**227.999.300,00**						**-**	**415.000.000,00**	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	*Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah*	-			1 Kurikulum	194.999.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMA/SMK	-	250.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya				72 Orang	194.999.900,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SMA/SMK		250.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	*Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan*	-			1 Kurikulum	32.999.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SLB	-	165.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya				20 Orang	32.999.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik SLB		165.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
3.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	***Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan***	**-**			**70.4 Nilai**	**76.999.700,00**						**-**	**195.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali*	-			87.2 Persen	76.999.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik	-	195.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				225 Peserta Didik	76.999.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik		195.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
		DINAS KESEHATAN						**263.856.257.811,00**							**266.571.719.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**263.856.257.811,00**							**266.571.719.532,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**238.104.258.611,00**							**239.825.222.433,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 nilai**	**236.661.868.675,00**						**-**	**238.382.832.497,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			1 laporan	216.813.760.595,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	216.805.677.009,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1514 Orang/ Bulan	216.757.232.395,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		216.757.114.498,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	56.528.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		48.562.511,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP*	-			100 persentase	1.192.993.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	1.739.771.461,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	227.692.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		619.832.588,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	965.301.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.119.938.873,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa pelayanan umum kantor*	-			1 Tahun	18.077.264.280,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	18.077.890.416,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	480.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17.597.264.280,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		17.597.890.416,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			1 Laporanse	577.850.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	1.759.493.611,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				27 Unit	457.800.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		418.824.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	100.050.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		84.094.133,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.256.575.478,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Kepesertaan JKN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan***	**-**			**95 Persen 96 Persen 100 Persen 98,2 Persen 88,5 Nilai**	**1.442.389.936,00**						**-**	**1.442.389.936,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan*	-			1 dokumen	1.442.389.936,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	1.442.389.936,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	1.442.389.936,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		1.442.389.936,00	DINAS KESEHATAN
	-	**-**						**25.751.999.200,00**							**26.746.497.099,00**	
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				4380824 Orang	150.918.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130000 Orang	117.726.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		300.557.664,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	175.310.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		210.251.032,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	173.309.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		273.309.856,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		155.120.526,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	43.412.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		16.713.807,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	23.382.187.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		23.375.221.199,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	92.560.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		92.560.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	96.396.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				150 Paket	16.250.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Puskesmas yang menerapkan e-Kesehatan Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan E-kesehatan melalui komunikasi data terintegrasi*	-			120 puskesmas 100 persen	40.159.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	14.113.440,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	40.159.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		14.113.440,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Rekomendasi yang diterbitkan Persentase faslitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar*	-			20 dokumen 100 persen	165.069.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Seluruh lapisan masyarakat	-	251.293.680,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				25 Unit	31.766.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Seluruh lapisan masyarakat		31.767.040,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				192 Unit	133.302.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		219.526.640,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan***	**-**			**75 persen**	**525.220.800,00**						**-**	**720.637.751,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Jumlah Dokumen Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Persentase perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi sesuai kebutuhan*	-			1 dokumen 100 persen	41.969.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	13.815.460,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				28500 Orang	41.969.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		13.815.460,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi*	-			90 persen	483.251.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	706.822.291,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				109 Orang	102.093.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		677.727.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	381.157.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		29.095.271,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase kabupaten/kota denngan ketersediaan obat esensial***	**-**			**85 persen**	**240.786.600,00**						**-**	**107.786.448,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK*	-			100 persen	103.190.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	48.674.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				40 Sarana	103.190.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		48.674.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	*Persentase pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional*	-			100 persen	137.596.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	59.111.808,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				20 Sarana	137.596.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		59.111.808,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri***	**-**			**66.67 persen**	**146.025.000,00**						**-**	**96.605.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	*jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan*	-			1 kebijakan	146.025.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	96.605.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	146.025.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		96.605.600,00	DINAS KESEHATAN
4.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**82 nilai**	**286.665.900,00**						**-**	**62.325.396,00**	
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen LKjIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu* *Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			1 dokumen 7 dokumen	286.665.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	62.325.396,00	DINAS KESEHATAN
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	42.974.100,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		20.741.616,00	DINAS KESEHATAN
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	243.691.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		41.583.780,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT						**5.613.004.168,00**							**4.699.203.979,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.175.833.168,00**							**4.509.989.464,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.175.833.168,00**							**4.509.989.464,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen***	**-**			**82 nilai**	**4.926.450.268,00**						**-**	**4.260.606.464,00**	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah tersedianya sarana penunjang administrasi umum*	-			1 Tahun	169.130.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	131.922.518,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	169.130.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		131.922.518,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen SPJ/ SPM Jasa Layanan Umum kantor*	-			1 Tahunase	1.603.574.568,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	1.603.574.568,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	363.900.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		363.900.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.239.674.568,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.239.674.568,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			1 Laporan	1.153.745.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	525.109.378,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	39.175.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		37.020.375,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	114.570.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		75.505.500,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		412.583.503,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas*	-			100 persen	2.000.000.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	2.000.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		2.000.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan***	**-**			**100 persentase**	**249.382.900,00**						**-**	**249.383.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Peserta Pelatihan yang lulus sesuai standar*	-			30 orang	249.382.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	249.383.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				145 Orang	249.382.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		249.383.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	X	**NON URUSAN**						**437.171.000,00**							**189.214.515,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**437.171.000,00**							**189.214.515,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen***	**-**			**82 nilai**	**437.171.000,00**						**-**	**189.214.515,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah tersedianya sarana penunjang administrasi umum*	-			1 Tahun	437.171.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-	-	189.214.515,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	437.171.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		189.214.515,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN						**10.323.640.968,00**							**10.584.507.558,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.323.640.968,00**							**10.584.507.558,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**10.323.640.968,00**							**10.584.507.558,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 nilai**	**9.893.657.094,00**						**-**	**10.154.507.558,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah bahan logistik, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia*	-			8 paket	702.664.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	865.255.514,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	702.664.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		865.255.514,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta pelayanna umum kantor*	-			1 Tahun	2.560.280.744,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	2.511.820.744,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	589.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		540.540.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				62 Laporan	1.971.280.744,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.971.280.744,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara* *Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP*	-			12 jenis 100 persentase	395.060.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	541.779.550,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	108.100.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		212.341.500,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	198.960.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		241.438.050,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	88.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		88.000.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali*	-			100 persen	6.235.651.750,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	6.235.651.750,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	6.235.651.750,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		6.235.651.750,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan***	**-**			**88.5 nilai**	**429.983.874,00**						**-**	**430.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar*	-			100 persen	429.983.874,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	430.000.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	429.983.874,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		430.000.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL						**8.143.967.360,00**							**4.200.005.924,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.143.967.360,00**							**4.200.005.924,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**8.143.967.360,00**							**4.200.005.924,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 nilai**	**7.913.311.460,00**						**-**	**3.969.349.224,00**	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu* *Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP*	-			1 Laporan 100 persentase	317.976.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	151.080.552,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	168.896.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		60.831.540,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	149.079.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		90.249.012,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP*	-			100 Persen	5.191.303.236,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	1.447.374.798,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4.272.540.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		427.137.500,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	918.763.236,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.020.237.298,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP*	-			1 Laporan 100 persentase	2.049.306.824,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	2.049.074.824,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	2.049.306.824,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		2.049.074.824,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP*	-			1 Laporan 100 persentase	354.724.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	321.819.050,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	57.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		57.400.000,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	71.288.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		89.878.950,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	226.035.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		174.540.100,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan***	**-**			**88.5 nilai**	**230.655.900,00**						**-**	**230.656.700,00**	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga*	-			1219 kunjungan 3 persentase	230.655.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	230.656.700,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	15.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		15.200.000,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	58.756.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		58.756.700,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	156.699.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		156.700.000,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
		RSUD BALI MANDARA						**222.341.698.500,00**							**231.453.657.442,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**222.341.698.500,00**							**231.453.657.442,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**222.341.698.500,00**							**231.453.657.442,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 nilai**	**201.341.698.500,00**						**-**	**201.341.698.500,00**	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa kebersihan kantor, jasa tenaga kesehatan, non kesehatan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan* *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP*	-			1 Tahun 100 persentase	41.341.698.500,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	41.341.698.500,00	RSUD BALI MANDARA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.806.240.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		6.806.240.000,00	RSUD BALI MANDARA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	34.535.458.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		34.535.458.500,00	RSUD BALI MANDARA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara* *Jumlah Pasien yang dilayani sesuai Standar Pelayanan RS*	-			90 nilai 70000 pasien	160.000.000.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	160.000.000.000,00	RSUD BALI MANDARA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	160.000.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		160.000.000.000,00	RSUD BALI MANDARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan***	**-**			**88.5 nilai**	**21.000.000.000,00**						**-**	**30.111.958.942,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana*	-			1 Tahun	21.000.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	30.111.958.942,00	RSUD BALI MANDARA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		9.111.958.942,00	RSUD BALI MANDARA
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				0 Unit	21.000.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		21.000.000.000,00	RSUD BALI MANDARA
		RUMAH SAKIT JIWA						**36.756.079.426,00**							**37.619.038.259,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**36.756.079.426,00**							**37.619.038.259,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**36.756.079.426,00**							**37.619.038.259,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 nilai**	**36.756.079.426,00**						**-**	**36.973.616.801,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP* *Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan*	-			100 persentase 1 Tahun	12.256.079.426,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	12.473.616.801,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.114.110.402,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.052.834.330,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11.141.969.024,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		11.420.782.471,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan*	-			81 nilai	24.500.000.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	24.500.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	24.500.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		24.500.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan***	**-**			**88.5 nilai**	**0,00**						**-**	**645.421.458,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana* *Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan*	-			1 Tahun 100 persentase	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	645.421.458,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				0 Unit	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		645.421.458,00	RUMAH SAKIT JIWA
		RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA						**72.000.000.000,00**							**72.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**72.000.000.000,00**							**72.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**72.000.000.000,00**							**72.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di BLUD***	**-**			**81,5 nilai**	**72.000.000.000,00**						**-**	**72.000.000.000,00**	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Pasien yang dilayani tuntas*	-			99 persen	72.000.000.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	72.000.000.000,00	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	72.000.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		72.000.000.000,00	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN						**22.774.193.184,00**							**14.497.047.340,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.784.959.600,00**							**6.400.632.999,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.784.959.600,00**							**6.400.632.999,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 nilai**	**1.227.019.800,00**						**-**	**2.446.868.844,00**	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			1 laporantase	24.300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-	-	1.179.785.250,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	24.300.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		1.179.785.250,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			1 laporanase	1.202.719.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	1.267.083.594,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	40.800.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		38.556.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	85.571.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		194.738.229,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	1.076.348.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.033.789.365,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan***	**-**			**81,5 nilai**	**1.557.939.800,00**						**-**	**3.953.764.155,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar*	-			70 persentase	957.277.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	3.782.824.155,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	91.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		104.101.754,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	865.777.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		3.678.722.401,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase sarana produksi dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar*	-			50 persentase	600.662.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	170.940.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				7 Dokumen	600.662.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		170.940.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	X	**NON URUSAN**						**19.989.233.584,00**							**8.096.414.341,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**19.989.233.584,00**							**8.096.414.341,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 nilai**	**19.989.233.584,00**						**-**	**8.096.414.341,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			2 Laporan	1.137.856.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	497.274.782,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	775.233.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		219.088.800,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	362.623.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		278.185.982,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			1 laporantase	15.746.402.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	4.494.164.575,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				81 Paket	46.402.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		55.342.980,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15.700.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		4.438.821.595,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			1 laporan	3.104.974.984,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	3.104.974.984,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				65 Laporan	3.104.974.984,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		3.104.974.984,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN
		UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN						**3.963.027.250,00**							**3.827.117.058,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.963.027.250,00**							**3.827.117.058,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**3.963.027.250,00**							**3.827.117.058,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan***	**-**			**85 Nilai**	**1.066.175.032,00**						**-**	**907.946.340,00**	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran*	-			100 %	99.792.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	99.740.700,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	11.971.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		11.791.200,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	19.614.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		19.853.600,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	32.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		32.500.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5.236.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		5.125.900,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		5.000.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	13.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		13.500.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	11.970.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		11.970.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 %	172.168.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	157.318.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	14.850.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		0,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani*	-			100 %	134.300.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	134.200.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		1.100.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53.100.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		53.100.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	80.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		80.000.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani*	-			100 %	659.913.432,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	674.005.640,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	309.895.848,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		309.895.848,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	18.010.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		31.950.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	332.007.584,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		332.159.792,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
2.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi***	**-**			**100 %**	**2.896.852.218,00**						**-**	**2.919.170.718,00**	
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	*Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan*	-			100 %	2.896.852.218,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	2.919.170.718,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				12 Paket Pekerjaan	2.896.852.218,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		2.919.170.718,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM						**29.018.411.568,00**							**30.475.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.018.411.568,00**							**30.475.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**29.018.411.568,00**							**30.475.000.000,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase cakupan layanan Air Minum Layak***	**-**			**95.00 %**	**29.018.411.568,00**						**-**	**30.475.000.000,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh Pelanggan*	-			40 %	29.018.411.568,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	30.475.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				5 Unit	29.018.411.568,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		30.475.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
		UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH						**11.064.918.400,00**							**12.929.094.479,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.064.918.400,00**							**12.929.094.479,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**11.064.918.400,00**							**12.929.094.479,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah***	**-**			**100 %**	**11.064.918.400,00**						**-**	**12.929.094.479,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik UPTD.PAL*	-			1 SPALD	11.064.918.400,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	12.929.094.479,00	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	11.064.918.400,00	- Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		12.929.094.479,00	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**326.919.539.328,00**							**480.168.505.962,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**316.111.349.328,00**							**479.850.186.262,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**308.478.278.144,00**							**468.705.615.052,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**85 Nilai**	**32.674.801.929,00**						**-**	**33.203.802.641,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan*	-			100 %	27.010.004.009,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	28.311.315.507,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				178 Orang/ Bulan	27.010.004.009,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		28.311.315.507,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 %	782.540.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	758.821.230,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.171.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		24.205.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	65.549.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		52.305.630,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		57.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	85.009.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	32.520.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		32.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	52.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		42.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	465.290.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		465.290.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 %	207.861.900,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur	-	155.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	207.861.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		155.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 %	1.093.826.448,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	1.093.226.448,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.600.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	572.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		572.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Laporan	200.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	318.226.448,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		318.226.448,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 %	3.580.569.272,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur	-	2.885.339.456,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	1.965.833.380,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		1.710.974.940,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				119 Unit	205.497.688,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		299.788.452,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	1.409.238.204,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		874.576.064,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik***	**-**			**48.63 %**	**8.757.070.276,00**						**-**	**54.816.827.513,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani*	-			5 Unit	2.439.385.324,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	34.115.542.316,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.17 KM	1.465.830.524,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		24.105.542.316,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	304.315.300,00	- Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		5.104.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	127.473.000,00	- Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai				4 Dokumen	541.766.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		4.356.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya*	-			14 D.I	6.317.684.952,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	20.701.285.197,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.1 KM	1.644.116.788,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		12.217.611.384,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				172.972 KM	3.645.687.292,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		5.775.541.877,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				7 Dokumen	1.027.880.872,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		2.708.131.936,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase cakupan layanan Air Minum Layak***	**-**			**95.00 %**	**15.071.635.500,00**						**-**	**5.895.800.768,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kapasitas layanan SPAM*	-			5 SPAM	15.071.635.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	5.895.800.768,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				10 Liter/Detik	15.071.635.500,00	- Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		5.895.800.768,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak***	**-**			**90.90 %**	**1.293.344.600,00**						**-**	**957.090.552,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani*	-			4200 SR	1.293.344.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	957.090.552,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat				150 Rumah Tangga	1.029.463.900,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		852.090.552,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun				2 Dokumen	263.880.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik***	**-**			**75.00 %**	**191.986.821.717,00**						**-**	**280.043.511.683,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik*	-			19 Kawasan	191.986.821.717,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	280.043.511.683,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				20 Kawasan	190.404.216.117,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		267.543.511.683,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				16 Dokumen	757.605.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				20 Dokumen	825.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap***	**-**			**78.67 %**	**55.178.233.658,00**						**-**	**90.095.474.585,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap*	-			601,92 Km	55.178.233.658,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	90.095.474.585,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				3 Dokumen	1.228.582.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		5.126.381.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 Dokumen	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.20 KM	4.504.930.236,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		10.609.977.845,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				2,86 KM	14.640.858.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				805.35 KM	24.340.043.440,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		31.598.456.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				0.56 KM	6.010.245.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		34.217.659.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				4 Dokumen	2.798.530.482,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		6.540.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				3 Dokumen	1.455.044.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		1.802.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat***	**-**			**22.77 %**	**1.499.014.344,00**						**-**	**1.474.014.976,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota*	-			10 Kegiatan	892.811.484,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	880.295.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				330 Orang	892.811.484,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		880.295.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	*Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi*	-			4 Kegiatan	606.202.860,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	593.719.436,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	299.325.280,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		295.808.856,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				16 Lembaga	306.877.580,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		297.910.580,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang***	**-**			**93.62 %**	**2.017.356.120,00**						**-**	**2.219.092.334,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	*Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan*	-			1 Perda	82.459.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	90.706.163,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	82.459.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		90.706.163,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang*	-			1 Kegiatan	731.335.564,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	804.469.120,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				9 Dokumen	731.335.564,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		804.469.120,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Bali*	-			1 Dokumen	551.464.980,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	606.611.478,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Laporan	401.000.680,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		441.100.748,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	150.464.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		165.510.730,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali*	-			2 Dokumen	652.095.976,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	717.305.573,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	237.354.992,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		261.090.491,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	414.740.984,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		456.215.082,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**5.191.810.000,00**							**5.563.294.300,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi***	**-**			**100 %**	**936.229.356,00**						**-**	**1.007.403.152,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan*	-			1 Paket	318.926.480,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	384.794.376,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	297.293.580,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		364.205.676,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	21.632.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		20.588.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah rumah kewenangan provinsi yang dibangun*	-			1 Paket	617.302.876,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	622.608.776,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				1 Unit Rumah	617.302.876,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		622.608.776,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh***	**-**			**5.94 %**	**1.860.525.100,00**						**-**	**2.697.504.572,00**	
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi*	-			7.82 %	1.860.525.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	2.697.504.572,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				12 Unit Rumah	371.650.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		107.170.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				0.97 Ha	1.488.875.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		2.590.334.472,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU***	**-**			**70 %**	**2.395.055.544,00**						**-**	**1.858.386.576,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	*Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman*	-			2.50 %	2.395.055.544,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	1.858.386.576,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				2 Dokumen	237.340.000,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		326.621.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				1 Lokasi	2.115.500.544,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		1.514.571.176,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	42.215.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		17.194.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.808.190.000,00**							**318.319.700,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**10.808.190.000,00**							**318.319.700,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan***	**-**			**9.72 Ha**	**10.500.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Bali*	-			9.72 Ha	10.500.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	10.500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi***	**-**			**100 %**	**32.817.000,00**						**-**	**37.896.400,00**	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi*	-			1 Dokumen	32.817.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	37.896.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.				1 Berita Acara	32.817.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		37.896.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Persentase data informasi pertanahan yang handal***	**-**			**30 %**	**275.373.000,00**						**-**	**280.423.300,00**	
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi*	-			1 Dokumen	275.373.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	280.423.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	275.373.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		280.423.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**316.111.349.328,00**							**479.850.186.262,00**	
	-	**-**						**2.441.261.184,00**							**5.581.276.910,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase cakupan layanan Air Minum Layak***	**-**			**95.00 %**	**1.613.794.952,00**						**-**	**1.679.199.232,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kapasitas layanan SPAM*	-			5 SPAM	1.613.794.952,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	-	-	1.679.199.232,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM				2 Dokumen	1.613.794.952,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	-		1.679.199.232,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	***undefined***	**-**			**undefined undefined**	**0,00**						**-**	**2.675.000.000,00**	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	*Meningkatnya kapasitas layanan SPAM*	-			5 SPAM	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	2.675.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional				0 SR	0,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		2.675.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap***	**-**			**78.67 %**	**0,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap*	-			601,92 Km	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dibangun				15 M	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**85 Nilai**	**827.466.232,00**						**-**	**1.227.077.678,00**	
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			15 Dokumen	827.466.232,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	1.227.077.678,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	453.212.460,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		680.220.215,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	374.253.772,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		546.857.463,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**50.133.628.066,00**							**48.139.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**50.133.628.066,00**							**48.139.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**50.133.628.066,00**							**48.139.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**83.3 Nilai**	**28.556.329.790,00**						**-**	**25.349.000.000,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			24 Dokumen	19.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	21.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	4.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	21.000.149.146,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	22.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	21.000.149.146,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		22.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya*	-			2 Paket	199.682.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	199.682.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			5 Jenis	534.160.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	410.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.980.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	349.337.100,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.847.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	54.995.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah*	-			2 Paket	4.215.027.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	40.492.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4.124.535.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	1.138.310.844,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.168.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	59.390.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	925.920.844,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		940.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	1.450.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				40 Unit	1.450.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti***	**-**			**100 persen**	**21.577.298.276,00**						**-**	**22.790.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti*	-			190 Pelanggaran	21.177.321.384,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	22.350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	79.999.796,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				50 Unit	16.860.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat dan Aparatur		18.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	149.999.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	29.899.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	99.999.496,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				190 Kasus	3.782.291.504,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		3.840.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				50 Orang	175.131.588,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	*Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi*	-			195 Kasus	259.977.392,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	290.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				2 Laporan	29.983.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				12 Laporan	49.994.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				4 Laporan	179.999.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	*Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina*	-			4 Orang	139.999.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	139.999.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**28.188.974.608,00**							**28.628.002.534,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28.188.974.608,00**							**28.628.002.534,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**28.188.974.608,00**							**28.628.002.534,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**83,60 Persen**	**23.750.236.708,00**						**-**	**23.660.325.534,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun*	-			100 Persen	184.163.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	310.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	65.640.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	118.522.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu*	-			100 Persen	14.128.410.708,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	14.128.339.262,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	14.128.410.708,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		14.128.339.262,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah*	-			1 Paket	71.400.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	286.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	71.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		286.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu*	-			100 Persen	696.746.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	714.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.996.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	125.678.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	82.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	11.220.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	23.995.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		24.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	399.862.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	43.494.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*	-			1 Tahun	999.994.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	580.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				18 Unit	999.994.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		580.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu*	-			100 Persen	1.602.568.856,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	1.548.152.128,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.420.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	178.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.418.148.856,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		1.418.152.128,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*	-			1 Tahun	6.066.952.644,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	6.093.334.144,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	1.748.717.372,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		1.748.717.372,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	60.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4.179.616.772,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		4.179.616.772,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9.988.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				93 Unit	68.630.100,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana***	**-**			**3 Persen**	**4.438.737.900,00**						**-**	**4.967.677.000,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan*	-			9 Kabupaten/ Kota	246.895.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)														
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				360 Orang	246.895.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana*	-			100 Persen	1.877.051.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	2.277.677.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	493.938.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		510.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				80 Orang	171.999.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				50 Orang	292.918.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		267.677.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	149.668.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				70 Orang	96.762.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				118 Unit	671.764.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran*	-			9 Kabupaten/ Kota	1.345.235.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	1.600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	638.455.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				900 Orang	706.779.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana*	-			5 Jenis	969.556.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	740.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				2 Dokumen	467.028.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		475.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	53.059.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen	258.772.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana														
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	72.222.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				9 kabupaten/ kota	118.474.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH						**8.625.665.050,00**							**8.897.421.516,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.625.665.050,00**							**8.897.421.516,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**8.625.665.050,00**							**8.897.421.516,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**83,60 Persen**	**5.565.307.610,00**						**-**	**5.921.844.076,00**	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase administrasi umum kantor yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku*	-			100 Persen	113.984.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	137.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.740.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		17.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.998.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		20.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	22.245.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		30.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	60.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		70.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*	-			1 Tahun	554.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	600.500.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				40 Unit	554.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		600.500.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu*	-			100 Persen	3.816.133.036,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	425.160.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	240.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		244.200.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	3.576.133.036,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		180.960.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*	-			1 Tahun	1.080.689.774,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	4.759.184.076,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	835.879.774,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		4.382.673.326,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	45.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		166.196.250,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				83 Unit	199.810.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		210.314.500,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana***	**-**			**3 Persen**	**3.060.357.440,00**						**-**	**2.975.577.440,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana*	-			100 Persen	1.029.589.440,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	1.075.577.440,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				8 Dokumen	1.029.589.440,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		1.075.577.440,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran*	-			9 Kabupaten/ Kota	373.520.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	400.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	373.520.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		400.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana*	-			1 Jenis	1.657.248.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	1.500.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	1.657.248.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		1.500.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK						**31.294.831.535,00**							**30.216.607.230,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.346.458.835,00**							**29.225.607.230,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**30.346.458.835,00**							**29.225.607.230,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**A Nilai**	**26.422.930.935,00**						**-**	**26.857.147.230,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			8 Dokumen	32.044.600,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	59.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.222.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		29.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.602.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		6.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	19.219.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		23.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi keuangan*	-			1 Tahun	19.523.163.815,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	20.170.802.108,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				116 Orang/ Bulan	19.523.163.815,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		20.170.802.108,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*	-			1 Orang	13.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Sipil Negara	-	12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	13.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Sipil Negara		12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan operasional perkantoran*	-			1 Tahun	314.737.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	347.831.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.652.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		16.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.926.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		87.246.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	100.924.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		121.085.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5.648.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		13.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.660.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	136.926.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		104.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran*	-			1 Tahun	370.489.040,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	227.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	492.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		3.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	180.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		24.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	189.997.040,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			1 Tahun	6.168.995.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	6.040.014.122,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	1.148.658.232,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		1.350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.742.705.272,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		3.385.958.632,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	1.277.632.376,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		1.304.055.490,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS***	**-**			**13.88 Persen**	**59.140.800,00**						**-**	**251.500.000,00**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial*	-			100 persen	3.530.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga dunia usaha	-	51.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				20 Dokumen	3.530.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga dunia usaha		51.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial*	-			51 Orang	55.610.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				57 Orang	55.610.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	***Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani***	**-**			**100 Persen**	**2.198.900,00**						**-**	**2.200.000,00**	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	*Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota*	-			5 Orang	2.198.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	2.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	2.198.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		2.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya***	**-**			**27.14 persen**	**3.306.069.100,00**						**-**	**1.149.700.000,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	-			241 Orang	2.318.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-	153.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				51 Orang	28.700.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		28.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	2.000.000.000,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				160 Orang	290.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	-			520 Orang	632.242.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti	-	450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				600 Orang	349.540.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	237.502.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti		250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				30 Orang	45.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	-			300 Orang	270.726.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	56.650.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				260 Orang	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				60 Orang	65.840.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				14 Orang	123.236.200,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	*Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	-			220 Orang	84.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan dan Pengemis	-	296.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				220 Orang	10.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan dan Pengemis		146.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				220 Orang	74.400.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan dan Pengemis		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan***	**-**			**0.16 persen**	**21.458.000,00**						**-**	**352.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	*Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur*	-			20 Orang	9.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar	-	47.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				20 Orang	9.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar		47.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin*	-			150 Keluarga	12.458.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin	-	305.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				95 Keluarga	6.814.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				100 Keluarga	5.643.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase korban bencana yang tertangani***	**-**			**100 persen**	**262.497.800,00**						**-**	**354.560.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	*Jumlah korban bencana yang terfasilitasi*	-			700 Orang	262.497.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial	-	354.560.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				2 Unit	2.280.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		2.280.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				100 Orang	2.280.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		2.280.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				650 Orang	257.937.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar***	**-**			**100 persen**	**272.163.300,00**						**-**	**258.000.000,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara*	-			1 TMP	272.163.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Taman Makam Pahlawan	-	258.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				898 Makam	272.163.300,00	- Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Taman Makam Pahlawan		258.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**948.372.700,00**							**991.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**948.372.700,00**							**991.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG***	**-**			**100 Persen**	**25.834.200,00**						**-**	**26.000.000,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG*	-			30 Orang	10.836.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Organisasi atau lembaga	-	11.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi				30 Orang	10.836.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Organisasi atau lembaga		11.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	-			10 Lembaga	14.997.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga atau organisasi perempuan	-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				100 Orang	14.997.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga atau organisasi perempuan		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Rasio Perempuan korban kekerasan***	**-**			**12.10 Nilai**	**119.998.200,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan*	-			3 Dokumen	19.998.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perempuan korban kekerasan	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	19.998.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perempuan korban kekerasan		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Indeks Kualitas Keluarga***	**-**			**72.89 Nilai**	**14.999.900,00**						**-**	**35.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan*	-			5 Lembaga	14.999.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				45 Orang	14.999.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah***	**-**			**28 Persen**	**9.997.100,00**						**-**	**10.000.000,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan*	-			1 Dokumen	9.997.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Data Gender dan Anak	-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	9.997.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Data Gender dan Anak		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)***	**-**			**75.95 Nilai**	**767.543.700,00**						**-**	**790.000.000,00**	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	*Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA*	-			20 Lembaga	14.990.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Pemenuhan Hak Anak	-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				20 perangkat daerah	14.990.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Pemenuhan Hak Anak		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*	-			5 Dokumen	752.552.800,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-	775.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				200 Orang	653.093.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		675.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				3 Kegiatan	95.499.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	3.960.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Rasio anak korban kekerasan***	**-**			**1.32 Nilai**	**9.999.600,00**						**-**	**10.000.000,00**	
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak*	-			1 Lembaga	9.999.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				20 Orang	9.999.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PELAYANAN SOSIAL						**6.835.613.704,00**							**4.845.137.292,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.835.613.704,00**							**4.845.137.292,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**6.835.613.704,00**							**4.845.137.292,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**A Nilai**	**5.273.904.636,00**						**-**	**2.708.749.792,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			1 Dokumen	1.900.000,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	11.400.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.900.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		11.400.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan operasional perkantoran*	-			1 tahun	188.418.500,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	290.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	9.837.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		15.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	159.954.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		250.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.638.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		5.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	15.988.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran*	-			1 Tahun	220.197.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	302.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	201.100.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		275.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	19.097.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		27.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			1 Tahun	4.863.388.736,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	2.104.849.792,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	273.332.392,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		300.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3.395.845.468,00	- Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		450.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.194.210.876,00	- Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		1.354.849.792,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya***	**-**			**27.14 persen**	**1.561.709.068,00**						**-**	**2.136.387.500,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	-			520 orang	783.528.768,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti milik pemerintah	-	1.350.987.500,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				45 Orang	59.546.000,00	- Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti milik pemerintah		300.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				45 Orang	400.000.000,00	- Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti milik pemerintah		377.775.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				45 Orang	89.750.000,00	- Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti milik pemerintah		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				45 Orang	10.000.000,00	- Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti milik pemerintah		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				45 Orang	47.912.100,00	- Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti milik pemerintah		150.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				45 Orang	158.840.668,00	- Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti milik pemerintah		298.212.500,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				45 Orang	17.480.000,00	- Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak terlantar dalam panti milik pemerintah		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	-			125 Orang	778.180.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah	-	785.400.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				90 Orang	565.000.000,00	- Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah		650.400.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				90 Orang	60.000.000,00	- Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah		30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				90 Orang	109.580.300,00	- Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				90 Orang	7.600.000,00	- Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah		30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				20 Orang	36.000.000,00	- Kab. Buleleng, Banjar, Banjar - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar dalam panti milik pemerintah		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						**610.208.484,00**							**1.435.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.438.800,00**							**32.500.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**32.438.800,00**							**32.500.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**A Nilai**	**32.438.800,00**						**-**	**32.500.000,00**	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan operasional perkantoran*	-			1 Tahun	32.438.800,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	32.500.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	19.962.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		20.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	12.476.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		12.500.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**577.769.684,00**							**1.402.500.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**577.769.684,00**							**1.402.500.000,00**	
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1.530.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		5.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	800.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		5.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran*	-			1 Tahun	5.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	20.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		20.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			1 Tahun	546.479.084,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor	-	1.200.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	159.117.592,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		300.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	38.846.696,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		450.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	348.514.796,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur dan Perangkat Kantor		450.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
1.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Rasio Perempuan korban kekerasan***	**-**			**12.10 Nilai**	**15.960.000,00**						**-**	**132.500.000,00**	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar*	-			1 Tahun	15.960.000,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perempuan Korban Kekerasan	-	132.500.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				30 Orang	7.980.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perempuan Korban Kekerasan		65.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				10 Layanan	7.980.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perempuan Korban Kekerasan		67.500.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Rasio anak korban kekerasan***	**-**			**1.32 Nilai**	**7.999.900,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga*	-			1 Dokumen	7.999.900,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	anak korban kekerasan	-	40.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	7.999.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	anak korban kekerasan		40.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA						**1.017.961.272,00**							**1.819.656.536,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.017.961.272,00**							**1.819.656.536,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**676.361.272,00**							**869.656.536,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)***	**-**			**86.80 Nilai**	**676.361.272,00**						**-**	**869.656.536,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan*	-			100 Persen	38.566.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	107.570.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.276.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		8.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.974.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		29.400.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	13.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		13.650.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.090.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		8.820.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	1.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		5.700.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	12.026.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		42.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan*	-			100 Persen	16.057.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	45.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	16.057.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		45.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan*	-			100 Persen	220.304.984,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	251.050.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		36.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	196.304.984,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		215.050.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai*	-			100 Persen	401.431.688,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	466.036.536,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	118.361.024,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		354.036.536,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	36.015.288,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		86.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				37 Unit	247.055.376,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		26.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	-	**-**						**341.600.000,00**							**950.000.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi***	**-**			**70 Persen**	**341.600.000,00**						**-**	**950.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi*	-			32 Orang	341.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Pencari Kerja	-	950.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				32 Orang	341.600.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Pencari Kerja		950.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
		UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA						**698.319.164,00**							**1.190.050.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**698.319.164,00**							**1.190.050.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**546.819.164,00**						**-**	**755.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)***	**-**			**86.80 Nilai**	**546.819.164,00**						**-**	**755.000.000,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan*	-			100 Persen	35.803.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	83.800.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		16.500.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		33.750.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		17.050.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.803.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		16.500.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan*	-			100 Persen	99.243.792,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	117.832.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	960.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		1.650.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		13.882.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	86.283.792,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		102.300.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai*	-			100 Persen	411.771.472,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	553.368.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	127.065.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		181.368.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		22.000.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	269.705.576,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		350.000.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	-	**-**						**151.500.000,00**							**435.050.000,00**	
1.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	***Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3***	**-**			**100 Persen**	**151.500.000,00**						**-**	**435.050.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku*	-			85 Perusahaan	151.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan	-	435.050.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				85 Perusahaan	151.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan		435.050.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL						**31.158.630.020,00**							**32.964.765.470,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.931.130.520,00**							**32.259.765.470,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**30.624.179.920,00**							**31.629.316.612,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)***	**-**			**86.80 Nilai**	**30.624.179.920,00**						**-**	**31.629.316.612,00**	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu*	-			100 Persen	27.275.729.312,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	28.002.128.153,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/ Bulan	27.275.729.312,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		28.002.128.153,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan*	-			100 Persen	325.781.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	-	402.889.691,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	14.994.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		14.175.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	45.947.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		85.649.267,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	64.800.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		68.047.344,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	27.795.100,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		37.810.080,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		9.450.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.025.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		3.750.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	158.220.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		184.008.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	116.411.800,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	116.411.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan*	-			100 Persen	992.887.064,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	1.080.650.032,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.880.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		1.650.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	396.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		480.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	594.007.064,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		599.000.032,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai*	-			100 Persen	1.913.369.944,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	-	2.023.648.736,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	659.127.168,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		845.866.784,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	170.263.584,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		179.905.792,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				72 Unit	1.083.979.192,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		997.876.160,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**227.499.500,00**							**705.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**186.499.500,00**							**330.000.000,00**	
1.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	***Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan***	**-**			**70 MW**	**186.499.500,00**						**-**	**330.000.000,00**	
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	*Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah*	-			4 Persen	186.499.500,00			-	6. Infrastruktur	Masyarakat	-	330.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi														
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi				1 Laporan	186.499.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.931.130.520,00**							**32.259.765.470,00**	
	-	**-**						**306.950.600,00**							**630.448.858,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi***	**-**			**30 Persen**	**44.997.600,00**						**-**	**90.000.000,00**	
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi*	-			44 Orang	44.997.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Tenaga Kerja	-	90.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				44 Dokumen	44.997.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Tenaga Kerja		90.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Penyerapan Tenaga Kerja***	**-**			**30 Persen**	**179.974.000,00**						**-**	**225.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasi bekerja/ berwirausaha*	-			40 Orang	139.974.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Pencari Kerja	-	225.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				40 Orang	139.974.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Pencari Kerja		225.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	*Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya*	-			180 Orang	40.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PMI (Pra dan Purna Penempatan)	-	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				180 Orang	40.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PMI (Pra dan Purna Penempatan)		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan***	**-**			**10.44 Persen**	**54.479.000,00**						**-**	**284.000.000,00**	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*	-			100 Persen	6.527.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan	-	52.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				8 Perkara	6.527.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan		52.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	*Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan*	-			2 Kep Gub	47.952.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Kerja dan Perusahaan	-	232.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	46.152.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Kerja dan Perusahaan		206.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)														
			Jumlah penetapan UMK				1 Surat Keputusan	1.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Kerja dan Perusahaan		26.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	***Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos***	**-**			**100 Persen**	**27.500.000,00**						**-**	**31.448.858,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja*	-			70 Perusahaan	27.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan dan Tenaga Kerja	-	31.448.858,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				70 Perusahaan	27.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan dan Tenaga Kerja		31.448.858,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**227.499.500,00**							**705.000.000,00**	
	-	**-**						**16.000.000,00**							**290.000.000,00**	
1.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan***	**-**			**62.50 Persen**	**8.000.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan*	-			62.50 Persen	8.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	-	-	60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	8.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	-		60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan***	**-**			**58.00 Persen**	**8.000.000,00**						**-**	**230.000.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan*	-			15 Dokumen	8.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	-	-	230.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				15 Dokumen	8.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	-		230.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	-	**-**						**25.000.000,00**							**85.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD***	**-**			**100 Persen**	**25.000.000,00**						**-**	**85.000.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target*	-			100 Persen	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Transmigran	-	85.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi														
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Lokasi	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Transmigran		85.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**24.887.880.677,00**							**24.887.902.627,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**24.887.880.677,00**							**24.887.902.627,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**910.364.476,00**							**850.000.000,00**	
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target***	**-**			**100 Persen**	**483.475.588,00**						**-**	**450.000.000,00**	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	*Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk*	-			100 Persen	483.475.588,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	483.475.588,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target***	**-**			**100 Persen**	**426.888.888,00**						**-**	**400.000.000,00**	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil*	-			79 Persen	426.888.888,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	426.888.888,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**23.166.810.325,00**							**23.307.673.272,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82.75 Nilai**	**16.588.563.933,00**						**-**	**17.830.564.256,00**	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja*	-			0.12 Persen	311.580.288,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Pemerintah Desa	-	411.811.955,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	19.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Pemerintah Desa		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	292.080.288,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Pemerintah Desa		391.811.955,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan*	-			100 Persen	12.785.659.237,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	14.377.413.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/ Bulan	12.655.281.149,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		14.236.963.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	130.378.088,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		140.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum*	-			12 Bulan	1.091.143.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	-	1.060.310.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.765.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		6.043.354,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	614.274.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		814.900.235,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	75.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		83.238.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.767.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		6.227.692,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.350.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		4.630.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	14.550.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		8.351.438,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	363.937.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		136.918.895,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terselesaikan*	-			100 Persen	207.340.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor	-	8.092.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	207.340.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor		8.092.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan*	-			100 Persen	690.697.052,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	-	680.005.657,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	182.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		151.483.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	508.297.052,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		528.522.157,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terselesaikan*	-			100 Persen	1.502.143.656,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor	-	1.292.929.566,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				19 Unit	1.397.483.656,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor		1.250.373.066,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	104.660.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor		42.556.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa***	**-**			**27 Desa**	**320.194.588,00**						**-**	**139.046.540,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	*Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan*	-			4.25 Persen	320.194.588,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota/ pihak ketiga	-	139.046.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	320.194.588,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota/ pihak ketiga		139.046.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase desa cepat berkembang***	**-**			**84.90 Persen**	**1.488.121.384,00**						**-**	**924.047.080,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa*	-			84.90 Persen	1.488.121.384,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan	-	924.047.080,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	770.037.604,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan		286.047.080,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	578.084.080,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan		488.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	139.999.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif***	**-**			**99.53 Persen**	**4.769.930.420,00**						**-**	**4.414.015.396,00**	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif*	-			100 Persen	4.769.930.420,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan	-	4.414.015.396,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1000 Unit	720.616.684,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan		299.881.429,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 Dokumen	489.406.384,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan		432.101.396,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	641.770.488,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan		705.947.328,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	2.918.136.864,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan		2.976.085.243,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**810.705.876,00**							**730.229.355,00**	
1.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana***	**-**			**4 Sektor**	**810.705.876,00**						**-**	**730.229.355,00**	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali*	-			1351 Orang	810.705.876,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK	-	730.229.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	810.705.876,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK		730.229.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN						**26.830.889.350,00**							**28.077.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**26.830.889.350,00**							**28.077.500.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**26.830.889.350,00**							**28.077.500.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Kinerja***	**-**			**83,85 Persen**	**23.906.479.331,00**						**-**	**24.737.500.000,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			8 Dokumen	94.679.800,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur	-	67.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	51.727.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		43.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	42.952.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen gaji , tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor*	-			2 Dokumen	18.696.021.383,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	19.030.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/ Bulan	18.667.614.283,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		19.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	28.407.100,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah pelayanan administrasi perkantoran*	-			6 Dokumen	1.346.716.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	1.598.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.489.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	916.029.700,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.303.300,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.202.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		32.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	311.692.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pelayanan administrasi perkantoran*	-			2 Dokumen	627.681.000,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur	-	670.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	325.036.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				55 Paket	302.645.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelayanan administrasi perkantoran*	-			3 Dokumen	616.323.164,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	702.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	245.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	369.823.164,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelayanan administrasi perkantoran*	-			3 Dokumen	2.525.057.484,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	2.670.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	1.005.963.584,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	68.774.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.450.319.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		1.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Rasio konektivitas layanan angkutan darat***	**-**			**0,86 Rasio**	**1.521.611.467,00**						**-**	**1.740.000.000,00**	
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	*Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan jalan*	-			2 Laporan	534.487.073,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	361.160.462,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	173.326.611,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti*	-			13 Laporan	86.665.026,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				8 Laporan	43.333.512,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin														
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				8 Laporan	43.331.514,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Laporan	489.472.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi				3000 Dokumen	489.472.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-			1 Laporan	410.986.568,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				10 Unit	410.986.568,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Persentase Aksesibilitas Pelayaran***	**-**			**75 Persen**	**905.389.976,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	*Jumlah dokumen kajian*	-			1 Dokumen	905.389.976,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen	905.389.976,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	***Persentase lintasan kereta api yang terbangun***	**-**			**25 Persen**	**497.408.576,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	*Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian*	-			1 Dokumen	497.408.576,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	497.408.576,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ						**2.557.882.088,00**							**2.619.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.557.882.088,00**							**2.619.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**2.557.882.088,00**							**2.619.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Kinerja***	**-**			**83,85 Persen**	**328.720.704,00**						**-**	**369.000.000,00**	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			11 Paket	136.179.712,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	154.800.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.850.812,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		4.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.693.300,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		100.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	719.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		800.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.916.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		50.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	-			5 Laporan	43.116.496,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	48.200.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.197.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		2.500.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		700.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40.918.696,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		45.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	-			20 Unit	149.424.496,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	166.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	138.134.496,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		150.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	11.290.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		16.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional***	**-**			**65 Persen**	**2.229.161.384,00**						**-**	**2.250.000.000,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara*	-			14 Unit	588.507.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	600.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				14 Unit	588.507.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		600.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	*Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi*	-			6 Laporan	1.640.653.784,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	1.650.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1.640.653.784,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		1.650.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
		UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA						**8.490.561.152,00**							**9.138.050.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.490.561.152,00**							**9.138.050.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**8.490.561.152,00**							**9.138.050.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Kinerja***	**-**			**83,85 Persen**	**618.855.672,00**						**-**	**638.050.000,00**	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia*	-			1 Tahun	188.469.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	198.600.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	964.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		1.100.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.215.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		100.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		27.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.999.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		17.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.988.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		3.500.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	45.302.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		50.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah kursi yang disediakan*	-			10 Unit	13.740.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	15.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	13.740.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		15.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan*	-			1 Laporan	57.102.296,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	60.450.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	396.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		450.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	17.700.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		18.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	39.006.296,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		42.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia*	-			25 Unit	359.544.376,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	364.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	346.434.376,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		350.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	13.110.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		14.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita***	**-**			**82,5 Persen**	**7.871.705.480,00**						**-**	**8.500.000.000,00**	
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita*	-			7332 RIT	7.871.705.480,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	8.500.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Unit	7.871.705.480,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		8.500.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
		UPTD PERLENGKAPAN JALAN						**2.049.428.864,00**							**2.344.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.049.428.864,00**							**2.344.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**2.049.428.864,00**							**2.344.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Kinerja***	**-**			**83,85 Persen**	**314.429.696,00**						**-**	**344.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			1 Dokumen	35.232.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	39.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.091.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		7.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	29.140.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		32.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	-			24 Unit	129.951.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	150.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	129.951.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		150.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	-			15 Unit	149.246.196,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	155.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	140.926.196,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		145.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	8.320.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		10.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik***	**-**			**38,58 Persen**	**1.734.999.168,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia* *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	-			388 Unit 760 Unit	1.734.999.168,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	2.000.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				363 Unit	1.134.999.684,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		1.350.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				998 Unit	599.999.484,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		650.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN						**1.116.139.460,00**							**1.184.900.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.116.139.460,00**							**1.184.900.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**1.116.139.460,00**							**1.184.900.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Kinerja***	**-**			**83,85 Persen**	**654.869.460,00**						**-**	**684.900.000,00**	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran*	-			1 Dokumen	496.372.060,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	552.200.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	85.272.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		76.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.496.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		3.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.540.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		3.200.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	405.063.960,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		470.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan*	-			13 Unit	37.797.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	25.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	37.797.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		25.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran*	-			150 Lembar	1.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	1.700.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		1.700.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia*	-			10 Unit	118.900.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	106.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	113.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		100.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5.400.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		6.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM***	**-**			**50 Persen**	**461.270.000,00**						**-**	**500.000.000,00**	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	*Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional*	-			19 Laporan	461.270.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	500.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				19 Laporan	461.270.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		500.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						**53.926.425.368,00**							**104.350.347.550,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**53.926.425.368,00**							**104.350.347.550,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**52.844.205.965,00**							**102.949.827.550,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)***	**-**			**82.75 Nilai**	**18.015.875.645,00**						**-**	**22.674.827.550,00**	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia*	-			16 Dokumen	30.832.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	34.609.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	19.286.700,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		21.215.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.074.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		6.274.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	6.471.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		7.119.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia*	-			75 Dokumen	13.908.322.059,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	16.643.680.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	13.715.947.459,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		15.081.523.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11 Dokumen	192.374.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur	Aparatur		1.562.157.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia*	-			12 Bulan	367.162.690,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	697.171.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.488.840,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		5.769.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	79.999.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		294.151.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	87.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		96.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.660.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		24.471.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13505 Dokumen	31.526.250,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		43.890.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		12.639.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	149.987.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan*	-			3 Paket	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	98.565.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		32.496.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		66.069.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan*	-			12 Bulan	533.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	626.125.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		3.690.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	350.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		402.435.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	180.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai*	-			674 Unit	3.176.558.696,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	4.574.675.150,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	1.520.880.544,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		2.353.052.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				489 Unit	6.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		8.215.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	99.860.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		199.518.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	1.464.938.152,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		1.863.738.350,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				51 Unit	84.480.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		150.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase informasi yang disebarluaskan***	**-**			**93.40 persen**	**12.802.691.140,00**						**-**	**24.893.000.000,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi*	-			82.00 Indeks	12.802.691.140,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	24.893.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				120 Dokumen	1.467.999.376,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		1.918.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				30000 Dokumen	3.878.999.480,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		11.257.730.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				96 Dokumen	1.794.599.976,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		4.748.425.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	3.128.899.232,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		3.505.216.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				4 Dokumen	1.578.099.576,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		1.938.530.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				20000 Dokumen	954.093.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		1.524.919.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Persentase Layanan Teknologi Informatika***	**-**			**91,00 Persen**	**22.025.639.180,00**						**-**	**55.382.000.000,00**	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi*	-			100 Persen	22.025.639.180,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	55.382.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1.185.841.588,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		21.478.498.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	11.355.099.996,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		19.367.539.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				28 Unit	9.484.697.596,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		14.535.962.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**504.219.880,00**							**652.520.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Indeks Pembangunan Statistik***	**-**			**4.00 nilai**	**504.219.880,00**						**-**	**652.520.000,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi*	-			11 Sektor	504.219.880,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	652.520.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	176.570.396,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		228.503.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	179.814.092,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		232.700.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah														
			Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	147.835.392,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		191.316.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**577.999.523,00**							**748.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Indeks Evalaksan***	**-**			**75.00 nilai**	**577.999.523,00**						**-**	**748.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan*	-			29 OPD	441.702.627,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	575.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				2 Dokumen	37.431.231,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		81.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	181.474.096,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		215.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	81.767.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		159.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				29 Perangkat Daerah	141.030.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	*Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun*	-			29 OPD	136.296.896,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	-	172.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				29 Perangkat Daerah	136.296.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		172.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**20.280.215.888,00**							**20.621.898.938,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.280.215.888,00**							**20.621.898.938,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**20.280.215.888,00**							**20.621.898.938,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)***	**-**			**82.31 Nilai**	**18.953.766.176,00**						**-**	**18.710.946.042,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	91.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran, dokumen perencanaan dan evaluasi	-	104.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	85.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran, dokumen perencanaan dan evaluasi		97.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran, dokumen perencanaan dan evaluasi		6.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	14.168.705.429,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Keuangan Perkantoran	-	14.522.923.065,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	14.168.705.429,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Keuangan Perkantoran		14.522.923.065,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pegawai ASN	-	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pegawai ASN		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	239.631.704,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran	-	314.739.820,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.613.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		11.498.965,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	54.505.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		57.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		109.250.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.729.100,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		14.015.855,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		5.175.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	73.284.104,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		117.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Dokumen	408.806.887,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	-	400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	408.806.887,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 Dokumen	1.222.147.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	-	1.426.117.530,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		2.289.650,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	280.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		311.880.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	939.147.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.111.947.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 Dokumen	2.803.474.756,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	-	1.927.515.627,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	825.761.272,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		920.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	50.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		143.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.927.713.484,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		863.765.627,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP***	**-**			**3.00 Persen**	**237.829.480,00**						**-**	**257.040.000,00**	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan*	-			10 Unit Usaha	217.829.480,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	182.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				10 Unit Usaha	217.829.480,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		182.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan*	-			1 Unit Usaha	20.000.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	75.040.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Unit Usaha	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		75.040.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase koperasi berkualitas***	**-**			**7.00 Persen**	**175.131.792,00**						**-**	**151.452.896,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi*	-			47 Unit Usaha	50.000.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	75.726.448,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				47 Unit Usaha	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		75.726.448,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi*	-			45 Unit Usaha	125.131.792,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	75.726.448,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				45 Unit Usaha	125.131.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		75.726.448,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta***	**-**			**3.20 Persen**	**225.131.792,00**						**-**	**477.360.000,00**	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	-			146 Unit Usaha	225.131.792,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi	-	477.360.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				76 Unit Usaha	175.131.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi		175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				70 Unit Usaha	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi		302.360.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase pertumbuhan wirausaha***	**-**			**6.00 Persen**	**475.658.960,00**						**-**	**683.400.000,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan*	-			200 Unit Usaha	475.658.960,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM, Wirausaha baru	-	683.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				200 Unit Usaha	425.658.960,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM, Wirausaha baru		533.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				100 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM, Wirausaha baru		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase UMKM Naik Kelas***	**-**			**3.00 Persen**	**212.697.688,00**						**-**	**341.700.000,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah*	-			125 Unit Usaha	212.697.688,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM, UKM	-	341.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	182.697.688,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM, UKM		205.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				25 Orang	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM, UKM		136.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH						**994.601.968,00**							**2.668.783.547,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**994.601.968,00**							**2.668.783.547,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**994.601.968,00**							**2.668.783.547,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)***	**-**			**82.31 Nilai**	**859.470.176,00**						**-**	**582.053.958,00**	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	39.892.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran	-	75.763.380,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	666.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		766.360,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.725.900,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		4.873.470,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		46.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		1.150.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		1.150.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran		21.823.550,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 Dokumen	207.229.084,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	-	240.778.136,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.151.150,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	48.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		55.775.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	157.729.084,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		183.851.986,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 Dokumen	612.348.792,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	-	265.512.442,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	95.900.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		129.984.942,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.850.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		32.027.500,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	513.598.792,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		103.500.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi***	**-**			**25.00 Persen**	**135.131.792,00**						**-**	**2.086.729.589,00**	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*	-			400 Orang	135.131.792,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, Pengelola Koperasi, UMKM	-	2.086.729.589,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				400 Orang	135.131.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, Pengelola Koperasi, UMKM		2.086.729.589,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**17.467.325.355,00**							**24.113.187.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.442.326.955,00**							**24.088.187.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**17.442.326.955,00**							**24.088.187.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**15.770.354.863,00**						**-**	**20.988.187.000,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.558.224.471,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	14.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	13.558.224.471,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		14.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	0,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	307.604.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	480.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.999.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	72.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.992.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	175.112.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.099.187.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.099.187.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.506.476.712,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.659.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.992.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	178.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		154.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.326.484.712,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	398.049.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	3.400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	373.179.480,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	24.870.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**350.263.584,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	150.263.584,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	150.263.584,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				2 Dokumen	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**300.263.584,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	300.263.584,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	225.263.584,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**638.356.548,00**						**-**	**1.100.000.000,00**	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	457.738.960,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				400 Pelaku Usaha	457.738.960,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	180.617.588,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	180.617.588,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**207.956.584,00**						**-**	**600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	207.956.584,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				100 Kegiatan usaha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				321 Kegiatan usaha	207.956.584,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				325 Pelaku Usaha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**175.131.792,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	175.131.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	175.131.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	**NON URUSAN**						**24.998.400,00**							**25.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**24.998.400,00**							**25.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**24.998.400,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	24.998.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.998.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN						**83.859.610.016,00**							**103.565.672.560,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**83.859.610.016,00**							**103.565.672.560,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**83.859.610.016,00**							**103.565.672.560,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 Poin**	**28.149.098.476,00**						**-**	**31.872.309.250,00**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*	-			10 Dokumen/ Laporan	172.697.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	203.701.241,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	162.697.288,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		175.856.006,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		27.845.235,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi Keuangan*	-			100 Persen	23.668.377.828,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	25.974.285.618,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				129 Orang/ Bulan	23.182.587.076,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		25.476.820.597,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	475.790.752,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		486.465.021,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Organisasi		11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana*	-			100 Persen	442.647.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	706.030.094,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	36.048.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		46.320.670,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	231.292.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		336.088.720,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	103.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		113.309.064,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.996.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		21.771.640,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		27.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		16.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22.310.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		144.540.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia*	-			100 Persen	1.356.409.528,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	1.672.767.598,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.496.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		6.050.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	500.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	100.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		245.465.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	750.913.528,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		871.252.598,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	2.508.966.632,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	3.315.524.699,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	825.059.376,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		902.944.557,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	31.535.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.652.372.256,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		2.302.580.142,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan***	**-**			**5 Persen**	**53.637.370.088,00**						**-**	**68.741.352.208,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Tercapainya Pelindindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan*	-			2040 Objek	28.158.075.176,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat	-	34.146.156.608,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				20 Objek	375.395.272,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		6.146.156.608,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				2000 Orang	27.782.679.904,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		28.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	*Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penghargaan pada Objek/ Lembaga yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan*	-			525 Objek/ Sertifikat	17.310.036.652,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat	-	24.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				500 Objek	15.502.207.672,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		22.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				25 Sertifikat	1.807.828.980,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terbinanya Lembaga Adat Lintas Kabupaten/Kota*	-			110 Organisasi/lembaga	8.169.258.260,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi/Lembaga	-	10.045.195.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				110 Unit	8.169.258.260,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi/Lembaga		10.045.195.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan***	**-**			**5 Persen**	**1.460.180.580,00**						**-**	**1.496.493.258,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terbinanya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional serta tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas daerah Kabupaten/Kota*	-			250 Orang/Sertifikat	1.460.180.580,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat	-	1.496.493.258,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				135 Orang	596.429.100,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		561.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				200 Sertifikat	863.751.480,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		935.493.258,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	***Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi***	**-**			**5 Persen**	**49.999.600,00**						**-**	**149.397.380,00**	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	*Tersedianya dan terlaksananya Data dan Dokumen Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi*	-			2 Dokumen	49.999.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat	-	149.397.380,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				2 Dokumen	49.999.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		149.397.380,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola***	**-**			**0,2 Persen**	**562.961.272,00**						**-**	**1.306.120.464,00**	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Terinventarisasi dan ditetapkannya Cagar Budaya Tingkat Provinsi*	-			5 Objek	287.829.480,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat	-	536.120.464,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	287.829.480,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		536.120.464,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi*	-			201 Objek	275.131.792,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat	-	770.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				1 Objek	125.131.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				20 Objek	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				2 Objek	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				18 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		UPTD TAMAN BUDAYA						**3.581.050.268,00**							**5.633.017.704,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.581.050.268,00**							**5.633.017.704,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.581.050.268,00**							**5.633.017.704,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 Poin**	**3.581.050.268,00**						**-**	**5.633.017.704,00**	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik*	-			100 Persen	172.704.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	304.010.410,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	84.999.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		196.443.500,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.920.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		8.712.880,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	47.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		60.500.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.920.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		9.813.100,00	UPTD TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	8.377.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		9.218.330,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	14.986.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		19.322.600,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai*	-			100 Persen	49.989.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-	-	277.596.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	49.989.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		277.596.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai*	-			100 Persen	2.035.855.484,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-	-	2.732.603.602,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.320.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		1.464.100,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	896.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		985.600.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	24.125.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		305.679.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.114.410.484,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		1.439.860.502,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik*	-			100 Persen	1.322.500.984,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-	-	2.318.807.692,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	158.800.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		174.680.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	24.290.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		189.629.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1.139.410.984,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		1.954.498.692,00	UPTD TAMAN BUDAYA
		UPTD MUSEUM BALI						**2.380.504.860,00**							**3.521.917.295,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.380.504.860,00**							**3.521.917.295,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.380.504.860,00**							**3.521.917.295,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 Poin**	**2.380.504.860,00**						**-**	**3.521.917.295,00**	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik*	-			100 Persen	226.713.940,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-	-	321.006.280,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	94.994.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		100.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	106.050.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		116.655.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4.999.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		27.674.680,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.768.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		6.352.500,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	14.901.640,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		70.324.100,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai*	-			100 Persen	24.986.800,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-	-	55.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	24.986.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		55.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai*	-			100 Persen	288.398.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-	-	1.145.480.015,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6.552.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		7.218.200,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	206.850.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		227.535.000,00	UPTD MUSEUM BALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	49.999.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		100.168.750,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.997.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		810.558.065,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai*	-			100 Persen	1.840.405.320,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	2.000.431.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	74.990.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		129.734.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	49.950.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		70.697.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.715.465.320,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		1.800.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
		UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI						**3.303.127.936,00**							**6.172.960.270,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.303.127.936,00**							**6.172.960.270,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.303.127.936,00**							**6.172.960.270,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 Poin**	**3.303.127.936,00**						**-**	**6.172.960.270,00**	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik*	-			100 Persen	158.624.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	439.429.334,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	34.999.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		118.967.024,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				48 Paket	49.998.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		209.489.720,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	48.950.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		53.845.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	5.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		15.517.590,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	5.004.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		5.610.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	14.672.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		36.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*"Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai"*	-			100 Persen	50.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	110.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		110.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai*	-			100 Persen	2.905.813.936,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	3.092.263.936,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		2.843.500,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	350.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		385.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	49.970.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		80.630.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.504.343.936,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		2.623.790.436,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai*	-			100 Persen	188.690.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	2.531.267.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	148.930.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		163.823.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	14.760.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		92.444.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		2.275.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT						**482.218.721.241,00**							**494.835.831.060,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**482.218.721.241,00**							**494.835.831.060,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**482.218.721.241,00**							**494.835.831.060,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas PMA)***	**80.90 Nilai**			**80.80 Nilai**	**13.912.808.617,00**						**80.85 Nilai**	**17.546.250.000,00**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*	21 Dokumen			7 Dokumen	23.224.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	7 Dokumen	37.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			6 Dokumen	18.160.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	6 Dokumen	26.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	5.064.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Laporan	11.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses*	156 Dokumen			52 Dokumen	10.875.000.785,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	52 Dokumen	11.500.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/ Bulan			52 Orang/ Bulan	10.875.000.785,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	52 Orang/ Bulan	11.500.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses*	3039 Dokumen			847 Dokumen	580.682.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	847 Dokumen	659.250.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	6.432.900,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Paket	6.750.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	34.303.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Paket	35.500.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2160 Dokumen			720 Dokumen	16.438.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	720 Dokumen	17.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 Laporan			125 Laporan	523.508.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	125 Laporan	600.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai*	60 Unit			15 Unit	95.918.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	15 Unit	1.300.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit			15 Unit	95.918.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	15 Unit	1.300.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai*	105 Laporan			35 Laporan	305.778.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	35 Laporan	350.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	105 Laporan			36 Laporan	305.778.300,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	35 Laporan	350.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai*	105 Unit			35 Laporan	2.032.203.832,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	35 Unit	3.700.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit			6 Unit	603.139.776,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	6 Unit	900.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit			12 Unit	1.429.064.056,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	12 Unit	2.800.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
2.	**2.22.09**	**PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI**	***Indeks Membangun Desa Adat***	**0.8750 Nilai 0.8750 Nilai 0.8750 Nilai 0.8750 Nilai**			**0.7090 Nilai**	**468.305.912.624,00**						**0.8025 Nilai 0.8025 Nilai 0.8025 Nilai 0.8025 Nilai**	**477.289.581.060,00**	
	2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	*Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina*	900 Desa Adat 1800 Desa Adat			600 Desa Adat	467.480.253.764,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali	300 Desa Adat 600 Desa Adat	475.589.581.060,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat														
			Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	1800 Desa			600 Desa	467.167.556.076,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali	600 Desa	474.714.581.060,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat														
			Jumlah Produk Hukum Desa Adat	900 Dokumen			300 Dokumen	312.697.688,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali	300 Dokumen	875.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	*Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses*	740 Dokumen			245 Dokumen	525.395.276,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali	245 Dokumen	1.050.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat														
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	600 Desa			200 Desa	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali	200 Desa	450.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat														
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	140 Desa			50 Desa	375.395.276,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali	45 Desa	600.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	*Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan*	12 Dokumen			4 Dokumen	300.263.584,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat dan Subak se Bali	4 Dokumen	650.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	12 Laporan			4 Laporan	300.263.584,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat dan Subak se Bali	4 Laporan	650.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**24.567.023.921,00**							**28.911.688.313,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**24.560.183.921,00**							**28.896.688.313,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**24.560.183.921,00**							**28.896.688.313,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)***	**-**			**81 Nilai**	**23.741.179.157,00**						**-**	**23.549.928.452,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 Persen	6.840.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.840.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN*	-			60 Dokumen	20.500.001.173,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	21.500.797.916,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/ Bulan	20.500.001.173,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		21.500.797.916,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 Persen	906.173.500,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	250.712.380,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.565.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	598.987.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	108.990.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		124.712.380,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	26.509.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	161.120.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik*	-			100 Persen	182.022.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	182.022.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik*	-			100 Persen	129.540.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	126.540.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik*	-			100 Persen	2.016.602.484,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	1.647.418.156,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	788.974.868,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		571.337.984,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	708.897.616,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		776.080.172,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	518.730.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	***Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil***	**-**			**44 Persen**	**192.697.488,00**						**-**	**541.526.531,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	-			102575.33 Ha	59.999.800,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	254.001.411,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	59.999.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		75.320.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				57862.83 Ha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		130.226.311,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				1 Ha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		48.455.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang*	-			15 Pelaku Usaha	0,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan*	-			4 Kelompok	132.697.688,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	237.525.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				40 Orang	132.697.688,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		65.540.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				4 Kelompok	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		71.445.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				40 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		55.340.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				4 Kelompok	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		45.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap***	**-**			**2 Persen**	**328.697.688,00**						**-**	**647.984.752,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	*Jumlah produksi perikanan tangkap*	-			103696.10 Ton	308.697.688,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	593.984.752,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				3 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		193.658.136,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				4 Unit	308.697.688,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		400.326.616,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan*	-			8000 Ton	20.000.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	54.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				30 Rekomendasi	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		54.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya***	**-**			**2 Persen**	**65.000.000,00**						**-**	**3.188.166.631,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit*	-			150 Sertifikat	0,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	24.580.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		24.580.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Jumlah Produksi Perikanan Budidaya*	-			32645.10 Ton	65.000.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	3.163.586.631,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		3.123.586.631,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				20 Dokumen	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku***	**-**			**2 Persen**	**87.478.696,00**						**-**	**330.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil*	-			30 Pelaku Usaha	87.478.696,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	299.542.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	67.528.696,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		37.680.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		80.138.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		68.194.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				40 Kelompok	19.950.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		113.529.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Pengawasan kepada unit usaha oengolahan dan distribusi hasil perikanan*	-			20 Unit Usaha	0,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	30.457.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		30.457.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan***	**-**			**2 Persen 48.68 Kg/Kapita/Tahun**	**145.130.892,00**						**-**	**639.081.947,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha*	-			25 Unit Usaha	0,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	295.471.321,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		295.471.321,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina*	-			25 Unit Usaha	145.130.892,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	343.610.626,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				25 Unit Usaha	145.130.892,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		343.610.626,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X	**NON URUSAN**						**6.840.000,00**							**15.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**6.840.000,00**							**15.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)***	**-**			**81 Nilai**	**6.840.000,00**						**-**	**15.000.000,00**	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 Persen	6.840.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	6.840.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT						**881.159.468,00**							**1.838.232.896,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**881.159.468,00**							**1.838.232.896,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**881.159.468,00**							**1.838.232.896,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	**-**			**81 Nilai**	**613.227.876,00**						**-**	**729.807.896,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 Persen	49.769.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	50.500.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.955.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		7.500.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.318.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		6.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		35.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.995.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		2.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik*	-			100 Persen	32.088.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	15.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	32.088.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		15.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik*	-			100 Persen	111.052.600,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	2.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	960.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		500.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	110.092.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		1.500.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik*	-			100 Persen	420.318.076,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	662.307.896,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	152.681.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		152.307.896,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	262.636.284,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		500.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		10.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya***	**-**			**2 Persen**	**267.931.592,00**						**-**	**1.108.425.000,00**	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas*	-			1250000 Ekor	267.931.592,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	1.108.425.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	107.277.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		800.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	160.653.992,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		308.425.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
		UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						**1.132.457.368,00**							**1.906.862.739,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.132.457.368,00**							**1.906.862.739,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.132.457.368,00**							**1.906.862.739,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)***	**-**			**81 Nilai**	**879.573.868,00**						**-**	**1.529.196.896,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 Persen	51.141.700,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	104.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.052.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		7.500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.589.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		6.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		90.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.999.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik*	-			100 Persen	49.569.500,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	15.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	49.569.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		15.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik*	-			100 Persen	110.592.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	2.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.992.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	108.600.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		1.500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik*	-			100 Persen	668.270.668,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	1.408.196.896,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	193.556.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		193.196.896,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	50.460.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		5.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	424.253.876,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		1.200.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		10.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan***	**-**			**2 Persen**	**252.883.500,00**						**-**	**377.665.843,00**	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan*	-			2500 Rekomendasi	252.883.500,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	377.665.843,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				30 Unit Usaha	222.884.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		297.118.843,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				7 Unit Usaha	29.999.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		80.547.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI						**1.342.043.604,00**							**1.924.079.617,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.303.873.604,00**							**1.885.898.417,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.303.873.604,00**							**1.885.898.417,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)***	**-**			**81 Nilai**	**1.233.874.104,00**						**-**	**1.085.898.417,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 Persen	17.984.600,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	14.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.986.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		7.500.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.999.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		6.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.998.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		500.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik*	-			100 Persen	50.000.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	15.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		15.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik*	-			100 Persen	11.992.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	2.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.992.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		500.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		1.500.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik*	-			100 Persen	1.153.897.504,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	1.054.898.417,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	81.210.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		82.211.113,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	962.686.804,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		962.687.304,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	109.999.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		10.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	***Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah***	**-**			**71 Persen**	**69.999.500,00**						**-**	**800.000.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan*	-			4 Kawasan	69.999.500,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	800.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				44712.5 Ha	69.999.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		750.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				1 Ha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		50.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	X	**NON URUSAN**						**38.170.000,00**							**38.181.200,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**38.170.000,00**							**38.181.200,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)***	**-**			**81 Nilai**	**38.170.000,00**						**-**	**38.181.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 Persen	38.170.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	38.181.200,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.170.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		38.181.200,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN						**429.285.296,00**							**615.553.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**429.285.296,00**							**615.553.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**429.285.296,00**							**615.553.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)***	**-**			**81 Nilai**	**375.537.696,00**						**-**	**248.553.500,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu*	-			100 Persen	54.485.800,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	51.553.500,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.969.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		7.500.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	6.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		6.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.517.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		36.053.500,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.999.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		2.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik*	-			100 Persen	47.182.500,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	15.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	47.182.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		15.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik*	-			100 Persen	11.992.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	2.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.992.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		500.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		1.500.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik*	-			100 Persen	261.877.396,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	180.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	65.881.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		70.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.995.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		100.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	96.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		10.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap***	**-**			**2 Persen**	**53.747.600,00**						**-**	**367.000.000,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan*	-			8000 Ton	53.747.600,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	367.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				50 Unit	39.999.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		117.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				5 Layanan	13.748.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		250.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA						**21.600.026.440,00**							**19.442.099.903,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.962.141.520,00**							**7.579.185.125,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**871.138.832,00**							**1.079.828.936,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**145.345.692,00**						**-**	**281.000.000,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-			-	0,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				1 Lokasi	0,00	- Kab. Buleleng, Sukasada, Ambengan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-			-	31.803.400,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	31.803.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar*	-			25 Usaha	113.542.292,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	281.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				10 Unit Usaha	15.347.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		100.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata														
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				9 Laporan	98.195.192,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		180.500.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan***	**-**			**12,50 Persen**	**340.942.572,00**						**-**	**368.228.640,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata*	-			2800000 Orang	340.942.572,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	368.228.640,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	183.723.284,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		152.650.092,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	157.219.288,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		215.578.548,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan***	**-**			**46 Persen**	**384.850.568,00**						**-**	**430.600.296,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	*Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan*	-			230 Orang	384.850.568,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	430.600.296,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				20 Orang	193.587.184,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		247.549.452,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				100 Orang	191.263.384,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		183.050.844,00	DINAS PARIWISATA
	X	**NON URUSAN**						**11.637.884.920,00**							**11.862.914.778,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**11.637.884.920,00**							**11.862.914.778,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**84 Nilai**	**11.637.884.920,00**						**-**	**11.862.914.778,00**	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan*	-			80 Dokumen	11.637.884.920,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	11.862.914.778,00	DINAS PARIWISATA
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	11.637.884.920,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		11.862.914.778,00	DINAS PARIWISATA
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	11.637.884.920,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		11.862.914.778,00	DINAS PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.962.141.520,00**							**7.579.185.125,00**	
	-	**-**						**9.091.002.688,00**							**6.499.356.189,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**484.844.268,00**						**-**	**437.744.055,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-			-	46.329.100,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	48.191.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				1 Dokumen	46.329.100,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		48.191.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-			-	438.515.168,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	389.553.055,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	438.515.168,00	- Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		389.553.055,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan***	**-**			**12,50 Persen**	**161.915.788,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata*	-			2800000 Orang	161.915.788,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	161.915.788,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**-**	**-**			**-**	**232.514.584,00**						**-**	**254.100.000,00**	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-			-	112.932.792,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	127.050.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				45 Laporan	112.932.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		127.050.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	119.581.792,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	127.050.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	119.581.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		127.050.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan***	**-**			**46 Persen**	**162.644.788,00**						**-**	**214.554.920,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	*Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan*	-			230 Orang	162.644.788,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	214.554.920,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya				35 Orang	162.644.788,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		214.554.920,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**8.049.083.260,00**						**-**	**5.442.957.214,00**	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	228.304.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	505.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	189.204.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	139.318.988,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	130.755.942,00	DINAS PARIWISATA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	75.621.792,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		85.742.027,00	DINAS PARIWISATA
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.699.369.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	988.004.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.484.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		35.784.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.390.879.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.982.090.872,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	3.819.197.272,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	510.016.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	228.304.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	505.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.982.090.872,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	3.819.197.272,00	DINAS PARIWISATA
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	34.310.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.699.369.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	988.004.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	67.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.999.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	139.318.988,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	130.755.942,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	63.697.196,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		45.013.915,00	DINAS PARIWISATA
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.699.369.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	988.004.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		2.220.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	228.304.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	505.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	39.100.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.982.090.872,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	3.819.197.272,00	DINAS PARIWISATA
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.437.764.172,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		3.144.197.272,00	DINAS PARIWISATA
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.699.369.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	988.004.000,00	DINAS PARIWISATA
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	220.505.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						**63.322.085.808,00**							**67.329.985.437,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.335.591.188,00**							**1.377.173.980,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**1.335.591.188,00**							**1.377.173.980,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi***	**-**			**89 Persen**	**534.536.952,00**						**-**	**586.809.934,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah dokumen bimtek pengolahan dan pengawalan mutu serta pemasaran hasil pertanian*	-			3 Dokumen	534.536.952,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Masyarakat	-	586.809.934,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	534.536.952,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Masyarakat		586.809.934,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Angka Kecukupan Energi (AKE)***	**-**			**2.675 kkal/kapita/hari**	**654.356.548,00**						**-**	**601.913.207,00**	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen ketersediaan pangan*	-			1 Dokumen	221.829.380,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur/Kelompok Masyarakat	-	239.120.464,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	221.829.380,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur/Kelompok Masyarakat		239.120.464,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina*	-			5 Unit	432.527.168,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat)	-	362.792.743,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	432.527.168,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat)		362.792.743,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**146.697.688,00**						**-**	**188.450.839,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	146.697.688,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Kelompok Masyarakat	-	188.450.839,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina				1 Dokumen	146.697.688,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Kelompok Masyarakat		188.450.839,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**61.986.494.620,00**							**65.952.811.457,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**57.364.661.312,00**							**60.448.566.118,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**44.643.724.508,00**						**-**	**45.785.146.260,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	44.643.724.508,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	45.785.146.260,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				275 Orang/ Bulan	44.643.724.508,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		45.785.146.260,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**9.906.747.256,00**						**-**	**9.986.016.051,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	5.387.377.184,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani	-	5.978.100.579,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	5.387.377.184,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani		5.978.100.579,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	2.243.711.112,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani	-	234.092.254,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				3 Laporan	2.243.711.112,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani		234.092.254,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	2.275.658.960,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani Ternak	-	3.773.823.218,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	2.275.658.960,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani Ternak		3.773.823.218,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian***	**-**			**15 Persen**	**1.391.925.964,00**						**-**	**1.458.406.656,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian*	-			2 Jenis	1.391.925.964,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara	-	1.458.406.656,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1.139.410.984,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara		1.235.661.892,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	252.514.980,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara		222.744.764,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis***	**-**			**5 Persen**	**1.422.263.584,00**						**-**	**3.218.997.151,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi*	-			250.000 Ekor	1.422.263.584,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat Umum	-	3.218.997.151,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2 Laporan	1.422.263.584,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat Umum		3.218.997.151,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	**-**						**4.621.833.308,00**							**5.504.245.339,00**	
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	-	-			-	52.565.896,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	RPH / TPH	-	58.395.093,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya														
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				3 Kasus	52.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	RPH / TPH		58.395.093,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**178.463.584,00**						**-**	**372.638.570,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	178.463.584,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani	-	372.638.570,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				10 Kelompok	178.463.584,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani		372.638.570,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**4.390.803.828,00**						**-**	**5.073.211.676,00**	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	635.725.768,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	799.093.552,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	317.725.768,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		351.393.552,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.584.690.464,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	2.925.584.072,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				58 Unit	1.600.502.544,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		1.962.569.809,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				380 Unit	232.870.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		159.076.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	650.115.336,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	771.633.134,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	322.942.368,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		419.369.922,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	327.172.968,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		352.263.212,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	119.613.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	139.245.370,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.234.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		18.431.270,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.296.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		13.856.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	13.884.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		15.272.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		17.325.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		63.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.298.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		11.110.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	635.725.768,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	799.093.552,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	318.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		447.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.584.690.464,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	2.925.584.072,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	751.317.920,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		803.937.763,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	400.658.960,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	437.655.548,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	400.658.960,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		437.655.548,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN						**1.729.911.398,00**							**2.288.291.644,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.195.148.534,00**							**1.592.974.220,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**621.397.452,00**							**819.937.700,00**	
1.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase Produk Bersertifikat Organik***	**-**			**0,87 Persen**	**621.397.452,00**						**-**	**819.937.700,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Teregistrasi*	-			18 Pelaku Usaha	621.397.452,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha Pertanian Organik dan Pelaku Usaha PSAT	-	819.937.700,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				6 Sertifikat	445.046.268,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha Pertanian Organik dan Pelaku Usaha PSAT		614.304.700,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				12 Dokumen	176.351.184,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha Pertanian Organik dan Pelaku Usaha PSAT		205.633.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	**-**						**573.751.082,00**							**773.036.520,00**	
1.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**573.751.082,00**						**-**	**773.036.520,00**	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	256.203.388,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	352.508.900,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	116.973.388,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		130.062.500,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	55.191.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	66.237.820,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.180.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		5.518.260,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.748.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		14.859.680,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		35.750.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.762.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		10.109.880,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	256.203.388,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	352.508.900,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	139.230.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		222.446.400,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	262.356.594,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	354.289.800,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	177.884.802,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		218.650.100,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.131.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		9.873.600,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				73 Unit	9.340.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		125.766.100,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**534.762.864,00**							**695.317.424,00**	
	-	**-**						**534.762.864,00**							**695.317.424,00**	
1.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**534.762.864,00**						**-**	**695.317.424,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-	-			-	534.762.864,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha	-	695.317.424,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit														
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi				1000 Unit	253.698.380,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha		326.209.224,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				75 Dokumen	281.064.484,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha		369.108.200,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN						**3.729.357.392,00**							**3.712.200.087,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.729.357.392,00**							**3.712.200.087,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**2.225.886.740,00**							**538.512.900,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**2.225.886.740,00**						**-**	**538.512.900,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	2.225.886.740,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	538.512.900,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				87 Laporan	2.225.886.740,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		538.512.900,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	**-**						**1.503.470.652,00**							**3.173.687.187,00**	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				75 Sertifikat	682.363.532,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		750.309.300,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	-	-			-	106.457.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat, Pemda	-	1.417.145.983,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme														
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				3 Laporan	106.457.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat, Pemda		1.417.145.983,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**714.649.720,00**						**-**	**1.006.231.904,00**	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	364.353.440,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	461.121.474,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	174.998.600,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		245.966.600,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	66.978.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	107.742.030,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.999.500,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		14.745.060,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	54.998.000,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		63.250.000,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.998.900,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		13.773.210,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	283.317.580,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	437.368.400,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	5.000.000,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		117.538.100,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	198.685.788,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		308.830.300,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	364.353.440,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	461.121.474,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	189.354.840,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		215.154.874,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	283.317.580,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	437.368.400,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	79.631.792,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		11.000.000,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	66.978.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	107.742.030,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.982.300,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		15.973.760,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN						**2.919.196.136,00**							**3.398.850.264,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.919.196.136,00**							**3.398.850.264,00**	
	-	**-**						**2.919.196.136,00**							**3.398.850.264,00**	
1.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.648.572.240,00**						**-**	**1.850.718.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	1.648.572.240,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak	-	1.850.718.300,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				6 Ha	542.237.052,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak		563.114.200,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				8 Ha	666.599.932,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak		784.249.900,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				1 Laporan	439.735.256,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak		503.354.200,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
2.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.270.623.896,00**						**-**	**1.548.131.964,00**	
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	862.288.916,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	1.010.083.200,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				78 Unit	183.192.788,00	- Kab. Buleleng, Seririt, Seririt - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		247.677.600,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.554.780,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	450.114.654,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	191.194.780,00	- Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		217.827.654,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	57.780.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	87.934.110,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.780.500,00	- Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		9.627.420,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.554.780,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	450.114.654,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	159.360.000,00	- Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		232.287.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	862.288.916,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	1.010.083.200,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	676.186.128,00	- Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		747.533.600,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	57.780.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	87.934.110,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.772.700,00	- Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		9.700.790,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	862.288.916,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	1.010.083.200,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				134 Unit	2.910.000,00	- Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		14.872.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	57.780.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	87.934.110,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.227.000,00	- Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		5.355.900,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	- Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia - Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk - Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		63.250.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK						**2.345.364.550,00**							**3.677.062.990,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.345.364.550,00**							**3.677.062.990,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.390.771.194,00**							**2.530.808.500,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Populasi Ternak***	**-**			**0,81 Persen**	**1.390.771.194,00**						**-**	**2.530.808.500,00**	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak*	-			3 Jenis	1.390.771.194,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	2.530.808.500,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 laporan	1.390.771.194,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		2.530.808.500,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	**-**						**954.593.356,00**							**1.146.254.490,00**	
1.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**954.593.356,00**						**-**	**1.146.254.490,00**	
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	558.635.256,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	633.405.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300.527.168,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		368.292.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	69.780.891,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	102.669.490,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.648.004,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		22.387.200,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.678.271,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		38.148.770,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.075.000,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		35.750.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.379.616,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		6.383.520,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	326.177.209,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	410.180.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	49.200.000,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		110.220.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	276.977.209,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		299.960.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	558.635.256,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	633.405.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	250.315.888,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		258.018.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7.792.200,00	- Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		7.095.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						**41.328.802.244,00**							**42.633.429.792,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.012.822.580,00**							**1.318.100.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**1.012.822.580,00**							**1.318.100.000,00**	
1.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik***	**-**			**100 Persen**	**370.127.092,00**						**-**	**315.000.000,00**	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	*Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan*	-			100 Persen	119.996.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	9 Kabupaten/Kota	-	105.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	119.996.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	9 Kabupaten/Kota		105.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	*Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan*	-			100 Persen	250.130.792,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali	-	210.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	250.130.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali		210.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Indeks kualitas air laut Indeks kualitas air Indeks kualitas udara Persentase Penurunan Emisi GRK***	**-**			**69.90 Nilai 63.05 Nilai 88.59 Nilai 12.37 Persen**	**132.999.700,00**						**-**	**297.500.000,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan*	-			100 Persen	132.999.700,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali	-	297.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	32.999.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali		157.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	99.999.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali		140.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)***	**-**			**100 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	*Persentase Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang disusun*	-			100 Persen	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali	-	0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan***	**-**			**68 Persen**	**39.999.100,00**						**-**	**94.500.000,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH*	-			100 Persen	39.999.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Perusahaan/pelaku usaha	-	94.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				10 Badan Usaha	39.999.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Perusahaan/pelaku usaha		94.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	***Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH***	**-**			**100 Persen**	**19.999.700,00**						**-**	**53.550.000,00**	
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	*Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilaksaankan*	-			100 Persen	19.999.700,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	9 Kabupaten/Kota	-	53.550.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	19.999.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	9 Kabupaten/Kota		53.550.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga***	**-**			**71 Persen 28 Persen**	**279.697.688,00**						**-**	**368.550.000,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengelolaan sampah*	-			9 Kab/Kota	279.697.688,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	9 Kabupaten/Kota	-	368.550.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	279.697.688,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	9 Kabupaten/Kota		368.550.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup***	**-**			**30 Persen**	**44.999.400,00**						**-**	**94.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH*	-			100 Persen	44.999.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali	-	94.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				20 Entitas	44.999.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali		94.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan***	**-**			**100 Persen**	**24.999.900,00**						**-**	**94.500.000,00**	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	*Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi*	-			100 Persen	24.999.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	masyarakat di 9 Kabupaten/Kota	-	94.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani				1 Dokumen	24.999.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	masyarakat di 9 Kabupaten/Kota		94.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**40.315.979.664,00**							**41.315.329.792,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**40.315.979.664,00**							**41.315.329.792,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)***	**-**			**A Nilai**	**40.028.282.176,00**						**-**	**40.755.804.742,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentasae Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu*	-			100 Persen	35.899.600,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	37.695.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	35.899.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		37.695.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu*	-			100 Persen	35.642.881.576,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	37.423.802.432,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				213 Orang/ Bulan	35.601.281.576,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		37.380.122.432,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	41.600.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		43.680.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu*	-			100 Persen	397.192.000,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	441.717.568,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.296.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		17.115.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.782.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		35.577.568,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	92.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		97.125.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.681.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		38.850.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	61.950.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		65.100.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	178.982.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		187.950.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan*	-			100 Persen	300.092.500,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	315.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	300.092.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		315.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan*	-			100 Persen	547.597.472,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	595.915.463,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	172.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		196.560.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	375.097.472,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		399.355.463,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan*	-			100 Persen	3.104.619.028,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	1.941.674.279,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	1.047.482.380,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		1.099.873.937,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.481.330.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		227.250.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	575.806.648,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		614.550.342,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan***	**-**			**3.06 Persen**	**150.131.592,00**						**-**	**317.730.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi*	-			100 Persen	150.131.592,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali	-	317.730.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	150.131.592,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali		317.730.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Persentase peningkatan kelas kelompok***	**-**			**2.82 Persen**	**60.000.000,00**						**-**	**37.170.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan*	-			100 Persen	60.000.000,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali	-	37.170.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				28 Orang	60.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali		37.170.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	***Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Indeks Kualitas Lahan***	**-**			**6.61 Persen 41.66 Nilai**	**77.565.896,00**						**-**	**204.625.050,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	-			100 Persen	77.565.896,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali	-	204.625.050,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				1 Dokumen	77.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Provinsi Bali		204.625.050,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA						**2.365.990.132,00**							**888.194.999,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.365.990.132,00**							**888.194.999,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**2.365.990.132,00**							**888.194.999,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)***	**-**			**A Nilai**	**2.365.990.132,00**						**-**	**888.194.999,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara*	-			100 Persen	56.044.200,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara	-	58.923.904,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.058.300,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		3.212.370,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.685.900,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		7.033.534,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.000.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		34.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	13.300.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		14.028.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara*	-			100 Persen	69.494.096,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara	-	72.876.875,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		31.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	39.494.096,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		41.376.875,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara*	-			100 Persen	2.240.451.836,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara	-	756.394.220,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	149.453.396,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		156.844.220,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	1.520.000.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	570.998.440,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		599.550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR						**5.496.271.264,00**							**671.895.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.496.271.264,00**							**671.895.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**5.496.271.264,00**							**671.895.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)***	**-**			**A Nilai**	**5.496.271.264,00**						**-**	**671.895.000,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur*	-			100 Persen	54.638.500,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur	-	57.292.305,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.975.600,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		3.131.520,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.832.700,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		13.450.185,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.250.000,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		37.012.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.580.200,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		3.698.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur*	-			100 Persen	36.318.500,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur	-	38.194.800,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	36.318.500,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		38.194.800,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur*	-			100 Persen	54.627.096,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur	-	57.382.622,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	14.600.000,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		15.330.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40.027.096,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		42.052.622,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur*	-			100 Persen	5.350.687.168,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur	-	519.025.273,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	484.317.168,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		508.546.273,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	4.856.390.000,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	9.980.000,00	- Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		10.479.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN						**1.007.970.908,00**							**441.315.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.007.970.908,00**							**441.315.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.007.970.908,00**							**441.315.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)***	**-**			**A Nilai**	**1.007.970.908,00**						**-**	**441.315.000,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan*	-			100 Persen	75.151.600,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan	-	101.728.515,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.175.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		2.302.125,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.748.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		13.387.290,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		26.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.728.100,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		2.879.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	13.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		17.010.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	19.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		39.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan*	-			100 Persen	126.049.988,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan	-	139.468.877,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8.000.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		15.796.996,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	118.049.988,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		123.671.881,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan*	-			100 Persen	806.769.320,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan	-	200.117.608,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	256.265.896,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		189.628.108,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	540.513.424,00	- Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	9.990.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		10.489.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT						**3.726.660.369,00**							**398.265.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.726.660.369,00**							**398.265.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**3.726.660.369,00**							**398.265.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)***	**-**			**A Nilai**	**3.726.660.369,00**						**-**	**398.265.000,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat*	-			100 Persen	55.772.200,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat	-	58.563.393,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.989.200,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		3.140.130,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.299.400,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		10.814.475,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.500.000,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		34.125.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.383.600,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		2.503.788,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7.600.000,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		7.980.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat*	-			100 Persen	62.769.696,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat	-	65.909.180,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22.800.000,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		23.940.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	39.969.696,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		41.969.180,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat*	-			100 Persen	3.608.118.473,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat	-	273.792.427,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	175.896.792,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		184.696.886,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3.347.429.889,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	84.791.792,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		89.095.541,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
		UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI						**411.002.196,00**							**223.515.001,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**411.002.196,00**							**223.515.001,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**411.002.196,00**							**223.515.001,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)***	**-**			**A Nilai**	**411.002.196,00**						**-**	**223.515.001,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai*	-			100 Persen	41.314.000,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai	-	43.394.715,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.410.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		2.542.365,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.429.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		22.503.390,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		15.750.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.474.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		2.598.960,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai*	-			100 Persen	226.620.196,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai	-	41.487.545,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	226.620.196,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		41.487.545,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai*	-			100 Persen	143.068.000,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai	-	138.632.741,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	126.878.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		121.223.741,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	16.190.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		17.409.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP						**423.293.500,00**							**641.570.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**423.293.500,00**							**641.570.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**423.293.500,00**							**641.570.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)***	**-**			**A Nilai**	**363.300.400,00**						**-**	**381.570.000,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH*	-			100 Persen	9.995.400,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH	-	10.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.995.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		8.400.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.999.900,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		2.100.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH*	-			100 Persen	99.948.000,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH	-	105.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	99.948.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		105.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH*	-			100 Persen	253.357.000,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH	-	266.070.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	253.357.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		266.070.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan***	**-**			**94.46 Persen**	**59.993.100,00**						**-**	**260.000.000,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi*	-			26 Persen	59.993.100,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH	-	260.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	59.993.100,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		260.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH						**4.856.559.980,00**							**8.568.651.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.856.559.980,00**							**8.568.651.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**4.856.559.980,00**							**8.568.651.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)***	**-**			**A Nilai**	**595.467.976,00**						**-**	**557.025.000,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah*	-			100 Persen	81.860.500,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah	-	68.670.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.721.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		5.250.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.875.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		8.400.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		42.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.013.700,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		7.350.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6.750.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		5.670.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah*	-			100 Persen	71.487.100,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah	-	21.611.310,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	71.487.100,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		21.611.310,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah*	-			100 Persen	442.120.376,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah	-	466.743.690,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	323.040.376,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		341.709.690,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	119.080.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		125.034.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
2.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional***	**-**			**100 Persen**	**4.261.092.004,00**						**-**	**8.011.626.000,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana*	-			100 Persen	4.261.092.004,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	TPA Sarbagita	-	8.011.626.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional														
			Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				1 Unit	4.261.092.004,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	TPA Sarbagita		8.011.626.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**23.292.448.212,00**							**31.976.300.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**23.292.448.212,00**							**31.976.300.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**20.779.092.064,00**							**24.281.300.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)***	**-**			**82,40**	**19.401.126.532,00**						**-**	**20.346.300.000,00**	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	92.216.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	92.216.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Sub Kegiatan	16.627.431.612,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	17.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	16.627.431.612,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		17.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			6 Sub Kegiatan	551.328.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	556.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.997.300,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		18.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	105.008.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	102.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.123.900,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	5.840.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	302.858.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan*	-			3 Sub Kegiatan	1.141.058.248,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.070.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	340.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		330.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	567.616.648,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		490.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	233.441.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Sub Kegiatan	989.092.272,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	842.539.480,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	146.552.792,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**-**			**82,00 Indeks**	**321.625.968,00**						**-**	**350.000.000,00**	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	*Jumlah Pelaku Usaha Ekspor dan Impor yang di Bina*	-			75 Pelaku Usaha	321.625.968,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha/Eksportir	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				14000 Dokumen	321.625.968,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha/Eksportir		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Jumlah Pasar ber SNI***	**-**			**1 Pasar**	**111.478.100,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	*Jumlah Pasar yang dibina*	-			8 Pasar	111.478.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pasar/Pengelola Pasar	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				8 Laporan	111.478.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pasar/Pengelola Pasar		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase stabilitas harga barang Pokok***	**-**			**<7 Persen**	**50.000.000,00**						**-**	**105.000.000,00**	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah*	-			2 Kali	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat	-	105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif***	**-**			**55 Persen**	**50.000.000,00**						**-**	**15.000.000,00**	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran*	-			10 Pelaku Usaha	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha/Eksportir	-	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				25 Pelaku Usaha	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha/Eksportir		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Indeks Keberdayaan Konsumen***	**-**			**49,70 Indeks**	**610.302.988,00**						**-**	**765.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses*	-			100 %	498.595.896,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen/Masyarakat/Pelaku Usaha	-	555.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				1 BPSK	456.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen/Masyarakat/Pelaku Usaha		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				7 LPKSM	42.595.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen/Masyarakat/Pelaku Usaha		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Produk SNI yang diawasi*	-			10 Produk	111.707.092,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen/Masyarakat/Pelaku Usaha	-	210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				90 Laporan	111.707.092,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen/Masyarakat/Pelaku Usaha		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali***	**-**			**30 Persen**	**234.558.476,00**						**-**	**2.550.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali Hasil : Persentase produk lokal bali terhadap total produk yang di jua*	-			100 Toko	234.558.476,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha	-	2.550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer				5 Laporan	234.558.476,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha		2.550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**2.513.356.148,00**							**7.695.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase industri kreatif yang tumbuh***	**-**			**1,5 Persen**	**2.513.356.148,00**						**-**	**7.420.000.000,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Persentase Industri yang dibina*	-			1,5 %	2.513.356.148,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali	-	7.420.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				10 Dokumen	62.565.396,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		270.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				10 Dokumen	2.450.790.752,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		7.150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Persentase Ketersediaan Data Industri***	**-**			**100 Persen**	**0,00**						**-**	**275.000.000,00**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Persentase Data Industri yang terkumpul*	-			100 %	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali	-	275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				270 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD RUMAH KREATIF						**1.024.068.692,00**							**892.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.024.068.692,00**							**892.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.024.068.692,00**							**892.000.000,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)***	**-**			**82,40**	**196.854.492,00**						**-**	**252.000.000,00**	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			4 Sub Kegiatan	44.097.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	96.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	33.437.700,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		85.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.100.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.200.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.200.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4.560.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.600.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan*	-			1 Sub Kegiatan	51.205.896,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	53.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	51.205.896,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		53.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*umlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan*	-			1 Sub Kegiatan	101.550.896,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	103.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	101.550.896,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		103.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase industri kreatif yang tumbuh***	**-**			**1,5 Persen**	**827.214.200,00**						**-**	**640.000.000,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Persentase Industri yang dibina*	-			1,5 %	827.214.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali	-	640.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	827.214.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		640.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG						**550.707.368,00**							**543.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**550.707.368,00**							**543.300.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**550.707.368,00**							**543.300.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)***	**-**			**82,40**	**318.059.080,00**						**-**	**263.300.000,00**	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			5 Sub Kegiatan	44.309.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	93.300.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.492.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.600.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	19.987.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		62.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		15.500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.100.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.200.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	5.729.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		12.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan*	-			2 Sub Kegiatan	171.603.584,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	63.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		13.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	159.603.584,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		50.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Sub Kegiatan	102.145.896,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	107.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	102.145.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		107.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Indeks Keberdayaan Konsumen***	**-**			**49,70 Indeks**	**232.648.288,00**						**-**	**280.000.000,00**	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan*	-			55 Sertifikat	232.648.288,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha / Eksportir	-	280.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang				56 Dokumen	232.648.288,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha / Eksportir		280.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		BIRO UMUM DAN PROTOKOL						**97.252.852.649,00**							**97.359.959.924,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**97.252.852.649,00**							**97.359.959.924,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**97.252.852.649,00**							**97.359.959.924,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**97.252.852.649,00**						**-**	**97.359.959.924,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	692.753.436,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	763.760.467,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	692.753.436,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		763.760.467,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	735.773.624,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	811.191.069,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	735.773.624,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		811.191.069,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 Persen	504.654.848,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	560.382.054,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				21 Laporan	504.654.848,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		560.382.054,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	18.586.573.884,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	20.102.544.496,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	668.934.884,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		737.500.727,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.098.378.516,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.806.307.930,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.431.628.680,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.642.120.950,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.773.211.760,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.239.216.539,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	614.420.044,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		677.398.350,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	18.073.459.304,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	24.140.935.380,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.011.354.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.217.518.886,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11.252.364.188,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		16.495.412.740,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.809.740.316,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.428.003.754,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	-			100 Persen	9.689.612.022,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	13.635.033.355,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				141 Unit	6.609.282.870,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.961.464.364,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	3.080.329.152,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.673.568.991,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil*	-			100 Persen	26.527.797.711,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	7.320.309.418,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	26.527.797.711,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.320.309.418,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	-			100 Persen	19.770.472.524,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	26.554.666.195,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				47 Paket	12.940.201.440,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		19.162.541.684,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				40 Paket	6.520.771.084,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.052.214.493,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	309.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		339.910.018,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan*	-			100 Persen	521.914.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	795.910.847,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	521.914.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		795.910.847,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan*	-			100 Persen	2.149.841.196,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.675.226.643,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	2.149.841.196,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.675.226.643,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		BIRO HUKUM						**7.066.309.000,00**							**7.392.993.909,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.066.309.000,00**							**7.392.993.909,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**7.066.309.000,00**							**7.392.993.909,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**80,5 Nilai**	**2.743.971.724,00**						**-**	**2.638.815.264,00**	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan*	-			4 Paket	1.518.834.700,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.292.723.586,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.995.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		16.498.680,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.349.999.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.100.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.999.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		16.499.450,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	138.840.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		159.725.456,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan*	-			27 Unit	1.225.137.024,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.346.091.678,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	491.346.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		540.496.708,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	678.820.232,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		745.127.970,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.500.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				69 Unit	49.970.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		54.967.000,00	BIRO HUKUM
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	***Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Diselesaikan dalam Kepastian Hukum***	**-**			**100 Persen**	**4.322.337.276,00**						**-**	**4.754.178.645,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum*	-			1195 Dokumen	2.133.618.708,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	2.346.981.453,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				45 Dokumen	1.276.798.884,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.404.479.331,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				1000 Dokumen	161.550.784,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		177.705.871,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				50 Dokumen	238.508.176,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		262.359.226,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				100 Dokumen	456.760.864,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		502.437.025,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan*	-			55 Kasus	2.188.718.568,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	2.407.197.192,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				45 Kasus	1.963.263.584,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.159.196.371,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				10 Kasus	225.454.984,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		248.000.821,00	BIRO HUKUM
		SEKRETARIAT DAERAH						**64.752.543.252,00**							**86.085.579.237,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**570.197.764,00**							**628.644.213,00**	
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**570.197.764,00**							**628.644.213,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip Nilai Evaluasi Kearsipan***	**-**			**100 Persen 63 Nilai**	**570.197.764,00**						**-**	**628.644.213,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*Terwujudnya Penataan Arsip*	-			100 Persen	262.363.484,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	289.256.301,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				1000 Arsip	262.363.484,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		289.256.301,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	*Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik*	-			21 Persen	307.834.280,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	339.387.912,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				400 Pengguna	40.757.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		44.935.916,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				45 Laporan	267.076.380,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		294.451.996,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**64.182.345.488,00**							**85.456.935.024,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**64.182.345.488,00**							**85.456.935.024,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**64.182.345.488,00**						**-**	**85.456.935.024,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	63.934.996.428,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	85.209.585.964,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				298 Orang/ Bulan	63.934.996.428,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		85.209.585.964,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	247.349.060,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	247.349.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	247.349.060,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		247.349.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**27.122.915.892,00**							**16.805.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**27.122.915.892,00**							**16.805.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**27.122.915.892,00**							**16.805.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 nilai**	**2.184.805.464,00**						**-**	**2.055.000.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	387.287.464,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	380.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	387.287.464,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		380.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum*	-			100 %	788.223.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	735.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.836.100,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		15.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	419.287.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.999.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		20.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	330.099.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		300.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang tertata*	-			100 %	1.009.295.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	940.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	877.495.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		800.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				105 Unit	86.800.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		90.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	45.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	***Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali***	**-**			**70 %**	**1.767.153.456,00**						**-**	**1.850.000.000,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*Persentase Tugas Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti*	-			100 %	652.248.772,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	700.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				11 Dokumen	462.334.572,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				2 Dokumen	189.914.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti*	-			100 %	365.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				2 Dokumen	190.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				2 Dokumen	175.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	749.904.684,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	750.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	349.905.184,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		350.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	399.999.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual***	**-**			**100 %**	**23.170.956.972,00**						**-**	**12.900.000.000,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	*Persentase Pengembangan Mental Spiritual*	-			100 %	6.529.234.304,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan tokoh agama	-	5.400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				100 Unit	5.886.099.532,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan tokoh agama		5.000.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				6 Lembaga	643.134.772,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan tokoh agama		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar*	-			100 %	16.641.722.668,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	7.500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	16.641.722.668,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		7.500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BIRO ORGANISASI						**3.605.298.830,00**							**3.815.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**628.093.064,00**							**795.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**628.093.064,00**							**795.000.000,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik***	**-**			**60 %**	**524.961.272,00**						**-**	**675.000.000,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik*	-			22,35 %	337.263.584,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan	-	450.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				80 Perpustakaan	67.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		100.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	137.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				3 Perpustakaan	64.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		75.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				50 Dokumen	67.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		75.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca*	-			37 %	187.697.688,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan	-	225.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				5 Lokus	62.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		75.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				15 Perpustakaan	125.131.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun***	**-**			**4,20 %**	**103.131.792,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	*Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun*	-			300 Eksemplar	51.565.896,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Koleksi KCKR	-	60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				300 Eksemplar	51.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Koleksi KCKR		60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	*Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan*	-			10 Naskah	51.565.896,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Naskah Kuno	-	60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				10 Eksemplar	51.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Naskah Kuno		60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.977.205.766,00**							**3.020.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.977.205.766,00**							**3.020.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi***	**-**			**85 Nilai**	**2.024.522.478,00**						**-**	**2.070.000.000,00**	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan*	-			1 Dokumen	4.355.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Setda Provinsi Bali	-	10.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	4.355.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Setda Provinsi Bali		10.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu*	-			100 %	998.796.610,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi	-	695.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	17.059.760,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	706.748.850,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi		380.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	274.988.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi		290.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.*	-			1 Laporan	1.021.370.168,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi	-	1.365.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	871.410.168,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi		1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	149.960.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi		165.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	***Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik***	**-**			**87 %**	**952.683.288,00**						**-**	**950.000.000,00**	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran*	-			87 %	387.565.896,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	-	420.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		90.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		130.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				29 Dokumen	187.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	*Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik*	-			87 %	565.117.392,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	-	530.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	187.562.196,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		175.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	129.999.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		80.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	19.990.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				2 Dokumen	74.999.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				4 Dokumen	152.565.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		165.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN						**4.194.833.960,00**							**4.614.319.734,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.044.232.200,00**							**1.144.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.044.232.200,00**							**1.144.000.000,00**	
1.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja*** ***Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah*** ***Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti***	**-**			**83 %** **5.5 %** **100 %**	**478.892.200,00**						**-**	**526.814.200,00**	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku* *Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 % 12 Bulan	74.814.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	-	82.295.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	74.814.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat		82.295.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan*	-			100 %	332.339.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	-	365.591.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	332.339.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat		365.591.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha*	-			100 %	71.739.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	-	78.927.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	71.739.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		78.927.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	***Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik***	**-**			**90 %**	**490.315.000,00**						**-**	**534.619.800,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	-			100 %	124.784.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	137.262.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	24.760.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.236.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	75.344.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		82.878.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	24.680.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.148.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	-			100 %	99.598.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	109.568.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				12 Laporan	50.061.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.068.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	49.537.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		54.500.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	-			4 Level	265.933.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	287.788.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				200 Orang	153.442.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		164.628.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	24.960.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.456.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	87.531.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		95.704.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
3.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	***Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku***	**-**			**87 %**	**75.025.000,00**						**-**	**82.566.000,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku*	-			100 %	25.100.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	-	27.610.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	25.100.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		27.610.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku*	-			100 %	49.925.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	-	54.956.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				2 Laporan	49.925.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		54.956.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	X	**NON URUSAN**						**3.150.601.760,00**							**3.470.319.734,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**3.150.601.760,00**							**3.470.319.734,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**3.150.601.760,00**						**-**	**3.470.319.734,00**	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.500.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	14.850.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	13.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		14.850.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.561.332.160,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.792.115.174,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.319.833.160,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.552.139.174,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	46.367.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		82.187.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	195.132.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		157.788.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	575.769.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	663.354.560,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				37 Unit	473.199.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		550.769.560,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				291 Unit	102.570.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		112.585.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		SEKRETARIAT DPRD						**267.885.919.555,00**							**273.106.101.815,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**267.885.919.555,00**							**273.106.101.815,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**267.885.919.555,00**							**273.106.101.815,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)***	**-**			**85 Persen**	**129.131.993.589,00**						**-**	**100.378.189.300,00**	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD*	-			100 Persen	356.878.192,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat	-	483.534.949,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	212.199.796,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat		256.122.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	144.678.396,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat		227.412.499,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu*	-			100 Persen	58.774.524.081,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat.	-	12.214.169.632,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	58.501.715.489,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat.		11.654.559.412,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	136.827.996,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat.		289.475.220,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	135.980.596,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur dan Masyarakat.		270.135.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu*	-			100 Persen	6.730.029.788,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	-	10.318.518.752,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		255.396.570,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	468.036.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		1.181.594.480,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.300.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		2.033.482.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	109.798.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		226.044.060,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	561.425.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		191.928.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4.290.269.188,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		6.430.073.642,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu*	-			100 Persen	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	-	1.924.532.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		1.924.532.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas*	-			100 Persen	83.914.588,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	-	3.305.227.485,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.996.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	73.918.588,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		2.395.227.485,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik*	-			100 Persen	1.325.681.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali	-	5.467.508.085,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				61 Unit	1.325.681.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali		4.525.127.085,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali		196.504.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali		745.877.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD*	-			100 Persen	60.183.273.424,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali	-	64.549.655.949,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				55 Orang/ Bulan	59.646.050.828,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali		62.253.485.207,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				385 Paket	372.442.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali		1.907.481.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	164.780.596,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali		388.688.792,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD*	-			100 Persen	1.677.692.216,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat.	-	2.115.041.948,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				30 Laporan	213.995.080,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat.		230.870.464,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				48 Laporan	1.463.697.136,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat.		1.884.171.484,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)***	**-**			**100 Persen**	**138.753.925.966,00**						**-**	**172.727.912.515,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD*	-			100 Persen	40.784.304.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali	-	48.462.827.597,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1.810.067.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali		2.087.521.597,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				21 Dokumen	13.723.847.588,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali		16.819.598.193,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				12 Dokumen	24.690.057.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali		28.620.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	560.331.192,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali		935.332.807,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD*	-			100 Persen	8.272.638.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali	-	8.818.477.266,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1.649.215.796,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali		1.797.645.928,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1.655.855.796,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali		1.738.649.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1.655.855.796,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali		1.804.883.528,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1.655.855.796,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali		1.738.649.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1.655.855.796,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi serta masyarakat Bali		1.738.649.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD*	-			100 Persen	32.432.250.698,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali	-	39.282.971.373,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	7.852.262.514,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali		9.456.644.727,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	7.624.688.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali		9.188.420.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	7.041.840.492,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali		9.461.832.683,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	8.295.079.192,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali		9.363.487.723,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1.618.380.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Masyarakat Bali		1.812.585.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD*	-			100 Persen	13.090.139.752,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat	-	15.342.862.292,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1.010.513.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	2.310.547.588,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		4.262.733.371,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				18 Orang	3.240.820.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		3.499.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	900.635.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		972.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1.995.487.992,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		2.942.445.847,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				60 Dokumen	3.632.134.372,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan , Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan masyarakat		3.666.483.074,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD*	-			100 Persen	36.936.713.180,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat/ konstituen sesuai dapil (daerah pemilihan) Pimpinan dan Anggota DPRD	-	42.972.483.990,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	821.919.592,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat/ konstituen sesuai dapil (daerah pemilihan) Pimpinan dan Anggota DPRD		3.581.088.066,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	1.748.545.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat/ konstituen sesuai dapil (daerah pemilihan) Pimpinan dan Anggota DPRD		1.905.991.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	34.366.247.688,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat/ konstituen sesuai dapil (daerah pemilihan) Pimpinan dan Anggota DPRD		37.485.404.484,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD*	-			100 Persen	817.247.392,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Bali	-	890.768.596,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				3 Laporan	817.247.392,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Bali		890.768.596,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD*	-			100 Persen	6.420.631.592,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat	-	16.957.521.401,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				10 Dokumen	2.613.340.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat		11.149.469.745,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				180 Laporan	434.783.192,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat		2.662.491.656,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				6 Dokumen	3.372.507.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pejabat Negara, Aparatur dan Masyarakat		3.145.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**28.485.902.928,00**							**32.635.208.898,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.485.902.928,00**							**32.635.208.898,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**28.485.902.928,00**							**32.635.208.898,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**87.17 Nilai**			**87,13 Nilai**	**21.737.061.428,00**						**87.15 Nilai**	**22.888.346.356,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	30 Dokumen			30 Dokumen	375.098.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	30 Dokumen	412.608.809,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			10 Dokumen	241.192.580,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	10 Dokumen	238.546.645,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	13.360.100,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Dokumen	18.919.802,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	13.360.100,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Dokumen	18.919.802,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	12.548.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Dokumen	17.005.824,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	10.071.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Dokumen	15.722.498,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	41.004.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	4 Laporan	47.995.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			12 Laporan	43.561.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	12 Laporan	55.498.790,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3 Jenis			3 Jenis	15.350.204.436,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	3 Jenis	16.908.435.209,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan			71 Orang/ Bulan	15.018.973.568,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	71 Orang/ Bulan	16.520.870.414,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 Dokumen			540 Dokumen	197.625.480,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	540 Dokumen	240.597.295,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen			14 Dokumen	133.605.388,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	14 Dokumen	146.967.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	48 Jenis			48 Jenis	1.316.586.172,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	48 Jenis	1.352.045.692,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	47.499.496,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Paket	57.367.489,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			6 Paket	341.491.396,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	6 Paket	294.535.838,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	105.577.096,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	3 Paket	126.942.610,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	49.542.596,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	2 Paket	85.258.957,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	75.004.796,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	12 Dokumen	90.648.902,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	103.565.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	12 Laporan	103.476.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	593.904.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	12 Laporan	593.815.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan*	3 Jenis			3 Jenis	246.661.896,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	3 Jenis	107.446.502,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	199.650.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	2 Paket	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	47.011.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Unit	57.446.502,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	9 Laporan			9 Laporan	970.590.932,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	9 Laporan	983.447.216,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	40.553.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Laporan	40.776.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	337.165.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	4 Laporan	347.076.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	592.871.140,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	4 Laporan	595.594.320,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*	177 Unit			177 Unit	3.477.919.512,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	177 Unit	3.124.362.928,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit			31 Unit	776.592.664,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	31 Unit	1.183.736.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit			140 Unit	168.215.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	140 Unit	185.626.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			6 Unit	2.533.110.952,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	6 Unit	1.755.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku***	**100 Persen**			**100 persen**	**4.248.270.636,00**						**100 Persen**	**6.614.353.965,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi*	2 Dokumen			2 Dokumen	2.199.877.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	2 Dokumen	3.460.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara			1 Berita Acara	84.999.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Berita Acara	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara			1 Berita Acara	194.008.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	2 Berita Acara	210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen			2 Dokumen	1.920.869.476,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	3 Dokumen	3.125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah*	7 Dokumen			7 Dokumen	617.234.984,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	905.652.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen			6 Dokumen	595.262.184,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	874.445.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku			1 Buku	21.972.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	1 Buku	31.207.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku*	31 Dokumen			40 Dokumen	1.198.934.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	40 Dokumen	1.872.605.365,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan			8 Laporan	390.555.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	8 Laporan	656.371.881,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan			5 Laporan	576.644.780,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	5 Laporan	846.585.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	18 Dokumen			27 Dokumen	231.734.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	27 Dokumen	369.648.224,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Data SIPD*	1 Dokumen			1 Dokumen	232.222.996,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	376.096.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen			1 Dokumen	232.222.996,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	376.096.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.500.570.864,00**						**100 Persen**	**3.132.508.577,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	1 Dokumen			1 Dokumen	824.373.352,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	1.093.344.484,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	156.793.492,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	157.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan			7 Laporan	137.142.892,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	7 Laporan	127.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen			3 Dokumen	268.161.584,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	2 Dokumen	506.407.077,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan			5 Laporan	262.275.384,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	5 Laporan	302.037.407,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA*	4 Dokumen			4 Dokumen	941.313.456,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	4 Dokumen	1.150.977.911,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	255.522.584,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	281.074.948,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan			1 Laporan	292.650.584,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Laporan	504.048.964,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	95.321.096,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	144.161.323,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan			1 Laporan	297.819.192,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Laporan	221.692.676,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan*	1 Dokumen			1 Dokumen	734.884.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	888.186.182,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	305.836.676,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	369.435.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan			1 Laporan	80.427.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Laporan	97.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	266.633.580,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	324.066.604,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan			1 Laporan	81.986.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Laporan	97.334.578,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**1.544.834.608.521,00**							**1.523.061.406.007,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.544.834.608.521,00**							**1.523.061.406.007,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.544.834.608.521,00**							**1.523.061.406.007,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**24.841.905.725,00**						**-**	**26.150.845.427,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu*	-			9 dokumen	37.005.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	38.855.775,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	37.005.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		38.855.775,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu*	-			2244 dokumen	18.981.894.907,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	20.020.989.652,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang/ Bulan	18.633.263.107,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		19.654.926.262,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2200 Dokumen	348.631.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		366.063.390,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu*	-			1 Tahun	1.668.372.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.756.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.372.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		18.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	750.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		787.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	600.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		630.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	65.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		70.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		210.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu*	-			1 Tahun	288.300.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	303.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	285.300.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu*	-			1 Tahun	3.866.332.818,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	4.032.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	714.332.818,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		720.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	12.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	140.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		147.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3.000.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.518.609.471.396,00**						**-**	**1.495.457.897.610,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu*	-			72 dokumen	1.920.977.292,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	2.017.026.157,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	67.645.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		71.027.880,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	58.436.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		61.357.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	347.253.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		364.616.385,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	80.488.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		84.512.820,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	711.407.696,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		746.978.081,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	655.745.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		688.533.191,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu*	-			27 SK	943.784.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	990.973.410,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				9 Laporan	170.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		178.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				9 Laporan	129.626.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		136.108.140,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				9 Laporan	144.157.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		151.365.270,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				2 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		525.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah laporan perbendaharaan disusun tepat waktu*	-			6 dokumen	627.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	658.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	627.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		658.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu*	-			2 dokumen	533.949.239,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	557.278.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	387.884.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		407.278.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	146.065.239,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu*	-			4 dokumen	1.513.514.203.665,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.490.111.234.993,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	2.506.377.057,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.423.390.408,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	271.149.787.266,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		246.829.805.243,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	50.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		50.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1.189.858.039.342,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.189.858.039.342,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan implementasi SIPD*	-			12 dokumen	1.069.557.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.123.034.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	1.069.557.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.123.034.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.383.231.400,00**						**-**	**1.452.662.970,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu*	-			1 dokumen	1.383.231.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.452.662.970,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	141.353.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		148.421.490,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	71.877.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		75.741.480,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	350.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		367.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	820.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		861.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						**3.339.114.100,00**							**3.507.569.805,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.176.321.500,00**							**3.336.637.575,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.176.321.500,00**							**3.336.637.575,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**576.321.500,00**						**-**	**606.637.575,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu*	-			1 Tahun	158.121.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	167.527.575,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.670.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		43.754.235,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.999.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.449.790,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.410.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		12.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	93.251.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		97.913.550,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu*	-			1 Tahun	58.200.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	61.110.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.260.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	57.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		59.850.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu*	-			1 Tahun	360.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	378.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	360.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		378.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**2.600.000.000,00**						**-**	**2.730.000.000,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Realisasi PAD dari Pemanfaatan BMD*	-			43 Persen	2.600.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	2.730.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				6 Laporan	2.600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.730.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**162.792.600,00**							**170.932.230,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**162.792.600,00**							**170.932.230,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**162.792.600,00**						**-**	**170.932.230,00**	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu*	-			1 Tahun	162.792.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	170.932.230,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	147.532.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		154.909.230,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15.260.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		16.023.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**136.862.495.850,00**							**136.922.888.798,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**136.862.495.850,00**							**136.922.888.798,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**50.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	50.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	**-**						**136.812.495.850,00**							**136.872.888.798,00**	
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***[deleted]*** ***Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota*** ***Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**15.025.800,00**						**-**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina* *Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen 100 Persen	15.025.800,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				2 Laporan	15.025.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.123.109.800,00**						**-**	**1.284.229.500,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah* *Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD pada UPTD PPRD Bapenda* *Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yag ditetapkan*	-			60,45 Persen 100 Persen 100 Persen	1.123.109.800,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.284.229.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	340.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		506.755.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	302.809.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		385.828.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	175.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		141.625.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	260.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		213.116.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	45.300.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		36.903.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**135.674.360.250,00**						**-**	**135.488.659.298,00**	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	945.627.104,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	767.136.703,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.994.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.740.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	37.913.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	37.913.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	19.045.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		19.045.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.999.917.640,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.256.751.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		391.729.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				409 Unit	2.549.917.640,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.741.193.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.239.828.780,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	9.465.290.993,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	115.845.396,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		115.476.848,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.957.642.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	2.471.478.390,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.428.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.437.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	13.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		14.985.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	393.388.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		806.571.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.239.828.780,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	9.465.290.993,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	1.300.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.946.697.553,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	125.493.431.026,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	119.490.088.012,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				402 Orang/ Bulan	125.493.431.026,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		119.490.088.012,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	37.913.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	37.913.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	18.867.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		18.867.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	945.627.104,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	767.136.703,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	387.433.104,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		387.433.104,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.239.828.780,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	9.465.290.993,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	685.345.376,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.233.502.088,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.957.642.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	2.471.478.390,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.727.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		6.927.590,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	233.891.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		200.124.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	75.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1.231.707.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.365.432.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.239.828.780,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	9.465.290.993,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				43 Unit	1.281.594.192,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.313.069.096,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	857.043.816,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		856.545.408,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	945.627.104,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	767.136.703,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	555.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		375.963.599,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.999.917.640,00			-	-	-	-	3.256.751.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	450.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.123.829.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG						**5.487.795.260,00**							**5.694.574.084,00**	
	X	**NON URUSAN**						**1.446.763.348,00**							**1.746.891.524,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**225.000.000,00**							**225.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**225.000.000,00**						**-**	**225.000.000,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	25.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	200.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	200.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		200.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.041.031.912,00**							**3.947.682.560,00**	
	-	**-**						**4.041.031.912,00**							**3.947.682.560,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**4.041.031.912,00**						**-**	**3.947.682.560,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	4.041.031.912,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.947.682.560,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	1.765.255.840,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.713.557.920,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				5000 Dokumen SSPD	2.275.776.072,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.234.124.640,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	X	**NON URUSAN**						**1.446.763.348,00**							**1.746.891.524,00**	
	-	**-**						**1.221.763.348,00**							**1.521.891.524,00**	
1.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.221.763.348,00**						**-**	**1.521.891.524,00**	
	-	Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	9.300.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	18.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.300.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		18.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	784.863.648,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	911.789.624,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	24.810.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		32.120.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	530.790.752,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		567.717.376,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	13.520.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		38.140.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	161.559.296,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		202.774.348,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	54.183.600,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		71.037.900,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	221.992.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	291.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	220.000.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		288.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.992.000,00	- Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	205.607.700,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	301.101.900,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	53.850.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		88.800.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	5.068.800,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.760.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	11.937.500,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.914.800,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	128.995.000,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		179.505.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5.756.400,00	- Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.121.900,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA						**1.973.358.180,00**							**2.021.669.838,00**	
	X	**NON URUSAN**						**925.574.156,00**							**966.152.326,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**175.000.000,00**							**174.500.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**175.000.000,00**						**-**	**174.500.000,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	25.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	150.000.000,00			-	-	-	-	149.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		149.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.047.784.024,00**							**1.055.517.512,00**	
	-	**-**						**1.047.784.024,00**							**1.055.517.512,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**903.792.024,00**						**-**	**867.057.512,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	903.792.024,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	867.057.512,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	433.758.064,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		421.339.480,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				14518 Dokumen SSPD	470.033.960,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		445.718.032,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
2.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**143.992.000,00**						**-**	**188.460.000,00**	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	143.992.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	188.460.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	142.000.000,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		185.460.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.992.000,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	X	**NON URUSAN**						**925.574.156,00**							**966.152.326,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	**-**						**750.574.156,00**							**791.652.326,00**	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	134.672.700,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	188.342.150,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.665.600,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.115.500,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	101.084.000,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		138.276.650,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	13.365.000,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		21.880.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	615.901.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	603.310.176,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	470.939.960,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		421.288.032,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	10.050.400,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		11.877.400,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	102.534.496,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		123.945.344,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	3.530.000,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.520.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.846.600,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		37.679.400,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	134.672.700,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	188.342.150,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.158.100,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		18.750.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.400.000,00	- Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.320.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN						**2.289.200.115,00**							**2.428.012.884,00**	
	X	**NON URUSAN**						**1.268.821.152,00**							**1.476.447.476,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**243.950.000,00**							**243.950.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**243.950.000,00**						**-**	**243.950.000,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	25.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.000.000,00	- Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	218.950.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	218.950.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	218.950.000,00	- Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		218.950.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.020.378.963,00**							**951.565.408,00**	
	-	**-**						**1.020.378.963,00**							**951.565.408,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.018.386.963,00**						**-**	**948.565.408,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.018.386.963,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	948.565.408,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	546.328.003,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		494.600.928,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12620 Dokumen SSPD	472.058.960,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		453.964.480,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
2.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**1.992.000,00**						**-**	**3.000.000,00**	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	1.992.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.992.000,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	X	**NON URUSAN**						**1.268.821.152,00**							**1.476.447.476,00**	
	-	**-**						**1.024.871.152,00**							**1.232.497.476,00**	
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	656.153.052,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	729.853.676,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29.791.000,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		38.900.800,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	165.718.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	236.177.600,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.500.000,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.388.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.366.700,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		7.920.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.491.500,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		12.074.700,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1074 Dokumen	2.996.000,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.716.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	656.153.052,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	729.853.676,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	217.014.792,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		264.139.696,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	25.378.300,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		31.788.700,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	378.858.960,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		378.964.480,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	5.110.000,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		16.060.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	165.718.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	236.177.600,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	13.365.000,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		21.880.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	129.998.900,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		181.198.900,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	203.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	266.466.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	203.000.000,00	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		266.466.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG						**4.610.861.242,00**							**4.808.094.052,00**	
	X	**NON URUSAN**						**1.461.013.690,00**							**1.745.953.620,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.275.758.740,00**							**1.482.802.720,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**1.275.758.740,00**						**-**	**1.482.802.720,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	46.975.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	61.180.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	21.975.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		36.180.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	428.500.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	500.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	228.500.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		300.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		200.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan*	-			100 %	800.283.740,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	921.622.720,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.985.100,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		29.999.400,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	142.056.096,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		176.053.048,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	19.920.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		55.420.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	575.922.544,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		598.670.272,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				62 Unit	39.400.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		61.480.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.149.847.552,00**							**3.062.140.432,00**	
	-	**-**						**3.149.847.552,00**							**3.062.140.432,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**3.147.855.552,00**						**-**	**3.059.140.432,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	3.147.855.552,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.059.140.432,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	2.174.183.528,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.124.644.368,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				288 Dokumen SSPD	973.672.024,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		934.496.064,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
2.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**1.992.000,00**						**-**	**3.000.000,00**	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	1.992.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.992.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	**NON URUSAN**						**1.461.013.690,00**							**1.745.953.620,00**	
	-	**-**						**185.254.950,00**							**263.150.900,00**	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	185.254.950,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	263.150.900,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	132.478.800,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		184.076.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.600.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.790.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	5.772.500,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.600.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	31.321.650,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		41.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.082.000,00	- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		7.184.900,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR						**4.912.966.512,00**							**5.112.248.248,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.245.419.368,00**							**3.035.412.944,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.245.419.368,00**							**3.035.412.944,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah***	**-**			**60.62 %**	**3.245.419.368,00**						**-**	**3.035.412.944,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (5)*	-			100 %	3.245.419.368,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.035.412.944,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				2 Laporan	2.897.508.096,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.703.327.808,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				194053 Dokumen SSPD	347.911.272,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		332.085.136,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X	**NON URUSAN**						**1.667.547.144,00**							**2.076.835.304,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.667.547.144,00**							**2.076.835.304,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**1.667.547.144,00**						**-**	**2.076.835.304,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	308.283.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	440.374.500,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.819.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.157.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	134.944.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		186.917.300,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	82.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		108.828.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.212.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		6.424.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	35.515.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		68.994.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	21.793.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		36.054.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	583.492.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	701.486.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.992.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.496.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	381.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		500.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	200.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		199.990.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*ersentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan*	-			100 %	775.771.744,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	934.974.804,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	47.986.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		62.702.400,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	133.421.992,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		152.354.996,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	6.640.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		18.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	500.790.752,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		598.307.408,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	86.932.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		103.110.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR						**3.230.507.676,00**							**3.408.557.788,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.980.177.320,00**							**1.951.010.160,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.980.177.320,00**							**1.951.010.160,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**1.992.000,00**						**-**	**3.000.000,00**	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	1.992.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.992.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah***	**-**			**60.62 %**	**1.978.185.320,00**						**-**	**1.948.010.160,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (6)*	-			100 %	1.978.185.320,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.948.010.160,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	1.187.133.296,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.173.287.648,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12176 Dokumen SSPD	791.052.024,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		774.722.512,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X	**NON URUSAN**						**1.250.330.356,00**							**1.457.547.628,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.250.330.356,00**							**1.457.547.628,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**1.250.330.356,00**						**-**	**1.457.547.628,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	218.139.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	287.581.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.189.700,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		17.247.500,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	139.139.800,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		177.714.700,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.210.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		17.159.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.400.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		23.760.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16.200.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		26.700.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	375.800.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	427.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	176.000.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		228.400.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	199.800.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		199.100.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan*	-			100 %	656.390.856,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	742.466.428,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	31.246.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		40.727.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	86.400.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		116.447.700,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	10.750.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		29.130.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	493.224.856,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		515.101.528,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	34.770.000,00	- Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		41.060.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI						**2.076.577.948,00**							**2.140.714.754,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.120.119.192,00**							**1.085.364.096,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.120.119.192,00**							**1.085.364.096,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah***	**-**			**60.62 %**	**1.120.119.192,00**						**-**	**1.085.364.096,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (7)*	-			100 %	1.120.119.192,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.085.364.096,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	590.552.544,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		565.470.272,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				10 Dokumen SSPD	529.566.648,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		519.893.824,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X	**NON URUSAN**						**956.458.756,00**							**1.055.350.658,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**956.458.756,00**							**1.055.350.658,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**956.458.756,00**						**-**	**1.055.350.658,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	149.333.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	200.049.730,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.088.400,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.995.700,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	104.198.800,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		142.608.830,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.946.200,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		6.477.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.600.000,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.748.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4.500.000,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		7.220.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	252.992.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	286.020.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.992.000,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.020.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	101.000.000,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		132.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		150.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan*	-			100 %	554.133.356,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	569.280.928,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.600.000,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		46.525.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	71.991.000,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		72.185.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	6.370.000,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		16.600.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	421.224.856,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		423.740.928,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	8.947.500,00	- Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.229.600,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG						**2.461.015.248,00**							**2.563.300.476,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.167.181.712,00**							**1.130.175.408,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.167.181.712,00**							**1.130.175.408,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**181.992.000,00**						**-**	**201.000.000,00**	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	181.992.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	201.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.992.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	180.000.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		198.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah***	**-**			**60.62 %**	**985.189.712,00**						**-**	**929.175.408,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (8)*	-			100 %	985.189.712,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	929.175.408,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	522.130.752,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		482.570.928,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				10.963 Dokumen SSPD	463.058.960,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		446.604.480,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X	**NON URUSAN**						**1.293.833.536,00**							**1.433.125.068,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.293.833.536,00**							**1.433.125.068,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**1.293.833.536,00**						**-**	**1.433.125.068,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	193.895.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	272.982.800,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.697.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.796.800,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	108.999.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		152.065.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.999.600,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.554.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.999.500,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.139.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.200.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		6.048.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	44.000.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		72.380.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	199.800.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	179.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	199.800.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		179.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan*	-			100 %	900.138.436,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	981.142.268,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.504.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		49.049.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	152.996.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		202.933.800,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	7.500.000,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.610.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	681.054.336,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		683.623.168,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	21.084.100,00	- Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		24.926.100,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM						**1.780.119.100,00**							**1.889.271.096,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**879.019.024,00**							**835.292.512,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**879.019.024,00**							**835.292.512,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**1.992.000,00**						**-**	**3.000.000,00**	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	1.992.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.992.000,00	- Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah***	**-**			**60.62 %**	**877.027.024,00**						**-**	**832.292.512,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (9)*	-			100 %	877.027.024,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	832.292.512,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	539.574.856,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		508.777.376,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				13155 Dokumen SSPD	337.452.168,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		323.515.136,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X	**NON URUSAN**						**901.100.076,00**							**1.053.978.584,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**901.100.076,00**							**1.053.978.584,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai evaluasi manajemen kinerja***	**-**			**88 Niai Sakip**	**901.100.076,00**						**-**	**1.053.978.584,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum yang tersedia*	-			100 %	165.186.100,00			-	-	-	-	225.343.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2.062.800,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.816.300,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	108.995.900,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		151.229.700,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	25.000.000,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5.499.900,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		7.160.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	2.647.500,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.307.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.320.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	18.480.000,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		30.510.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia*	-			100 %	280.200.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	312.800.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	103.000.000,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		135.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	177.200.000,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		177.800.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan*	-			100 %	455.713.976,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	515.835.584,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33.495.800,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		43.620.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	89.861.896,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		107.080.448,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	5.680.000,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		17.040.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	315.429.480,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		334.835.136,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	11.246.800,00	- Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		13.260.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**39.080.621.739,00**							**42.520.709.712,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**39.080.621.739,00**							**42.520.709.712,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**37.967.476.655,00**							**41.351.892.240,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**86 Nilai**	**28.348.157.303,00**						**-**	**28.721.465.484,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana*	-			7 Jenis	122.719.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	122.870.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.168.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.250.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	231.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		231.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	231.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		231.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	83.989.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		83.989.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	31.518.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		28.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang disusun*	-			3 Laporan	24.891.065.735,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	25.133.219.762,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				138 Orang/ Bulan	24.891.065.735,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		25.133.219.762,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana*	-			1 Jenis	210.860.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	304.016.104,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	210.860.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		304.016.104,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana*	-			6 Layanan	716.324.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	740.632.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.015.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		15.101.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	158.451.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		158.464.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.232.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		99.275.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.745.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		9.798.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4.800.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	429.080.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		453.194.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana*	-			1 Layanan	53.661.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	113.768.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	53.661.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		113.768.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana*	-			3 Jenis	1.187.068.408,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.224.695.504,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	960.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	253.600.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		253.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	932.508.408,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		970.095.504,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana*	-			4 jenis	1.166.458.160,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.082.262.864,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	758.645.160,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		649.443.864,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	221.113.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		221.119.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	136.700.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		136.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Indeks Profesionalitas ASN Instansi***	**-**			**59,00 Nilai**	**9.619.319.352,00**						**-**	**12.630.426.756,00**	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana*	-			44 sineJJenis	6.322.791.212,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	6.322.792.008,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	10.386.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		10.387.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	5.987.743.440,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.987.743.736,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	143.597.688,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		143.597.688,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	181.063.284,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		181.063.584,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik*	-			3 Jenis	381.525.788,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	448.447.788,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1 Dokumen	82.439.996,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		82.439.996,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				12 Laporan	125.088.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		125.088.896,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	173.996.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		240.918.896,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan*	-			3 Jenis	2.258.502.976,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	5.168.793.584,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1.981.124.192,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.391.414.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	113.737.192,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		613.737.792,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				12 Dokumen	163.641.592,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		163.641.792,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana*	-			4 Jenis	656.499.376,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	690.393.376,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	133.899.792,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		167.779.792,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				800 Orang	350.137.792,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		350.141.792,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1200 Orang	141.765.792,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		141.775.792,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	30.696.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		30.696.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1.113.145.084,00**							**1.168.817.472,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi***	**-**			**100 persen**	**1.113.145.084,00**						**-**	**1.168.817.472,00**	
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi*	-			4 dokumen	1.113.145.084,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.168.817.472,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				3 Dokumen	335.965.896,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		294.093.896,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				85 Orang	469.929.196,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		567.472.984,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				20 Dokumen	307.249.992,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		307.250.592,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI						**1.220.695.968,00**							**1.220.696.368,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.220.695.968,00**							**1.220.696.368,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**1.220.695.968,00**							**1.220.696.368,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**86 Nilai**	**518.553.368,00**						**-**	**518.248.468,00**	
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana*	-			2 Jenis	52.381.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	53.657.500,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	11.815.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		13.091.500,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	40.566.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		40.566.000,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana*	-			1 Layanan	75.537.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	73.959.000,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	75.537.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		73.959.000,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana*	-			1 Jenis	300.527.168,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	300.527.168,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	300.527.168,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		300.527.168,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana*	-			2 Layanan	90.108.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	90.104.800,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	78.218.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		78.214.800,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	11.890.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		11.890.000,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Indeks Profesionalitas ASN Instansi***	**-**			**59.00 Nilai**	**702.142.600,00**						**-**	**702.447.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN*	-			1 Jenis	702.142.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	702.447.900,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				14 Dokumen	702.142.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		702.447.900,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA						**6.959.832.000,00**							**6.959.832.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.959.832.000,00**							**6.959.832.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**6.959.832.000,00**							**6.959.832.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**86 Nilai**	**6.959.832.000,00**						**-**	**6.959.832.000,00**	
	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia*	-			100 Persen	6.959.832.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	6.959.832.000,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	6.959.832.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.959.832.000,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**23.374.352.871,00**							**25.721.788.157,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**23.374.352.871,00**							**25.721.788.157,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**9.796.155.700,00**							**10.785.773.250,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**79 Nilai**	**25.000.000,00**						**-**	**27.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			2 Unit	25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	27.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	25.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan***	**-**			**100 Persen**	**9.771.155.700,00**						**-**	**10.758.273.250,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	-			13 Laporan	8.446.157.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota	-	9.290.773.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				5 Laporan	7.860.329.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota		8.646.361.900,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa				1 Laporan	249.999.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota		275.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				6 Dokumen	335.828.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota		369.411.900,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	-			10 Dokumen	1.324.998.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi	-	1.467.499.450,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				5 Dokumen	380.000.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi		418.000.770,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				3 Dokumen	900.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi		1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	22.499.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi		24.749.340,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	22.499.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi		24.749.340,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	**-**						**13.578.197.171,00**							**14.936.014.907,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	-			13 Laporan	67.841.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	74.626.200,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				1 Laporan	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				1 Rekomendasi	67.841.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		74.626.200,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	-			100 Persen	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				0 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				0 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				0 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	-			10 Dokumen	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				0 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	-			4 Laporan	299.998.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	-	330.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				2 Laporan	99.999.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi		110.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	64.999.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi		71.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	134.999.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi		148.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
1.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**79 Nilai**	**13.210.357.371,00**						**-**	**14.531.388.707,00**	
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			51 Orang/ Bulan	10.148.440.607,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	11.163.270.028,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/ Bulan	10.148.440.607,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		11.163.270.028,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan*	-			1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen	517.537.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	569.300.208,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.952.700,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		24.153.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	198.912.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		218.803.578,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	107.495.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		118.244.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	24.180.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		26.598.330,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		16.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	149.997.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		165.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			2 Unit	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan*	-			3 Laporan 100 Persen	479.009.272,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	526.910.380,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	152.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		167.200.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	324.009.272,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		356.410.380,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			15 Unit	2.019.099.192,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.221.009.111,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	850.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		935.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.169.099.192,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.286.009.111,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			17 Dokumen	46.271.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	50.898.980,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	11.011.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		12.113.310,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	35.259.100,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		38.785.670,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGHUBUNG						**8.678.749.909,00**							**10.959.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.678.749.909,00**							**10.959.000.000,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**6.068.364.225,00**							**7.107.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**82 nilai**	**3.054.638.865,00**						**-**	**3.407.000.000,00**	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat*	-			100 persen	4.876.800,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	7.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4.876.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		7.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan*	-			100 persen	3.049.762.065,00			-	-	-	-	3.400.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/ Bulan	3.049.762.065,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.400.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung***	**-**			**90 indeks**	**3.013.725.360,00**						**-**	**3.700.000.000,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung*	-			90 indeks	3.013.725.360,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.700.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				12 Laporan	45.569.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				12 Laporan	242.982.072,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	2.725.173.888,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	**-**						**2.610.385.684,00**							**3.852.000.000,00**	
1.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.610.385.684,00**						**-**	**3.852.000.000,00**	
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.074.385.648,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	879.877.176,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.208.686.136,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.515.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	920.690.136,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	278.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.996.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	99.827.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				33 Unit	99.827.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	227.486.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	387.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	74.990.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.499.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	85.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		90.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	49.996.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.999.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.074.385.648,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	94.508.472,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
		INSPEKTORAT						**37.136.745.394,00**							**45.661.920.633,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**37.136.745.394,00**							**45.661.920.633,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**37.136.745.394,00**							**45.661.920.633,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Inspektorat)***	**-**			**87 Persen**	**29.321.068.306,00**						**-**	**33.128.870.633,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu*	-			100 Persen	130.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	130.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	80.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu*	-			100 Persen	21.068.568.090,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	22.794.253.558,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/ Bulan	21.068.568.090,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		22.794.253.558,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi yang terpenuhi*	-			100 Persen	1.839.441.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.569.264.955,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.999.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	118.473.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		100.472.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	169.979.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		166.696.496,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.995.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		26.520.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	44.996.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		46.675.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	80.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		85.560.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.349.998.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.093.341.259,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana*	-			100 Persen	1.660.347.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.492.465.545,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1.660.347.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.492.465.545,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang yang terpenuhi*	-			100 Persen	680.097.876,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	833.337.490,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.100.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	275.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		362.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	399.997.876,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		466.137.490,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 Persen	3.942.613.440,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	6.309.549.085,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	2.149.988.064,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.076.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.486.181.792,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.757.769.085,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	306.443.584,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		475.280.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota***	**-**			**100 Persen**	**4.514.127.136,00**						**-**	**7.929.510.000,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal*	-			100 Persen	3.049.847.956,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	5.368.544.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 Laporan	449.999.884,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		625.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				15 Laporan	249.999.992,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				45 Laporan	199.999.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		324.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 Laporan	299.999.596,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		357.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				58 Laporan	899.848.892,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.098.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	449.999.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				58 Dokumen	499.999.992,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		764.044.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu*	-			100 Persen	1.464.279.180,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	2.560.965.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	149.999.992,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		169.120.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	1.314.279.188,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.391.845.200,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***[deleted] Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan***	**-**			**100 Persen**	**3.301.549.952,00**						**-**	**4.603.540.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan*	-			100 Persen	1.601.557.364,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	2.481.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				105 Rekomendasi	549.999.988,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.081.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	1.051.557.376,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan*	-			100 Persen	1.699.992.588,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	2.122.140.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				12 Perangkat Daerah	549.999.788,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		683.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				33 Perangkat Daerah	299.999.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		381.280.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	700.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		848.640.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 Perangkat Daerah	149.993.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		209.120.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**200.351.521.521,00**							**45.269.927.768,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**200.351.521.521,00**							**45.269.927.768,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**200.351.521.521,00**							**45.269.927.768,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	**-**			**83 Nilai**	**11.995.542.565,00**						**-**	**13.198.168.092,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*	-			8 Dokumen	50.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	15.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	9.926.772.925,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	9.920.786.427,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/ Bulan	9.926.772.925,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.920.786.427,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	340.564.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	477.712.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	14.989.100,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	78.585.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		99.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	80.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	35.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	126.990.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		219.912.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase paket pengadaan selesai*	-			100 %	137.796.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	188.198.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	137.796.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		188.198.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi*	-			100 %	810.222.440,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	887.099.616,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.960.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	110.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	693.262.440,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		762.099.616,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah terpelihara*	-			100 %	730.186.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.654.372.049,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	544.600.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		581.976.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	12.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	25.640.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		197.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	133.456.900,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		833.465.649,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	14.490.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		29.930.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila***	**-**			**90 %**	**1.512.428.684,00**						**-**	**3.561.995.144,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	-			100 %	1.512.428.684,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.561.995.144,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	712.428.684,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.961.995.144,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				36 Orang	800.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik***	**-**			**80 %**	**178.156.029.440,00**						**-**	**18.000.000.000,00**	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*	-			100 %	178.156.029.440,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	18.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	178.156.029.440,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		18.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Ormas yang terdata***	**-**			**80 %**	**50.000.000,00**						**-**	**332.500.000,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	-			100 %	50.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	332.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		332.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah***	**-**			**80 %**	**7.425.091.544,00**						**-**	**8.854.657.544,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	-			100 %	7.425.091.544,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	8.854.657.544,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	7.425.091.544,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.854.657.544,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial***	**-**			**90 %**	**1.212.429.288,00**						**-**	**1.322.606.988,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	-			100 %	1.212.429.288,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.322.606.988,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	212.429.288,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		422.606.988,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				12 Dokumen	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**5.983.126.584.360,00**							**6.182.843.840.064,00**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada target capaian dokumen RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2023, seiring dengan ditetapkannya perubahan status COVID-19 menjadi endemi, perekonomian nasional dan Provinsi Bali berangsur-angsur terus bertambah baik. Meskipun dibayang-bayangi oleh resesi yang diramalkan akan dihadapi sebagian negara di dunia, perekonomian nasional dan perekonomian Provinsi Bali diperkirakan tidak akan mengalami dampak yang signifikan.

Optimisme yang dibangun oleh pemerintah akan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah di tahun 2023 dan tahun 2024 tentu tercermin pada (salah satunya) penetapan target-target ekonomi makronya. Adapun target makro ekonomi Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Bali Tahun 2024

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET 2024
1	Angka Kemiskinan	Persen	4.53	4.07
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.05	5,75 (5,25-6,25)
3	Angka Pengangguran	Persen	4.8	2.57
4	Indeks Gini	Nilai	0.363	0.366
5	Laju Inflasi	Persen	6.44	3±1
6	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		60.45
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76.44	76.50
8	Angka umur harapan hidup	Tahun	72.6	72.60
9	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9.39	9.8
10	Indeks Daya Saing Krama	Nilai	69.09	63.189

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET 2024
	Bali			
11	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai		67.97
16	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Nilai	70,89	71.81
17	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	(belum rilis)	12.37
18	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen		92,45
19	Persentase Energi Baru Terbarukan	Persen	1,26	8,45
20	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen		100
21	Persentase Desa Adat Mandiri	Persen		14.06
22	Indeks Pemajuan Tradisi	Persen		15.00
23	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Nilai		65
24	Indeks Provinsi Hijau	Nilai		67.05
25	Indeks Infrastruktur	Nilai		73.75
26	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai		76.18
27	Rasio Konektivitas Transportasi	Nilai	(belum rilis)	0.86
28	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai		79.85
29	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Nilai		96.50
30	Indeks demokrasi	Nilai	(belum rilis)	76.00
31	Indeks resiko bencana	Nilai		115.14
32	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	(BB, nilai RB belum rilis)	74.00
33	Indeks Merit Sistem	Nilai		0.82
34	Nilai AKIP	Nilai		81
35	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
36	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	N/A	88.5
37	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	Nilai		82.5
38	Indeks Inovasi Daerah	Nilai		65.75

Sumber: RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Untuk lebih rincinya, penetapan target capaian kinerja Pemerintahan Provinsi Bali dapat dilihat dalam tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,84	5,75 (5,25-6,25)	5,85 (5,35-6,35)
2	Laju Inflasi	Persen	6,20	3±1	3±1
3	PDRB per kapita	Jumlah	55,54 juta	56 - 61 juta	59- 64 juta
4	Indeks Gini	Persen	0,362	0.366	0.362
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	4,53	4.07	3.97
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	76.44	76.5	76.65
7	Angka Melek Huruf	Persen	95.53	95.8	97
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9.39	9.8	10.6
9	Angka usia harapan hidup	tahun	72.6	72.6	72.8
10	Persentase balita gizi buruk	Persen	0.2	1.8	1.6
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	1.8	2.7	2.5
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	2.7	2,5
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Jumlah	2,738,539	2,709,549	2,987,273
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	76.86	77.22	85.13
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4.8	2.57	1.41
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	88.5	89.5
17	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	88.3	92.90	96.00
19	Penguatan cadangan pangan	Persen	20	2.30	4.60
20	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	9,93%	1.59	1.61
21	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	1,65	1.74	1.76
22	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	1,47	2.14	2.16
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	-	4.95	4.97

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Nilai Tukar Petani	Persen	95.43	98.00	102.00
2	Angka kriminalitas	Kasus	1,533	1,850	1500
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	17,93	18.56	19.34
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	14,68	10.62	10.64
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	**Pendidikan**				
1.1	Angka Partisipasi Kasar				
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persen	100.51	104.68	105
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan				
1.2.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	32.77	100	100
1.3	Angka Partisipasi Murni				
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	74.00	85.00	90.00
1.4	Angka Partisipasi Sekolah				
1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	74.00	100	100
1.5	Angka Putus Sekolah				
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0.03	0.18	0.12
1.6	Angka Kelulusan				
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	99.98	99.82	99.88
1.7	Angka Transisi (AT)				
1.7.1	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persen	94.14	99.5	99.8
1.8	Fasilitas Pendidikan				
1.8.1	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	71.72	98.35	98.45
1.9	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persen	63.38	23.98	24
1.10	Rasio Guru	Persen		67	67.08

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	terhadap murid pendidikan menengah				
	- SMA/MA (per 1000 murid)		62.04	67	67.08
	- SMK (per 1000 murid)		64.92	67.08	68
1.11	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata				
1.11.1	SMA/SMK/MA	Persen	0.10	0.10	0.11
1.12	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99.94	99.92	99.96
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95.53	93.35	94
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV				
1.14.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persen	93.95	97.92	97.98
2	**Kesehatan**				
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4.83	9,5	9,5
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4.95	6,5	6,5
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4.27	4,4	4,4
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	84.83	65	65
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persen	1.61	1.61	1.61
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk				
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persen	0.027	0.027	0.026
2.6.2	Rasio klinik	Persen	0.05	0.056	0.065
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persen	0.12	0.113	0.111
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persen	0.0021	0.0166	0.0167
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persen	0.93	0.98	1.00
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk				

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persen	2.75	2.67	2.69
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persen	1.27	1.25	1.27
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100.00	88.50	88.50
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100	96.8	96.8
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	Persen	0.67	100	100
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100		
2.14	Case Detection Rate TBC	Persen	0.3	40	44
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persen	0.8232	90	90
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	1	100	100
2.17	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	108	70	50
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100
2.19	Angka kematian Malaria	Persen	0	0	0
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	0.005	<1	<1
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persen	84	85	90
2.22	Cakupan kunjungan bayi	Persen	83.53	97.7	97.7
2.23	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persen	100	100	100
2.24	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	0.12	0.808	0.811
2.25	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	70.89	96	96
2.26	Cakupan Pelayanan nifas	Persen	73.37	98	98
2.27	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	58.88	100	100
2.28	Cakupan pelayanan	Persen	68.84	97.7	97.7

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	anak balita				
2.29	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100
2.30	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	98.54	100	100
2.31	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persen	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
3.1	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	76.84	81.18	83.13
3.2	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persen	49.00	48.63	48.87
3.4	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	74.00	79.27	88.07
3.5	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persen	72.00	75	77
3.6	Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat	Persen	16.51	14.78	19.01
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persen	100	100	100
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Persen	100.00	100	100
3.9	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	Persen	50.31	44	50
3.10.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persen	92.00	93.05	95.51
3.10.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persen	89.79	95.1	97

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Persen	94.0	96	98
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				
4.5	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persen	70.0	100	100
4.6	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persen	45.0	5.94	3.84
5	**Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat**				
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	30.26	31.00	31.02
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	60	36.00	36.02
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	73.20	44.68	44.70
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100%
6	**Sosial**				
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	0,40	0.43	0.862
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	0,98	1.87	1.88
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	0,51	25.9	26.21
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan	Persen	60	18.08	20.21

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial				
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	N/A	5	15
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100
6.7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100
6.8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	11,27	0.92	0.92
Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1	**Tenaga Kerja**				
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 Perusahaan	0,002: 1000 perusahaan	0.009	0.024
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	47.83	100	100
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	73.84	66.23	66.53
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persen	7, 16	20.53	63.08
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	49.40	43.37	44.37
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	5, 13	21.04	64.91
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persen	39.95	20.24	59.78
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	12.34	19.39	20.73

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100.00	100	100
1:10	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	0,075: 10.000 penduduk	0.076	0.076
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	49,65	46.5	48.59
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	16,36	17.45	19.56
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	52,00	48.15	48.45
2.4	Rasio KDRT	Persen	0,442	0.011	0.01
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	69,5	68.25	68.95
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	0	100	100
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	74,14	100	100
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat	Persen	1,72	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	74,14	100	100
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	74,14	100	100
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	74,14	100	100
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	1,00	97.30	97.45
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	0,99	87.18	97.27
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	0,99	74.94	75.02
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	-	26.79	28.70
2.17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	1.00	95,10	95,26
3	**Pangan**				
3.1	Ketersediaan Pangan Utama				
3.1.1	Padi	Ton	814,434	684,887	695,198
3.1.2	Jagung	Ton	61,310	68,400	69,430
3.1.3	Kedelai	Ton	2,945	3,298	3,347
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	5,541	5,446	5,528
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	80,946	194,201	197,125
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	213	214	218
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	19,734	13,875	14,084

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2,672	2,675	2,690
		Gram/Kap/Hari	72.01	57.00	57.00
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	85	95.80	96.00
4	**Pertanahan**				
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persen	99	60	80
5	**Lingkungan Hidup**				
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	1	3
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	89.19	88.59	88.70
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	53.5	63.05	63.15
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	43.36	41.66	41.66
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	88.49	69.90	69.98
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	-	1	3
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah		1	1
5.12	Jumlah limbah B3 yag dikelola		Ada	9	9
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persen	-	100	100
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab	Perusahaan	10 Perusahaan	68	72

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persen	-	0.067	0.201
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persen	-	0.067	0.201
5.18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persen	-	0.067	0.201
5.19	Penetapan hak MHA	Persen	100	100	100
5.20	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	108	30	90
5.21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	48	30	90
5.22	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	17 Adiwiyata	45	150
5.23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	8 Kasus	2	6
5.24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam	Ton/tahun	584,896.25	727,477.025	729,878.916

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	Jakstrada)				
5.25	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persen	0.55	71	70
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
6.1	Rasio penddukan ber-KTP per satuan penduduk	Persen	0.99	1	1
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	96.68	98.96	99.96
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	55.2	67.38	71.38
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada	ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	sudah	sudah	sudah
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99.7	100	100
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	49.7	60	64
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	75.31	88.05	94.35
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persen	12.29	31.84	47.76
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persen	18.93	25.25	29.71
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persen	100	100	100
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persen	78.13	79	80
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	300	330	340
7.7	Pemeliharaan Pasca Program	Persen	98.43	98.43	99.06

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	pemberdayaan masyarakat				
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0.19	-0.02	-0.02
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	1.98	2.1	2.0
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	100	100	100
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	25	50	66
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	1	1
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	6	6	8
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	14	18	26
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1.41	2	2
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	53.38	54	55

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen	15.5	28	27
8.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17.9	9.86	9.5
8.12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	44.35	50	52
8.13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	15.1	23	23
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	60.62	60.62	60.62
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	59.9	62.0	64.0
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	26.03	26.2	26.9
8.17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	40.35	42	44
8.18	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	308	68	70
8.19	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100
8.20	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	49.5	93	95
8.21	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1	1

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
8.22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100
8.23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	14	100	100
8.24	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	N/A	21.7	21.9
9	**Perhubungan**				
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum				
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	2,825,131	1,720,202	2,907,141
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	20,634,800	1,976,817	2,391,948
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	8,224,824	3,814,357	3,852,123
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	387	197	217
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	81,466	110,200	130,120
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis				
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	42	40	40
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	1	1
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	3	3	3
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	29.43	38.58	49.48
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,000237538	0,00023	0,00022
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum				
9.9.1	Angkutan Darat				
	- Orang	Jumlah	2,825,131	1,720,202.00	2,907,141.00
	- Barang	Jumlah	66,656	166,240.00	171,350.00
9.9.2	Angkutan Laut				
	- Orang	Jumlah	20,634,800	1,976,817	2,391,948
	- Barang	Jumlah	11,256,303	100,722,259	145,040,053
9.9.	Angkutan Udara				

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
3					
	- Orang	Jumlah	8,224,824	3,814,357	3,852,123
	- Barang	Jumlah	111,831,240	63,716,394	64,662,677
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun				
9.10.1	Dermaga				
	- Orang	Jumlah	20,634,800	1.976.816,6	2,391,948
	- Barang	Jumlah	11,256,303	100,722,259	145,040,053
9.10.2	Bandara				
	- Orang	Jumlah	8,224,823	3,814,357	3,852,123
	- Barang	Jumlah	111,831,240	63,716,394	64,662,677
9.10.3	Terminal				
	- Orang / Barang	Jumlah	2825131/ 66656	1720202/166240	2907141/171350
10	**Komunikasi dan Informatika**				
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		120	120	120
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	100.00	100	100
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon				
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persen	83.51	96.95	98.90
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persen	2.37	1.89	1.71
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persen	70.59	94.09	97.89
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	27.72	26.14	26.93
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**				
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	78.98	70.45	72.75
11.2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi	Persen	440,609	4.00	12.00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	dari Informal ke Formal				
11.3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	6.440	8.00	24.00
12	**Penanaman Modal**				
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah		5,500	6,500
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)		13.00	13.50
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen		5	6
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persen		17	17,5
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks		88.5	89.5
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**				
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	40	81.5	82.02
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	0.5	0.88	1
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	60	60.25	60.78
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	50	49	55
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persen	15	16	18.7
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	226 orang	215	230
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Cabor	33 cabor	30	35
14	**Statistik**				
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9	9
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1 Buku	1	1
15	**Persandian**				
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100.00	100	100
16	**Kebudayaan**				
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	2	6	6
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar				

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	Budaya yang dilestarikan				
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	483	20	22,869
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	9	5	568
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	23	5	695
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	0	5	5
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	13	533	535
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu				
16.3.1	Situs Cagar Budaya	Jumlah	23	122	122
16.3.2	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	0	4	4
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	0	220	
17	**Perpustakaan**				
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	6	5	16.5
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	105,189	300	1025
17.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	3,968	120	375
17.4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	56,498	300	1025
17.5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	39	27	27
18	**Kearsipan**				
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	28	50	20
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	100	50	100
LAYANAN URUSAN PILIHAN					
1	**Pariwisata**				
1.1	Kunjungan Wisatawan				
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Orang	8,052,974	7,500,000	10,000,000
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Orang	1,778,471	1,500,000	2,500,000

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1.2	Lama Tinggal Wisatawan				
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	1.97	2.65	2.85
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	2.50	3.65	3.85
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persen	25.74	26.33	42.18
2	**Pertanian**				
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persen	14,68	1.59	1.61
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persen	1,65	1.74	1.76
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	0	1,47	2.14	2.17
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persen	N/A	4.96	5.03
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar				
2.5.1	Padi	Ku/Ha	61.29	60.95	61.87
2.5.2	Jagung	Ku/Ha	40.97	43.47	44.08
2.5.3	Kedelai	Ku/Ha	13.96	15.88	16.11
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	9.011	1	1
3	**Kehutanan**				
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persen	4.88	6,61	7,46
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	835.00	31,658.84	31,593.52
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	71.19	70	70
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**				
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	100	100	100
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	100	1.52	1.48
5	**Perdagangan**				
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	95.45	96	96
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar	Persen	17.25	19.41	23.72

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	Rakyat				
6	**Perindustrian**				
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persen	8.36	1	1
7	**Transmigrasi**				
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persen	-	0	0
8	**Kelautan dan Perikanan**				
8.1	Produksi Perikanan	Ton	133,667.74	156,667.96	189,568.24
8.2	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/tahun	44.81	49.29	59.64
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	0	100	100
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persen	78.91	82.24	90.66
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	100,801.60	104,897.51	115,649.51
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persen	80	84%	92%
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persen	100.44	100.22	100.28
PENUNJANG URUSAN					
1	**Perencanaan Pembangunan**				
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100
2	**Keuangan**				
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	-	WTP	WTP
2.2	Persentase SiLPA	Persen	11.27	6	6
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	5.56	6	6
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persen	0	0	0
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	20.38	20	20
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	10.11	10	10
2.7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1,231,251,353,817	1,192,689,709,947	1,129,187,963,042
2.8	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**				
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persen	30	30	30
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	29,11	2.04	2.66
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	39,46	10	10.43
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	38	42	42
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Orang	3,783	3,489	3,076
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	7,137	5,636	4,881
4	**Penelitian dan Pengembangan**				
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100
	Penerapan SIDa:		-		
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	90,90 27/33	80	90
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persen	96,6 30/36	80	90
5	**Pengawasan**				
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen		85	95
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	0,009	85	95
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persen		85	95
6	**Sekretariat Dewan**				
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada

BAB VIII
PENUTUP

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan program pembangunan seperti yang tertuang dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dukungan tersebut sangat penting artinya agar target-target yang direncanakan dapat direalisasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang termuat dalam RKPD tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER